



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 106);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 46);

38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/A);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.117.612.130.232,42
b. Belanja	Rp. 1.194.903.395.527,39
Surplus/(Defisit) sebesar	(Rp. 77.291.265.294,97)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 191.244.870.447,43
2. Pengeluaran	Rp. 0,00
Surplus/(Defisit) sebesar	Rp. 113.953.605.152,46

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.28.795.020.724,42 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pendapatan	
setelah perubahan	Rp. 1.088.817.109.508,00
2. Realisasi	Rp. 1.117.612.130.232,42
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 28.795.020.724,42
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.85.157.386.427,61) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran belanja setelah	
perubahan	Rp. 1.280.060.781.955,00
2. Realisasi	Rp. 1.194.903.395.527,39
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp. 85.157.386.427,61)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.113.952.407.152,03 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Surplus/(defisit) setelah	
Perubahan Anggaran	(Rp. 191.243.672.447,00)
2. Realisasi	(Rp. 77.291.265.294,97)
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 131.952.407.152,03

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.1.198.000,43 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan | | |
| setelah perubahan | Rp. | 191.243.672.447,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | <u>191.244.870.447,43</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. | 1.198.000,43 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------------|-----|-------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | | |
| setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | <u>0,00</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. | 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 1.198.000,43 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan | | |
| netto setelah perubahan | Rp. | 191.243.672.447,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | <u>191.244.870.447,43</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. | 1.198.000,43 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- | | | |
|--|------|---------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. | 191.243.672.447,43 |
| b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan | | |
| Tahun berjalan | (Rp. | 191.243.672.447,43) |
| c. Jumlah Sub Total | Rp. | 0,00 |
| d. Sisa lebih/Kurang Pembiayaan | | |
| Anggaran (SiLPA/SIKPA) | Rp. | 113.953.605.152,46 |
| e. Koreksi Kesalahan Pembukuan | | |
| Tahun Sebelumnya | Rp. | 0,00 |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. | 113.953.605.152,46 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 2.381.738.610.915,86
b. Jumlah Utang	Rp. 22.524.854.759,67
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.806.862.353.839,15

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan Laporan Operasional	Rp. 1.167.775.852.624,59
b. Beban Operasi	Rp. 1.137.849.555.033,26
Surplus/(Defisit) sebesar	Rp. 29.926.297.591,33
c. Surplus (Defisit) dari	
1. Sebelum Luar Biasa	Rp. 29.473.415.603,33
2. Pos Luar Biasa	(Rp. 1.238.717.822,00)
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional sebesar	Rp. 28.234.697.781,33

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp. 119.817.397.122,23
b. Saldo kas awal BLUD Dinas Kesehatan	Rp. 6.254.896.034,24
c. Saldo kas awal BLUD RSUD	Rp. 64.695.549.324,61
d. Saldo kas bendahara Penerimaan	Rp. 10.236.077,00
e. Saldo kas bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00
f. Saldo kas Lainnya	Rp. 465.593.889,35
g. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 140.049.918.705,72

h. Arus kas dari aktivitas investasi	
aset Non Keuangan	(Rp. 217.341.184.000,69)
i. Arus kas dari aktivitas	
pendanaan	Rp. 1.198.000,00
j. Arus kas dari aktivitas	
Transitoris	(Rp. 592.341.110,00)
k. Saldo kas akhir per	
31 Desember 2023	Rp. 114.554.737.972,46

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.798.933.012.648,62
b. Surplus (Defisit) Laporan	
Operasional	Rp. 28.234.697.781,33
c. Dampak Kumulatif Perubahan	
Kebijakan/Kesalahan	
Mendasar	Rp. 0,00
d. Akumulasi Penyusutan	
Sampai dengan Tahun 2022	Rp. 0,00
e. Akumulasi Amortisasi	
Sampai dengan Tahun 2022	Rp. 0,00
f. Lain-lain	(Rp. 20.305.356.590,80)
g. Surplus/(Defisit) Laporan	
Operasional sebesar	Rp. 2.806.862.353.839,15

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang;

- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Wali Kota Madiun menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO
LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 1/A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 122-9/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan pertanggungjawaban keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam APBD, karena itu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan tahap akhir dari siklus anggaran untuk tahun anggaran tertentu yang memuat data realisasi pelaksanaan APBD.

Realisasi pendapatan dan belanja yang tercantum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan cerminan dari hasil yang telah dicapai, sekaligus memberikan gambaran berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD tahun berkenaan.

Salah satu upaya konkret mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah adalah penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan telah selesai dan diserahkannya laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dimana pada tahun ini laporan keuangan Daerah kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sehingga tercatat dari tahun 2017 sampai saat ini Kota Madiun telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan lampiran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 122

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I.1. RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	114.246.270.000,00	99.724.273.973,11	(14.521.996.026,89)	87,29%
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan	-			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	113.379.270.000,00	98.355.162.619,11	(15.024.107.380,89)	86,75%
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	113.379.270.000,00	98.355.162.619,11	(15.024.107.380,89)	86,75%
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	755.000.000,00	1.194.226.354,00	439.226.354,00	158,18%
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	755.000.000,00	1.194.226.354,00	439.226.354,00	158,18%
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	112.000.000,00	174.885.000,00	62.885.000,00	156,15%
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	112.000.000,00	174.885.000,00	62.885.000,00	156,15%
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-			
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	-	-	-
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-			

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.479.938.840,00	5.723.934.478,00	243.995.638,00	104,45%
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	-	-	-	-
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	-	-	-	-
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	-	-	-	-
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	-	-
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	-	-	-
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	155.000.000,00	171.940.000,00	16.940.000,00	110,93%
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	Dinas Lingkungan Hidup	155.000.000,00	171.940.000,00	16.940.000,00	110,93%
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.964.938.840,00	4.255.698.112,00	290.759.272,00	107,33%
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	3.964.938.840,00	4.255.698.112,00	290.759.272,00	107,33%
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	160.000.000,00	202.331.966,00	42.331.966,00	126,46%
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	160.000.000,00	202.331.966,00	42.331.966,00	126,46%
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	-	-	-	-

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	-			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	-	-	-	-
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	-			
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	-	-	-
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	-			
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	-	-	-
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	-			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.200.000.000,00	1.093.964.400,00	(106.035.600,00)	91,16%
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	1.200.000.000,00	1.093.964.400,00	(106.035.600,00)	91,16%
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	-	-	-
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-			
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	-	-	-
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-			
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5.124.941.300,00	7.606.145.647,00	2.481.204.347,00	148,41%
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	28.000.000,00	31.555.000,00	3.555.000,00	112,70%
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.000.000,00	31.555.000,00	3.555.000,00	112,70%
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	-	-	-	-
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	-			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	64.957.000,00	46.693.000,00	(18.264.000,00)	71,88%
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	64.957.000,00	46.693.000,00	(18.264.000,00)	71,88%

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.031.984.300,00	7.527.897.647,00	2.495.913.347,00	149,60%
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan	5.031.984.300,00	7.527.897.647,00	2.495.913.347,00	149,60%
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	-	-	-	-
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	-	-	-	-
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	-	-
3	32	2.18.3.32.0.00.06.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
4	02		SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	960.759.234.368,00	1.000.288.301.310,36	39.529.066.942,36	104,11%
5	01		PERENCANAAN	-	-	-	-
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
5	02		KEUANGAN	960.659.234.368,00	1.000.151.526.310,36	39.492.291.942,36	104,11%
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	856.418.784.368,00	886.008.213.182,69	29.589.428.814,69	103,46%
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	104.240.450.000,00	114.143.313.127,67	9.902.863.127,67	109,50%
5	03		KEPEGAWAIAN	100.000.000,00	136.775.000,00	36.775.000,00	136,78%
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.000.000,00	136.775.000,00	36.775.000,00	136,78%
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
6	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	Inspektorat Daerah	-			
7			UNSUR KEWILAYAHAN	3.206.205.000,00	4.259.867.625,00	1.053.662.625,00	132,86%
7	01		KECAMATAN	3.206.205.000,00	4.259.867.625,00	1.053.662.625,00	132,86%
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Manguharjo	1.015.000.000,00	1.443.472.670,00	428.472.670,00	142,21%
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Kartoharjo	1.070.205.000,00	1.337.932.175,00	267.727.175,00	125,02%
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Taman	1.121.000.000,00	1.478.462.780,00	357.462.780,00	131,89%
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
			BELANJA				
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	799.538.498.249,00	756.184.701.148,32	(43.353.797.100,68)	94,58%
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	305.108.012.078,00	283.017.127.138,51	(22.090.884.939,49)	92,76%
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan	305.108.012.078,00	283.017.127.138,51	(22.090.884.939,49)	92,76%
			Belanja Operasi	246.073.986.271,00	224.994.909.944,01	(21.079.076.326,99)	91,43%
			Belanja Pegawai	172.659.737.000,00	159.677.191.999,00	(12.982.545.001,00)	92,48%
			Belanja Barang dan Jasa	55.607.019.271,00	53.079.016.505,01	(2.528.002.765,99)	95,45%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	6.952.030.000,00	1.756.801.440,00	(5.195.228.560,00)	25,27%
			Belanja Bantuan Sosial	10.855.200.000,00	10.481.900.000,00	(373.300.000,00)	96,56%
			Belanja Modal	59.034.025.807,00	58.022.217.194,50	(1.011.808.612,50)	98,29%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	262.237.846.290,00	252.898.531.901,24	(9.339.314.388,76)	96,44%
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	262.237.846.290,00	252.898.531.901,24	(9.339.314.388,76)	96,44%
			Belanja Operasi	228.709.461.873,00	220.648.288.660,50	(8.061.173.212,50)	96,48%
			Belanja Pegawai	76.401.522.561,00	71.917.086.377,00	(4.484.436.184,00)	94,13%
			Belanja Barang dan Jasa	150.802.539.617,00	147.253.850.218,50	(3.548.689.398,50)	97,65%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	1.505.399.695,00	1.477.352.065,00	(28.047.630,00)	98,14%
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	33.528.384.417,00	32.250.243.240,74	(1.278.141.176,26)	96,19%

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	132.150.748.174,00	127.717.127.540,67	(4.433.620.633,33)	96,65%
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132.150.748.174,00	127.717.127.540,67	(4.433.620.633,33)	96,65%
			Belanja Operasi	40.983.561.184,00	38.370.955.309,67	(2.612.605.874,33)	93,63%
			Belanja Pegawai	7.713.444.030,00	6.741.362.679,00	(972.081.351,00)	87,40%
			Belanja Barang dan Jasa	22.608.591.154,00	21.271.408.630,67	(1.337.182.523,33)	94,09%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	10.661.526.000,00	10.358.184.000,00	(303.342.000,00)	97,15%
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	91.167.186.990,00	89.346.172.231,00	(1.821.014.759,00)	98,00%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.207.303.705,00	40.611.823.081,33	(1.595.480.623,67)	96,22%
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.207.303.705,00	40.611.823.081,33	(1.595.480.623,67)	96,22%
			Belanja Operasi	28.479.839.472,00	27.011.700.989,00	(1.468.138.483,00)	94,84%
			Belanja Pegawai	5.610.968.670,00	4.787.941.364,00	(823.027.306,00)	85,33%
			Belanja Barang dan Jasa	20.768.870.802,00	20.123.759.625,00	(645.111.177,00)	96,89%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	-	100,00%
			Belanja Modal	13.727.464.233,00	13.600.122.092,33	(127.342.140,67)	99,07%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	29.271.228.805,00	25.256.353.227,57	(4.014.875.577,43)	86,28%
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	25.510.228.805,00	21.569.693.069,57	(3.940.535.735,43)	84,55%
			Belanja Operasi	24.691.107.305,00	20.809.991.012,00	(3.881.116.293,00)	84,28%
			Belanja Pegawai	7.862.298.000,00	6.239.014.742,00	(1.623.283.258,00)	79,35%
			Belanja Barang dan Jasa	16.828.809.305,00	14.570.976.270,00	(2.257.833.035,00)	86,58%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	819.121.500,00	759.702.057,57	(59.419.442,43)	92,75%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.761.000.000,00	3.686.660.158,00	(74.339.842,00)	98,02%
			Belanja Operasi	3.731.989.000,00	3.657.649.976,00	(74.339.024,00)	98,01%
			Belanja Pegawai	1.756.695.000,00	1.701.613.226,00	(55.081.774,00)	96,86%
			Belanja Barang dan Jasa	1.925.294.000,00	1.906.036.750,00	(19.257.250,00)	99,00%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00%
			Belanja Modal	29.011.000,00	29.010.182,00	(818,00)	100,00%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	28.563.359.197,00	26.683.738.259,00	(1.879.620.938,00)	93,42%
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.563.359.197,00	26.683.738.259,00	(1.879.620.938,00)	93,42%
			Belanja Operasi	28.282.338.039,00	26.419.838.259,00	(1.862.499.780,00)	93,41%
			Belanja Pegawai	5.943.774.352,00	5.424.675.511,00	(519.098.841,00)	91,27%
			Belanja Barang dan Jasa	9.346.161.987,00	8.391.005.248,00	(955.156.739,00)	89,78%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	12.992.401.700,00	12.604.157.500,00	(388.244.200,00)	97,01%
			Belanja Modal	281.021.158,00	263.900.000,00	(17.121.158,00)	93,91%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	141.850.814.826,00	135.049.404.291,50	(6.801.410.534,50)	95,21%
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	11.278.758.543,00	10.052.122.765,69	(1.226.635.777,31)	89,12%
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	11.278.758.543,00	10.052.122.765,69	(1.226.635.777,31)	89,12%
			Belanja Operasi	11.078.519.615,00	9.859.090.027,69	(1.219.429.587,31)	88,99%
			Belanja Pegawai	5.479.630.413,00	5.067.862.752,00	(411.767.661,00)	92,49%
			Belanja Barang dan Jasa	5.478.080.102,00	4.699.179.375,69	(778.900.726,31)	85,78%

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah			-	
			Belanja Bantuan Sosial	120.809.100,00	92.047.900,00	(28.761.200,00)	76,19%
			Belanja Modal	200.238.928,00	193.032.738,00	(7.206.190,00)	96,40%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.057.950.700,00	1.984.916.528,00	(73.034.172,00)	96,45%
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.057.950.700,00	1.984.916.528,00	(73.034.172,00)	96,45%
			Belanja Operasi	2.057.950.700,00	1.984.916.528,00	(73.034.172,00)	96,45%
			Belanja Pegawai			-	
			Belanja Barang dan Jasa	2.057.950.700,00	1.984.916.528,00	(73.034.172,00)	96,45%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah			-	
			Belanja Bantuan Sosial			-	
			Belanja Modal			-	
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.451.412.500,00	6.471.641.616,00	(979.770.884,00)	86,85%
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.451.412.500,00	6.471.641.616,00	(979.770.884,00)	86,85%
			Belanja Operasi	7.207.544.057,00	6.229.854.616,00	(977.689.441,00)	86,44%
			Belanja Pegawai	5.141.257.000,00	4.189.577.559,00	(951.679.441,00)	81,49%
			Belanja Barang dan Jasa	2.066.287.057,00	2.040.277.057,00	(26.010.000,00)	98,74%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah			-	
			Belanja Bantuan Sosial			-	
			Belanja Modal	243.868.443,00	241.787.000,00	(2.081.443,00)	99,15%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	314.600.000,00	260.951.885,00	(53.648.115,00)	82,95%
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	314.600.000,00	260.951.885,00	(53.648.115,00)	82,95%
			Belanja Operasi	314.600.000,00	260.951.885,00	(53.648.115,00)	82,95%

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
	Belanja Pegawai	-	-	-		
	Belanja Barang dan Jasa	314.600.000,00	260.951.885,00	(53.648.115,00)	82,95%	
	Belanja Bunga			-		
	Belanja Subsidi			-		
	Belanja Hibah	-	-	-		
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-		
	Belanja Modal			-		
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-		
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26.805.066.066,00	25.378.637.614,30	(1.426.428.451,70)	94,68%
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000 Dinas Lingkungan Hidup	26.805.066.066,00	25.378.637.614,30	(1.426.428.451,70)	94,68%
		Belanja Operasi	23.553.014.316,00	22.409.381.777,26	(1.143.632.538,74)	95,14%
		Belanja Pegawai	9.775.953.388,00	9.297.966.573,00	(477.986.815,00)	95,11%
		Belanja Barang dan Jasa	13.777.060.928,00	13.111.415.204,26	(665.645.723,74)	95,17%
		Belanja Bunga			-	
		Belanja Subsidi			-	
		Belanja Hibah			-	
		Belanja Bantuan Sosial			-	
		Belanja Modal	3.252.051.750,00	2.969.255.837,04	(282.795.912,96)	91,30%
		Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.884.144.194,00	6.756.225.074,00	(127.919.120,00)	98,14%
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.884.144.194,00	6.756.225.074,00	(127.919.120,00)	98,14%
		Belanja Operasi	6.593.187.813,00	6.469.224.474,00	(123.963.339,00)	98,12%
		Belanja Pegawai	4.405.303.400,00	4.317.572.955,00	(87.730.445,00)	98,01%
		Belanja Barang dan Jasa	2.187.884.413,00	2.151.651.519,00	(36.232.894,00)	98,34%
		Belanja Bunga			-	
		Belanja Subsidi			-	
		Belanja Hibah			-	
		Belanja Bantuan Sosial			-	
		Belanja Modal	290.956.381,00	287.000.600,00	(3.955.781,00)	98,64%
		Belanja Tidak Terduga	-	-	-	

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.167.292.100,00	4.337.343.723,00	(829.948.377,00)	83,94%
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.167.292.100,00	4.337.343.723,00	(829.948.377,00)	83,94%
			Belanja Operasi	4.181.259.200,00	3.466.345.490,00	(714.913.710,00)	82,90%
			Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00%
			Belanja Barang dan Jasa	4.174.659.200,00	3.459.745.490,00	(714.913.710,00)	82,87%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	986.032.900,00	870.998.233,00	(115.034.667,00)	88,33%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	18.304.063.966,00	17.926.570.593,21	(377.493.372,79)	97,94%
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	18.304.063.966,00	17.926.570.593,21	(377.493.372,79)	97,94%
			Belanja Operasi	16.893.350.288,00	16.534.163.319,21	(359.186.968,79)	97,87%
			Belanja Pegawai	6.413.732.086,00	6.228.595.727,00	(185.136.359,00)	97,11%
			Belanja Barang dan Jasa	10.479.618.202,00	10.305.567.592,21	(174.050.609,79)	98,34%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah			-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	1.410.713.678,00	1.392.407.274,00	(18.306.404,00)	98,70%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31.043.126.258,00	30.485.190.332,00	(557.935.926,00)	98,20%
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.043.126.258,00	30.485.190.332,00	(557.935.926,00)	98,20%
			Belanja Operasi	30.886.626.258,00	30.331.750.332,00	(554.875.926,00)	98,20%
			Belanja Pegawai	5.390.459.137,00	4.931.346.454,00	(459.112.683,00)	91,48%
			Belanja Barang dan Jasa	25.496.167.121,00	25.400.403.878,00	(95.763.243,00)	99,62%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah			-	

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
			Belanja Bantuan Sosial			-	
			Belanja Modal	156.500.000,00	153.440.000,00	(3.060.000,00)	98,04%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	843.889.506,00	809.654.225,00	(34.235.281,00)	95,94%
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	843.889.506,00	809.654.225,00	(34.235.281,00)	95,94%
			Belanja Operasi	843.889.506,00	809.654.225,00	(34.235.281,00)	95,94%
			Belanja Pegawai			-	
			Belanja Barang dan Jasa	843.889.506,00	809.654.225,00	(34.235.281,00)	95,94%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah			-	
			Belanja Bantuan Sosial			-	
			Belanja Modal			-	
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.303.552.247,00	6.981.191.473,00	(322.360.774,00)	95,59%
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.303.552.247,00	6.981.191.473,00	(322.360.774,00)	95,59%
			Belanja Operasi	7.244.852.247,00	6.923.194.573,00	(321.657.674,00)	95,56%
			Belanja Pegawai	4.016.473.000,00	3.818.343.136,00	(198.129.864,00)	95,07%
			Belanja Barang dan Jasa	3.228.379.247,00	3.104.851.437,00	(123.527.810,00)	96,17%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah			-	
			Belanja Bantuan Sosial			-	
			Belanja Modal	58.700.000,00	57.996.900,00	(703.100,00)	98,80%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.968.389.861,00	7.867.451.678,90	(100.938.182,10)	98,73%
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	7.968.389.861,00	7.867.451.678,90	(100.938.182,10)	98,73%
			Belanja Operasi	7.968.389.861,00	7.867.451.678,90	(100.938.182,10)	98,73%
			Belanja Pegawai	19.200.000,00	16.550.000,00	(2.650.000,00)	86,20%
			Belanja Barang dan Jasa	5.745.346.361,00	5.706.419.578,90	(38.926.782,10)	99,32%
			Belanja Bunga			-	

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	2.203.843.500,00	2.144.482.100,00	(59.361.400,00)	97,31%
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	-	-	-	
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	125.000.000,00	123.426.700,00	(1.573.300,00)	98,74%
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	125.000.000,00	123.426.700,00	(1.573.300,00)	98,74%
			Belanja Operasi	125.000.000,00	123.426.700,00	(1.573.300,00)	98,74%
			Belanja Pegawai	-	-	-	
			Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	123.426.700,00	(1.573.300,00)	98,74%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal			-	
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	292.872.000,00	284.892.875,00	(7.979.125,00)	97,28%
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	292.872.000,00	284.892.875,00	(7.979.125,00)	97,28%
			Belanja Operasi	267.872.000,00	260.972.875,00	(6.899.125,00)	97,42%
			Belanja Pegawai			-	
			Belanja Barang dan Jasa	267.872.000,00	260.972.875,00	(6.899.125,00)	97,42%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	25.000.000,00	23.920.000,00	(1.080.000,00)	95,68%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.900.774.689,00	8.703.816.884,00	(196.957.805,00)	97,79%
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	8.900.774.689,00	8.703.816.884,00	(196.957.805,00)	97,79%
			Belanja Operasi	8.882.974.689,00	8.686.516.884,00	(196.457.805,00)	97,79%
			Belanja Pegawai	4.414.932.397,00	4.246.310.370,00	(168.622.027,00)	96,18%

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
			Belanja Barang dan Jasa	4.468.042.292,00	4.440.206.514,00	(27.835.778,00)	99,38%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah			-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	17.800.000,00	17.300.000,00	(500.000,00)	97,19%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.241.451.423,00	5.778.506.417,40	(462.945.005,60)	92,58%
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.241.451.423,00	5.778.506.417,40	(462.945.005,60)	92,58%
			Belanja Operasi	6.163.652.983,00	5.701.637.267,40	(462.015.715,60)	92,50%
			Belanja Pegawai	4.040.291.218,00	3.723.966.456,00	(316.324.762,00)	92,17%
			Belanja Barang dan Jasa	2.123.361.765,00	1.977.670.811,40	(145.690.953,60)	93,14%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	77.798.440,00	76.869.150,00	(929.290,00)	98,81%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	868.470.773,00	846.863.907,00	(21.606.866,00)	97,51%
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	868.470.773,00	846.863.907,00	(21.606.866,00)	97,51%
			Belanja Operasi	868.470.773,00	846.863.907,00	(21.606.866,00)	97,51%
			Belanja Pegawai	-	-	-	
			Belanja Barang dan Jasa	868.470.773,00	846.863.907,00	(21.606.866,00)	97,51%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal				
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26.413.795.584,00	22.977.518.701,00	(3.436.276.883,00)	86,99%
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	404.505.000,00	401.398.026,00	(3.106.974,00)	99,23%

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	404.505.000,00	401.398.026,00	(3.106.974,00)	99,23%
			Belanja Operasi	401.308.200,00	398.456.526,00	(2.851.674,00)	99,29%
			Belanja Pegawai	-	-	-	
			Belanja Barang dan Jasa	401.308.200,00	398.456.526,00	(2.851.674,00)	99,29%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah			-	
			Belanja Bantuan Sosial			-	
			Belanja Modal	3.196.800,00	2.941.500,00	(255.300,00)	92,01%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.856.446.866,00	1.852.993.139,00	(3.453.727,00)	99,81%
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	1.856.446.866,00	1.852.993.139,00	(3.453.727,00)	99,81%
			Belanja Operasi	1.856.446.866,00	1.852.993.139,00	(3.453.727,00)	99,81%
			Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
			Belanja Barang dan Jasa	1.854.046.866,00	1.850.593.139,00	(3.453.727,00)	99,81%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah			-	
			Belanja Bantuan Sosial			-	
			Belanja Modal			-	
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5.334.742.300,00	4.913.122.573,00	(421.619.727,00)	92,10%
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.334.742.300,00	4.913.122.573,00	(421.619.727,00)	92,10%
			Belanja Operasi	4.990.238.800,00	4.573.732.142,00	(416.506.658,00)	91,65%
			Belanja Pegawai	17.700.000,00	15.100.000,00	(2.600.000,00)	85,31%
			Belanja Barang dan Jasa	4.972.538.800,00	4.558.632.142,00	(413.906.658,00)	91,68%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah			-	
			Belanja Bantuan Sosial			-	
			Belanja Modal	344.503.500,00	339.390.431,00	(5.113.069,00)	98,52%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	16.352.788.030,00	15.151.606.033,00	(1.201.181.997,00)	92,65%
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan	16.352.788.030,00	15.151.606.033,00	(1.201.181.997,00)	92,65%
			Belanja Operasi	16.209.620.030,00	15.014.160.333,00	(1.195.459.697,00)	92,62%
			Belanja Pegawai	9.362.352.622,00	8.343.248.151,00	(1.019.104.471,00)	89,11%
			Belanja Barang dan Jasa	6.748.121.408,00	6.571.766.182,00	(176.355.226,00)	97,39%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi	99.146.000,00	99.146.000,00	-	100,00%
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	143.168.000,00	137.445.700,00	(5.722.300,00)	96,00%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.465.313.388,00	658.398.930,00	(1.806.914.458,00)	26,71%
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2.465.313.388,00	658.398.930,00	(1.806.914.458,00)	26,71%
			Belanja Operasi	2.465.313.388,00	658.398.930,00	(1.806.914.458,00)	26,71%
			Belanja Pegawai			-	
			Belanja Barang dan Jasa	2.465.313.388,00	658.398.930,00	(1.806.914.458,00)	26,71%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	-	-	-	
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	-	
3	32	2.18.3.32.0.00.06.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	
			Belanja Operasi	-	-	-	
			Belanja Pegawai	-	-	-	
			Belanja Barang dan Jasa			-	
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
	Belanja Modal				
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	111.983.923.311,00	102.695.559.430,10	(9.288.363.880,90)	91,71%
4	01 SEKRETARIAT DAERAH	65.298.458.757,00	59.866.678.986,10	(5.431.779.770,90)	91,68%
4	01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah	65.298.458.757,00	59.866.678.986,10	(5.431.779.770,90)	91,68%
	Belanja Operasi	63.293.511.502,00	57.928.444.212,10	(5.365.067.289,90)	91,52%
	Belanja Pegawai	18.980.546.377,00	16.086.618.431,00	(2.893.927.946,00)	84,75%
	Belanja Barang dan Jasa	33.811.300.125,00	31.746.560.781,10	(2.064.739.343,90)	93,89%
	Belanja Bunga	-	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	-	
	Belanja Hibah	3.726.465.000,00	3.526.465.000,00	(200.000.000,00)	94,63%
	Belanja Bantuan Sosial	6.775.200.000,00	6.568.800.000,00	(206.400.000,00)	96,95%
	Belanja Modal	2.004.947.255,00	1.938.234.774,00	(66.712.481,00)	96,67%
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
4	02 SEKRETARIAT DPRD	46.685.464.554,00	42.828.880.444,00	(3.856.584.110,00)	91,74%
4	02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD	46.685.464.554,00	42.828.880.444,00	(3.856.584.110,00)	91,74%
	Belanja Operasi	46.500.031.554,00	42.677.953.444,00	(3.822.078.110,00)	91,78%
	Belanja Pegawai	18.225.445.841,00	17.377.019.689,00	(848.426.152,00)	95,34%
	Belanja Barang dan Jasa	28.274.585.713,00	25.300.933.755,00	(2.973.651.958,00)	89,48%
	Belanja Bunga			-	
	Belanja Subsidi			-	
	Belanja Hibah	-	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
	Belanja Modal	185.433.000,00	150.927.000,00	(34.506.000,00)	81,39%
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	94.004.954.728,00	75.957.312.865,32	(18.047.641.862,68)	80,80%
5	01 PERENCANAAN	10.511.882.063,00	9.444.078.304,00	(1.067.803.759,00)	89,84%
5	01 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.511.882.063,00	9.444.078.304,00	(1.067.803.759,00)	89,84%
	Belanja Operasi	10.466.804.763,00	9.400.153.304,00	(1.066.651.459,00)	89,81%
	Belanja Pegawai	5.423.607.476,00	4.689.119.022,00	(734.488.454,00)	86,46%
	Belanja Barang dan Jasa	5.043.197.287,00	4.711.034.282,00	(332.163.005,00)	93,41%
	Belanja Bunga			-	

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	45.077.300,00	43.925.000,00	(1.152.300,00)	97,44%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
5	02		KEUANGAN	70.335.985.514,00	54.036.789.429,32	(16.299.196.084,68)	76,83%
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	59.618.421.030,00	43.901.422.835,00	(15.716.998.195,00)	73,64%
			Belanja Operasi	54.745.460.388,00	41.820.635.013,00	(12.924.825.375,00)	76,39%
			Belanja Pegawai	29.584.637.209,00	18.764.087.938,00	(10.820.549.271,00)	63,43%
			Belanja Barang dan Jasa	25.160.823.179,00	23.056.547.075,00	(2.104.276.104,00)	91,64%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	855.100.000,00	842.070.000,00	(13.030.000,00)	98,48%
			Belanja Tidak Terduga	4.017.860.642,00	1.238.717.822,00	(2.779.142.820,00)	30,83%
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	10.717.564.484,00	10.135.366.594,32	(582.197.889,68)	94,57%
			Belanja Operasi	10.421.207.954,00	9.851.580.344,32	(569.627.609,68)	94,53%
			Belanja Pegawai	8.095.808.900,00	7.725.180.552,39	(370.628.347,61)	95,42%
			Belanja Barang dan Jasa	2.325.399.054,00	2.126.399.791,93	(198.999.262,07)	91,44%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	296.356.530,00	283.786.250,00	(12.570.280,00)	95,76%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
5	03		KEPEGAWAIAN	9.353.710.709,00	8.871.466.062,00	(482.244.647,00)	94,84%
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.353.710.709,00	8.871.466.062,00	(482.244.647,00)	94,84%
			Belanja Operasi	9.111.492.564,00	8.669.576.062,00	(441.916.502,00)	95,15%
			Belanja Pegawai	5.903.398.559,00	5.690.093.810,00	(213.304.749,00)	96,39%
			Belanja Barang dan Jasa	3.208.094.005,00	2.979.482.252,00	(228.611.753,00)	92,87%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	242.218.145,00	201.890.000,00	(40.328.145,00)	83,35%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.459.306.900,00	2.362.534.451,00	(96.772.449,00)	96,07%
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.459.306.900,00	2.362.534.451,00	(96.772.449,00)	96,07%
			Belanja Operasi	2.459.306.900,00	2.362.534.451,00	(96.772.449,00)	96,07%
			Belanja Pegawai			-	
			Belanja Barang dan Jasa	2.459.306.900,00	2.362.534.451,00	(96.772.449,00)	96,07%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	-	-	-	
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.344.069.542,00	1.242.444.619,00	(101.624.923,00)	92,44%
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.344.069.542,00	1.242.444.619,00	(101.624.923,00)	92,44%
			Belanja Operasi	1.344.069.542,00	1.242.444.619,00	(101.624.923,00)	92,44%
			Belanja Pegawai	5.450.000,00	4.650.000,00	(800.000,00)	85,32%
			Belanja Barang dan Jasa	1.338.619.542,00	1.237.794.619,00	(100.824.923,00)	92,47%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal			-	
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.095.494.616,00	9.834.451.015,51	(261.043.600,49)	97,41%
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	10.095.494.616,00	9.834.451.015,51	(261.043.600,49)	97,41%
6	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	Inspektorat Daerah	10.095.494.616,00	9.834.451.015,51	(261.043.600,49)	97,41%
			Belanja Operasi	9.597.744.616,00	9.372.844.393,00	(224.900.223,00)	97,66%
			Belanja Pegawai	7.376.098.986,00	7.166.570.507,00	(209.528.479,00)	97,16%
			Belanja Barang dan Jasa	2.221.645.630,00	2.206.273.886,00	(15.371.744,00)	99,31%
			Belanja Bunga			-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
	Belanja Subsidi			-	
	Belanja Hibah	-	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
	Belanja Modal	497.750.000,00	461.606.622,51	(36.143.377,49)	92,74%
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
7	UNSUR KEWILAYAHAN	76.041.970.210,00	72.632.081.471,64	(3.409.888.738,36)	95,52%
7	01 KECAMATAN	76.041.970.210,00	72.632.081.471,64	(3.409.888.738,36)	95,52%
7	01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Manguharjo	24.791.151.272,00	23.785.496.498,64	(1.005.654.773,36)	95,94%
	Belanja Operasi	21.367.644.112,00	20.407.250.403,64	(960.393.708,36)	95,51%
	Belanja Pegawai	11.873.549.082,00	11.070.556.260,00	(802.992.822,00)	93,24%
	Belanja Barang dan Jasa	9.494.095.030,00	9.336.694.143,64	(157.400.886,36)	98,34%
	Belanja Bunga			-	
	Belanja Subsidi			-	
	Belanja Hibah	-	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
	Belanja Modal	3.423.507.160,00	3.378.246.095,00	(45.261.065,00)	98,68%
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
7	01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kartoharjo	24.887.599.670,00	23.913.084.334,00	(974.515.336,00)	96,08%
	Belanja Operasi	20.283.698.763,00	19.356.323.585,00	(927.375.178,00)	95,43%
	Belanja Pegawai	11.469.217.545,00	10.742.772.955,00	(726.444.590,00)	93,67%
	Belanja Barang dan Jasa	8.814.481.218,00	8.613.550.630,00	(200.930.588,00)	97,72%
	Belanja Bunga			-	
	Belanja Subsidi			-	
	Belanja Hibah	-	-	-	
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
	Belanja Modal	4.603.900.907,00	4.556.760.749,00	(47.140.158,00)	98,98%
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
7	01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Taman	26.363.219.268,00	24.933.500.639,00	(1.429.718.629,00)	94,58%
	Belanja Operasi	21.510.550.988,00	20.103.668.128,00	(1.406.882.860,00)	93,46%
	Belanja Pegawai	11.508.809.855,00	10.266.975.319,00	(1.241.834.536,00)	89,21%
	Belanja Barang dan Jasa	10.001.741.133,00	9.836.692.809,00	(165.048.324,00)	98,35%
	Belanja Bunga			-	
	Belanja Subsidi			-	

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
			Belanja Hibah	-	-	-	
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	4.852.668.280,00	4.829.832.511,00	(22.835.769,00)	99,53%
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	20.131.330.431,00	19.571.366.604,00	(559.963.827,00)	97,22%
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20.131.330.431,00	19.571.366.604,00	(559.963.827,00)	97,22%
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.131.330.431,00	19.571.366.604,00	(559.963.827,00)	97,22%
			Belanja Operasi	20.062.757.728,00	19.503.495.304,00	(559.262.424,00)	97,21%
			Belanja Pegawai	4.054.921.149,00	3.618.182.330,00	(436.738.819,00)	89,23%
			Belanja Barang dan Jasa	2.987.273.079,00	2.884.749.474,00	(102.523.605,00)	96,57%
			Belanja Bunga			-	
			Belanja Subsidi			-	
			Belanja Hibah	13.020.563.500,00	13.000.563.500,00	(20.000.000,00)	99,85%
			Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
			Belanja Modal	68.572.703,00	67.871.300,00	(701.403,00)	
			Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
			TOTAL	1.280.060.781.955,00	1.194.902.395.527,39	(85.158.386.427,61)	93,35%

I.2. RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.088.817.109.508,00	1.117.612.130.232,42	28.795.020.724,42	102,64%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	261.815.342.908,00	255.554.493.407,62	(6.260.849.500,38)	97,61%
4.1.01	Pajak Daerah	104.240.450.000,00	113.514.116.369,67	9.273.666.369,67	108,90%
4.1.02	Retribusi Daerah	18.446.515.665,00	22.551.072.553,00	4.104.556.888,00	122,25%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.160.694.027,00	14.983.008.032,73	(1.177.685.994,27)	92,71%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	122.967.683.216,00	104.506.296.452,22	(18.461.386.763,78)	84,99%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	827.001.766.600,00	862.057.636.824,80	35.055.870.224,80	104,24%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	730.719.376.000,00	740.785.552.012,80	10.066.176.012,80	101,38%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.282.390.600,00	121.272.084.812,00	24.989.694.212,00	125,95%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
5	BELANJA DAERAH	1.280.060.781.955,00	1.194.903.395.527,39	(85.157.386.427,61)	93,35%
5.1	BELANJA OPERASI	1.053.170.646.108,00	975.874.375.042,70	(77.296.271.065,30)	92,66%
5.1.01	Belanja Pegawai	468.936.215.253,00	423.896.152.844,39	(45.040.062.408,61)	90,40%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.171.846.360,00	487.718.322.693,31	(25.453.523.666,69)	95,04%

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	
5.1.04	Belanja Subsidi	99.146.000,00	99.146.000,00	-	100,00%
5.1.05	Belanja Hibah	38.190.636.795,00	32.355.896.005,00	(5.834.740.790,00)	84,72%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.772.801.700,00	31.804.857.500,00	(967.944.200,00)	97,05%
5.2	BELANJA MODAL	222.872.275.205,00	217.790.302.662,69	(5.081.972.542,31)	97,72%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.145.003.249,00	71.585.868.051,04	(1.559.135.197,96)	97,87%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.254.511.750,00	80.940.539.683,65	(2.313.972.066,35)	97,22%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.036.113.165,00	62.832.477.443,00	(1.203.635.722,00)	98,12%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.436.647.041,00	2.431.417.485,00	(5.229.556,00)	99,79%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.017.860.642,00	1.238.717.822,00	(2.779.142.820,00)	30,83%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.017.860.642,00	1.238.717.822,00	(2.779.142.820,00)	30,83%
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	
	SURPLUS / DEFISIT	(191.243.672.447,00)	(77.291.265.294,97)	113.952.407.152,03	40,42%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	191.243.672.447,00	191.244.870.447,43	0,43	100,00%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	191.243.672.447,00	191.243.672.447,43	0,43	100,00%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	1.198.000,00	1.198.000,00	100,00%
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
	Pembiayaan Netto	191.243.672.447,00	191.244.870.447,43	0,43	100,00%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		113.953.605.152,46		

I.3 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
0	00	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	305.108.012.078,00	283.017.127.138,51	(22.090.884.939,49)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	114.007.283.435,00	104.946.970.140,50	(9.060.313.294,50)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	76.339.372.335,00	74.139.630.987,28	(2.199.741.347,72)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.112.207.499,00	1.116.432.060,28	(995.775.438,72)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	52.007.700,00	14.700.000,00	(37.307.700,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	52.007.700,00	14.700.000,00	(37.307.700,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2	BELANJA MODAL	2.060.199.799,00	1.101.732.060,28	(958.467.738,72)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2	03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.060.199.799,00	1.101.732.060,28	(958.467.738,72)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	49.877.655.400,00	49.639.883.948,00	(237.771.452,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	1	BELANJA OPERASI	1.019.505.400,00	827.202.848,00	(192.302.552,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	1.019.505.400,00	827.202.848,00	(192.302.552,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	2	BELANJA MODAL	48.858.150.000,00	48.812.681.100,00	(45.468.900,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.858.150.000,00	48.812.681.100,00	(45.468.900,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12.472.027.400,00	11.780.464.707,00	(691.562.693,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1	BELANJA OPERASI	11.877.765.202,00	11.210.291.507,00	(667.473.695,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	11.877.765.202,00	11.210.291.507,00	(667.473.695,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	2			BELANJA MODAL	594.262.198,00	570.173.200,00	(24.088.998,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	581.843.198,00	557.755.200,00	(24.087.998,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.419.000,00	12.418.000,00	(1.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	25					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	550.112.336,00	410.538.500,00	(139.573.836,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	25	5	1			BELANJA OPERASI	550.112.336,00	410.538.500,00	(139.573.836,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	25	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	550.112.336,00	410.538.500,00	(139.573.836,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	646.979.700,00	550.967.950,00	(96.011.750,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1			BELANJA OPERASI	646.979.700,00	550.967.950,00	(96.011.750,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	646.979.700,00	550.967.950,00	(96.011.750,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	10.680.390.000,00	10.641.343.822,00	(39.046.178,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1			BELANJA OPERASI	8.702.295.455,00	8.615.391.669,00	(86.903.786,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	01		Belanja Pegawai	748.400.000,00	-	(748.400.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.953.895.455,00	8.615.391.669,00	661.496.214,00	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2			BELANJA MODAL	1.978.094.545,00	2.025.952.153,00	47.857.608,00	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	727.651.144,00	740.296.282,00	12.645.138,00	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	29	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.250.443.401,00	1.285.655.871,00	35.212.470,00	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27.331.491.062,00	25.979.014.835,23	(1.352.476.226,77)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	3.288.125.572,00	3.168.195.421,23	(119.930.150,77)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	5	1			BELANJA OPERASI	28.173.300,00	8.150.000,00	(20.023.300,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	28.173.300,00	8.150.000,00	(20.023.300,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	5	2			BELANJA MODAL	3.259.952.272,00	3.160.045.421,23	(99.906.850,77)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.259.952.272,00	3.160.045.421,23	(99.906.850,77)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	27					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.975.043.026,00	3.679.046.100,00	(295.996.926,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	27	5	1			BELANJA OPERASI	3.477.374.526,00	3.188.546.100,00	(288.828.426,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	27	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.477.374.526,00	3.188.546.100,00	(288.828.426,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	27	5	2			BELANJA MODAL	497.668.500,00	490.500.000,00	(7.168.500,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	27	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	497.668.500,00	490.500.000,00	(7.168.500,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	8.647.441.500,00	8.193.920.051,00	(453.521.449,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1			BELANJA OPERASI	8.024.619.450,00	7.582.760.751,00	(441.858.699,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	01		Belanja Pegawai	2.100.000,00	1.950.000,00	(150.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.022.519.450,00	7.580.810.751,00	(441.708.699,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	2			BELANJA MODAL	622.822.050,00	611.159.300,00	(11.662.750,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	503.822.050,00	493.484.836,00	(10.337.214,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	119.000.000,00	117.674.464,00	(1.325.536,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	212.633.000,00	100.256.000,00	(112.377.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1			BELANJA OPERASI	212.633.000,00	100.256.000,00	(112.377.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	212.633.000,00	100.256.000,00	(112.377.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	494.740.000,00	435.490.200,00	(59.249.800,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	1			BELANJA OPERASI	494.740.000,00	435.490.200,00	(59.249.800,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	494.740.000,00	435.490.200,00	(59.249.800,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	41					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	559.017.964,00	186.744.000,00	(372.273.964,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1			BELANJA OPERASI	559.017.964,00	186.744.000,00	(372.273.964,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	41	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	559.017.964,00	186.744.000,00	(372.273.964,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.154.490.000,00	10.215.363.063,00	60.873.063,00	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1			BELANJA OPERASI	9.172.188.850,00	9.141.054.667,00	(31.134.183,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	01		Belanja Pegawai	616.000.000,00	-	(616.000.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.556.188.850,00	9.141.054.667,00	584.865.817,00	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	2			BELANJA MODAL	982.301.150,00	1.074.308.396,00	92.007.246,00	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	313.104.950,00	308.573.396,00	(4.531.554,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	669.196.200,00	765.735.000,00	96.538.800,00	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.344.990.038,00	4.642.261.258,99	(4.702.728.779,01)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	310.294.038,00	293.973.583,99	(16.320.454,01)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	5	1			BELANJA OPERASI	226.794.038,00	211.425.020,00	(15.369.018,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	226.794.038,00	211.425.020,00	(15.369.018,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	5	2			BELANJA MODAL	83.500.000,00	82.548.563,99	(951.436,01)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.500.000,00	82.548.563,99	(951.436,01)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	16					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3.600.000.000,00	3.392.700.000,00	(207.300.000,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1			BELANJA OPERASI	3.600.000.000,00	3.392.700.000,00	(207.300.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	16	5	1	06		Belanja Bantuan Sosial	3.600.000.000,00	3.392.700.000,00	(207.300.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.011.796.000,00	856.587.675,00	(155.208.325,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1			BELANJA OPERASI	1.011.796.000,00	856.587.675,00	(155.208.325,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	17	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.011.796.000,00	856.587.675,00	(155.208.325,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	18					Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.422.900.000,00	99.000.000,00	(4.323.900.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1			BELANJA OPERASI	4.422.900.000,00	99.000.000,00	(4.323.900.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	18	5	1	05		Belanja Hibah	4.422.900.000,00	99.000.000,00	(4.323.900.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	00					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	991.430.000,00	186.063.059,00	(805.366.941,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	12					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	178.000.000,00	125.715.300,00	(52.284.700,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1			BELANJA OPERASI	178.000.000,00	125.715.300,00	(52.284.700,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	178.000.000,00	125.715.300,00	(52.284.700,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	16					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	85.000.000,00	60.347.759,00	(24.652.241,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1			BELANJA OPERASI	85.000.000,00	60.347.759,00	(24.652.241,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	16	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	60.347.759,00	(24.652.241,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	17					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	728.430.000,00	-	(728.430.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1			BELANJA OPERASI	728.430.000,00	-	(728.430.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	17	5	1	05		Belanja Hibah	728.430.000,00		(728.430.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	4.807.339.116,00	4.282.839.413,20	(524.499.702,80)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	3.550.447.213,00	3.196.020.898,20	(354.426.314,80)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01					Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.550.038.223,00	1.361.961.290,00	(188.076.933,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.550.038.223,00	1.361.961.290,00	(188.076.933,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.020.038.223,00	832.799.850,00	(187.238.373,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	05		Belanja Hibah	530.000.000,00	529.161.440,00	(838.560,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02					Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.112.630.191,00	1.011.510.423,00	(101.119.768,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.112.630.191,00	1.011.510.423,00	(101.119.768,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.112.630.191,00	1.011.510.423,00	(101.119.768,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04					Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	887.778.799,00	822.549.185,20	(65.229.613,80)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	887.778.799,00	822.549.185,20	(65.229.613,80)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	887.778.799,00	822.549.185,20	(65.229.613,80)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.256.891.903,00	1.086.818.515,00	(170.073.388,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02					Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.256.891.903,00	1.086.818.515,00	(170.073.388,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.256.891.903,00	1.086.818.515,00	(170.073.388,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.256.891.903,00	1.086.818.515,00	(170.073.388,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.609.200.000,00	1.591.415.200,00	(17.784.800,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.609.200.000,00	1.591.415.200,00	(17.784.800,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	750.000.000,00	740.385.300,00	(9.614.700,00)		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	750.000.000,00	740.385.300,00	(9.614.700,00)		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	5.800.000,00	4.250.000,00	(1.550.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	744.200.000,00	736.135.300,00	(8.064.700,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	859.200.000,00	851.029.900,00	(8.170.100,00)		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	859.200.000,00	851.029.900,00	(8.170.100,00)		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	658.300.000,00	650.129.900,00	(8.170.100,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	199.200.000,00	199.200.000,00	-	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	184.684.189.527,00	172.195.902.384,81	(12.488.287.142,19)		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.323.636.600,00	8.147.534.040,00	(176.102.560,00)		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.323.636.600,00	8.147.534.040,00	(176.102.560,00)		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	8.323.636.600,00	8.147.534.040,00	(176.102.560,00)		
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	01	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	-	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	286.936.600,00	276.894.040,00	(10.042.560,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	05	Belanja Hibah	953.700.000,00	953.640.000,00	(60.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	7.056.000.000,00	6.890.000.000,00	(166.000.000,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	171.254.487.000,00	159.638.891.999,00	(11.615.595.001,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	171.254.487.000,00	159.638.891.999,00	(11.615.595.001,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	171.254.487.000,00	159.638.891.999,00	(11.615.595.001,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	171.254.487.000,00	159.638.891.999,00	(11.615.595.001,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00					Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.115.934.834,00	3.540.257.844,00	(575.676.990,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.696.172.000,00	3.231.268.331,00	(464.903.669,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	3.696.172.000,00	3.231.268.331,00	(464.903.669,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	01		Belanja Pegawai	2.050.000,00	1.200.000,00	(850.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.377.122.000,00	3.055.068.331,00	(322.053.669,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	05		Belanja Hibah	317.000.000,00	175.000.000,00	(142.000.000,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.762.834,00	308.989.513,00	(110.773.321,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	419.762.834,00	308.989.513,00	(110.773.321,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	419.762.834,00	308.989.513,00	(110.773.321,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.475.293,00	94.517.000,00	(3.958.293,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.475.293,00	94.517.000,00	(3.958.293,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1			BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	-	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	01		Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	-	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	-	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2			BELANJA MODAL	97.075.293,00	93.117.000,00	(3.958.293,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.075.293,00	93.117.000,00	(3.958.293,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	891.655.800,00	774.701.501,81	(116.954.298,19)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196.923.000,00	156.184.197,00	(40.738.803,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	196.923.000,00	156.184.197,00	(40.738.803,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	196.923.000,00	156.184.197,00	(40.738.803,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	489.065.000,00	430.060.304,81	(59.004.695,19)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	489.065.000,00	430.060.304,81	(59.004.695,19)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	01 Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	-	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	487.715.000,00	428.710.304,81	(59.004.695,19)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.667.800,00	188.457.000,00	(17.210.800,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	205.667.800,00	188.457.000,00	(17.210.800,00)	
1	01	1.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	205.667.800,00	188.457.000,00	(17.210.800,00)	
Jumlah Belanja									305.108.012.078,00	283.017.127.138,51	(22.090.884.939,49)	
Total Surplus/(Defisit)									(305.108.012.078,00)	(283.017.127.138,51)	22.090.884.939,49	
0	00	1.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	113.379.270.000,00	98.350.186.897,11	(15.029.083.102,89)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	113.379.270.000,00	98.350.186.897,11	(15.029.083.102,89)	
Jumlah Pendapatan									113.379.270.000,00	98.350.186.897,11	(15.029.083.102,89)	
0	00	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	262.237.846.290,00	252.898.531.901,24	(9.339.314.388,76)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	0.00	00			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100.956.564.930,00	96.697.529.640,24	(4.259.035.289,76)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	00			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	42.049.811.306,00	40.458.676.428,74	(1.591.134.877,26)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	08			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	546.652.000,00	537.537.000,00	(9.115.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	7.650.000,00	7.650.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	08	5	1 01	Belanja Pegawai	7.650.000,00	7.650.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	08	5	2	BELANJA MODAL	539.002.000,00	529.887.000,00	(9.115.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	08	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	539.002.000,00	529.887.000,00	(9.115.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	09			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	246.629.080,00	238.461.800,00	(8.167.280,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	14.241.000,00	7.961.800,00	(6.279.200,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	09	5	1 01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.041.000,00	6.761.800,00	(6.279.200,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	09	5	2	BELANJA MODAL	232.388.080,00	230.500.000,00	(1.888.080,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.388.080,00	230.500.000,00	(1.888.080,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	12			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22.862.791.500,00	22.862.791.475,74	(24,26)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	12	5	1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	12	5	1 01	Belanja Pegawai	5.500.000,00	5.500.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	12	5	2	BELANJA MODAL	22.857.291.500,00	22.857.291.475,74	(24,26)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	12	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.857.291.500,00	22.857.291.475,74	(24,26)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	13			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.511.199.984,00	2.076.815.550,00	(434.384.434,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	13	5	1	BELANJA OPERASI	11.650.000,00	8.850.000,00	(2.800.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	13	5	1 01	Belanja Pegawai	11.650.000,00	8.850.000,00	(2.800.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	13	5	2	BELANJA MODAL	2.499.549.984,00	2.067.965.550,00	(431.584.434,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	13	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.924.720.134,00	1.589.043.050,00	(335.677.084,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	13	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	574.829.850,00	478.922.500,00	(95.907.350,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	14			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.175.773.985,00	5.380.494.439,00	(795.279.546,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	14	5	1	BELANJA OPERASI	611.284.032,00	583.526.250,00	(27.757.782,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	14	5	1 01	Belanja Pegawai	15.900.000,00	14.950.000,00	(950.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	14	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	595.384.032,00	568.576.250,00	(26.807.782,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	14	5	2	BELANJA MODAL	5.564.489.953,00	4.796.968.189,00	(767.521.764,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	14	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.564.489.953,00	4.796.968.189,00	(767.521.764,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	15			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	158.439.200,00	130.140.200,00	(28.299.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	15	5	1	BELANJA OPERASI	158.439.200,00	130.140.200,00	(28.299.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	15	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	158.439.200,00	130.140.200,00	(28.299.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	16			Pengadaan Obat, Vaksin	8.617.155.554,00	8.569.620.186,00	(47.535.368,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	16	5	1	BELANJA OPERASI	8.617.155.554,00	8.569.620.186,00	(47.535.368,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	16	5	1 01	Belanja Pegawai	27.700.000,00	27.700.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	16	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.589.455.554,00	8.541.920.186,00	(47.535.368,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	17			Pengadaan Bahan Habis Pakai	651.790.003,00	546.421.698,00	(105.368.305,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	17	5	1	BELANJA OPERASI	651.790.003,00	546.421.698,00	(105.368.305,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	651.790.003,00	546.421.698,00	(105.368.305,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	20			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	279.380.000,00	116.394.080,00	(162.985.920,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	20	5	1	BELANJA OPERASI	279.380.000,00	116.394.080,00	(162.985.920,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	20	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	279.380.000,00	116.394.080,00	(162.985.920,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	00			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.906.753.624,00	56.238.853.211,50	(2.667.900.412,50)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.047.548.600,00	1.041.728.000,00	(5.820.600,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.047.548.600,00	1.041.728.000,00	(5.820.600,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.045.848.600,00	1.040.028.000,00	(5.820.600,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	02			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	49.007.200,00	46.907.200,00	(2.100.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	49.007.200,00	46.907.200,00	(2.100.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.007.200,00	46.907.200,00	(2.100.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	84.232.800,00	71.378.800,00	(12.854.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	84.232.800,00	71.378.800,00	(12.854.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.232.800,00	71.378.800,00	(12.854.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	04			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	268.321.000,00	261.289.910,00	(7.031.090,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	268.321.000,00	261.289.910,00	(7.031.090,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	04	5	1 01	Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	267.471.000,00	260.439.910,00	(7.031.090,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	129.673.500,00	121.208.892,00	(8.464.608,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	129.673.500,00	121.208.892,00	(8.464.608,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	05	5	1 01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	128.923.500,00	120.458.892,00	(8.464.608,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	71.855.200,00	66.915.200,00	(4.940.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	71.855.200,00	66.915.200,00	(4.940.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.855.200,00	66.915.200,00	(4.940.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	77.139.600,00	67.433.600,00	(9.706.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	77.139.600,00	67.433.600,00	(9.706.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.139.600,00	67.433.600,00	(9.706.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	08			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.548.000,00	12.148.000,00	(1.400.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	13.548.000,00	12.148.000,00	(1.400.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.548.000,00	12.148.000,00	(1.400.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	09			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	202.012.000,00	192.333.200,00	(9.678.800,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	09	5	1	BELANJA OPERASI	202.012.000,00	192.333.200,00	(9.678.800,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	202.012.000,00	192.333.200,00	(9.678.800,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	72.735.000,00	70.699.200,00	(2.035.800,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	72.735.000,00	70.699.200,00	(2.035.800,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.735.000,00	70.699.200,00	(2.035.800,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	64.090.000,00	60.092.000,00	(3.998.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	11	5	1	BELANJA OPERASI	64.090.000,00	60.092.000,00	(3.998.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	64.090.000,00	60.092.000,00	(3.998.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	12			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	215.904.400,00	207.819.380,00	(8.085.020,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	12	5	1	BELANJA OPERASI	215.904.400,00	207.819.380,00	(8.085.020,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	12	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	215.904.400,00	207.819.380,00	(8.085.020,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	13	5	1	BELANJA OPERASI	-	-	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	15			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.875.216.200,00	5.712.256.249,50	(162.959.950,50)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	15	5	1	BELANJA OPERASI	5.875.216.200,00	5.712.256.249,50	(162.959.950,50)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	15	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.875.216.200,00	5.712.256.249,50	(162.959.950,50)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	16			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	330.502.400,00	314.727.500,00	(15.774.900,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	16	5	1	BELANJA OPERASI	330.502.400,00	314.727.500,00	(15.774.900,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	16	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	330.502.400,00	314.727.500,00	(15.774.900,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	17			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	192.449.800,00	162.727.400,00	(29.722.400,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	17	5	1	BELANJA OPERASI	192.449.800,00	162.727.400,00	(29.722.400,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	192.449.800,00	162.727.400,00	(29.722.400,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	18			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	611.388.200,00	605.610.000,00	(5.778.200,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	18	5	1	BELANJA OPERASI	611.388.200,00	605.610.000,00	(5.778.200,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	18	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	611.388.200,00	605.610.000,00	(5.778.200,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	20			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	153.970.400,00	123.220.400,00	(30.750.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	20	5	1	BELANJA OPERASI	153.970.400,00	123.220.400,00	(30.750.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	20	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	153.970.400,00	123.220.400,00	(30.750.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	21			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	36.348.000,00	34.730.200,00	(1.617.800,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1	BELANJA OPERASI	36.348.000,00	34.730.200,00	(1.617.800,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	21	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.348.000,00	34.730.200,00	(1.617.800,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	22			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	58.794.000,00	56.363.200,00	(2.430.800,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	22	5	1	BELANJA OPERASI	58.794.000,00	56.363.200,00	(2.430.800,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	22	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.794.000,00	56.363.200,00	(2.430.800,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	25			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	717.799.850,00	609.789.400,00	(108.010.450,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	25	5	1	BELANJA OPERASI	717.799.850,00	609.789.400,00	(108.010.450,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	25	5	1 01	Belanja Pegawai	3.850.000,00	3.750.000,00	(100.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	25	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	713.949.850,00	606.039.400,00	(107.910.450,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	26			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	33.448.581.200,00	31.981.761.480,00	(1.466.819.720,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	26	5	1	BELANJA OPERASI	33.448.581.200,00	31.981.761.480,00	(1.466.819.720,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	26	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.448.581.200,00	31.981.761.480,00	(1.466.819.720,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	28			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.329.600,00	1.590.700,00	(738.900,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	28	5	1	BELANJA OPERASI	2.329.600,00	1.590.700,00	(738.900,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	28	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.329.600,00	1.590.700,00	(738.900,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	29			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	324.109.600,00	199.567.500,00	(124.542.100,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	29	5	1	BELANJA OPERASI	324.109.600,00	199.567.500,00	(124.542.100,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	29	5	1 01	Belanja Pegawai	350.000,00	-	(350.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	29	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	323.759.600,00	199.567.500,00	(124.192.100,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	33			Operasional Pelayanan Puskesmas	11.794.986.600,00	11.222.732.356,00	(572.254.244,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	33	5	1	BELANJA OPERASI	11.123.845.300,00	10.558.366.330,00	(565.478.970,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	33	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.123.845.300,00	10.558.366.330,00	(565.478.970,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	33	5	2	BELANJA MODAL	671.141.300,00	664.366.026,00	(6.775.274,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	33	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	671.141.300,00	664.366.026,00	(6.775.274,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	33	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	34				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.152.376.574,00	2.121.744.844,00	(30.631.730,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	34	5	1		BELANJA OPERASI	1.653.254.974,00	1.622.644.844,00	(30.610.130,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	34	5	1	01	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	34	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	145.305.279,00	142.742.779,00	(2.562.500,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	34	5	1	05	Belanja Hibah	1.505.399.695,00	1.477.352.065,00	(28.047.630,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	34	5	2		BELANJA MODAL	499.121.600,00	499.100.000,00	(21.600,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	34	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499.121.600,00	499.100.000,00	(21.600,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	35				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	220.947.900,00	191.905.400,00	(29.042.500,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	35	5	1		BELANJA OPERASI	220.947.900,00	191.905.400,00	(29.042.500,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	35	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	220.947.900,00	191.905.400,00	(29.042.500,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	36				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.600.000,00	2.250.000,00	(350.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	36	5	1		BELANJA OPERASI	2.600.000,00	2.250.000,00	(350.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	36	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.250.000,00	(350.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	38				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	683.036.000,00	673.973.200,00	(9.062.800,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	38	5	1		BELANJA OPERASI	683.036.000,00	673.973.200,00	(9.062.800,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	38	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	683.036.000,00	673.973.200,00	(9.062.800,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	40			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.650.000,00	3.950.000,00	(700.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	40	5	1	BELANJA OPERASI	4.650.000,00	3.950.000,00	(700.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	40	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	3.950.000,00	(700.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	42			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	600.000,00	-	(600.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	42	5	1	BELANJA OPERASI	600.000,00	-	(600.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	42	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	-	(600.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	893.645.000,00	749.215.874,00	(144.429.126,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	00			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	42.419.000,00	42.419.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	03			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	42.419.000,00	42.419.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	42.419.000,00	42.419.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.419.000,00	42.419.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	00			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	851.226.000,00	706.796.874,00	(144.429.126,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	01			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	851.226.000,00	706.796.874,00	(144.429.126,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	851.226.000,00	706.796.874,00	(144.429.126,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	851.226.000,00	706.796.874,00	(144.429.126,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	0.00	00			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	91.395.000,00	86.676.500,00	(4.718.500,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	00			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	58.600.000,00	55.550.500,00	(3.049.500,00)		
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	58.600.000,00	55.550.500,00	(3.049.500,00)		
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	58.600.000,00	55.550.500,00	(3.049.500,00)		
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	58.600.000,00	55.550.500,00	(3.049.500,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.04	00			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	32.795.000,00	31.126.000,00	(1.669.000,00)		
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.04	01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	32.795.000,00	31.126.000,00	(1.669.000,00)		
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	32.795.000,00	31.126.000,00	(1.669.000,00)		
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.795.000,00	31.126.000,00	(1.669.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	05	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.196.994.436,00	3.125.354.466,00	(71.639.970,00)		
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	05	2.01	00			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	504.002.736,00	474.358.481,00	(29.644.255,00)		
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	05	2.01	01			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	504.002.736,00	474.358.481,00	(29.644.255,00)		
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	504.002.736,00	474.358.481,00	(29.644.255,00)		
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.350.000,00	2.350.000,00	-	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	501.652.736,00	472.008.481,00	(29.644.255,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	05	2.03	00			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.692.991.700,00	2.650.995.985,00	(41.995.715,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	05	2.03	01			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.692.991.700,00	2.650.995.985,00	(41.995.715,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	05	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.692.991.700,00	2.650.995.985,00	(41.995.715,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	05	2.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.692.991.700,00	2.650.995.985,00	(41.995.715,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.099.246.924,00	152.239.755.421,00	(4.859.491.503,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	330.406.000,00	297.984.700,00	(32.421.300,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	172.825.700,00	159.746.400,00	(13.079.300,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	172.825.700,00	159.746.400,00	(13.079.300,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1 01	Belanja Pegawai	250.000,00	250.000,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	172.575.700,00	159.496.400,00	(13.079.300,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	124.754.400,00	124.754.400,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	124.754.400,00	124.754.400,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	124.754.400,00	124.754.400,00	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.825.900,00	13.483.900,00	(19.342.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	32.825.900,00	13.483.900,00	(19.342.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.825.900,00	13.483.900,00	(19.342.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.202.012.561,00	71.736.926.377,00	(4.465.086.184,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76.202.012.561,00	71.736.926.377,00	(4.465.086.184,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	76.202.012.561,00	71.736.926.377,00	(4.465.086.184,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01 Belanja Pegawai	76.202.012.561,00	71.736.926.377,00	(4.465.086.184,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.598.242.800,00	2.469.736.037,00	(128.506.763,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.847.022.800,00	1.719.767.385,00	(127.255.415,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.847.022.800,00	1.719.767.385,00	(127.255.415,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1	01 Belanja Pegawai	1.950.000,00	-	(1.950.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	1.845.072.800,00	1.719.767.385,00	(125.305.415,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	751.220.000,00	749.968.652,00	(1.251.348,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	751.220.000,00	749.968.652,00	(1.251.348,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	751.220.000,00	749.968.652,00	(1.251.348,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	770.550.000,00	713.450.000,00	(57.100.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	770.550.000,00	713.450.000,00	(57.100.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	770.550.000,00	713.450.000,00	(57.100.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	770.550.000,00	713.450.000,00	(57.100.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.996.000,00	372.115.075,00	(96.880.925,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	321.706.000,00	227.473.629,00	(94.232.371,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	321.706.000,00	227.473.629,00	(94.232.371,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	321.706.000,00	227.473.629,00	(94.232.371,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.663.000,00	23.618.446,00	(1.044.554,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	24.663.000,00	23.618.446,00	(1.044.554,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.663.000,00	23.618.446,00	(1.044.554,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.627.000,00	121.023.000,00	(1.604.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	122.627.000,00	121.023.000,00	(1.604.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	122.627.000,00	121.023.000,00	(1.604.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.10	00			Peningkatan Pelayanan BLUD	76.729.039.563,00	76.649.543.232,00	(79.496.331,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.10	01			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	76.729.039.563,00	76.649.543.232,00	(79.496.331,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.10	01	5	1	BELANJA OPERASI	76.063.639.563,00	76.045.378.232,00	(18.261.331,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.10	01	5	1 01	Belanja Pegawai	115.310.000,00	102.110.000,00	(13.200.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.10	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.948.329.563,00	75.943.268.232,00	(5.061.331,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.10	01	5	2	BELANJA MODAL	665.400.000,00	604.165.000,00	(61.235.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.10	01	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	99.120.000,00	(880.000,00)	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	01	2.10	01	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	565.400.000,00	505.045.000,00	(60.355.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.167.292.100,00	4.337.343.723,00	(829.948.377,00)		
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	704.621.300,00	701.551.430,00	(3.069.870,00)		
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	00			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	93.263.600,00	93.262.200,00	(1.400,00)		
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	07			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	93.263.600,00	93.262.200,00	(1.400,00)		
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	93.263.600,00	93.262.200,00	(1.400,00)		
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	93.263.600,00	93.262.200,00	(1.400,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	00			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	611.357.700,00	608.289.230,00	(3.068.470,00)		
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	09			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	296.715.000,00	295.345.530,00	(1.369.470,00)		
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	09	5	1	BELANJA OPERASI	296.715.000,00	295.345.530,00	(1.369.470,00)		
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	09	5	1	01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	294.315.000,00	292.945.530,00	(1.369.470,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	12			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	314.642.700,00	312.943.700,00	(1.699.000,00)		
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	12	5	1	BELANJA OPERASI	314.642.700,00	312.943.700,00	(1.699.000,00)		
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	12	5	1	01	Belanja Pegawai	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	314.642.700,00	312.943.700,00	(1.699.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	13			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	-	-		

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	13	5	1	BELANJA OPERASI	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	02	2.02	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	0.00	00			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.674.264.000,00	2.226.608.033,00	(447.655.967,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	00			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	533.450.000,00	527.743.300,00	(5.706.700,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	01			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000,00	119.870.100,00	(129.900,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.870.100,00	(129.900,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.870.100,00	(129.900,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	02			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	03			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1 01	Belanja Pegawai	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	04			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	149.949.200,00	(50.800,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.949.200,00	(50.800,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	1 01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	-	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	149.250.000,00	149.199.200,00	(50.800,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	06			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	39.000.000,00	38.433.600,00	(566.400,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	39.000.000,00	38.433.600,00	(566.400,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	38.433.600,00	(566.400,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	07			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	144.450.000,00	144.428.400,00	(21.600,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	144.450.000,00	144.428.400,00	(21.600,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	144.450.000,00	144.428.400,00	(21.600,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	08			Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	75.062.000,00	(4.938.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	75.062.000,00	(4.938.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	75.062.000,00	(4.938.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	00			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	58.000.000,00	58.000.000,00	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	01			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	02			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	02	5	1 01	Belanja Pegawai	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	02	5	2	BELANJA MODAL	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	04			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	54.000.000,00	54.000.000,00	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	54.000.000,00	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	00			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.965.314.000,00	1.523.838.733,00	(441.475.267,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	01			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.000.000,00	8.550.000,00	(4.450.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	8.550.000,00	(4.450.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	8.550.000,00	(4.450.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	03			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	781.632.000,00	461.118.500,00	(320.513.500,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	781.632.000,00	461.118.500,00	(320.513.500,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	781.632.000,00	461.118.500,00	(320.513.500,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	06			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.158.982.000,00	1.042.518.233,00	(116.463.767,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	06	5	1	BELANJA OPERASI	172.949.100,00	171.520.000,00	(1.429.100,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	06	5	1 01	Belanja Pegawai	-	-	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	172.949.100,00	171.520.000,00	(1.429.100,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	06	5	2	BELANJA MODAL	986.032.900,00	870.998.233,00	(115.034.667,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH					
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	550.000.000,00	436.637.500,00	(113.362.500,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	06	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	436.032.900,00	434.360.733,00	(1.672.167,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	08				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.700.000,00	11.652.000,00	(48.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	08	5	1		BELANJA OPERASI	11.700.000,00	11.652.000,00	(48.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.03	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.652.000,00	(48.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.04	00				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	117.500.000,00	117.026.000,00	(474.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.04	02				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	8.960.000,00	(40.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.960.000,00	(40.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.960.000,00	(40.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.04	03				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	108.500.000,00	108.066.000,00	(434.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	108.500.000,00	108.066.000,00	(434.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	03	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	108.500.000,00	108.066.000,00	(434.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	0.00	00				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.788.406.800,00	1.409.184.260,00	(379.222.540,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	00				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.788.406.800,00	1.409.184.260,00	(379.222.540,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	02				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	361.200.000,00	353.250.000,00	(7.950.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	361.200.000,00	353.250.000,00	(7.950.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	02	5	1 01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	352.050.000,00	(7.950.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	04			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	172.520.700,00	152.643.200,00	(19.877.500,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	172.520.700,00	152.643.200,00	(19.877.500,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	04	5	1 01	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	171.020.700,00	151.143.200,00	(19.877.500,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	05			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	973.800.000,00	628.512.000,00	(345.288.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	973.800.000,00	628.512.000,00	(345.288.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	973.800.000,00	628.512.000,00	(345.288.000,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	07			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	280.886.100,00	274.779.060,00	(6.107.040,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	280.886.100,00	274.779.060,00	(6.107.040,00)	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1 01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	-	
2	14	1.02.2.14.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	280.136.100,00	274.029.060,00	(6.107.040,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	02	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
										Jumlah Belanja	267.405.138.390,00	257.235.875.624,24	(10.169.262.765,76)	
										Total Surplus/(Defisit)	(154.025.868.390,00)	(158.885.688.727,13)	(4.859.820.337,13)	
0	00	1.02.2.14.0.00.03.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH				
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	755.000.000,00	1.194.226.354,00	439.226.354,00	Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2023
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	Retribusi Daerah	755.000.000,00	1.194.226.354,00	439.226.354,00	
Jumlah Pendapatan								755.000.000,00	1.194.226.354,00	439.226.354,00	
0	00	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA				
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	132.150.748.174,00	127.717.127.540,67	(4.433.620.633,33)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.157.271.500,00	7.010.488.116,00	(146.783.384,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.157.271.500,00	7.010.488.116,00	(146.783.384,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28		Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	235.100.000,00	229.177.830,00	(5.922.170,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	BELANJA OPERASI	9.100.000,00	5.563.230,00	(3.536.770,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	Belanja Pegawai	3.550.000,00	3.350.000,00	(200.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	2.213.230,00	(3.336.770,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	BELANJA MODAL	226.000.000,00	223.614.600,00	(2.385.400,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	28	5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	226.000.000,00	223.614.600,00	(2.385.400,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	38		Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	2.123.400.000,00	2.116.853.250,00	(6.546.750,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	38	5	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	21.653.250,00	(1.746.750,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	38	5	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	38	5	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	19.553.250,00	(1.746.750,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	38	5	2			BELANJA MODAL	2.100.000.000,00	2.095.200.000,00	(4.800.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	38	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.100.000.000,00	2.095.200.000,00	(4.800.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46					Normalisasi/Restorasi Sungai	3.927.242.500,00	3.796.187.516,00	(131.054.984,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5	1			BELANJA OPERASI	232.872.460,00	231.405.916,00	(1.466.544,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5	1	01		Belanja Pegawai	5.950.000,00	5.950.000,00	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	226.922.460,00	225.455.916,00	(1.466.544,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5	2			BELANJA MODAL	3.694.370.040,00	3.564.781.600,00	(129.588.440,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.694.370.040,00	3.564.781.600,00	(129.588.440,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55					Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	871.529.000,00	868.269.520,00	(3.259.480,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	5	1			BELANJA OPERASI	721.880.000,00	718.620.520,00	(3.259.480,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	5	1	01		Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	720.530.000,00	717.270.520,00	(3.259.480,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	5	2			BELANJA MODAL	149.649.000,00	149.649.000,00	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	149.649.000,00	149.649.000,00	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	21.269.000,00	20.095.000,00	(1.174.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	21.269.000,00	20.095.000,00	(1.174.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	21.269.000,00	20.095.000,00	(1.174.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.269.000,00	550.000,00	(719.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	01		Belanja Pegawai	500.000,00	-	(500.000,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	769.000,00	550.000,00	(219.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	2			BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.545.000,00	(455.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	19.545.000,00	(455.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	16.872.319.750,00	16.367.960.473,67	(504.359.276,33)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	00					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.872.319.750,00	16.367.960.473,67	(504.359.276,33)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	934.450.000,00	762.260.900,00	(172.189.100,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	34.450.000,00	34.433.300,00	(16.700,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	01		Belanja Pegawai	10.350.000,00	10.350.000,00	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	24.083.300,00	(16.700,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	2			BELANJA MODAL	900.000.000,00	727.827.600,00	(172.172.400,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	900.000.000,00	727.827.600,00	(172.172.400,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05					Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	13.295.841.000,00	13.099.927.926,00	(195.913.074,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	89.550.000,00	89.304.026,00	(245.974,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5	1	01		Belanja Pegawai	42.900.000,00	42.900.000,00	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	46.650.000,00	46.404.026,00	(245.974,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5	2			BELANJA MODAL	13.206.291.000,00	13.010.623.900,00	(195.667.100,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.206.291.000,00	13.010.623.900,00	(195.667.100,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2.642.028.750,00	2.505.771.647,67	(136.257.102,33)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	2.642.028.750,00	2.505.771.647,67	(136.257.102,33)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	5	1 01	Belanja Pegawai	2.350.000,00	2.350.000,00	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.639.678.750,00	2.503.421.647,67	(136.257.102,33)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	46.838.268.400,00	45.720.190.655,00	(1.118.077.745,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	00			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	46.838.268.400,00	45.720.190.655,00	(1.118.077.745,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	242.900.000,00	224.678.300,00	(18.221.700,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	242.900.000,00	224.678.300,00	(18.221.700,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	242.900.000,00	224.678.300,00	(18.221.700,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	46.595.368.400,00	45.495.512.355,00	(1.099.856.045,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	11.143.762.900,00	10.823.417.424,00	(320.345.476,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5	1 01	Belanja Pegawai	151.000.000,00	144.550.000,00	(6.450.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	331.236.900,00	320.683.424,00	(10.553.476,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5	1 05	Belanja Hibah	10.661.526.000,00	10.358.184.000,00	(303.342.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5	2	BELANJA MODAL	35.451.605.500,00	34.672.094.931,00	(779.510.569,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.351.605.500,00	34.672.094.931,00	(679.510.569,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	0.00	00					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	12.877.487.200,00	12.318.273.218,00	(559.213.982,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	00					Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	12.877.487.200,00	12.318.273.218,00	(559.213.982,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03					Penataan Bangunan dan Lingkungan	12.197.807.500,00	11.646.863.204,00	(550.944.296,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	5.796.206.500,00	5.438.825.054,00	(357.381.446,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	5	1	01		Belanja Pegawai	71.000.000,00	55.850.000,00	(15.150.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.725.206.500,00	5.382.975.054,00	(342.231.446,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	5	2			BELANJA MODAL	6.401.601.000,00	6.208.038.150,00	(193.562.850,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.401.601.000,00	6.208.038.150,00	(193.562.850,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04					Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	679.679.700,00	671.410.014,00	(8.269.686,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	679.679.700,00	671.410.014,00	(8.269.686,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	5	1	01		Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.250.000,00	(350.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	678.079.700,00	670.160.014,00	(7.919.686,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	0.00	00					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	34.139.050.650,00	33.622.923.546,00	(516.127.104,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	00					Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	34.139.050.650,00	33.622.923.546,00	(516.127.104,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19					Pemeliharaan Rutin Jembatan	437.640.000,00	432.610.483,00	(5.029.517,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	5	1			BELANJA OPERASI	437.640.000,00	432.610.483,00	(5.029.517,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	5	1	01		Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	433.840.000,00	428.810.483,00	(5.029.517,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	341.114.450,00	273.434.450,00	(67.680.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5 2	BELANJA MODAL	341.114.450,00	273.434.450,00	(67.680.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	341.114.450,00	273.434.450,00	(67.680.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	02		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	316.258.000,00	273.524.875,00	(42.733.125,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	316.258.000,00	273.524.875,00	(42.733.125,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	02	5 1 01	Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	315.108.000,00	272.374.875,00	(42.733.125,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	02	5 2	BELANJA MODAL	-	-	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	02	5 2 01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	408.600.000,00	403.465.065,00	(5.134.935,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	408.600.000,00	403.465.065,00	(5.134.935,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5 1 01	Belanja Pegawai	4.600.000,00	4.600.000,00	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	404.000.000,00	398.865.065,00	(5.134.935,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5 2	BELANJA MODAL	-	-	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05		Pembangunan Jalan	1.726.277.000,00	1.712.959.073,00	(13.317.927,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	17.050.000,00	16.782.073,00	(267.927,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5 1 01	Belanja Pegawai	7.350.000,00	7.200.000,00	(150.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	9.582.073,00	(117.927,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	2	BELANJA MODAL	1.709.227.000,00	1.696.177.000,00	(13.050.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.709.227.000,00	1.696.177.000,00	(13.050.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	07			Pelebaran Jalan Menambah Lajur	12.366.408.000,00	12.147.625.760,00	(218.782.240,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	94.050.000,00	84.160.760,00	(9.889.240,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	07	5	1 01	Belanja Pegawai	34.050.000,00	31.850.000,00	(2.200.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	52.310.760,00	(7.689.240,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	07	5	2	BELANJA MODAL	12.272.358.000,00	12.063.465.000,00	(208.893.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	07	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.272.358.000,00	12.063.465.000,00	(208.893.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10			Pemeliharaan Berkala Jalan	13.419.746.000,00	13.380.375.119,00	(39.370.881,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	5	1	BELANJA OPERASI	35.100.000,00	35.009.119,00	(90.881,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	5	1 01	Belanja Pegawai	14.600.000,00	14.600.000,00	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	20.409.119,00	(90.881,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	5	2	BELANJA MODAL	13.384.646.000,00	13.345.366.000,00	(39.280.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.384.646.000,00	13.345.366.000,00	(39.280.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11			Pemeliharaan Rutin Jalan	4.059.337.200,00	3.945.855.288,00	(113.481.912,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	4.059.337.200,00	3.945.855.288,00	(113.481.912,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5	1 01	Belanja Pegawai	30.700.000,00	28.700.000,00	(2.000.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.028.637.200,00	3.917.155.288,00	(111.481.912,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12			Pembangunan Jembatan	1.063.670.000,00	1.053.073.433,00	(10.596.567,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12	5	1	BELANJA OPERASI	11.350.000,00	9.203.433,00	(2.146.567,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12	5	1	01		Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	6.153.433,00	(2.146.567,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12	5	2			BELANJA MODAL	1.052.320.000,00	1.043.870.000,00	(8.450.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.052.320.000,00	1.043.870.000,00	(8.450.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	0.00	00					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	986.419.000,00	699.751.992,00	(286.667.008,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	00					Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	207.669.000,00	166.952.886,00	(40.716.114,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04					Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	207.669.000,00	166.952.886,00	(40.716.114,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	207.669.000,00	166.952.886,00	(40.716.114,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	207.669.000,00	166.952.886,00	(40.716.114,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.03	00					Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	778.750.000,00	532.799.106,00	(245.950.894,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.03	03					Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	778.750.000,00	532.799.106,00	(245.950.894,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.03	03	5	1			BELANJA OPERASI	778.750.000,00	532.799.106,00	(245.950.894,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.03	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	778.750.000,00	532.799.106,00	(245.950.894,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	0.00	00					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.075.860.000,00	919.981.420,00	(155.878.580,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	00					Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	732.000.000,00	645.705.578,00	(86.294.422,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	01					Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	177.000.000,00	161.869.096,00	(15.130.904,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	177.000.000,00	161.869.096,00	(15.130.904,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	01	5	1	01		Belanja Pegawai	-	-	-	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	177.000.000,00	161.869.096,00	(15.130.904,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	02					Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	555.000.000,00	483.836.482,00	(71.163.518,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	555.000.000,00	483.836.482,00	(71.163.518,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	02	5	1	01		Belanja Pegawai	-	-	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	555.000.000,00	483.836.482,00	(71.163.518,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03					Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	-	-	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	-	-	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03	5	1	01		Belanja Pegawai	-	-	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04					Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	-	-	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	-	-	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	5	1	01		Belanja Pegawai	-	-	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	00					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000,00	126.149.107,00	(13.850.893,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	140.000.000,00	126.149.107,00	(13.850.893,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	140.000.000,00	126.149.107,00	(13.850.893,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	126.149.107,00	(13.850.893,00)	

Kode Rekening						Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1						2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	00		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	203.860.000,00	148.126.735,00	(55.733.265,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	203.860.000,00	148.126.735,00	(55.733.265,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	5 1	BELANJA OPERASI	203.860.000,00	148.126.735,00	(55.733.265,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	5 1 01	Belanja Pegawai	350.000,00	-	(350.000,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	203.510.000,00	148.126.735,00	(55.383.265,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.182.802.674,00	11.037.463.120,00	(1.145.339.554,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.881.943,00	(118.057,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.881.943,00	(118.057,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.881.943,00	(118.057,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.881.943,00	(118.057,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.317.344.030,00	6.373.362.679,00	(943.981.351,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.317.344.030,00	6.373.362.679,00	(943.981.351,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	7.317.344.030,00	6.373.362.679,00	(943.981.351,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	7.317.344.030,00	6.373.362.679,00	(943.981.351,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.876.284,00	348.365.012,00	(4.511.272,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352.876.284,00	348.365.012,00	(4.511.272,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	352.876.284,00	348.365.012,00	(4.511.272,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	352.876.284,00	348.365.012,00	(4.511.272,00)

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.575.000,00	14.575.000,00	(1.000.000,00)		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.575.000,00	14.575.000,00	(1.000.000,00)		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	700.000,00	(1.000.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	01	Belanja Pegawai	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	550.000,00	(850.000,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	13.875.000,00	13.875.000,00	-	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.875.000,00	13.875.000,00	-
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.362.934.022,00	3.184.341.635,00	(178.592.387,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.362.934.022,00	3.184.341.635,00	(178.592.387,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	3.362.934.022,00	3.184.341.635,00	(178.592.387,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	01	Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	-
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.362.584.022,00	3.183.991.635,00	(178.592.387,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.084.073.338,00	1.066.936.851,00	(17.136.487,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	370.280.838,00	363.721.862,00	(6.558.976,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	370.280.838,00	363.721.862,00	(6.558.976,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	370.280.838,00	363.721.862,00	(6.558.976,00)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	713.792.500,00	703.214.989,00	(10.577.511,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	469.662.500,00	464.604.989,00	(5.057.511,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	01		Belanja Pegawai	3.150.000,00	2.550.000,00	(600.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	466.512.500,00	462.054.989,00	(4.457.511,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2			BELANJA MODAL	244.130.000,00	238.610.000,00	(5.520.000,00)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	244.130.000,00	238.610.000,00	(5.520.000,00)	
Jumlah Belanja											132.150.748.174,00	127.717.127.540,67	(4.433.620.633,33)	
Total Surplus/(Defisit)											(131.395.748.174,00)	(126.522.901.186,67)	4.872.846.987,33	
0	00	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.000.000,00	174.885.000,00	62.885.000,00	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	112.000.000,00	174.885.000,00	62.885.000,00	
Jumlah Pendapatan									112.000.000,00	174.885.000,00	62.885.000,00	
0	00	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA			-	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.207.303.705,00	40.611.823.081,33	(1.595.480.623,67)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.477.810.500,00	2.384.725.563,00	(93.084.937,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.01	00			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	86.150.000,00	85.145.200,00	(1.004.800,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.01	06			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	86.150.000,00	85.145.200,00	(1.004.800,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	86.150.000,00	85.145.200,00	(1.004.800,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	86.150.000,00	85.145.200,00	(1.004.800,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	00			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.295.210.500,00	2.203.833.913,00	(91.376.587,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	06			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.295.210.500,00	2.203.833.913,00	(91.376.587,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	06	5	1	BELANJA OPERASI	1.262.310.500,00	1.239.334.913,00	(22.975.587,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.262.310.500,00	1.239.334.913,00	(22.975.587,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	06	5	2	BELANJA MODAL	1.032.900.000,00	964.499.000,00	(68.401.000,00)	

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.900.000,00	7.659.000,00	(241.000,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	06	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.025.000.000,00	956.840.000,00	(68.160.000,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	00				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	96.450.000,00	95.746.450,00	(703.550,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	96.450.000,00	95.746.450,00	(703.550,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	96.450.000,00	95.746.450,00	(703.550,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	96.450.000,00	95.746.450,00	(703.550,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	0.00	00				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	6.051.801.600,00	5.955.079.435,00	(96.722.165,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	00				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	95.000.000,00	94.916.700,00	(83.300,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	95.000.000,00	94.916.700,00	(83.300,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	95.000.000,00	94.916.700,00	(83.300,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	94.916.700,00	(83.300,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	00				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.956.801.600,00	5.860.162.735,00	(96.638.865,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01				Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	236.996.000,00	206.548.200,00	(30.447.800,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	236.996.000,00	206.548.200,00	(30.447.800,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	236.996.000,00	206.548.200,00	(30.447.800,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.372.940.600,00	2.371.789.270,00	(1.151.330,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.372.940.600,00	2.371.789.270,00	(1.151.330,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	272.940.600,00	271.789.270,00	(1.151.330,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	-	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3.346.865.000,00	3.281.825.265,00	(65.039.735,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	5	1	BELANJA OPERASI	676.865.000,00	640.602.865,00	(36.262.135,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	676.865.000,00	640.602.865,00	(36.262.135,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	5	2	BELANJA MODAL	2.670.000.000,00	2.641.222.400,00	(28.777.600,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.975.000.000,00	1.951.231.400,00	(23.768.600,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	695.000.000,00	689.991.000,00	(5.009.000,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	23.392.447.900,00	22.907.366.847,33	(485.081.052,67)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	00			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	23.392.447.900,00	22.907.366.847,33	(485.081.052,67)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	23.392.447.900,00	22.907.366.847,33	(485.081.052,67)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	13.536.500.574,00	13.077.891.155,00	(458.609.419,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.536.500.574,00	13.077.891.155,00	(458.609.419,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	5	2	BELANJA MODAL	9.855.947.326,00	9.829.475.692,33	(26.471.633,67)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.092.375.537,00	2.088.883.636,04	(3.491.900,96)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.763.571.789,00	7.740.592.056,29	(22.979.732,71)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.285.243.705,00	9.364.651.236,00	(920.592.469,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.673.400,00	18.658.630,00	(14.770,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.673.400,00	18.658.630,00	(14.770,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	18.673.400,00	18.658.630,00	(14.770,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.673.400,00	18.658.630,00	(14.770,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.648.468.285,00	4.825.205.364,00	(823.262.921,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.610.968.670,00	4.787.941.364,00	(823.027.306,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	5.610.968.670,00	4.787.941.364,00	(823.027.306,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	5.610.968.670,00	4.787.941.364,00	(823.027.306,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	37.499.615,00	37.264.000,00	(235.615,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	37.499.615,00	37.264.000,00	(235.615,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.499.615,00	37.264.000,00	(235.615,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	139.600.000,00	139.337.031,00	(262.969,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	129.600.000,00	129.363.525,00	(236.475,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	5 1	BELANJA OPERASI	129.600.000,00	129.363.525,00	(236.475,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	129.600.000,00	129.363.525,00	(236.475,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	9.973.506,00	(26.494,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	10	5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.973.506,00	(26.494,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.973.506,00	(26.494,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.880.000,00	233.459.123,00	(420.877,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.880.000,00	233.459.123,00	(420.877,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	233.880.000,00	233.459.123,00	(420.877,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	233.880.000,00	233.459.123,00	(420.877,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	223.610.017,00	219.391.500,00	(4.218.517,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	223.610.017,00	219.391.500,00	(4.218.517,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	54.993.110,00	54.466.500,00	(526.610,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.993.110,00	54.466.500,00	(526.610,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	168.616.907,00	164.925.000,00	(3.691.907,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.616.907,00	164.925.000,00	(3.691.907,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.094.091.613,00	2.004.308.278,00	(89.783.335,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.094.091.613,00	2.004.308.278,00	(89.783.335,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	2.094.091.613,00	2.004.308.278,00	(89.783.335,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.094.091.613,00	2.004.308.278,00	(89.783.335,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.926.920.390,00	1.924.291.310,00	(2.629.080,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.434.008.090,00	1.433.669.140,00	(338.950,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.434.008.090,00	1.433.669.140,00	(338.950,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.434.008.090,00	1.433.669.140,00	(338.950,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	149.676.000,00	(324.000,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.676.000,00	(324.000,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.676.000,00	(324.000,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	342.912.300,00	340.946.170,00	(1.966.130,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	342.912.300,00	340.946.170,00	(1.966.130,00)	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	342.912.300,00	340.946.170,00	(1.966.130,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	314.600.000,00	260.951.885,00	(53.648.115,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	15.000.000,00	10.347.750,00	(4.652.250,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.01	00			Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	10.347.750,00	(4.652.250,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.01	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	15.000.000,00	10.347.750,00	(4.652.250,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	10.347.750,00	(4.652.250,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.347.750,00	(4.652.250,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	36.200.000,00	32.249.185,00	(3.950.815,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	00			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.200.000,00	32.249.185,00	(3.950.815,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.200.000,00	32.249.185,00	(3.950.815,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	36.200.000,00	32.249.185,00	(3.950.815,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.200.000,00	32.249.185,00	(3.950.815,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	0.00	00			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	263.400.000,00	218.354.950,00	(45.045.050,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	00			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	263.400.000,00	218.354.950,00	(45.045.050,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	263.400.000,00	218.354.950,00	(45.045.050,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	263.400.000,00	218.354.950,00	(45.045.050,00)	
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	263.400.000,00	218.354.950,00	(45.045.050,00)	
Jumlah Belanja									42.521.903.705,00	40.872.774.966,33	(1.649.128.738,67)	
Total Surplus/(Defisit)									(42.409.903.705,00)	(40.697.889.966,33)	1.712.013.738,67	
0	00	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
0	00	1.05.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25.510.228.805,00	21.569.693.069,57	(3.940.535.735,43)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.032.938.311,00	9.089.711.388,00	(1.943.226.923,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	00			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.981.051.762,00	6.364.433.990,00	(1.616.617.772,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.313.413.000,00	1.163.090.340,00	(150.322.660,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.313.413.000,00	1.163.090.340,00	(150.322.660,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	1.313.413.000,00	1.163.090.340,00	(150.322.660,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	720.060.000,00	706.015.750,00	(14.044.250,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	720.060.000,00	706.015.750,00	(14.044.250,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	720.060.000,00	706.015.750,00	(14.044.250,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	152.772.000,00	112.964.250,00	(39.807.750,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	152.772.000,00	112.964.250,00	(39.807.750,00)		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	152.772.000,00	112.964.250,00	(39.807.750,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	04			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.481.931.762,00	4.122.387.650,00	(1.359.544.112,00)		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	5.481.931.762,00	4.122.387.650,00	(1.359.544.112,00)		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.481.931.762,00	4.122.387.650,00	(1.359.544.112,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	05			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	312.875.000,00	259.976.000,00	(52.899.000,00)		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	312.875.000,00	259.976.000,00	(52.899.000,00)		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	312.875.000,00	259.976.000,00	(52.899.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	00			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3.040.808.549,00	2.725.277.398,00	(315.531.151,00)		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.392.746.805,00	2.191.569.362,00	(201.177.443,00)		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.392.746.805,00	2.191.569.362,00	(201.177.443,00)		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	-	-	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.392.746.805,00	2.191.569.362,00	(201.177.443,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	2	BELANJA MODAL	-	-	-		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	648.061.744,00	533.708.036,00	(114.353.708,00)		

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	558.661.744,00	449.208.036,00	(109.453.708,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	1.150.000,00	1.150.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	557.511.744,00	448.058.036,00	(109.453.708,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	2		BELANJA MODAL	89.400.000,00	84.500.000,00	(4.900.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.400.000,00	84.500.000,00	(4.900.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	00				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	11.078.000,00	-	(11.078.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	01				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	11.078.000,00	-	(11.078.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.078.000,00	-	(11.078.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.078.000,00	-	(11.078.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.123.228.000,00	1.075.470.970,00	(47.757.030,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	00				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.064.655.000,00	1.027.469.970,00	(37.185.030,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	699.128.000,00	683.199.600,00	(15.928.400,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	699.128.000,00	683.199.600,00	(15.928.400,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	699.128.000,00	683.199.600,00	(15.928.400,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	365.527.000,00	344.270.370,00	(21.256.630,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	365.527.000,00	344.270.370,00	(21.256.630,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	365.527.000,00	344.270.370,00	(21.256.630,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	00			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	58.573.000,00	48.001.000,00	(10.572.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	58.573.000,00	48.001.000,00	(10.572.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	27.493.000,00	17.971.000,00	(9.522.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	27.493.000,00	17.971.000,00	(9.522.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	5	2	BELANJA MODAL	31.080.000,00	30.030.000,00	(1.050.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.080.000,00	30.030.000,00	(1.050.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.354.062.494,00	11.404.510.711,57	(1.949.551.782,43)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.974.000,00	163.078.400,00	(895.600,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	163.974.000,00	163.078.400,00	(895.600,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	163.974.000,00	163.078.400,00	(895.600,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	1	01 Belanja Pegawai	250.000,00	250.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	163.724.000,00	162.828.400,00	(895.600,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.858.848.000,00	6.236.414.742,00	(1.622.433.258,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.858.848.000,00	6.236.414.742,00	(1.622.433.258,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	7.858.848.000,00	6.236.414.742,00	(1.622.433.258,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01 Belanja Pegawai	7.858.848.000,00	6.236.414.742,00	(1.622.433.258,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	684.175.000,00	617.631.300,00	(66.543.700,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	684.175.000,00	617.631.300,00	(66.543.700,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	5	1	BELANJA OPERASI	684.175.000,00	617.631.300,00	(66.543.700,00)	

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	684.175.000,00	617.631.300,00	(66.543.700,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.000.000,00	299.892.579,00	(107.421,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	299.892.579,00	(107.421,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	300.000.000,00	299.892.579,00	(107.421,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	299.892.579,00	(107.421,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.841.500,00	682.364.057,57	(68.477.442,43)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000,00	185.992.000,00	(14.008.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	02	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000,00	35.992.000,00	(14.008.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	02	5	1	01	Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.150.000,00	35.142.000,00	(14.008.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	02	5	2		BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	09				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	504.330.000,00	453.572.057,57	(50.757.942,43)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	09	5	1		BELANJA OPERASI	2.200.000,00	1.200.000,00	(1.000.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	09	5	1	01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	350.000,00	(850.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	850.000,00	(150.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	09	5	2		BELANJA MODAL	502.130.000,00	452.372.057,57	(49.757.942,43)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	09	5	2	01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	250.860.057,57	(49.139.942,43)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	09	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	202.130.000,00	201.512.000,00	(618.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.511.500,00	42.800.000,00	(3.711.500,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	46.511.500,00	42.800.000,00	(3.711.500,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.511.500,00	42.800.000,00	(3.711.500,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.647.446.994,00	2.567.812.328,00	(79.634.666,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.647.446.994,00	2.567.812.328,00	(79.634.666,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	2.647.446.994,00	2.567.812.328,00	(79.634.666,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	2.647.446.994,00	2.567.812.328,00	(79.634.666,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	948.777.000,00	837.317.305,00	(111.459.695,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	443.057.000,00	372.646.341,00	(70.410.659,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	443.057.000,00	372.646.341,00	(70.410.659,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	443.057.000,00	372.646.341,00	(70.410.659,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	401.000.000,00	361.149.364,00	(39.850.636,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	401.000.000,00	361.149.364,00	(39.850.636,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	401.000.000,00	361.149.364,00	(39.850.636,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.720.000,00	103.521.600,00	(1.198.400,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	104.720.000,00	103.521.600,00	(1.198.400,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	104.720.000,00	103.521.600,00	(1.198.400,00)	
								Jumlah Belanja	25.510.228.805,00	21.569.693.069,57	(3.940.535.735,43)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
Total Surplus/(Defisit)											25.510.228.805,00	21.569.693.069,57	3.999.108.735,00	
0	00	1.05.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
0	00	1.05.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.761.000.000,00	3.686.660.158,00	(74.339.842,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.396.582.000,00	1.383.150.402,00	(13.431.598,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	00			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	61.133.000,00	57.406.000,00	(3.727.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	-	-	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	61.133.000,00	57.406.000,00	(3.727.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	61.133.000,00	57.406.000,00	(3.727.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	61.133.000,00	57.406.000,00	(3.727.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	00			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.182.035.000,00	1.172.331.102,00	(9.703.898,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	01			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	85.633.000,00	81.299.520,00	(4.333.480,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	85.633.000,00	81.299.520,00	(4.333.480,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.633.000,00	81.299.520,00	(4.333.480,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	16.636.000,00	16.635.182,00	(818,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	5	2	BELANJA MODAL	16.636.000,00	16.635.182,00	(818,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.636.000,00	16.635.182,00	(818,00)	

Kode Rekening				Uraian				Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1				2				3	4	5 = 4 - 3	6	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	47.613.000,00	44.822.800,00	(2.790.200,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	47.613.000,00	44.822.800,00	(2.790.200,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.613.000,00	44.822.800,00	(2.790.200,00)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	08			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	888.600.000,00	888.600.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	888.600.000,00	888.600.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	888.600.000,00	888.600.000,00	-
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09			Penyusunan Rencana Kontijensi	50.000.000,00	49.300.000,00	(700.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.300.000,00	(700.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.300.000,00	(700.000,00)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	43.553.000,00	41.673.600,00	(1.879.400,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	43.553.000,00	41.673.600,00	(1.879.400,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.553.000,00	41.673.600,00	(1.879.400,00)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	00			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	103.064.000,00	103.063.300,00	(700,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80.475.000,00	80.475.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	80.475.000,00	80.475.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.475.000,00	80.475.000,00	-
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	22.589.000,00	22.588.300,00	(700,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04	5	1	BELANJA OPERASI	22.589.000,00	22.588.300,00	(700,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.589.000,00	22.588.300,00	(700,00)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	00			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	50.350.000,00	50.350.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	06			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	50.350.000,00	50.350.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	06	5	1	BELANJA OPERASI	50.350.000,00	50.350.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	-
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	06	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000,00	50.000.000,00	-
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.364.418.000,00	2.303.509.756,00	(60.908.244,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.250.000,00	1.591.200,00	(658.800,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.250.000,00	1.591.200,00	(658.800,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	1.591.200,00	(658.800,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	1.591.200,00	(658.800,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.682.835.000,00	1.627.753.226,00	(55.081.774,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.682.835.000,00	1.627.753.226,00	(55.081.774,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.682.835.000,00	1.627.753.226,00	(55.081.774,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01 Belanja Pegawai	1.682.835.000,00	1.627.753.226,00	(55.081.774,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.000.000,00	119.986.742,00	(13.258,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	119.986.742,00	(13.258,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.986.742,00	(13.258,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.986.742,00	(13.258,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.375.000,00	12.375.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.375.000,00	12.375.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	12.375.000,00	12.375.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.375.000,00	12.375.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.576.000,00	373.456.998,00	(1.119.002,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	374.576.000,00	373.456.998,00	(1.119.002,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	374.576.000,00	373.456.998,00	(1.119.002,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	03	5	1	01 Belanja Pegawai	73.860.000,00	73.860.000,00	-	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	300.716.000,00	299.596.998,00	(1.119.002,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.382.000,00	168.346.590,00	(4.035.410,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.787.000,00	145.514.590,00	(3.272.410,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	148.787.000,00	145.514.590,00	(3.272.410,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	148.787.000,00	145.514.590,00	(3.272.410,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.595.000,00	22.832.000,00	(763.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	23.595.000,00	22.832.000,00	(763.000,00)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	23.595.000,00	22.832.000,00	(763.000,00)	
Jumlah Belanja											3.761.000.000,00	3.686.660.158,00	(74.339.842,00)	
Total Surplus/(Defisit)											3.761.000.000,00	3.686.660.158,00	74.339.842,00	
0	00	1.05.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
0	00	1.06.2.08.0.00.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	28.563.359.197,00	26.681.442.659,00	(1.881.916.538,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.826.778.450,00	3.621.916.059,00	(204.862.391,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	00			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.826.778.450,00	3.621.916.059,00	(204.862.391,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	01			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	679.469.400,00	657.619.594,00	(21.849.806,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	679.469.400,00	657.619.594,00	(21.849.806,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	01	5	1	01 Belanja Pegawai	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	677.069.400,00	656.419.594,00	(20.649.806,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	02			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.155.800,00	58.232.180,00	(1.923.620,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	60.155.800,00	58.232.180,00	(1.923.620,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	60.155.800,00	58.232.180,00	(1.923.620,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	03			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	199.425.600,00	180.453.300,00	(18.972.300,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	199.425.600,00	180.453.300,00	(18.972.300,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	199.425.600,00	180.453.300,00	(18.972.300,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	04			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.887.727.650,00	2.725.610.985,00	(162.116.665,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	04	5	1	BELANJA OPERASI	2.887.727.650,00	2.725.610.985,00	(162.116.665,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.354.837.650,00	1.289.993.485,00	(64.844.165,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	04	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	1.532.890.000,00	1.435.617.500,00	(97.272.500,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	0.00	00			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.981.665.743,00	2.759.004.510,00	(222.661.233,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	00			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.416.019.663,00	2.240.752.210,00	(175.267.453,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	01			Penyediaan Permakanan	166.548.000,00	132.251.800,00	(34.296.200,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	166.548.000,00	132.251.800,00	(34.296.200,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	166.548.000,00	132.251.800,00	(34.296.200,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	02			Penyediaan Sandang	52.967.043,00	52.744.500,00	(222.543,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	52.967.043,00	52.744.500,00	(222.543,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.967.043,00	52.744.500,00	(222.543,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	03			Penyediaan Alat Bantu	35.457.200,00	32.014.900,00	(3.442.300,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	35.457.200,00	32.014.900,00	(3.442.300,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	03	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	35.457.200,00	32.014.900,00	(3.442.300,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	04			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.300.000,00	41.437.000,00	(863.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	42.300.000,00	41.437.000,00	(863.000,00)	

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.300.000,00	41.437.000,00	(863.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	05				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.100.000,00	10.100.000,00	-	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	10.100.000,00	10.100.000,00	-	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	10.100.000,00	-	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	06				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.928.380.420,00	1.844.636.510,00	(83.743.910,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.928.380.420,00	1.844.636.510,00	(83.743.910,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	146.080.420,00	134.236.510,00	(11.843.910,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	06	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	1.782.300.000,00	1.710.400.000,00	(71.900.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	10				Pemberian Layanan Kedaruratan	180.267.000,00	127.567.500,00	(52.699.500,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	180.267.000,00	127.567.500,00	(52.699.500,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	180.267.000,00	127.567.500,00	(52.699.500,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	00				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	565.646.080,00	518.252.300,00	(47.393.780,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	02				Pemberian Layanan Kedaruratan	191.360.500,00	153.249.000,00	(38.111.500,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	191.360.500,00	153.249.000,00	(38.111.500,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	191.360.500,00	153.249.000,00	(38.111.500,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	03				Penyediaan Permakanan	95.736.800,00	95.466.000,00	(270.800,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	95.736.800,00	95.466.000,00	(270.800,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.736.800,00	95.466.000,00	(270.800,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	04			Penyediaan Sandang	20.250.900,00	17.198.400,00	(3.052.500,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	20.250.900,00	17.198.400,00	(3.052.500,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.250.900,00	17.198.400,00	(3.052.500,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	05			Penyediaan Alat Bantu	31.154.500,00	30.425.100,00	(729.400,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	31.154.500,00	30.425.100,00	(729.400,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	05	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	31.154.500,00	30.425.100,00	(729.400,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	06			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	26.051.380,00	26.001.800,00	(49.580,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	26.051.380,00	26.001.800,00	(49.580,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.051.380,00	26.001.800,00	(49.580,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	07			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	69.200.000,00	67.800.000,00	(1.400.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	69.200.000,00	67.800.000,00	(1.400.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	69.200.000,00	67.800.000,00	(1.400.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	10			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	117.792.000,00	117.792.000,00	-	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	117.792.000,00	117.792.000,00	-	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	117.792.000,00	117.792.000,00	-	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	12			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14.100.000,00	10.320.000,00	(3.780.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	12	5	1	BELANJA OPERASI	14.100.000,00	10.320.000,00	(3.780.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	12	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	10.320.000,00	(3.780.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	0.00	00			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	12.167.195.900,00	11.598.123.900,00	(569.072.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	00			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	4.270.000,00	2.700.000,00	(1.570.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	01			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.660.000,00	1.210.000,00	(450.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.660.000,00	1.210.000,00	(450.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.660.000,00	1.210.000,00	(450.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	02			Rujukan Anak-Anak Terlantar	2.410.000,00	1.390.000,00	(1.020.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	2.410.000,00	1.390.000,00	(1.020.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.410.000,00	1.390.000,00	(1.020.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	03			Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	00			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12.162.925.900,00	11.595.423.900,00	(567.502.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	01			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	917.583.200,00	892.897.000,00	(24.686.200,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	917.583.200,00	892.897.000,00	(24.686.200,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	917.583.200,00	892.897.000,00	(24.686.200,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	406.052.550,00	379.804.150,00	(26.248.400,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	406.052.550,00	379.804.150,00	(26.248.400,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	406.052.550,00	379.804.150,00	(26.248.400,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	03			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10.811.745.150,00	10.297.268.550,00	(514.476.600,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	10.811.745.150,00	10.297.268.550,00	(514.476.600,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	03	5	1 01	Belanja Pegawai	-	-	-	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.201.145.150,00	901.568.550,00	(299.576.600,00)	

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	03	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	9.610.600.000,00	9.395.700.000,00	(214.900.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	04				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	27.545.000,00	25.454.200,00	(2.090.800,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	27.545.000,00	25.454.200,00	(2.090.800,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.545.000,00	25.454.200,00	(2.090.800,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	0.00	00				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	656.991.300,00	557.893.500,00	(99.097.800,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.01	00				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	78.209.900,00	25.160.600,00	(53.049.300,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.01	01				Penyediaan Makanan	39.282.600,00	9.983.300,00	(29.299.300,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	39.282.600,00	9.983.300,00	(29.299.300,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.282.600,00	9.983.300,00	(29.299.300,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.01	02				Penyediaan Sandang	15.177.300,00	15.177.300,00	-	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	15.177.300,00	15.177.300,00	-	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.177.300,00	15.177.300,00	-	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.01	05				Pelayanan Dukungan Psikososial	23.750.000,00	-	(23.750.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	23.750.000,00	-	(23.750.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.750.000,00	-	(23.750.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	00				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	578.781.400,00	532.732.900,00	(46.048.500,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	01				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	135.615.200,00	120.459.200,00	(15.156.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	135.615.200,00	120.459.200,00	(15.156.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.615.200,00	120.459.200,00	(15.156.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	02				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	443.166.200,00	412.273.700,00	(30.892.500,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	443.166.200,00	412.273.700,00	(30.892.500,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	443.166.200,00	412.273.700,00	(30.892.500,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	182.250.086,00	168.359.248,00	(13.890.838,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.01	00			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	182.250.086,00	168.359.248,00	(13.890.838,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.01	02			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	182.250.086,00	168.359.248,00	(13.890.838,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	182.250.086,00	168.359.248,00	(13.890.838,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	182.250.086,00	168.359.248,00	(13.890.838,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.748.477.718,00	7.976.145.442,00	(772.332.276,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206.776.700,00	201.797.400,00	(4.979.300,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.237.500,00	123.884.800,00	(352.700,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	124.237.500,00	123.884.800,00	(352.700,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	124.237.500,00	123.884.800,00	(352.700,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.227.400,00	17.960.800,00	(3.266.600,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	21.227.400,00	17.960.800,00	(3.266.600,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.227.400,00	17.960.800,00	(3.266.600,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.311.800,00	59.951.800,00	(1.360.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	61.311.800,00	59.951.800,00	(1.360.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1 01	Belanja Pegawai	250.000,00	250.000,00	-	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	61.061.800,00	59.701.800,00	(1.360.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.070.479.302,00	5.552.600.061,00	(517.879.241,00)		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.937.424.352,00	5.419.775.511,00	(517.648.841,00)		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.937.424.352,00	5.419.775.511,00	(517.648.841,00)		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	5.937.424.352,00	5.419.775.511,00	(517.648.841,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	133.054.950,00	132.824.550,00	(230.400,00)		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	133.054.950,00	132.824.550,00	(230.400,00)		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	133.054.950,00	132.824.550,00	(230.400,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.023.000,00	126.218.700,00	(1.804.300,00)		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	101.536.000,00	100.828.000,00	(708.000,00)		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.05	09	5	1	BELANJA OPERASI	101.536.000,00	100.828.000,00	(708.000,00)		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.05	09	5	1	01	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	-	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.05	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.736.000,00	100.028.000,00	(708.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26.487.000,00	25.390.700,00	(1.096.300,00)		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.05	10	5	1	BELANJA OPERASI	26.487.000,00	25.390.700,00	(1.096.300,00)		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.05	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.487.000,00	25.390.700,00	(1.096.300,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.541.000,00	325.531.630,00	(9.370,00)		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.541.000,00	325.531.630,00	(9.370,00)		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	325.541.000,00	325.531.630,00	(9.370,00)		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	325.541.000,00	325.531.630,00	(9.370,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284.631.158,00	267.510.000,00	(17.121.158,00)		

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	284.631.158,00	267.510.000,00	(17.121.158,00)		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	3.610.000,00	3.610.000,00	-	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	1	01	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	-
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	1.210.000,00	-
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	281.021.158,00	263.900.000,00	(17.121.158,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	281.021.158,00	263.900.000,00	(17.121.158,00)
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.273.868.763,00	1.105.329.032,00	(168.539.731,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	875.168.763,00	721.789.032,00	(153.379.731,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	875.168.763,00	721.789.032,00	(153.379.731,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1	01	Belanja Pegawai	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	874.668.763,00	721.539.032,00	(153.129.731,00)
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.700.000,00	383.540.000,00	(15.160.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	398.700.000,00	383.540.000,00	(15.160.000,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	398.700.000,00	383.540.000,00	(15.160.000,00)
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.157.795,00	397.158.619,00	(61.999.176,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.702.000,00	164.485.261,00	(51.216.739,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	215.702.000,00	164.485.261,00	(51.216.739,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	215.702.000,00	164.485.261,00	(51.216.739,00)
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.421.075,00	148.595.108,00	(3.825.967,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	152.421.075,00	148.595.108,00	(3.825.967,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	152.421.075,00	148.595.108,00	(3.825.967,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.034.720,00	84.078.250,00	(6.956.470,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	91.034.720,00	84.078.250,00	(6.956.470,00)	
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	91.034.720,00	84.078.250,00	(6.956.470,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.057.950.700,00	1.984.916.528,00	(73.034.172,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.090.047.400,00	1.052.738.714,00	(37.308.686,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.01	00			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	169.086.900,00	153.616.804,00	(15.470.096,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.01	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	72.834.400,00	72.525.804,00	(308.596,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	72.834.400,00	72.525.804,00	(308.596,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.834.400,00	72.525.804,00	(308.596,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.01	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	55.137.500,00	40.970.000,00	(14.167.500,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	55.137.500,00	40.970.000,00	(14.167.500,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.137.500,00	40.970.000,00	(14.167.500,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.01	03			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.217.000,00	29.888.000,00	(329.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	30.217.000,00	29.888.000,00	(329.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.217.000,00	29.888.000,00	(329.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.01	04			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	10.898.000,00	10.233.000,00	(665.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	10.898.000,00	10.233.000,00	(665.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.898.000,00	10.233.000,00	(665.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.02	00			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.946.000,00	31.362.000,00	(3.584.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.02	01			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	34.946.000,00	31.362.000,00	(3.584.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	34.946.000,00	31.362.000,00	(3.584.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.946.000,00	31.362.000,00	(3.584.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	00			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	886.014.500,00	867.759.910,00	(18.254.590,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	02			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	863.234.500,00	844.980.910,00	(18.253.590,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	863.234.500,00	844.980.910,00	(18.253.590,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	863.234.500,00	844.980.910,00	(18.253.590,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	03			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.780.000,00	22.779.000,00	(1.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	22.780.000,00	22.779.000,00	(1.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.780.000,00	22.779.000,00	(1.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	0.00	00			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	240.370.350,00	238.647.650,00	(1.722.700,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.01	00			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	68.286.980,00	67.070.880,00	(1.216.100,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.01	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	36.390.980,00	35.174.880,00	(1.216.100,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	36.390.980,00	35.174.880,00	(1.216.100,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.390.980,00	35.174.880,00	(1.216.100,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.01	02			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	31.896.000,00	31.896.000,00	-		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	31.896.000,00	31.896.000,00	-		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.896.000,00	31.896.000,00	-	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.02	00			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	155.906.600,00	155.750.000,00	(156.600,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.02	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	155.906.600,00	155.750.000,00	(156.600,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	155.906.600,00	155.750.000,00	(156.600,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	155.906.600,00	155.750.000,00	(156.600,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.03	00			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.176.770,00	15.826.770,00	(350.000,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.03	03			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	7.518.000,00	7.518.000,00	-		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	7.518.000,00	7.518.000,00	-		

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.518.000,00	7.518.000,00	-	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.03	04				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.658.770,00	8.308.770,00	(350.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	8.658.770,00	8.308.770,00	(350.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	03	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.658.770,00	8.308.770,00	(350.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	0.00	00				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	271.270.300,00	253.631.300,00	(17.639.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	00				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	222.349.300,00	204.710.300,00	(17.639.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	82.969.300,00	82.617.300,00	(352.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	82.969.300,00	82.617.300,00	(352.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	82.969.300,00	82.617.300,00	(352.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	02				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	139.380.000,00	122.093.000,00	(17.287.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	139.380.000,00	122.093.000,00	(17.287.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	139.380.000,00	122.093.000,00	(17.287.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	00				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.921.000,00	48.921.000,00	-	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	02			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.921.000,00	48.921.000,00	-		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	48.921.000,00	48.921.000,00	-		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	04	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.921.000,00	48.921.000,00	-	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	108.891.900,00	102.384.500,00	(6.507.400,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	00			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.891.900,00	102.384.500,00	(6.507.400,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	01			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	45.649.900,00	43.477.500,00	(2.172.400,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	45.649.900,00	43.477.500,00	(2.172.400,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.649.900,00	43.477.500,00	(2.172.400,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	02			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	63.242.000,00	58.907.000,00	(4.335.000,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	63.242.000,00	58.907.000,00	(4.335.000,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.242.000,00	58.907.000,00	(4.335.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	0.00	00			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	264.553.110,00	259.447.124,00	(5.105.986,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.01	00			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	43.237.900,00	42.264.900,00	(973.000,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.01	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	43.237.900,00	42.264.900,00	(973.000,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	43.237.900,00	42.264.900,00	(973.000,00)		

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.237.900,00	42.264.900,00	(973.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	00				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	221.315.210,00	217.182.224,00	(4.132.986,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	01				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	22.583.900,00	22.535.000,00	(48.900,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	22.583.900,00	22.535.000,00	(48.900,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.583.900,00	22.535.000,00	(48.900,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.178.800,00	82.194.214,00	(1.984.586,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	84.178.800,00	82.194.214,00	(1.984.586,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.178.800,00	82.194.214,00	(1.984.586,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	03				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.211.600,00	74.526.100,00	(1.685.500,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	76.211.600,00	74.526.100,00	(1.685.500,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.211.600,00	74.526.100,00	(1.685.500,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	04				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.340.910,00	37.926.910,00	(414.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	38.340.910,00	37.926.910,00	(414.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	06	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.340.910,00	37.926.910,00	(414.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	0.00	00				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	82.817.640,00	78.067.240,00	(4.750.400,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.01	00			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26.311.810,00	25.225.410,00	(1.086.400,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.01	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26.311.810,00	25.225.410,00	(1.086.400,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	26.311.810,00	25.225.410,00	(1.086.400,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.311.810,00	25.225.410,00	(1.086.400,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	00			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.149.900,00	31.821.900,00	(2.328.000,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5.750.000,00	5.750.000,00	-		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	5.750.000,00	5.750.000,00	-		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	-	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	04			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	28.399.900,00	26.071.900,00	(2.328.000,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	28.399.900,00	26.071.900,00	(2.328.000,00)		
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.399.900,00	26.071.900,00	(2.328.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.03	00			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.355.930,00	21.019.930,00	(1.336.000,00)		

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.03	03					Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.355.930,00	21.019.930,00	(1.336.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.03	03	5	1			BELANJA OPERASI	22.355.930,00	21.019.930,00	(1.336.000,00)	
2	08	1.06.2.08.0.00.02.0000	07	2.03	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	22.355.930,00	21.019.930,00	(1.336.000,00)	
Jumlah Belanja											30.621.309.897,00	28.666.359.187,00	(1.954.950.710,00)	
Total Surplus/(Defisit)											30.621.309.897,00	28.666.359.187,00	1.954.950.710,00	
0	00	1.06.2.08.0.00.02.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
 Organisasi : 2.07.2.17.3.31.10 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
0	00	2.07.2.17.3.31.10.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	11.278.758.543,00	10.052.122.765,69	(1.226.635.777,31)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	03	0.00	00			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.093.811.800,00	1.845.107.133,00	(248.704.667,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	03	2.01	00			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.071.802.000,00	1.824.874.333,00	(246.927.667,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	03	2.01	01			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.071.802.000,00	1.824.874.333,00	(246.927.667,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.071.802.000,00	1.824.874.333,00	(246.927.667,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	03	2.01	01	5	1 01	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	03	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.065.802.000,00	1.818.874.333,00	(246.927.667,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	03	2.02	00			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.054.800,00	8.658.800,00	(1.396.000,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	03	2.02	01			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.054.800,00	8.658.800,00	(1.396.000,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	10.054.800,00	8.658.800,00	(1.396.000,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	03	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.054.800,00	8.658.800,00	(1.396.000,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	03	2.05	00			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.955.000,00	11.574.000,00	(381.000,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	03	2.05	01			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	11.955.000,00	11.574.000,00	(381.000,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	03	2.05	01	5	1	BELANJA OPERASI	11.955.000,00	11.574.000,00	(381.000,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	03	2.05	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.955.000,00	11.574.000,00	(381.000,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	170.900.000,00	167.363.350,00	(3.536.650,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	04	2.03	00			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	170.900.000,00	167.363.350,00	(3.536.650,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	04	2.03	01			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	102.931.575,00	101.248.450,00	(1.683.125,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	04	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	102.931.575,00	101.248.450,00	(1.683.125,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	04	2.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	102.931.575,00	101.248.450,00	(1.683.125,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	04	2.03	02		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	67.968.425,00	66.114.900,00	(1.853.525,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	04	2.03	02	5 1	BELANJA OPERASI	67.968.425,00	66.114.900,00	(1.853.525,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	04	2.03	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.968.425,00	66.114.900,00	(1.853.525,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	0.00	00		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.177.271.897,00	1.639.550.455,69	(537.721.441,31)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.01	00		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.050.000,00	9.050.000,00	-	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.01	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	3.462.000,00	3.462.000,00	-	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	3.462.000,00	3.462.000,00	-	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.462.000,00	3.462.000,00	-	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.01	03		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	5.588.000,00	5.588.000,00	-	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	5.588.000,00	5.588.000,00	-	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.588.000,00	5.588.000,00	-	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.02	00		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.168.221.897,00	1.630.500.455,69	(537.721.441,31)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.02	02		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.460.000,00	35.403.200,00	(56.800,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	35.460.000,00	35.403.200,00	(56.800,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.02	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.460.000,00	35.403.200,00	(56.800,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.02	05		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.132.761.897,00	1.595.097.255,69	(537.664.641,31)	

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.132.761.897,00	1.595.097.255,69	(537.664.641,31)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.132.761.897,00	1.595.097.255,69	(537.664.641,31)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.836.774.846,00	6.400.101.827,00	(436.673.019,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.280.000,00	71.176.400,00	(103.600,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.280.000,00	71.176.400,00	(103.600,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	71.280.000,00	71.176.400,00	(103.600,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	71.280.000,00	71.176.400,00	(103.600,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.470.630.413,00	5.059.612.752,00	(411.017.661,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.470.630.413,00	5.059.612.752,00	(411.017.661,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.470.630.413,00	5.059.612.752,00	(411.017.661,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	5.470.630.413,00	5.059.612.752,00	(411.017.661,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	819.477.725,00	802.231.797,00	(17.245.928,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	482.302.725,00	465.263.736,00	(17.038.989,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	482.302.725,00	465.263.736,00	(17.038.989,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	482.302.725,00	465.263.736,00	(17.038.989,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.175.000,00	336.968.061,00	(206.939,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	337.175.000,00	336.968.061,00	(206.939,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	337.175.000,00	336.968.061,00	(206.939,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201.738.928,00	194.532.738,00	(7.206.190,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	201.738.928,00	194.532.738,00	(7.206.190,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	200.238.928,00	193.032.738,00	(7.206.190,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.238.928,00	193.032.738,00	(7.206.190,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.647.780,00	272.548.140,00	(1.099.640,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.444.000,00	75.134.322,00	(309.678,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	75.444.000,00	75.134.322,00	(309.678,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.444.000,00	75.134.322,00	(309.678,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	159.097.025,00	158.334.248,00	(762.777,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	159.097.025,00	158.334.248,00	(762.777,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.09	09	5 1 01	Belanja Pegawai	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	157.597.025,00	157.584.248,00	(12.777,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.106.755,00	39.079.570,00	(27.185,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.09	10	5 1	BELANJA OPERASI	39.106.755,00	39.079.570,00	(27.185,00)	
2	07	2.07.2.17.3.31.10.0000	01	2.09	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.106.755,00	39.079.570,00	(27.185,00)	
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	843.889.506,00	809.654.225,00	(34.235.281,00)	
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	460.790.000,00	456.964.000,00	(3.826.000,00)	
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.01	00		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	460.790.000,00	456.964.000,00	(3.826.000,00)	
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.01	01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	460.790.000,00	456.964.000,00	(3.826.000,00)	
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	460.790.000,00	456.964.000,00	(3.826.000,00)	
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	05	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	460.790.000,00	456.964.000,00	(3.826.000,00)	
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	06	0.00	00		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	180.804.100,00	151.363.900,00	(29.440.200,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	06	2.01	00		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.804.100,00	151.363.900,00	(29.440.200,00)	
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	06	2.01	01		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	180.804.100,00	151.363.900,00	(29.440.200,00)	
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	06	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	180.804.100,00	151.363.900,00	(29.440.200,00)
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	06	2.01	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	59.995.000,00	59.316.000,00	(679.000,00)
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	06	2.01	01	5	1	05 Belanja Hibah	120.809.100,00	92.047.900,00	(28.761.200,00)
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	08	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	202.295.406,00	201.326.325,00	(969.081,00)
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	08	2.01	00			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	202.295.406,00	201.326.325,00	(969.081,00)
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	08	2.01	01			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	202.295.406,00	201.326.325,00	(969.081,00)
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	08	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	202.295.406,00	201.326.325,00	(969.081,00)
2	17	2.07.2.17.3.31.10.0000	08	2.01	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	202.295.406,00	201.326.325,00	(969.081,00)
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.465.313.388,00	658.398.930,00	(1.806.914.458,00)
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	02	0.00	00			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.090.592.950,00	283.918.745,00	(1.806.674.205,00)
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	02	2.01	00			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.090.592.950,00	283.918.745,00	(1.806.674.205,00)
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	02	2.01	03			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	22.906.150,00	22.898.000,00	(8.150,00)
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	02	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	22.906.150,00	22.898.000,00	(8.150,00)
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	02	2.01	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	22.906.150,00	22.898.000,00	(8.150,00)
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	02	2.01	04			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	23.000.000,00	22.990.000,00	(10.000,00)

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	02	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	23.000.000,00	22.990.000,00	(10.000,00)	
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	02	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	22.990.000,00	(10.000,00)	
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	02	2.01	05					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.044.686.800,00	238.030.745,00	(1.806.656.055,00)	
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	02	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	2.044.686.800,00	238.030.745,00	(1.806.656.055,00)	
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	02	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.044.686.800,00	238.030.745,00	(1.806.656.055,00)	
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	04	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	374.720.438,00	374.480.185,00	(240.253,00)	
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	04	2.01	00					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	374.720.438,00	374.480.185,00	(240.253,00)	
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	04	2.01	02					Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	374.720.438,00	374.480.185,00	(240.253,00)	
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	04	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	374.720.438,00	374.480.185,00	(240.253,00)	
3	31	2.07.2.17.3.31.10.0000	04	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	374.720.438,00	374.480.185,00	(240.253,00)	
Jumlah Belanja											14.587.961.437,00	11.520.175.920,69	(3.067.785.516,31)	
Total Surplus/(Defisit)											(14.587.961.437,00)	(11.520.175.921,00)	3.067.785.516,00	
0	00	2.07.2.17.3.31.10.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 Organisasi : 2.09.3.27.3.25.02 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93.477.000,00	84.919.000,00	(8.558.000,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	61.477.000,00	52.146.000,00	(9.331.000,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	32.000.000,00	32.773.000,00	773.000,00	
Jumlah Pendapatan									93.477.000,00	84.919.000,00	(8.558.000,00)	
0	00	2.09.3.27.3.25.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.451.412.500,00	6.471.641.616,00	(979.770.884,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	503.271.500,00	499.880.150,00	(3.391.350,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	00			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	351.220.500,00	348.315.450,00	(2.905.050,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	01			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12.662.000,00	12.025.800,00	(636.200,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	12.662.000,00	12.025.800,00	(636.200,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	01	5	1 01	Belanja Pegawai	-	-	-	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.662.000,00	12.025.800,00	(636.200,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	02			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	308.789.500,00	306.521.250,00	(2.268.250,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	178.919.500,00	178.021.250,00	(898.250,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	02	5	1 01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	177.719.500,00	176.821.250,00	(898.250,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	02	5	2	BELANJA MODAL	129.870.000,00	128.500.000,00	(1.370.000,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.870.000,00	128.500.000,00	(1.370.000,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	04			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	29.769.000,00	29.768.400,00	(600,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	29.769.000,00	29.768.400,00	(600,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.769.000,00	29.768.400,00	(600,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.04	00			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	152.051.000,00	151.564.700,00	(486.300,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.04	01			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	23.553.000,00	23.306.900,00	(246.100,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	23.553.000,00	23.306.900,00	(246.100,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.04	01	5	1 01	Belanja Pegawai	-	-	-	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.04	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.553.000,00	23.306.900,00	(246.100,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.04	02			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	128.498.000,00	128.257.800,00	(240.200,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	128.498.000,00	128.257.800,00	(240.200,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.04	02	5	1 01	Belanja Pegawai	-	-	-	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.04	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	128.498.000,00	128.257.800,00	(240.200,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	32.480.000,00	32.473.700,00	(6.300,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.01	00			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	32.480.000,00	32.473.700,00	(6.300,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.01	01			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	32.480.000,00	32.473.700,00	(6.300,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	32.480.000,00	32.473.700,00	(6.300,00)	

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	-	-	-	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.480.000,00	32.473.700,00	(6.300,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	0.00	00				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	78.393.500,00	74.670.975,00	(3.722.525,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	00				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	78.393.500,00	74.670.975,00	(3.722.525,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	01				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	23.538.500,00	22.911.900,00	(626.600,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	23.538.500,00	22.911.900,00	(626.600,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	-	-	-	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.538.500,00	22.911.900,00	(626.600,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	05				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	54.855.000,00	51.759.075,00	(3.095.925,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	54.855.000,00	51.759.075,00	(3.095.925,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	05	5	1	01	Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	-	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.005.000,00	50.909.075,00	(3.095.925,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.837.267.500,00	5.864.616.791,00	(972.650.709,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.649.000,00	110.762.000,00	(2.887.000,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	113.649.000,00	110.762.000,00	(2.887.000,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	113.649.000,00	110.762.000,00	(2.887.000,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.01	06	5	1	01	Belanja Pegawai	250.000,00	250.000,00	-	

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	113.399.000,00	110.512.000,00	(2.887.000,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.132.457.000,00	4.182.877.559,00	(949.579.441,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.132.457.000,00	4.182.877.559,00	(949.579.441,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.132.457.000,00	4.182.877.559,00	(949.579.441,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	5.132.457.000,00	4.182.877.559,00	(949.579.441,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.05	00				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.078.000,00	13.841.900,00	(2.236.100,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.05	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.078.000,00	13.841.900,00	(2.236.100,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.05	04	5	1		BELANJA OPERASI	16.078.000,00	13.841.900,00	(2.236.100,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.05	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.078.000,00	13.841.900,00	(2.236.100,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.185.741.600,00	1.179.188.081,00	(6.553.519,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	771.140.000,00	764.739.502,00	(6.400.498,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	734.510.000,00	728.739.502,00	(5.770.498,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.06	02	5	1	01	Belanja Pegawai	4.400.000,00	2.600.000,00	(1.800.000,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	730.110.000,00	726.139.502,00	(3.970.498,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.06	02	5	2		BELANJA MODAL	36.630.000,00	36.000.000,00	(630.000,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.06	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.630.000,00	36.000.000,00	(630.000,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.476.600,00	23.339.900,00	(136.700,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	23.476.600,00	23.339.900,00	(136.700,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.476.600,00	23.339.900,00	(136.700,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391.125.000,00	391.108.679,00	(16.321,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	391.125.000,00	391.108.679,00	(16.321,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	391.125.000,00	391.108.679,00	(16.321,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.880.300,00	78.498.000,00	(382.300,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.880.300,00	78.498.000,00	(382.300,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	1.511.857,00	1.211.000,00	(300.857,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.07	10	5	1 01	Belanja Pegawai	750.000,00	450.000,00	(300.000,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.07	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	761.857,00	761.000,00	(857,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	77.368.443,00	77.287.000,00	(81.443,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.07	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.368.443,00	77.287.000,00	(81.443,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.461.600,00	299.449.251,00	(11.012.349,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.254.600,00	82.157.832,00	(6.096.768,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	88.254.600,00	82.157.832,00	(6.096.768,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.254.600,00	82.157.832,00	(6.096.768,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.584.500,00	14.253.760,00	(1.330.740,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	15.584.500,00	14.253.760,00	(1.330.740,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.584.500,00	14.253.760,00	(1.330.740,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.952.000,00	168.992.659,00	(2.959.341,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	171.952.000,00	168.992.659,00	(2.959.341,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.09	09	5	1	01		Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	-	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	170.602.000,00	167.642.659,00	(2.959.341,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.670.500,00	34.045.000,00	(625.500,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	34.670.500,00	34.045.000,00	(625.500,00)	
2	09	2.09.3.27.3.25.02.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	34.670.500,00	34.045.000,00	(625.500,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	404.505.000,00	401.398.026,00	(3.106.974,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	186.241.000,00	184.615.317,00	(1.625.683,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	00					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	186.241.000,00	184.615.317,00	(1.625.683,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	03					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.691.000,00	18.399.230,00	(291.770,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	03	5	1			BELANJA OPERASI	18.691.000,00	18.399.230,00	(291.770,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	18.691.000,00	18.399.230,00	(291.770,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	05					Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	167.550.000,00	166.216.087,00	(1.333.913,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	05	5	1			BELANJA OPERASI	164.353.200,00	163.274.587,00	(1.078.613,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	05	5	1	01		Belanja Pegawai	-	-	-	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	164.353.200,00	163.274.587,00	(1.078.613,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	05	5	2			BELANJA MODAL	3.196.800,00	2.941.500,00	(255.300,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	05	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.196.800,00	2.941.500,00	(255.300,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	0.00	00					PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	34.510.000,00	34.353.600,00	(156.400,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	00			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	34.510.000,00	34.353.600,00	(156.400,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	01			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	34.510.000,00	34.353.600,00	(156.400,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	34.510.000,00	34.353.600,00	(156.400,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	01	5	1	01 Belanja Pegawai	-	-	-	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	34.510.000,00	34.353.600,00	(156.400,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	0.00	00			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	183.754.000,00	182.429.109,00	(1.324.891,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	2.02	00			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	65.164.000,00	64.706.512,00	(457.488,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	2.02	01			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	65.164.000,00	64.706.512,00	(457.488,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	65.164.000,00	64.706.512,00	(457.488,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	2.02	01	5	1	01 Belanja Pegawai	-	-	-	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	2.02	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	65.164.000,00	64.706.512,00	(457.488,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	2.03	00			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	118.590.000,00	117.722.597,00	(867.403,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	2.03	02			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.590.000,00	117.722.597,00	(867.403,00)	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	2.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	118.590.000,00	117.722.597,00	(867.403,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	2.03	02	5	1	01		Belanja Pegawai	-	-	-	
3	25	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	2.03	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	118.590.000,00	117.722.597,00	(867.403,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5.334.742.300,00	4.913.122.573,00	(421.619.727,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.269.957.000,00	2.151.431.701,00	(118.525.299,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.01	00					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.140.615.000,00	2.022.653.681,00	(117.961.319,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.01	01					Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	23.550.000,00	23.100.000,00	(450.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	23.550.000,00	23.100.000,00	(450.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	23.550.000,00	23.100.000,00	(450.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.01	02					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.117.065.000,00	1.999.553.681,00	(117.511.319,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	2.095.142.500,00	1.980.118.525,00	(115.023.975,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.01	02	5	1	01		Belanja Pegawai	5.150.000,00	5.150.000,00	-	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.089.992.500,00	1.974.968.525,00	(115.023.975,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.01	02	5	2			BELANJA MODAL	21.922.500,00	19.435.156,00	(2.487.344,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.01	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.922.500,00	19.435.156,00	(2.487.344,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.03	00					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	129.342.000,00	128.778.020,00	(563.980,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.03	01					Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	129.342.000,00	128.778.020,00	(563.980,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	129.342.000,00	128.778.020,00	(563.980,00)	

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.03	01	5	1	01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	-	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	128.592.000,00	128.028.020,00	(563.980,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	439.684.000,00	419.957.100,00	(19.726.900,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	00				Pengembangan Prasarana Pertanian	14.954.000,00	1.490.000,00	(13.464.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	14.954.000,00	1.490.000,00	(13.464.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	14.954.000,00	1.490.000,00	(13.464.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.954.000,00	1.490.000,00	(13.464.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	00				Pembangunan Prasarana Pertanian	424.730.000,00	418.467.100,00	(6.262.900,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	03				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	52.815.000,00	52.229.475,00	(585.525,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	03	5	2		BELANJA MODAL	51.615.000,00	51.029.475,00	(585.525,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.615.000,00	51.029.475,00	(585.525,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	07				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	7.215.000,00	6.397.000,00	(818.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.550.000,00	4.897.000,00	(653.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	4.897.000,00	(653.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	07	5	2		BELANJA MODAL	1.665.000,00	1.500.000,00	(165.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	07	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.665.000,00	1.500.000,00	(165.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	09				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	364.700.000,00	359.840.625,00	(4.859.375,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	09	5	1			BELANJA OPERASI	210.284.000,00	206.740.625,00	(3.543.375,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	09	5	1	01		Belanja Pegawai	3.250.000,00	2.400.000,00	(850.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	207.034.000,00	204.340.625,00	(2.693.375,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	09	5	2			BELANJA MODAL	154.416.000,00	153.100.000,00	(1.316.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	03	2.02	09	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.416.000,00	153.100.000,00	(1.316.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	0.00	00					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	337.591.000,00	310.429.397,00	(27.161.603,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.01	00					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	235.103.000,00	230.392.697,00	(4.710.303,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.01	01					Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	235.103.000,00	230.392.697,00	(4.710.303,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	235.103.000,00	230.392.697,00	(4.710.303,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.01	01	5	1	01		Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	-	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	234.053.000,00	229.342.697,00	(4.710.303,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.03	00					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	350.000,00	(14.650.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.03	02					Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	15.000.000,00	350.000,00	(14.650.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.03	02	5	1			BELANJA OPERASI	15.000.000,00	350.000,00	(14.650.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.03	02	5	1	01		Belanja Pegawai	300.000,00	-	(300.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.03	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	350.000,00	(14.350.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	00					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	87.488.000,00	79.686.700,00	(7.801.300,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	01		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	16.543.000,00	9.234.500,00	(7.308.500,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	01	5 1	BELANJA OPERASI	16.543.000,00	9.234.500,00	(7.308.500,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	01	5 1 01	Belanja Pegawai	600.000,00	-	(600.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.943.000,00	9.234.500,00	(6.708.500,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	02		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	70.945.000,00	70.452.200,00	(492.800,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	02	5 1	BELANJA OPERASI	70.945.000,00	70.452.200,00	(492.800,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	02	5 1 01	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	-	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	04	2.04	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.645.000,00	70.152.200,00	(492.800,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	167.855.000,00	155.018.250,00	(12.836.750,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	00		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	167.855.000,00	155.018.250,00	(12.836.750,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	01		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	167.855.000,00	155.018.250,00	(12.836.750,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	167.855.000,00	155.018.250,00	(12.836.750,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	01	5 1 01	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	-	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	05	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	166.755.000,00	153.918.250,00	(12.836.750,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	0.00	00		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	33.600.000,00	25.025.150,00	(8.574.850,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	2.01	00		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	33.600.000,00	25.025.150,00	(8.574.850,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	2.01	02		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	33.600.000,00	25.025.150,00	(8.574.850,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	33.600.000,00	25.025.150,00	(8.574.850,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	06	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	25.025.150,00	(8.574.850,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	07	0.00	00					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.086.055.300,00	1.851.260.975,00	(234.794.325,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	07	2.01	00					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.086.055.300,00	1.851.260.975,00	(234.794.325,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	07	2.01	02					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.946.820.300,00	1.712.585.175,00	(234.235.125,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	07	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.946.820.300,00	1.712.585.175,00	(234.235.125,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	07	2.01	02	5	1	01		Belanja Pegawai	2.400.000,00	1.550.000,00	(850.000,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	07	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.944.420.300,00	1.711.035.175,00	(233.385.125,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	07	2.01	03					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	139.235.000,00	138.675.800,00	(559.200,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	07	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	24.350.000,00	24.350.000,00	-	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	07	2.01	03	5	1	01		Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	07	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	22.750.000,00	22.750.000,00	-	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	07	2.01	03	5	2			BELANJA MODAL	114.885.000,00	114.325.800,00	(559.200,00)	
3	27	2.09.3.27.3.25.02.0000	07	2.01	03	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.885.000,00	114.325.800,00	(559.200,00)	
Jumlah Belanja											13.190.659.800,00	11.786.162.215,00	(1.404.497.585,00)	
Total Surplus/(Defisit)											(13.097.182.800,00)	(11.701.243.215,00)	1.395.939.585,00	
0	00	2.09.3.27.3.25.02.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.05 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	155.000.000,00	171.940.000,00	16.940.000,00	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	155.000.000,00	171.940.000,00	16.940.000,00	
Jumlah Pendapatan									155.000.000,00	171.940.000,00	16.940.000,00	
0	00	2.11.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26.805.066.066,00	25.378.637.614,30	(1.426.428.451,70)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	02	0.00	00			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	299.284.000,00	283.494.300,00	(15.789.700,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	00			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	123.700.000,00	113.756.800,00	(9.943.200,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	123.700.000,00	113.756.800,00	(9.943.200,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	123.700.000,00	113.756.800,00	(9.943.200,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	123.700.000,00	113.756.800,00	(9.943.200,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	00			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	175.584.000,00	169.737.500,00	(5.846.500,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	02			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	175.584.000,00	169.737.500,00	(5.846.500,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	175.584.000,00	169.737.500,00	(5.846.500,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	175.584.000,00	169.737.500,00	(5.846.500,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.110.568.770,00	1.106.894.600,00	(3.674.170,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	00			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	607.704.574,00	606.559.050,00	(1.145.524,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	01		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	231.912.780,00	231.465.250,00	(447.530,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	231.912.780,00	231.465.250,00	(447.530,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	231.912.780,00	231.465.250,00	(447.530,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	375.791.794,00	375.093.800,00	(697.994,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	375.791.794,00	375.093.800,00	(697.994,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	02	5 1 01	Belanja Pegawai	555.000,00	550.000,00	(5.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	375.236.794,00	374.543.800,00	(692.994,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	00		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	502.864.196,00	500.335.550,00	(2.528.646,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	01		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	301.831.396,00	301.083.450,00	(747.946,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	301.831.396,00	301.083.450,00	(747.946,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	-	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	301.331.396,00	300.583.450,00	(747.946,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	201.032.800,00	199.252.100,00	(1.780.700,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	201.032.800,00	199.252.100,00	(1.780.700,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03	5 1 01	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	-	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	199.732.800,00	197.952.100,00	(1.780.700,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	04	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	76.700.000,00	76.530.800,00	(169.200,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	00		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	76.700.000,00	76.530.800,00	(169.200,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	76.700.000,00	76.530.800,00	(169.200,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	76.700.000,00	76.530.800,00	(169.200,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	04	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	76.700.000,00	76.530.800,00	(169.200,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	51.985.000,00	45.855.000,00	(6.130.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	00		Penyimpanan sementara Limbah B3	51.985.000,00	45.855.000,00	(6.130.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	51.985.000,00	45.855.000,00	(6.130.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	51.985.000,00	45.855.000,00	(6.130.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.985.000,00	45.855.000,00	(6.130.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	06	0.00	00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	323.629.200,00	319.872.000,00	(3.757.200,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	00		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	323.629.200,00	319.872.000,00	(3.757.200,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	177.829.200,00	175.992.000,00	(1.837.200,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	177.829.200,00	175.992.000,00	(1.837.200,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	01	5 1 01	Belanja Pegawai	-	-	-	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	177.829.200,00	175.992.000,00	(1.837.200,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	03				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	145.800.000,00	143.880.000,00	(1.920.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	145.800.000,00	143.880.000,00	(1.920.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	145.800.000,00	143.880.000,00	(1.920.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	08	0.00	00				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	672.265.000,00	618.230.100,00	(54.034.900,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	08	2.01	00				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	672.265.000,00	618.230.100,00	(54.034.900,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	08	2.01	02				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	672.265.000,00	618.230.100,00	(54.034.900,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	08	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	672.265.000,00	618.230.100,00	(54.034.900,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	08	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	672.265.000,00	618.230.100,00	(54.034.900,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	10	0.00	00				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	145.000.000,00	143.579.000,00	(1.421.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	10	2.01	00				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	145.000.000,00	143.579.000,00	(1.421.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	10	2.01	01				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	45.000.000,00	44.787.000,00	(213.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	10	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.787.000,00	(213.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	10	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.787.000,00	(213.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	10	2.01	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	100.000.000,00	98.792.000,00	(1.208.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	10	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	71.192.000,00	(808.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	10	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	71.192.000,00	(808.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	10	2.01	02	5	2	BELANJA MODAL	28.000.000,00	27.600.000,00	(400.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	10	2.01	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	27.600.000,00	(400.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.184.615.336,00	5.554.028.825,85	(630.586.510,15)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	00			Pengelolaan Sampah	6.084.615.336,00	5.473.136.825,85	(611.478.510,15)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	02			Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	201.015.336,00	175.153.913,00	(25.861.423,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	201.015.336,00	175.153.913,00	(25.861.423,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	02	5	1 01	Belanja Pegawai	1.332.000,00	1.200.000,00	(132.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	199.683.336,00	173.953.913,00	(25.729.423,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	03			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.130.000.000,00	1.856.523.980,00	(273.476.020,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	2.130.000.000,00	1.856.523.980,00	(273.476.020,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	03	5	1 01	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.128.200.000,00	1.855.323.980,00	(272.876.020,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	04			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	92.000.000,00	90.878.100,00	(1.121.900,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	92.000.000,00	90.878.100,00	(1.121.900,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	92.000.000,00	90.878.100,00	(1.121.900,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	07		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.661.600.000,00	3.350.580.832,85	(311.019.167,15)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	443.098.250,00	414.447.995,81	(28.650.254,19)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	07	5 1 01	Belanja Pegawai	10.323.000,00	10.250.000,00	(73.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	432.775.250,00	404.197.995,81	(28.577.254,19)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	07	5 2	BELANJA MODAL	3.218.501.750,00	2.936.132.837,04	(282.368.912,96)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	07	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	761.001.750,00	726.529.700,00	(34.472.050,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.01	07	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.457.500.000,00	2.209.603.137,04	(247.896.862,96)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.03	00		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	100.000.000,00	80.892.000,00	(19.108.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.03	02		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	100.000.000,00	80.892.000,00	(19.108.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.03	02	5 1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	80.892.000,00	(19.108.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.03	02	5 1 01	Belanja Pegawai	945.000,00	-	(945.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	11	2.03	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.055.000,00	80.892.000,00	(18.163.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.941.018.760,00	17.230.152.988,45	(710.865.771,55)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.660.100,00	67.649.500,00	(10.600,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.660.100,00	67.649.500,00	(10.600,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	67.660.100,00	67.649.500,00	(10.600,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.660.100,00	67.649.500,00	(10.600,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.759.198.388,00	9.282.966.573,00	(476.231.815,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.759.198.388,00	9.282.966.573,00	(476.231.815,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	9.759.198.388,00	9.282.966.573,00	(476.231.815,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	9.759.198.388,00	9.282.966.573,00	(476.231.815,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.05	00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	270.427.400,00	270.285.900,00	(141.500,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	157.200.600,00	157.186.900,00	(13.700,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.05	02	5 1	BELANJA OPERASI	157.200.600,00	157.186.900,00	(13.700,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.05	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	157.200.600,00	157.186.900,00	(13.700,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	113.226.800,00	113.099.000,00	(127.800,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.05	09	5 1	BELANJA OPERASI	113.226.800,00	113.099.000,00	(127.800,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.05	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	113.226.800,00	113.099.000,00	(127.800,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	390.508.000,00	390.429.000,00	(79.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390.508.000,00	390.429.000,00	(79.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	390.508.000,00	390.429.000,00	(79.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	390.508.000,00	390.429.000,00	(79.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.550.000,00	5.523.000,00	(27.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.550.000,00	5.523.000,00	(27.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	11	5 2	BELANJA MODAL	5.550.000,00	5.523.000,00	(27.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	11	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.550.000,00	5.523.000,00	(27.000,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.693.060.712,00	5.610.968.350,00	(82.092.362,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.284.208,00	672.868.050,00	(7.416.158,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	680.284.208,00	672.868.050,00	(7.416.158,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	680.284.208,00	672.868.050,00	(7.416.158,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.012.776.504,00	4.938.100.300,00	(74.676.204,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	5.012.776.504,00	4.938.100.300,00	(74.676.204,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.012.776.504,00	4.938.100.300,00	(74.676.204,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.754.614.160,00	1.602.330.665,45	(152.283.494,55)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.320.115.722,00	1.198.853.600,00	(121.262.122,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.320.115.722,00	1.198.853.600,00	(121.262.122,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.320.115.722,00	1.198.853.600,00	(121.262.122,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.260.800,00	162.886.150,00	(27.374.650,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	190.260.800,00	162.886.150,00	(27.374.650,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	190.260.800,00	162.886.150,00	(27.374.650,00)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	244.237.638,00	240.590.915,45	(3.646.722,55)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	244.237.638,00	240.590.915,45	(3.646.722,55)	
2	11	2.11.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	244.237.638,00	240.590.915,45	(3.646.722,55)	
Jumlah Belanja											26.805.066.066,00	25.378.637.614,30	(1.426.428.451,70)	
Total Surplus/(Defisit)											(26.650.066.066,00)	(25.206.697.614,30)	1.443.368.451,70	
0	00	2.11.0.00.0.00.05.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN			-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Organisasi : 2.12.2.24.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
0	00	2.12.2.24.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.884.144.194,00	6.756.225.074,00	(127.919.120,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	187.143.864,00	187.002.585,00	(141.279,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	00			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	122.853.104,00	122.712.485,00	(140.619,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	04			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	85.822.640,00	85.701.485,00	(121.155,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	85.822.640,00	85.701.485,00	(121.155,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	85.822.640,00	85.701.485,00	(121.155,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	05			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	37.030.464,00	37.011.000,00	(19.464,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	37.030.464,00	37.011.000,00	(19.464,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	37.030.464,00	37.011.000,00	(19.464,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	02	2.03	00			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	64.290.760,00	64.290.100,00	(660,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	02	2.03	03			Fasilitas Pendaftaran Penduduk	64.290.760,00	64.290.100,00	(660,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	64.290.760,00	64.290.100,00	(660,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	64.290.760,00	64.290.100,00	(660,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	172.282.982,00	169.333.600,00	(2.949.382,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	00			Pelayanan Pencatatan Sipil	172.282.982,00	169.333.600,00	(2.949.382,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	01			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	87.596.380,00	84.873.600,00	(2.722.780,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	87.596.380,00	84.873.600,00	(2.722.780,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1 01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	-	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	87.096.380,00	84.373.600,00	(2.722.780,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	02			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	84.686.602,00	84.460.000,00	(226.602,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	48.486.172,00	48.260.000,00	(226.172,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.486.172,00	48.260.000,00	(226.172,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	2	BELANJA MODAL	36.200.430,00	36.200.000,00	(430,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.200.430,00	36.200.000,00	(430,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	215.242.891,00	213.580.610,00	(1.662.281,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	04	2.01	00			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	69.029.960,00	68.899.167,00	(130.793,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	04	2.01	01			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	33.695.600,00	33.695.000,00	(600,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	33.695.600,00	33.695.000,00	(600,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.695.600,00	33.695.000,00	(600,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	04	2.01	02			Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	35.334.360,00	35.204.167,00	(130.193,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	35.334.360,00	35.204.167,00	(130.193,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.334.360,00	35.204.167,00	(130.193,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	04	2.03	00			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	146.212.931,00	144.681.443,00	(1.531.488,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	04	2.03	05			Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	146.212.931,00	144.681.443,00	(1.531.488,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	04	2.03	05	5	1	BELANJA OPERASI	146.212.931,00	144.681.443,00	(1.531.488,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	04	2.03	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	146.212.931,00	144.681.443,00	(1.531.488,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.309.474.457,00	6.186.308.279,00	(123.166.178,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.650.000,00	78.329.000,00	(1.321.000,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.290.000,00	2.132.000,00	(158.000,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	2.290.000,00	2.132.000,00	(158.000,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.290.000,00	2.132.000,00	(158.000,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.360.000,00	76.197.000,00	(1.163.000,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	77.360.000,00	76.197.000,00	(1.163.000,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.360.000,00	76.197.000,00	(1.163.000,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.406.803.400,00	4.319.072.955,00	(87.730.445,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.328.123.400,00	4.240.392.955,00	(87.730.445,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.328.123.400,00	4.240.392.955,00	(87.730.445,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	4.328.123.400,00	4.240.392.955,00	(87.730.445,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.680.000,00	78.680.000,00	-	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	78.680.000,00	78.680.000,00	-	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1 01	Belanja Pegawai	76.680.000,00	76.680.000,00	-	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.541.500,00	32.264.500,00	(277.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	11.500.000,00	11.464.500,00	(35.500,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.05	10	5	1	BELANJA OPERASI	11.500.000,00	11.464.500,00	(35.500,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.05	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.464.500,00	(35.500,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.041.500,00	20.800.000,00	(241.500,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	1	BELANJA OPERASI	21.041.500,00	20.800.000,00	(241.500,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.041.500,00	20.800.000,00	(241.500,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	583.172.226,00	582.460.529,00	(711.697,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	351.364.461,00	350.938.145,00	(426.316,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	351.364.461,00	350.938.145,00	(426.316,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	351.364.461,00	350.938.145,00	(426.316,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.357.375,00	36.206.950,00	(150.425,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	36.357.375,00	36.206.950,00	(150.425,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.357.375,00	36.206.950,00	(150.425,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.088.510,00	25.087.800,00	(710,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	25.088.510,00	25.087.800,00	(710,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.088.510,00	25.087.800,00	(710,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.361.880,00	170.227.634,00	(134.246,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	170.361.880,00	170.227.634,00	(134.246,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	170.361.880,00	170.227.634,00	(134.246,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	257.315.951,00	253.360.600,00	(3.955.351,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	257.315.951,00	253.360.600,00	(3.955.351,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	2.560.000,00	2.560.000,00	-	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	2.560.000,00	-	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	254.755.951,00	250.800.600,00	(3.955.351,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.305.951,00	38.280.000,00	(25.951,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	216.450.000,00	212.520.600,00	(3.929.400,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665.502.640,00	647.140.845,00	(18.361.795,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	665.502.640,00	647.140.845,00	(18.361.795,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	665.502.640,00	647.140.845,00	(18.361.795,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	665.502.640,00	647.140.845,00	(18.361.795,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.488.740,00	273.679.850,00	(10.808.890,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.406.367,00	22.786.200,00	(2.620.167,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	25.406.367,00	22.786.200,00	(2.620.167,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.406.367,00	22.786.200,00	(2.620.167,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.552.040,00	15.445.100,00	(6.106.940,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	21.552.040,00	15.445.100,00	(6.106.940,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.552.040,00	15.445.100,00	(6.106.940,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.932.496,00	14.900.000,00	(1.032.496,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	15.932.496,00	14.900.000,00	(1.032.496,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.932.496,00	14.900.000,00	(1.032.496,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.705.105,00	44.350.550,00	(354.555,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	44.705.105,00	44.350.550,00	(354.555,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	44.705.105,00	44.350.550,00	(354.555,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.892.732,00	176.198.000,00	(694.732,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	176.892.732,00	176.198.000,00	(694.732,00)	
2	12	2.12.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	176.892.732,00	176.198.000,00	(694.732,00)	
Jumlah Belanja											6.884.144.194,00	6.756.225.074,00	(127.919.120,00)	
Total Surplus/(Defisit)											6.884.144.194,00	6.756.225.074,00	(127.919.120,00)	
0	00	2.12.2.24.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.964.938.840,00	4.258.105.112,00	293.166.272,00	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	3.936.815.940,00	4.136.642.612,00	199.826.672,00	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	28.122.900,00	121.462.500,00	93.339.600,00	
Jumlah Pendapatan									3.964.938.840,00	4.258.105.112,00	293.166.272,00	
0	00	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	18.304.063.966,00	17.926.570.593,21	(377.493.372,79)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.739.534.952,00	7.588.872.736,00	(150.662.216,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.296.725.427,00	3.225.629.774,00	(71.095.653,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	120.350.000,00	118.100.900,00	(2.249.100,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	120.350.000,00	118.100.900,00	(2.249.100,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	500.000,00	350.000,00	(150.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	119.850.000,00	117.750.900,00	(2.099.100,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.142.124.400,00	1.106.085.000,00	(36.039.400,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	82.250.000,00	61.400.000,00	(20.850.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1 01	Belanja Pegawai	3.750.000,00	3.400.000,00	(350.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	78.500.000,00	58.000.000,00	(20.500.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	BELANJA MODAL	1.059.874.400,00	1.044.685.000,00	(15.189.400,00)	

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.059.874.400,00	1.044.685.000,00	(15.189.400,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.034.251.027,00	2.001.443.874,00	(32.807.153,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.975.303.027,00	1.943.575.800,00	(31.727.227,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	01	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	-	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.973.903.027,00	1.942.175.800,00	(31.727.227,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2		BELANJA MODAL	58.948.000,00	57.868.074,00	(1.079.926,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.948.000,00	57.868.074,00	(1.079.926,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	189.200.000,00	186.353.750,00	(2.846.250,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	189.200.000,00	186.353.750,00	(2.846.250,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	172.550.000,00	169.898.000,00	(2.652.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	01	Belanja Pegawai	750.000,00	-	(750.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	171.800.000,00	169.898.000,00	(1.902.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	2		BELANJA MODAL	16.650.000,00	16.455.750,00	(194.250,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.650.000,00	16.455.750,00	(194.250,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	00				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.026.708.000,00	1.014.315.685,00	(12.392.315,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.026.708.000,00	1.014.315.685,00	(12.392.315,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	981.708.000,00	969.915.685,00	(11.792.315,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	01	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.300.000,00	(500.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	978.908.000,00	967.615.685,00	(11.292.315,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	44.400.000,00	(600.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	44.400.000,00	(600.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	00			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	652.225.800,00	644.111.059,00	(8.114.741,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	257.077.000,00	251.376.059,00	(5.700.941,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	BELANJA OPERASI	130.921.000,00	126.268.059,00	(4.652.941,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	130.921.000,00	126.268.059,00	(4.652.941,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	2	BELANJA MODAL	126.156.000,00	125.108.000,00	(1.048.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.156.000,00	125.108.000,00	(1.048.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	395.148.800,00	392.735.000,00	(2.413.800,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	5	1	BELANJA OPERASI	395.148.800,00	392.735.000,00	(2.413.800,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	395.148.800,00	392.735.000,00	(2.413.800,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	00			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	56.304.000,00	56.218.000,00	(86.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	56.304.000,00	56.218.000,00	(86.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	56.304.000,00	56.218.000,00	(86.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	56.304.000,00	56.218.000,00	(86.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	00			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	231.316.000,00	227.733.000,00	(3.583.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	04			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	231.316.000,00	227.733.000,00	(3.583.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	04	5	1	BELANJA OPERASI	231.316.000,00	227.733.000,00	(3.583.000,00)	

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	231.316.000,00	227.733.000,00	(3.583.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	00				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	944.622.525,00	927.997.713,00	(16.624.812,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	01				Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	51.300.000,00	50.800.000,00	(500.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	51.300.000,00	50.800.000,00	(500.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.300.000,00	50.800.000,00	(500.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	02				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	782.858.525,00	770.547.215,00	(12.311.310,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	782.858.525,00	770.547.215,00	(12.311.310,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	782.858.525,00	770.547.215,00	(12.311.310,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	110.464.000,00	106.650.498,00	(3.813.502,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	110.464.000,00	106.650.498,00	(3.813.502,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.464.000,00	106.650.498,00	(3.813.502,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	00				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.342.433.200,00	1.306.513.755,00	(35.919.445,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.342.433.200,00	1.306.513.755,00	(35.919.445,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.342.433.200,00	1.306.513.755,00	(35.919.445,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	-	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.341.083.200,00	1.305.163.755,00	(35.919.445,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.564.529.014,00	10.337.697.857,21	(226.831.156,79)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.740.000,00	91.447.660,00	(2.292.340,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93.740.000,00	91.447.660,00	(2.292.340,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	93.740.000,00	91.447.660,00	(2.292.340,00)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	93.740.000,00	91.447.660,00	(2.292.340,00)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.399.332.086,00	6.217.195.727,00	(182.136.359,00)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.399.332.086,00	6.217.195.727,00	(182.136.359,00)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	6.399.332.086,00	6.217.195.727,00	(182.136.359,00)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01 Belanja Pegawai	6.399.332.086,00	6.217.195.727,00	(182.136.359,00)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	370.744.166,00	367.282.040,00	(3.462.126,00)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	204.235.166,00	201.906.360,00	(2.328.806,00)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1	BELANJA OPERASI	204.235.166,00	201.906.360,00	(2.328.806,00)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1	01 Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	-
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	202.835.166,00	200.506.360,00	(2.328.806,00)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	166.509.000,00	165.375.680,00	(1.133.320,00)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10	5	1	BELANJA OPERASI	166.509.000,00	165.375.680,00	(1.133.320,00)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	166.509.000,00	165.375.680,00	(1.133.320,00)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.645.000,00	274.873.337,00	(1.771.663,00)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.645.000,00	274.873.337,00	(1.771.663,00)

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	276.645.000,00	274.873.337,00	(1.771.663,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	276.645.000,00	274.873.337,00	(1.771.663,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.428.373,00	107.826.600,00	(2.601.773,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.428.373,00	107.826.600,00	(2.601.773,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	6.343.095,00	3.936.150,00	(2.406.945,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1 01	Belanja Pegawai	1.050.000,00	350.000,00	(700.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.293.095,00	3.586.150,00	(1.706.945,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	104.085.278,00	103.890.450,00	(194.828,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.085.278,00	103.890.450,00	(194.828,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.057.999.389,00	2.030.946.297,00	(27.053.092,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.057.999.389,00	2.030.946.297,00	(27.053.092,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	2.057.999.389,00	2.030.946.297,00	(27.053.092,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.057.999.389,00	2.030.946.297,00	(27.053.092,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.255.640.000,00	1.248.126.196,21	(7.513.803,79)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	626.065.000,00	625.837.178,00	(227.822,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	626.065.000,00	625.837.178,00	(227.822,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	626.065.000,00	625.837.178,00	(227.822,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	493.500.000,00	486.398.118,21	(7.101.881,79)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	493.500.000,00	486.398.118,21	(7.101.881,79)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	01		Belanja Pegawai	1.400.000,00	850.000,00	(550.000,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	492.100.000,00	485.548.118,21	(6.551.881,79)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.075.000,00	135.890.900,00	(184.100,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	136.075.000,00	135.890.900,00	(184.100,00)	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	136.075.000,00	135.890.900,00	(184.100,00)	
Jumlah Belanja											18.304.063.966,00	17.926.570.593,21	(377.493.372,79)	
Total Surplus/(Defisit)											(14.339.125.126,00)	(13.668.465.481,21)	670.659.644,79	
0	00	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.000.000,00	202.331.966,00	42.331.966,00	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	160.000.000,00	202.331.966,00	42.331.966,00	
Jumlah Pendapatan									160.000.000,00	202.331.966,00	42.331.966,00	
0	00	2.16.2.20.2.21.04.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31.043.126.258,00	30.485.190.332,00	(557.935.926,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.005.319.361,00	3.976.856.378,00	(28.462.983,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	00			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.005.319.361,00	3.976.856.378,00	(28.462.983,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2.158.616.364,00	2.157.239.037,00	(1.377.327,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	2.158.616.364,00	2.157.239.037,00	(1.377.327,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	5	1 01	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.151.116.364,00	2.149.739.037,00	(1.377.327,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.339.423.328,00	1.320.792.346,00	(18.630.982,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.200.923.328,00	1.183.227.346,00	(17.695.982,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.923.328,00	1.183.227.346,00	(17.695.982,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	2	BELANJA MODAL	138.500.000,00	137.565.000,00	(935.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.500.000,00	137.565.000,00	(935.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06			Pelayanan Informasi Publik	250.664.450,00	243.170.495,00	(7.493.955,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	250.664.450,00	243.170.495,00	(7.493.955,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	250.664.450,00	243.170.495,00	(7.493.955,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	135.415.219,00	134.516.500,00	(898.719,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	135.415.219,00	134.516.500,00	(898.719,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.415.219,00	134.516.500,00	(898.719,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	12				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	121.200.000,00	121.138.000,00	(62.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	121.200.000,00	121.138.000,00	(62.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	121.200.000,00	121.138.000,00	(62.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	19.666.506.560,00	19.620.264.366,00	(46.242.194,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	00				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.565.500.000,00	15.562.394.086,00	(3.105.914,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.952.086,00	(47.914,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.952.086,00	(47.914,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.952.086,00	(47.914,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	15.465.500.000,00	15.462.442.000,00	(3.058.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	15.465.500.000,00	15.462.442.000,00	(3.058.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.465.500.000,00	15.462.442.000,00	(3.058.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	00				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.101.006.560,00	4.057.870.280,00	(43.136.280,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	01				Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.776.480.000,00	2.767.602.332,00	(8.877.668,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.776.480.000,00	2.767.602.332,00	(8.877.668,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.776.480.000,00	2.767.602.332,00	(8.877.668,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	04			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	273.700.000,00	268.499.915,00	(5.200.085,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	273.700.000,00	268.499.915,00	(5.200.085,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	273.700.000,00	268.499.915,00	(5.200.085,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	400.942.000,00	383.660.755,00	(17.281.245,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	400.942.000,00	383.660.755,00	(17.281.245,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.942.000,00	383.660.755,00	(17.281.245,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	180.778.560,00	180.667.778,00	(110.782,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	180.778.560,00	180.667.778,00	(110.782,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	180.778.560,00	180.667.778,00	(110.782,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	114.906.000,00	112.531.000,00	(2.375.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	5	1	BELANJA OPERASI	114.906.000,00	112.531.000,00	(2.375.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.906.000,00	112.531.000,00	(2.375.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	10			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	35.000.000,00	34.908.500,00	(91.500,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.908.500,00	(91.500,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.908.500,00	(91.500,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	11			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	319.200.000,00	310.000.000,00	(9.200.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	11	5	1	BELANJA OPERASI	319.200.000,00	310.000.000,00	(9.200.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	319.200.000,00	310.000.000,00	(9.200.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.371.300.337,00	6.888.069.588,00	(483.230.749,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.000.000,00	134.758.200,00	(241.800,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	135.000.000,00	134.758.200,00	(241.800,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	135.000.000,00	134.758.200,00	(241.800,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	06	5	1	01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	133.800.000,00	133.558.200,00	(241.800,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.380.709.137,00	4.922.646.454,00	(458.062.683,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.380.709.137,00	4.922.646.454,00	(458.062.683,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.380.709.137,00	4.922.646.454,00	(458.062.683,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	5.380.709.137,00	4.922.646.454,00	(458.062.683,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.753.200,00	295.753.200,00	-	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.753.200,00	295.753.200,00	-	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	295.753.200,00	295.753.200,00	-	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	295.753.200,00	295.753.200,00	-	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.000.000,00	15.875.000,00	(2.125.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.000.000,00	15.875.000,00	(2.125.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	11	5	2		BELANJA MODAL	18.000.000,00	15.875.000,00	(2.125.000,00)	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	15.875.000,00	(2.125.000,00)	

Kode Rekening						Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1						2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.102.838.000,00	1.084.420.364,00	(18.417.636,00)
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.102.838.000,00	1.084.420.364,00	(18.417.636,00)
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	03	5 1	BELANJA OPERASI	1.102.838.000,00	1.084.420.364,00	(18.417.636,00)
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.102.838.000,00	1.084.420.364,00	(18.417.636,00)
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.000.000,00	434.616.370,00	(4.383.630,00)
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.608.000,00	168.581.449,00	(2.026.551,00)
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	170.608.000,00	168.581.449,00	(2.026.551,00)
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	170.608.000,00	168.581.449,00	(2.026.551,00)
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.612.000,00	86.582.001,00	(2.029.999,00)
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	88.612.000,00	86.582.001,00	(2.029.999,00)
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09	5 1 01	Belanja Pegawai	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	87.562.000,00	86.582.001,00	(979.999,00)
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	179.780.000,00	179.452.920,00	(327.080,00)
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	10	5 1	BELANJA OPERASI	179.780.000,00	179.452.920,00	(327.080,00)
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	179.780.000,00	179.452.920,00	(327.080,00)
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	00	0.00	00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	125.000.000,00	123.426.700,00	(1.573.300,00)
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	125.000.000,00	123.426.700,00	(1.573.300,00)
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	00		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	123.426.700,00	(1.573.300,00)

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	125.000.000,00	123.426.700,00	(1.573.300,00)	
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	123.426.700,00	(1.573.300,00)	
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	123.426.700,00	(1.573.300,00)	
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	292.872.000,00	284.892.875,00	(7.979.125,00)	
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	292.872.000,00	284.892.875,00	(7.979.125,00)	
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	00			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	292.872.000,00	284.892.875,00	(7.979.125,00)	
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	41.752.000,00	41.639.100,00	(112.900,00)	
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	41.752.000,00	41.639.100,00	(112.900,00)	
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	41.752.000,00	41.639.100,00	(112.900,00)	
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	251.120.000,00	243.253.775,00	(7.866.225,00)	
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	226.120.000,00	219.333.775,00	(6.786.225,00)	
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	226.120.000,00	219.333.775,00	(6.786.225,00)	
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	23.920.000,00	(1.080.000,00)	
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	2	05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	23.920.000,00	(1.080.000,00)	
Jumlah Belanja									31.460.998.258,00	30.893.509.907,00	(567.488.351,00)	
Total Surplus/(Defisit)									(31.300.998.258,00)	(30.691.177.941,00)	609.820.317,00	
0	00	2.16.2.20.2.21.04.0000	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Organisasi : 2.18.3.32.0.00.06 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
0	00	2.18.3.32.0.00.06.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.303.552.247,00	6.981.191.473,00	(322.360.774,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	34.700.000,00	30.371.000,00	(4.329.000,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	02	2.02	00			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	34.700.000,00	30.371.000,00	(4.329.000,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	02	2.02	02			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	34.700.000,00	30.371.000,00	(4.329.000,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	02	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	34.700.000,00	30.371.000,00	(4.329.000,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	02	2.02	02	5	1 01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	-	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	02	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	29.871.000,00	(4.329.000,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	03	0.00	00			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	308.848.200,00	294.344.205,00	(14.503.995,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	03	2.01	00			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	308.848.200,00	294.344.205,00	(14.503.995,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	03	2.01	02			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	308.848.200,00	294.344.205,00	(14.503.995,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	308.848.200,00	294.344.205,00	(14.503.995,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	03	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	308.848.200,00	294.344.205,00	(14.503.995,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	04	0.00	00			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	798.175.500,00	780.764.791,00	(17.410.709,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	04	2.01	00			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	798.175.500,00	780.764.791,00	(17.410.709,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	04	2.01	01			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	227.314.000,00	226.516.500,00	(797.500,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	227.314.000,00	226.516.500,00	(797.500,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	04	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	227.314.000,00	226.516.500,00	(797.500,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	04	2.01	02			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	222.501.500,00	220.811.828,00	(1.689.672,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	04	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	222.501.500,00	220.811.828,00	(1.689.672,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	04	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	222.501.500,00	220.811.828,00	(1.689.672,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	04	2.01	03			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	348.360.000,00	333.436.463,00	(14.923.537,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	04	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	348.360.000,00	333.436.463,00	(14.923.537,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	04	2.01	03	5	1 01	Belanja Pegawai	2.550.000,00	2.550.000,00	-	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	04	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	345.810.000,00	330.886.463,00	(14.923.537,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	462.675.000,00	434.873.708,00	(27.801.292,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	05	2.01	00			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	462.675.000,00	434.873.708,00	(27.801.292,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	05	2.01	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	420.273.500,00	392.741.208,00	(27.532.292,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	05	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	420.273.500,00	392.741.208,00	(27.532.292,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	05	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	420.273.500,00	392.741.208,00	(27.532.292,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	05	2.01	03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	42.401.500,00	42.132.500,00	(269.000,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	05	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	42.401.500,00	42.132.500,00	(269.000,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	05	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.401.500,00	42.132.500,00	(269.000,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	06	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	198.248.500,00	187.863.400,00	(10.385.100,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	06	2.01	00			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.248.500,00	187.863.400,00	(10.385.100,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	06	2.01	01			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	198.248.500,00	187.863.400,00	(10.385.100,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	198.248.500,00	187.863.400,00	(10.385.100,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1	01 Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	-	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	06	2.01	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	197.398.500,00	187.013.400,00	(10.385.100,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.500.905.047,00	5.252.974.369,00	(247.930.678,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.491.000,00	30.468.050,00	(22.950,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.491.000,00	30.468.050,00	(22.950,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	30.491.000,00	30.468.050,00	(22.950,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.01	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	30.491.000,00	30.468.050,00	(22.950,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.009.723.000,00	3.813.093.136,00	(196.629.864,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.009.723.000,00	3.813.093.136,00	(196.629.864,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.009.723.000,00	3.813.093.136,00	(196.629.864,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01 Belanja Pegawai	4.009.723.000,00	3.813.093.136,00	(196.629.864,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.233.794,00	274.192.058,00	(41.736,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.233.794,00	274.192.058,00	(41.736,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	274.233.794,00	274.192.058,00	(41.736,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	274.233.794,00	274.192.058,00	(41.736,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.700.000,00	57.996.900,00	(703.100,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.700.000,00	57.996.900,00	(703.100,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	58.700.000,00	57.996.900,00	(703.100,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.07	10	5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.700.000,00	57.996.900,00	(703.100,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	753.933.953,00	726.670.083,00	(27.263.870,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	753.933.953,00	726.670.083,00	(27.263.870,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	753.933.953,00	726.670.083,00	(27.263.870,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.08	03	5	1	01 Belanja Pegawai	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.08	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	752.433.953,00	726.670.083,00	(25.763.870,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.823.300,00	350.554.142,00	(23.269.158,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.397.800,00	50.578.142,00	(2.819.658,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	53.397.800,00	50.578.142,00	(2.819.658,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	53.397.800,00	50.578.142,00	(2.819.658,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.510.000,00	246.575.000,00	(19.935.000,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	266.510.000,00	246.575.000,00	(19.935.000,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.09	09	5	1	01 Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	-	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.09	09	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	265.160.000,00	245.225.000,00	(19.935.000,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.915.500,00	53.401.000,00	(514.500,00)	
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	53.915.500,00	53.401.000,00	(514.500,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	18	2.18.3.32.0.00.06.0000	01	2.09	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	53.915.500,00	53.401.000,00	(514.500,00)	
3	32	2.18.3.32.0.00.06.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	-	
3	32	2.18.3.32.0.00.06.0000	03	0.00	00					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	-	
3	32	2.18.3.32.0.00.06.0000	03	2.01	00					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	
3	32	2.18.3.32.0.00.06.0000	03	2.01	05					Penyuluhan Transmigrasi	-	-	-	
3	32	2.18.3.32.0.00.06.0000	03	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	-	-	-	
3	32	2.18.3.32.0.00.06.0000	03	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
3	32	2.18.3.32.0.00.06.0000	03	2.01	06					Pelatihan Transmigrasi	-	-	-	
3	32	2.18.3.32.0.00.06.0000	03	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	-	-	-	
3	32	2.18.3.32.0.00.06.0000	03	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
Jumlah Belanja											7.303.552.247,00	6.981.191.473,00	(322.360.774,00)	
Total Surplus/(Defisit)											7.303.552.247,00	6.981.191.473,00	(322.360.774,00)	
0	00	2.18.3.32.0.00.06.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
 Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.000.000,00	1.093.964.400,00	(106.035.600,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	1.200.000.000,00	1.093.964.400,00	(106.035.600,00)	
Jumlah Pendapatan									1.200.000.000,00	1.093.964.400,00	(106.035.600,00)	
0	00	2.22.2.19.3.26.04.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.968.389.861,00	7.867.451.678,90	(100.938.182,10)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	475.000.000,00	469.713.928,00	(5.286.072,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.01	00			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	475.000.000,00	469.713.928,00	(5.286.072,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.01	08			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	475.000.000,00	469.713.928,00	(5.286.072,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	475.000.000,00	469.713.928,00	(5.286.072,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.01	08	5	1 01	Belanja Pegawai	4.800.000,00	2.200.000,00	(2.600.000,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	470.200.000,00	467.513.928,00	(2.686.072,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.493.389.861,00	7.397.737.750,90	(95.652.110,10)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.01	00			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.015.546.361,00	2.982.087.275,90	(33.459.085,10)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.01	03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3.015.546.361,00	2.982.087.275,90	(33.459.085,10)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	3.015.546.361,00	2.982.087.275,90	(33.459.085,10)	

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.01	03	5	1	01	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.003.546.361,00	2.970.087.275,90	(33.459.085,10)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.02	00				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.658.000.000,00	1.655.711.000,00	(2.289.000,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.02	02				Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1.658.000.000,00	1.655.711.000,00	(2.289.000,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.658.000.000,00	1.655.711.000,00	(2.289.000,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.150.000,00	(50.000,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.656.800.000,00	1.654.561.000,00	(2.239.000,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.04	00				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.203.843.500,00	2.144.482.100,00	(59.361.400,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.04	02				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.203.843.500,00	2.144.482.100,00	(59.361.400,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.203.843.500,00	2.144.482.100,00	(59.361.400,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.04	02	5	1	05	Belanja Hibah	2.203.843.500,00	2.144.482.100,00	(59.361.400,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.05	00				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	616.000.000,00	615.457.375,00	(542.625,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.05	01				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	616.000.000,00	615.457.375,00	(542.625,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	616.000.000,00	615.457.375,00	(542.625,00)	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.05	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2	19	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	614.800.000,00	614.257.375,00	(542.625,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	00	0.00	00				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.900.774.689,00	8.703.816.884,00	(196.957.805,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.892.700.000,00	1.885.539.500,00	(7.160.500,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.02	00				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.892.700.000,00	1.885.539.500,00	(7.160.500,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.02	01				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.622.700.000,00	1.615.824.500,00	(6.875.500,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.622.700.000,00	1.615.824.500,00	(6.875.500,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.02	01	5	1	01 Belanja Pegawai	13.200.000,00	12.800.000,00	(400.000,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.02	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	1.609.500.000,00	1.603.024.500,00	(6.475.500,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.02	03			Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	270.000.000,00	269.715.000,00	(285.000,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	270.000.000,00	269.715.000,00	(285.000,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.02	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	269.715.000,00	(285.000,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	50.000.000,00	49.883.250,00	(116.750,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.01	00			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.883.250,00	(116.750,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.01	01			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50.000.000,00	49.883.250,00	(116.750,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.883.250,00	(116.750,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.01	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.883.250,00	(116.750,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	05	0.00	00			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	50.000.000,00	49.842.900,00	(157.100,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	05	2.02	00			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.842.900,00	(157.100,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	05	2.02	02			Pengembangan Cagar Budaya	50.000.000,00	49.842.900,00	(157.100,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	05	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.842.900,00	(157.100,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	05	2.02	02	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.842.900,00	(157.100,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.908.074.689,00	6.718.551.234,00	(189.523.455,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.631.600,00	(368.400,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	29.631.600,00	(368.400,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.631.600,00	(368.400,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.631.600,00	(368.400,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.400.232.397,00	4.232.010.370,00	(168.222.027,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.400.232.397,00	4.232.010.370,00	(168.222.027,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.400.232.397,00	4.232.010.370,00	(168.222.027,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	4.400.232.397,00	4.232.010.370,00	(168.222.027,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.000.000,00	249.536.743,00	(463.257,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	249.536.743,00	(463.257,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.536.743,00	(463.257,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	249.536.743,00	(463.257,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.800.000,00	17.300.000,00	(500.000,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.800.000,00	17.300.000,00	(500.000,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	17.800.000,00	17.300.000,00	(500.000,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.800.000,00	17.300.000,00	(500.000,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.065.042.292,00	2.045.794.390,00	(19.247.902,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.065.042.292,00	2.045.794.390,00	(19.247.902,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	2.065.042.292,00	2.045.794.390,00	(19.247.902,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.08	03	5	1 01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	-	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.08	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.064.292.292,00	2.045.044.390,00	(19.247.902,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000,00	144.278.131,00	(721.869,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000,00	54.299.616,00	(700.384,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.299.616,00	(700.384,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.09	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.299.616,00	(700.384,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.988.515,00	(11.485,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.988.515,00	(11.485,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.09	09	5	1	01 Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	-	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.09	09	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	49.238.515,00	(11.485,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	39.990.000,00	(10.000,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.990.000,00	(10.000,00)	
2	22	2.22.2.19.3.26.04.0000	01	2.09	10	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.990.000,00	(10.000,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.856.446.866,00	1.852.993.139,00	(3.453.727,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	437.660.866,00	436.897.915,00	(762.951,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.03	00			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	437.660.866,00	436.897.915,00	(762.951,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.03	03			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.485.250,00	(514.750,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.485.250,00	(514.750,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.03	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.485.250,00	(514.750,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.03	06			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	387.660.866,00	387.412.665,00	(248.201,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.03	06	5	1	BELANJA OPERASI	387.660.866,00	387.412.665,00	(248.201,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.03	06	5	1	01 Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	-	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	02	2.03	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	386.460.866,00	386.212.665,00	(248.201,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	0.00	00					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.140.786.000,00	1.138.444.624,00	(2.341.376,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.01	00					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.140.786.000,00	1.138.444.624,00	(2.341.376,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.01	02					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.140.786.000,00	1.138.444.624,00	(2.341.376,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.140.786.000,00	1.138.444.624,00	(2.341.376,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	03	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.140.786.000,00	1.138.444.624,00	(2.341.376,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	05	0.00	00					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	278.000.000,00	277.650.600,00	(349.400,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	05	2.01	00					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	278.000.000,00	277.650.600,00	(349.400,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	05	2.01	06					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	278.000.000,00	277.650.600,00	(349.400,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	05	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	278.000.000,00	277.650.600,00	(349.400,00)	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	05	2.01	06	5	1	01		Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
3	26	2.22.2.19.3.26.04.0000	05	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	276.800.000,00	276.450.600,00	(349.400,00)	
Jumlah Belanja											18.725.611.416,00	18.424.261.701,90	(301.349.714,10)	
Total Surplus/(Defisit)											(17.525.611.416,00)	(17.330.297.301,90)	195.314.114,10	
0	00	2.22.2.19.3.26.04.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
0	00	2.23.2.24.0.00.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.241.451.423,00	5.778.506.417,40	(462.945.005,60)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.015.899.000,00	988.000.144,40	(27.898.855,60)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	00			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	357.840.000,00	352.989.144,40	(4.850.855,60)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	291.040.000,00	286.369.994,40	(4.670.005,60)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	291.040.000,00	286.369.994,40	(4.670.005,60)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	291.040.000,00	286.369.994,40	(4.670.005,60)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	66.800.000,00	66.619.150,00	(180.850,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.211.560,00	1.150.000,00	(61.560,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.211.560,00	1.150.000,00	(61.560,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	5	2	BELANJA MODAL	65.588.440,00	65.469.150,00	(119.290,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.588.440,00	65.469.150,00	(119.290,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	00			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	658.059.000,00	635.011.000,00	(23.048.000,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	558.059.000,00	541.691.000,00	(16.368.000,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	558.059.000,00	541.691.000,00	(16.368.000,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	558.059.000,00	541.691.000,00	(16.368.000,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	04			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	100.000.000,00	93.320.000,00	(6.680.000,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	93.320.000,00	(6.680.000,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	93.320.000,00	(6.680.000,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	0.00	00					PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	128.037.656,00	103.629.500,00	(24.408.156,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.01	00					Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	128.037.656,00	103.629.500,00	(24.408.156,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.01	01					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	106.849.718,00	85.604.500,00	(21.245.218,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	106.849.718,00	85.604.500,00	(21.245.218,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	106.849.718,00	85.604.500,00	(21.245.218,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.01	02					Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	21.187.938,00	18.025.000,00	(3.162.938,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	21.187.938,00	18.025.000,00	(3.162.938,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	21.187.938,00	18.025.000,00	(3.162.938,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.097.514.767,00	4.686.876.773,00	(410.637.994,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	00					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.418.000,00	39.826.600,00	(2.591.400,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.418.000,00	39.826.600,00	(2.591.400,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	42.418.000,00	39.826.600,00	(2.591.400,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	42.418.000,00	39.826.600,00	(2.591.400,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.040.291.218,00	3.723.966.456,00	(316.324.762,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.040.291.218,00	3.723.966.456,00	(316.324.762,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	4.040.291.218,00	3.723.966.456,00	(316.324.762,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	4.040.291.218,00	3.723.966.456,00	(316.324.762,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	00					Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.954.000,00	147.321.811,00	(5.632.189,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.954.000,00	147.321.811,00	(5.632.189,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	152.954.000,00	147.321.811,00	(5.632.189,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	152.954.000,00	147.321.811,00	(5.632.189,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.210.000,00	11.400.000,00	(810.000,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.210.000,00	11.400.000,00	(810.000,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	2			BELANJA MODAL	12.210.000,00	11.400.000,00	(810.000,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.210.000,00	11.400.000,00	(810.000,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.950.000,00	539.290.440,00	(69.659.560,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	608.950.000,00	539.290.440,00	(69.659.560,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	608.950.000,00	539.290.440,00	(69.659.560,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	608.950.000,00	539.290.440,00	(69.659.560,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.691.549,00	225.071.466,00	(15.620.083,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.903.780,00	80.504.120,00	(2.399.660,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	82.903.780,00	80.504.120,00	(2.399.660,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	82.903.780,00	80.504.120,00	(2.399.660,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.378.940,00	90.395.146,00	(3.983.794,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	94.378.940,00	90.395.146,00	(3.983.794,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	94.378.940,00	90.395.146,00	(3.983.794,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.408.829,00	54.172.200,00	(9.236.629,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	63.408.829,00	54.172.200,00	(9.236.629,00)	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	63.408.829,00	54.172.200,00	(9.236.629,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	868.470.773,00	846.863.907,00	(21.606.866,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	705.708.673,00	688.097.607,00	(17.611.066,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	00					Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	363.150.000,00	349.455.907,00	(13.694.093,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02					Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	363.150.000,00	349.455.907,00	(13.694.093,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	363.150.000,00	349.455.907,00	(13.694.093,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	363.150.000,00	349.455.907,00	(13.694.093,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	00					Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	342.558.673,00	338.641.700,00	(3.916.973,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	02					Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	342.558.673,00	338.641.700,00	(3.916.973,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	342.558.673,00	338.641.700,00	(3.916.973,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	342.558.673,00	338.641.700,00	(3.916.973,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	0.00	00					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	162.762.100,00	158.766.300,00	(3.995.800,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.01	00					Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	162.762.100,00	158.766.300,00	(3.995.800,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.01	01					Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	81.211.400,00	78.057.100,00	(3.154.300,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	81.211.400,00	78.057.100,00	(3.154.300,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	81.211.400,00	78.057.100,00	(3.154.300,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.01	02					Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	81.550.700,00	80.709.200,00	(841.500,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	81.550.700,00	80.709.200,00	(841.500,00)	
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	81.550.700,00	80.709.200,00	(841.500,00)	
Jumlah Belanja											7.109.922.196,00	6.625.370.324,40	(484.551.871,60)	
Total Surplus/(Defisit)											(7.109.922.196,00)	(6.625.370.324,00)	484.551.872,00	
0	00	2.23.2.24.0.00.02.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01 Dinas Perdagangan

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.031.984.300,00	7.527.897.647,00	2.495.913.347,00	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	5.031.984.300,00	7.527.897.647,00	2.495.913.347,00	
Jumlah Pendapatan									5.031.984.300,00	7.527.897.647,00	2.495.913.347,00	
0	00	3.30.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	16.352.788.030,00	15.151.606.033,00	(1.201.181.997,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	267.374.400,00	267.325.700,00	(48.700,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	267.374.400,00	267.325.700,00	(48.700,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	267.374.400,00	267.325.700,00	(48.700,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	267.374.400,00	267.325.700,00	(48.700,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	267.374.400,00	267.325.700,00	(48.700,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.373.887.270,00	4.266.057.440,00	(107.829.830,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	861.300.070,00	798.171.840,00	(63.128.230,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	61.046.000,00	59.663.800,00	(1.382.200,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	61.046.000,00	59.663.800,00	(1.382.200,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1 01	Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	-	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.696.000,00	59.313.800,00	(1.382.200,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	800.254.070,00	738.508.040,00	(61.746.030,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	721.254.070,00	659.975.540,00	(61.278.530,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1 01	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	-	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	720.554.070,00	659.275.540,00	(61.278.530,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	2	BELANJA MODAL	79.000.000,00	78.532.500,00	(467.500,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.000.000,00	78.532.500,00	(467.500,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.512.587.200,00	3.467.885.600,00	(44.701.600,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	210.310.000,00	209.090.000,00	(1.220.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	210.310.000,00	209.090.000,00	(1.220.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	210.310.000,00	209.090.000,00	(1.220.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.302.277.200,00	3.258.795.600,00	(43.481.600,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	3.302.277.200,00	3.258.795.600,00	(43.481.600,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.302.277.200,00	3.258.795.600,00	(43.481.600,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	250.257.000,00	249.511.500,00	(745.500,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	00			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	232.264.000,00	231.818.500,00	(445.500,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	96.307.000,00	96.181.000,00	(126.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	96.307.000,00	96.181.000,00	(126.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	96.307.000,00	96.181.000,00	(126.000,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	03		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	135.957.000,00	135.637.500,00	(319.500,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	135.957.000,00	135.637.500,00	(319.500,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.811.000,00	36.491.500,00	(319.500,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	03	5 1 04	Belanja Subsidi	99.146.000,00	99.146.000,00	-	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	00		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.993.000,00	17.693.000,00	(300.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02		Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	17.993.000,00	17.693.000,00	(300.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5 1	BELANJA OPERASI	17.993.000,00	17.693.000,00	(300.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.993.000,00	17.693.000,00	(300.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	235.684.724,00	230.943.400,00	(4.741.324,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	00		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	235.684.724,00	230.943.400,00	(4.741.324,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	226.416.724,00	222.043.400,00	(4.373.324,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	226.416.724,00	222.043.400,00	(4.373.324,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	226.416.724,00	222.043.400,00	(4.373.324,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	9.268.000,00	8.900.000,00	(368.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	9.268.000,00	8.900.000,00	(368.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.268.000,00	8.900.000,00	(368.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	07	0.00	00		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	309.031.550,00	305.193.000,00	(3.838.550,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	00		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	309.031.550,00	305.193.000,00	(3.838.550,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	129.031.550,00	125.193.000,00	(3.838.550,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	129.031.550,00	125.193.000,00	(3.838.550,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	129.031.550,00	125.193.000,00	(3.838.550,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03					Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.916.553.086,00	9.832.574.993,00	(1.083.978.093,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	894.000,00	894.000,00	-	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	894.000,00	894.000,00	-	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	894.000,00	894.000,00	-	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	894.000,00	894.000,00	-	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.353.202.622,00	8.336.798.151,00	(1.016.404.471,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.353.202.622,00	8.336.798.151,00	(1.016.404.471,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	9.353.202.622,00	8.336.798.151,00	(1.016.404.471,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	9.353.202.622,00	8.336.798.151,00	(1.016.404.471,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	00					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.544.700,00	61.157.000,00	(387.700,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	61.544.700,00	61.157.000,00	(387.700,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1			BELANJA OPERASI	61.544.700,00	61.157.000,00	(387.700,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1	01		Belanja Pegawai	350.000,00	300.000,00	(50.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	61.194.700,00	60.857.000,00	(337.700,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00					Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.443.200,00	291.443.200,00	-	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.443.200,00	291.443.200,00	-	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	291.443.200,00	291.443.200,00	-	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	291.443.200,00	291.443.200,00	-	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.168.000,00	58.913.200,00	(5.254.800,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.168.000,00	58.913.200,00	(5.254.800,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2			BELANJA MODAL	64.168.000,00	58.913.200,00	(5.254.800,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.168.000,00	58.913.200,00	(5.254.800,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.249.250,00	713.883.400,00	(40.365.850,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	754.249.250,00	713.883.400,00	(40.365.850,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	754.249.250,00	713.883.400,00	(40.365.850,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	01		Belanja Pegawai	7.750.000,00	5.100.000,00	(2.650.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	746.499.250,00	708.783.400,00	(37.715.850,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.051.314,00	369.486.042,00	(21.565.272,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	238.701.714,00	229.311.692,00	(9.390.022,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	238.701.714,00	229.311.692,00	(9.390.022,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	238.701.714,00	229.311.692,00	(9.390.022,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.696.200,00	64.619.200,00	(7.077.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	71.696.200,00	64.619.200,00	(7.077.000,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	71.696.200,00	64.619.200,00	(7.077.000,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.653.400,00	75.555.150,00	(5.098.250,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	80.653.400,00	75.555.150,00	(5.098.250,00)	
3	30	3.30.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	80.653.400,00	75.555.150,00	(5.098.250,00)	
Jumlah Belanja											16.352.788.030,00	15.151.606.033,00	(1.201.181.997,00)	
Total Surplus/(Defisit)											(11.320.803.730,00)	(7.623.708.386,00)	3.697.095.344,00	
0	00	3.30.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
0	00	4.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			SEKRETARIAT DAERAH	65.298.458.757,00	59.866.678.986,10	(5.431.779.770,90)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.094.488.817,00	15.172.637.195,00	(921.851.622,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00			Administrasi Tata Pemerintahan	1.824.527.600,00	1.771.689.345,00	(52.838.255,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01			Penataan Administrasi Pemerintahan	1.414.527.600,00	1.364.975.020,00	(49.552.580,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.414.527.600,00	1.364.975.020,00	(49.552.580,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	01 Belanja Pegawai	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	1.413.527.600,00	1.364.025.020,00	(49.502.580,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	410.000.000,00	406.714.325,00	(3.285.675,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	410.000.000,00	406.714.325,00	(3.285.675,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	410.000.000,00	406.714.325,00	(3.285.675,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	13.034.120.929,00	12.197.429.600,00	(836.691.329,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13.034.120.929,00	12.197.429.600,00	(836.691.329,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	12.859.120.929,00	12.056.429.600,00	(802.691.329,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	2.357.455.929,00	1.961.164.600,00	(396.291.329,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	05 Belanja Hibah	3.726.465.000,00	3.526.465.000,00	(200.000.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	06 Belanja Bantuan Sosial	6.775.200.000,00	6.568.800.000,00	(206.400.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	2	BELANJA MODAL	175.000.000,00	141.000.000,00	(34.000.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	2	05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	175.000.000,00	141.000.000,00	(34.000.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	890.840.288,00	868.234.850,00	(22.605.438,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	390.500.000,00	376.100.000,00	(14.400.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	390.500.000,00	376.100.000,00	(14.400.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	390.500.000,00	376.100.000,00	(14.400.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02			Fasilitasi Bantuan Hukum	213.632.778,00	206.675.725,00	(6.957.053,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	213.632.778,00	206.675.725,00	(6.957.053,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	213.632.778,00	206.675.725,00	(6.957.053,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	286.707.510,00	285.459.125,00	(1.248.385,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	286.707.510,00	285.459.125,00	(1.248.385,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	286.707.510,00	285.459.125,00	(1.248.385,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	00			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	345.000.000,00	335.283.400,00	(9.716.600,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	345.000.000,00	335.283.400,00	(9.716.600,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	345.000.000,00	335.283.400,00	(9.716.600,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	345.000.000,00	335.283.400,00	(9.716.600,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	839.742.822,00	771.431.271,00	(68.311.551,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	336.769.600,00	293.269.100,00	(43.500.500,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	246.999.600,00	218.303.100,00	(28.696.500,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	246.999.600,00	218.303.100,00	(28.696.500,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	246.999.600,00	218.303.100,00	(28.696.500,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	89.770.000,00	74.966.000,00	(14.804.000,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	89.770.000,00	74.966.000,00	(14.804.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	89.770.000,00	74.966.000,00	(14.804.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	107.011.660,00	106.999.451,00	(12.209,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	31.496.300,00	31.496.300,00	-	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	31.496.300,00	31.496.300,00	-	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	31.496.300,00	31.496.300,00	-	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	75.515.360,00	75.503.151,00	(12.209,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	75.515.360,00	75.503.151,00	(12.209,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	01		Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	-	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	74.765.360,00	74.753.151,00	(12.209,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	00					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	197.831.467,00	197.666.420,00	(165.047,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	124.454.027,00	124.341.020,00	(113.007,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	124.454.027,00	124.341.020,00	(113.007,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	124.454.027,00	124.341.020,00	(113.007,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	73.377.440,00	73.325.400,00	(52.040,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1			BELANJA OPERASI	73.377.440,00	73.325.400,00	(52.040,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1	01		Belanja Pegawai	-	-	-	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	73.377.440,00	73.325.400,00	(52.040,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	00					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	198.130.095,00	173.496.300,00	(24.633.795,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	198.130.095,00	173.496.300,00	(24.633.795,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	198.130.095,00	173.496.300,00	(24.633.795,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	198.130.095,00	173.496.300,00	(24.633.795,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.364.227.118,00	43.922.610.520,10	(4.441.616.597,90)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.358.960,00	54.795.950,00	(8.563.010,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.358.960,00	54.795.950,00	(8.563.010,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	63.358.960,00	54.795.950,00	(8.563.010,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.358.960,00	54.795.950,00	(8.563.010,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.195.811.705,00	15.323.023.813,00	(2.872.787.892,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.195.811.705,00	15.323.023.813,00	(2.872.787.892,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	18.195.811.705,00	15.323.023.813,00	(2.872.787.892,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	18.195.811.705,00	15.323.023.813,00	(2.872.787.892,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.537.085.000,00	7.182.704.000,00	(354.381.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.537.085.000,00	7.182.704.000,00	(354.381.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1	BELANJA OPERASI	7.537.085.000,00	7.182.704.000,00	(354.381.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1 01	Belanja Pegawai	9.050.000,00	9.050.000,00	-	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.528.035.000,00	7.173.654.000,00	(354.381.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.173.802.142,00	5.003.226.591,10	(170.575.550,90)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	271.500.000,00	249.471.300,10	(22.028.699,90)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	271.500.000,00	249.471.300,10	(22.028.699,90)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	01 Belanja Pegawai	1.150.000,00	350.000,00	(800.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	270.350.000,00	249.121.300,10	(21.228.699,90)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.902.302.142,00	4.753.755.291,00	(148.546.851,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	4.902.302.142,00	4.753.755.291,00	(148.546.851,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	4.902.302.142,00	4.753.755.291,00	(148.546.851,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.838.247.255,00	1.805.334.774,00	(32.912.481,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.268.005.000,00	1.266.074.930,00	(1.930.070,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	4.900.000,00	(200.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	5	1	01 Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.200.000,00	(200.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	5	2	BELANJA MODAL	1.262.905.000,00	1.261.174.930,00	(1.730.070,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.262.905.000,00	1.261.174.930,00	(1.730.070,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.876.926,00	197.289.900,00	(2.587.026,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	-	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	01 Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	-	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	198.776.926,00	196.189.900,00	(2.587.026,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.776.926,00	196.189.900,00	(2.587.026,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	370.365.329,00	341.969.944,00	(28.395.385,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	01 Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	-	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	-	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	368.265.329,00	339.869.944,00	(28.395.385,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	368.265.329,00	339.869.944,00	(28.395.385,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.617.696.798,00	6.017.041.230,00	(600.655.568,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.617.696.798,00	6.017.041.230,00	(600.655.568,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	6.617.696.798,00	6.017.041.230,00	(600.655.568,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	01 Belanja Pegawai	4.800.000,00	3.750.000,00	(1.050.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	6.612.896.798,00	6.013.291.230,00	(599.605.568,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.849.537.776,00	2.785.210.089,00	(64.327.687,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.291.618.276,00	1.278.439.194,00	(13.179.082,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.291.618.276,00	1.278.439.194,00	(13.179.082,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	01 Belanja Pegawai	1.350.000,00	-	(1.350.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	1.290.268.276,00	1.278.439.194,00	(11.829.082,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.200.234.000,00	1.178.156.799,00	(22.077.201,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.200.234.000,00	1.178.156.799,00	(22.077.201,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	01		Belanja Pegawai	4.750.000,00	4.750.000,00	-	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.195.484.000,00	1.173.406.799,00	(22.077.201,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	357.685.500,00	328.614.096,00	(29.071.404,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	357.685.500,00	328.614.096,00	(29.071.404,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	01		Belanja Pegawai	750.000,00	-	(750.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	356.935.500,00	328.614.096,00	(28.321.404,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	00					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	741.634.672,00	728.994.618,00	(12.640.054,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	201.634.672,00	199.254.618,00	(2.380.054,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01	5	1			BELANJA OPERASI	201.634.672,00	199.254.618,00	(2.380.054,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01	5	1	01		Belanja Pegawai	201.634.672,00	199.254.618,00	(2.380.054,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	04					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	540.000.000,00	529.740.000,00	(10.260.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	04	5	1			BELANJA OPERASI	540.000.000,00	529.740.000,00	(10.260.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	04	5	1	01		Belanja Pegawai	540.000.000,00	529.740.000,00	(10.260.000,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	00					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.000.000.000,00	1.824.871.776,00	(175.128.224,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.100.000.000,00	1.060.403.577,00	(39.596.423,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.100.000.000,00	1.060.403.577,00	(39.596.423,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	1.060.403.577,00	(39.596.423,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	02					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	575.000.000,00	565.978.035,00	(9.021.965,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	02	5	1			BELANJA OPERASI	575.000.000,00	565.978.035,00	(9.021.965,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	575.000.000,00	565.978.035,00	(9.021.965,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	03					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	325.000.000,00	198.490.164,00	(126.509.836,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	03	5	1			BELANJA OPERASI	325.000.000,00	198.490.164,00	(126.509.836,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	198.490.164,00	(126.509.836,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	00					Penataan Organisasi	1.365.275.110,00	1.343.888.679,00	(21.386.431,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	337.871.000,00	331.904.100,00	(5.966.900,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01	5	1			BELANJA OPERASI	337.871.000,00	331.904.100,00	(5.966.900,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	337.871.000,00	331.904.100,00	(5.966.900,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	647.906.630,00	635.710.506,00	(12.196.124,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	1			BELANJA OPERASI	647.906.630,00	635.710.506,00	(12.196.124,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	647.906.630,00	635.710.506,00	(12.196.124,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	379.497.480,00	376.274.073,00	(3.223.407,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1			BELANJA OPERASI	379.497.480,00	376.274.073,00	(3.223.407,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1	01		Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	-	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	379.147.480,00	375.924.073,00	(3.223.407,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	00					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.981.777.700,00	1.853.519.000,00	(128.258.700,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01					Fasilitasi Keprotokolan	1.981.777.700,00	1.853.519.000,00	(128.258.700,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.981.777.700,00	1.853.519.000,00	(128.258.700,00)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	01		Belanja Pegawai	13.100.000,00	8.800.000,00	(4.300.000,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.968.677.700,00	1.844.719.000,00	(123.958.700,00)	
										Jumlah Belanja	65.298.458.757,00	59.866.678.986,10	(5.431.779.770,90)	
										Total Surplus/(Defisit)	(65.298.458.757,00)	(59.726.706.086,10)	5.571.752.670,90	
0	00	4.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
0	00	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			SEKRETARIAT DPRD	46.685.464.554,00	42.828.880.444,00	(3.856.584.110,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.823.981.365,00	14.678.231.395,00	(2.145.749.970,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	9.308.607.600,00	7.859.209.274,00	(1.449.398.326,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.392.219.960,00	2.954.427.849,00	(437.792.111,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	3.392.219.960,00	2.954.427.849,00	(437.792.111,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	01 Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	-	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	3.391.369.960,00	2.953.577.849,00	(437.792.111,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	5.916.387.640,00	4.904.781.425,00	(1.011.606.215,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	5.916.387.640,00	4.904.781.425,00	(1.011.606.215,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	5.916.387.640,00	4.904.781.425,00	(1.011.606.215,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00			Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.416.698.000,00	1.316.006.100,00	(100.691.900,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03			Pembahasan APBD	1.416.698.000,00	1.316.006.100,00	(100.691.900,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	1.416.698.000,00	1.316.006.100,00	(100.691.900,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	1.416.698.000,00	1.316.006.100,00	(100.691.900,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	502.960.349,00	478.315.200,00	(24.645.149,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	223.112.793,00	216.346.850,00	(6.765.943,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	5	1	BELANJA OPERASI	223.112.793,00	216.346.850,00	(6.765.943,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	223.112.793,00	216.346.850,00	(6.765.943,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07					Pengawasan Penggunaan Anggaran	279.847.556,00	261.968.350,00	(17.879.206,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	1			BELANJA OPERASI	279.847.556,00	261.968.350,00	(17.879.206,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	279.847.556,00	261.968.350,00	(17.879.206,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	00					Peningkatan Kapasitas DPRD	4.615.273.016,00	4.093.360.721,00	(521.912.295,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02					Pendalaman Tugas DPRD	2.104.590.000,00	1.796.530.305,00	(308.059.695,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1			BELANJA OPERASI	2.104.590.000,00	1.796.530.305,00	(308.059.695,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.104.590.000,00	1.796.530.305,00	(308.059.695,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.359.356.800,00	1.190.166.001,00	(169.190.799,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1			BELANJA OPERASI	1.359.356.800,00	1.190.166.001,00	(169.190.799,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1	01		Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.357.856.800,00	1.188.666.001,00	(169.190.799,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	07					Penyusunan Program Kerja DPRD	1.151.326.216,00	1.106.664.415,00	(44.661.801,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	07	5	1			BELANJA OPERASI	1.151.326.216,00	1.106.664.415,00	(44.661.801,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.151.326.216,00	1.106.664.415,00	(44.661.801,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	00					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	980.442.400,00	931.340.100,00	(49.102.300,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03					Pelaksanaan Reses	980.442.400,00	931.340.100,00	(49.102.300,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1			BELANJA OPERASI	980.442.400,00	931.340.100,00	(49.102.300,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1	01		Belanja Pegawai	1.700.000,00	-	(1.700.000,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	978.742.400,00	931.340.100,00	(47.402.300,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.861.483.189,00	28.150.649.049,00	(1.710.834.140,00)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.329.977,00	75.199.329,00	(130.648,00)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.329.977,00	75.199.329,00	(130.648,00)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	75.329.977,00	75.199.329,00	(130.648,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	-	-	-
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.329.977,00	75.199.329,00	(130.648,00)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.098.532.624,00	2.939.801.309,00	(158.731.315,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.098.532.624,00	2.939.801.309,00	(158.731.315,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.098.532.624,00	2.939.801.309,00	(158.731.315,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.096.532.624,00	2.938.151.309,00	(158.381.315,00)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.650.000,00	(350.000,00)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	292.157.667,00	211.204.000,00	(80.953.667,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	63.946.212,00	53.504.000,00	(10.442.212,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1	BELANJA OPERASI	63.946.212,00	53.504.000,00	(10.442.212,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.946.212,00	53.504.000,00	(10.442.212,00)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	228.211.455,00	157.700.000,00	(70.511.455,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10	5	1	BELANJA OPERASI	228.211.455,00	157.700.000,00	(70.511.455,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	228.211.455,00	157.700.000,00	(70.511.455,00)
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.387.997.258,00	1.380.425.098,00	(7.572.160,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.387.997.258,00	1.380.425.098,00	(7.572.160,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	1.387.997.258,00	1.380.425.098,00	(7.572.160,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.387.997.258,00	1.380.425.098,00	(7.572.160,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	232.608.000,00	183.367.000,00	(49.241.000,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	232.608.000,00	183.367.000,00	(49.241.000,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1			BELANJA OPERASI	47.175.000,00	32.440.000,00	(14.735.000,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	47.175.000,00	32.440.000,00	(14.735.000,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2			BELANJA MODAL	185.433.000,00	150.927.000,00	(34.506.000,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.433.000,00	150.927.000,00	(34.506.000,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.774.536.442,00	2.436.195.297,00	(338.341.145,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.774.536.442,00	2.436.195.297,00	(338.341.145,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	2.774.536.442,00	2.436.195.297,00	(338.341.145,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	01		Belanja Pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	-	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.763.736.442,00	2.425.395.297,00	(338.341.145,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.616.253,00	650.513.016,00	(132.103.237,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	308.788.898,00	256.021.138,00	(52.767.760,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	308.788.898,00	256.021.138,00	(52.767.760,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	308.788.898,00	256.021.138,00	(52.767.760,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	289.844.450,00	261.800.857,00	(28.043.593,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	289.844.450,00	261.800.857,00	(28.043.593,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	289.844.450,00	261.800.857,00	(28.043.593,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.982.905,00	132.691.021,00	(51.291.884,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	183.982.905,00	132.691.021,00	(51.291.884,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	183.982.905,00	132.691.021,00	(51.291.884,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	00					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	15.370.742.237,00	14.574.835.880,00	(795.906.357,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.050.763.217,00	14.378.779.980,00	(671.983.237,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	5	1			BELANJA OPERASI	15.050.763.217,00	14.378.779.980,00	(671.983.237,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	5	1	01		Belanja Pegawai	15.048.063.217,00	14.376.579.980,00	(671.483.237,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.200.000,00	(500.000,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	253.979.020,00	146.917.500,00	(107.061.520,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02	5	1			BELANJA OPERASI	253.979.020,00	146.917.500,00	(107.061.520,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	253.979.020,00	146.917.500,00	(107.061.520,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	03					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	66.000.000,00	49.138.400,00	(16.861.600,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	03	5	1			BELANJA OPERASI	66.000.000,00	49.138.400,00	(16.861.600,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	03	5	1	01		Belanja Pegawai	66.000.000,00	49.138.400,00	(16.861.600,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	00					Layanan Administrasi DPRD	5.846.962.731,00	5.699.108.120,00	(147.854.611,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	02					Fasilitasi Fraksi DPRD	22.397.170,00	16.373.200,00	(6.023.970,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	02	5	1			BELANJA OPERASI	22.397.170,00	16.373.200,00	(6.023.970,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	22.397.170,00	16.373.200,00	(6.023.970,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5.824.565.561,00	5.682.734.920,00	(141.830.641,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03	5	1			BELANJA OPERASI	5.824.565.561,00	5.682.734.920,00	(141.830.641,00)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.824.565.561,00	5.682.734.920,00	(141.830.641,00)	
Jumlah Belanja											46.685.464.554,00	42.828.880.444,00	(3.856.584.110,00)	
Total Surplus/(Defisit)											46.685.464.554,00	42.828.880.444,00	3.856.584.110,00	
0	00	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
0	00	5.01.5.05.0.00.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	00	0.00	00			PERENCANAAN	10.511.882.063,00	9.444.078.304,00	(1.067.803.759,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.732.090.550,00	1.705.918.453,00	(26.172.097,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	00			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.591.623.100,00	1.567.439.103,00	(24.183.997,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	03			Pelaksanaan Konsultasi Publik	250.913.380,00	244.399.700,00	(6.513.680,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	250.913.380,00	244.399.700,00	(6.513.680,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	250.913.380,00	244.399.700,00	(6.513.680,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	147.815.700,00	147.815.700,00	-	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	147.815.700,00	147.815.700,00	-	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	147.815.700,00	147.815.700,00	-	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	307.324.770,00	294.525.813,00	(12.798.957,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	307.324.770,00	294.525.813,00	(12.798.957,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	307.324.770,00	294.525.813,00	(12.798.957,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	885.569.250,00	880.697.890,00	(4.871.360,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	885.569.250,00	880.697.890,00	(4.871.360,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	885.569.250,00	880.697.890,00	(4.871.360,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	00		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	140.467.450,00	138.479.350,00	(1.988.100,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	96.660.650,00	95.793.600,00	(867.050,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	5 1	BELANJA OPERASI	96.660.650,00	95.793.600,00	(867.050,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	96.660.650,00	95.793.600,00	(867.050,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	43.806.800,00	42.685.750,00	(1.121.050,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	5 1	BELANJA OPERASI	43.806.800,00	42.685.750,00	(1.121.050,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.806.800,00	42.685.750,00	(1.121.050,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	0.00	00		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.357.785.500,00	1.242.483.870,00	(115.301.630,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	00		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	499.015.120,00	492.812.750,00	(6.202.370,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.000.000,00	96.954.150,00	(45.850,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	97.000.000,00	96.954.150,00	(45.850,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	96.954.150,00	(45.850,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	174.350.000,00	172.378.350,00	(1.971.650,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	174.350.000,00	172.378.350,00	(1.971.650,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	174.350.000,00	172.378.350,00	(1.971.650,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	221.246.620,00	217.062.250,00	(4.184.370,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	221.246.620,00	217.062.250,00	(4.184.370,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	5 1 01	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	-	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	220.746.620,00	216.562.250,00	(4.184.370,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.418.500,00	6.418.000,00	(500,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	6.418.500,00	6.418.000,00	(500,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.418.500,00	6.418.000,00	(500,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	00		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	185.982.000,00	178.256.840,00	(7.725.160,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.437.000,00	34.405.640,00	(31.360,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	34.437.000,00	34.405.640,00	(31.360,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.437.000,00	34.405.640,00	(31.360,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	151.545.000,00	143.851.200,00	(7.693.800,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	151.545.000,00	143.851.200,00	(7.693.800,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	151.545.000,00	143.851.200,00	(7.693.800,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	00		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	672.788.380,00	571.414.280,00	(101.374.100,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	462.458.000,00	371.371.380,00	(91.086.620,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	5 1	BELANJA OPERASI	462.458.000,00	371.371.380,00	(91.086.620,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	462.458.000,00	371.371.380,00	(91.086.620,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.254.880,00	43.926.800,00	(3.328.080,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	03	5 1	BELANJA OPERASI	47.254.880,00	43.926.800,00	(3.328.080,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.254.880,00	43.926.800,00	(3.328.080,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147.975.500,00	142.945.100,00	(5.030.400,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	5 1	BELANJA OPERASI	147.975.500,00	142.945.100,00	(5.030.400,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	5 1 01	Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	-	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	147.125.500,00	142.095.100,00	(5.030.400,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.100.000,00	13.171.000,00	(1.929.000,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	07	5 1	BELANJA OPERASI	15.100.000,00	13.171.000,00	(1.929.000,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	13.171.000,00	(1.929.000,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	0.00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.422.006.013,00	6.495.675.981,00	(926.330.032,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.488.787,00	134.953.800,00	(1.534.987,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.129.900,00	20.070.400,00	(59.500,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	20.129.900,00	20.070.400,00	(59.500,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.129.900,00	20.070.400,00	(59.500,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.655.600,00	11.623.600,00	(32.000,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	11.655.600,00	11.623.600,00	(32.000,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.655.600,00	11.623.600,00	(32.000,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.703.287,00	103.259.800,00	(1.443.487,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	104.703.287,00	103.259.800,00	(1.443.487,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	104.703.287,00	103.259.800,00	(1.443.487,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.435.128.491,00	4.700.704.022,00	(734.424.469,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.421.693.491,00	4.687.269.022,00	(734.424.469,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	5.421.693.491,00	4.687.269.022,00	(734.424.469,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	5.421.693.491,00	4.687.269.022,00	(734.424.469,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.435.000,00	13.435.000,00	-	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	13.435.000,00	13.435.000,00	-	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.435.000,00	13.435.000,00	-	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	168.811.200,00	154.009.259,00	(14.801.941,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	83.445.200,00	71.678.800,00	(11.766.400,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	09	5 1	BELANJA OPERASI	83.445.200,00	71.678.800,00	(11.766.400,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	83.445.200,00	71.678.800,00	(11.766.400,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	10					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85.366.000,00	82.330.459,00	(3.035.541,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	10	5	1			BELANJA OPERASI	85.366.000,00	82.330.459,00	(3.035.541,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	85.366.000,00	82.330.459,00	(3.035.541,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	00					Administrasi Umum Perangkat Daerah	481.467.282,00	408.229.634,00	(73.237.648,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.467.282,00	408.229.634,00	(73.237.648,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	481.467.282,00	408.229.634,00	(73.237.648,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	481.467.282,00	408.229.634,00	(73.237.648,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.641.285,00	44.425.000,00	(1.216.285,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.641.285,00	44.425.000,00	(1.216.285,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	1			BELANJA OPERASI	563.985,00	500.000,00	(63.985,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	1	01		Belanja Pegawai	563.985,00	500.000,00	(63.985,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	2			BELANJA MODAL	45.077.300,00	43.925.000,00	(1.152.300,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.077.300,00	43.925.000,00	(1.152.300,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.662.000,00	838.111.325,00	(97.550.675,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	935.662.000,00	838.111.325,00	(97.550.675,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	935.662.000,00	838.111.325,00	(97.550.675,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	935.662.000,00	838.111.325,00	(97.550.675,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.806.968,00	215.242.941,00	(3.564.027,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.730.400,00	82.272.546,00	(3.457.854,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	85.730.400,00	82.272.546,00	(3.457.854,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.730.400,00	82.272.546,00	(3.457.854,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.616.000,00	77.588.195,00	(27.805,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	77.616.000,00	77.588.195,00	(27.805,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.616.000,00	77.588.195,00	(27.805,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.460.568,00	55.382.200,00	(78.368,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	10	5 1	BELANJA OPERASI	55.460.568,00	55.382.200,00	(78.368,00)	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.460.568,00	55.382.200,00	(78.368,00)	
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	00	0.00	00		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.344.069.542,00	1.242.444.619,00	(101.624.923,00)	
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.344.069.542,00	1.242.444.619,00	(101.624.923,00)	
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	00		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.157.453.652,00	1.058.792.054,00	(98.661.598,00)	
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	02		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1.035.126.452,00	947.699.600,00	(87.426.852,00)	
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	1.035.126.452,00	947.699.600,00	(87.426.852,00)	
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	02	5 1 01	Belanja Pegawai	4.650.000,00	4.650.000,00	-	
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.476.452,00	943.049.600,00	(87.426.852,00)	
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	122.327.200,00	111.092.454,00	(11.234.746,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1			BELANJA OPERASI	122.327.200,00	111.092.454,00	(11.234.746,00)	
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1	01		Belanja Pegawai	800.000,00	-	(800.000,00)	
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	121.527.200,00	111.092.454,00	(10.434.746,00)	
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	00					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	186.615.890,00	183.652.565,00	(2.963.325,00)	
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01					Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	186.615.890,00	183.652.565,00	(2.963.325,00)	
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	5	1			BELANJA OPERASI	186.615.890,00	183.652.565,00	(2.963.325,00)	
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	186.615.890,00	183.652.565,00	(2.963.325,00)	
Jumlah Belanja											11.855.951.605,00	10.686.522.923,00	(1.169.428.682,00)	
Total Surplus/(Defisit)											11.855.951.605,00	10.686.522.923,00	1.169.428.682,00	
0	00	5.01.5.05.0.00.02.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.417.017.768,00	23.960.371.207,89	(5.456.646.560,11)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	3.728.033.425,00	3.602.802.949,00	(125.230.476,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.160.694.027,00	14.983.008.032,73	(1.177.685.994,27)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	9.528.290.316,00	5.374.560.226,16	(4.153.730.089,84)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	2	PENDAPATAN TRANSFER	827.001.766.600,00	862.254.147.228,00	35.252.380.628,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	730.719.376.000,00	740.982.062.416,00	10.262.686.416,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.282.390.600,00	121.272.084.812,00	24.989.694.212,00	
Jumlah Pendapatan									856.418.784.368,00	886.214.518.435,89	29.795.734.067,89	
0	00	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00			KEUANGAN	59.618.421.030,00	43.901.422.835,00	(15.716.998.195,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.243.033.642,00	3.363.870.322,00	(2.879.163.320,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	00			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.026.814.000,00	980.184.900,00	(46.629.100,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	83.421.000,00	75.421.000,00	(8.000.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	83.421.000,00	75.421.000,00	(8.000.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1 01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	-	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.671.000,00	74.671.000,00	(8.000.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	56.819.000,00	36.743.500,00	(20.075.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	56.819.000,00	36.743.500,00	(20.075.500,00)	

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.819.000,00	36.743.500,00	(20.075.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	05				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	16.876.000,00	16.335.600,00	(540.400,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	16.876.000,00	16.335.600,00	(540.400,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.876.000,00	16.335.600,00	(540.400,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	06				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	23.640.000,00	22.858.200,00	(781.800,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	23.640.000,00	22.858.200,00	(781.800,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.640.000,00	22.858.200,00	(781.800,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	07				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	154.679.000,00	154.335.500,00	(343.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	154.679.000,00	154.335.500,00	(343.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	154.679.000,00	154.335.500,00	(343.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	08				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	154.679.000,00	154.574.000,00	(105.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	154.679.000,00	154.574.000,00	(105.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	08	5	1	01	Belanja Pegawai	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	153.079.000,00	152.974.000,00	(105.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	09				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	536.700.000,00	519.917.100,00	(16.782.900,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	536.700.000,00	519.917.100,00	(16.782.900,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	536.700.000,00	519.917.100,00	(16.782.900,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	00				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	50.600.000,00	43.500.000,00	(7.100.000,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	45.500.000,00	39.505.000,00	(5.995.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	45.500.000,00	39.505.000,00	(5.995.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	39.505.000,00	(5.995.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemoangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5.100.000,00	3.995.000,00	(1.105.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5 1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	3.995.000,00	(1.105.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	3.995.000,00	(1.105.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	00		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.147.759.000,00	1.101.467.600,00	(46.291.400,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	135.000.000,00	134.929.000,00	(71.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5 1	BELANJA OPERASI	135.000.000,00	134.929.000,00	(71.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5 1 01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	-	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	134.250.000,00	134.179.000,00	(71.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	08		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	66.000.000,00	54.135.000,00	(11.865.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	08	5 1	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	54.135.000,00	(11.865.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	08	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	54.135.000,00	(11.865.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	09		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	80.000.000,00	79.280.000,00	(720.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	09	5 1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.280.000,00	(720.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	09	5 1 01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	-	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	79.250.000,00	78.530.000,00	(720.000,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	866.759.000,00	833.123.600,00	(33.635.400,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	11	5 1	BELANJA OPERASI	866.759.000,00	833.123.600,00	(33.635.400,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	11	5 1 01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	-	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	11	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	866.009.000,00	832.373.600,00	(33.635.400,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	00		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.017.860.642,00	1.238.717.822,00	(2.779.142.820,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.017.860.642,00	1.238.717.822,00	(2.779.142.820,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	09	5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.017.860.642,00	1.238.717.822,00	(2.779.142.820,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.04	09	5 3 01	Belanja Tidak Terduga	4.017.860.642,00	1.238.717.822,00	(2.779.142.820,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	0.00	00		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.149.948.000,00	1.845.140.170,00	(304.807.830,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	00		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.149.948.000,00	1.845.140.170,00	(304.807.830,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	157.142.000,00	46.495.000,00	(110.647.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	157.142.000,00	46.495.000,00	(110.647.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	05	5 1 01	Belanja Pegawai	550.000,00	-	(550.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	156.592.000,00	46.495.000,00	(110.097.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	07		Pengamanan Barang Milik Daerah	1.953.206.000,00	1.764.750.170,00	(188.455.830,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	1.953.206.000,00	1.764.750.170,00	(188.455.830,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	07	5 1 01	Belanja Pegawai	2.650.000,00	2.150.000,00	(500.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.556.000,00	1.762.600.170,00	(187.955.830,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	39.600.000,00	33.895.000,00	(5.705.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	11	5 1	BELANJA OPERASI	39.600.000,00	33.895.000,00	(5.705.000,00)	

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	33.895.000,00	(5.705.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.225.439.388,00	38.692.412.343,00	(12.533.027.045,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.284.500,00	(715.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	1.284.500,00	(715.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.284.500,00	(715.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.284.500,00	(715.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.995.937.209,00	18.437.680.458,00	(10.558.256.751,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.995.937.209,00	18.437.680.458,00	(10.558.256.751,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	28.995.937.209,00	18.437.680.458,00	(10.558.256.751,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	28.995.937.209,00	18.437.680.458,00	(10.558.256.751,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	00				Administrasi Umum Perangkat Daerah	500.000.000,00	497.925.542,00	(2.074.458,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	497.925.542,00	(2.074.458,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	500.000.000,00	497.925.542,00	(2.074.458,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	497.925.542,00	(2.074.458,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	00				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	860.410.000,00	847.380.000,00	(13.030.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	860.410.000,00	847.380.000,00	(13.030.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	11	5	1		BELANJA OPERASI	5.310.000,00	5.310.000,00	-	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	11	5	1	01	Belanja Pegawai	3.700.000,00	3.700.000,00	-	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.000,00	1.610.000,00	-	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	11	5	2	BELANJA MODAL	855.100.000,00	842.070.000,00	(13.030.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	855.100.000,00	842.070.000,00	(13.030.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.521.692.179,00	18.586.702.353,00	(1.934.989.826,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.521.692.179,00	18.586.702.353,00	(1.934.989.826,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	20.521.692.179,00	18.586.702.353,00	(1.934.989.826,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1 01	Belanja Pegawai	576.000.000,00	314.757.480,00	(261.242.520,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.945.692.179,00	18.271.944.873,00	(1.673.747.306,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.400.000,00	321.439.490,00	(23.960.510,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.000.000,00	102.431.240,00	(12.568.760,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	102.431.240,00	(12.568.760,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	102.431.240,00	(12.568.760,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.400.000,00	122.121.000,00	(279.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	122.400.000,00	122.121.000,00	(279.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1 01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	121.200.000,00	120.921.000,00	(279.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.000.000,00	96.887.250,00	(11.112.750,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	108.000.000,00	96.887.250,00	(11.112.750,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	96.887.250,00	(11.112.750,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
Jumlah Belanja											59.618.421.030,00	43.901.422.835,00	(15.716.998.195,00)	
Total Surplus/(Defisit)											796.800.363.338,00	842.313.095.600,89	45.512.732.262,89	
0	00	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	191.243.672.447,00	191.243.672.447,00	-	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	191.243.672.447,00	191.243.672.447,00	-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											191.243.672.447,00	191.243.672.447,00	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH					
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	104.240.450.000,00	113.514.116.369,67	9.273.666.369,67		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	01		Pajak Daerah	104.240.450.000,00	113.514.116.369,67	9.273.666.369,67		
Jumlah Pendapatan											104.240.450.000,00	113.514.116.369,67	9.273.666.369,67		
0	00	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	5				BELANJA					
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00					KEUANGAN	10.717.564.484,00	10.135.366.594,32	(582.197.889,68)		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.326.995.292,00	1.246.961.400,00	(80.033.892,00)		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	00					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.326.995.292,00	1.246.961.400,00	(80.033.892,00)		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	254.000.000,00	250.335.000,00	(3.665.000,00)		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	254.000.000,00	250.335.000,00	(3.665.000,00)		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	254.000.000,00	250.335.000,00	(3.665.000,00)		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	03					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	96.057.302,00	84.026.800,00	(12.030.502,00)		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	96.057.302,00	84.026.800,00	(12.030.502,00)		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	96.057.302,00	84.026.800,00	(12.030.502,00)		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	107.849.430,00	102.164.800,00	(5.684.630,00)		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	47.849.430,00	43.864.800,00	(3.984.630,00)		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	47.849.430,00	43.864.800,00	(3.984.630,00)		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	5	2			BELANJA MODAL	60.000.000,00	58.300.000,00	(1.700.000,00)		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	58.300.000,00	(1.700.000,00)		

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	06			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	165.000.000,00	161.968.500,00	(3.031.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	165.000.000,00	161.968.500,00	(3.031.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	06	5	1	01 Belanja Pegawai	1.900.000,00	1.900.000,00	-	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	06	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	163.100.000,00	160.068.500,00	(3.031.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	07			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	183.016.800,00	169.568.700,00	(13.448.100,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	183.016.800,00	169.568.700,00	(13.448.100,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	07	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	183.016.800,00	169.568.700,00	(13.448.100,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	08			Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.007.540,00	4.573.200,00	(434.340,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	5.007.540,00	4.573.200,00	(434.340,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	08	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	5.007.540,00	4.573.200,00	(434.340,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	09			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	96.203.700,00	87.400.000,00	(8.803.700,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	6.793.200,00	4.500.000,00	(2.293.200,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	09	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	6.793.200,00	4.500.000,00	(2.293.200,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	09	5	2	BELANJA MODAL	89.410.500,00	82.900.000,00	(6.510.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	09	5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.410.500,00	82.900.000,00	(6.510.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	10			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	99.040.000,00	98.374.900,00	(665.100,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	10	5	1	BELANJA OPERASI	99.040.000,00	98.374.900,00	(665.100,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	10	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	99.040.000,00	98.374.900,00	(665.100,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	11			Penagihan Pajak Daerah	310.550.520,00	278.280.800,00	(32.269.720,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	310.550.520,00	278.280.800,00	(32.269.720,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	310.550.520,00	278.280.800,00	(32.269.720,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	13			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	10.270.000,00	10.268.700,00	(1.300,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	13	5	1	BELANJA OPERASI	10.270.000,00	10.268.700,00	(1.300,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.270.000,00	10.268.700,00	(1.300,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.390.569.192,00	8.888.405.194,32	(502.163.997,68)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	2.547.500,00	(2.452.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	2.547.500,00	(2.452.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	2.547.500,00	(2.452.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.547.500,00	(2.452.500,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.300.839.800,00	7.849.364.113,32	(451.475.686,68)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.300.839.800,00	7.849.364.113,32	(451.475.686,68)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	8.300.839.800,00	7.849.364.113,32	(451.475.686,68)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	8.092.358.900,00	7.722.080.552,39	(370.278.347,61)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	208.480.900,00	127.283.560,93	(81.197.339,07)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.138.000,00	201.944.499,00	(193.501,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.138.000,00	201.944.499,00	(193.501,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	202.138.000,00	201.944.499,00	(193.501,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	202.138.000,00	201.944.499,00	(193.501,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.946.030,00	142.586.250,00	(4.359.780,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146.946.030,00	142.586.250,00	(4.359.780,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	146.946.030,00	142.586.250,00	(4.359.780,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.459.780,00	103.500.000,00	(1.959.780,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	2	03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.286.250,00	19.086.250,00	(200.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	2	04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.200.000,00	20.000.000,00	(2.200.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	572.145.362,00	533.617.590,00	(38.527.772,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.145.362,00	533.617.590,00	(38.527.772,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	572.145.362,00	533.617.590,00	(38.527.772,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1	01 Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.200.000,00	(350.000,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	570.595.362,00	532.417.590,00	(38.177.772,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.500.000,00	158.345.242,00	(5.154.758,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.725.000,00	40.997.385,00	(727.615,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	41.725.000,00	40.997.385,00	(727.615,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	41.725.000,00	40.997.385,00	(727.615,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.275.000,00	77.867.020,00	(3.407.980,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	81.275.000,00	77.867.020,00	(3.407.980,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	81.275.000,00	77.867.020,00	(3.407.980,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.500.000,00	39.480.837,00	(1.019.163,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	40.500.000,00	39.480.837,00	(1.019.163,00)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	39.480.837,00	(1.019.163,00)	
Jumlah Belanja											10.717.564.484,00	10.135.366.594,32	(582.197.889,68)	
Total Surplus/ (Defisit)											93.522.885.516,00	103.378.749.775,35	9.855.864.259,35	
0	00	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	136.775.000,00	36.775.000,00	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	136.775.000,00	36.775.000,00	
Jumlah Pendapatan									100.000.000,00	136.775.000,00	36.775.000,00	
0	00	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00			KEPEGAWAIAN	9.353.710.709,00	8.871.466.062,00	(482.244.647,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.073.107.400,00	1.883.854.984,00	(189.252.416,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	00			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	617.962.200,00	521.774.184,00	(96.188.016,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	04			Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	420.182.200,00	350.285.200,00	(69.897.000,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	420.182.200,00	350.285.200,00	(69.897.000,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	420.182.200,00	350.285.200,00	(69.897.000,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	06			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	89.360.000,00	88.922.600,00	(437.400,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	89.360.000,00	88.922.600,00	(437.400,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	89.360.000,00	88.922.600,00	(437.400,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	11			Pengelolaan Data Kepegawaian	108.420.000,00	82.566.384,00	(25.853.616,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	108.420.000,00	82.566.384,00	(25.853.616,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.420.000,00	82.566.384,00	(25.853.616,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	00			Mutasi dan Promosi ASN	447.096.200,00	388.604.300,00	(58.491.900,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	01			Pengelolaan Mutasi ASN	375.626.200,00	328.754.300,00	(46.871.900,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	375.626.200,00	328.754.300,00	(46.871.900,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	375.626.200,00	328.754.300,00	(46.871.900,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	71.470.000,00	59.850.000,00	(11.620.000,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	71.470.000,00	59.850.000,00	(11.620.000,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.470.000,00	59.850.000,00	(11.620.000,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	00			Pengembangan Kompetensi ASN	888.456.400,00	880.941.000,00	(7.515.400,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	02			Pengelolaan Assessment Center	888.456.400,00	880.941.000,00	(7.515.400,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	888.456.400,00	880.941.000,00	(7.515.400,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1 01	Belanja Pegawai	1.700.000,00	1.500.000,00	(200.000,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	886.756.400,00	879.441.000,00	(7.315.400,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	00			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	119.592.600,00	92.535.500,00	(27.057.100,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13.980.600,00	3.925.000,00	(10.055.600,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	13.980.600,00	3.925.000,00	(10.055.600,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.980.600,00	3.925.000,00	(10.055.600,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	04			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	28.490.000,00	25.435.500,00	(3.054.500,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1	BELANJA OPERASI	28.490.000,00	25.435.500,00	(3.054.500,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.490.000,00	25.435.500,00	(3.054.500,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	07			Pembinaan Disiplin ASN	77.122.000,00	63.175.000,00	(13.947.000,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	07	5	1	BELANJA OPERASI	77.122.000,00	63.175.000,00	(13.947.000,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.122.000,00	63.175.000,00	(13.947.000,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.280.603.309,00	6.987.611.078,00	(292.992.231,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.400.000,00	17.300.000,00	(2.100.000,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.400.000,00	17.300.000,00	(2.100.000,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	19.400.000,00	17.300.000,00	(2.100.000,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	17.300.000,00	(2.100.000,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	00			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.900.998.559,00	5.687.893.810,00	(213.104.749,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.900.998.559,00	5.687.893.810,00	(213.104.749,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.900.998.559,00	5.687.893.810,00	(213.104.749,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	5.900.998.559,00	5.687.893.810,00	(213.104.749,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	00			Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.100.000,00	438.525.068,00	(2.574.932,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.100.000,00	438.525.068,00	(2.574.932,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	441.100.000,00	438.525.068,00	(2.574.932,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	441.100.000,00	438.525.068,00	(2.574.932,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	00			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	244.368.145,00	204.040.000,00	(40.328.145,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	244.368.145,00	204.040.000,00	(40.328.145,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	1	BELANJA OPERASI	2.150.000,00	2.150.000,00	-	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	1 01	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	-	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	-	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	2	BELANJA MODAL	242.218.145,00	201.890.000,00	(40.328.145,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	242.218.145,00	201.890.000,00	(40.328.145,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	00			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.886.605,00	412.018.977,00	(24.867.628,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	436.886.605,00	412.018.977,00	(24.867.628,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	436.886.605,00	412.018.977,00	(24.867.628,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	436.886.605,00	412.018.977,00	(24.867.628,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.850.000,00	227.833.223,00	(10.016.777,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.300.000,00	16.965.123,00	(5.334.877,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	22.300.000,00	16.965.123,00	(5.334.877,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.300.000,00	16.965.123,00	(5.334.877,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	181.200.000,00	178.068.900,00	(3.131.100,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	181.200.000,00	178.068.900,00	(3.131.100,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	181.200.000,00	178.068.900,00	(3.131.100,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.350.000,00	32.799.200,00	(1.550.800,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	34.350.000,00	32.799.200,00	(1.550.800,00)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.350.000,00	32.799.200,00	(1.550.800,00)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.459.306.900,00	2.362.534.451,00	(96.772.449,00)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.459.306.900,00	2.362.534.451,00	(96.772.449,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	00					Pengembangan Kompetensi Teknis	1.590.042.900,00	1.552.289.291,00	(37.753.609,00)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.590.042.900,00	1.552.289.291,00	(37.753.609,00)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	1.590.042.900,00	1.552.289.291,00	(37.753.609,00)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.590.042.900,00	1.552.289.291,00	(37.753.609,00)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	00					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	869.264.000,00	810.245.160,00	(59.018.840,00)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	869.264.000,00	810.245.160,00	(59.018.840,00)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1			BELANJA OPERASI	869.264.000,00	810.245.160,00	(59.018.840,00)	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	869.264.000,00	810.245.160,00	(59.018.840,00)	
Jumlah Belanja											11.813.017.609,00	11.234.000.513,00	(579.017.096,00)	
Total Surplus/(Defisit)											(11.713.017.609,00)	(11.097.225.513,00)	615.792.096,00	
0	00	5.03.5.04.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6	
0	00	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA					
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					INSPEKTORAT DAERAH	10.095.494.616,00	9.834.451.015,51	(261.043.600,49)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	368.115.900,00	360.368.868,00	(7.747.032,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	334.646.300,00	328.213.468,00	(6.432.832,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	51.712.800,00	51.637.105,00	(75.695,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	51.712.800,00	51.637.105,00	(75.695,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	51.712.800,00	51.637.105,00	(75.695,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	129.926.000,00	126.942.450,00	(2.983.550,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	129.926.000,00	126.942.450,00	(2.983.550,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	129.926.000,00	126.942.450,00	(2.983.550,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03					Reviu Laporan Kinerja	24.436.000,00	24.435.200,00	(800,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	24.436.000,00	24.435.200,00	(800,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	24.436.000,00	24.435.200,00	(800,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04					Reviu Laporan Keuangan	110.766.400,00	107.449.713,00	(3.316.687,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	110.766.400,00	107.449.713,00	(3.316.687,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	110.766.400,00	107.449.713,00	(3.316.687,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	17.805.100,00	17.749.000,00	(56.100,00)		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	17.805.100,00	17.749.000,00	(56.100,00)		

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.805.100,00	17.749.000,00	(56.100,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	33.469.600,00	32.155.400,00	(1.314.200,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5.364.000,00	5.337.000,00	(27.000,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.364.000,00	5.337.000,00	(27.000,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.364.000,00	5.337.000,00	(27.000,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	28.105.600,00	26.818.400,00	(1.287.200,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	28.105.600,00	26.818.400,00	(1.287.200,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.105.600,00	26.818.400,00	(1.287.200,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	911.851.800,00	905.128.381,00	(6.723.419,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.622.800,00	6.620.400,00	(2.400,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.622.800,00	6.620.400,00	(2.400,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.622.800,00	6.620.400,00	(2.400,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.622.800,00	6.620.400,00	(2.400,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00				Pendampingan dan Asistensi	905.229.000,00	898.507.981,00	(6.721.019,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	246.795.100,00	241.651.181,00	(5.143.919,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	246.795.100,00	241.651.181,00	(5.143.919,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	246.795.100,00	241.651.181,00	(5.143.919,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	658.433.900,00	656.856.800,00	(1.577.100,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	658.433.900,00	656.856.800,00	(1.577.100,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	658.433.900,00	656.856.800,00	(1.577.100,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.815.526.916,00	8.568.953.766,51	(246.573.149,49)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.861.500,00	1.800.000,00	(61.500,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.861.500,00	1.800.000,00	(61.500,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	1.861.500,00	1.800.000,00	(61.500,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.861.500,00	1.800.000,00	(61.500,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.376.098.986,00	7.166.570.507,00	(209.528.479,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.376.098.986,00	7.166.570.507,00	(209.528.479,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	7.376.098.986,00	7.166.570.507,00	(209.528.479,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	7.376.098.986,00	7.166.570.507,00	(209.528.479,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00					Administrasi Umum Perangkat Daerah	877.979.890,00	877.323.722,00	(656.168,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	482.603.490,00	482.216.200,00	(387.290,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	482.603.490,00	482.216.200,00	(387.290,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	482.603.490,00	482.216.200,00	(387.290,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.376.400,00	395.107.522,00	(268.878,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	395.376.400,00	395.107.522,00	(268.878,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	395.376.400,00	395.107.522,00	(268.878,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.586.540,00	523.259.537,51	(36.327.002,49)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.886.540,00	42.723.915,00	(162.625,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	42.886.540,00	42.723.915,00	(162.625,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	42.886.540,00	42.723.915,00	(162.625,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	501.700.000,00	465.556.622,51	(36.143.377,49)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	3.950.000,00	3.950.000,00	-	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	3.950.000,00	-	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2			BELANJA MODAL	497.750.000,00	461.606.622,51	(36.143.377,49)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	497.750.000,00	461.606.622,51	(36.143.377,49)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14.979.000,00	(21.000,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.979.000,00	(21.000,00)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.979.000,00	(21.000,00)	
Jumlah Belanja											10.095.494.616,00	9.834.451.015,51	(261.043.600,49)	
Total Surplus/(Defisit)											10.095.494.616,00	9.834.451.015,51	261.043.600,00	
0	00	6.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Manguharjo

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.015.000.000,00	1.443.472.670,00	428.472.670,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	1.015.000.000,00	1.443.472.670,00	428.472.670,00	
Jumlah Pendapatan											1.015.000.000,00	1.443.472.670,00	428.472.670,00	
0	00	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA			-	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					KECAMATAN	24.791.151.272,00	23.785.496.498,64	(1.005.654.773,36)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.464.826.485,00	5.380.197.617,64	(84.628.867,36)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.446.674.485,00	5.362.631.217,64	(84.043.267,36)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.446.674.485,00	5.362.631.217,64	(84.043.267,36)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	5.446.674.485,00	5.362.631.217,64	(84.043.267,36)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.446.674.485,00	5.362.631.217,64	(84.043.267,36)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	18.152.000,00	17.566.400,00	(585.600,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	18.152.000,00	17.566.400,00	(585.600,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1			BELANJA OPERASI	18.152.000,00	17.566.400,00	(585.600,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	18.152.000,00	17.566.400,00	(585.600,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.956.595.320,00	4.892.836.450,00	(63.758.870,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	00					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.893.182.920,00	4.833.446.350,00	(59.736.570,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	280.755.080,00	277.339.360,00	(3.415.720,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	280.755.080,00	277.339.360,00	(3.415.720,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	280.755.080,00	277.339.360,00	(3.415.720,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.016.225.231,00	3.965.757.452,00	(50.467.779,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	600.876.571,00	595.661.857,00	(5.214.714,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	01		Belanja Pegawai	4.250.000,00	4.250.000,00	-	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	596.626.571,00	591.411.857,00	(5.214.714,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	2			BELANJA MODAL	3.415.348.660,00	3.370.095.595,00	(45.253.065,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.527.000,00	137.975.220,00	(1.551.780,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.275.821.660,00	3.232.120.375,00	(43.701.285,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	596.202.609,00	590.349.538,00	(5.853.071,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	596.202.609,00	590.349.538,00	(5.853.071,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	01		Belanja Pegawai	250.000,00	-	(250.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	595.952.609,00	590.349.538,00	(5.603.071,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	00					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	63.412.400,00	59.390.100,00	(4.022.300,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	63.412.400,00	59.390.100,00	(4.022.300,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	5	1	BELANJA OPERASI	63.412.400,00	59.390.100,00	(4.022.300,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.412.400,00	59.390.100,00	(4.022.300,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	933.164.450,00	904.760.800,00	(28.403.650,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	402.536.600,00	401.974.100,00	(562.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	402.536.600,00	401.974.100,00	(562.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	402.536.600,00	401.974.100,00	(562.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	402.536.600,00	401.974.100,00	(562.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	00			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	530.627.850,00	502.786.700,00	(27.841.150,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	530.627.850,00	502.786.700,00	(27.841.150,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	530.627.850,00	502.786.700,00	(27.841.150,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	530.627.850,00	502.786.700,00	(27.841.150,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	103.577.200,00	98.942.400,00	(4.634.800,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	103.577.200,00	98.942.400,00	(4.634.800,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	37.482.000,00	36.832.000,00	(650.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	37.482.000,00	36.832.000,00	(650.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.482.000,00	36.832.000,00	(650.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	51.076.000,00	-	(51.076.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	51.076.000,00	-	(51.076.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.076.000,00	-	(51.076.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	07			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	15.019.200,00	14.936.400,00	(82.800,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	15.019.200,00	14.936.400,00	(82.800,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.019.200,00	14.936.400,00	(82.800,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.332.987.817,00	12.508.759.231,00	(824.228.586,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.506.985,00	24.152.700,00	(354.285,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.506.985,00	24.152.700,00	(354.285,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	24.506.985,00	24.152.700,00	(354.285,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	24.506.985,00	24.152.700,00	(354.285,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.870.699.082,00	11.067.927.060,00	(802.772.022,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.868.699.082,00	11.065.956.260,00	(802.742.822,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	11.868.699.082,00	11.065.956.260,00	(802.742.822,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	11.868.699.082,00	11.065.956.260,00	(802.742.822,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	1.970.800,00	(29.200,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1			BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.970.800,00	(29.200,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.970.800,00	(29.200,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	00					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	143.847.435,00	143.307.600,00	(539.835,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	127.583.685,00	127.054.000,00	(529.685,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1			BELANJA OPERASI	127.583.685,00	127.054.000,00	(529.685,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1	01		Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	-	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	127.233.685,00	126.704.000,00	(529.685,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.263.750,00	16.253.600,00	(10.150,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10	5	1			BELANJA OPERASI	16.263.750,00	16.253.600,00	(10.150,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	16.263.750,00	16.253.600,00	(10.150,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00					Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.091.000,00	153.010.277,00	(80.723,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.091.000,00	153.010.277,00	(80.723,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	153.091.000,00	153.010.277,00	(80.723,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	153.091.000,00	153.010.277,00	(80.723,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.158.500,00	8.150.500,00	(8.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.158.500,00	8.150.500,00	(8.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2			BELANJA MODAL	8.158.500,00	8.150.500,00	(8.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.158.500,00	8.150.500,00	(8.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	930.603.809,00	914.204.896,00	(16.398.913,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	930.603.809,00	914.204.896,00	(16.398.913,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	930.603.809,00	914.204.896,00	(16.398.913,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	930.603.809,00	914.204.896,00	(16.398.913,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.081.006,00	198.006.198,00	(4.074.808,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.667.208,00	66.003.100,00	(1.664.108,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	67.667.208,00	66.003.100,00	(1.664.108,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	67.667.208,00	66.003.100,00	(1.664.108,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	73.690.960,00	(1.309.040,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	75.000.000,00	73.690.960,00	(1.309.040,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	73.690.960,00	(1.309.040,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.413.798,00	58.312.138,00	(1.101.660,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	59.413.798,00	58.312.138,00	(1.101.660,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	59.413.798,00	58.312.138,00	(1.101.660,00)	
Jumlah Belanja											24.791.151.272,00	23.785.496.498,64	(1.005.654.773,36)	
Total Surplus/(Defisit)											(23.776.151.272,00)	(22.342.023.828,64)	1.434.127.443,36	
0	00	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Kartoharjo

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.070.205.000,00	1.337.932.175,00	267.727.175,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	1.070.205.000,00	1.337.932.175,00	267.727.175,00	
Jumlah Pendapatan									1.070.205.000,00	1.337.932.175,00	267.727.175,00	
0	00	7.01.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00			KECAMATAN	24.887.599.670,00	23.913.084.334,00	(974.515.336,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.189.519.065,00	5.084.583.988,00	(104.935.077,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	00			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.150.863.065,00	5.046.372.488,00	(104.490.577,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.150.863.065,00	5.046.372.488,00	(104.490.577,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	5.150.863.065,00	5.046.372.488,00	(104.490.577,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.150.863.065,00	5.046.372.488,00	(104.490.577,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	00			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	38.656.000,00	38.211.500,00	(444.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	01			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	38.656.000,00	38.211.500,00	(444.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	38.656.000,00	38.211.500,00	(444.500,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.03	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	38.656.000,00	38.211.500,00	(444.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	0.00	00					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.403.704.600,00	5.347.460.920,00	(56.243.680,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	00					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.270.480.400,00	5.218.514.220,00	(51.966.180,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	01					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	265.520.400,00	262.459.513,00	(3.060.887,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	265.520.400,00	262.459.513,00	(3.060.887,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	265.520.400,00	262.459.513,00	(3.060.887,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.662.961.947,00	4.616.164.607,00	(46.797.340,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	117.820.000,00	116.220.000,00	(1.600.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	1	01		Belanja Pegawai	28.600.000,00	27.200.000,00	(1.400.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	89.220.000,00	89.020.000,00	(200.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	2			BELANJA MODAL	4.545.141.947,00	4.499.944.607,00	(45.197.340,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.750.000,00	114.500.000,00	(250.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	2	04		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.430.391.947,00	4.385.444.607,00	(44.947.340,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	341.998.053,00	339.890.100,00	(2.107.953,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	341.998.053,00	339.890.100,00	(2.107.953,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	341.998.053,00	339.890.100,00	(2.107.953,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	00					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	133.224.200,00	128.946.700,00	(4.277.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	04					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	133.224.200,00	128.946.700,00	(4.277.500,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	04	5	1			BELANJA OPERASI	133.224.200,00	128.946.700,00	(4.277.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.03	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	133.224.200,00	128.946.700,00	(4.277.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	0.00	00					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	974.592.200,00	917.025.700,00	(57.566.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	00					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	507.540.200,00	492.321.200,00	(15.219.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	02					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	507.540.200,00	492.321.200,00	(15.219.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	507.540.200,00	492.321.200,00	(15.219.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	02	5	1	01		Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	-	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	506.690.200,00	491.471.200,00	(15.219.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	00					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	467.052.000,00	424.704.500,00	(42.347.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	467.052.000,00	424.704.500,00	(42.347.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	467.052.000,00	424.704.500,00	(42.347.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	-	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	466.202.000,00	423.854.500,00	(42.347.500,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	0.00	00					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	186.232.000,00	184.427.700,00	(1.804.300,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	00					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	186.232.000,00	184.427.700,00	(1.804.300,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	01			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.000.000,00	99.675.000,00	(325.000,00)		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.675.000,00	(325.000,00)		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.675.000,00	(325.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	05			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000,00	73.595.000,00	(1.405.000,00)		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	73.595.000,00	(1.405.000,00)		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	73.595.000,00	(1.405.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	07			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	11.232.000,00	11.157.700,00	(74.300,00)		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	11.232.000,00	11.157.700,00	(74.300,00)		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.232.000,00	11.157.700,00	(74.300,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	0.00	00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	13.133.551.805,00	12.379.586.026,00	(753.965.779,00)		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.351.265,00	3.351.200,00	(65,00)		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.351.265,00	3.351.200,00	(65,00)		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.351.265,00	3.351.200,00	(65,00)		

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.351.265,00	3.351.200,00	(65,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.438.217.545,00	10.713.922.855,00	(724.294.690,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.436.217.545,00	10.711.922.955,00	(724.294.590,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	11.436.217.545,00	10.711.922.955,00	(724.294.590,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	11.436.217.545,00	10.711.922.955,00	(724.294.590,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000,00	1.999.900,00	(100,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	5	1			BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.999.900,00	(100,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.999.900,00	(100,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	00					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	143.241.896,00	143.210.500,00	(31.396,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	10					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	143.241.896,00	143.210.500,00	(31.396,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	10	5	1			BELANJA OPERASI	143.241.896,00	143.210.500,00	(31.396,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	10	5	1	01		Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	142.041.896,00	142.010.500,00	(31.396,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	00					Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.048.000,00	301.679.738,00	(1.368.262,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.048.000,00	301.679.738,00	(1.368.262,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	303.048.000,00	301.679.738,00	(1.368.262,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	303.048.000,00	301.679.738,00	(1.368.262,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.990.696,00	57.987.542,00	(3.003.154,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	09					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	09	5	1			BELANJA OPERASI	-	-	-	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.990.696,00	57.987.542,00	(3.003.154,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	1			BELANJA OPERASI	2.231.736,00	1.171.400,00	(1.060.336,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.231.736,00	1.171.400,00	(1.060.336,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	2			BELANJA MODAL	58.758.960,00	56.816.142,00	(1.942.818,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.758.960,00	56.816.142,00	(1.942.818,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.026.135.108,00	1.009.880.166,00	(16.254.942,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.026.135.108,00	1.009.880.166,00	(16.254.942,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	1.026.135.108,00	1.009.880.166,00	(16.254.942,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1	01		Belanja Pegawai	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.024.635.108,00	1.009.130.166,00	(15.504.942,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.567.295,00	149.554.025,00	(9.013.270,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.117.966,00	36.811.367,00	(6.306.599,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	43.117.966,00	36.811.367,00	(6.306.599,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	43.117.966,00	36.811.367,00	(6.306.599,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.157.329,00	20.840.800,00	(2.316.529,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	23.157.329,00	20.840.800,00	(2.316.529,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	23.157.329,00	20.840.800,00	(2.316.529,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.410.000,00	57.270.858,00	(139.142,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	57.410.000,00	57.270.858,00	(139.142,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	57.410.000,00	57.270.858,00	(139.142,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.882.000,00	34.631.000,00	(251.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	34.882.000,00	34.631.000,00	(251.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	34.882.000,00	34.631.000,00	(251.000,00)	
Jumlah Belanja											24.887.599.670,00	23.913.084.334,00	(974.515.336,00)	
Total Surplus/(Defisit)											(23.817.394.670,00)	(22.575.152.159,00)	1.242.242.511,00	
0	00	7.01.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Taman

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.121.000.000,00	1.478.462.780,00	357.462.780,00	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	1.121.000.000,00	1.478.462.780,00	357.462.780,00	
Jumlah Pendapatan									1.121.000.000,00	1.478.462.780,00	357.462.780,00	
0	00	7.01.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00			KECAMATAN	26.363.219.268,00	24.933.500.639,00	(1.429.718.629,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.806.184.279,00	5.737.927.184,00	(68.257.095,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	00			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.784.185.879,00	5.716.846.184,00	(67.339.695,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.784.185.879,00	5.716.846.184,00	(67.339.695,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	5.784.185.879,00	5.716.846.184,00	(67.339.695,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.784.185.879,00	5.716.846.184,00	(67.339.695,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	00			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	21.998.400,00	21.081.000,00	(917.400,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	01			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	21.998.400,00	21.081.000,00	(917.400,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	21.998.400,00	21.081.000,00	(917.400,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.998.400,00	21.081.000,00	(917.400,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	0.00	00			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.979.941.073,00	5.934.668.820,00	(45.272.253,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	00			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.835.576.465,00	5.791.853.420,00	(43.723.045,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	321.693.225,00	317.940.400,00	(3.752.825,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	321.693.225,00	317.940.400,00	(3.752.825,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	321.693.225,00	317.940.400,00	(3.752.825,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.041.909.128,00	5.012.557.211,00	(29.351.917,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	415.955.250,00	408.962.650,00	(6.992.600,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02	5	1 01	Belanja Pegawai	33.235.000,00	31.385.000,00	(1.850.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	382.720.250,00	377.577.650,00	(5.142.600,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02	5	2	BELANJA MODAL	4.625.953.878,00	4.603.594.561,00	(22.359.317,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.000.000,00	57.964.000,00	(36.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	02	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.567.953.878,00	4.545.630.561,00	(22.323.317,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	471.974.112,00	461.355.809,00	(10.618.303,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	471.974.112,00	461.355.809,00	(10.618.303,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	03	5	1 01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	470.974.112,00	461.355.809,00	(9.618.303,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.03	00			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	144.364.608,00	142.815.400,00	(1.549.208,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.03	04			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	144.364.608,00	142.815.400,00	(1.549.208,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.03	04	5	1	BELANJA OPERASI	144.364.608,00	142.815.400,00	(1.549.208,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.03	04	5	1 01	Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	-	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.03	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	143.514.608,00	141.965.400,00	(1.549.208,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	0.00	00		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	985.761.850,00	982.084.450,00	(3.677.400,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	00		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	501.484.000,00	499.564.000,00	(1.920.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	501.484.000,00	499.564.000,00	(1.920.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	501.484.000,00	499.564.000,00	(1.920.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	5 1 01	Belanja Pegawai	750.000,00	150.000,00	(600.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.734.000,00	499.414.000,00	(1.320.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	00		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	484.277.850,00	482.520.450,00	(1.757.400,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	484.277.850,00	482.520.450,00	(1.757.400,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	484.277.850,00	482.520.450,00	(1.757.400,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	-	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	483.477.850,00	481.720.450,00	(1.757.400,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	0.00	00		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102.064.100,00	97.495.500,00	(4.568.600,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	00		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	102.064.100,00	97.495.500,00	(4.568.600,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36.448.000,00	36.343.000,00	(105.000,00)	

Kode Rekening									Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1									2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	36.448.000,00	36.343.000,00	(105.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.448.000,00	36.343.000,00	(105.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	05				Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	44.648.400,00	42.257.100,00	(2.391.300,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	44.648.400,00	42.257.100,00	(2.391.300,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.648.400,00	42.257.100,00	(2.391.300,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	07				Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	20.967.700,00	18.895.400,00	(2.072.300,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	20.967.700,00	18.895.400,00	(2.072.300,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.967.700,00	18.895.400,00	(2.072.300,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	0.00	00				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.489.267.966,00	12.181.324.685,00	(1.307.943.281,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	00				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.380.000,00	1.171.000,00	(1.209.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.380.000,00	1.171.000,00	(1.209.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.380.000,00	1.171.000,00	(1.209.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	1.171.000,00	(1.209.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	00				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.464.224.855,00	10.226.990.319,00	(1.237.234.536,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.464.224.855,00	10.226.990.319,00	(1.237.234.536,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.464.224.855,00	10.226.990.319,00	(1.237.234.536,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	11.464.224.855,00	10.226.990.319,00	(1.237.234.536,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	00				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.021.000,00	202.789.000,00	(1.232.000,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	10					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	204.021.000,00	202.789.000,00	(1.232.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	10	5	1			BELANJA OPERASI	204.021.000,00	202.789.000,00	(1.232.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	10	5	1	01		Belanja Pegawai	2.400.000,00	1.350.000,00	(1.050.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	201.621.000,00	201.439.000,00	(182.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	00					Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.446.859,00	106.445.223,00	(1.636,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.446.859,00	106.445.223,00	(1.636,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	106.446.859,00	106.445.223,00	(1.636,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	106.446.859,00	106.445.223,00	(1.636,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.714.402,00	230.137.950,00	(576.452,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	230.714.402,00	230.137.950,00	(576.452,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	1			BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	1	01		Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.100.000,00	(100.000,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	-	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	2			BELANJA MODAL	226.714.402,00	226.237.950,00	(476.452,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	226.714.402,00	226.237.950,00	(476.452,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	00					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939.940.450,00	874.186.023,00	(65.754.427,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	939.940.450,00	874.186.023,00	(65.754.427,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	03	5	1			BELANJA OPERASI	939.940.450,00	874.186.023,00	(65.754.427,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	939.940.450,00	874.186.023,00	(65.754.427,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.540.400,00	539.605.170,00	(1.935.230,00)	

Kode Rekening								Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.522.300,00	51.416.870,00	(1.105.430,00)		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	52.522.300,00	51.416.870,00	(1.105.430,00)		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.522.300,00	51.416.870,00	(1.105.430,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	451.546.300,00	450.845.100,00	(701.200,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	451.546.300,00	450.845.100,00	(701.200,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	2.350.000,00	2.350.000,00	-	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	449.196.300,00	448.495.100,00	(701.200,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.471.800,00	37.343.200,00	(128.600,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	37.471.800,00	37.343.200,00	(128.600,00)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.471.800,00	37.343.200,00	(128.600,00)	
Jumlah Belanja									26.363.219.268,00	24.933.500.639,00	(1.429.718.629,00)		
Total Surplus/(Defisit)									(25.242.219.268,00)	(23.455.037.859,00)	1.787.181.409,00		
0	00	7.01.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6			PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									-	-	-		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									-	-	-		

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA					
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20.131.330.431,00	19.571.366.604,00	(559.963.827,00)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	359.150.297,00	343.465.340,00	(15.684.957,00)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	359.150.297,00	343.465.340,00	(15.684.957,00)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	359.150.297,00	343.465.340,00	(15.684.957,00)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	359.150.297,00	343.465.340,00	(15.684.957,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	01 Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	-	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	258.850.297,00	243.165.340,00	(15.684.957,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	05 Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	12.016.837.530,00	11.987.343.533,00	(29.493.997,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	12.016.837.530,00	11.987.343.533,00	(29.493.997,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	980.581.030,00	980.560.100,00	(20.930,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	980.581.030,00	980.560.100,00	(20.930,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.017.530,00	29.996.600,00	(20.930,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5 1 05	Belanja Hibah	950.563.500,00	950.563.500,00	-	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.353.000,00	34.352.820,00	(180,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	34.353.000,00	34.352.820,00	(180,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.353.000,00	34.352.820,00	(180,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.001.903.500,00	10.972.430.613,00	(29.472.887,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	11.001.903.500,00	10.972.430.613,00	(29.472.887,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	401.903.500,00	372.430.613,00	(29.472.887,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5 1 05	Belanja Hibah	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	-	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	185.337.000,00	162.533.500,00	(22.803.500,00)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	185.337.000,00	162.533.500,00	(22.803.500,00)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	185.337.000,00	162.533.500,00	(22.803.500,00)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	185.337.000,00	162.533.500,00	(22.803.500,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	60.337.000,00	57.533.500,00	(2.803.500,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	05 Belanja Hibah	125.000.000,00	105.000.000,00	(20.000.000,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	671.581.250,00	670.721.308,00	(859.942,00)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	671.581.250,00	670.721.308,00	(859.942,00)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.000.000,00	59.913.662,00	(86.338,00)		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.913.662,00	(86.338,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.913.662,00	(86.338,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	611.581.250,00	610.807.646,00	(773.604,00)		

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	611.581.250,00	610.807.646,00	(773.604,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	5	1	01		Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	-	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	536.081.250,00	535.307.646,00	(773.604,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	5	1	05		Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.781.976.750,00	1.757.983.100,00	(23.993.650,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	00					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.781.976.750,00	1.757.983.100,00	(23.993.650,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.335.350.000,00	1.317.395.700,00	(17.954.300,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	1.335.350.000,00	1.317.395.700,00	(17.954.300,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	165.350.000,00	147.395.700,00	(17.954.300,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	1	05		Belanja Hibah	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	-	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	446.626.750,00	440.587.400,00	(6.039.350,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	446.626.750,00	440.587.400,00	(6.039.350,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	446.626.750,00	440.587.400,00	(6.039.350,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.116.447.604,00	4.649.319.823,00	(467.127.781,00)	

Kode Rekening							Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.837.000,00	56.914.900,00	(922.100,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.837.000,00	12.814.000,00	(23.000,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	12.837.000,00	12.814.000,00	(23.000,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.837.000,00	12.814.000,00	(23.000,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000,00	44.100.900,00	(899.100,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.100.900,00	(899.100,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.100.900,00	(899.100,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.053.271.149,00	3.616.532.330,00	(436.738.819,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.053.271.149,00	3.616.532.330,00	(436.738.819,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	4.053.271.149,00	3.616.532.330,00	(436.738.819,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	4.053.271.149,00	3.616.532.330,00	(436.738.819,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.815.812,00	55.410.830,00	(7.404.982,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62.815.812,00	55.410.830,00	(7.404.982,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10	5 1	BELANJA OPERASI	62.815.812,00	55.410.830,00	(7.404.982,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.815.812,00	55.410.830,00	(7.404.982,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	776.810.940,00	756.990.065,00	(19.820.875,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	576.810.940,00	559.518.975,00	(17.291.965,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	576.810.940,00	559.518.975,00	(17.291.965,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	576.810.940,00	559.518.975,00	(17.291.965,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	197.471.090,00	(2.528.910,00)	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1			BELANJA OPERASI	200.000.000,00	197.471.090,00	(2.528.910,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	197.471.090,00	(2.528.910,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	00					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.972.703,00	69.271.300,00	(701.403,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.972.703,00	69.271.300,00	(701.403,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1			BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	-	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	01		Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	-	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	-	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2			BELANJA MODAL	68.572.703,00	67.871.300,00	(701.403,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.572.703,00	67.871.300,00	(701.403,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.740.000,00	94.200.398,00	(1.539.602,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.740.000,00	49.383.943,00	(1.356.057,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	50.740.000,00	49.383.943,00	(1.356.057,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	50.740.000,00	49.383.943,00	(1.356.057,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.510.029,00	4.400.000,00	(110.029,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	4.510.029,00	4.400.000,00	(110.029,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.510.029,00	4.400.000,00	(110.029,00)	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.489.971,00	40.489.971,00	-	

Kode Rekening										Uraian	Sesudah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	40.489.971,00	40.489.971,00	-	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	40.489.971,00	40.489.971,00	-	
Jumlah Belanja											20.131.330.431,00	19.571.366.604,00	(559.963.827,00)	
Total Surplus/(Defisit)											(20.131.330.431,00)	(19.571.366.604,00)	559.963.827,00	
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											-	-	-	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.488.729.800,00	-	-	-	1.488.729.800,00	1.456.931.649,50	-	-	-	1.456.931.649,50	(31.798.150,50)
1 02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	207.449.500,00	-	-	-	207.449.500,00	187.386.500,00	-	-	-	187.386.500,00	(20.063.000,00)
1 02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	115.042.400,00	-	-	-	115.042.400,00	97.728.700,00	-	-	-	97.728.700,00	(17.313.700,00)
1 02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	112.452.800,00	-	-	-	112.452.800,00	95.852.800,00	-	-	-	95.852.800,00	(16.600.000,00)
1 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	36.348.000,00	-	-	-	36.348.000,00	34.730.200,00	-	-	-	34.730.200,00	(1.617.800,00)
1 02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	55.294.000,00	-	-	-	55.294.000,00	52.863.200,00	-	-	-	52.863.200,00	(2.430.800,00)
1 02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	475.514.250,00	-	-	-	475.514.250,00	374.797.800,00	-	-	-	374.797.800,00	(100.716.450,00)
1 02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	33.448.581.200,00	-	-	-	33.448.581.200,00	31.981.761.480,00	-	-	-	31.981.761.480,00	(1.466.819.720,00)
1 02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	324.109.600,00	-	-	-	324.109.600,00	199.567.500,00	-	-	-	199.567.500,00	(124.542.100,00)
1 02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.653.254.974,00	499.121.600,00	-	-	2.152.376.574,00	1.622.644.844,00	499.100.000,00	-	-	2.121.744.844,00	(30.631.730,00)
1 02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	220.947.900,00	-	-	-	220.947.900,00	191.905.400,00	-	-	-	191.905.400,00	(29.042.500,00)
1 02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	683.036.000,00	-	-	-	683.036.000,00	673.973.200,00	-	-	-	673.973.200,00	(9.062.800,00)
1 02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	893.645.000,00	-	-	-	893.645.000,00	749.215.874,00	-	-	-	749.215.874,00	(144.429.126,00)
1 02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	42.419.000,00	-	-	-	42.419.000,00	42.419.000,00	-	-	-	42.419.000,00	-
1 02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	42.419.000,00	-	-	-	42.419.000,00	42.419.000,00	-	-	-	42.419.000,00	-
1 02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	851.226.000,00	-	-	-	851.226.000,00	706.796.874,00	-	-	-	706.796.874,00	(144.429.126,00)
1 02 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	851.226.000,00	-	-	-	851.226.000,00	706.796.874,00	-	-	-	706.796.874,00	(144.429.126,00)
1 02	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	91.395.000,00	-	-	-	91.395.000,00	86.676.500,00	-	-	-	86.676.500,00	(4.718.500,00)
1 02	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	58.600.000,00	-	-	-	58.600.000,00	55.550.500,00	-	-	-	55.550.500,00	(3.049.500,00)
1 02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	58.600.000,00	-	-	-	58.600.000,00	55.550.500,00	-	-	-	55.550.500,00	(3.049.500,00)
1 02	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	32.795.000,00	-	-	-	32.795.000,00	31.126.000,00	-	-	-	31.126.000,00	(1.669.000,00)
1 02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	32.795.000,00	-	-	-	32.795.000,00	31.126.000,00	-	-	-	31.126.000,00	(1.669.000,00)
1 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.853.562.536,00	-	-	-	2.853.562.536,00	2.792.104.466,00	-	-	-	2.792.104.466,00	(61.458.070,00)
1 02	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	504.002.736,00	-	-	-	504.002.736,00	474.358.481,00	-	-	-	474.358.481,00	(29.644.255,00)
1 02 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	504.002.736,00	-	-	-	504.002.736,00	474.358.481,00	-	-	-	474.358.481,00	(29.644.255,00)
1 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.349.559.800,00	-	-	-	2.349.559.800,00	2.317.745.985,00	-	-	-	2.317.745.985,00	(31.813.815,00)
1 02 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.349.559.800,00	-	-	-	2.349.559.800,00	2.317.745.985,00	-	-	-	2.317.745.985,00	(31.813.815,00)
1 02	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	112.514.497.391,00	30.382.179.484,00	-	-	142.896.676.875,00	109.163.425.048,00	29.342.461.025,74	-	-	138.505.886.073,74	(4.390.790.801,26)
1 02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.769.307.164,00	665.400.000,00	-	-	107.434.707.164,00	103.436.062.058,00	604.165.000,00	-	-	104.040.227.058,00	(3.394.480.106,00)
1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.935.117.601,00	-	-	-	29.935.117.601,00	26.677.233.826,00	-	-	-	26.677.233.826,00	(3.257.883.775,00)
1 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.935.117.601,00	-	-	-	29.935.117.601,00	26.677.233.826,00	-	-	-	26.677.233.826,00	(3.257.883.775,00)
1 02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	770.550.000,00	-	-	-	770.550.000,00	713.450.000,00	-	-	-	713.450.000,00	(57.100.000,00)
1 02 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	770.550.000,00	-	-	-	770.550.000,00	713.450.000,00	-	-	-	713.450.000,00	(57.100.000,00)
1 02	Peningkatan Pelayanan BLUD	76.063.639.563,00	665.400.000,00	-	-	76.729.039.563,00	76.045.378.232,00	604.165.000,00	-	-	76.649.543.232,00	(79.496.331,00)
1 02 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	76.063.639.563,00	665.400.000,00	-	-	76.729.039.563,00	76.045.378.232,00	604.165.000,00	-	-	76.649.543.232,00	(79.496.331,00)
1 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.745.190.227,00	29.716.779.484,00	-	-	35.461.969.711,00	5.727.362.990,00	28.738.296.025,74	-	-	34.465.659.015,74	(996.310.695,26)
1 02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.745.190.227,00	29.716.779.484,00	-	-	35.461.969.711,00	5.727.362.990,00	28.738.296.025,74	-	-	34.465.659.015,74	(996.310.695,26)
1 02 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	7.650.000,00	539.002.000,00	-	-	546.652.000,00	7.650.000,00	529.887.000,00	-	-	537.537.000,00	(9.115.000,00)
1 02 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.500.000,00	22.857.291.500,00	-	-	22.862.791.500,00	5.500.000,00	22.857.291.475,74	-	-	22.862.791.475,74	(24,26)
1 02 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.650.000,00	2.499.549.984,00	-	-	2.511.199.984,00	8.850.000,00	2.067.965.550,00	-	-	2.076.815.550,00	(434.384.434,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.750.000,00	3.820.936.000,00	-	-	3.828.686.000,00	6.800.000,00	3.283.152.000,00	-	-	3.289.952.000,00	(538.734.000,00)
1 02 16	Pengadaan Obat, Vaksin	5.712.640.227,00	-	-	-	5.712.640.227,00	5.698.562.990,00	-	-	5.698.562.990,00	(14.077.237,00)	
1 02	Puskesmas Manguhario	2.912.933.500,00	100.000.000,00	-	-	3.012.933.500,00	2.677.883.188,00	97.930.500,00	-	-	2.775.813.688,00	(237.119.812,00)
1 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.897.423.500,00	100.000.000,00	-	-	2.997.423.500,00	2.662.873.588,00	97.930.500,00	-	-	2.760.804.088,00	(236.619.412,00)
1 02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.642.000,00	-	-	-	27.642.000,00	3.024.000,00	-	-	3.024.000,00	(24.618.000,00)	
1 02 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27.642.000,00	-	-	-	27.642.000,00	3.024.000,00	-	-	3.024.000,00	(24.618.000,00)	
1 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.869.781.500,00	100.000.000,00	-	-	2.969.781.500,00	2.659.849.588,00	97.930.500,00	-	-	2.757.780.088,00	(212.001.412,00)
1 02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.032.000,00	-	-	-	26.032.000,00	25.932.000,00	-	-	25.932.000,00	(100.000,00)	
1 02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3.750.000,00	-	-	-	3.750.000,00	3.650.000,00	-	-	3.650.000,00	(100.000,00)	
1 02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.300.000,00	-	-	-	6.300.000,00	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	(300.000,00)	
1 02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2.592.000,00	-	-	-	2.592.000,00	2.392.000,00	-	-	2.392.000,00	(200.000,00)	
1 02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	
1 02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.300.000,00	-	-	-	1.300.000,00	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00	(50.000,00)	
1 02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.841.200,00	-	-	-	3.841.200,00	3.341.180,00	-	-	3.341.180,00	(500.020,00)	
1 02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	583.664.600,00	-	-	-	583.664.600,00	553.989.350,00	-	-	553.989.350,00	(29.675.250,00)	
1 02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	27.962.000,00	-	-	-	27.962.000,00	27.916.000,00	-	-	27.916.000,00	(46.000,00)	
1 02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.583.800,00	-	-	-	7.583.800,00	3.949.000,00	-	-	3.949.000,00	(3.634.800,00)	
1 02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	128.433.600,00	-	-	-	128.433.600,00	128.433.600,00	-	-	128.433.600,00	-	
1 02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.814.000,00	-	-	-	9.814.000,00	7.014.000,00	-	-	7.014.000,00	(2.800.000,00)	
1 02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	
1 02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	54.438.800,00	-	-	-	54.438.800,00	50.794.800,00	-	-	50.794.800,00	(3.644.000,00)	
1 02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB	416.000,00	-	-	-	416.000,00	416.000,00	-	-	416.000,00	-	
1 02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.008.353.500,00	100.000.000,00	-	-	2.108.353.500,00	1.839.771.658,00	97.930.500,00	-	-	1.937.702.158,00	(170.651.342,00)
1 02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	(200.000,00)	
1 02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	
1 02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	(100.000,00)	
1 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.510.000,00	-	-	-	15.510.000,00	15.009.600,00	-	-	15.009.600,00	(500.400,00)	
1 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.510.000,00	-	-	-	15.510.000,00	15.009.600,00	-	-	15.009.600,00	(500.400,00)	
1 02 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.510.000,00	-	-	-	15.510.000,00	15.009.600,00	-	-	15.009.600,00	(500.400,00)	
1 02	Puskesmas Ngeong	2.478.921.250,00	108.081.850,00	-	-	2.587.003.100,00	2.418.459.369,00	105.982.311,00	-	-	2.524.441.680,00	(62.561.420,00)
1 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.436.687.250,00	108.081.850,00	-	-	2.544.769.100,00	2.376.225.369,00	105.982.311,00	-	-	2.482.207.680,00	(62.561.420,00)
1 02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.470.000,00	-	-	-	27.470.000,00	4.548.000,00	-	-	4.548.000,00	(22.922.000,00)	
1 02 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27.470.000,00	-	-	-	27.470.000,00	4.548.000,00	-	-	4.548.000,00	(22.922.000,00)	
1 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.409.217.250,00	108.081.850,00	-	-	2.517.299.100,00	2.371.677.369,00	105.982.311,00	-	-	2.477.659.680,00	(39.639.420,00)
1 02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.425.200,00	-	-	-	30.425.200,00	30.378.000,00	-	-	30.378.000,00	(47.200,00)	
1 02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4.900.000,00	-	-	-	4.900.000,00	4.650.000,00	-	-	4.650.000,00	(250.000,00)	
1 02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.400.000,00	-	-	-	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	9.400.000,00	-	
1 02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	3.864.000,00	-	-	-	3.864.000,00	3.864.000,00	-	-	3.864.000,00	-	
1 02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	
1 02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.750.000,00	-	-	-	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	1.750.000,00	-	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	614.653.800,00	-	-	-	614.653.800,00	606.256.000,00	-	-	-	606.256.000,00	(8.397.800,00)
1 02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	15.140.000,00	-	-	-	15.140.000,00	15.140.000,00	-	-	-	15.140.000,00	-
1 02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.524.000,00	-	-	-	12.524.000,00	12.524.000,00	-	-	-	12.524.000,00	-
1 02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	127.180.600,00	-	-	-	127.180.600,00	127.174.800,00	-	-	-	127.174.800,00	(5.800,00)
1 02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.650.000,00	-	-	-	2.650.000,00	2.350.000,00	-	-	-	2.350.000,00	(300.000,00)
1 02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan	100.000,00	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-
1 02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28.708.000,00	-	-	-	28.708.000,00	28.108.000,00	-	-	-	28.108.000,00	(600.000,00)
1 02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	166.400,00	-	-	-	166.400,00	83.200,00	-	-	-	83.200,00	(83.200,00)
1 02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.555.405.250,00	108.081.850,00	-	-	1.663.487.100,00	1.527.799.369,00	105.982.311,00	-	-	1.633.781.680,00	(29.705.420,00)
1 02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian	250.000,00	-	-	-	250.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	(150.000,00)
1 02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-
1 02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	(100.000,00)
1 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	42.234.000,00	-	-	-	42.234.000,00	42.234.000,00	-	-	-	42.234.000,00	-
1 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.234.000,00	-	-	-	42.234.000,00	42.234.000,00	-	-	-	42.234.000,00	-
1 02 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	42.234.000,00	-	-	-	42.234.000,00	42.234.000,00	-	-	-	42.234.000,00	-
1 02	Puskesmas Sukosari	2.836.166.500,00	100.000.000,00	-	-	2.936.166.500,00	2.634.099.838,00	99.760.975,00	-	-	2.733.860.813,00	(202.305.687,00)
1 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.721.754.500,00	100.000.000,00	-	-	2.821.754.500,00	2.523.555.438,00	99.760.975,00	-	-	2.623.316.413,00	(198.438.087,00)
1 02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.368.000,00	-	-	-	29.368.000,00	3.060.000,00	-	-	-	3.060.000,00	(26.308.000,00)
1 02 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29.368.000,00	-	-	-	29.368.000,00	3.060.000,00	-	-	-	3.060.000,00	(26.308.000,00)
1 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.692.386.500,00	100.000.000,00	-	-	2.792.386.500,00	2.520.495.438,00	99.760.975,00	-	-	2.620.256.413,00	(172.130.087,00)
1 02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.668.000,00	-	-	-	22.668.000,00	22.668.000,00	-	-	-	22.668.000,00	-
1 02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10.584.000,00	-	-	-	10.584.000,00	9.984.000,00	-	-	-	9.984.000,00	(600.000,00)
1 02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.158.000,00	-	-	-	6.158.000,00	6.008.000,00	-	-	-	6.008.000,00	(150.000,00)
1 02 11	Pengelolaan Pelayanan	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-
1 02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00	-
1 02 13	Pengelolaan Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	739.242.200,00	-	-	-	739.242.200,00	653.205.600,00	-	-	-	653.205.600,00	(86.036.600,00)
1 02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	600.000,00	-	-	-	600.000,00	600.000,00	-	-	-	600.000,00	-
1 02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17.923.400,00	-	-	-	17.923.400,00	14.897.500,00	-	-	-	14.897.500,00	(3.025.900,00)
1 02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	102.376.400,00	-	-	-	102.376.400,00	102.364.000,00	-	-	-	102.364.000,00	(12.400,00)
1 02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.200.000,00	-	-	-	9.200.000,00	6.800.000,00	-	-	-	6.800.000,00	(2.400.000,00)
1 02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	34.952.000,00	-	-	-	34.952.000,00	34.452.000,00	-	-	-	34.452.000,00	(500.000,00)
1 02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB	416.000,00	-	-	-	416.000,00	332.800,00	-	-	-	332.800,00	(83.200,00)
1 02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.744.816.500,00	100.000.000,00	-	-	1.844.816.500,00	1.665.933.538,00	99.760.975,00	-	-	1.765.694.513,00	(79.121.987,00)
1 02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak	250.000,00	-	-	-	250.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-
1 02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	900.000,00	-	-	-	900.000,00	(100.000,00)
1 02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	(100.000,00)
1 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	114.412.000,00	-	-	-	114.412.000,00	110.544.400,00	-	-	-	110.544.400,00	(3.867.600,00)
1 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.412.000,00	-	-	-	114.412.000,00	110.544.400,00	-	-	-	110.544.400,00	(3.867.600,00)
1 02 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	114.412.000,00	-	-	-	114.412.000,00	110.544.400,00	-	-	-	110.544.400,00	(3.867.600,00)
1 02	Puskesmas Tawangrejo	2.524.800.050,00	117.869.450,00	-	-	2.642.669.500,00	2.431.215.761,00	116.787.500,00	-	-	2.548.003.261,00	(94.666.239,00)
1 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.451.548.050,00	117.869.450,00	-	-	2.569.417.500,00	2.360.513.761,00	116.787.500,00	-	-	2.477.301.261,00	(92.116.239,00)
1 02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	30.407.000,00	-	-	-	30.407.000,00	5.676.000,00	-	-	-	5.676.000,00	(24.731.000,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.407.000,00	-	-	-	30.407.000,00	5.676.000,00	-	-	-	5.676.000,00	(24.731.000,00)
1 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.421.141.050,00	117.869.450,00	-	-	2.539.010.500,00	2.354.837.761,00	116.787.500,00	-	-	2.471.625.261,00	(67.385.239,00)
1 02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.790.400,00	-	-	-	21.790.400,00	21.790.400,00	-	-	-	21.790.400,00	-
1 02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5.700.000,00	-	-	-	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	-	5.700.000,00	-
1 02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.200.000,00	-	-	-	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	-	3.200.000,00	-
1 02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.440.000,00	-	-	-	7.440.000,00	7.440.000,00	-	-	-	7.440.000,00	-
1 02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-
1 02 11	Pengelolaan Pelayanan	1.350.000,00	-	-	-	1.350.000,00	1.250.000,00	-	-	-	1.250.000,00	(100.000,00)
1 02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	500.000,00	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-
1 02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	570.850.600,00	-	-	-	570.850.600,00	564.923.550,00	-	-	-	564.923.550,00	(5.927.050,00)
1 02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.249.600,00	-	-	-	7.249.600,00	7.248.000,00	-	-	-	7.248.000,00	(1.600,00)
1 02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.519.000,00	-	-	-	21.519.000,00	20.640.500,00	-	-	-	20.640.500,00	(878.500,00)
1 02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	101.388.000,00	-	-	-	101.388.000,00	101.388.000,00	-	-	-	101.388.000,00	-
1 02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.453.600,00	-	-	-	7.453.600,00	5.753.600,00	-	-	-	5.753.600,00	(1.700.000,00)
1 02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan	2.400.000,00	-	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	-	2.400.000,00	-
1 02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	41.752.800,00	-	-	-	41.752.800,00	41.152.800,00	-	-	-	41.152.800,00	(600.000,00)
1 02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB	416.000,00	-	-	-	416.000,00	166.400,00	-	-	-	166.400,00	(249.600,00)
1 02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.626.431.050,00	117.869.450,00	-	-	1.744.300.500,00	1.569.684.511,00	116.787.500,00	-	-	1.686.472.011,00	(57.828.489,00)
1 02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat)	200.000,00	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00	-
1 02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	400.000,00	-	-	-	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-
1 02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	(100.000,00)
1 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	73.252.000,00	-	-	-	73.252.000,00	70.702.000,00	-	-	-	70.702.000,00	(2.550.000,00)
1 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.252.000,00	-	-	-	73.252.000,00	70.702.000,00	-	-	-	70.702.000,00	(2.550.000,00)
1 02 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	73.252.000,00	-	-	-	73.252.000,00	70.702.000,00	-	-	-	70.702.000,00	(2.550.000,00)
1 02	Puskesmas Banjarejo	3.557.767.000,00	101.710.000,00	-	-	3.659.477.000,00	3.437.967.838,00	101.349.490,00	-	-	3.539.317.328,00	(120.159.672,00)
1 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.494.577.100,00	101.710.000,00	-	-	3.596.287.100,00	3.376.241.838,00	101.349.490,00	-	-	3.477.591.328,00	(118.695.772,00)
1 02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31.286.000,00	-	-	-	31.286.000,00	7.020.000,00	-	-	-	7.020.000,00	(24.266.000,00)
1 02 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	31.286.000,00	-	-	-	31.286.000,00	7.020.000,00	-	-	-	7.020.000,00	(24.266.000,00)
1 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.463.291.100,00	101.710.000,00	-	-	3.565.001.100,00	3.369.221.838,00	101.349.490,00	-	-	3.470.571.328,00	(94.429.772,00)
1 02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.950.800,00	-	-	-	38.950.800,00	38.950.800,00	-	-	-	38.950.800,00	-
1 02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.200.000,00	-	-	-	6.200.000,00	6.200.000,00	-	-	-	6.200.000,00	-
1 02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4.650.000,00	-	-	-	4.650.000,00	4.650.000,00	-	-	-	4.650.000,00	-
1 02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-
1 02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-
1 02 11	Pengelolaan Pelayanan	2.250.000,00	-	-	-	2.250.000,00	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	(750.000,00)
1 02 13	Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.028.370.800,00	-	-	-	1.028.370.800,00	1.027.843.000,00	-	-	-	1.027.843.000,00	(527.800,00)
1 02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	32.966.000,00	-	-	-	32.966.000,00	32.966.000,00	-	-	-	32.966.000,00	-
1 02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.793.900,00	-	-	-	9.793.900,00	9.560.600,00	-	-	-	9.560.600,00	(233.300,00)
1 02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	66.538.400,00	-	-	-	66.538.400,00	60.778.400,00	-	-	-	60.778.400,00	(5.760.000,00)
1 02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.200.000,00	-	-	-	3.200.000,00	1.650.000,00	-	-	-	1.650.000,00	(1.550.000,00)
1 02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	46.970.000,00	-	-	-	46.970.000,00	45.820.000,00	-	-	-	45.820.000,00	(1.150.000,00)
1 02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB	499.200,00	-	-	-	499.200,00	332.800,00	-	-	-	332.800,00	(166.400,00)
1 02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.218.602.000,00	101.710.000,00	-	-	2.320.312.000,00	2.135.020.238,00	101.349.490,00	-	-	2.236.369.728,00	(83.942.272,00)
1 02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	500.000,00	-	-	-	500.000,00	250.000,00	-	-	-	250.000,00	(250.000,00)
1 02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	(100.000,00)
1 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	63.189.900,00	-	-	-	63.189.900,00	61.726.000,00	-	-	-	61.726.000,00	(1.463.900,00)
1 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.189.900,00	-	-	-	63.189.900,00	61.726.000,00	-	-	-	61.726.000,00	(1.463.900,00)
1 02 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	63.189.900,00	-	-	-	63.189.900,00	61.726.000,00	-	-	-	61.726.000,00	(1.463.900,00)
1 02	Puskesmas Demangan	3.125.855.000,00	143.480.000,00	-	-	3.269.335.000,00	2.942.769.316,00	142.555.250,00	-	-	3.085.324.566,00	(184.010.434,00)
1 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.091.021.000,00	143.480.000,00	-	-	3.234.501.000,00	2.909.735.316,00	142.555.250,00	-	-	3.052.290.566,00	(182.210.434,00)
1 02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.827.000,00	-	-	-	28.827.000,00	5.340.000,00	-	-	-	5.340.000,00	(23.487.000,00)
1 02 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	28.827.000,00	-	-	-	28.827.000,00	5.340.000,00	-	-	-	5.340.000,00	(23.487.000,00)
1 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.062.194.000,00	143.480.000,00	-	-	3.205.674.000,00	2.904.395.316,00	142.555.250,00	-	-	3.046.950.566,00	(158.723.434,00)
1 02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.370.800,00	-	-	-	24.370.800,00	24.306.400,00	-	-	-	24.306.400,00	(64.400,00)
1 02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	11.350.000,00	-	-	-	11.350.000,00	11.350.000,00	-	-	-	11.350.000,00	-
1 02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.600.000,00	-	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	6.600.000,00	-
1 02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.332.000,00	-	-	-	5.332.000,00	5.332.000,00	-	-	-	5.332.000,00	-
1 02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00	-
1 02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	-
1 02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00	-
1 02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	849.704.400,00	-	-	-	849.704.400,00	849.107.100,00	-	-	-	849.107.100,00	(597.300,00)
1 02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	39.135.300,00	-	-	-	39.135.300,00	39.110.000,00	-	-	-	39.110.000,00	(25.300,00)
1 02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.063.300,00	-	-	-	8.063.300,00	7.788.100,00	-	-	-	7.788.100,00	(275.200,00)
1 02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	85.471.200,00	-	-	-	85.471.200,00	85.471.200,00	-	-	-	85.471.200,00	-
1 02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.200.000,00	-	-	-	9.200.000,00	3.800.000,00	-	-	-	3.800.000,00	(5.400.000,00)
1 02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.464.000,00	-	-	-	35.464.000,00	34.764.000,00	-	-	-	34.764.000,00	(700.000,00)
1 02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB	416.000,00	-	-	-	416.000,00	259.500,00	-	-	-	259.500,00	(156.500,00)
1 02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.970.237.000,00	143.480.000,00	-	-	2.113.717.000,00	1.820.157.016,00	142.555.250,00	-	-	1.962.712.266,00	(151.004.734,00)
1 02 36	Investigasi Awak Kejadian Luar Biasa Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat)	500.000,00	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-
1 02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	750.000,00	-	-	-	750.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00	(400.000,00)
1 02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	(100.000,00)
1 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	34.834.000,00	-	-	-	34.834.000,00	33.034.000,00	-	-	-	33.034.000,00	(1.800.000,00)
1 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	34.834.000,00	-	-	-	34.834.000,00	33.034.000,00	-	-	-	33.034.000,00	(1.800.000,00)
1 02 01	Bimbingan teknis dan Supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	34.834.000,00	-	-	-	34.834.000,00	33.034.000,00	-	-	-	33.034.000,00	(1.800.000,00)
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40.983.561.184,00	91.167.186.990,00	-	-	132.150.748.174,00	38.370.955.309,67	89.346.172.231,00	-	-	127.717.127.540,67	(4.433.620.633,33)
1 03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40.983.561.184,00	91.167.186.990,00	-	-	132.150.748.174,00	38.370.955.309,67	89.346.172.231,00	-	-	127.717.127.540,67	(4.433.620.633,33)
1 03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.924.797.674,00	258.005.000,00	-	-	12.182.802.674,00	10.784.978.120,00	252.485.000,00	-	-	11.037.463.120,00	(1.145.339.554,00)
1 03	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	49.881.943,00	-	-	-	49.881.943,00	(118.057,00)
1 03 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	49.881.943,00	-	-	-	49.881.943,00	(118.057,00)
1 03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.317.344.030,00	-	-	-	7.317.344.030,00	6.373.362.679,00	-	-	-	6.373.362.679,00	(943.981.351,00)
1 03 01	Penyediaan Gaii dan Tunjangan ASN	7.317.344.030,00	-	-	-	7.317.344.030,00	6.373.362.679,00	-	-	-	6.373.362.679,00	(943.981.351,00)
1 03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.876.284,00	-	-	-	352.876.284,00	348.365.012,00	-	-	-	348.365.012,00	(4.511.272,00)
1 03 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352.876.284,00	-	-	-	352.876.284,00	348.365.012,00	-	-	-	348.365.012,00	(4.511.272,00)
1 03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.700.000,00	13.875.000,00	-	-	15.575.000,00	700.000,00	13.875.000,00	-	-	14.575.000,00	(1.000.000,00)
1 03 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.700.000,00	13.875.000,00	-	-	15.575.000,00	700.000,00	13.875.000,00	-	-	14.575.000,00	(1.000.000,00)
1 03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.362.934.022,00	-	-	-	3.362.934.022,00	3.184.341.635,00	-	-	-	3.184.341.635,00	(178.592.387,00)
1 03 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.362.934.022,00	-	-	-	3.362.934.022,00	3.184.341.635,00	-	-	-	3.184.341.635,00	(178.592.387,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.655.420.994,00	698.641.500,00	-	-	13.354.062.494,00	10.759.338.654,00	645.172.057,57	-	-	11.404.510.711,57	(1.949.551.782,43)
1 05	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.974.000,00	-	-	-	163.974.000,00	163.078.400,00	-	-	-	163.078.400,00	(895.600,00)
1 05	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	163.974.000,00	-	-	-	163.974.000,00	163.078.400,00	-	-	-	163.078.400,00	(895.600,00)
1 05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.858.848.000,00	-	-	-	7.858.848.000,00	6.236.414.742,00	-	-	-	6.236.414.742,00	(1.622.433.258,00)
1 05	01 Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	7.858.848.000,00	-	-	-	7.858.848.000,00	6.236.414.742,00	-	-	-	6.236.414.742,00	(1.622.433.258,00)
1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	684.175.000,00	-	-	-	684.175.000,00	617.631.300,00	-	-	-	617.631.300,00	(66.543.700,00)
1 05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	684.175.000,00	-	-	-	684.175.000,00	617.631.300,00	-	-	-	617.631.300,00	(66.543.700,00)
1 05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	299.892.579,00	-	-	-	299.892.579,00	(107.421,00)
1 05	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	-	-	-	300.000.000,00	299.892.579,00	-	-	-	299.892.579,00	(107.421,00)
1 05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.200.000,00	698.641.500,00	-	-	750.841.500,00	37.192.000,00	645.172.057,57	-	-	682.364.057,57	(68.477.442,43)
	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	150.000.000,00	-	-	200.000.000,00	35.992.000,00	150.000.000,00	-	-	185.992.000,00	(14.008.000,00)
	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.200.000,00	502.130.000,00	-	-	504.330.000,00	1.200.000,00	452.372.057,57	-	-	453.572.057,57	(50.757.942,43)
1 05	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	46.511.500,00	-	-	46.511.500,00	-	42.800.000,00	-	-	42.800.000,00	(3.711.500,00)
1 05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.647.446.994,00	-	-	-	2.647.446.994,00	2.567.812.328,00	-	-	-	2.567.812.328,00	(79.634.666,00)
1 05	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.647.446.994,00	-	-	-	2.647.446.994,00	2.567.812.328,00	-	-	-	2.567.812.328,00	(79.634.666,00)
1 05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	948.777.000,00	-	-	-	948.777.000,00	837.317.305,00	-	-	-	837.317.305,00	(111.459.695,00)
1 05	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	443.057.000,00	-	-	-	443.057.000,00	372.646.341,00	-	-	-	372.646.341,00	(70.410.659,00)
1 05	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	401.000.000,00	-	-	-	401.000.000,00	361.149.364,00	-	-	-	361.149.364,00	(39.850.636,00)
1 05	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.720.000,00	-	-	-	104.720.000,00	103.521.600,00	-	-	-	103.521.600,00	(1.198.400,00)
1 05	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.943.538.311,00	89.400.000,00	-	-	11.032.938.311,00	9.005.211.388,00	84.500.000,00	-	-	9.089.711.388,00	(1.943.226.923,00)
1 05	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.981.051.762,00	-	-	-	7.981.051.762,00	6.364.433.990,00	-	-	-	6.364.433.990,00	(1.616.617.772,00)
1 05	01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.313.413.000,00	-	-	-	1.313.413.000,00	1.163.090.340,00	-	-	-	1.163.090.340,00	(150.322.660,00)
1 05	02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	720.060.000,00	-	-	-	720.060.000,00	706.015.750,00	-	-	-	706.015.750,00	(14.044.250,00)
1 05	03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	152.772.000,00	-	-	-	152.772.000,00	112.964.250,00	-	-	-	112.964.250,00	(39.807.750,00)
1 05	04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.481.931.762,00	-	-	-	5.481.931.762,00	4.122.387.650,00	-	-	-	4.122.387.650,00	(1.359.544.112,00)
1 05	05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	312.875.000,00	-	-	-	312.875.000,00	259.976.000,00	-	-	-	259.976.000,00	(52.899.000,00)
1 05	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.951.408.549,00	89.400.000,00	-	-	3.040.808.549,00	2.640.777.398,00	84.500.000,00	-	-	2.725.277.398,00	(315.531.151,00)
1 05	01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.392.746.805,00	-	-	-	2.392.746.805,00	2.191.569.362,00	-	-	-	2.191.569.362,00	(201.177.443,00)
1 05	03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	558.661.744,00	89.400.000,00	-	-	648.061.744,00	449.208.036,00	84.500.000,00	-	-	533.708.036,00	(114.353.708,00)
1 05	05 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	11.078.000,00	-	-	-	11.078.000,00	-	-	-	-	-	(11.078.000,00)
1 05	01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	11.078.000,00	-	-	-	11.078.000,00	-	-	-	-	-	(11.078.000,00)
1 05	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.092.148.000,00	31.080.000,00	-	-	1.123.228.000,00	1.045.440.970,00	30.030.000,00	-	-	1.075.470.970,00	(47.757.030,00)
1 05	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.064.655.000,00	-	-	-	1.064.655.000,00	1.027.469.970,00	-	-	-	1.027.469.970,00	(37.185.030,00)
1 05	01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	699.128.000,00	-	-	-	699.128.000,00	683.199.600,00	-	-	-	683.199.600,00	(15.928.400,00)
1 05	02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	365.527.000,00	-	-	-	365.527.000,00	344.270.370,00	-	-	-	344.270.370,00	(21.256.630,00)
1 05	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	27.493.000,00	31.080.000,00	-	-	58.573.000,00	17.971.000,00	30.030.000,00	-	-	48.001.000,00	(10.572.000,00)
1 05	01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	27.493.000,00	31.080.000,00	-	-	58.573.000,00	17.971.000,00	30.030.000,00	-	-	48.001.000,00	(10.572.000,00)
1 05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.731.989.000,00	29.011.000,00	-	-	3.761.000.000,00	3.657.649.976,00	29.010.182,00	-	-	3.686.660.158,00	(74.339.842,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.352.043.000,00	12.375.000,00	-	-	2.364.418.000,00	2.291.134.756,00	12.375.000,00	-	-	2.303.509.756,00	(60.908.244,00)
1 05	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.250.000,00	-	-	-	2.250.000,00	1.591.200,00	-	-	1.591.200,00	(658.800,00)	
1 05 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.250.000,00	-	-	-	2.250.000,00	1.591.200,00	-	-	1.591.200,00	(658.800,00)	
1 05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.682.835.000,00	-	-	-	1.682.835.000,00	1.627.753.226,00	-	-	1.627.753.226,00	(55.081.774,00)	
1 05 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.682.835.000,00	-	-	-	1.682.835.000,00	1.627.753.226,00	-	-	1.627.753.226,00	(55.081.774,00)	
1 05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.000.000,00	-	-	-	120.000.000,00	119.986.742,00	-	-	119.986.742,00	(13.258,00)	
1 05 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	-	-	-	120.000.000,00	119.986.742,00	-	-	119.986.742,00	(13.258,00)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	12.375.000,00	-	-	12.375.000,00	-	12.375.000,00	-	-	12.375.000,00	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	-	12.375.000,00	-	-	12.375.000,00	-	12.375.000,00	-	-	12.375.000,00	-
1 05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.576.000,00	-	-	-	374.576.000,00	373.456.998,00	-	-	373.456.998,00	(1.119.002,00)	
1 05 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	374.576.000,00	-	-	-	374.576.000,00	373.456.998,00	-	-	373.456.998,00	(1.119.002,00)	
1 05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.382.000,00	-	-	-	172.382.000,00	168.346.590,00	-	-	168.346.590,00	(4.035.410,00)	
1 05 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.787.000,00	-	-	-	148.787.000,00	145.514.590,00	-	-	145.514.590,00	(3.272.410,00)	
1 05 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.595.000,00	-	-	-	23.595.000,00	22.832.000,00	-	-	22.832.000,00	(763.000,00)	
1 05	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.379.946.000,00	16.636.000,00	-	-	1.396.582.000,00	1.366.515.220,00	16.635.182,00	-	-	1.383.150.402,00	(13.431.598,00)
1 05	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	61.133.000,00	-	-	-	61.133.000,00	57.406.000,00	-	-	57.406.000,00	(3.727.000,00)	
1 05 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 05 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	61.133.000,00	-	-	-	61.133.000,00	57.406.000,00	-	-	57.406.000,00	(3.727.000,00)	
1 05	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.165.399.000,00	16.636.000,00	-	-	1.182.035.000,00	1.155.695.920,00	16.635.182,00	-	-	1.172.331.102,00	(9.703.898,00)
	01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	
1 05 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	85.633.000,00	-	-	-	85.633.000,00	81.299.520,00	-	-	81.299.520,00	(4.333.480,00)	
1 05 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	16.636.000,00	-	-	16.636.000,00	-	16.635.182,00	-	-	16.635.182,00	(818,00)
1 05 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan	47.613.000,00	-	-	-	47.613.000,00	44.822.800,00	-	-	44.822.800,00	(2.790.200,00)	
1 05 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	888.600.000,00	-	-	-	888.600.000,00	888.600.000,00	-	-	888.600.000,00	-	
	09 Penyusunan Rencana Kontijensi	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	49.300.000,00	-	-	49.300.000,00	(700.000,00)	
	10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	43.553.000,00	-	-	-	43.553.000,00	41.673.600,00	-	-	41.673.600,00	(1.879.400,00)	
1 05	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	103.064.000,00	-	-	-	103.064.000,00	103.063.300,00	-	-	103.063.300,00	(700,00)	
	03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80.475.000,00	-	-	-	80.475.000,00	80.475.000,00	-	-	80.475.000,00	-	
1 05 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	22.589.000,00	-	-	-	22.589.000,00	22.588.300,00	-	-	22.588.300,00	(700,00)	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	50.350.000,00	-	-	-	50.350.000,00	50.350.000,00	-	-	50.350.000,00	-	
	06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	50.350.000,00	-	-	-	50.350.000,00	50.350.000,00	-	-	50.350.000,00	-	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	28.282.338.039,00	281.021.158,00	-	-	28.563.359.197,00	26.419.838.259,00	263.900.000,00	-	-	26.683.738.259,00	(1.879.620.938,00)
1 06	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.282.338.039,00	281.021.158,00	-	-	28.563.359.197,00	26.419.838.259,00	263.900.000,00	-	-	26.683.738.259,00	(1.879.620.938,00)
1 06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.467.456.560,00	281.021.158,00	-	-	8.748.477.718,00	7.714.541.042,00	263.900.000,00	-	-	7.978.441.042,00	(770.036.676,00)
1 06	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	206.776.700,00	-	-	-	206.776.700,00	204.093.000,00	-	-	204.093.000,00	(2.683.700,00)	
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.237.500,00	-	-	-	124.237.500,00	123.884.800,00	-	-	123.884.800,00	(352.700,00)	
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.227.400,00	-	-	-	21.227.400,00	20.256.400,00	-	-	20.256.400,00	(971.000,00)	
1 06 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.311.800,00	-	-	-	61.311.800,00	59.951.800,00	-	-	59.951.800,00	(1.360.000,00)	
1 06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.070.479.302,00	-	-	-	6.070.479.302,00	5.552.600.061,00	-	-	5.552.600.061,00	(517.879.241,00)	
1 06 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.937.424.352,00	-	-	-	5.937.424.352,00	5.419.775.511,00	-	-	5.419.775.511,00	(517.648.841,00)	
1 06 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	133.054.950,00	-	-	-	133.054.950,00	132.824.550,00	-	-	132.824.550,00	(230.400,00)	
1 06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.023.000,00	-	-	-	128.023.000,00	126.218.700,00	-	-	126.218.700,00	(1.804.300,00)	
	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	101.536.000,00	-	-	-	101.536.000,00	100.828.000,00	-	-	100.828.000,00	(708.000,00)	

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 06 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26.487.000,00	-	-	-	26.487.000,00	25.390.700,00	-	-	-	25.390.700,00	(1.096.300,00)
1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.541.000,00	-	-	-	325.541.000,00	325.531.630,00	-	-	-	325.531.630,00	(9.370,00)
1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.541.000,00	-	-	-	325.541.000,00	325.531.630,00	-	-	-	325.531.630,00	(9.370,00)
1 06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.610.000,00	281.021.158,00	-	-	284.631.158,00	3.610.000,00	263.900.000,00	-	-	267.510.000,00	(17.121.158,00)
1 06 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.610.000,00	281.021.158,00	-	-	284.631.158,00	3.610.000,00	263.900.000,00	-	-	267.510.000,00	(17.121.158,00)
1 06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.273.868.763,00	-	-	-	1.273.868.763,00	1.105.329.032,00	-	-	-	1.105.329.032,00	(168.539.731,00)
1 06 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	875.168.763,00	-	-	-	875.168.763,00	721.789.032,00	-	-	-	721.789.032,00	(153.379.731,00)
1 06 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.700.000,00	-	-	-	398.700.000,00	383.540.000,00	-	-	-	383.540.000,00	(15.160.000,00)
1 06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.157.795,00	-	-	-	459.157.795,00	397.158.619,00	-	-	-	397.158.619,00	(61.999.176,00)
1 06 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.702.000,00	-	-	-	215.702.000,00	164.485.261,00	-	-	-	164.485.261,00	(51.216.739,00)
1 06 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.421.075,00	-	-	-	152.421.075,00	148.595.108,00	-	-	-	148.595.108,00	(3.825.967,00)
1 06 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.034.720,00	-	-	-	91.034.720,00	84.078.250,00	-	-	-	84.078.250,00	(6.956.470,00)
1 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.826.778.450,00	-	-	-	3.826.778.450,00	3.621.916.059,00	-	-	-	3.621.916.059,00	(204.862.391,00)
1 06	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.826.778.450,00	-	-	-	3.826.778.450,00	3.621.916.059,00	-	-	-	3.621.916.059,00	(204.862.391,00)
1 06 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	679.469.400,00	-	-	-	679.469.400,00	657.619.594,00	-	-	-	657.619.594,00	(21.849.806,00)
1 06 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.155.800,00	-	-	-	60.155.800,00	58.232.180,00	-	-	-	58.232.180,00	(1.923.620,00)
1 06 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	199.425.600,00	-	-	-	199.425.600,00	180.453.300,00	-	-	-	180.453.300,00	(18.972.300,00)
1 06 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.887.727.650,00	-	-	-	2.887.727.650,00	2.725.610.985,00	-	-	-	2.725.610.985,00	(162.116.665,00)
1 06	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.981.665.743,00	-	-	-	2.981.665.743,00	2.759.004.510,00	-	-	-	2.759.004.510,00	(222.661.233,00)
1 06	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.416.019.663,00	-	-	-	2.416.019.663,00	2.240.752.210,00	-	-	-	2.240.752.210,00	(175.267.453,00)
1 06 01	Penyediaan Perumahan	166.548.000,00	-	-	-	166.548.000,00	132.251.800,00	-	-	-	132.251.800,00	(34.296.200,00)
1 06 02	Penyediaan Sandang	52.967.043,00	-	-	-	52.967.043,00	52.744.500,00	-	-	-	52.744.500,00	(222.543,00)
1 06 03	Penyediaan Alat Bantu	35.457.200,00	-	-	-	35.457.200,00	32.014.900,00	-	-	-	32.014.900,00	(3.442.300,00)
1 06 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.300.000,00	-	-	-	42.300.000,00	41.437.000,00	-	-	-	41.437.000,00	(863.000,00)
1 06 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.100.000,00	-	-	-	10.100.000,00	10.100.000,00	-	-	-	10.100.000,00	-
1 06 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.928.380.420,00	-	-	-	1.928.380.420,00	1.844.636.510,00	-	-	-	1.844.636.510,00	(83.743.910,00)
1 06 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	180.267.000,00	-	-	-	180.267.000,00	127.567.500,00	-	-	-	127.567.500,00	(52.699.500,00)
1 06	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	565.646.080,00	-	-	-	565.646.080,00	518.252.300,00	-	-	-	518.252.300,00	(47.393.780,00)
1 06 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	191.360.500,00	-	-	-	191.360.500,00	153.249.000,00	-	-	-	153.249.000,00	(38.111.500,00)
1 06 03	Penyediaan Perumahan	95.736.800,00	-	-	-	95.736.800,00	95.466.000,00	-	-	-	95.466.000,00	(270.800,00)
1 06 04	Penyediaan Sandang	20.250.900,00	-	-	-	20.250.900,00	17.198.400,00	-	-	-	17.198.400,00	(3.052.500,00)
1 06 05	Penyediaan Alat Bantu	31.154.500,00	-	-	-	31.154.500,00	30.425.100,00	-	-	-	30.425.100,00	(729.400,00)
1 06 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	26.051.380,00	-	-	-	26.051.380,00	26.001.800,00	-	-	-	26.001.800,00	(49.580,00)
1 06 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	69.200.000,00	-	-	-	69.200.000,00	67.800.000,00	-	-	-	67.800.000,00	(1.400.000,00)
1 06 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	117.792.000,00	-	-	-	117.792.000,00	117.792.000,00	-	-	-	117.792.000,00	-
1 06 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14.100.000,00	-	-	-	14.100.000,00	10.320.000,00	-	-	-	10.320.000,00	(3.780.000,00)
1 06	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	12.167.195.900,00	-	-	-	12.167.195.900,00	11.598.123.900,00	-	-	-	11.598.123.900,00	(569.072.000,00)
1 06	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	4.270.000,00	-	-	-	4.270.000,00	2.700.000,00	-	-	-	2.700.000,00	(1.570.000,00)
1 06 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.660.000,00	-	-	-	1.660.000,00	1.210.000,00	-	-	-	1.210.000,00	(450.000,00)
1 06 02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	2.410.000,00	-	-	-	2.410.000,00	1.390.000,00	-	-	-	1.390.000,00	(1.020.000,00)
1 06 03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	200.000,00	-	-	-	200.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	(100.000,00)
1 06	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12.162.925.900,00	-	-	-	12.162.925.900,00	11.595.423.900,00	-	-	-	11.595.423.900,00	(567.502.000,00)
1 06 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	917.583.200,00	-	-	-	917.583.200,00	892.897.000,00	-	-	-	892.897.000,00	(24.686.200,00)
1 06 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	406.052.550,00	-	-	-	406.052.550,00	379.804.150,00	-	-	-	379.804.150,00	(26.248.400,00)
1 06 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10.811.745.150,00	-	-	-	10.811.745.150,00	10.297.268.550,00	-	-	-	10.297.268.550,00	(514.476.600,00)
1 06 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	27.545.000,00	-	-	-	27.545.000,00	25.454.200,00	-	-	-	25.454.200,00	(2.090.800,00)
1 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	656.991.300,00	-	-	-	656.991.300,00	557.893.500,00	-	-	-	557.893.500,00	(99.097.800,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 06	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	78.209.900,00	-	-	-	78.209.900,00	25.160.600,00	-	-	-	25.160.600,00	(53.049.300,00)
1 06 01	Penyediaan Makanan	39.282.600,00	-	-	-	39.282.600,00	9.983.300,00	-	-	-	9.983.300,00	(29.299.300,00)
1 06 02	Penyediaan Sandang	15.177.300,00	-	-	-	15.177.300,00	15.177.300,00	-	-	-	15.177.300,00	-
1 06 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	23.750.000,00	-	-	-	23.750.000,00	-	-	-	-	-	(23.750.000,00)
1 06	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	578.781.400,00	-	-	-	578.781.400,00	532.732.900,00	-	-	-	532.732.900,00	(46.048.500,00)
1 06 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	135.615.200,00	-	-	-	135.615.200,00	120.459.200,00	-	-	-	120.459.200,00	(15.156.000,00)
1 06 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	443.166.200,00	-	-	-	443.166.200,00	412.273.700,00	-	-	-	412.273.700,00	(30.892.500,00)
1 06	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	182.250.086,00	-	-	-	182.250.086,00	168.359.248,00	-	-	-	168.359.248,00	(13.890.838,00)
1 06	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	182.250.086,00	-	-	-	182.250.086,00	168.359.248,00	-	-	-	168.359.248,00	(13.890.838,00)
1 06 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	182.250.086,00	-	-	-	182.250.086,00	168.359.248,00	-	-	-	168.359.248,00	(13.890.838,00)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	135.131.154.306,00	6.719.660.520,00	-	-	141.850.814.826,00	128.765.396.559,46	6.284.007.732,04	-	-	135.049.404.291,50	(6.801.410.534,50)
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	11.078.519.615,00	200.238.928,00	-	-	11.278.758.543,00	9.859.090.027,69	193.032.738,00	-	-	10.052.122.765,69	(1.226.635.777,31)
2 07	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	11.078.519.615,00	200.238.928,00	-	-	11.278.758.543,00	9.859.090.027,69	193.032.738,00	-	-	10.052.122.765,69	(1.226.635.777,31)
2 07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.636.535.918,00	200.238.928,00	-	-	6.836.774.846,00	6.207.069.089,00	193.032.738,00	-	-	6.400.101.827,00	(436.673.019,00)
2 07	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.280.000,00	-	-	-	71.280.000,00	71.176.400,00	-	-	-	71.176.400,00	(103.600,00)
2 07 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.280.000,00	-	-	-	71.280.000,00	71.176.400,00	-	-	-	71.176.400,00	(103.600,00)
2 07	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	5.470.630.413,00	-	-	-	5.470.630.413,00	5.059.612.752,00	-	-	-	5.059.612.752,00	(411.017.661,00)
2 07 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.470.630.413,00	-	-	-	5.470.630.413,00	5.059.612.752,00	-	-	-	5.059.612.752,00	(411.017.661,00)
2 07	Administrasi Umum Perangkat Daerah	819.477.725,00	-	-	-	819.477.725,00	802.231.797,00	-	-	-	802.231.797,00	(17.245.928,00)
2 07 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	482.302.725,00	-	-	-	482.302.725,00	465.263.736,00	-	-	-	465.263.736,00	(17.038.989,00)
2 07 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.175.000,00	-	-	-	337.175.000,00	336.968.061,00	-	-	-	336.968.061,00	(206.939,00)
2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.500.000,00	200.238.928,00	-	-	1.700.238.928,00	1.500.000,00	193.032.738,00	-	-	1.693.032.738,00	(7.206.190,00)
2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000,00	200.238.928,00	-	-	1.700.238.928,00	1.500.000,00	193.032.738,00	-	-	1.693.032.738,00	(7.206.190,00)
2 07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.647.780,00	-	-	-	273.647.780,00	272.548.140,00	-	-	-	272.548.140,00	(1.099.640,00)
2 07 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.444.000,00	-	-	-	75.444.000,00	75.134.322,00	-	-	-	75.134.322,00	(309.678,00)
2 07 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	159.097.025,00	-	-	-	159.097.025,00	158.334.248,00	-	-	-	158.334.248,00	(762.777,00)
2 07 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.106.755,00	-	-	-	39.106.755,00	39.079.570,00	-	-	-	39.079.570,00	(27.185,00)
2 07	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.093.811.800,00	-	-	-	2.093.811.800,00	1.845.107.133,00	-	-	-	1.845.107.133,00	(248.704.667,00)
2 07	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.071.802.000,00	-	-	-	2.071.802.000,00	1.824.874.333,00	-	-	-	1.824.874.333,00	(246.927.667,00)
2 07 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	2.071.802.000,00	-	-	-	2.071.802.000,00	1.824.874.333,00	-	-	-	1.824.874.333,00	(246.927.667,00)
2 07	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.054.800,00	-	-	-	10.054.800,00	8.658.800,00	-	-	-	8.658.800,00	(1.396.000,00)
2 07 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.054.800,00	-	-	-	10.054.800,00	8.658.800,00	-	-	-	8.658.800,00	(1.396.000,00)
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	11.955.000,00	-	-	-	11.955.000,00	11.574.000,00	-	-	-	11.574.000,00	(381.000,00)
01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	11.955.000,00	-	-	-	11.955.000,00	11.574.000,00	-	-	-	11.574.000,00	(381.000,00)
2 07	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	170.900.000,00	-	-	-	170.900.000,00	167.363.350,00	-	-	-	167.363.350,00	(3.536.650,00)
2 07	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	170.900.000,00	-	-	-	170.900.000,00	167.363.350,00	-	-	-	167.363.350,00	(3.536.650,00)
2 07 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	102.931.575,00	-	-	-	102.931.575,00	101.248.450,00	-	-	-	101.248.450,00	(1.683.125,00)
2 07 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	67.968.425,00	-	-	-	67.968.425,00	66.114.900,00	-	-	-	66.114.900,00	(1.853.525,00)
2 07	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.177.271.897,00	-	-	-	2.177.271.897,00	1.639.550.455,69	-	-	-	1.639.550.455,69	(537.721.441,31)
2 07	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.050.000,00	-	-	-	9.050.000,00	9.050.000,00	-	-	-	9.050.000,00	-
2 07 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	3.462.000,00	-	-	-	3.462.000,00	3.462.000,00	-	-	-	3.462.000,00	-
2 07 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	5.588.000,00	-	-	-	5.588.000,00	5.588.000,00	-	-	-	5.588.000,00	-
2 07	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.168.221.897,00	-	-	-	2.168.221.897,00	1.630.500.455,69	-	-	-	1.630.500.455,69	(537.721.441,31)
2 07 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.460.000,00	-	-	-	35.460.000,00	35.403.200,00	-	-	-	35.403.200,00	(56.800,00)
2 07 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.132.761.897,00	-	-	-	2.132.761.897,00	1.595.097.255,69	-	-	-	1.595.097.255,69	(537.664.641,31)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.057.950.700,00	-	-	-	2.057.950.700,00	1.984.916.528,00	-	-	-	1.984.916.528,00	(73.034.172,00)
1 06	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.057.950.700,00	-	-	-	2.057.950.700,00	1.984.916.528,00	-	-	-	1.984.916.528,00	(73.034.172,00)
2 08	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.090.047.400,00	-	-	-	1.090.047.400,00	1.052.738.714,00	-	-	-	1.052.738.714,00	(37.308.686,00)
2 08	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	169.086.900,00	-	-	-	169.086.900,00	153.616.804,00	-	-	-	153.616.804,00	(15.470.096,00)
2 08 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	72.834.400,00	-	-	-	72.834.400,00	72.525.804,00	-	-	-	72.525.804,00	(308.596,00)
2 08 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	55.137.500,00	-	-	-	55.137.500,00	40.970.000,00	-	-	-	40.970.000,00	(14.167.500,00)
2 08 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.217.000,00	-	-	-	30.217.000,00	29.888.000,00	-	-	-	29.888.000,00	(329.000,00)
2 08 04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.898.000,00	-	-	-	10.898.000,00	10.233.000,00	-	-	-	10.233.000,00	(665.000,00)
2 08	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.946.000,00	-	-	-	34.946.000,00	31.362.000,00	-	-	-	31.362.000,00	(3.584.000,00)
2 08 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	34.946.000,00	-	-	-	34.946.000,00	31.362.000,00	-	-	-	31.362.000,00	(3.584.000,00)
2 08	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	886.014.500,00	-	-	-	886.014.500,00	867.759.910,00	-	-	-	867.759.910,00	(18.254.590,00)
2 08 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	863.234.500,00	-	-	-	863.234.500,00	844.980.910,00	-	-	-	844.980.910,00	(18.253.590,00)
2 08 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.780.000,00	-	-	-	22.780.000,00	22.779.000,00	-	-	-	22.779.000,00	(1.000,00)
2 08	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	240.370.350,00	-	-	-	240.370.350,00	238.647.650,00	-	-	-	238.647.650,00	(1.722.700,00)
2 08	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	68.286.980,00	-	-	-	68.286.980,00	67.070.880,00	-	-	-	67.070.880,00	(1.216.100,00)
2 08 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	36.390.980,00	-	-	-	36.390.980,00	35.174.880,00	-	-	-	35.174.880,00	(1.216.100,00)
2 08 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	31.896.000,00	-	-	-	31.896.000,00	31.896.000,00	-	-	-	31.896.000,00	-
2 08	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	155.906.600,00	-	-	-	155.906.600,00	155.750.000,00	-	-	-	155.750.000,00	(156.600,00)
2 08 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	155.906.600,00	-	-	-	155.906.600,00	155.750.000,00	-	-	-	155.750.000,00	(156.600,00)
2 08	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.176.770,00	-	-	-	16.176.770,00	15.826.770,00	-	-	-	15.826.770,00	(350.000,00)
2 08 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	7.518.000,00	-	-	-	7.518.000,00	7.518.000,00	-	-	-	7.518.000,00	-
2 08 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.658.770,00	-	-	-	8.658.770,00	8.308.770,00	-	-	-	8.308.770,00	(350.000,00)
2 08	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	271.270.300,00	-	-	-	271.270.300,00	253.631.300,00	-	-	-	253.631.300,00	(17.639.000,00)
2 08	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	222.349.300,00	-	-	-	222.349.300,00	204.710.300,00	-	-	-	204.710.300,00	(17.639.000,00)
2 08 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	82.969.300,00	-	-	-	82.969.300,00	82.617.300,00	-	-	-	82.617.300,00	(352.000,00)
2 08 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	139.380.000,00	-	-	-	139.380.000,00	122.093.000,00	-	-	-	122.093.000,00	(17.287.000,00)
2 08	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.921.000,00	-	-	-	48.921.000,00	48.921.000,00	-	-	-	48.921.000,00	-
2 08 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.921.000,00	-	-	-	48.921.000,00	48.921.000,00	-	-	-	48.921.000,00	-
2 08	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	108.891.900,00	-	-	-	108.891.900,00	102.384.500,00	-	-	-	102.384.500,00	(6.507.400,00)
2 08	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.891.900,00	-	-	-	108.891.900,00	102.384.500,00	-	-	-	102.384.500,00	(6.507.400,00)
2 08 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	45.649.900,00	-	-	-	45.649.900,00	43.477.500,00	-	-	-	43.477.500,00	(2.172.400,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)		
		Belanja					Belanja							
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja			
2	08	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	63.242.000,00	-	-	-	63.242.000,00	58.907.000,00	-	-	-	58.907.000,00	(4.335.000,00)
2	08		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	264.553.110,00	-	-	-	264.553.110,00	259.447.124,00	-	-	-	259.447.124,00	(5.105.986,00)
2	08		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	43.237.900,00	-	-	-	43.237.900,00	42.264.900,00	-	-	-	42.264.900,00	(973.000,00)
2	08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	43.237.900,00	-	-	-	43.237.900,00	42.264.900,00	-	-	-	42.264.900,00	(973.000,00)
2	08		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	221.315.210,00	-	-	-	221.315.210,00	217.182.224,00	-	-	-	217.182.224,00	(4.132.986,00)
2	08	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	22.583.900,00	-	-	-	22.583.900,00	22.535.000,00	-	-	-	22.535.000,00	(48.900,00)
2	08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.178.800,00	-	-	-	84.178.800,00	82.194.214,00	-	-	-	82.194.214,00	(1.984.586,00)
2	08	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.211.600,00	-	-	-	76.211.600,00	74.526.100,00	-	-	-	74.526.100,00	(1.685.500,00)
2	08	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.340.910,00	-	-	-	38.340.910,00	37.926.910,00	-	-	-	37.926.910,00	(414.000,00)
2	08		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	82.817.640,00	-	-	-	82.817.640,00	78.067.240,00	-	-	-	78.067.240,00	(4.750.400,00)
2	08		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26.311.810,00	-	-	-	26.311.810,00	25.225.410,00	-	-	-	25.225.410,00	(1.086.400,00)
2	08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26.311.810,00	-	-	-	26.311.810,00	25.225.410,00	-	-	-	25.225.410,00	(1.086.400,00)
2	08		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.149.900,00	-	-	-	34.149.900,00	31.821.900,00	-	-	-	31.821.900,00	(2.328.000,00)
2	08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5.750.000,00	-	-	-	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	-	5.750.000,00	-
2	08	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	28.399.900,00	-	-	-	28.399.900,00	26.071.900,00	-	-	-	26.071.900,00	(2.328.000,00)
2	08		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.355.930,00	-	-	-	22.355.930,00	21.019.930,00	-	-	-	21.019.930,00	(1.336.000,00)
2	08	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.355.930,00	-	-	-	22.355.930,00	21.019.930,00	-	-	-	21.019.930,00	(1.336.000,00)
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.207.544.057,00	243.868.443,00	-	-	7.451.412.500,00	6.229.854.616,00	241.787.000,00	-	-	6.471.641.616,00	(979.770.884,00)
2	09		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.207.544.057,00	243.868.443,00	-	-	7.451.412.500,00	6.229.854.616,00	241.787.000,00	-	-	6.471.641.616,00	(979.770.884,00)
2	09		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.723.269.057,00	113.998.443,00	-	-	6.837.267.500,00	5.751.329.791,00	113.287.000,00	-	-	5.864.616.791,00	(972.650.709,00)
2	09		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.649.000,00	-	-	-	113.649.000,00	110.762.000,00	-	-	-	110.762.000,00	(2.887.000,00)
2	09	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	113.649.000,00	-	-	-	113.649.000,00	110.762.000,00	-	-	-	110.762.000,00	(2.887.000,00)
2	09		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.132.457.000,00	-	-	-	5.132.457.000,00	4.182.877.559,00	-	-	-	4.182.877.559,00	(949.579.441,00)
2	09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.132.457.000,00	-	-	-	5.132.457.000,00	4.182.877.559,00	-	-	-	4.182.877.559,00	(949.579.441,00)
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.078.000,00	-	-	-	16.078.000,00	13.841.900,00	-	-	-	13.841.900,00	(2.236.100,00)
		04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.078.000,00	-	-	-	16.078.000,00	13.841.900,00	-	-	-	13.841.900,00	(2.236.100,00)
2	09		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.149.111.600,00	36.630.000,00	-	-	1.185.741.600,00	1.143.188.081,00	36.000.000,00	-	-	1.179.188.081,00	(6.553.519,00)
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	734.510.000,00	36.630.000,00	-	-	771.140.000,00	728.739.502,00	36.000.000,00	-	-	764.739.502,00	(6.400.498,00)
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.476.600,00	-	-	-	23.476.600,00	23.339.900,00	-	-	-	23.339.900,00	(136.700,00)
2	09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	391.125.000,00	-	-	-	391.125.000,00	391.108.679,00	-	-	-	391.108.679,00	(16.321,00)
2	09		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.511.857,00	77.368.443,00	-	-	78.880.300,00	1.211.000,00	77.287.000,00	-	-	78.498.000,00	(382.300,00)
2	09	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.511.857,00	77.368.443,00	-	-	78.880.300,00	1.211.000,00	77.287.000,00	-	-	78.498.000,00	(382.300,00)
2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.461.600,00	-	-	-	310.461.600,00	299.449.251,00	-	-	-	299.449.251,00	(11.012.349,00)
2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.254.600,00	-	-	-	88.254.600,00	82.157.832,00	-	-	-	82.157.832,00	(6.096.768,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.584.500,00	-	-	-	15.584.500,00	14.253.760,00	-	-	-	14.253.760,00	(1.330.740,00)
2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.952.000,00	-	-	-	171.952.000,00	168.992.659,00	-	-	-	168.992.659,00	(2.959.341,00)
2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.670.500,00	-	-	-	34.670.500,00	34.045.000,00	-	-	-	34.045.000,00	(625.500,00)
2 09	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	373.401.500,00	129.870.000,00	-	-	503.271.500,00	371.380.150,00	128.500.000,00	-	-	499.880.150,00	(3.391.350,00)
2 09	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	221.350.500,00	129.870.000,00	-	-	351.220.500,00	219.815.450,00	128.500.000,00	-	-	348.315.450,00	(2.905.050,00)
2 09 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12.662.000,00	-	-	-	12.662.000,00	12.025.800,00	-	-	-	12.025.800,00	(636.200,00)
2 09 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	178.919.500,00	129.870.000,00	-	-	308.789.500,00	178.021.250,00	128.500.000,00	-	-	306.521.250,00	(2.268.250,00)
2 09 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	29.769.000,00	-	-	-	29.769.000,00	29.768.400,00	-	-	-	29.768.400,00	(600,00)
2 09	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	152.051.000,00	-	-	-	152.051.000,00	151.564.700,00	-	-	-	151.564.700,00	(486.300,00)
2 09 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	23.553.000,00	-	-	-	23.553.000,00	23.306.900,00	-	-	-	23.306.900,00	(246.100,00)
2 09 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	128.498.000,00	-	-	-	128.498.000,00	128.257.800,00	-	-	-	128.257.800,00	(240.200,00)
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	32.480.000,00	-	-	-	32.480.000,00	32.473.700,00	-	-	-	32.473.700,00	(6.300,00)
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	32.480.000,00	-	-	-	32.480.000,00	32.473.700,00	-	-	-	32.473.700,00	(6.300,00)
2 09 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	32.480.000,00	-	-	-	32.480.000,00	32.473.700,00	-	-	-	32.473.700,00	(6.300,00)
2 09	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	78.393.500,00	-	-	-	78.393.500,00	74.670.975,00	-	-	-	74.670.975,00	(3.722.525,00)
2 09	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	78.393.500,00	-	-	-	78.393.500,00	74.670.975,00	-	-	-	74.670.975,00	(3.722.525,00)
2 09 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	23.538.500,00	-	-	-	23.538.500,00	22.911.900,00	-	-	-	22.911.900,00	(626.600,00)
2 09 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	54.855.000,00	-	-	-	54.855.000,00	51.759.075,00	-	-	-	51.759.075,00	(3.095.925,00)
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	314.600.000,00	-	-	-	314.600.000,00	260.951.885,00	-	-	-	260.951.885,00	(53.648.115,00)
1 04	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	314.600.000,00	-	-	-	314.600.000,00	260.951.885,00	-	-	-	260.951.885,00	(53.648.115,00)
2 10	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	10.347.750,00	-	-	-	10.347.750,00	(4.652.250,00)
2 10	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	10.347.750,00	-	-	-	10.347.750,00	(4.652.250,00)
2 10 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	10.347.750,00	-	-	-	10.347.750,00	(4.652.250,00)
2 10	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	36.200.000,00	-	-	-	36.200.000,00	32.249.185,00	-	-	-	32.249.185,00	(3.950.815,00)
2 10	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.200.000,00	-	-	-	36.200.000,00	32.249.185,00	-	-	-	32.249.185,00	(3.950.815,00)
2 10 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.200.000,00	-	-	-	36.200.000,00	32.249.185,00	-	-	-	32.249.185,00	(3.950.815,00)
2 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	263.400.000,00	-	-	-	263.400.000,00	218.354.950,00	-	-	-	218.354.950,00	(45.045.050,00)
2 10	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	263.400.000,00	-	-	-	263.400.000,00	218.354.950,00	-	-	-	218.354.950,00	(45.045.050,00)
2 10 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	263.400.000,00	-	-	-	263.400.000,00	218.354.950,00	-	-	-	218.354.950,00	(45.045.050,00)
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	23.553.014.316,00	3.252.051.750,00	-	-	26.805.066.066,00	22.409.381.777,26	2.969.255.837,04	-	-	25.378.637.614,30	(1.426.428.451,70)
2 11	Dinas Lingkungan Hidup	23.553.014.316,00	3.252.051.750,00	-	-	26.805.066.066,00	22.409.381.777,26	2.969.255.837,04	-	-	25.378.637.614,30	(1.426.428.451,70)
2 11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.935.468.760,00	5.550.000,00	-	-	17.941.018.760,00	17.224.629.988,45	5.523.000,00	-	-	17.230.152.988,45	(710.865.771,55)
2 11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.660.100,00	-	-	-	67.660.100,00	67.649.500,00	-	-	-	67.649.500,00	(10.600,00)
2 11 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.660.100,00	-	-	-	67.660.100,00	67.649.500,00	-	-	-	67.649.500,00	(10.600,00)
2 11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.759.198.388,00	-	-	-	9.759.198.388,00	9.282.966.573,00	-	-	-	9.282.966.573,00	(476.231.815,00)
2 11 01	Penyediaan Gaii dan Tunjangan ASN	9.759.198.388,00	-	-	-	9.759.198.388,00	9.282.966.573,00	-	-	-	9.282.966.573,00	(476.231.815,00)
2 11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	270.427.400,00	-	-	-	270.427.400,00	270.285.900,00	-	-	-	270.285.900,00	(141.500,00)
2 11 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	157.200.600,00	-	-	-	157.200.600,00	157.186.900,00	-	-	-	157.186.900,00	(13.700,00)
2 11 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	113.226.800,00	-	-	-	113.226.800,00	113.099.000,00	-	-	-	113.099.000,00	(127.800,00)
2 11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	390.508.000,00	-	-	-	390.508.000,00	390.429.000,00	-	-	-	390.429.000,00	(79.000,00)
2 11 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390.508.000,00	-	-	-	390.508.000,00	390.429.000,00	-	-	-	390.429.000,00	(79.000,00)
2 11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	5.550.000,00	-	-	5.550.000,00	-	5.523.000,00	-	-	5.523.000,00	(27.000,00)
2 11 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	5.550.000,00	-	-	5.550.000,00	-	5.523.000,00	-	-	5.523.000,00	(27.000,00)
2 11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.693.060.712,00	-	-	-	5.693.060.712,00	5.610.968.350,00	-	-	-	5.610.968.350,00	(82.092.362,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 11 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.284.208,00	-	-	-	680.284.208,00	672.868.050,00	-	-	-	672.868.050,00	(7.416.158,00)
2 11 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.012.776.504,00	-	-	-	5.012.776.504,00	4.938.100.300,00	-	-	-	4.938.100.300,00	(74.676.204,00)
2 11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.754.614.160,00	-	-	-	1.754.614.160,00	1.602.330.665,45	-	-	-	1.602.330.665,45	(152.283.494,55)
2 11 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.320.115.722,00	-	-	-	1.320.115.722,00	1.198.853.600,00	-	-	-	1.198.853.600,00	(121.262.122,00)
2 11 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.260.800,00	-	-	-	190.260.800,00	162.886.150,00	-	-	-	162.886.150,00	(27.374.650,00)
2 11 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	244.237.638,00	-	-	-	244.237.638,00	240.590.915,45	-	-	-	240.590.915,45	(3.646.722,55)
2 11	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	299.284.000,00	-	-	-	299.284.000,00	283.494.300,00	-	-	-	283.494.300,00	(15.789.700,00)
2 11	Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	123.700.000,00	-	-	-	123.700.000,00	113.756.800,00	-	-	-	113.756.800,00	(9.943.200,00)
2 11 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	123.700.000,00	-	-	-	123.700.000,00	113.756.800,00	-	-	-	113.756.800,00	(9.943.200,00)
2 11	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	175.584.000,00	-	-	-	175.584.000,00	169.737.500,00	-	-	-	169.737.500,00	(5.846.500,00)
2 11 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	175.584.000,00	-	-	-	175.584.000,00	169.737.500,00	-	-	-	169.737.500,00	(5.846.500,00)
2 11	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.110.568.770,00	-	-	-	1.110.568.770,00	1.106.894.600,00	-	-	-	1.106.894.600,00	(3.674.170,00)
2 11	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	607.704.574,00	-	-	-	607.704.574,00	606.559.050,00	-	-	-	606.559.050,00	(1.145.524,00)
2 11 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	231.912.780,00	-	-	-	231.912.780,00	231.465.250,00	-	-	-	231.465.250,00	(447.530,00)
2 11 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	375.791.794,00	-	-	-	375.791.794,00	375.093.800,00	-	-	-	375.093.800,00	(697.994,00)
2 11	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	502.864.196,00	-	-	-	502.864.196,00	500.335.550,00	-	-	-	500.335.550,00	(2.528.646,00)
2 11 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	301.831.396,00	-	-	-	301.831.396,00	301.083.450,00	-	-	-	301.083.450,00	(747.946,00)
2 11 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	201.032.800,00	-	-	-	201.032.800,00	199.252.100,00	-	-	-	199.252.100,00	(1.780.700,00)
2 11	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	76.700.000,00	-	-	-	76.700.000,00	76.530.800,00	-	-	-	76.530.800,00	(169.200,00)
2 11	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	76.700.000,00	-	-	-	76.700.000,00	76.530.800,00	-	-	-	76.530.800,00	(169.200,00)
2 11 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	76.700.000,00	-	-	-	76.700.000,00	76.530.800,00	-	-	-	76.530.800,00	(169.200,00)
2 11	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	51.985.000,00	-	-	-	51.985.000,00	45.855.000,00	-	-	-	45.855.000,00	(6.130.000,00)
2 11	Penyimpanan Sementara Limbah B3	51.985.000,00	-	-	-	51.985.000,00	45.855.000,00	-	-	-	45.855.000,00	(6.130.000,00)
2 11 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	51.985.000,00	-	-	-	51.985.000,00	45.855.000,00	-	-	-	45.855.000,00	(6.130.000,00)
2 11	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	323.629.200,00	-	-	-	323.629.200,00	319.872.000,00	-	-	-	319.872.000,00	(3.757.200,00)
2 11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	323.629.200,00	-	-	-	323.629.200,00	319.872.000,00	-	-	-	319.872.000,00	(3.757.200,00)
2 11 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	177.829.200,00	-	-	-	177.829.200,00	175.992.000,00	-	-	-	175.992.000,00	(1.837.200,00)
2 11 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	145.800.000,00	-	-	-	145.800.000,00	143.880.000,00	-	-	-	143.880.000,00	(1.920.000,00)
2 11	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	672.265.000,00	-	-	-	672.265.000,00	618.230.100,00	-	-	-	618.230.100,00	(54.034.900,00)
2 11	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	672.265.000,00	-	-	-	672.265.000,00	618.230.100,00	-	-	-	618.230.100,00	(54.034.900,00)
2 11 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	672.265.000,00	-	-	-	672.265.000,00	618.230.100,00	-	-	-	618.230.100,00	(54.034.900,00)
2 11	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	117.000.000,00	28.000.000,00	-	-	145.000.000,00	115.979.000,00	27.600.000,00	-	-	143.579.000,00	(1.421.000,00)
2 11	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	117.000.000,00	28.000.000,00	-	-	145.000.000,00	115.979.000,00	27.600.000,00	-	-	143.579.000,00	(1.421.000,00)
2 11 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	45.000.000,00	-	-	-	45.000.000,00	44.787.000,00	-	-	-	44.787.000,00	(213.000,00)
2 11 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	72.000.000,00	28.000.000,00	-	-	100.000.000,00	71.192.000,00	27.600.000,00	-	-	98.792.000,00	(1.208.000,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.181.259.200,00	986.032.900,00	-	-	5.167.292.100,00	3.466.345.490,00	870.998.233,00	-	-	4.337.343.723,00	(829.948.377,00)
2 14	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	704.621.300,00	-	-	-	704.621.300,00	701.551.430,00	-	-	701.551.430,00	(3.069.870,00)	
2 14	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	93.263.600,00	-	-	-	93.263.600,00	93.262.200,00	-	-	93.262.200,00	(1.400,00)	
2 14 07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	93.263.600,00	-	-	-	93.263.600,00	93.262.200,00	-	-	93.262.200,00	(1.400,00)	
2 14	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	611.357.700,00	-	-	-	611.357.700,00	608.289.230,00	-	-	608.289.230,00	(3.068.470,00)	
2 14 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi	296.715.000,00	-	-	-	296.715.000,00	295.345.530,00	-	-	295.345.530,00	(1.369.470,00)	
2 14 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	314.642.700,00	-	-	-	314.642.700,00	312.943.700,00	-	-	312.943.700,00	(1.699.000,00)	
2 14	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.688.231.100,00	986.032.900,00	-	-	2.674.264.000,00	1.355.609.800,00	870.998.233,00	-	-	2.226.608.033,00	(447.655.967,00)
2 14	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	533.450.000,00	-	-	-	533.450.000,00	527.743.300,00	-	-	527.743.300,00	(5.706.700,00)	
2 14 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000,00	-	-	-	120.000.000,00	119.870.100,00	-	-	119.870.100,00	(129.900,00)	
2 14 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00	149.949.200,00	-	-	149.949.200,00	(50.800,00)	
2 14 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	39.000.000,00	-	-	-	39.000.000,00	38.433.600,00	-	-	38.433.600,00	(566.400,00)	
2 14 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	144.450.000,00	-	-	-	144.450.000,00	144.428.400,00	-	-	144.428.400,00	(21.600,00)	
2 14 08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	-	-	-	80.000.000,00	75.062.000,00	-	-	75.062.000,00	(4.938.000,00)	
2 14	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	58.000.000,00	-	-	-	58.000.000,00	58.000.000,00	-	-	58.000.000,00	-	
2 14 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	-	
2 14 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	54.000.000,00	-	-	-	54.000.000,00	54.000.000,00	-	-	54.000.000,00	-	
2 14	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	979.281.100,00	986.032.900,00	-	-	1.965.314.000,00	652.840.500,00	870.998.233,00	-	-	1.523.838.733,00	(441.475.267,00)
2 14 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.000.000,00	-	-	-	13.000.000,00	8.550.000,00	-	-	8.550.000,00	(4.450.000,00)	
2 14 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	781.632.000,00	-	-	-	781.632.000,00	461.118.500,00	-	-	461.118.500,00	(320.513.500,00)	
2 14 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	172.949.100,00	986.032.900,00	-	-	1.158.982.000,00	171.520.000,00	870.998.233,00	-	-	1.042.518.233,00	(116.463.767,00)
2 14 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.700.000,00	-	-	-	11.700.000,00	11.652.000,00	-	-	11.652.000,00	(48.000,00)	
2 14	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	117.500.000,00	-	-	-	117.500.000,00	117.026.000,00	-	-	117.026.000,00	(474.000,00)	
02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	-	-	-	9.000.000,00	8.960.000,00	-	-	8.960.000,00	(40.000,00)	
2 14 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	108.500.000,00	-	-	-	108.500.000,00	108.066.000,00	-	-	108.066.000,00	(434.000,00)	
2 14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.788.406.800,00	-	-	-	1.788.406.800,00	1.409.184.260,00	-	-	1.409.184.260,00	(379.222.540,00)	
2 14	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.788.406.800,00	-	-	-	1.788.406.800,00	1.409.184.260,00	-	-	1.409.184.260,00	(379.222.540,00)	
2 14 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	361.200.000,00	-	-	-	361.200.000,00	353.250.000,00	-	-	353.250.000,00	(7.950.000,00)	
2 14 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	172.520.700,00	-	-	-	172.520.700,00	152.643.200,00	-	-	152.643.200,00	(19.877.500,00)	
2 14 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	973.800.000,00	-	-	-	973.800.000,00	628.512.000,00	-	-	628.512.000,00	(345.288.000,00)	
2 14 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	280.886.100,00	-	-	-	280.886.100,00	274.779.060,00	-	-	274.779.060,00	(6.107.040,00)	
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	16.893.350.288,00	1.410.713.678,00	-	-	18.304.063.966,00	16.534.163.319,21	1.392.407.274,00	-	-	17.926.570.593,21	(377.493.372,79)
2 15	Dinas Perhubungan	16.893.350.288,00	1.410.713.678,00	-	-	18.304.063.966,00	16.534.163.319,21	1.392.407.274,00	-	-	17.926.570.593,21	(377.493.372,79)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
2	15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.460.443.736,00	104.085.278,00	-	-	10.564.529.014,00	10.233.807.407,21	103.890.450,00	-	-	10.337.697.857,21	(226.831.156,79)
2	15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.740.000,00	-	-	-	93.740.000,00	91.447.660,00	-	-	-	91.447.660,00	(2.292.340,00)
2	15	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93.740.000,00	-	-	-	93.740.000,00	91.447.660,00	-	-	-	91.447.660,00	(2.292.340,00)
2	15	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	6.399.332.086,00	-	-	-	6.399.332.086,00	6.217.195.727,00	-	-	-	6.217.195.727,00	(182.136.359,00)
2	15	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.399.332.086,00	-	-	-	6.399.332.086,00	6.217.195.727,00	-	-	-	6.217.195.727,00	(182.136.359,00)
2	15	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	370.744.166,00	-	-	-	370.744.166,00	367.282.040,00	-	-	-	367.282.040,00	(3.462.126,00)
2	15	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	204.235.166,00	-	-	-	204.235.166,00	201.906.360,00	-	-	-	201.906.360,00	(2.328.806,00)
2	15	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	166.509.000,00	-	-	-	166.509.000,00	165.375.680,00	-	-	-	165.375.680,00	(1.133.320,00)
2	15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.645.000,00	-	-	-	276.645.000,00	274.873.337,00	-	-	-	274.873.337,00	(1.771.663,00)
2	15	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.645.000,00	-	-	-	276.645.000,00	274.873.337,00	-	-	-	274.873.337,00	(1.771.663,00)
2	15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.343.095,00	104.085.278,00	-	-	110.428.373,00	3.936.150,00	103.890.450,00	-	-	107.826.600,00	(2.601.773,00)
2	15	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.343.095,00	104.085.278,00	-	-	110.428.373,00	3.936.150,00	103.890.450,00	-	-	107.826.600,00	(2.601.773,00)
2	15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.057.999.389,00	-	-	-	2.057.999.389,00	2.030.946.297,00	-	-	-	2.030.946.297,00	(27.053.092,00)
2	15	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.057.999.389,00	-	-	-	2.057.999.389,00	2.030.946.297,00	-	-	-	2.030.946.297,00	(27.053.092,00)
2	15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.255.640.000,00	-	-	-	1.255.640.000,00	1.248.126.196,21	-	-	-	1.248.126.196,21	(7.513.803,79)
2	15	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	626.065.000,00	-	-	-	626.065.000,00	625.837.178,00	-	-	-	625.837.178,00	(227.822,00)
2	15	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	493.500.000,00	-	-	-	493.500.000,00	486.398.118,21	-	-	-	486.398.118,21	(7.101.881,79)
2	15	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.075.000,00	-	-	-	136.075.000,00	135.890.900,00	-	-	-	135.890.900,00	(184.100,00)
2	15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.432.906.552,00	1.306.628.400,00	-	-	7.739.534.952,00	6.300.355.912,00	1.288.516.824,00	-	-	7.588.872.736,00	(150.662.216,00)
2	15	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.177.903.027,00	1.118.822.400,00	-	-	3.296.725.427,00	2.123.076.700,00	1.102.553.074,00	-	-	3.225.629.774,00	(71.095.653,00)
		01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	120.350.000,00	-	-	-	120.350.000,00	118.100.900,00	-	-	-	118.100.900,00	(2.249.100,00)
2	15	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	82.250.000,00	1.059.874.400,00	-	-	1.142.124.400,00	61.400.000,00	1.044.685.000,00	-	-	1.106.085.000,00	(36.039.400,00)
2	15	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.975.303.027,00	58.948.000,00	-	-	2.034.251.027,00	1.943.575.800,00	57.868.074,00	-	-	2.001.443.874,00	(32.807.153,00)
2	15	Penyediaan Terminal Penumpang Tipe C	172.550.000,00	16.650.000,00	-	-	189.200.000,00	169.898.000,00	16.455.750,00	-	-	186.353.750,00	(2.846.250,00)
2	15	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	172.550.000,00	16.650.000,00	-	-	189.200.000,00	169.898.000,00	16.455.750,00	-	-	186.353.750,00	(2.846.250,00)
2	15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	981.708.000,00	45.000.000,00	-	-	1.026.708.000,00	969.915.685,00	44.400.000,00	-	-	1.014.315.685,00	(12.392.315,00)
2	15	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	981.708.000,00	45.000.000,00	-	-	1.026.708.000,00	969.915.685,00	44.400.000,00	-	-	1.014.315.685,00	(12.392.315,00)
2	15	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	526.069.800,00	126.156.000,00	-	-	652.225.800,00	519.003.059,00	125.108.000,00	-	-	644.111.059,00	(8.114.741,00)
2	15	01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	130.921.000,00	126.156.000,00	-	-	257.077.000,00	126.268.059,00	125.108.000,00	-	-	251.376.059,00	(5.700.941,00)
2	15	07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	395.148.800,00	-	-	-	395.148.800,00	392.735.000,00	-	-	-	392.735.000,00	(2.413.800,00)
2	15	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	56.304.000,00	-	-	-	56.304.000,00	56.218.000,00	-	-	-	56.218.000,00	(86.000,00)
2	15	01 Penataan Manajemen dan Rekamasi Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	56.304.000,00	-	-	-	56.304.000,00	56.218.000,00	-	-	-	56.218.000,00	(86.000,00)
2	15	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	231.316.000,00	-	-	-	231.316.000,00	227.733.000,00	-	-	-	227.733.000,00	(3.583.000,00)
2	15	04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	231.316.000,00	-	-	-	231.316.000,00	227.733.000,00	-	-	-	227.733.000,00	(3.583.000,00)
2	15	10 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	944.622.525,00	-	-	-	944.622.525,00	927.997.713,00	-	-	-	927.997.713,00	(16.624.812,00)
2	15	01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	51.300.000,00	-	-	-	51.300.000,00	50.800.000,00	-	-	-	50.800.000,00	(500.000,00)
2	15	02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	782.858.525,00	-	-	-	782.858.525,00	770.547.215,00	-	-	-	770.547.215,00	(12.311.310,00)
2	15	04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	110.464.000,00	-	-	-	110.464.000,00	106.650.498,00	-	-	-	106.650.498,00	(3.813.502,00)
2	15	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.342.433.200,00	-	-	-	1.342.433.200,00	1.306.513.755,00	-	-	-	1.306.513.755,00	(35.919.445,00)
2	15	01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.342.433.200,00	-	-	-	1.342.433.200,00	1.306.513.755,00	-	-	-	1.306.513.755,00	(35.919.445,00)
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.886.626.258,00	156.500.000,00	-	-	31.043.126.258,00	30.331.750.332,00	153.440.000,00	-	-	30.485.190.332,00	(557.935.926,00)
2	16	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.886.626.258,00	156.500.000,00	-	-	31.043.126.258,00	30.331.750.332,00	153.440.000,00	-	-	30.485.190.332,00	(557.935.926,00)
2	16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.353.300.337,00	18.000.000,00	-	-	7.371.300.337,00	6.872.194.588,00	15.875.000,00	-	-	6.888.069.588,00	(483.230.749,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
2	16	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.000.000,00	-	-	-	135.000.000,00	134.758.200,00	-	-	-	134.758.200,00	(241.800,00)
2	16	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	135.000.000,00	-	-	-	135.000.000,00	134.758.200,00	-	-	-	134.758.200,00	(241.800,00)
2	16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.380.709.137,00	-	-	-	5.380.709.137,00	4.922.646.454,00	-	-	-	4.922.646.454,00	(458.062.683,00)
2	16	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.380.709.137,00	-	-	-	5.380.709.137,00	4.922.646.454,00	-	-	-	4.922.646.454,00	(458.062.683,00)
2	16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.753.200,00	-	-	-	295.753.200,00	295.753.200,00	-	-	-	295.753.200,00	-
2	16	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.753.200,00	-	-	-	295.753.200,00	295.753.200,00	-	-	-	295.753.200,00	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	15.875.000,00	-	-	15.875.000,00	(2.125.000,00)
		11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	-	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	15.875.000,00	-	-	15.875.000,00	(2.125.000,00)
2	16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.102.838.000,00	-	-	-	1.102.838.000,00	1.084.420.364,00	-	-	-	1.084.420.364,00	(18.417.636,00)
2	16	03 Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	1.102.838.000,00	-	-	-	1.102.838.000,00	1.084.420.364,00	-	-	-	1.084.420.364,00	(18.417.636,00)
2	16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.000.000,00	-	-	-	439.000.000,00	434.616.370,00	-	-	-	434.616.370,00	(4.383.630,00)
2	16	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.608.000,00	-	-	-	170.608.000,00	168.581.449,00	-	-	-	168.581.449,00	(2.026.551,00)
2	16	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.612.000,00	-	-	-	88.612.000,00	86.582.001,00	-	-	-	86.582.001,00	(2.029.999,00)
2	16	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	179.780.000,00	-	-	-	179.780.000,00	179.452.920,00	-	-	-	179.452.920,00	(327.080,00)
2	16	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.866.819.361,00	138.500.000,00	-	-	4.005.319.361,00	3.839.291.378,00	137.565.000,00	-	-	3.976.856.378,00	(28.462.983,00)
2	16	01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.866.819.361,00	138.500.000,00	-	-	4.005.319.361,00	3.839.291.378,00	137.565.000,00	-	-	3.976.856.378,00	(28.462.983,00)
2	16	02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2.158.616.364,00	-	-	-	2.158.616.364,00	2.157.239.037,00	-	-	-	2.157.239.037,00	(1.377.327,00)
2	16	04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.200.923.328,00	138.500.000,00	-	-	1.339.423.328,00	1.183.227.346,00	137.565.000,00	-	-	1.320.792.346,00	(18.630.982,00)
2	16	06 Pelayanan Informasi Publik	250.664.450,00	-	-	-	250.664.450,00	243.170.495,00	-	-	-	243.170.495,00	(7.493.955,00)
2	16	08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	135.415.219,00	-	-	-	135.415.219,00	134.516.500,00	-	-	-	134.516.500,00	(898.719,00)
2	16	12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	121.200.000,00	-	-	-	121.200.000,00	121.138.000,00	-	-	-	121.138.000,00	(62.000,00)
2	16	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	19.666.506.560,00	-	-	-	19.666.506.560,00	19.620.264.366,00	-	-	-	19.620.264.366,00	(46.242.194,00)
2	16	01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.565.500.000,00	-	-	-	15.565.500.000,00	15.562.394.086,00	-	-	-	15.562.394.086,00	(3.105.914,00)
2	16	02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	99.952.086,00	-	-	-	99.952.086,00	(47.914,00)
2	16	03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	15.465.500.000,00	-	-	-	15.465.500.000,00	15.462.442.000,00	-	-	-	15.462.442.000,00	(3.058.000,00)
2	16	01 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.101.006.560,00	-	-	-	4.101.006.560,00	4.057.870.280,00	-	-	-	4.057.870.280,00	(43.136.280,00)
2	16	01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.776.480.000,00	-	-	-	2.776.480.000,00	2.767.602.332,00	-	-	-	2.767.602.332,00	(8.877.668,00)
2	16	04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	273.700.000,00	-	-	-	273.700.000,00	268.499.915,00	-	-	-	268.499.915,00	(5.200.085,00)
2	16	07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	400.942.000,00	-	-	-	400.942.000,00	383.660.755,00	-	-	-	383.660.755,00	(17.281.245,00)
2	16	08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	180.778.560,00	-	-	-	180.778.560,00	180.667.778,00	-	-	-	180.667.778,00	(110.782,00)
2	16	09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	114.906.000,00	-	-	-	114.906.000,00	112.531.000,00	-	-	-	112.531.000,00	(2.375.000,00)
2	16	10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	35.000.000,00	-	-	-	35.000.000,00	34.908.500,00	-	-	-	34.908.500,00	(91.500,00)
2	16	11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	319.200.000,00	-	-	-	319.200.000,00	310.000.000,00	-	-	-	310.000.000,00	(9.200.000,00)
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	843.889.506,00	-	-	-	843.889.506,00	809.654.225,00	-	-	-	809.654.225,00	(34.235.281,00)
2	07	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	843.889.506,00	-	-	-	843.889.506,00	809.654.225,00	-	-	-	809.654.225,00	(34.235.281,00)
2	17	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	460.790.000,00	-	-	-	460.790.000,00	456.964.000,00	-	-	-	456.964.000,00	(3.826.000,00)
2	17	01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	460.790.000,00	-	-	-	460.790.000,00	456.964.000,00	-	-	-	456.964.000,00	(3.826.000,00)
2	17	01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	460.790.000,00	-	-	-	460.790.000,00	456.964.000,00	-	-	-	456.964.000,00	(3.826.000,00)
2	17	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	180.804.100,00	-	-	-	180.804.100,00	151.363.900,00	-	-	-	151.363.900,00	(29.440.200,00)
2	17	01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.804.100,00	-	-	-	180.804.100,00	151.363.900,00	-	-	-	151.363.900,00	(29.440.200,00)
2	17	01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	180.804.100,00	-	-	-	180.804.100,00	151.363.900,00	-	-	-	151.363.900,00	(29.440.200,00)
2	17	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	202.295.406,00	-	-	-	202.295.406,00	201.326.325,00	-	-	-	201.326.325,00	(969.081,00)
2	17	01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	202.295.406,00	-	-	-	202.295.406,00	201.326.325,00	-	-	-	201.326.325,00	(969.081,00)
2	17	01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	202.295.406,00	-	-	-	202.295.406,00	201.326.325,00	-	-	-	201.326.325,00	(969.081,00)
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.244.852.247,00	58.700.000,00	-	-	7.303.552.247,00	6.923.194.573,00	57.996.900,00	-	-	6.981.191.473,00	(322.360.774,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.244.852.247,00	58.700.000,00	-	-	7.303.552.247,00	6.923.194.573,00	57.996.900,00	-	-	6.981.191.473,00	(322.360.774,00)
2 18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.442.205.047,00	58.700.000,00	-	-	5.500.905.047,00	5.194.977.469,00	57.996.900,00	-	-	5.252.974.369,00	(247.930.678,00)
2 18	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.491.000,00	-	-	-	30.491.000,00	30.468.050,00	-	-	-	30.468.050,00	(22.950,00)
2 18 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.491.000,00	-	-	-	30.491.000,00	30.468.050,00	-	-	-	30.468.050,00	(22.950,00)
2 18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.009.723.000,00	-	-	-	4.009.723.000,00	3.813.093.136,00	-	-	-	3.813.093.136,00	(196.629.864,00)
2 18 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.009.723.000,00	-	-	-	4.009.723.000,00	3.813.093.136,00	-	-	-	3.813.093.136,00	(196.629.864,00)
2 18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.233.794,00	-	-	-	274.233.794,00	274.192.058,00	-	-	-	274.192.058,00	(41.736,00)
2 18 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.233.794,00	-	-	-	274.233.794,00	274.192.058,00	-	-	-	274.192.058,00	(41.736,00)
2 18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	58.700.000,00	-	-	58.700.000,00	-	57.996.900,00	-	-	57.996.900,00	(703.100,00)
2 18 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	58.700.000,00	-	-	58.700.000,00	-	57.996.900,00	-	-	57.996.900,00	(703.100,00)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	753.933.953,00	-	-	-	753.933.953,00	726.670.083,00	-	-	-	726.670.083,00	(27.263.870,00)
	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	753.933.953,00	-	-	-	753.933.953,00	726.670.083,00	-	-	-	726.670.083,00	(27.263.870,00)
2 18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.823.300,00	-	-	-	373.823.300,00	350.554.142,00	-	-	-	350.554.142,00	(23.269.158,00)
2 18 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.397.800,00	-	-	-	53.397.800,00	50.578.142,00	-	-	-	50.578.142,00	(2.819.658,00)
2 18 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.510.000,00	-	-	-	266.510.000,00	246.575.000,00	-	-	-	246.575.000,00	(19.935.000,00)
2 18 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.915.500,00	-	-	-	53.915.500,00	53.401.000,00	-	-	-	53.401.000,00	(514.500,00)
2 18	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	34.700.000,00	-	-	-	34.700.000,00	30.371.000,00	-	-	-	30.371.000,00	(4.329.000,00)
2 18	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	34.700.000,00	-	-	-	34.700.000,00	30.371.000,00	-	-	-	30.371.000,00	(4.329.000,00)
2 18 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	34.700.000,00	-	-	-	34.700.000,00	30.371.000,00	-	-	-	30.371.000,00	(4.329.000,00)
2 18	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	308.848.200,00	-	-	-	308.848.200,00	294.344.205,00	-	-	-	294.344.205,00	(14.503.995,00)
2 18	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	308.848.200,00	-	-	-	308.848.200,00	294.344.205,00	-	-	-	294.344.205,00	(14.503.995,00)
2 18 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	308.848.200,00	-	-	-	308.848.200,00	294.344.205,00	-	-	-	294.344.205,00	(14.503.995,00)
2 18	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	798.175.500,00	-	-	-	798.175.500,00	780.764.791,00	-	-	-	780.764.791,00	(17.410.709,00)
2 18	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	798.175.500,00	-	-	-	798.175.500,00	780.764.791,00	-	-	-	780.764.791,00	(17.410.709,00)
2 18 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	227.314.000,00	-	-	-	227.314.000,00	226.516.500,00	-	-	-	226.516.500,00	(797.500,00)
2 18 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	222.501.500,00	-	-	-	222.501.500,00	220.811.828,00	-	-	-	220.811.828,00	(1.689.672,00)
2 18 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	348.360.000,00	-	-	-	348.360.000,00	333.436.463,00	-	-	-	333.436.463,00	(14.923.537,00)
2 18	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	462.675.000,00	-	-	-	462.675.000,00	434.873.708,00	-	-	-	434.873.708,00	(27.801.292,00)
2 18	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	462.675.000,00	-	-	-	462.675.000,00	434.873.708,00	-	-	-	434.873.708,00	(27.801.292,00)
2 18 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	420.273.500,00	-	-	-	420.273.500,00	392.741.208,00	-	-	-	392.741.208,00	(27.532.292,00)
2 18 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	42.401.500,00	-	-	-	42.401.500,00	42.132.500,00	-	-	-	42.132.500,00	(269.000,00)
2 18	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	198.248.500,00	-	-	-	198.248.500,00	187.863.400,00	-	-	-	187.863.400,00	(10.385.100,00)
2 18	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.248.500,00	-	-	-	198.248.500,00	187.863.400,00	-	-	-	187.863.400,00	(10.385.100,00)
2 18 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	198.248.500,00	-	-	-	198.248.500,00	187.863.400,00	-	-	-	187.863.400,00	(10.385.100,00)
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.968.389.861,00	-	-	-	7.968.389.861,00	7.867.451.678,90	-	-	-	7.867.451.678,90	(100.938.182,10)
2 22	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	7.968.389.861,00	-	-	-	7.968.389.861,00	7.867.451.678,90	-	-	-	7.867.451.678,90	(100.938.182,10)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Setelah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
2	19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	475.000.000,00	-	-	-	475.000.000,00	469.713.928,00	-	-	-	469.713.928,00	(5.286.072,00)
2	19	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	475.000.000,00	-	-	-	475.000.000,00	469.713.928,00	-	-	-	469.713.928,00	(5.286.072,00)
2	19	08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	475.000.000,00	-	-	-	475.000.000,00	469.713.928,00	-	-	-	469.713.928,00	(5.286.072,00)
2	19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.493.389.861,00	-	-	-	7.493.389.861,00	7.397.737.750,90	-	-	-	7.397.737.750,90	(95.652.110,10)
2	19	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.015.546.361,00	-	-	-	3.015.546.361,00	2.982.087.275,90	-	-	-	2.982.087.275,90	(33.459.085,10)
2	19	03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3.015.546.361,00	-	-	-	3.015.546.361,00	2.982.087.275,90	-	-	-	2.982.087.275,90	(33.459.085,10)
2	19	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.658.000.000,00	-	-	-	1.658.000.000,00	1.655.711.000,00	-	-	-	1.655.711.000,00	(2.289.000,00)
2	19	02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1.658.000.000,00	-	-	-	1.658.000.000,00	1.655.711.000,00	-	-	-	1.655.711.000,00	(2.289.000,00)
2	19	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.203.843.500,00	-	-	-	2.203.843.500,00	2.144.482.100,00	-	-	-	2.144.482.100,00	(59.361.400,00)
2	19	02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.203.843.500,00	-	-	-	2.203.843.500,00	2.144.482.100,00	-	-	-	2.144.482.100,00	(59.361.400,00)
2	19	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	616.000.000,00	-	-	-	616.000.000,00	615.457.375,00	-	-	-	615.457.375,00	(542.625,00)
2	19	01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasilan Festival dan Olahraga Rekreasi	616.000.000,00	-	-	-	616.000.000,00	615.457.375,00	-	-	-	615.457.375,00	(542.625,00)
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	125.000.000,00	-	-	-	125.000.000,00	123.426.700,00	-	-	-	123.426.700,00	(1.573.300,00)
2	16	Dinas Komunikasi dan Informatika	125.000.000,00	-	-	-	125.000.000,00	123.426.700,00	-	-	-	123.426.700,00	(1.573.300,00)
2	20	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	125.000.000,00	-	-	-	125.000.000,00	123.426.700,00	-	-	-	123.426.700,00	(1.573.300,00)
2	20	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	-	-	-	125.000.000,00	123.426.700,00	-	-	-	123.426.700,00	(1.573.300,00)
2	20	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	125.000.000,00	-	-	-	125.000.000,00	123.426.700,00	-	-	-	123.426.700,00	(1.573.300,00)
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	267.872.000,00	25.000.000,00	-	-	292.872.000,00	260.972.875,00	23.920.000,00	-	-	284.892.875,00	(7.979.125,00)
2	16	Dinas Komunikasi dan Informatika	267.872.000,00	25.000.000,00	-	-	292.872.000,00	260.972.875,00	23.920.000,00	-	-	284.892.875,00	(7.979.125,00)
2	21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	267.872.000,00	25.000.000,00	-	-	292.872.000,00	260.972.875,00	23.920.000,00	-	-	284.892.875,00	(7.979.125,00)
2	21	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	267.872.000,00	25.000.000,00	-	-	292.872.000,00	260.972.875,00	23.920.000,00	-	-	284.892.875,00	(7.979.125,00)
2	21	03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	41.752.000,00	-	-	-	41.752.000,00	41.639.100,00	-	-	-	41.639.100,00	(112.900,00)
2	21	04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	226.120.000,00	25.000.000,00	-	-	251.120.000,00	219.333.775,00	23.920.000,00	-	-	243.253.775,00	(7.866.225,00)
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8.882.974.689,00	17.800.000,00	-	-	8.900.774.689,00	8.686.516.884,00	17.300.000,00	-	-	8.703.816.884,00	(196.957.805,00)
2	22	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	8.882.974.689,00	17.800.000,00	-	-	8.900.774.689,00	8.686.516.884,00	17.300.000,00	-	-	8.703.816.884,00	(196.957.805,00)
2	22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.890.274.689,00	17.800.000,00	-	-	6.908.074.689,00	6.701.251.234,00	17.300.000,00	-	-	6.718.551.234,00	(189.523.455,00)
2	22	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00	29.631.600,00	-	-	-	29.631.600,00	(368.400,00)
2	22	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00	29.631.600,00	-	-	-	29.631.600,00	(368.400,00)
2	22	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.400.232.397,00	-	-	-	4.400.232.397,00	4.232.010.370,00	-	-	-	4.232.010.370,00	(168.222.027,00)
2	22	01 Penediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.400.232.397,00	-	-	-	4.400.232.397,00	4.232.010.370,00	-	-	-	4.232.010.370,00	(168.222.027,00)
2	22	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.000.000,00	-	-	-	250.000.000,00	249.536.743,00	-	-	-	249.536.743,00	(463.257,00)
2	22	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	-	-	-	250.000.000,00	249.536.743,00	-	-	-	249.536.743,00	(463.257,00)
2	22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	17.800.000,00	-	-	17.800.000,00	-	17.300.000,00	-	-	17.300.000,00	(500.000,00)
2	22	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	17.800.000,00	-	-	17.800.000,00	-	17.300.000,00	-	-	17.300.000,00	(500.000,00)
2	22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.065.042.292,00	-	-	-	2.065.042.292,00	2.045.794.390,00	-	-	-	2.045.794.390,00	(19.247.902,00)
2	22	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.065.042.292,00	-	-	-	2.065.042.292,00	2.045.794.390,00	-	-	-	2.045.794.390,00	(19.247.902,00)
2	22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000,00	-	-	-	145.000.000,00	144.278.131,00	-	-	-	144.278.131,00	(721.869,00)
2	22	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000,00	-	-	-	55.000.000,00	54.299.616,00	-	-	-	54.299.616,00	(700.384,00)
2	22	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	49.988.515,00	-	-	-	49.988.515,00	(11.485,00)
2	22	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	-	-	-	40.000.000,00	39.990.000,00	-	-	-	39.990.000,00	(10.000,00)
2	22	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.892.700.000,00	-	-	-	1.892.700.000,00	1.885.539.500,00	-	-	-	1.885.539.500,00	(7.160.500,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 22	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.892.700.000,00	-	-	-	1.892.700.000,00	1.885.539.500,00	-	-	-	1.885.539.500,00	(7.160.500,00)
2 22 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.622.700.000,00	-	-	-	1.622.700.000,00	1.615.824.500,00	-	-	-	1.615.824.500,00	(6.875.500,00)
2 22 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	270.000.000,00	-	-	-	270.000.000,00	269.715.000,00	-	-	-	269.715.000,00	(285.000,00)
2 22	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	49.883.250,00	-	-	-	49.883.250,00	(116.750,00)
2 22	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	49.883.250,00	-	-	-	49.883.250,00	(116.750,00)
2 22 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	49.883.250,00	-	-	-	49.883.250,00	(116.750,00)
2 22	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	49.842.900,00	-	-	-	49.842.900,00	(157.100,00)
2 22	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	49.842.900,00	-	-	-	49.842.900,00	(157.100,00)
2 22 02	Pengembangan Cagar Budaya	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	49.842.900,00	-	-	-	49.842.900,00	(157.100,00)
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.163.652.983,00	77.798.440,00	-	-	6.241.451.423,00	5.701.637.267,40	76.869.150,00	-	-	5.778.506.417,40	(462.945.005,60)
2 23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.163.652.983,00	77.798.440,00	-	-	6.241.451.423,00	5.701.637.267,40	76.869.150,00	-	-	5.778.506.417,40	(462.945.005,60)
2 23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.085.304.767,00	12.210.000,00	-	-	5.097.514.767,00	4.675.476.773,00	11.400.000,00	-	-	4.686.876.773,00	(410.637.994,00)
2 23	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.418.000,00	-	-	-	42.418.000,00	39.826.600,00	-	-	-	39.826.600,00	(2.591.400,00)
2 23 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.418.000,00	-	-	-	42.418.000,00	39.826.600,00	-	-	-	39.826.600,00	(2.591.400,00)
2 23	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.040.291.218,00	-	-	-	4.040.291.218,00	3.723.966.456,00	-	-	-	3.723.966.456,00	(316.324.762,00)
2 23 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.040.291.218,00	-	-	-	4.040.291.218,00	3.723.966.456,00	-	-	-	3.723.966.456,00	(316.324.762,00)
2 23	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.954.000,00	-	-	-	152.954.000,00	147.321.811,00	-	-	-	147.321.811,00	(5.632.189,00)
2 23 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.954.000,00	-	-	-	152.954.000,00	147.321.811,00	-	-	-	147.321.811,00	(5.632.189,00)
2 23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12.210.000,00	-	-	12.210.000,00	-	11.400.000,00	-	-	11.400.000,00	(810.000,00)
2 23 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	12.210.000,00	-	-	12.210.000,00	-	11.400.000,00	-	-	11.400.000,00	(810.000,00)
2 23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.950.000,00	-	-	-	608.950.000,00	539.290.440,00	-	-	-	539.290.440,00	(69.659.560,00)
2 23 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	608.950.000,00	-	-	-	608.950.000,00	539.290.440,00	-	-	-	539.290.440,00	(69.659.560,00)
2 23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.691.549,00	-	-	-	240.691.549,00	225.071.466,00	-	-	-	225.071.466,00	(15.620.083,00)
2 23 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.903.780,00	-	-	-	82.903.780,00	80.504.120,00	-	-	-	80.504.120,00	(2.399.660,00)
2 23 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.378.940,00	-	-	-	94.378.940,00	90.395.146,00	-	-	-	90.395.146,00	(3.983.794,00)
2 23 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.408.829,00	-	-	-	63.408.829,00	54.172.200,00	-	-	-	54.172.200,00	(9.236.629,00)
2 23	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	950.310.560,00	65.588.440,00	-	-	1.015.899.000,00	922.530.994,40	65.469.150,00	-	-	988.000.144,40	(27.898.855,60)
2 23	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	292.251.560,00	65.588.440,00	-	-	357.840.000,00	287.519.994,40	65.469.150,00	-	-	352.989.144,40	(4.850.855,60)
2 23 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	291.040.000,00	-	-	-	291.040.000,00	286.369.994,40	-	-	-	286.369.994,40	(4.670.005,60)
2 23 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1.211.560,00	65.588.440,00	-	-	66.800.000,00	1.150.000,00	65.469.150,00	-	-	66.619.150,00	(180.850,00)
2 23	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	658.059.000,00	-	-	-	658.059.000,00	635.011.000,00	-	-	-	635.011.000,00	(23.048.000,00)
2 23 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	558.059.000,00	-	-	-	558.059.000,00	541.691.000,00	-	-	-	541.691.000,00	(16.368.000,00)
	04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	93.320.000,00	-	-	-	93.320.000,00	(6.680.000,00)
2 23	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	128.037.656,00	-	-	-	128.037.656,00	103.629.500,00	-	-	-	103.629.500,00	(24.408.156,00)
2 23	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	128.037.656,00	-	-	-	128.037.656,00	103.629.500,00	-	-	-	103.629.500,00	(24.408.156,00)
2 23 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	106.849.718,00	-	-	-	106.849.718,00	85.604.500,00	-	-	-	85.604.500,00	(21.245.218,00)
	02 yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Pengembangan, Pengamatan dan Pemanfaatan naskah kuno	21.187.938,00	-	-	-	21.187.938,00	18.025.000,00	-	-	-	18.025.000,00	(3.162.938,00)
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	868.470.773,00	-	-	-	868.470.773,00	846.863.907,00	-	-	-	846.863.907,00	(21.606.866,00)
2 23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	868.470.773,00	-	-	-	868.470.773,00	846.863.907,00	-	-	-	846.863.907,00	(21.606.866,00)
2 24	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	705.708.673,00	-	-	-	705.708.673,00	688.097.607,00	-	-	-	688.097.607,00	(17.611.066,00)
2 24	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	363.150.000,00	-	-	-	363.150.000,00	349.455.907,00	-	-	-	349.455.907,00	(13.694.093,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)			
		Belanja					Belanja								
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja				
2	24	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	363.150.000,00	-	-	-	-	363.150.000,00	349.455.907,00	-	-	-	349.455.907,00	(13.694.093,00)
2	24		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	342.558.673,00	-	-	-	-	342.558.673,00	338.641.700,00	-	-	-	338.641.700,00	(3.916.973,00)
2	24	02	AKUISISI, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	342.558.673,00	-	-	-	-	342.558.673,00	338.641.700,00	-	-	-	338.641.700,00	(3.916.973,00)
2	24		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	162.762.100,00	-	-	-	-	162.762.100,00	158.766.300,00	-	-	-	158.766.300,00	(3.995.800,00)
2	24		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	162.762.100,00	-	-	-	-	162.762.100,00	158.766.300,00	-	-	-	158.766.300,00	(3.995.800,00)
2	24	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	81.211.400,00	-	-	-	-	81.211.400,00	78.057.100,00	-	-	-	78.057.100,00	(3.154.300,00)
2	24	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	81.550.700,00	-	-	-	-	81.550.700,00	80.709.200,00	-	-	-	80.709.200,00	(841.500,00)
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	25.922.927.284,00	490.868.300,00	-	-	-	26.413.795.584,00	22.497.741.070,00	-	-	-	22.977.518.701,00	(3.436.276.883,00)
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	401.308.200,00	3.196.800,00	-	-	-	404.505.000,00	398.456.526,00	-	-	-	401.398.026,00	(3.106.974,00)
2	09		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	401.308.200,00	3.196.800,00	-	-	-	404.505.000,00	398.456.526,00	-	-	-	401.398.026,00	(3.106.974,00)
3	25		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	183.044.200,00	3.196.800,00	-	-	-	186.241.000,00	181.673.817,00	-	-	-	184.615.317,00	(1.625.683,00)
3	25		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	183.044.200,00	3.196.800,00	-	-	-	186.241.000,00	181.673.817,00	-	-	-	184.615.317,00	(1.625.683,00)
3	25	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.691.000,00	-	-	-	-	18.691.000,00	18.399.230,00	-	-	-	18.399.230,00	(291.770,00)
3	25	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	164.353.200,00	3.196.800,00	-	-	-	167.550.000,00	163.274.587,00	-	-	-	166.216.087,00	(1.333.913,00)
3	25		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	34.510.000,00	-	-	-	-	34.510.000,00	34.353.600,00	-	-	-	34.353.600,00	(156.400,00)
3	25		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disahakan Dalam Kabupaten/Kota	34.510.000,00	-	-	-	-	34.510.000,00	34.353.600,00	-	-	-	34.353.600,00	(156.400,00)
3	25	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disahakan dalam Kabupaten/Kota	34.510.000,00	-	-	-	-	34.510.000,00	34.353.600,00	-	-	-	34.353.600,00	(156.400,00)
3	25		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	183.754.000,00	-	-	-	-	183.754.000,00	182.429.109,00	-	-	-	182.429.109,00	(1.324.891,00)
3	25		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	65.164.000,00	-	-	-	-	65.164.000,00	64.706.512,00	-	-	-	64.706.512,00	(457.488,00)
3	25	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	65.164.000,00	-	-	-	-	65.164.000,00	64.706.512,00	-	-	-	64.706.512,00	(457.488,00)
3	25		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	118.590.000,00	-	-	-	-	118.590.000,00	117.722.597,00	-	-	-	117.722.597,00	(867.403,00)
3	25	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.590.000,00	-	-	-	-	118.590.000,00	117.722.597,00	-	-	-	117.722.597,00	(867.403,00)
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.856.446.866,00	-	-	-	-	1.856.446.866,00	1.852.993.139,00	-	-	-	1.852.993.139,00	(3.453.727,00)
2	22		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.856.446.866,00	-	-	-	-	1.856.446.866,00	1.852.993.139,00	-	-	-	1.852.993.139,00	(3.453.727,00)
3	26		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	437.660.866,00	-	-	-	-	437.660.866,00	436.897.915,00	-	-	-	436.897.915,00	(762.951,00)
3	26		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	437.660.866,00	-	-	-	-	437.660.866,00	436.897.915,00	-	-	-	436.897.915,00	(762.951,00)
3	26	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00	49.485.250,00	-	-	-	49.485.250,00	(514.750,00)
3	26	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	387.660.866,00	-	-	-	-	387.660.866,00	387.412.665,00	-	-	-	387.412.665,00	(248.201,00)
3	26		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.140.786.000,00	-	-	-	-	1.140.786.000,00	1.138.444.624,00	-	-	-	1.138.444.624,00	(2.341.376,00)
3	26		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.140.786.000,00	-	-	-	-	1.140.786.000,00	1.138.444.624,00	-	-	-	1.138.444.624,00	(2.341.376,00)
3	26	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.140.786.000,00	-	-	-	-	1.140.786.000,00	1.138.444.624,00	-	-	-	1.138.444.624,00	(2.341.376,00)
3	26		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	278.000.000,00	-	-	-	-	278.000.000,00	277.650.600,00	-	-	-	277.650.600,00	(349.400,00)
3	26		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	278.000.000,00	-	-	-	-	278.000.000,00	277.650.600,00	-	-	-	277.650.600,00	(349.400,00)
3	26	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	278.000.000,00	-	-	-	-	278.000.000,00	277.650.600,00	-	-	-	277.650.600,00	(349.400,00)
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.990.238.800,00	344.503.500,00	-	-	-	5.334.742.300,00	4.573.732.142,00	-	-	-	4.913.122.573,00	(421.619.727,00)
2	09		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.990.238.800,00	344.503.500,00	-	-	-	5.334.742.300,00	4.573.732.142,00	-	-	-	4.913.122.573,00	(421.619.727,00)
3	27		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.248.034.500,00	21.922.500,00	-	-	-	2.269.957.000,00	2.131.996.545,00	-	-	-	2.151.431.701,00	(118.525.299,00)
3	27		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.118.692.500,00	21.922.500,00	-	-	-	2.140.615.000,00	2.003.218.525,00	-	-	-	2.022.653.681,00	(117.961.319,00)
3	27	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	23.550.000,00	-	-	-	-	23.550.000,00	23.100.000,00	-	-	-	23.100.000,00	(450.000,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)		
		Belanja					Belanja							
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja			
3	27	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.095.142.500,00	21.922.500,00	-	-	2.117.065.000,00	1.980.118.525,00	19.435.156,00	-	-	1.999.553.681,00	(117.511.319,00)
3	27		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	129.342.000,00	-	-	-	129.342.000,00	128.778.020,00	-	-	-	128.778.020,00	(563.980,00)
3	27	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	129.342.000,00	-	-	-	129.342.000,00	128.778.020,00	-	-	-	128.778.020,00	(563.980,00)
3	27		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	231.988.000,00	207.696.000,00	-	-	439.684.000,00	214.327.625,00	205.629.475,00	-	-	419.957.100,00	(19.726.900,00)
3	27		Pembangunan Prasarana Pertanian	14.954.000,00	-	-	-	14.954.000,00	1.490.000,00	-	-	-	1.490.000,00	(13.464.000,00)
3	27	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	14.954.000,00	-	-	-	14.954.000,00	1.490.000,00	-	-	-	1.490.000,00	(13.464.000,00)
			Pembangunan Prasarana Pertanian	217.034.000,00	207.696.000,00	-	-	424.730.000,00	212.837.625,00	205.629.475,00	-	-	418.467.100,00	(6.262.900,00)
		03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.200.000,00	51.615.000,00	-	-	52.815.000,00	1.200.000,00	51.029.475,00	-	-	52.229.475,00	(585.525,00)
		07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	5.550.000,00	1.665.000,00	-	-	7.215.000,00	4.897.000,00	1.500.000,00	-	-	6.397.000,00	(818.000,00)
		09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	210.284.000,00	154.416.000,00	-	-	364.700.000,00	206.740.625,00	153.100.000,00	-	-	359.840.625,00	(4.859.375,00)
3	27		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	337.591.000,00	-	-	-	337.591.000,00	310.429.397,00	-	-	-	310.429.397,00	(27.161.603,00)
3	27		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	235.103.000,00	-	-	-	235.103.000,00	230.392.697,00	-	-	-	230.392.697,00	(4.710.303,00)
3	27	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	235.103.000,00	-	-	-	235.103.000,00	230.392.697,00	-	-	-	230.392.697,00	(4.710.303,00)
			Penyediaan pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00	(14.650.000,00)
		02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	350.000,00	-	-	-	350.000,00	(14.650.000,00)
3	27		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	87.488.000,00	-	-	-	87.488.000,00	79.686.700,00	-	-	-	79.686.700,00	(7.801.300,00)
3	27	01	Pendampingan Unit	16.543.000,00	-	-	-	16.543.000,00	9.234.500,00	-	-	-	9.234.500,00	(7.308.500,00)
		02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk	70.945.000,00	-	-	-	70.945.000,00	70.452.200,00	-	-	-	70.452.200,00	(492.800,00)
3	27		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	167.855.000,00	-	-	-	167.855.000,00	155.018.250,00	-	-	-	155.018.250,00	(12.836.750,00)
3	27		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	167.855.000,00	-	-	-	167.855.000,00	155.018.250,00	-	-	-	155.018.250,00	(12.836.750,00)
3	27	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	167.855.000,00	-	-	-	167.855.000,00	155.018.250,00	-	-	-	155.018.250,00	(12.836.750,00)
3	27		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	33.600.000,00	-	-	-	33.600.000,00	25.025.150,00	-	-	-	25.025.150,00	(8.574.850,00)
3	27		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	33.600.000,00	-	-	-	33.600.000,00	25.025.150,00	-	-	-	25.025.150,00	(8.574.850,00)
3	27	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	33.600.000,00	-	-	-	33.600.000,00	25.025.150,00	-	-	-	25.025.150,00	(8.574.850,00)
3	27		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.971.170.300,00	114.885.000,00	-	-	2.086.055.300,00	1.736.935.175,00	114.325.800,00	-	-	1.851.260.975,00	(234.794.325,00)
3	27		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.971.170.300,00	114.885.000,00	-	-	2.086.055.300,00	1.736.935.175,00	114.325.800,00	-	-	1.851.260.975,00	(234.794.325,00)
3	27	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.946.820.300,00	-	-	-	1.946.820.300,00	1.712.585.175,00	-	-	-	1.712.585.175,00	(234.235.125,00)
3	27	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	24.350.000,00	114.885.000,00	-	-	139.235.000,00	24.350.000,00	114.325.800,00	-	-	138.675.800,00	(559.200,00)
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	16.209.620.030,00	143.168.000,00	-	-	16.352.788.030,00	15.014.160.333,00	137.445.700,00	-	-	15.151.606.033,00	(1.201.181.997,00)
3	30		Dinas Perdagangan	16.209.620.030,00	143.168.000,00	-	-	16.352.788.030,00	15.014.160.333,00	137.445.700,00	-	-	15.151.606.033,00	(1.201.181.997,00)
3	30		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.852.385.086,00	64.168.000,00	-	-	10.916.553.086,00	9.773.661.793,00	58.913.200,00	-	-	9.832.574.993,00	(1.083.978.093,00)
3	30		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	894.000,00	-	-	-	894.000,00	894.000,00	-	-	-	894.000,00	-
3	30	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	894.000,00	-	-	-	894.000,00	894.000,00	-	-	-	894.000,00	-
3	30		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.353.202.622,00	-	-	-	9.353.202.622,00	8.336.798.151,00	-	-	-	8.336.798.151,00	(1.016.404.471,00)
3	30	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.353.202.622,00	-	-	-	9.353.202.622,00	8.336.798.151,00	-	-	-	8.336.798.151,00	(1.016.404.471,00)
3	30		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.544.700,00	-	-	-	61.544.700,00	61.157.000,00	-	-	-	61.157.000,00	(387.700,00)
3	30	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61.544.700,00	-	-	-	61.544.700,00	61.157.000,00	-	-	-	61.157.000,00	(387.700,00)
3	30		Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.443.200,00	-	-	-	291.443.200,00	291.443.200,00	-	-	-	291.443.200,00	-
3	30	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	291.443.200,00	-	-	-	291.443.200,00	291.443.200,00	-	-	-	291.443.200,00	-
		06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	64.168.000,00	-	-	64.168.000,00	-	58.913.200,00	-	-	58.913.200,00	(5.254.800,00)
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	64.168.000,00	-	-	64.168.000,00	-	58.913.200,00	-	-	58.913.200,00	(5.254.800,00)
3	30		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.249.250,00	-	-	-	754.249.250,00	713.883.400,00	-	-	-	713.883.400,00	(40.365.850,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 30 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	754.249.250,00	-	-	-	754.249.250,00	713.883.400,00	-	-	-	713.883.400,00	(40.365.850,00)
3 30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.051.314,00	-	-	-	391.051.314,00	369.486.042,00	-	-	-	369.486.042,00	(21.565.272,00)
3 30 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	238.701.714,00	-	-	-	238.701.714,00	229.311.692,00	-	-	-	229.311.692,00	(9.390.022,00)
3 30 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.696.200,00	-	-	-	71.696.200,00	64.619.200,00	-	-	-	64.619.200,00	(7.077.000,00)
3 30 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.653.400,00	-	-	-	80.653.400,00	75.555.150,00	-	-	-	75.555.150,00	(5.098.250,00)
3 30	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	267.374.400,00	-	-	-	267.374.400,00	267.325.700,00	-	-	-	267.325.700,00	(48.700,00)
3 30	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	267.374.400,00	-	-	-	267.374.400,00	267.325.700,00	-	-	-	267.325.700,00	(48.700,00)
3 30 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	267.374.400,00	-	-	-	267.374.400,00	267.325.700,00	-	-	-	267.325.700,00	(48.700,00)
3 30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.294.887.270,00	79.000.000,00	-	-	4.373.887.270,00	4.187.524.940,00	78.532.500,00	-	-	4.266.057.440,00	(107.829.830,00)
3 30	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	782.300.070,00	79.000.000,00	-	-	861.300.070,00	719.639.340,00	78.532.500,00	-	-	798.171.840,00	(63.128.230,00)
3 30 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	61.046.000,00	-	-	-	61.046.000,00	59.663.800,00	-	-	-	59.663.800,00	(1.382.200,00)
3 30 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	721.254.070,00	79.000.000,00	-	-	800.254.070,00	659.975.540,00	78.532.500,00	-	-	738.508.040,00	(61.746.030,00)
3 30	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.512.587.200,00	-	-	-	3.512.587.200,00	3.467.885.600,00	-	-	-	3.467.885.600,00	(44.701.600,00)
3 30 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	210.310.000,00	-	-	-	210.310.000,00	209.090.000,00	-	-	-	209.090.000,00	(1.220.000,00)
3 30 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.302.277.200,00	-	-	-	3.302.277.200,00	3.258.795.600,00	-	-	-	3.258.795.600,00	(43.481.600,00)
3 30	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	250.257.000,00	-	-	-	250.257.000,00	249.511.500,00	-	-	-	249.511.500,00	(745.500,00)
3 30	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	232.264.000,00	-	-	-	232.264.000,00	231.818.500,00	-	-	-	231.818.500,00	(445.500,00)
3 30 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	96.307.000,00	-	-	-	96.307.000,00	96.181.000,00	-	-	-	96.181.000,00	(126.000,00)
03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	135.957.000,00	-	-	-	135.957.000,00	135.637.500,00	-	-	-	135.637.500,00	(319.500,00)
3 30	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.993.000,00	-	-	-	17.993.000,00	17.693.000,00	-	-	-	17.693.000,00	(300.000,00)
3 30 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	17.993.000,00	-	-	-	17.993.000,00	17.693.000,00	-	-	-	17.693.000,00	(300.000,00)
3 30	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	235.684.724,00	-	-	-	235.684.724,00	230.943.400,00	-	-	-	230.943.400,00	(4.741.324,00)
3 30	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	235.684.724,00	-	-	-	235.684.724,00	230.943.400,00	-	-	-	230.943.400,00	(4.741.324,00)
3 30 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	226.416.724,00	-	-	-	226.416.724,00	222.043.400,00	-	-	-	222.043.400,00	(4.373.324,00)
3 30 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	9.268.000,00	-	-	-	9.268.000,00	8.900.000,00	-	-	-	8.900.000,00	(368.000,00)
3 30	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	309.031.550,00	-	-	-	309.031.550,00	305.193.000,00	-	-	-	305.193.000,00	(3.838.550,00)
3 30	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	309.031.550,00	-	-	-	309.031.550,00	305.193.000,00	-	-	-	305.193.000,00	(3.838.550,00)
3 30 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	129.031.550,00	-	-	-	129.031.550,00	125.193.000,00	-	-	-	125.193.000,00	(3.838.550,00)
3 30 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	180.000.000,00	-	-	-	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	-	180.000.000,00	-
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.465.313.388,00	-	-	-	2.465.313.388,00	658.398.930,00	-	-	-	658.398.930,00	(1.806.914.458,00)
2 07	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2.465.313.388,00	-	-	-	2.465.313.388,00	658.398.930,00	-	-	-	658.398.930,00	(1.806.914.458,00)
3 31	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.090.592.950,00	-	-	-	2.090.592.950,00	283.918.745,00	-	-	-	283.918.745,00	(1.806.674.205,00)
3 31	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.090.592.950,00	-	-	-	2.090.592.950,00	283.918.745,00	-	-	-	283.918.745,00	(1.806.674.205,00)
3 31 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	22.906.150,00	-	-	-	22.906.150,00	22.898.000,00	-	-	-	22.898.000,00	(8.150,00)
3 31 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	23.000.000,00	-	-	-	23.000.000,00	22.990.000,00	-	-	-	22.990.000,00	(10.000,00)
3 31 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.044.686.800,00	-	-	-	2.044.686.800,00	238.030.745,00	-	-	-	238.030.745,00	(1.806.656.055,00)
3 31	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	374.720.438,00	-	-	-	374.720.438,00	374.480.185,00	-	-	-	374.480.185,00	(240.253,00)
3 31	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI	374.720.438,00	-	-	-	374.720.438,00	374.480.185,00	-	-	-	374.480.185,00	(240.253,00)
3 31 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINas	374.720.438,00	-	-	-	374.720.438,00	374.480.185,00	-	-	-	374.480.185,00	(240.253,00)
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	94.905.000,00			94.905.000,00		93.174.930,00			93.174.930,00	(1.730.070,00)
4	01	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	152.976.926,00			152.976.926,00		152.284.900,00			(692.026,00)
4	01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.433.430,00	-			342.433.430,00	315.887.251,00	-			(26.546.179,00)
4	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	342.433.430,00	-			342.433.430,00	315.887.251,00	-			(26.546.179,00)
4	01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.259.126,00	-			49.259.126,00	44.619.207,00	-			(4.639.919,00)
4	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.485.126,00	-			26.485.126,00	23.285.607,00	-			(3.199.519,00)
4	01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.774.000,00	-			3.774.000,00	2.911.800,00	-			(862.200,00)
4	01	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.000.000,00	-			19.000.000,00	18.421.800,00	-			(578.200,00)
4	01		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	890.840.288,00	-			890.840.288,00	868.234.850,00	-			(22.605.438,00)
4	01		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	890.840.288,00	-			890.840.288,00	868.234.850,00	-			(22.605.438,00)
4	01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	390.500.000,00	-			390.500.000,00	376.100.000,00	-			(14.400.000,00)
4	01	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	213.632.778,00	-			213.632.778,00	206.675.725,00	-			(6.957.053,00)
4	01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	286.707.510,00	-			286.707.510,00	285.459.125,00	-			(1.248.385,00)
4	01		Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	3.202.387.737,00	48.277.600,00			3.250.665.337,00	3.177.432.374,00	48.257.600,00			(24.975.363,00)
4	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.897.544.610,00	48.277.600,00			2.945.822.210,00	2.872.766.503,00	48.257.600,00			(24.798.107,00)
4	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.358.960,00	-			14.358.960,00	14.358.500,00	-			(460,00)
4	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.358.960,00	-			14.358.960,00	14.358.500,00	-			(460,00)
4	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.663.571.476,00	-			1.663.571.476,00	1.648.355.058,00	-			(15.216.418,00)
4	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.663.571.476,00	-			1.663.571.476,00	1.648.355.058,00	-			(15.216.418,00)
4	01		Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.432.000,00	-			236.432.000,00	231.349.826,00	-			(5.082.174,00)
4	01	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.432.000,00	-			236.432.000,00	231.349.826,00	-			(5.082.174,00)
4	01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.300.000,00	48.277.600,00			49.577.600,00	1.300.000,00	48.257.600,00			(20.000,00)
4	01	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.300.000,00	48.277.600,00			49.577.600,00	1.300.000,00	48.257.600,00			(20.000,00)
4	01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.072.974,00	-			293.072.974,00	289.075.108,00	-			(3.997.866,00)
4	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	293.072.974,00	-			293.072.974,00	289.075.108,00	-			(3.997.866,00)
4	01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.809.200,00	-			688.809.200,00	688.328.011,00	-			(481.189,00)
4	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.290.200,00	-			22.290.200,00	21.809.011,00	-			(481.189,00)
4	01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	647.360.000,00	-			647.360.000,00	647.360.000,00	-			-
4	01	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.159.000,00	-			19.159.000,00	19.159.000,00	-			-
4	01		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	304.843.127,00	-			304.843.127,00	304.665.871,00	-			(177.256,00)
4	01		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	107.011.660,00	-			107.011.660,00	106.999.451,00	-			(12.209,00)
4	01	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	31.496.300,00	-			31.496.300,00	31.496.300,00	-			-
4	01	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	75.515.360,00	-			75.515.360,00	75.503.151,00	-			(12.209,00)
4	01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	197.831.467,00	-			197.831.467,00	197.666.420,00	-			(165.047,00)
4	01	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	124.454.027,00	-			124.454.027,00	124.341.020,00	-			(113.007,00)
4	01	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	73.377.440,00	-			73.377.440,00	73.325.400,00	-			(52.040,00)
4	01		Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	14.920.880.794,00	178.265.065,00			15.099.145.859,00	13.833.036.800,00	143.865.000,00			(1.122.244.059,00)
4	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.526.860.170,00	3.265.065,00			1.530.125.235,00	1.309.841.800,00	2.865.000,00			(217.418.435,00)
4	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	-			20.000.000,00	11.829.400,00	-			(8.170.600,00)
4	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	-			20.000.000,00	11.829.400,00	-			(8.170.600,00)
4	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.007.694.810,00	-			1.007.694.810,00	906.628.617,00	-			(101.066.193,00)
4	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.007.694.810,00	-			1.007.694.810,00	906.628.617,00	-			(101.066.193,00)
4	01		Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.000.000,00	-			180.000.000,00	180.000.000,00	-			-
4	01	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000,00	-			180.000.000,00	180.000.000,00	-			-
4	01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	3.265.065,00			3.265.065,00	-	2.865.000,00			(400.065,00)
4	01	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	3.265.065,00			3.265.065,00	-	2.865.000,00			(400.065,00)
4	01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.215.360,00	-			259.215.360,00	170.065.062,00	-			(89.150.298,00)
4	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.215.360,00	-			259.215.360,00	170.065.062,00	-			(89.150.298,00)
4	01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.950.000,00	-			59.950.000,00	41.318.721,00	-			(18.631.279,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 01 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.467.282,00	-	-	-	481.467.282,00	408.229.634,00	-	-	-	408.229.634,00	(73.237.648,00)
5 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.985,00	45.077.300,00	-	-	45.641.285,00	500.000,00	43.925.000,00	-	-	44.425.000,00	(1.216.285,00)
5 01 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	563.985,00	45.077.300,00	-	-	45.641.285,00	500.000,00	43.925.000,00	-	-	44.425.000,00	(1.216.285,00)
5 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.662.000,00	-	-	-	935.662.000,00	838.111.325,00	-	-	-	838.111.325,00	(97.550.675,00)
5 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	935.662.000,00	-	-	-	935.662.000,00	838.111.325,00	-	-	-	838.111.325,00	(97.550.675,00)
5 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.806.968,00	-	-	-	218.806.968,00	215.242.941,00	-	-	-	215.242.941,00	(3.564.027,00)
5 01 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.730.400,00	-	-	-	85.730.400,00	82.272.546,00	-	-	-	82.272.546,00	(3.457.854,00)
5 01 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.616.000,00	-	-	-	77.616.000,00	77.588.195,00	-	-	-	77.588.195,00	(27.805,00)
5 01 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.460.568,00	-	-	-	55.460.568,00	55.382.200,00	-	-	-	55.382.200,00	(78.368,00)
5 01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.732.090.550,00	-	-	-	1.732.090.550,00	1.705.918.453,00	-	-	-	1.705.918.453,00	(26.172.097,00)
5 01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.591.623.100,00	-	-	-	1.591.623.100,00	1.567.439.103,00	-	-	-	1.567.439.103,00	(24.183.997,00)
5 01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	250.913.380,00	-	-	-	250.913.380,00	244.399.700,00	-	-	-	244.399.700,00	(6.513.680,00)
5 01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	147.815.700,00	-	-	-	147.815.700,00	147.815.700,00	-	-	-	147.815.700,00	-
5 01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	307.324.770,00	-	-	-	307.324.770,00	294.525.813,00	-	-	-	294.525.813,00	(12.798.957,00)
5 01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	885.569.250,00	-	-	-	885.569.250,00	880.697.890,00	-	-	-	880.697.890,00	(4.871.360,00)
5 01	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	140.467.450,00	-	-	-	140.467.450,00	138.479.350,00	-	-	-	138.479.350,00	(1.988.100,00)
5 01 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	96.660.650,00	-	-	-	96.660.650,00	95.793.600,00	-	-	-	95.793.600,00	(867.050,00)
5 01 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	43.806.800,00	-	-	-	43.806.800,00	42.685.750,00	-	-	-	42.685.750,00	(1.121.050,00)
5 01	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.357.785.500,00	-	-	-	1.357.785.500,00	1.242.483.870,00	-	-	-	1.242.483.870,00	(115.301.630,00)
5 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	499.015.120,00	-	-	-	499.015.120,00	492.812.750,00	-	-	-	492.812.750,00	(6.202.370,00)
5 01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.000.000,00	-	-	-	97.000.000,00	96.954.150,00	-	-	-	96.954.150,00	(45.850,00)
5 01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	174.350.000,00	-	-	-	174.350.000,00	172.378.350,00	-	-	-	172.378.350,00	(1.971.650,00)
5 01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	221.246.620,00	-	-	-	221.246.620,00	217.062.250,00	-	-	-	217.062.250,00	(4.184.370,00)
5 01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.418.500,00	-	-	-	6.418.500,00	6.418.000,00	-	-	-	6.418.000,00	(500,00)
5 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	185.982.000,00	-	-	-	185.982.000,00	178.256.840,00	-	-	-	178.256.840,00	(7.725.160,00)
5 01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.437.000,00	-	-	-	34.437.000,00	34.405.640,00	-	-	-	34.405.640,00	(31.360,00)
5 01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	151.545.000,00	-	-	-	151.545.000,00	143.851.200,00	-	-	-	143.851.200,00	(7.693.800,00)
5 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	672.788.380,00	-	-	-	672.788.380,00	571.414.280,00	-	-	-	571.414.280,00	(101.374.100,00)
5 01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	462.458.000,00	-	-	-	462.458.000,00	371.371.380,00	-	-	-	371.371.380,00	(91.086.620,00)
5 01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.254.880,00	-	-	-	47.254.880,00	43.926.800,00	-	-	-	43.926.800,00	(3.328.080,00)
5 01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147.975.500,00	-	-	-	147.975.500,00	142.945.100,00	-	-	-	142.945.100,00	(5.030.400,00)
5 01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	15.100.000,00	-	-	-	15.100.000,00	13.171.000,00	-	-	-	13.171.000,00	(1.929.000,00)
5 02	KEUANGAN	65.166.668.342,00	1.151.456.530,00	4.017.860.642,00	-	70.335.985.514,00	51.672.215.357,32	1.125.856.250,00	1.238.717.822,00	-	54.036.789.429,32	(16.299.196.084,68)
5 02	Badan Keuangan dan Aset Daerah	54.745.460.388,00	855.100.000,00	4.017.860.642,00	-	59.618.421.030,00	41.820.635.013,00	842.070.000,00	1.238.717.822,00	-	43.901.422.835,00	(15.716.998.195,00)
5 02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.370.339.388,00	855.100.000,00	-	-	51.225.439.388,00	37.850.342.343,00	842.070.000,00	-	-	38.692.412.343,00	(12.533.027.045,00)
5 02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	1.284.500,00	-	-	-	1.284.500,00	(715.500,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	1.284.500,00	-	-	-	1.284.500,00	(715.500,00)
5 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.995.937.209,00	-	-	-	28.995.937.209,00	18.437.680.458,00	-	-	-	18.437.680.458,00	(10.558.256.751,00)
5 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.995.937.209,00	-	-	-	28.995.937.209,00	18.437.680.458,00	-	-	-	18.437.680.458,00	(10.558.256.751,00)
5 02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	497.925.542,00	-	-	-	497.925.542,00	(2.074.458,00)
5 02 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	497.925.542,00	-	-	-	497.925.542,00	(2.074.458,00)
5 02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.310.000,00	855.100.000,00	-	-	860.410.000,00	5.310.000,00	842.070.000,00	-	-	847.380.000,00	(13.030.000,00)
5 02 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.310.000,00	855.100.000,00	-	-	860.410.000,00	5.310.000,00	842.070.000,00	-	-	847.380.000,00	(13.030.000,00)
5 02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.521.692.179,00	-	-	-	20.521.692.179,00	18.586.702.353,00	-	-	-	18.586.702.353,00	(1.934.989.826,00)
5 02 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.521.692.179,00	-	-	-	20.521.692.179,00	18.586.702.353,00	-	-	-	18.586.702.353,00	(1.934.989.826,00)
5 02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.400.000,00	-	-	-	345.400.000,00	321.439.490,00	-	-	-	321.439.490,00	(23.960.510,00)
5 02 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.000.000,00	-	-	-	115.000.000,00	102.431.240,00	-	-	-	102.431.240,00	(12.568.760,00)
5 02 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.400.000,00	-	-	-	122.400.000,00	122.121.000,00	-	-	-	122.121.000,00	(279.000,00)
5 02 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.000.000,00	-	-	-	108.000.000,00	96.887.250,00	-	-	-	96.887.250,00	(11.112.750,00)
5 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.225.173.000,00	-	4.017.860.642,00	-	6.243.033.642,00	2.125.152.500,00	-	1.238.717.822,00	-	3.363.870.322,00	(2.879.163.320,00)
5 02	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.026.814.000,00	-	-	-	1.026.814.000,00	980.184.900,00	-	-	-	980.184.900,00	(46.629.100,00)
5 02 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	83.421.000,00	-	-	-	83.421.000,00	75.421.000,00	-	-	-	75.421.000,00	(8.000.000,00)
5 02 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	56.819.000,00	-	-	-	56.819.000,00	36.743.500,00	-	-	-	36.743.500,00	(20.075.500,00)
5 02 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	16.876.000,00	-	-	-	16.876.000,00	16.335.600,00	-	-	-	16.335.600,00	(540.400,00)
5 02 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	23.640.000,00	-	-	-	23.640.000,00	22.858.200,00	-	-	-	22.858.200,00	(781.800,00)
5 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	154.679.000,00	-	-	-	154.679.000,00	154.335.500,00	-	-	-	154.335.500,00	(343.500,00)
5 02 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	154.679.000,00	-	-	-	154.679.000,00	154.574.000,00	-	-	-	154.574.000,00	(105.000,00)
5 02 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	536.700.000,00	-	-	-	536.700.000,00	519.917.100,00	-	-	-	519.917.100,00	(16.782.900,00)
5 02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	50.600.000,00	-	-	-	50.600.000,00	43.500.000,00	-	-	-	43.500.000,00	(7.100.000,00)
5 02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	45.500.000,00	-	-	-	45.500.000,00	39.505.000,00	-	-	-	39.505.000,00	(5.995.000,00)
5 02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	5.100.000,00	-	-	-	5.100.000,00	3.995.000,00	-	-	-	3.995.000,00	(1.105.000,00)
5 02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.147.759.000,00	-	-	-	1.147.759.000,00	1.101.467.600,00	-	-	-	1.101.467.600,00	(46.291.400,00)
5 02 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	135.000.000,00	-	-	-	135.000.000,00	134.929.000,00	-	-	-	134.929.000,00	(71.000,00)
5 02 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	66.000.000,00	-	-	-	66.000.000,00	54.135.000,00	-	-	-	54.135.000,00	(11.865.000,00)
5 02 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	80.000.000,00	-	-	-	80.000.000,00	79.280.000,00	-	-	-	79.280.000,00	(720.000,00)
5 02 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	866.759.000,00	-	-	-	866.759.000,00	833.123.600,00	-	-	-	833.123.600,00	(33.635.400,00)
5 02	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	4.017.860.642,00	-	4.017.860.642,00	-	-	1.238.717.822,00	-	1.238.717.822,00	(2.779.142.820,00)
5 02 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	4.017.860.642,00	-	4.017.860.642,00	-	-	1.238.717.822,00	-	1.238.717.822,00	(2.779.142.820,00)
5 02	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.149.948.000,00	-	-	-	2.149.948.000,00	1.845.140.170,00	-	-	-	1.845.140.170,00	(304.807.830,00)
5 02	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.149.948.000,00	-	-	-	2.149.948.000,00	1.845.140.170,00	-	-	-	1.845.140.170,00	(304.807.830,00)
5 02 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	157.142.000,00	-	-	-	157.142.000,00	46.495.000,00	-	-	-	46.495.000,00	(110.647.000,00)
5 02 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.953.206.000,00	-	-	-	1.953.206.000,00	1.764.750.170,00	-	-	-	1.764.750.170,00	(188.455.830,00)
5 02 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	39.600.000,00	-	-	-	39.600.000,00	33.895.000,00	-	-	-	33.895.000,00	(5.705.000,00)
5 02	Badan Pendapatan Daerah	10.421.207.954,00	296.356.530,00	-	-	10.717.564.484,00	9.851.580.344,32	283.786.250,00	-	-	10.135.366.594,32	(582.197.889,68)
5 02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.243.623.162,00	146.946.030,00	-	-	9.390.569.192,00	8.745.818.944,32	142.586.250,00	-	-	8.888.405.194,32	(502.163.997,68)
5 02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	2.547.500,00	-	-	-	2.547.500,00	(2.452.500,00)
5 02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	2.547.500,00	-	-	-	2.547.500,00	(2.452.500,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
5	03	Pengembangan Kompetensi ASN	888.456.400,00	-	-	-	888.456.400,00	880.941.000,00	-	-	-	880.941.000,00	(7.515.400,00)
5	03	02 Pengelolaan Assessment Center	888.456.400,00	-	-	-	888.456.400,00	880.941.000,00	-	-	-	880.941.000,00	(7.515.400,00)
5	03	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	119.592.600,00	-	-	-	119.592.600,00	92.535.500,00	-	-	-	92.535.500,00	(27.057.100,00)
	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13.980.600,00	-	-	-	13.980.600,00	3.925.000,00	-	-	-	3.925.000,00	(10.055.600,00)
	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	28.490.000,00	-	-	-	28.490.000,00	25.435.500,00	-	-	-	25.435.500,00	(3.054.500,00)
5	03	07 Pembinaan Disiplin ASN	77.122.000,00	-	-	-	77.122.000,00	63.175.000,00	-	-	-	63.175.000,00	(13.947.000,00)
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.459.306.900,00	-	-	-	2.459.306.900,00	2.362.534.451,00	-	-	-	2.362.534.451,00	(96.772.449,00)
5	03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.459.306.900,00	-	-	-	2.459.306.900,00	2.362.534.451,00	-	-	-	2.362.534.451,00	(96.772.449,00)
5	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.459.306.900,00	-	-	-	2.459.306.900,00	2.362.534.451,00	-	-	-	2.362.534.451,00	(96.772.449,00)
5	04	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.590.042.900,00	-	-	-	1.590.042.900,00	1.552.289.291,00	-	-	-	1.552.289.291,00	(37.753.609,00)
5	04	03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.590.042.900,00	-	-	-	1.590.042.900,00	1.552.289.291,00	-	-	-	1.552.289.291,00	(37.753.609,00)
5	04	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	869.264.000,00	-	-	-	869.264.000,00	810.245.160,00	-	-	-	810.245.160,00	(59.018.840,00)
5	04	07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	869.264.000,00	-	-	-	869.264.000,00	810.245.160,00	-	-	-	810.245.160,00	(59.018.840,00)
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.344.069.542,00	-	-	-	1.344.069.542,00	1.242.444.619,00	-	-	-	1.242.444.619,00	(101.624.923,00)
5	01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.344.069.542,00	-	-	-	1.344.069.542,00	1.242.444.619,00	-	-	-	1.242.444.619,00	(101.624.923,00)
5	05	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.344.069.542,00	-	-	-	1.344.069.542,00	1.242.444.619,00	-	-	-	1.242.444.619,00	(101.624.923,00)
5	05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.157.453.652,00	-	-	-	1.157.453.652,00	1.058.792.054,00	-	-	-	1.058.792.054,00	(98.661.598,00)
5	05	02 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1.035.126.452,00	-	-	-	1.035.126.452,00	947.699.600,00	-	-	-	947.699.600,00	(87.426.852,00)
5	05	12 Pengelolaan Data Kelitbitan dan Peraturan	122.327.200,00	-	-	-	122.327.200,00	111.092.454,00	-	-	-	111.092.454,00	(11.234.746,00)
5	05	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	186.615.890,00	-	-	-	186.615.890,00	183.652.565,00	-	-	-	183.652.565,00	(2.963.325,00)
5	05	01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	186.615.890,00	-	-	-	186.615.890,00	183.652.565,00	-	-	-	183.652.565,00	(2.963.325,00)
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.597.744.616,00	497.750.000,00	-	-	10.095.494.616,00	9.372.844.393,00	461.606.622,51	-	-	9.834.451.015,51	(261.043.600,49)
6	01	INSPEKTORAT DAERAH	9.597.744.616,00	497.750.000,00	-	-	10.095.494.616,00	9.372.844.393,00	461.606.622,51	-	-	9.834.451.015,51	(261.043.600,49)
6	01	Inspektorat Daerah	9.597.744.616,00	497.750.000,00	-	-	10.095.494.616,00	9.372.844.393,00	461.606.622,51	-	-	9.834.451.015,51	(261.043.600,49)
6	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.317.776.916,00	497.750.000,00	-	-	8.815.526.916,00	8.107.347.144,00	461.606.622,51	-	-	8.568.953.766,51	(246.573.149,49)
6	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.861.500,00	-	-	-	1.861.500,00	1.800.000,00	-	-	-	1.800.000,00	(61.500,00)
6	01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.861.500,00	-	-	-	1.861.500,00	1.800.000,00	-	-	-	1.800.000,00	(61.500,00)
6	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.376.098.986,00	-	-	-	7.376.098.986,00	7.166.570.507,00	-	-	-	7.166.570.507,00	(209.528.479,00)
6	01	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.376.098.986,00	-	-	-	7.376.098.986,00	7.166.570.507,00	-	-	-	7.166.570.507,00	(209.528.479,00)
6	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	877.979.890,00	-	-	-	877.979.890,00	877.323.722,00	-	-	-	877.323.722,00	(656.168,00)
6	01	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	482.603.490,00	-	-	-	482.603.490,00	482.216.200,00	-	-	-	482.216.200,00	(387.290,00)
6	01	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.376.400,00	-	-	-	395.376.400,00	395.107.522,00	-	-	-	395.107.522,00	(268.878,00)
6	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.836.540,00	497.750.000,00	-	-	559.586.540,00	61.652.915,00	461.606.622,51	-	-	523.259.537,51	(36.327.002,49)
6	01	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.886.540,00	-	-	-	42.886.540,00	42.723.915,00	-	-	-	42.723.915,00	(162.625,00)
6	01	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.950.000,00	497.750.000,00	-	-	501.700.000,00	3.950.000,00	461.606.622,51	-	-	465.556.622,51	(36.143.377,49)
6	01	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	-	-	-	15.000.000,00	14.979.000,00	-	-	-	14.979.000,00	(21.000,00)
6	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	368.115.900,00	-	-	-	368.115.900,00	360.368.868,00	-	-	-	360.368.868,00	(7.747.032,00)
6	01	Pengelolaan Pengawasan Internal	334.646.300,00	-	-	-	334.646.300,00	328.213.468,00	-	-	-	328.213.468,00	(6.432.832,00)
6	01	01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	51.712.800,00	-	-	-	51.712.800,00	51.637.105,00	-	-	-	51.637.105,00	(75.695,00)
6	01	02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	129.926.000,00	-	-	-	129.926.000,00	126.942.450,00	-	-	-	126.942.450,00	(2.983.550,00)
6	01	03 Reviu Laporan Kinerja	24.436.000,00	-	-	-	24.436.000,00	24.435.200,00	-	-	-	24.435.200,00	(800,00)
6	01	04 Reviu Laporan Keuangan	110.766.400,00	-	-	-	110.766.400,00	107.449.713,00	-	-	-	107.449.713,00	(3.316.687,00)
6	01	07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	17.805.100,00	-	-	-	17.805.100,00	17.749.000,00	-	-	-	17.749.000,00	(56.100,00)
6	01	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	33.469.600,00	-	-	-	33.469.600,00	32.155.400,00	-	-	-	32.155.400,00	(1.314.200,00)
6	01	01 Pemangangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5.364.000,00	-	-	-	5.364.000,00	5.337.000,00	-	-	-	5.337.000,00	(27.000,00)
6	01	02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	28.105.600,00	-	-	-	28.105.600,00	26.818.400,00	-	-	-	26.818.400,00	(1.287.200,00)
6	01	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	911.851.800,00	-	-	-	911.851.800,00	905.128.381,00	-	-	-	905.128.381,00	(6.723.419,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
6 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	6.622.800,00	-	-	-	6.622.800,00	6.620.400,00	-	-	-	6.620.400,00	(2.400,00)
6 01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.622.800,00	-	-	-	6.622.800,00	6.620.400,00	-	-	-	6.620.400,00	(2.400,00)
6 01	Pendampingan dan Asistensi	905.229.000,00	-	-	-	905.229.000,00	898.507.981,00	-	-	-	898.507.981,00	(6.721.019,00)
6 01 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	246.795.100,00	-	-	-	246.795.100,00	241.651.181,00	-	-	-	241.651.181,00	(5.143.919,00)
6 01 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	658.433.900,00	-	-	-	658.433.900,00	656.856.800,00	-	-	-	656.856.800,00	(1.577.100,00)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	63.161.893.863,00	12.880.076.347,00	-	-	76.041.970.210,00	59.867.242.116,64	12.764.839.355,00	-	-	72.632.081.471,64	(3.409.888.738,36)
7 01	KECAMATAN	63.161.893.863,00	12.880.076.347,00	-	-	76.041.970.210,00	59.867.242.116,64	12.764.839.355,00	-	-	72.632.081.471,64	(3.409.888.738,36)
7 01	Kecamatan Manguharjo	14.723.890.447,00	8.158.500,00	-	-	14.732.048.947,00	13.858.607.791,00	8.150.500,00	-	-	13.866.758.291,00	(865.290.656,00)
7 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.324.829.317,00	8.158.500,00	-	-	13.332.987.817,00	12.500.608.731,00	8.150.500,00	-	-	12.508.759.231,00	(824.228.586,00)
7 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.506.985,00	-	-	-	24.506.985,00	24.152.700,00	-	-	-	24.152.700,00	(354.285,00)
7 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.506.985,00	-	-	-	24.506.985,00	24.152.700,00	-	-	-	24.152.700,00	(354.285,00)
7 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.870.699.082,00	-	-	-	11.870.699.082,00	11.067.927.060,00	-	-	-	11.067.927.060,00	(802.772.022,00)
7 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.868.699.082,00	-	-	-	11.868.699.082,00	11.065.956.260,00	-	-	-	11.065.956.260,00	(802.742.822,00)
7 01 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	1.970.800,00	-	-	-	1.970.800,00	(29.200,00)
7 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	143.847.435,00	-	-	-	143.847.435,00	143.307.600,00	-	-	-	143.307.600,00	(539.835,00)
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	127.583.685,00	-	-	-	127.583.685,00	127.054.000,00	-	-	-	127.054.000,00	(529.685,00)
7 01 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.263.750,00	-	-	-	16.263.750,00	16.253.600,00	-	-	-	16.253.600,00	(10.150,00)
7 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.091.000,00	-	-	-	153.091.000,00	153.010.277,00	-	-	-	153.010.277,00	(80.723,00)
7 01 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.091.000,00	-	-	-	153.091.000,00	153.010.277,00	-	-	-	153.010.277,00	(80.723,00)
7 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	8.158.500,00	-	-	8.158.500,00	-	8.150.500,00	-	-	8.150.500,00	(8.000,00)
7 01 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	-	8.158.500,00	-	-	8.158.500,00	-	8.150.500,00	-	-	8.150.500,00	(8.000,00)
7 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	930.603.809,00	-	-	-	930.603.809,00	914.204.896,00	-	-	-	914.204.896,00	(16.398.913,00)
7 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	930.603.809,00	-	-	-	930.603.809,00	914.204.896,00	-	-	-	914.204.896,00	(16.398.913,00)
7 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.081.006,00	-	-	-	202.081.006,00	198.006.198,00	-	-	-	198.006.198,00	(4.074.808,00)
7 01 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.667.208,00	-	-	-	67.667.208,00	66.003.100,00	-	-	-	66.003.100,00	(1.664.108,00)
7 01 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	-	-	-	75.000.000,00	73.690.960,00	-	-	-	73.690.960,00	(1.309.040,00)
7 01 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.413.798,00	-	-	-	59.413.798,00	58.312.138,00	-	-	-	58.312.138,00	(1.101.660,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.152.000,00	-	-	-	18.152.000,00	17.566.400,00	-	-	-	17.566.400,00	(585.600,00)
7 01	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	18.152.000,00	-	-	-	18.152.000,00	17.566.400,00	-	-	-	17.566.400,00	(585.600,00)
7 01 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	18.152.000,00	-	-	-	18.152.000,00	17.566.400,00	-	-	-	17.566.400,00	(585.600,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	344.167.480,00	-	-	-	344.167.480,00	336.729.460,00	-	-	-	336.729.460,00	(7.438.020,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	280.755.080,00	-	-	-	280.755.080,00	277.339.360,00	-	-	-	277.339.360,00	(3.415.720,00)
7 01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	280.755.080,00	-	-	-	280.755.080,00	277.339.360,00	-	-	-	277.339.360,00	(3.415.720,00)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	63.412.400,00	-	-	-	63.412.400,00	59.390.100,00	-	-	-	59.390.100,00	(4.022.300,00)
	04 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	63.412.400,00	-	-	-	63.412.400,00	59.390.100,00	-	-	-	59.390.100,00	(4.022.300,00)
7 01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	933.164.450,00	-	-	-	933.164.450,00	904.760.800,00	-	-	-	904.760.800,00	(28.403.650,00)
7 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	402.536.600,00	-	-	-	402.536.600,00	401.974.100,00	-	-	-	401.974.100,00	(562.500,00)
7 01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	402.536.600,00	-	-	-	402.536.600,00	401.974.100,00	-	-	-	401.974.100,00	(562.500,00)
7 01	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	530.627.850,00	-	-	-	530.627.850,00	502.786.700,00	-	-	-	502.786.700,00	(27.841.150,00)
7 01 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	530.627.850,00	-	-	-	530.627.850,00	502.786.700,00	-	-	-	502.786.700,00	(27.841.150,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	103.577.200,00	-	-	-	103.577.200,00	98.942.400,00	-	-	-	98.942.400,00	(4.634.800,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	103.577.200,00	-	-	-	103.577.200,00	98.942.400,00	-	-	-	98.942.400,00	(4.634.800,00)
7 01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	37.482.000,00	-	-	-	37.482.000,00	36.832.000,00	-	-	-	36.832.000,00	(650.000,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	51.076.000,00	-	-	-	51.076.000,00	47.174.000,00	-	-	-	47.174.000,00	(3.902.000,00)
7 01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	15.019.200,00	-	-	-	15.019.200,00	14.936.400,00	-	-	-	14.936.400,00	(82.800,00)
7 01	Kelurahan Manguharjo	763.511.680,00	445.000.000,00	-	-	1.208.511.680,00	761.940.856,00	438.386.000,00	-	-	1.200.326.856,00	(8.184.824,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	682.077.399,00	-	-	-	682.077.399,00	681.261.256,00	-	-	-	681.261.256,00	(816.143,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	682.077.399,00	-	-	-	682.077.399,00	681.261.256,00	-	-	-	681.261.256,00	(816.143,00)
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	682.077.399,00	-	-	-	682.077.399,00	681.261.256,00	-	-	-	681.261.256,00	(816.143,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	81.434.281,00	445.000.000,00	-	-	526.434.281,00	80.679.600,00	438.386.000,00	-	-	519.065.600,00	(7.368.681,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	81.434.281,00	445.000.000,00	-	-	526.434.281,00	80.679.600,00	438.386.000,00	-	-	519.065.600,00	(7.368.681,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	800.000,00	445.000.000,00	-	-	800.000,00	800.000,00	438.386.000,00	-	-	439.186.000,00	(6.614.000,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80.634.281,00	-	-	-	80.634.281,00	79.879.600,00	-	-	-	79.879.600,00	(754.681,00)
7 01	Kelurahan Sogaten	791.302.158,00	223.099.500,00	-	-	1.014.401.658,00	784.974.801,00	220.691.093,00	-	-	1.005.665.894,00	(8.735.764,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	590.027.790,00	-	-	-	590.027.790,00	585.625.390,00	-	-	-	585.625.390,00	(4.402.400,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	590.027.790,00	-	-	-	590.027.790,00	585.625.390,00	-	-	-	585.625.390,00	(4.402.400,00)
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	590.027.790,00	-	-	-	590.027.790,00	585.625.390,00	-	-	-	585.625.390,00	(4.402.400,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	201.274.368,00	223.099.500,00	-	-	424.373.868,00	199.349.411,00	220.691.093,00	-	-	420.040.504,00	(4.333.364,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	201.274.368,00	223.099.500,00	-	-	424.373.868,00	199.349.411,00	220.691.093,00	-	-	420.040.504,00	(4.333.364,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	151.150.000,00	223.099.500,00	-	-	374.249.500,00	150.032.659,00	220.691.093,00	-	-	370.723.752,00	(3.525.748,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.124.368,00	-	-	-	50.124.368,00	49.316.752,00	-	-	-	49.316.752,00	(807.616,00)
7 01	Kelurahan Patihan	804.696.000,00	135.880.000,00	-	-	940.576.000,00	798.361.481,00	135.880.000,00	-	-	934.241.481,00	(6.334.519,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	525.116.000,00	-	-	-	525.116.000,00	519.728.981,00	-	-	-	519.728.981,00	(5.387.019,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	525.116.000,00	-	-	-	525.116.000,00	519.728.981,00	-	-	-	519.728.981,00	(5.387.019,00)
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	525.116.000,00	-	-	-	525.116.000,00	519.728.981,00	-	-	-	519.728.981,00	(5.387.019,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	279.580.000,00	135.880.000,00	-	-	415.460.000,00	278.632.500,00	135.880.000,00	-	-	414.512.500,00	(947.500,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279.580.000,00	135.880.000,00	-	-	415.460.000,00	278.632.500,00	135.880.000,00	-	-	414.512.500,00	(947.500,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	227.180.000,00	135.880.000,00	-	-	363.060.000,00	226.510.000,00	135.880.000,00	-	-	362.390.000,00	(670.000,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.400.000,00	-	-	-	52.400.000,00	52.122.500,00	-	-	-	52.122.500,00	(277.500,00)
7 01	Kelurahan Neecong	674.688.230,00	297.000.000,00	-	-	971.688.230,00	665.512.952,64	297.000.000,00	-	-	962.512.952,64	(9.175.277,36)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	517.448.249,00	-	-	-	517.448.249,00	509.503.185,64	-	-	-	509.503.185,64	(7.945.063,36)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	517.448.249,00	-	-	-	517.448.249,00	509.503.185,64	-	-	-	509.503.185,64	(7.945.063,36)
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	517.448.249,00	-	-	-	517.448.249,00	509.503.185,64	-	-	-	509.503.185,64	(7.945.063,36)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	157.239.981,00	297.000.000,00	-	-	454.239.981,00	156.009.767,00	297.000.000,00	-	-	453.009.767,00	(1.230.214,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	157.239.981,00	297.000.000,00	-	-	454.239.981,00	156.009.767,00	297.000.000,00	-	-	453.009.767,00	(1.230.214,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	82.239.981,00	297.000.000,00	-	-	379.239.981,00	81.471.231,00	297.000.000,00	-	-	378.471.231,00	(768.750,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.000.000,00	-	-	-	75.000.000,00	74.538.536,00	-	-	-	74.538.536,00	(461.464,00)
7 01	Kelurahan Winongo	619.292.603,00	512.222.000,00	-	-	1.131.514.603,00	592.356.927,00	480.025.382,00	-	-	1.072.382.309,00	(59.132.294,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	568.535.163,00	-	-	-	568.535.163,00	542.587.927,00	-	-	-	542.587.927,00	(25.947.236,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	568.535.163,00	-	-	-	568.535.163,00	542.587.927,00	-	-	-	542.587.927,00	(25.947.236,00)
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	568.535.163,00	-	-	-	568.535.163,00	542.587.927,00	-	-	-	542.587.927,00	(25.947.236,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.757.440,00	512.222.000,00	-	-	562.979.440,00	49.769.000,00	480.025.382,00	-	-	529.794.382,00	(33.185.058,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	50.757.440,00	512.222.000,00	-	-	562.979.440,00	49.769.000,00	480.025.382,00	-	-	529.794.382,00	(33.185.058,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.261.890,00	512.222.000,00	-	-	514.483.890,00	1.500.000,00	480.025.382,00	-	-	481.525.382,00	(32.958.508,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48.495.550,00	-	-	-	48.495.550,00	48.269.000,00	-	-	-	48.269.000,00	(226.550,00)
7 01	Kelurahan Madiun Lor	761.523.519,00	327.500.000,00	-	-	1.089.023.519,00	759.467.865,00	327.497.600,00	-	-	1.086.965.465,00	(2.058.054,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	619.485.419,00	-	-	-	619.485.419,00	617.447.265,00	-	-	-	617.447.265,00	(2.038.154,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	619.485.419,00	-	-	-	619.485.419,00	617.447.265,00	-	-	-	617.447.265,00	(2.038.154,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.157.329,00	-	-	-	23.157.329,00	20.840.800,00	-	-	-	20.840.800,00	(2.316.529,00)
7 01 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.410.000,00	-	-	-	57.410.000,00	57.270.858,00	-	-	-	57.270.858,00	(139.142,00)
7 01 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.882.000,00	-	-	-	34.882.000,00	34.631.000,00	-	-	-	34.631.000,00	(251.000,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.656.000,00	-	-	-	38.656.000,00	38.211.500,00	-	-	-	38.211.500,00	(444.500,00)
7 01	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	38.656.000,00	-	-	-	38.656.000,00	38.211.500,00	-	-	-	38.211.500,00	(444.500,00)
7 01 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	38.656.000,00	-	-	-	38.656.000,00	38.211.500,00	-	-	-	38.211.500,00	(444.500,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	398.744.600,00	-	-	-	398.744.600,00	391.406.213,00	-	-	-	391.406.213,00	(7.338.387,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	265.520.400,00	-	-	-	265.520.400,00	262.459.513,00	-	-	-	262.459.513,00	(3.060.887,00)
7 01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	265.520.400,00	-	-	-	265.520.400,00	262.459.513,00	-	-	-	262.459.513,00	(3.060.887,00)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	133.224.200,00	-	-	-	133.224.200,00	128.946.700,00	-	-	-	128.946.700,00	(4.277.500,00)
	04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	133.224.200,00	-	-	-	133.224.200,00	128.946.700,00	-	-	-	128.946.700,00	(4.277.500,00)
7 01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	974.592.200,00	-	-	-	974.592.200,00	917.025.700,00	-	-	-	917.025.700,00	(57.566.500,00)
7 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	507.540.200,00	-	-	-	507.540.200,00	492.321.200,00	-	-	-	492.321.200,00	(15.219.000,00)
7 01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	507.540.200,00	-	-	-	507.540.200,00	492.321.200,00	-	-	-	492.321.200,00	(15.219.000,00)
7 01	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	467.052.000,00	-	-	-	467.052.000,00	424.704.500,00	-	-	-	424.704.500,00	(42.347.500,00)
7 01 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	467.052.000,00	-	-	-	467.052.000,00	424.704.500,00	-	-	-	424.704.500,00	(42.347.500,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	186.232.000,00	-	-	-	186.232.000,00	184.427.700,00	-	-	-	184.427.700,00	(1.804.300,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	186.232.000,00	-	-	-	186.232.000,00	184.427.700,00	-	-	-	184.427.700,00	(1.804.300,00)
7 01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00	99.675.000,00	-	-	-	99.675.000,00	(325.000,00)
7 01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000,00	-	-	-	75.000.000,00	73.595.000,00	-	-	-	73.595.000,00	(1.405.000,00)
7 01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	11.232.000,00	-	-	-	11.232.000,00	11.157.700,00	-	-	-	11.157.700,00	(74.300,00)
7 01	Kelurahan Oro-Oro Ombo	675.110.900,00	545.306.800,00	-	-	1.220.417.700,00	669.241.741,00	522.256.800,00	-	-	1.191.498.541,00	(28.919.159,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	620.627.700,00	-	-	-	620.627.700,00	614.963.341,00	-	-	-	614.963.341,00	(5.664.359,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	620.627.700,00	-	-	-	620.627.700,00	614.963.341,00	-	-	-	614.963.341,00	(5.664.359,00)
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	620.627.700,00	-	-	-	620.627.700,00	614.963.341,00	-	-	-	614.963.341,00	(5.664.359,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	54.483.200,00	545.306.800,00	-	-	599.790.000,00	54.278.400,00	522.256.800,00	-	-	576.535.200,00	(23.254.800,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	54.483.200,00	545.306.800,00	-	-	599.790.000,00	54.278.400,00	522.256.800,00	-	-	576.535.200,00	(23.254.800,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12.980.000,00	545.306.800,00	-	-	558.286.800,00	12.980.000,00	522.256.800,00	-	-	535.236.800,00	(23.050.000,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	41.503.200,00	-	-	-	41.503.200,00	41.298.400,00	-	-	-	41.298.400,00	(204.800,00)
7 01	Kelurahan Sukosari	569.117.981,00	412.098.547,00	-	-	981.216.528,00	561.387.336,00	404.458.100,00	-	-	965.845.436,00	(15.371.092,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	529.626.528,00	-	-	-	529.626.528,00	521.898.136,00	-	-	-	521.898.136,00	(7.728.392,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	529.626.528,00	-	-	-	529.626.528,00	521.898.136,00	-	-	-	521.898.136,00	(7.728.392,00)
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	529.626.528,00	-	-	-	529.626.528,00	521.898.136,00	-	-	-	521.898.136,00	(7.728.392,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.491.453,00	412.098.547,00	-	-	451.590.000,00	39.489.200,00	404.458.100,00	-	-	443.947.300,00	(7.642.700,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	39.491.453,00	412.098.547,00	-	-	451.590.000,00	39.489.200,00	404.458.100,00	-	-	443.947.300,00	(7.642.700,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12.980.000,00	412.098.547,00	-	-	425.078.547,00	12.980.000,00	404.458.100,00	-	-	417.438.100,00	(7.640.447,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26.511.453,00	-	-	-	26.511.453,00	26.509.200,00	-	-	-	26.509.200,00	(2.253,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01	Kelurahan Klegen	703.194.420,00	507.051.000,00	-	-	1.210.245.420,00	697.490.225,00	507.051.000,00	-	-	1.204.541.225,00	(5.704.195,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	646.455.420,00	-	-	-	646.455.420,00	641.101.225,00	-	-	641.101.225,00	(5.354.195,00)	
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	646.455.420,00	-	-	-	646.455.420,00	641.101.225,00	-	-	641.101.225,00	(5.354.195,00)	
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	646.455.420,00	-	-	-	646.455.420,00	641.101.225,00	-	-	641.101.225,00	(5.354.195,00)	
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56.739.000,00	507.051.000,00	-	-	563.790.000,00	56.389.000,00	507.051.000,00	-	-	563.440.000,00	(350.000,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	56.739.000,00	507.051.000,00	-	-	563.790.000,00	56.389.000,00	507.051.000,00	-	-	563.440.000,00	(350.000,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12.980.000,00	507.051.000,00	-	-	520.031.000,00	12.630.000,00	507.051.000,00	-	-	519.681.000,00	(350.000,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	43.759.000,00	-	-	-	43.759.000,00	43.759.000,00	-	-	43.759.000,00	-	
7 01	Kelurahan Rejomulyo	661.665.793,00	652.865.200,00	-	-	1.314.530.993,00	653.951.039,00	650.730.777,00	-	-	1.304.681.816,00	(9.849.177,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	609.540.993,00	-	-	-	609.540.993,00	602.183.039,00	-	-	602.183.039,00	(7.357.954,00)	
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	609.540.993,00	-	-	-	609.540.993,00	602.183.039,00	-	-	602.183.039,00	(7.357.954,00)	
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	609.540.993,00	-	-	-	609.540.993,00	602.183.039,00	-	-	602.183.039,00	(7.357.954,00)	
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.124.800,00	652.865.200,00	-	-	704.990.000,00	51.768.000,00	650.730.777,00	-	-	702.498.777,00	(2.491.223,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	52.124.800,00	652.865.200,00	-	-	704.990.000,00	51.768.000,00	650.730.777,00	-	-	702.498.777,00	(2.491.223,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12.980.000,00	652.865.200,00	-	-	665.845.200,00	12.630.000,00	650.730.777,00	-	-	663.360.777,00	(2.484.423,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39.144.800,00	-	-	-	39.144.800,00	39.138.000,00	-	-	39.138.000,00	(6.800,00)	
7 01	Kelurahan Pilangbango	602.333.659,00	468.630.000,00	-	-	1.070.963.659,00	592.839.908,00	468.630.000,00	-	-	1.061.469.908,00	(9.493.751,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	559.273.659,00	-	-	-	559.273.659,00	550.240.908,00	-	-	550.240.908,00	(9.032.751,00)	
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	559.273.659,00	-	-	-	559.273.659,00	550.240.908,00	-	-	550.240.908,00	(9.032.751,00)	
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	559.273.659,00	-	-	-	559.273.659,00	550.240.908,00	-	-	550.240.908,00	(9.032.751,00)	
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.060.000,00	468.630.000,00	-	-	511.690.000,00	42.599.000,00	468.630.000,00	-	-	511.229.000,00	(461.000,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	43.060.000,00	468.630.000,00	-	-	511.690.000,00	42.599.000,00	468.630.000,00	-	-	511.229.000,00	(461.000,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12.980.000,00	468.630.000,00	-	-	481.610.000,00	12.630.000,00	468.630.000,00	-	-	481.260.000,00	(350.000,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.080.000,00	-	-	-	30.080.000,00	29.969.000,00	-	-	29.969.000,00	(111.000,00)	
7 01	Kelurahan Tawangrejo	541.814.900,00	486.544.000,00	-	-	1.028.358.900,00	519.735.775,00	479.861.530,00	-	-	999.597.305,00	(28.761.595,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	491.568.900,00	-	-	-	491.568.900,00	469.799.775,00	-	-	469.799.775,00	(21.769.125,00)	
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	491.568.900,00	-	-	-	491.568.900,00	469.799.775,00	-	-	469.799.775,00	(21.769.125,00)	
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	491.568.900,00	-	-	-	491.568.900,00	469.799.775,00	-	-	469.799.775,00	(21.769.125,00)	
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.246.000,00	486.544.000,00	-	-	536.790.000,00	49.936.000,00	479.861.530,00	-	-	529.797.530,00	(6.992.470,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	50.246.000,00	486.544.000,00	-	-	536.790.000,00	49.936.000,00	479.861.530,00	-	-	529.797.530,00	(6.992.470,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	13.980.000,00	486.544.000,00	-	-	500.524.000,00	13.980.000,00	479.861.530,00	-	-	493.841.530,00	(6.682.470,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	36.266.000,00	-	-	-	36.266.000,00	35.956.000,00	-	-	35.956.000,00	(310.000,00)	
7 01	Kelurahan Kanigoro	680.470.030,00	609.578.400,00	-	-	1.290.048.430,00	656.295.424,00	604.578.400,00	-	-	1.260.873.824,00	(29.174.606,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	613.108.430,00	-	-	-	613.108.430,00	589.838.824,00	-	-	589.838.824,00	(23.269.606,00)	
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	613.108.430,00	-	-	-	613.108.430,00	589.838.824,00	-	-	589.838.824,00	(23.269.606,00)	
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	613.108.430,00	-	-	-	613.108.430,00	589.838.824,00	-	-	589.838.824,00	(23.269.606,00)	
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	67.361.600,00	609.578.400,00	-	-	676.940.000,00	66.456.600,00	604.578.400,00	-	-	671.035.000,00	(5.905.000,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	67.361.600,00	609.578.400,00	-	-	676.940.000,00	66.456.600,00	604.578.400,00	-	-	671.035.000,00	(5.905.000,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12.980.000,00	609.578.400,00	-	-	622.558.400,00	12.630.000,00	604.578.400,00	-	-	617.208.400,00	(5.350.000,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54.381.600,00	-	-	-	54.381.600,00	53.826.600,00	-	-	53.826.600,00	(555.000,00)	
7 01	Kelurahan Kartoharjo	602.077.205,00	431.877.600,00	-	-	1.033.954.805,00	589.772.347,00	431.187.600,00	-	-	1.020.959.947,00	(12.994.858,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	550.264.805,00	-	-	-	550.264.805,00	538.329.547,00	-	-	-	538.329.547,00	(11.935.258,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	550.264.805,00	-	-	-	550.264.805,00	538.329.547,00	-	-	-	538.329.547,00	(11.935.258,00)
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	550.264.805,00	-	-	-	550.264.805,00	538.329.547,00	-	-	-	538.329.547,00	(11.935.258,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.812.400,00	431.877.600,00	-	-	483.690.000,00	51.442.800,00	431.187.600,00	-	-	482.630.400,00	(1.059.600,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	51.812.400,00	431.877.600,00	-	-	483.690.000,00	51.442.800,00	431.187.600,00	-	-	482.630.400,00	(1.059.600,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12.980.000,00	431.877.600,00	-	-	444.857.600,00	12.980.000,00	431.187.600,00	-	-	444.167.600,00	(690.000,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38.832.400,00	-	-	-	38.832.400,00	38.462.800,00	-	-	-	38.462.800,00	(369.600,00)
7 01	Kelurahan Kelun	574.896.230,00	431.190.400,00	-	-	1.006.086.630,00	561.768.793,00	431.190.400,00	-	-	992.959.193,00	(13.127.437,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	530.396.630,00	-	-	-	530.396.630,00	518.017.693,00	-	-	-	518.017.693,00	(12.378.937,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	530.396.630,00	-	-	-	530.396.630,00	518.017.693,00	-	-	-	518.017.693,00	(12.378.937,00)
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	530.396.630,00	-	-	-	530.396.630,00	518.017.693,00	-	-	-	518.017.693,00	(12.378.937,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	44.499.600,00	431.190.400,00	-	-	475.690.000,00	43.751.100,00	431.190.400,00	-	-	474.941.500,00	(748.500,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	44.499.600,00	431.190.400,00	-	-	475.690.000,00	43.751.100,00	431.190.400,00	-	-	474.941.500,00	(748.500,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	12.980.000,00	431.190.400,00	-	-	444.170.400,00	12.780.000,00	431.190.400,00	-	-	443.970.400,00	(200.000,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31.519.600,00	-	-	-	31.519.600,00	30.971.100,00	-	-	-	30.971.100,00	(548.500,00)
7 01	Kecamatan Taman	14.838.435.747,00	226.714.402,00	-	-	15.065.150.149,00	13.516.503.485,00	226.237.950,00	-	-	13.742.741.435,00	(1.322.408.714,00)
7 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.262.553.564,00	226.714.402,00	-	-	13.489.267.966,00	11.955.086.735,00	226.237.950,00	-	-	12.181.324.685,00	(1.307.943.281,00)
7 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.380.000,00	-	-	-	2.380.000,00	1.171.000,00	-	-	-	1.171.000,00	(1.209.000,00)
7 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.380.000,00	-	-	-	2.380.000,00	1.171.000,00	-	-	-	1.171.000,00	(1.209.000,00)
7 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.464.224.855,00	-	-	-	11.464.224.855,00	10.226.990.319,00	-	-	-	10.226.990.319,00	(1.237.234.536,00)
7 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.464.224.855,00	-	-	-	11.464.224.855,00	10.226.990.319,00	-	-	-	10.226.990.319,00	(1.237.234.536,00)
7 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.021.000,00	-	-	-	204.021.000,00	202.789.000,00	-	-	-	202.789.000,00	(1.232.000,00)
7 01 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	204.021.000,00	-	-	-	204.021.000,00	202.789.000,00	-	-	-	202.789.000,00	(1.232.000,00)
7 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.446.859,00	-	-	-	106.446.859,00	106.445.223,00	-	-	-	106.445.223,00	(1.636,00)
7 01 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	106.446.859,00	-	-	-	106.446.859,00	106.445.223,00	-	-	-	106.445.223,00	(1.636,00)
7 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.000.000,00	226.714.402,00	-	-	230.714.402,00	3.900.000,00	226.237.950,00	-	-	230.137.950,00	(576.452,00)
7 01 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000,00	226.714.402,00	-	-	230.714.402,00	3.900.000,00	226.237.950,00	-	-	230.137.950,00	(576.452,00)
7 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939.940.450,00	-	-	-	939.940.450,00	874.186.023,00	-	-	-	874.186.023,00	(65.754.427,00)
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	939.940.450,00	-	-	-	939.940.450,00	874.186.023,00	-	-	-	874.186.023,00	(65.754.427,00)
7 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.540.400,00	-	-	-	541.540.400,00	539.605.170,00	-	-	-	539.605.170,00	(1.935.230,00)
7 01 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.522.300,00	-	-	-	52.522.300,00	51.416.870,00	-	-	-	51.416.870,00	(1.105.430,00)
7 01 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	451.546.300,00	-	-	-	451.546.300,00	450.845.100,00	-	-	-	450.845.100,00	(701.200,00)
7 01 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.471.800,00	-	-	-	37.471.800,00	37.343.200,00	-	-	-	37.343.200,00	(128.600,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.998.400,00	-	-	-	21.998.400,00	21.081.000,00	-	-	-	21.081.000,00	(917.400,00)
7 01	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	21.998.400,00	-	-	-	21.998.400,00	21.081.000,00	-	-	-	21.081.000,00	(917.400,00)
7 01 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	21.998.400,00	-	-	-	21.998.400,00	21.081.000,00	-	-	-	21.081.000,00	(917.400,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	466.057.833,00	-	-	-	466.057.833,00	460.755.800,00	-	-	-	460.755.800,00	(5.302.033,00)
7 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	321.693.225,00	-	-	-	321.693.225,00	317.940.400,00	-	-	-	317.940.400,00	(3.752.825,00)
7 01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	321.693.225,00	-	-	-	321.693.225,00	317.940.400,00	-	-	-	317.940.400,00	(3.752.825,00)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	144.364.608,00	-	-	-	144.364.608,00	142.815.400,00	-	-	-	142.815.400,00	(1.549.208,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	144.364.608,00				144.364.608,00	142.815.400,00				142.815.400,00	(1.549.208,00)
7	01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	985.761.850,00	-	-	-	985.761.850,00	982.084.450,00	-	-	-	982.084.450,00	(3.677.400,00)
7	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	501.484.000,00	-	-	-	501.484.000,00	499.564.000,00	-	-	-	499.564.000,00	(1.920.000,00)
7	01	02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	501.484.000,00	-	-	-	501.484.000,00	499.564.000,00	-	-	-	499.564.000,00	(1.920.000,00)
7	01	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	484.277.850,00	-	-	-	484.277.850,00	482.520.450,00	-	-	-	482.520.450,00	(1.757.400,00)
7	01	01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	484.277.850,00	-	-	-	484.277.850,00	482.520.450,00	-	-	-	482.520.450,00	(1.757.400,00)
7	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102.064.100,00	-	-	-	102.064.100,00	97.495.500,00	-	-	-	97.495.500,00	(4.568.600,00)
7	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	102.064.100,00	-	-	-	102.064.100,00	97.495.500,00	-	-	-	97.495.500,00	(4.568.600,00)
7	01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36.448.000,00				36.448.000,00	36.343.000,00	-	-	-	36.343.000,00	(105.000,00)
7	01	05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	44.648.400,00	-	-	-	44.648.400,00	42.257.100,00	-	-	-	42.257.100,00	(2.391.300,00)
7	01	07 Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	20.967.700,00	-	-	-	20.967.700,00	18.895.400,00	-	-	-	18.895.400,00	(2.072.300,00)
7	01	01 Kelurahan Moioerio	801.852.365,00	275.000.000,00	-	-	1.076.852.365,00	795.644.362,00	274.604.100,00	-	-	1.070.248.462,00	(6.603.903,00)
7	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	675.994.765,00	-	-	-	675.994.765,00	673.979.208,00	-	-	-	673.979.208,00	(2.015.557,00)
7	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	675.994.765,00	-	-	-	675.994.765,00	673.979.208,00	-	-	-	673.979.208,00	(2.015.557,00)
7	01	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	675.994.765,00	-	-	-	675.994.765,00	673.979.208,00	-	-	-	673.979.208,00	(2.015.557,00)
7	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	125.857.600,00	275.000.000,00	-	-	400.857.600,00	121.665.154,00	274.604.100,00	-	-	396.269.254,00	(4.588.346,00)
7	01	01 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	125.857.600,00	275.000.000,00	-	-	400.857.600,00	121.665.154,00	274.604.100,00	-	-	396.269.254,00	(4.588.346,00)
7	01	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	47.984.000,00	275.000.000,00	-	-	322.984.000,00	47.573.250,00	274.604.100,00	-	-	322.177.350,00	(806.650,00)
7	01	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	77.873.600,00	-	-	-	77.873.600,00	74.091.904,00	-	-	-	74.091.904,00	(3.781.696,00)
7	01	01 Kelurahan Pandean	738.193.072,00	369.000.000,00	-	-	1.107.193.072,00	730.397.098,00	368.875.500,00	-	-	1.099.272.598,00	(7.920.474,00)
7	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	612.398.800,00	-	-	-	612.398.800,00	604.874.598,00	-	-	-	604.874.598,00	(7.524.202,00)
7	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	612.398.800,00	-	-	-	612.398.800,00	604.874.598,00	-	-	-	604.874.598,00	(7.524.202,00)
7	01	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	612.398.800,00	-	-	-	612.398.800,00	604.874.598,00	-	-	-	604.874.598,00	(7.524.202,00)
7	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	125.794.272,00	369.000.000,00	-	-	494.794.272,00	125.522.500,00	368.875.500,00	-	-	494.398.000,00	(396.272,00)
7	01	01 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	125.794.272,00	369.000.000,00	-	-	494.794.272,00	125.522.500,00	368.875.500,00	-	-	494.398.000,00	(396.272,00)
7	01	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	53.231.000,00	369.000.000,00	-	-	422.231.000,00	52.979.500,00	368.875.500,00	-	-	421.855.000,00	(376.000,00)
7	01	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72.563.272,00	-	-	-	72.563.272,00	72.543.000,00	-	-	-	72.543.000,00	(20.272,00)
7	01	01 Kelurahan Banjarejo	750.228.465,00	609.300.000,00	-	-	1.359.528.465,00	739.933.144,00	606.909.000,00	-	-	1.346.842.144,00	(12.686.321,00)
7	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	670.080.065,00	-	-	-	670.080.065,00	661.497.144,00	-	-	-	661.497.144,00	(8.582.921,00)
7	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	670.080.065,00	-	-	-	670.080.065,00	661.497.144,00	-	-	-	661.497.144,00	(8.582.921,00)
7	01	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	670.080.065,00	-	-	-	670.080.065,00	661.497.144,00	-	-	-	661.497.144,00	(8.582.921,00)
7	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80.148.400,00	609.300.000,00	-	-	689.448.400,00	78.436.000,00	606.909.000,00	-	-	685.345.000,00	(4.103.400,00)
7	01	01 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80.148.400,00	609.300.000,00	-	-	689.448.400,00	78.436.000,00	606.909.000,00	-	-	685.345.000,00	(4.103.400,00)
7	01	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	33.662.000,00	609.300.000,00	-	-	642.962.000,00	32.482.600,00	606.909.000,00	-	-	639.391.600,00	(3.570.400,00)
7	01	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46.486.400,00	-	-	-	46.486.400,00	45.953.400,00	-	-	-	45.953.400,00	(533.000,00)
7	01	01 Kelurahan Kuncen	473.625.020,00	384.205.500,00	-	-	857.830.520,00	465.525.076,00	382.813.189,00	-	-	848.338.265,00	(9.492.255,00)
7	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	446.737.020,00	-	-	-	446.737.020,00	440.457.576,00	-	-	-	440.457.576,00	(6.279.444,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	446.737.020,00	-	-	-	446.737.020,00	440.457.576,00	-	-	-	440.457.576,00	(6.279.444,00)
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	446.737.020,00	-	-	-	446.737.020,00	440.457.576,00	-	-	-	440.457.576,00	(6.279.444,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.888.000,00	384.205.500,00	-	-	411.093.500,00	25.067.500,00	382.813.189,00	-	-	407.880.689,00	(3.212.811,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	26.888.000,00	384.205.500,00	-	-	411.093.500,00	25.067.500,00	382.813.189,00	-	-	407.880.689,00	(3.212.811,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	15.368.000,00	384.205.500,00	-	-	399.573.500,00	13.818.000,00	382.813.189,00	-	-	396.631.189,00	(2.942.311,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11.520.000,00	-	-	-	11.520.000,00	11.249.500,00	-	-	-	11.249.500,00	(270.500,00)
7 01	Kelurahan Manisrejo	937.401.804,00	788.446.638,00	-	-	1.725.848.442,00	932.950.080,00	788.446.638,00	-	-	1.721.396.718,00	(4.451.724,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	822.821.604,00	-	-	-	822.821.604,00	818.381.080,00	-	-	-	818.381.080,00	(4.440.524,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	822.821.604,00	-	-	-	822.821.604,00	818.381.080,00	-	-	-	818.381.080,00	(4.440.524,00)
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	822.821.604,00	-	-	-	822.821.604,00	818.381.080,00	-	-	-	818.381.080,00	(4.440.524,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	114.580.200,00	788.446.638,00	-	-	903.026.838,00	114.569.000,00	788.446.638,00	-	-	903.015.638,00	(11.200,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	114.580.200,00	788.446.638,00	-	-	903.026.838,00	114.569.000,00	788.446.638,00	-	-	903.015.638,00	(11.200,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	48.150.000,00	788.446.638,00	-	-	836.596.638,00	48.150.000,00	788.446.638,00	-	-	836.596.638,00	-
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	66.430.200,00	-	-	-	66.430.200,00	66.419.000,00	-	-	-	66.419.000,00	(11.200,00)
7 01	Kelurahan Kejuron	736.795.067,00	484.850.000,00	-	-	1.221.645.067,00	713.852.811,00	484.838.420,00	-	-	1.198.691.231,00	(22.953.836,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	640.447.557,00	-	-	-	640.447.557,00	623.292.111,00	-	-	-	623.292.111,00	(17.155.446,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	640.447.557,00	-	-	-	640.447.557,00	623.292.111,00	-	-	-	623.292.111,00	(17.155.446,00)
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	640.447.557,00	-	-	-	640.447.557,00	623.292.111,00	-	-	-	623.292.111,00	(17.155.446,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96.347.510,00	484.850.000,00	-	-	581.197.510,00	90.560.700,00	484.838.420,00	-	-	575.399.120,00	(5.798.390,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	96.347.510,00	484.850.000,00	-	-	581.197.510,00	90.560.700,00	484.838.420,00	-	-	575.399.120,00	(5.798.390,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	45.049.810,00	484.850.000,00	-	-	529.899.810,00	43.705.700,00	484.838.420,00	-	-	528.544.120,00	(1.355.690,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	51.297.700,00	-	-	-	51.297.700,00	46.855.000,00	-	-	-	46.855.000,00	(4.442.700,00)
7 01	Kelurahan Josenan	730.814.798,00	859.937.240,00	-	-	1.590.752.038,00	719.673.956,00	859.937.240,00	-	-	1.579.611.196,00	(11.140.842,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	657.329.758,00	-	-	-	657.329.758,00	648.191.151,00	-	-	-	648.191.151,00	(9.138.607,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	657.329.758,00	-	-	-	657.329.758,00	648.191.151,00	-	-	-	648.191.151,00	(9.138.607,00)
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	657.329.758,00	-	-	-	657.329.758,00	648.191.151,00	-	-	-	648.191.151,00	(9.138.607,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73.485.040,00	859.937.240,00	-	-	933.422.280,00	71.482.805,00	859.937.240,00	-	-	931.420.045,00	(2.002.235,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	73.485.040,00	859.937.240,00	-	-	933.422.280,00	71.482.805,00	859.937.240,00	-	-	931.420.045,00	(2.002.235,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	28.584.000,00	859.937.240,00	-	-	888.521.240,00	26.584.000,00	859.937.240,00	-	-	886.521.240,00	(2.000.000,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44.901.040,00	-	-	-	44.901.040,00	44.898.805,00	-	-	-	44.898.805,00	(2.235,00)
7 01	Kelurahan Demangan	691.785.596,00	630.124.500,00	-	-	1.321.910.096,00	680.678.819,00	615.484.450,00	-	-	1.296.163.269,00	(25.746.827,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	604.046.896,00	-	-	-	604.046.896,00	592.946.819,00	-	-	-	592.946.819,00	(11.100.077,00)
7 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	604.046.896,00	-	-	-	604.046.896,00	592.946.819,00	-	-	-	592.946.819,00	(11.100.077,00)
7 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	604.046.896,00	-	-	-	604.046.896,00	592.946.819,00	-	-	-	592.946.819,00	(11.100.077,00)
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87.738.700,00	630.124.500,00	-	-	717.863.200,00	87.732.000,00	615.484.450,00	-	-	703.216.450,00	(14.646.750,00)
7 01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	87.738.700,00	630.124.500,00	-	-	717.863.200,00	87.732.000,00	615.484.450,00	-	-	703.216.450,00	(14.646.750,00)
7 01 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	33.100.000,00	630.124.500,00	-	-	663.224.500,00	33.100.000,00	615.484.450,00	-	-	648.584.450,00	(14.640.050,00)
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54.638.700,00	-	-	-	54.638.700,00	54.632.000,00	-	-	-	54.632.000,00	(6.700,00)
7 01	Kelurahan Taman	811.419.054,00	225.090.000,00	-	-	1.036.509.054,00	808.509.297,00	221.686.024,00	-	-	1.030.195.321,00	(6.313.733,00)
7 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	654.329.414,00	-	-	-	654.329.414,00	653.226.497,00	-	-	-	653.226.497,00	(1.102.917,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
7	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	654.329.414,00	-	-	-	654.329.414,00	653.226.497,00	-	-	-	653.226.497,00	(1.102.917,00)
7	01	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	654.329.414,00	-	-	-	654.329.414,00	653.226.497,00	-	-	-	653.226.497,00	(1.102.917,00)
7	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	157.089.640,00	225.090.000,00	-	-	382.179.640,00	155.282.800,00	221.686.024,00	-	-	376.968.824,00	(5.210.816,00)
7	01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	157.089.640,00	225.090.000,00	-	-	382.179.640,00	155.282.800,00	221.686.024,00	-	-	376.968.824,00	(5.210.816,00)
7	01	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	110.826.440,00	225.090.000,00	-	-	335.916.440,00	110.569.600,00	221.686.024,00	-	-	332.255.624,00	(3.660.816,00)
7	01	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46.263.200,00	-	-	-	46.263.200,00	44.713.200,00	-	-	-	44.713.200,00	(1.550.000,00)
8	01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	20.062.757.728,00	68.572.703,00	-	-	20.131.330.431,00	19.503.495.304,00	67.871.300,00	-	-	19.571.366.604,00	(559.963.827,00)
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20.062.757.728,00	68.572.703,00	-	-	20.131.330.431,00	19.503.495.304,00	67.871.300,00	-	-	19.571.366.604,00	(559.963.827,00)
8	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.062.757.728,00	68.572.703,00	-	-	20.131.330.431,00	19.503.495.304,00	67.871.300,00	-	-	19.571.366.604,00	(559.963.827,00)
8	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.047.874.901,00	68.572.703,00	-	-	5.116.447.604,00	4.581.448.523,00	67.871.300,00	-	-	4.649.319.823,00	(467.127.781,00)
8	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.837.000,00	-	-	-	57.837.000,00	56.914.900,00	-	-	-	56.914.900,00	(922.100,00)
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.837.000,00	-	-	-	12.837.000,00	12.814.000,00	-	-	-	12.814.000,00	(23.000,00)
8	01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000,00	-	-	-	45.000.000,00	44.100.900,00	-	-	-	44.100.900,00	(899.100,00)
8	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.053.271.149,00	-	-	-	4.053.271.149,00	3.616.532.330,00	-	-	-	3.616.532.330,00	(436.738.819,00)
8	01	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.053.271.149,00	-	-	-	4.053.271.149,00	3.616.532.330,00	-	-	-	3.616.532.330,00	(436.738.819,00)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.815.812,00	-	-	-	62.815.812,00	55.410.830,00	-	-	-	55.410.830,00	(7.404.982,00)
	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62.815.812,00	-	-	-	62.815.812,00	55.410.830,00	-	-	-	55.410.830,00	(7.404.982,00)
8	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	776.810.940,00	-	-	-	776.810.940,00	756.990.065,00	-	-	-	756.990.065,00	(19.820.875,00)
8	01	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	576.810.940,00	-	-	-	576.810.940,00	559.518.975,00	-	-	-	559.518.975,00	(17.291.965,00)
8	01	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	197.471.090,00	-	-	-	197.471.090,00	(2.528.910,00)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1.400.000,00	68.572.703,00	-	-	69.972.703,00	1.400.000,00	67.871.300,00	-	-	69.271.300,00	(701.403,00)
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1.400.000,00	68.572.703,00	-	-	69.972.703,00	1.400.000,00	67.871.300,00	-	-	69.271.300,00	(701.403,00)
8	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.740.000,00	-	-	-	95.740.000,00	94.200.398,00	-	-	-	94.200.398,00	(1.539.602,00)
8	01	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.740.000,00	-	-	-	50.740.000,00	49.383.943,00	-	-	-	49.383.943,00	(1.356.057,00)
8	01	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.510.029,00	-	-	-	4.510.029,00	4.400.000,00	-	-	-	4.400.000,00	(110.029,00)
8	01	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.489.971,00	-	-	-	40.489.971,00	40.416.455,00	-	-	-	40.416.455,00	(73.516,00)
8	01	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	359.150.297,00	-	-	-	359.150.297,00	343.465.340,00	-	-	-	343.465.340,00	(15.684.957,00)
8	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	359.150.297,00	-	-	-	359.150.297,00	343.465.340,00	-	-	-	343.465.340,00	(15.684.957,00)
8	01	04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	359.150.297,00	-	-	-	359.150.297,00	343.465.340,00	-	-	-	343.465.340,00	(15.684.957,00)
8	01	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	12.016.837.530,00	-	-	-	12.016.837.530,00	11.987.343.533,00	-	-	-	11.987.343.533,00	(29.493.997,00)
8	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	12.016.837.530,00	-	-	-	12.016.837.530,00	11.987.343.533,00	-	-	-	11.987.343.533,00	(29.493.997,00)
8	01	03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	980.581.030,00	-	-	-	980.581.030,00	980.560.100,00	-	-	-	980.560.100,00	(20.930,00)
8	01	04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.353.000,00	-	-	-	34.353.000,00	34.352.820,00	-	-	-	34.352.820,00	(180,00)
	05	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	11.001.903.500,00	-	-	-	11.001.903.500,00	10.972.430.613,00	-	-	-	10.972.430.613,00	(29.472.887,00)
8	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	185.337.000,00	-	-	-	185.337.000,00	162.533.500,00	-	-	-	162.533.500,00	(22.803.500,00)
8	01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	185.337.000,00	-	-	-	185.337.000,00	162.533.500,00	-	-	-	162.533.500,00	(22.803.500,00)

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sesudah Perubahan					Realisasi					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8 01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	185.337.000,00	-	-	-	185.337.000,00	162.533.500,00	-	-	-	162.533.500,00	(22.803.500,00)
8 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	671.581.250,00	-	-	-	671.581.250,00	670.721.308,00	-	-	-	670.721.308,00	(859.942,00)
8 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	671.581.250,00	-	-	-	671.581.250,00	670.721.308,00	-	-	-	670.721.308,00	(859.942,00)
8 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.000.000,00	-	-	-	60.000.000,00	59.913.662,00	-	-	-	59.913.662,00	(86.338,00)
8 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	611.581.250,00	-	-	-	611.581.250,00	610.807.646,00	-	-	-	610.807.646,00	(773.604,00)
8 01	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.781.976.750,00	-	-	-	1.781.976.750,00	1.757.983.100,00	-	-	-	1.757.983.100,00	(23.993.650,00)
8 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.781.976.750,00	-	-	-	1.781.976.750,00	1.757.983.100,00	-	-	-	1.757.983.100,00	(23.993.650,00)
8 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.335.350.000,00	-	-	-	1.335.350.000,00	1.317.395.700,00	-	-	-	1.317.395.700,00	(17.954.300,00)
06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	446.626.750,00	-	-	-	446.626.750,00	440.587.400,00	-	-	-	440.587.400,00	(6.039.350,00)
TOTAL		1.053.170.646.108,00	222.872.275.205,00	4.017.860.642,00	-	1.280.060.781.955,00	975.873.375.042,70	217.790.302.662,69	1.238.717.822,00	-	1.194.902.395.527,39	(85.158.386.427,61)

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	6.1	191.243.672.447,43	295.936.667.818,14
2	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	6.2	(191.243.672.447,43)	(295.936.667.818,14)
3	Sub total (1 + 2)		-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	6.3	113.953.605.152,46	191.243.672.447,43
5	Sub total (3 +4)		113.953.605.152,46	191.243.672.447,43
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	6.4	-	-
7	Lain-Lain		-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	6.5	113.953.605.152,46	191.243.672.447,43

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
1	PENDAPATAN LO	8.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH LO	8.1.1				
3	Hasil Pajak Daerah LO	8.1.1.1	114.046.677.401,10	106.736.313.999,26	7.310.363.401,84	18,88%
4	Hasil Retribusi Daerah LO	8.1.1.2	21.264.290.040,92	21.696.850.879,58	(432.560.838,66)	21,77%
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO	8.1.1.3	22.714.358.167,73	18.468.304.240,97	4.246.053.926,76	5,86%
6	Lain-lain PAD yang Sah	8.1.1.4	106.334.681.417,37	112.571.371.767,28	(6.236.690.349,91)	-29,15%
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (1 sd 6)		264.360.007.027,12	259.472.840.887,09	4.887.166.140,03	-8,61%
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER LO	8.1.2				

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN LO	8.1.2.1				
11	Bagi Hasil Pajak LO	8.1.2.1.1	42.560.552.000,00	29.804.646.600,00	12.755.905.400,00	-12,24%
12	Bagi Hasil Bukan Pajak LO	8.1.2.1.2	36.475.210.342,00	82.308.678.000,00	(45.833.467.658,00)	28,91%
13	Dana Alokasi Umum LO	8.1.2.1.3	487.141.770.396,00	463.486.748.121,00	23.655.022.275,00	-0,43%
14	Dana Alokasi Khusus LO	8.1.2.1.4	82.402.483.839,80	71.207.048.405,00	11.195.435.434,80	-2,45%
15	Dana Bagi Hasil Cukai LO	8.1.2.1.5	35.959.029.435,00	21.802.781.361,00	14.156.248.074,00	9,93%
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 sd 15)		684.539.046.012,80	668.609.902.487,00	15.929.143.525,80	2,38%
17						
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA LO	8.1.2.2				
19	Dana Otonomi Khusus LO	8.1.2.2.1	-	-		
20	Dana Penyesuaian LO	8.1.2.2.2	74.714.922.000,00	28.870.790.000,00	45.844.132.000,00	158,79%
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 sd 20)		74.714.922.000,00	28.870.790.000,00	45.844.132.000,00	158,79%
22						
23	Transfer Pemerintah Provinsi LO	8.1.2.3				
24	Pendapatan bagi hasil pajak LO	8.1.2.3.1	120.565.582.200,00	98.284.006.080,00	22.281.576.120,00	22,67%
25	Pendapatan bagi hasil lainnya LO	8.1.2.3.2	-	-		

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
26	Bantuan Keuangan LO	8.1.2.3.2	706.502.612,00	739.383.000,00	(32.880.388,00)	-4,45%
27	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (24 sd 25)		121.272.084.812,00	99.023.389.080,00	22.248.695.732,00	22,47%
28						
29	Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 21 + 26)		880.526.052.824,80	796.504.081.567,00	84.021.971.257,80	10,55%
30						
31	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH LO	8.1.3				
32	Pendapatan Hibah LO	8.1.3.1	22.889.792.772,67	1.328.530.246,00	21.561.262.526,67	1622,94%
33	Pendapatan Darurat LO		-	-		
34	Pendapatan Lainnya LO		-	-		
35	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31 sd 33)		22.889.792.772,67	1.328.530.246,00	21.561.262.526,67	1622,94%
36						
37	JUMLAH PENDAPATAN (6 + 28 + 34)		1.167.775.852.624,59	1.057.305.452.700,09	110.470.399.924,50	10,45%
38						

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
39	BEBAN					
40	BEBAN OPERASI	8.2.				
41	Beban Pegawai	8.2.1.	422.881.149.234,89	402.259.612.087,25	20.621.537.147,64	5,13%
42	Beban Persediaan	8.2.2.	162.232.535.065,04	161.980.339.760,76	252.195.304,28	0,16%
43	Beban Jasa	8.2.3.	247.925.077.120,63	243.168.503.606,19	4.756.573.514,44	1,96%
44	Beban Pemeliharaan	8.2.4.	31.556.734.043,18	33.681.434.482,28	(2.124.700.439,10)	-6,31%
45	Beban Perjalanan Dinas	8.2.5.	42.894.685.591,00	39.903.387.457,00	2.991.298.134,00	7,50%
46	Beban Bunga		-	-	0,00	
47	Beban Subsidi	8.2.6.	99.146.000,00	6.480.445.500,00	(6.381.299.500,00)	-98,47%
48	Beban Hibah	8.2.7.	44.134.020.599,50	11.682.323.718,00	32.451.696.881,50	277,78%
49	Beban Bantuan Sosial	8.2.8.	31.804.857.500,00	33.248.185.680,00	(1.443.328.180,00)	-4,34%
50	Beban Bantuan Keuangan		-	-	-	
51	Beban Transfer		-	-	-	
52	Beban Penyisihan Piutang	8.2.9.	578.175.207,58	1.450.381.015,56	(872.205.807,98)	-60,14%
53	Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen	8.2.10.				

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
54	Beban Penyusutan	8.2.10.	150.036.103.064,44	146.351.482.025,70	3.684.621.038,74	5,55%
55	Beban Amortisasi	8.2.11.	998.849.333,00	1.985.993.167,00	(987.143.834,00)	-28,84%
56	Beban Amortisasi	8.2.12.	492.226.518,00	441.991.276,00	50.235.242,00	6,86%
57	Beban Lain lain	8.2.13.	2.215.995.756,00	1.940.713.725,00	275.282.031,00	7,67%
58	Jumlah Beban Operasi (40 sd 54)		1.137.849.555.033,26	1.084.574.793.500,74	53.274.761.532,52	4,91%
59						
60	SURLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (36 - 55)		29.926.297.591,33	(27.269.340.800,65)	57.195.638.391,98	-209,74%
61						
62	SURLUS (DEFISIT) DARI					
63	KEGIATAN NON OPERASIONAL					
64	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		449.118.662,00	481.163.643,00	(32.044.981,00)	-6,66%
65	Surplus dari Kegiatan non operasional lainnya					
66	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-		
67	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		902.000.650,00	2.280.893.928,00	(1.378.893.278,00)	-60,45%
68	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg Non Operasional (61 sd 64)		(452.881.988,00)	(1.799.730.285,00)	1.346.848.297,00	-74,84%

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
69	SURLUS (DEFISIT) SEBELUM LUAR BIASA (57 + 65)		29.473.415.603,33	(29.069.071.085,65)	55.848.790.094,98	-201,39%
70	POS LUAR BIASA					
71	Pendapatan Luar Biasa		-	-		
72	Beban Luar Biasa		-	-		
73	Beban Tidak Terduga		1.238.717.822,00	2.502.082.962,00	(1.263.365.140,00)	-50,49%
74	Jumlah Pos Luar Biasa (71 sd 73)		(1.238.717.822,00)	(2.502.082.962,00)	1.263.365.140,00	50,49%
75	SURPLUS/ DEFISIT LO (67 + 73)		28.234.697.781,33	(31.571.154.047,65)	57.112.155.234,98	-189,43%

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Ekuitas Awal	10.1	2.798.933.012.648,62	2.810.414.582.202,98
2	Surplus (Defisit) LO	10.2	28.234.697.781,33	(31.571.154.047,65)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		-	-
4	Akumulasi Penyusutan sd tahun 2021		-	-
5	Akumulasi Amortisasi sd tahun 2021		-	-
6	Lain-lain	10.6	(20.305.356.590,80)	20.089.584.493,29
7	Ekuitas Akhir	10.7	2.806.862.353.839,15	2.798.933.012.648,62

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NERACA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1				
2	ASET	7.1		
3	ASET LANCAR	7.1.1		
4	Kas dan Bank	7.1.1.1		
5	Kas di Kas Daerah	7.1.1.1.1	67.071.188.644,14	119.817.397.122,23
6	Deposito Berjangka 1 Bulan	7.1.1.1.6	-	-
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.1.1.1.2	601.132.820,00	-
8	Kas di Bendahara Penerimaan	7.1.1.1.3	10.230.722,00	10.236.077,00
9	Kas di BLUD RSUD	7.1.1.1.4	38.758.539.712,32	64.695.549.324,61
10	Kas di BLUD Puskesmas/JKN	7.1.1.1.4	7.503.164.480,85	6.254.896.034,24
11	Kas Lainnya		610.481.593,15	474.385.599,35
12	Piutang Pajak Daerah	7.1.1.2	11.995.973.053,35	11.226.316.634,00
13	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	7.1.1.2	(4.296.540.965,20)	(5.208.614.573,93)
14	<i>Piutang Pajak Daerah Netto</i>	7.1.1.2	7.699.432.088,15	6.017.702.060,07

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
15	Piutang Retribusi Daerah	7.1.1.3	4.625.019.057,00	7.217.998.007,00
16	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	7.1.1.3	(2.068.159.551,60)	(2.959.719.866,00)
17	<i>Piutang Retribusi Daerah Netto</i>	7.1.1.3	2.556.859.505,40	4.258.278.141,00
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.1.1.4	110.358.980,00	121.517.355,00
19	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.1.1.4	(110.358.980,00)	(121.517.355,00)
20	<i> Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto</i>	7.1.1.4	-	-
21	Piutang Lain-Lain	7.1.1.5	8.072.837.702,85	6.558.726.241,18
22	Penyisihan Piutang Lain-Lain	7.1.1.5	(165.826.573,75)	(151.600.739,41)
23	<i> Piutang Lain-Lain Netto</i>	7.1.1.5	7.907.011.129,10	6.407.125.501,77
24	Persediaan	7.1.1.6	13.537.733.840,96	12.928.832.764,50
25	Belanja Dibayar Dimuka	7.1.1.7	364.051.750,00	-
26	Jumlah Aset Lancar (5 sd 11 +13+16+19+22+23+24+25)		146.619.826.286,07	220.864.402.624,77
27				
28	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.1.2		
29	Investasi Non Permanen	7.1.2.1		
30	Investasi Dana Bergulir	7.1.2.1.1	25.418.517.513,89	24.999.610.290,58
31	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	7.1.2.1.2	(10.134.892.010,33)	(9.691.623.240,33)
32	<i> Investasi Dana Bergulir Netto</i>	7.1.2.1.2	15.283.625.503,56	15.307.987.050,25

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
33				
34	Jumlah Investasi Non Permanen (32)		15.283.625.503,56	15.307.987.050,25
35				
36	Investasi Permanen	7.1.2.2		
37	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.1.2.2.1	140.534.524.709,00	140.522.766.667,00
38	Jumlah Investasi Permanen (37)		140.534.524.709,00	140.522.766.667,00
39				
40	Jumlah Investasi Jangka Panjang (34+38)		155.818.150.212,56	155.830.753.717,25
41				
42	ASET TETAP	7.1.3		
43	Tanah	7.1.3.1	710.169.521.272,27	710.406.120.272,27
44	Peralatan dan Mesin	7.1.3.2	776.839.667.064,50	704.569.408.867,71
45	Akumulasi Peny Peralatan dan Mesin		(638.444.793.528,54)	(574.146.833.518,54)
46	<i>Peralatan dan Mesin Netto</i>		<i>138.394.873.535,96</i>	<i>130.422.575.349,17</i>
47	Gedung dan Bangunan	7.1.3.3	1.051.357.839.620,13	943.400.178.827,51
48	Akumulasi Peny Gedung dan Bangunan		(214.838.706.903,30)	(191.683.302.682,30)
49	<i>Gedung dan Bangunan Netto</i>		<i>836.519.132.716,83</i>	<i>751.716.876.145,21</i>
50	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.1.3.4	1.464.805.790.487,14	1.417.896.999.992,67
51	Akumulasi Peny Jalan, Jaringan, Irigasi		(780.193.133.666,00)	(720.579.673.319,00)
52	<i>Jalan, Irigasi dan Jaringan Netto</i>		<i>684.612.656.821,14</i>	<i>697.317.326.673,67</i>

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
53	Aset Tetap Lainnya	7.1.3.5	6.698.636.203,19	6.625.595.703,19
54	Akumulasi Peny Aset Tetap Lainnya		(1.179.386.093,92)	(1.071.131.843,92)
55	<i>Aset Tetap Lainnya Netto</i>		5.519.250.109,27	5.554.463.859,27
56	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.1.3.6	6.523.176.460,39	9.539.402.677,35
57				
58	Jumlah Aset Tetap (43 sd 49)		2.381.738.610.915,86	2.304.956.764.976,94
59				
60	ASET LAINNYA	7.1.4		
61	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
62	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
63	<i>Tagihan Penjualan Angsuran Netto</i>		-	-
64	Tuntutan Perbendaharaan		-	-
65	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan		-	-
66	<i>Tuntutan Perbendaharaan Netto</i>		-	-
67	Tuntutan Ganti Rugi	7.1.4.1	-	-
68	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.1.4.1	-	-
69	<i>Tuntutan Ganti Rugi Netto</i>	7.1.4.1	-	-
70	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.1.4.2	119.532.900.004,00	119.532.900.004,00
71	Aset Tak Berwujud	7.1.4.4	23.172.037.247,00	23.128.572.247,00
72	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.1.4.4	(22.699.916.915,00)	(21.701.067.582,00)
73	<i>Aset Tak Berwujud Netto</i>	7.1.4.4	472.120.332,00	1.427.504.665,00

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
74	Aset Lain-lain	7.1.4.5	58.843.255.389,37	40.520.839.389,37
75	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	7.1.4.5	(33.637.654.541,04)	(29.495.710.877,04)
76	<i>Akumulasi penyusutan aset lain-lain Netto</i>	7.1.4.5	<i>25.205.600.848,33</i>	<i>11.025.128.512,33</i>
77	Jumlah Aset Lainnya (53 sd 68)		145.210.621.184,33	131.985.533.181,33
78				
79	JUMLAH ASET (26 + 40 + 50 + 69)		2.829.387.208.598,82	2.813.637.454.500,29
80				
81	UTANG	7.2		
82	UTANG LANCAR	7.2.1		
83	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.2.1.1	601.132.820,00	8.791.710,00
84	Pendapatan Diterima Dimuka	7.2.1.2	5.051.616.973,67	4.898.956.358,67
85	Utang Belanja	7.2.1.3	16.872.104.966,00	9.796.693.783,00
86	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.2.1.4	-	-
87	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (75 sd 78)		22.524.854.759,67	14.704.441.851,67
88				
89	UTANG JANGKA PANJANG	7.2.2		
90	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
91	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
92	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
93	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
94	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
95	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
96	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (82 sd 87)		-	-
97				
98	JUMLAH KEWAJIBAN (79 +88)		22.524.854.759,67	14.704.441.851,67
99				
100	Ekuitas	7.3.1	2.806.862.353.839,15	2.798.933.012.648,62
101	Jumlah Ekuitas (91)		2.806.862.353.839,15	2.798.933.012.648,62
102				
103	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (94 + 99)		2.829.387.208.598,82	2.813.637.454.500,29

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Catatan	Tahun 2023	Tahun 2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	9.1		
2	Arus Masuk Kas	9.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	9.1.1.1	113.514.116.369,67	106.165.312.122,76
4	Penerimaan Retribusi Daerah	9.1.1.2	22.551.072.553,00	21.385.348.837,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.1.1.3	14.983.008.032,73	15.595.752.355,97
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	9.1.1.4	104.057.177.790,22	120.584.652.558,82
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	9.1.1.5	24.092.136.000,00	29.804.646.600,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	9.1.1.6	36.475.210.342,00	82.308.678.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	9.1.1.7	487.141.770.396,00	463.486.748.121,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	9.1.1.8	82.402.483.839,80	71.207.048.405,00
11	Penerimaan Bagi Hasil Cukai	9.1.1.9	35.959.029.435,00	21.802.781.361,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	9.1.1.10	120.565.582.200,00	98.284.006.080,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan/Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi	9.1.1.11	706.502.612,00	739.383.000,00
14	Penerimaan Dana Penyesuaian	9.1.1.12	74.714.922.000,00	28.870.790.000,00
15	Penerimaan Hibah	9.1.1.13	-	-
16	Penerimaan Dana Darurat	9.1.1.14	-	-

No	Uraian	Catatan	Tahun 2023	Tahun 2022
17	Penerimaan Lainnya	9.1.1.15	-	-
18	Jumlah Arus Masuk Kas		1.117.163.011.570,42	1.060.235.147.441,55
19	Arus Keluar Kas	9.1.2		
20	Pembayaran Pegawai	9.1.2.1	423.896.152.844,39	404.406.660.608,25
21	Pembayaran Barang dan Jasa	9.1.2.2	487.718.322.693,31	474.775.658.285,04
22	Pembayaran Bunga	9.1.2.3	-	-
22	Pembayaran Subsidi	9.1.2.3	99.146.000,00	6.480.445.500,00
22	Pembayaran Hibah	9.1.2.3	32.355.896.005,00	11.562.623.718,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	9.1.2.4	31.804.857.500,00	33.248.185.680,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	9.1.2.5		
25	Pembayaran Tidak Terduga		1.238.717.822,00	2.502.082.962,00
26	Pembayaran Transfer	9.1.2.6	-	-
27	Jumlah Arus Keluar Kas		977.113.092.864,70	932.975.656.753,29
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	9.1.3	140.049.918.705,72	127.259.490.688,26
29				
30	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	9.2		
31	Arus Masuk Kas	9.2.1		
32	Penjualan Investasi Jangka Panjang	9.2.1.1	-	-
33	Penjualan Aktiva Tetap	9.2.1.2	449.118.662,00	481.163.643,00
34	Jumlah Arus Masuk Kas		449.118.662,00	481.163.643,00
35	Arus Keluar Kas	9.2.2		
36	Perolehan Modal Tanah	9.2.2.1	-	-
37	Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	9.2.2.2	71.585.868.051,04	53.011.211.346,00
38	Perolehan Modal Gedung dan Bangunan	9.2.2.3	80.940.539.683,65	72.843.838.757,97
39	Perolehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.2.2.4	62.832.477.443,00	103.137.296.907,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.2.2.5	2.431.417.485,00	3.442.102.691,00
41	Perolehan Aset Lainnya	9.2.2.6	-	-
42	Penyertaan Modal		-	-
43	Jumlah Arus Keluar Kas		217.790.302.662,69	232.434.449.701,97
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	9.2.3	(217.341.184.000,69)	(231.953.286.058,97)
45				

50	U r a i a n	Catatan	Tahun 2023	Tahun 2022
46	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	9.3		
47	Arus Masuk Kas	9.3.1		
48	SiLPA Tahun anggaran yang lalu	9.3.1.1	-	-
49	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		-	-
51	Transfer dari Dana Cadangan		-	-
52	Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan		-	-
53	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	9.3.1.2	1.198.000,00	800.000,00
54	Jumlah Arus Masuk Kas		1.198.000,00	800.000,00
55	Arus Keluar Kas	9.3.2		
56	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi		-	-
57	Transfer ke Dana Cadangan		-	-
58	Penyertaan Modal	9.3.2.1	-	-
59	Pembayaran Utang Pokok	9.3.2.2	-	-
60	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	9.3.3	1.198.000,00	800.000,00
62	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	9.4		
63	Arus Masuk Kas	9.4.1		
65	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		61.215.397.853,00	59.270.137.579,00
66	Jumlah Arus Masuk Kas		61.215.397.853,00	59.270.137.579,00
67	Arus Keluar Kas	9.4.2		
68	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		60.623.056.743,00	59.278.397.517,00
69	Jumlah Arus Keluar Kas		60.623.056.743,00	59.278.397.517,00
70	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	9.4.3	592.341.110,00	- 8.259.938,00
71				
72	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode		(76.697.726.184,97)	(104.701.255.308,71)
73	Saldo Awal Kas di Kas Daerah		119.817.397.122,23	225.992.425.922,40
77	Saldo Awal Kas BLUD Dinas Kesehatan		6.254.896.034,24	7.457.912.123,59
78	Saldo Awal Kas BLUD RSUD		64.695.549.324,61	61.231.491.260,82
75	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		10.236.077,00	6.402.708,00
74	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran			
76	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan BLUD			
79	Saldo Awal Kas Lainnya BOS		465.593.889,35	1.265.487.451,33
80	Saldo Awal Kas Lainnya Pfk		8.791.710,00	-
81	Saldo Akhir Kas		114.554.737.972,46	191.252.464.157,43

No	U r a i a n	Catatan	Tahun 2023	Tahun 2022
82	Saldo Akhir Kas di BUD		67.071.188.644,14	119.817.397.122,23
83	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		601.132.820,00	-
84	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD		-	-
85	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		10.230.722,00	7.662.000,00
86	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD		-	2.574.077,00
87	Saldo Akhir Kas BLUD Dinas Kesehatan		7.503.164.480,85	6.254.896.034,24
88	Saldo Akhir Kas BLUD RSUD		38.758.539.712,32	64.695.549.324,61
89	Saldo Akhir Kas BOS		610.481.593,15	465.593.889,35
90	Saldo Akhir Lainnya Pfk		-	8.791.710,00
91	Saldo Akhir Kas		114.554.737.972,46	191.252.464.157,43

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah dihadapkan pada suatu keadaan dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat. Setelah tahun anggaran 2023 berakhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah telah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Kota telah menerapkan basis akuntansi akrual sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Madiun.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pembiayaan, posisi aset, posisi kewajiban, posisi ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan. Selain itu, setiap entitas pelaporan keuangan daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna (stakeholders) dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Maksud dan tujuan dari penyusunan LKPD antara lain:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
- b. Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah tercapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
- j. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah;
- k. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah;
- l. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan

Memberikan informasi mengenai LKPD Tahun 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk).

Bab I Pendahuluan

Memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan serta landasan hukum penyusunan LKPD Tahun 2023

Bab II Perkembangan Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Target Kinerja APBD

Memberikan informasi mengenai ekonomi makro dan kebijakan keuangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja keuangan masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun selama tahun anggaran 2023.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam menyusun LKPD Tahun 2023.

Bab V Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Bab VI Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan SAL

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Bab VII Penjelasan Pos - Pos Neraca

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Neraca.

Bab VIII Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Operasional (LO).

Bab IX Penjelasan Pos - Pos Laporan Arus Kas

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Arus Kas.

Bab X Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab XI Penjelasan Informasi Non Keuangan

Memberikan informasi non keuangan Pemerintah Kota Madiun yang terjadi selama tahun anggaran 2023 dan kejadian-kejadian lain setelah tanggal neraca.

Bab XII Penutup

Memberikan informasi mengenai kesimpulan uraian secara ringkas Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

BAB II PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

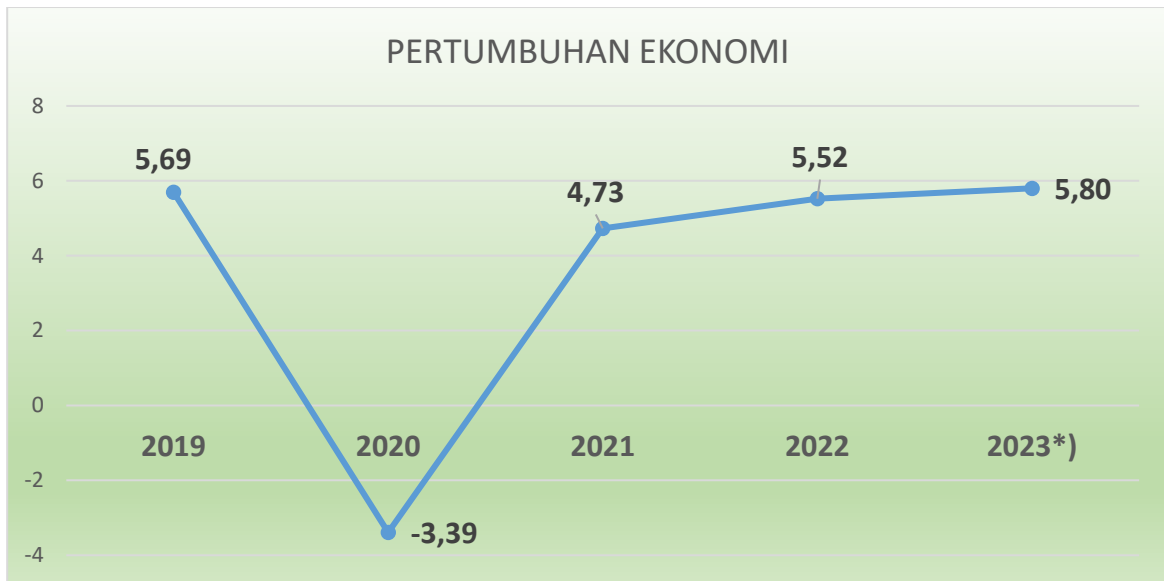
2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Madiun Tahun 2023 telah menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi daerah dalam pembangunan dan mengindikasikan sejauh mana kesejahteraan masyarakat daerah Kota Madiun tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian daerah Kota Madiun adalah pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.

2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), baik ADHB/Atas Dasar Harga Berlaku maupun ADHK/Atas Dasar Harga Konstan. Berdasarkan data dari BPS Kota Madiun diketahui bahwa laju pertumbuhan perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2023 adalah sebesar 5,80. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,28 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022, di mana pada Tahun 2022 tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52. Angka kenaikan pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh upaya Pemerintah Kota Madiun dalam menciptakan ruang usaha di Kota Madiun yang kondusif sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja yaitu dengan memberikan kemudahan perijinan pendirian usaha, perlindungan usaha, pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan terpadu UMKM, partisipasi UMKM dalam infrastruktur publik, layanan bantuan dan pendampingan hukum, kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, dan pelatihan serta optimalisasi fungsi lapak UMKM sebagai katalisator pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah. Rancangan kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Madiun yang telah berhasil memberikan stimulus dalam upaya mengakselerasi perekonomian daerah berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi lanjutan di tahun 2023, dengan mencatatkan angka Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun yang positif yang diproyeksikan pada angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80.

Grafik 2.1.1.1
Grafik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2023

*) Angka Sementara

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun yang dapat diindikasikan oleh kenaikan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) yaitu dengan menghitung pertumbuhan PDRB riil Kota Madiun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun periode 2019-2023 menunjukkan terjadi fluktuatif. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun berada pada angka 5,69 persen. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu sebesar -3,39 hal itu disebabkan adanya wabah pandemi COVID 19. Selanjutnya pada Tahun 2021 telah mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Jawa Timur maupun nasional kenaikannya lebih dalam yaitu sebesar 4,73. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun melanjutkan trend pemulihan yang positif dimulai pada Tahun 2021 dengan angka pertumbuhan 4,73 Tahun 2022 dengan angka pertumbuhan 5,52 sedangkan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 5,80.

Hal ini terjadi karena adanya upaya Pemerintah Kota Madiun yang telah melakukan optimalisasi dalam pemulihan ekonomi dan mengantisipasi efek jangka panjang ekonomi dari pandemi COVID-19 terhadap kehidupan sosial

ekonomi & daya beli masyarakat. Untuk mendukung capaian pemulihan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Madiun agar target tersebut tercapai:

- a. Percepatan Belanja Pemerintah. Pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat teknis, melaksanakan tender, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial. Tujuan percepatan ini mengarahkan agar dapat adaptasi dengan kebiasaan yang baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca pandemi, dan penguatan reformasi kebijakan publik.
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
- c. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.
- d. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
- f. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan ketrampilan kerja dalam rangka menanggulangi peningkatan PHK akibat Perlambatan ekonomi regional.
- g. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
- h. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.
- i. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.
- j. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- k. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Dari kondisi tersebut, prospek perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2023 sudah mengalami perbaikan yang cukup signifikan.

2.1.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB nya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kota Madiun pada umumnya terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Pola *recovery* telah dimulai pada tahun 2021 yang menunjukkan trend angka pertumbuhan pada zona positif yang disebabkan semakin pulihnya kondisi ekonomi regional. Pada Tahun 2021 hingga 2022 telah terjadi perbaikan data pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB tahun 2021 dan 2022 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada Tahun 2021 dan 2022 bergerak positif, serta Tahun 2023 diproyeksikan mampu tumbuh di atas rata - rata daerah yang lain. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada tahun 2019 sampai dengan proyeksi 2023 dapat dilihat data di bawah ini:

Tabel 2.1.2.1
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2019 sampai tahun 2023 (Milyar)

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2019	14.107,3	10.623,8	5,69
2020	13.769,3	10.262,4	-3,39
2021	14.699,8	10.748,1	4,73
2022	15.018,7	11.273,7	5,52
2023*)	17.033,1	11.745,6	5,80

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2024

*) angka sementara

PDRB Kota Madiun terus mengalami peningkatan pada tahun 2019-2023. Nilai PDRB pada tahun 2019 atas dasar harga berlaku sebesar Rp14.107,3 milyar dan atas dasar harga konstan sebesar Rp10.623,8 milyar. Sedangkan pada Tahun 2020 baik berdasarkan harga konstan atau harga berlaku mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana untuk PDRB atas dasar harga konstan menjadi sebesar Rp10.262,4 (Milyar) dan untuk PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp13.769,3 (milyar). Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 untuk PDRB atas dasar harga konstan mengalami penurunan sebesar Rp361,40 (Milyar), sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sebesar Rp338,0 (Milyar). Sedangkan untuk Tahun 2021 seiring dengan adanya pemulihan ekonomi, nilai PDRB atas dasar Harga Konstan sebesar Rp10.748,1 (Milyar) dan PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp14.699,8 (Milyar) sedangkan Tahun 2022 nilai PDRB atas dasar Harga Konstan sebesar Rp11.273,7 (Milyar) dan PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp15.818,61 (Milyar). Pada Tahun 2023 ekonomi Kota Madiun

semakin membaik maka diproyeksikan nilai PDRB atas dasar Harga Konstan sebesar Rp11.764,40 (Milyar) dan PDRB atas dasar Harga Berlaku sebesar Rp17.256,23 (Milyar)

Tabel 2.1.2.2
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 s/d 2023
(Milyard)

No	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	106,81	120,59	108,7	110,35	121,77
2	Pertambangan dan Penggalian	3,05	2,95	2,91	2,71	2,65
3	Industri Pengolahan	2.290,02	1.780,97	1.985,25	2.099,37	2.340,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,22	11,48	11,72	12,89	13,75
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	29,04	30,4	32,65	34,76	36,82
6	Konstruksi	834,71	798,95	805,73	928,22	1005,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	3.657,66	3.311,32	3.712,41	4.216,70	4.608,99
8	Transportasi dan Pergudangan	498,89	477,53	516,72	643,89	780,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	705,63	661,55	716,4	900,81	811,41
10	Informasi dan Komuniasi	1.851,67	2.172,16	2.296,07	2.435,44	2.632,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.432,48	1.423,02	1.462,62	1.583,93	1.668,21
12	Real Estate	374,2	381,91	388,09	413,3	438,04
13	Jasa Perusahaan	98,17	97,71	100,68	108,69	117,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	438,16	452,66	447,71	454,35	465,47
15	Jasa Pendidikan	1.067,46	1.109,27	1.113,54	1.135,80	1.202,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	189,69	212,57	227,26	240,59	256,87
17	Jasa Lainnya	518,48	474,94	506,98	586,23	664,37
PDRB		14.107,34	13.519,88	14.435,43	15.818,61	17.256,23

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2023

*) angka sementara

Dengan melihat besarnya peranan atau kontribusi dari masing-masing sektor maka struktur perekonomian Kota Madiun pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mayoritas ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor, sektor industri pengolahan dan sektor Informasi dan komunikasi. Ketiga sektor

tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Madiun.

Tabel 2.1.2.3
Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2019 s/d 2023 (%)

No	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	75,63	84,38	78,26	73,82	77,36
2	Pertambangan dan Penggalian	2,2	2,08	1,99	1,82	1,72
3	Industri Pengolahan	1.878,54	1.430,78	1.532,38	1.565,69	1.690,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,61	8,78	9,04	9,76	10,28
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	22,26	23,34	24,8	25,67	26,75
6	Konstruksi	647,2	616,69	611,17	661,51	693,46
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.514,39	2.233,21	2.460,08	2.656,42	2.805,14
8	Transportasi dan Pergudangan	333	318,4	341,24	398,92	445,33
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	559,24	514,6	531,1	583,98	2286,79
10	Informasi dan Komuniasi	1.671,41	1.940,86	2.032,96	2.153,80	2.153,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	947,54	941,3	945,67	948,75	975,52
12	Real Estate	263,02	263,89	267,05	280,64	292,84
13	Jasa Perusahaan	77,36	74,9	75,48	79,45	84,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	322,38	315,18	312,05	310,7	312,28
15	Jasa Pendidikan	768,65	783,82	788,06	792,75	817,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139,55	153,48	161,86	167,19	172,55
17	Jasa Lainnya	392,1	350,22	364,51	408,67	447,05
PDRB		10.623,07	10.055,91	10.537,70	11.119,55	11.764,40

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2023

*) angka sementara

Atas dasar harga konstan kontribusi sektor yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Madiun pada tahun 2019 hingga 2023, mayoritas ditopang oleh sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan motor; sektor industri pengolahan dan sektor Informasi dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 57,08% pada Tahun 2019, sebesar 56,63% pada Tahun

2020 dan sebesar 58,01% pada Tahun 2021 serta sebesar 55,30% pada Tahun 2022 dan 56,52% pada Tahun 2023.

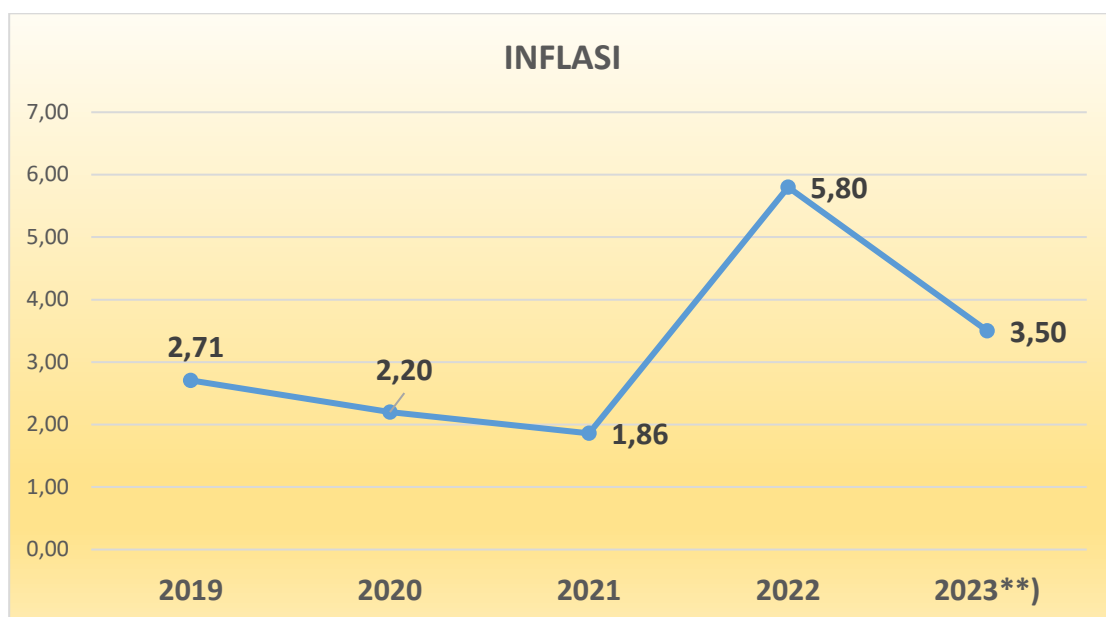
2.1.3. INFLASI

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2023 tingkat Inflasi Kota Madiun masih di bawah angka laju pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2019 s/d 2023. Hal ini menunjukkan tingkat pendapatan dan daya beli penduduk Kota Madiun di atas kenaikan harga – harga yang terjadi dan kondisi perekonomian Kota Madiun relatif masih stabil dan terkendali.

Kondisi tersebut mengalami pembalikan pada tahun 2020 yang dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 menyebabkan munculnya angka deflasi yang mengindikasikan melemahnya tingkat daya beli masyarakat Kota Madiun. Sementara pada tahun 2021 dan tahun 2022 mulai menunjukkan angka inflasi yang positif dalam range yang terkontrol yang menunjukkan *outlook* perbaikan tingkat daya beli masyarakat Kota Madiun. Pada Tahun 2023 perkembangan tingkat inflasi Kota Madiun diproyeksikan di angka 3 ± 1 . Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

Grafik 2.1.3.1

Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2023

**) Angka Proyeksi

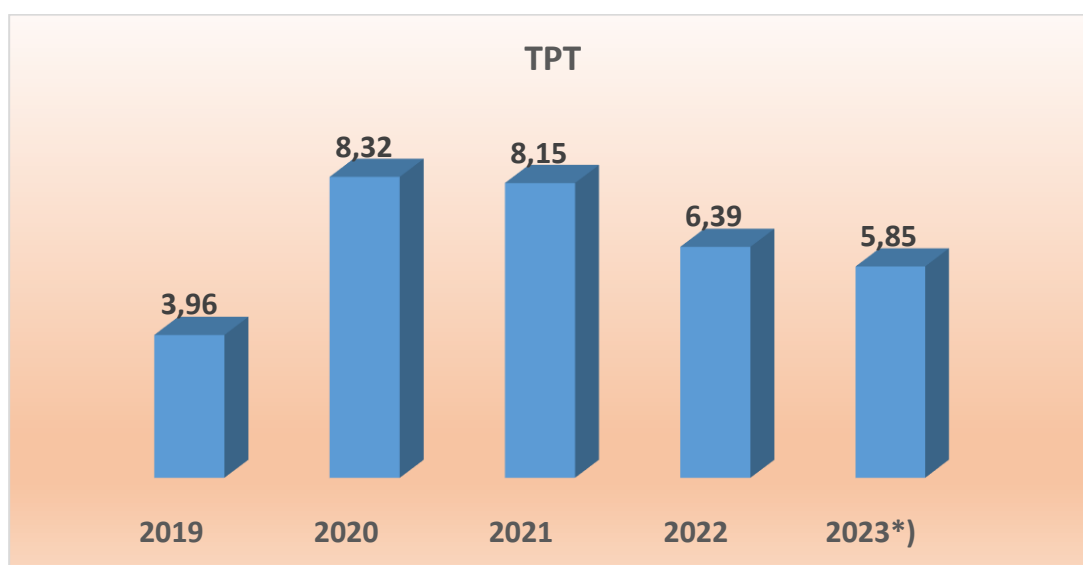
Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 inflasi pada level sebesar 2,2 persen, di tahun 2020 inflasi mengalami penurunan yang cukup besar menjadi sebesar 1,86 dan di tahun 2020 angka inflasi sebesar 1,86 yang berarti inflasi di Kota Madiun cenderung berubah menuju deflasi akibat ketimpangan supply - demand antara pasokan produksi dan kebutuhan konsumen akibat adanya pandemi COVID-19. Angka Inflasi di tahun 2021 sesuai rilis data dari BPS pada mengalami kenaikan menjadi sebesar tetap 2,00 (akibat mulai adanya recovery ekonomi yang ditopang dengan pertumbuhan uang beredar dan kenaikan produksi akibat pulihnya kemampuan daya beli konsumen dengan mulai tumbuhnya geliat aktivitas ekonomi akibat terkendalnya penanganan pandemi COVID-19. Secara keseluruhan inflasi Kota Madiun selama 5 tahun terakhir sudah berangsur angsur terkendali.) Pada Tahun 2022 dan 2023 seluruh dunia mengalami krisis pangan dan energi yang menyebabkan inflasi menjadi lebih besar dan banyak negara yang mengalami krisis, sehingga untuk Kota Madiun inflasi pada Tahun 2023 diproyeksi sekitar 3,5 persen.

2.1.4. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang menjadi permasalahan pada setiap daerah, tidak terkecuali Kota Madiun. Di Kota Madiun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator pada penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan. Namun demikian, permasalahan

pengangguran sebenarnya merupakan persoalan yang menjadi tanggungjawab bersama lintas sektoral sehingga beberapa OPD harus saling mendukung terhadap upaya pengurangan tingkat pengangguran terbuka ini. Kinerja pembangunan ekonomi di Kota Madiun juga bisa tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka ini. Berikut merupakan gambaran mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir.

GRAFIK 2.1.4.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2024

*) Angka Sementara

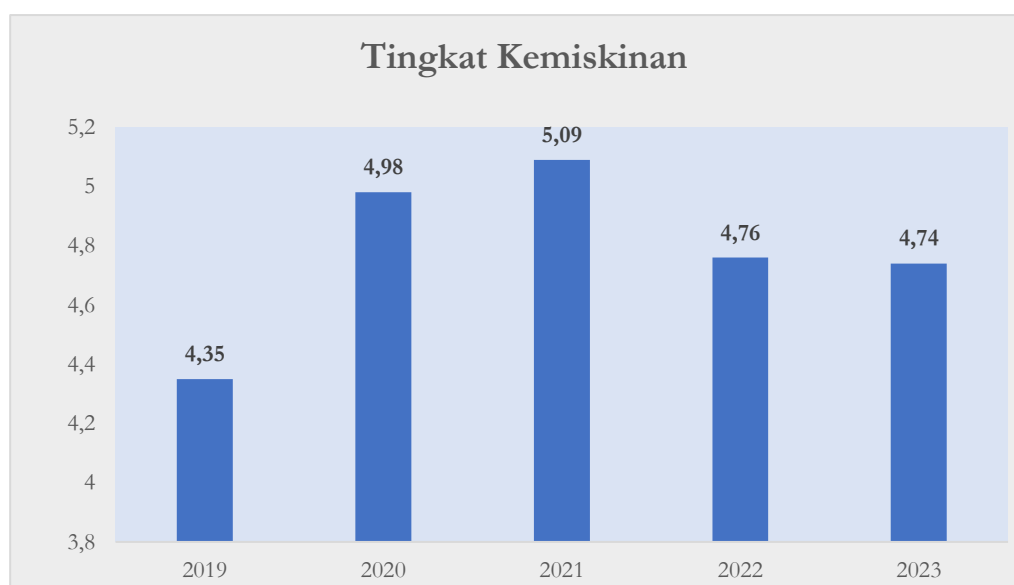
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan sedikit menjadi sebesar 3,96 persen dan tahun 2020 mengalami kenaikan cukup tajam menjadi 8,32 sebagai dampak adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan adanya PHK dan pelaku usaha tidak bisa melaksanakan usahanya secara maksimal. Sedangkan pada Tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 8,15, karena kondisi ekonomi masih sangat tertekan sehingga banyak terjadi PHK dan UMKM sudah mulai sedikit bangkit karena dukungan dari pemerintah, sedangkan pada Tahun 2022 TPT

Kota Madiun sudah mengalami penurunan sebesar 6,39. Kondisi penurunan tersebut berlanjut pada Tahun 2023, dimana TPT Kota Madiun diproyeksikan sebesar 5,85.

2.1.5. KEMISKINAN

Perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Madiun Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat di bawah ini:

Grafik 2.1.5.1
Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan
Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun
Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan prosentase penduduk miskin Kota Madiun tahun 2019 menunjukkan angka yang sangat rendah yang menunjukkan program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan dengan baik. Tetapi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang juga sangat signifikan, hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi Covid 19 yang menekan perekonomian global, nasional maupun daerah yang mempunyai efek jangka panjang. Pada Tahun 2022 Tingkat Kemiskinan berhasil diturunkan

sejalan dengan dilaksanakannya program – program pengentasan kemiskinan dan stimulus ekonomi oleh Pemerintah Kota Madiun sebagai bagian upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik sebagaimana melaksanakan apa yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dengan meluncurkan Program PEN. Kondisi tersebut masih berlanjut pada Tahun 2023, dimana Tingkat Kemiskinan diproyeksikan mengalami penurunan lagi sejalan kondisi ekonomi yang stabil dan mengalami perbaikan berkelanjutan, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kota Madiun bisa berjalan dengan baik.

2.1.6. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Indeks Kesehatan, Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Indeks PPP dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2.1.6.1
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2019 s/d 2023

Indeks	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
IPM	80,88	81,03	82,27	83,02	83,71
Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,82	
Umur Harapan Hidup	72,75	72,81	72,83	73,13	75,40
Indeks Pengetahuan	0,77	0,85	0,78	0,79	
Harapan Lama Sekolah	14,39	14,4	14,40	14,43	14,44
Rata-rata Lama Sekolah	11,13	11,14	11,37	11,67	11,82
Indeks Pengeluaran	0,83	0,85	0,85	0,85	
Pengeluaran per kapita (000 Rp)	16,040	16,010	16,095	16,503	17,115

Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2024

*) Angka Sementara

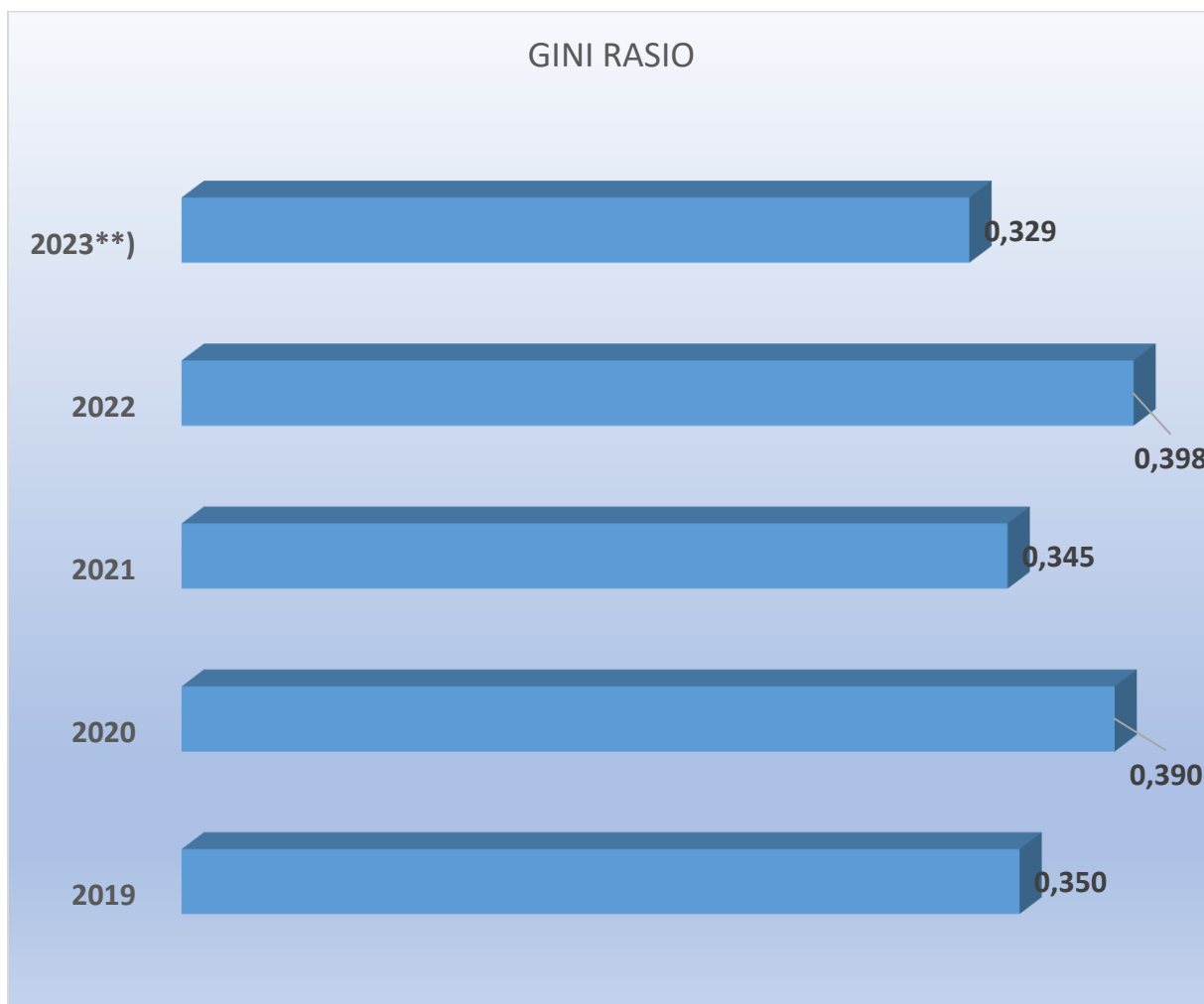
IPM Kota Madiun pada Tahun 2023 diproyeksikan mencapai 83,71 atau naik sebesar 0,69 poin dibanding Tahun 2022 yang mencapai 83,02. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah

yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80. Umur Harapan Hidup Kota Madiun diproyeksikan juga mengalami kenaikan dari 73,13 menjadi 75,40 atau mengalami peningkatan sebesar 2,27 dibandingkan tahun 2022, hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – rata Lama Sekolah masing – masing mengalami kenaikan sebesar 0,01 dan 0,15 dibandingkan tahun 2022. Sementara angka Pengeluaran per kapita juga mengalami kenaikan sebesar 0,612 dibandingkan tahun 2022 yang mengindikasikan inflasi bergerak moderat terkendali yang menandakan tumbuhnya pertumbuhan ekonomi Kota Madiun yang cukup signifikan.

2.1.7. GINI RATIO (IPM)

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kota Madiun pada tahun 2019-2023 tercatat secara rinci pada angka 0,350 pada tahun 2019, pada angka 0,390 pada tahun 2020, pada angka 0,345 pada tahun 2021, pada angka 0,398 pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 tercapai pada angka 0,329, dengan demikian termasuk Kota dengan ketimpangan sedang. Mulai Tahun 2021 pergerakan sudah mulai melandai maka Gini Ratio Kota Madiun menunjukkan trend yang semakin menurun, yang menunjukkan ketimpangannya semakin berkurang.

Grafik 2.1.7.1
Perkembangan GINI RATIO Kota Madiun Tahun 2019 s/d 2023



Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2024
 **) Angka Proyeksi

LAPORAN SERAPAN INSENTIF FISKAL & DAU



Tabel Laporan TL.1
 RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH
 (DID TAHUN BERJALAN PRIORITAS NASIONAL) TAHUN ANGGARAN 2023
 KOTA MADIUN

KEG	SUB KEG	PAGU (Rp)	OUTPUT	REALISASI (Rp)	OUTPUT	%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.700.000.000	2800 Orang	4.896.000.000	720	73%

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Bantuan Beasiswa Masyarakat Miskin)		4.714.031.000	780 Orang	811.015.500	971	17%
TOTAL		11.414.031.000		5.707.015.500		50%

Tabel Laporan TL.2
REALISASI PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL (IF KINERJA TAHUN
SEBELUMNYA - REGULER)
TAHUN ANGGARAN 2023
KOTA MADIUN

JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	OUTPUT	
			JUMLAH	SATUAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	63.300.891.000	46.399.802.428		
pengelolaan dan pengembangan sistem drainasi yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota (Pembangunan sistem drainase)	13.174.370.000	6.418.978.100	100	meter
pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (Satu) daerah kab/kota (Normalisasi stasiun pompa banjir)	2.065.661.000	2.065.661.000	500	meter
pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (Satu) daerah kab/kota (peningkatan stasiun pompa banjir)	2.100.000.000	1.997.000.000	2	
penyelenggaraan jalan kab/kota (panjang jalan yang dilakukan pelebaran dengan menambah lajur seperti bangunan pelengkap dan trotoar)	12.627.160.000	8.564.158.000	2	KM
penyelenggaraan jalan kab/kota (Pembangunan Jalan)	1.842.780.000	1.634.847.000	1	KM
penyelenggaraan jalan kab/kota (Pembangunan jembatan)	1.098.080.000	-	40	m2
penyelenggaraan jalan kab/kota (Pemeliharaan berkala jalan seperti pengaspalan)	14.343.950.000	13,278,135,119	6	KM

penyelenggaraan jalan kab/kota (pemeliharaan rutin jalan seperti tambal sulam pengaspalan jalan rusak)	2.491.560.000	2.291.229.445	1500	m
penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota (penataan bangunan dan lingkungan untuk pembangunan saluran lingkungan di kelurahan)	13.557.330.000	10.149.793.764	15	kelurahan

Tabel Laporan TL.3
LAPORAN REALISASI DAU BIDANG KESEHATAN
KOTA MADIUN
2023

Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keluaran		
Uraian Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan			Uraian	Jumlah	Satuan
(2)		(3)	(4)	(5)		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.050.072.593		Gaji		Orang/Bulan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.386.362.000		JKN		Dokumen
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	377.829.000		alat kesehatan/ alat medik yang disediakan		Unit
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	246.629.080		Rehabilitasi Puskesmas		Unit

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.376.422.095		jumlah dokumen operasional pelayanan kesehatan lainnya		Dokumen
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.126.922.860		jumlah dokumen bimbingan teknis dan supervisi UKBM		Dokumen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	659.406.000		jumlah PSC tersediaan		Unit
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.360.350		jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya		Orang
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,	61.684.700		Jumlah dokumen pendengendalian dan pengawasannya		Dokumen

	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	34.521.000		Jumlah dokumen pendengandalian dan pengaawasaan		Dokumen
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	355.011.920		Jumlah dokumen		Dokumen
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	231.957200		Jumlah dokumen		Dokumen

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	143.404.500		Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi		Unit
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	485.679.932		pengadaan obat dan vaksin yang disediakan		Paket
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	78.450.000		alat kesehatan yang terpelihara sesuai standar		Unit
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	310.623.200		ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	40.866.400		ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.834.000		bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	166.600.000		balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	103.130.000		usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	112.786.408		usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	69.678.100		usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.567.000		penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	28.788.000		penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	64.735.000		orang menderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	52.894.750		orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	163.368.900		Jumlah orang terduga menderita HIV		Orang
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	159.330.000		jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		Dokumen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	92.281.400		jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		Dokumen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	115.061.000		jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan		Dokumen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	58.204.200		jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan		Orang

Daerah Kabupaten/Kota						
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	276.645.000		jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		Dokumen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	324.124.800		jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kab/kota sehat		Dokumen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	22.939.200		jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kab/kota		Unit
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	52.515.000		jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB		Dokumen
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyediaan dan Oistribusi Sarana KIE Program KKBPK	20.576.200		jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE Program KKBPK		Unit

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	25.000.000		jumlah dokumen promosi dan KIE Program KKBK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang		Dokumen
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	14.323.912		jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Laporan
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	15.245.500		Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK		Laporan
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.189.000		Jumlah laporan hasil pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya		Laporan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.100.439.900		jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		Dokumen
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	306.987.900		jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang		Orang
TOTAL		21.545.448.000	-			

Tabel Laporan TL.4
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU BIDANG KESEHATAN
KOTA MADIUN
TAHAP I dan TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	URAIAN		PAGU (Rp)	REALISASI PENYERAPAN		SISA PAGU	REALISASI KELUARAN		
	Keg	Sub Keg		Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)		Uraian	Juml	Sat
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	246.629.080	1.192.000	1.192.000	244.245.080	Rehabilitasi Puskesmas	1	Unit

2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	377.829.000	167.655.700	210.173.300	-	alat kesehatan/alat medik yang disediakan	140	Unit
3	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	143.404.500	-	115.316.000	28.088.500	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	100	Unit
4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	485.679.932	406.152.228	79.527.704	-	pengadaan obat dan vaksin yang disediakan	4	Paket
5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	78.450.000	36.197.725	42.252.275	-	alat kesehatan yang terpelihara sesuai standar	140	Unit

6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	310.623.200	20.464.000	5.287.600	284.871.600	ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1248	Orang
7	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	40.866.400	16.613.200	13.890.000	10.363.200	ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1166	Orang
8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.834.000	7.636.000	5.198.000	-	bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1147	Orang
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	166.600.000	-	-	166.600.000	balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang

10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	103.130.000	4.612.000	4.066.000	94.452.000	usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20608	Orang
11	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	112.786.408	11.946.000	26.315.200	74.525.208	usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	73037	Orang
12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	69.678.100	-	27.457.600	42.220.500	usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	19484	Orang

13	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.567.000	-	4.174.000	9.393.000	penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	24119	Orang
14	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	28.788.000	-	-	28.788.000	penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan		Orang
15	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	64.735.000	13.972.000	22.020.800	28.742.200	orang menderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	273	Orang

16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	52.894.750	-	24.396.000	28.498.750	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2043	Orang
17	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	163.368.900	56.629.800	24.747.200	81.991.900	Jumlah orang terduga menderita HIV	4264	Orang
18	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.100.439.900	-	79.743.600	2.020.696.300	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	Dokumen

19	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	159.330.000	81.999.000	920.000	76.411.000	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2	Dokumen
20	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	92.281.400	-	26.436.000	65.845.400	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1	Dokumen
21	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	115.061.000	19.787.000	55.533.400	39.740.600	jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	3	Dokumen

22	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	58.204.200	12.000.000	20.317.200	25.887.000	jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan	273	Orang
23	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	276.645.000	28.565.000	42.809.700	205.270.300	jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2	Dokumen
24	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.386.362.000	-	5.386.362.000	-	JKN	18	Dokumen

25	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	324.124.800	42.736.000	21.472.500	259.916.300	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kab/kota sehat	7	Dokumen
26	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.376.422.095	303.060.472	670.414.788	1.402.946.835	jumlah dokumen operasional pelayanan kesehatan lainnya	6	Dokumen
27	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	22.939.200	-	-	22.939.200	jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kab/kota		Unit

28	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGD T)	659.406.000	271.267.200	69.522.000	318.616.800	jumlah PSC tersedia	1	Unit
29	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.360.350	74.602.850	123.757.500	-	jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	590	Orang
30	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	61.684.700	20.370.600	10.965.200	30.348.900	Jumlah dokumen pendengendalian dan pengawasan	1	Dokumen

		(UMOT)							
31	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	34.521.000	6.149.800	14.289.600	14.081.600	Jumlah dokumen pendeng andalian dan pengaaw asan	1	Dok ume n

32	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	355.011.920	4.269.620	100.820.370	249.921.930	Jumlah dokumen	1	Dokumen
33	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.126.922.860	574.272.000	311.174.700	1.241.476.160	jumlah dokumen bimbingan teknis dan supervisi UKBM	1	Dokumen

34	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	52.515.000	-	-	52.515.000	jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB		Dokumen
35	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk Sesuai Kearifan Budaya Lokal	231.957.200	73.681.600	88.601.600	69.674.000	Jumlah dokumen	1	Dokumen

36	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	20.576.200	-	-	20.576.200	jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE Program KKBP		Unit
37	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	25.000.000	-	25.000.000	-	jumlah dokumen promosi dan KIE Program KKBP melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1	Dokumen

38	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	14.323.912	14.323.912	-	-	jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	40	Laporan
39	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	15.245.500	-	-	15.245.500	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK		Laporan
40	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.189.000	1.650.000	1.000.000	6.539.000	Jumlah laporan hasil pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	4	Laporan

41	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	306.987.900	141.755.700	159.833.500	5.398.700	jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	291	Orang
42	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.050.072.593	4.050.072.593	-	-	Gaji	339	Orang/Bulan
TOTAL			21.545.448.000	6.463.634.000	7.814.987.337	7.266.826.663			

Tabel Laporan TL.5
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAU PENDANAAN KELURAHAN TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2023
KOTA MADIUN

NO.	URAIAN		BAGIAN DAU PENDANAAN KELURAHAN				
	Kegiatan	Subkegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	OUTPUT	
						VOLUME	SATUAN
1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Penerangan lingkungan pemukiman	232.699.481	150.670.731	82.028.750	2	Unit
2	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jalan pemukiman	3.619.500.585	1.230.535.374	2.388.965.211	25	Meter
3	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya	99.251.000	62.350.000	36.901.000	3	Unit

4	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Penyelenggaraan pelatihan kerja	1.448.548.934	1.256.443.895	192.105.039	78	Pokmas /Ormas
TOTAL			5.400.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000		

2.1.8. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO KOTA MADIUN

Dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Madiun selalu mempertimbangkan perkembangan ekonomi domestik, regional dan global, karena kondisi perekonomian domestik sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional maupun global. Pada Tahun 2023 tantangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh inflasi harga pangan yang dipengaruhi oleh perubahan iklim kemarau ekstrem *el-nino* yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan Februari 2024. Dengan menghadapi kondisi harga pangan yang melonjak terutama kenaikan harga beras di tingkat konsumen, Pemerintah Kota Madiun secara rutin telah mengadakan operasi pasar murah Bahan Pokok, terutama beras murah. Hal tersebut dilakukan untuk menekan laju inflasi dan menopang daya beli masyarakat bawah terhadap kebutuhan harga bahan pokok.

Selain tantangan di atas, kondisi Geopolitik & Geoekonomi juga sangat berpengaruh, dimana gejolak peperangan yang masih berlangsung di eropa dan timur tengah masih akan memberikan efek domino pada kondisi perekonomian global, dimana mengakibatkan penurunan konsumsi produk – produk dari Negara Asia termasuk Indonesia oleh Negara Eropa dan Timur Tengah. Hal itu akan berimplikasi pada pengurangan kapasitas produksi manufaktur dan akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Efek domino dari rangkaian kondisi di atas Kota Madiun akan terimbas, terutama dari kondisi arus balik korban PHK yang mencoba untuk memulai usaha di Kota Madiun dalam jumlah yang relatif besar. Hal itu tercermin dari jumlah pedagang UMKM yang mengalami kenaikan yang cukup tajam.

Dengan melihat kondisi di atas Pemerintah Kota Madiun telah berupaya dengan memberikan stimulus ekonomi pada sektor menengah dan bawah dengan kebijakan – kebijakan Pro Rakyat sebagai upaya membantu berlangsungnya kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Madiun juga selalu memperhatikan faktor ekonomi yang bersifat internal dan eksternal, yaitu kondisi ekonomi regional, nasional dan global yang sangat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi di tingkat daerah. Sehingga Pemerintah Kota

Madiun juga merasakan tidak terlepas dari dampak tersebut dimana dalam postur APBD selalu melakukan penyesuaian prioritas program untuk menghadapi kondisi tersebut. Penajaman program unggulan yang bersifat kerakyatan menjadi hal yang utama dalam upaya memberi jalan keluar atas beberapa tantangan di atas, sehingga Kota Madiun telah melakukan penyesuaian terhadap kondisi tersebut.

Berdasarkan kondisi perekonomian global, nasional dan regional provinsi Jawa Timur, maka capaian perekonomian Kota Madiun tahun 2022 dan prospek tahun 2023 dapat dilihat dalam indikator ekonomi di bawah ini.

Tabel 2.1.8.1
Proyeksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2022 – 2024

KETERANGAN	Realisasi	Proyeksi	
	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,19	5,41	
PDRB ADHB (juta rupiah)	15.018,65	15.691,11	
PDRB ADHK (juta rupiah)	11.273,68	11.838,49	
PDRB per Kapita (juta rupiah)	77,65	80,43	
TPT (%)	7,47	6,15	
IPM	81,70	82,15	
Inflasi (%)	3±1	3±1	
Kemiskinan	4,92	4,77	
Indeks Gini	0,332	0,329	

Sumber: KUA Tahun 2022

Dari tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara moderat pada tahun 2022 mencapai 5,19 dan pada tahun 2023 diproyeksikan akan mencapai 5,41 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan baru yaitu peperangan geopolitik dan cuaca ekstrem kemarau *el nino* yang berimbas pada inflasi & perlambatan ekonomi. Dengan level pertumbuhan ekonomi tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 sebesar 7,47 persen atau mengalami penurunan dari tahun 2021. Diharapkan pada tahun 2023 terjadi recovery ekonomi yang ditopang dengan kelanjutan atas program pemerintah yang dapat menurunkan tingkat resiko inflasi dan perlambatan ekonomi, sehingga angka TPT di proyeksikan mengalami penurunan sampai angka 6,15 persen pada tahun 2023. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2022 tercapai sebesar 81,70 persen dan pada tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi sebesar 82,15. Begitu juga terhadap Tingkat Kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 4,92

diperkirakan menjadi 4,77 pada Tahun 2023 seiring dengan berjalannya recovery ekonomi yang telah mulai berjalan sejak tahun 2021.

Untuk mendukung capaian pemulihan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai:

- a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
- b. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.
- c. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
- e. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan ketrampilan kerja dalam rangka menanggulangi peningkatan PHK.
- f. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
- g. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.
- h. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.
- i. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- j. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif.
- k. Memberikan insentif fiskal kepada pengusaha kecil (UMKM) sebagai bantalan ekonomi dalam menghadapi fluktuasi harga pangan.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

2.2.1.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada data masa lalu, baik pertumbuhan, nilai nominal, kebutuhan masyarakat, potensi penerimaan dan beberapa kondisi yang mempengaruhi. Proyeksi pendapatan daerah didasarkan pada potensi pendapatan daerah, baik PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-

Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, proyeksi belanja daerah memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah serta kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil musrenbang, yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan Kota.

Sesuai dengan arah kebijakan nasional, regional, dan mengacu pada RPJMD 2019–2024, maka perlu dirumuskan arah kebijakan keuangan Kota Madiun. Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terdapat beberapa arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan target pendapatan daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian terkini dan potensi yang ada;
- b. Penguatan kondisi fundamental ekonomi daerah sebagai dampak inflasi dan perlambatan ekonomi membutuhkan berbagai insentif fiskal baik dari sisi pendapatan maupun belanja;
- c. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan d
- d. aerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan tidak menambah beban bagi masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi kontra produktif;
- e. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik;
- f. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan OPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus peningkatan pendapatan;
- g. Optimaliasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi,

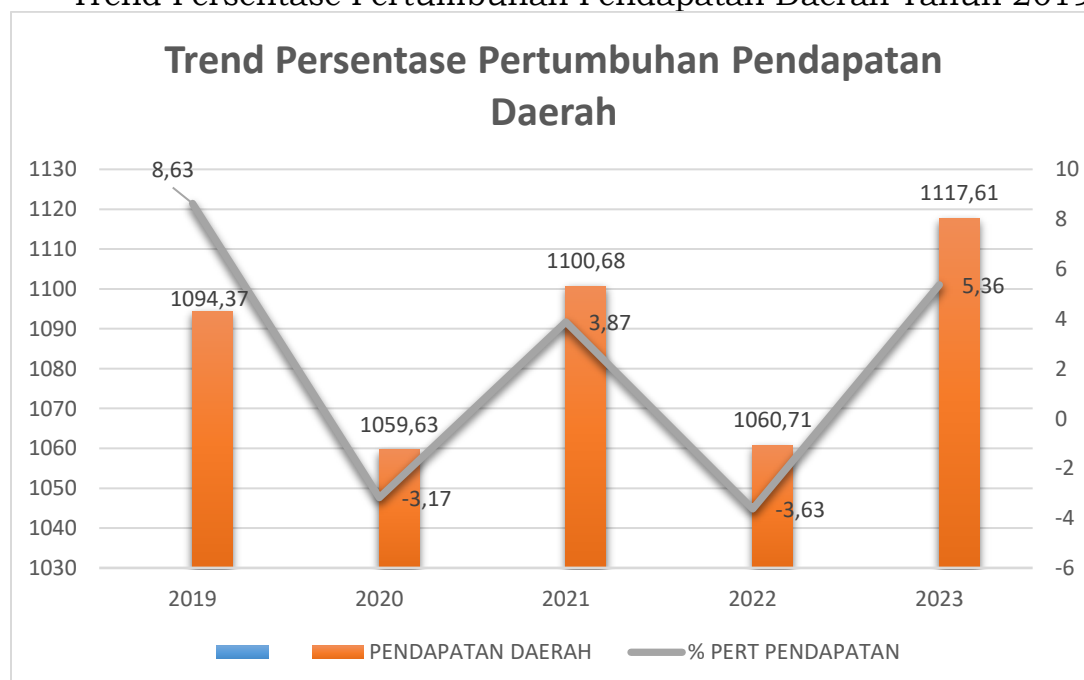
terutama pendapatan transfer yang bersifat reward kepada daerah yang tentu saja dibuktikan dengan capaian keberhasilannya;

- h. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah, terutama dalam hal meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar bisa menghasilkan pendapatan daerah;
- i. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah dengan pendanaan dari pusat maupun provinsi;
- j. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
- k. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

2.2.1.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah.

Grafik 2.2.1.2.1
Trend Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023



Sumber: BKAD Kota Madiun 2023 data diolah

Trend pendapatan daerah terus mengalami pertumbuhan yang fluktuatif mulai terbitnya perubahan regulasi yaitu dengan adanya perubahan kewenangan beberapa bidang urusan, pada Tahun 2019 Tren Pendapatan tumbuh sebesar 8,63%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan turun sebesar minus 3,17%. Pada Tahun 2021 realisasi Pendapatan Daerah sebesar 1.100,67 miliar atau mengalami pertumbuhan sekitar 3,87%. Pada tahun 2022 pendapatan mengalami penurunan menjadi sebesar 1.060,71 atau sebesar minus 3,63, karena adanya pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang disebabkan kompensasi pembiayaan atas pelaksanaan pengendalian pandemi COVID-19 Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh TNI/Polri yang dibiayai APBN. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 1.117,60 atau sebesar 5,36 %.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah secara konsisten berupaya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan tidak hanya melalui penguatan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran, tetapi juga dari sisi penerimaan berupa perluasan local taxing power. Perluasan local taxing power diilhami dari rendahnya penerimaan Pajak dan Retribusi daerah yang diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Selama ini, sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dana transfer dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan adanya hubungan yang sinergi dan harmonis Keuangan Pusat dan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah.

Selain pajak dan retribusi daerah komponen Pendapat Asli Daerah ada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Dengan pengelolaan kekayaan daerah secara optimal maka diharapkan dapat memberikan pendapat bagi daerah yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Untuk Lain-Lain PAD yang komponen utamanya adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan BLUD yang efektif dan efisien diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar pada PAD.

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Madiun selalu berusaha untuk meningkatkan PAD dengan melakukan inovasi maupun terobosan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan batasan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun tersebut tidak memberatkan bagi masyarakat.

Tabel 2.2.1.2.1
Peta Potensi Pajak Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)				
	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET 2024
PAJAK DAERAH	90.291.466.03 3,07	87.874.777.05 9,32	106.165.312.12 2,76	113.514.116.36 9,67	102.506.770.00 0,00
Pajak Hotel	4.372.533.671 ,20	4.651.995.032 ,00	7.026.280.556, 00	8.130.855.159, 00	6.900.000.000, 00
Pajak Restoran	11.403.756.26 6,81	12.191.757.30 0,09	19.278.495.104 ,00	23.343.654.772 ,00	18.000.000.000 ,00
Pajak Hiburan	836.732.808,0 0	416.770.721,0 0	1.638.210.592, 00	1.845.737.251, 00	1.375.000.000, 00
Pajak Reklame	1.928.783.033 ,00	2.079.605.858 ,00	2.114.017.568, 00	2.304.955.619, 00	1.922.220.000, 00
Pajak Penerangan Jalan	20.664.839.57 9,46	20.011.884.36 3,64	22.103.164.301 ,44	23.482.333.529 ,83	21.936.250.000 ,00
Pajak Parkir	808.361.637,0 0	664.001.863,0 0	1.434.441.434, 55	1.683.862.056, 00	1.350.000.000, 00
Pajak Air Tanah	329.465.566,0 0	324.737.466,4 0	292.100.851,30	318.395.998,84	280.000.000,00
BPHTB	27.567.526.53 5,00	24.684.757.50 9,19	27.704.042.227 ,47	28.519.672.350 ,00	26.633.600.000 ,00
Pajak Bumi dan Bangunan	22.379.466.93 6,00	22.849.266.94 6,00	24.574.559.488 ,00	23.884.649.634 ,00	24.109.700.000 ,00

Tabel 2.2.1.2.2
Peta Potensi Retribusi Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)				
	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET 2024
RETRIBUSI DAERAH	15.619.539.7 19,00	17.501.688.1 95,00	21.385.348.8 37,00	22.551.072.5 53,00	18.012.701.0 00,00
Retribusi Jasa Umum	6.004.754.40 9,50	3.456.867.59 7,00	4.255.304.24 0,00	3.795.130.57 8,00	3.718.317.40 0,00
Retribusi Jasa Usaha	8.786.735.90 9,50	13.366.161.5 98,00	16.102.531.5 97,00	17.565.540.6 21,00	13.543.303.6 00,00
Retribusi Perijinan Tertentu	828.049.400, 00	678.659.000, 00	1.027.513.00 0,00	1.190.401.35 4,00	751.080.000, 00

Tabel 2.2.1.2.3
Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

URAIAN	JUMLAH (Rp)				
	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET 2024
HASIL PENGELOAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	15.216.268.562,40	16.199.882.796,95	15.595.752.355,97	14.983.008.032,73	16.029.310.600,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.754.363.181,00	16.199.882.796,95	15.595.752.355,97	14.983.008.032,73	16.029.310.600,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	6.461.905.381,40	0,00	15.595.752.355,97	0,00	0,00

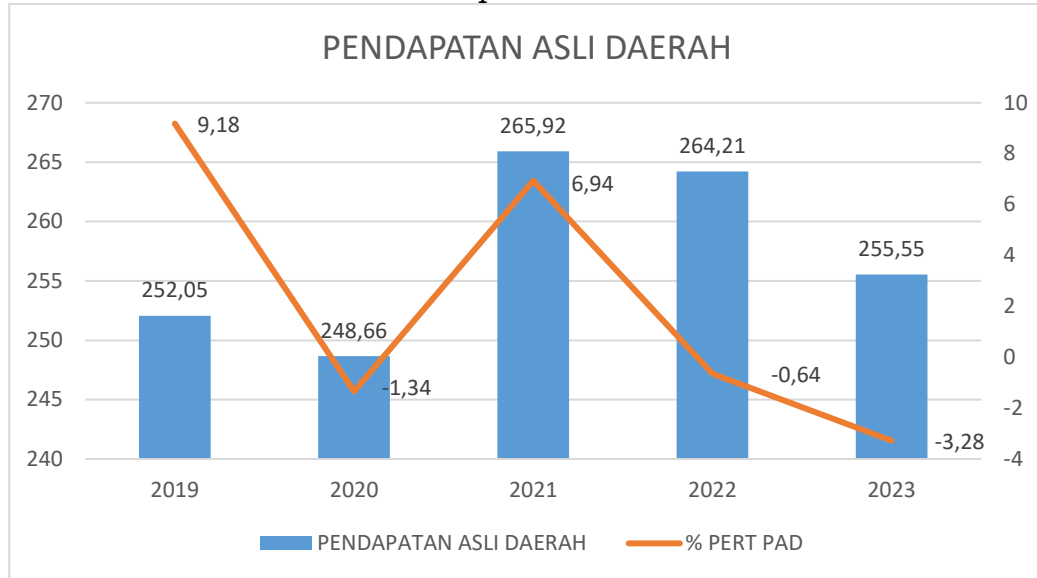
Tabel 2.2.1.2.4
Peta Potensi Lain-Lain PAD Yang Sah

URAIAN	JUMLAH (Rp)				
	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET 2024
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	127.817.130.173,12	144.339.306.884,51	121.065.816.201,82	104.506.296.452,22	117.592.932.800,00
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	37.410.000,00	0,00	512.718.642,00	481.891.662,00	32.000.000,00
Penerimaan Jasa Giro	1.355.620.963,85	84.667.299,92	89.080.155,53	599.729.647,13	80.000.000,00
Pendapatan Bunga Deposito	9.026.027.396,74	9.099.624.602,86	6.961.975.880,18	2.880.498.521,96	4.500.000.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	34.209.856,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan	3.782.676,00	70.676.998,78	56.062.722,01	172.086.543,39	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	159.920.658,00	624.387.027,00	629.196.758,00	142.852.500,00
Pendapatan Dari Pengembalian	00,00	168.330.911,73	2.715.956.140,09	1.187.998.977,67	0,00
Bagi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.315,83	0,00	98.561.827,86	75.333.024,01	0,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan/ Penjualan	21.387.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	1.324.459.344,84	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD	115.885.942.419,43	133.834.775.856,60	110.007.073.807,15	98.357.722.618,06	112.709.790.000,00

Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun kurun waktu enam tahun terakhir sebagai berikut:

Grafik 2.2.1.2.2

Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 – 2023

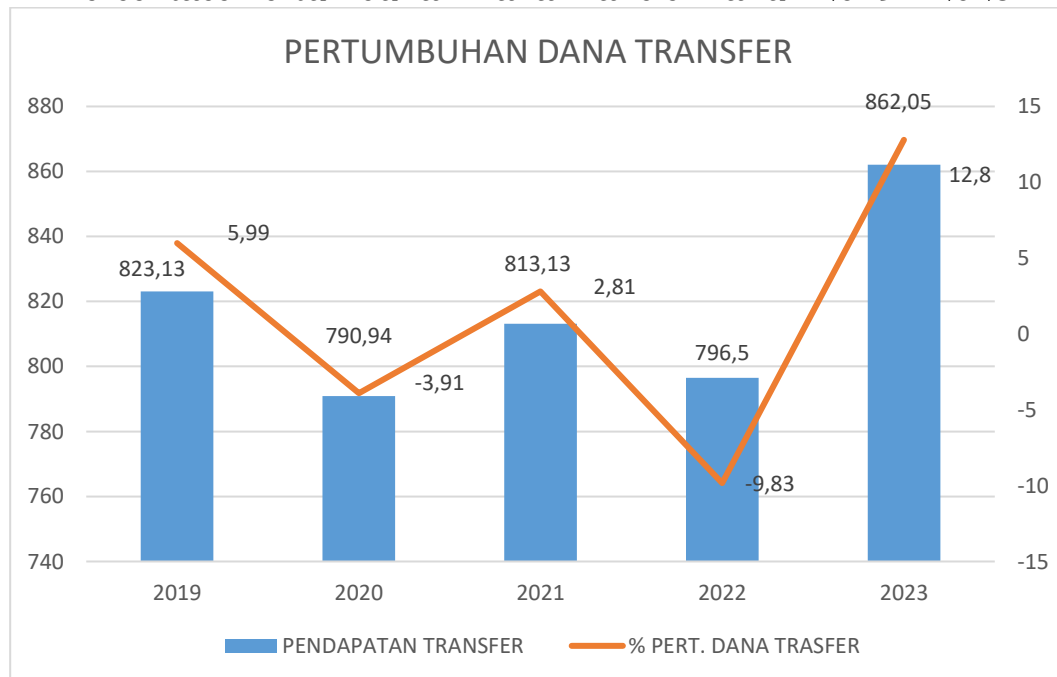


Sumber: BKAD Kota Madiun 2023 data diolah

b. Dana Perimbangan

Dari gambar perkembangan pendapatan dana perimbangan Kota Madiun di bawah ini, terlihat bahwa dana perimbangan masih didominasi oleh dana alokasi umum yang memang salah satunya diperuntukkan gaji pegawai serta pembangunan.

Grafik 2.2.1.2.3
Persentase Pertumbuhan Dana Transfer Tahun 2019 – 2023



Sumber: BKAD Kota Madiun 2023 data diolah

Dana Transfer adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, dana transfer terdiri dari dana transfer pusat dan dana transfer antar daerah. Dana Transfer ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah, yang dialokasikan berupa Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, DBH-CHT, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi.

2.2.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

2.2.2.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Kebijakan untuk Tahun 2021 belanja digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD 2019-2024 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ada di RPJMD. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta inovasi dan peningkatan kinerja daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja (*money follow program*).

Kebijakan belanja daerah di atas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut:

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun.

2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis serta prioritas daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 – 2024.

Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan publik.
- c. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
- d. Menitikberatkan pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Kebijakan belanja dititikberatkan pada prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2021 dan diarahkan pada optimalisasi pencapaian sasaran/target kinerja masing-masing OPD yang tertuang dalam Renstra dan Renja OPD.
- f. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja (*money follow program*) dan disertai pengendalian, evaluasi dan sistem pelaporan yang akuntabel.
- g. Optimalisasi pemanfaatan pendapatan transfer, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- h. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
- i. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.
- j. Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luarbiasa yang bersifat *force mayor*.

Semuanya dianggarkan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3. TARGET KINERJA APBD

Sebagai bentuk dari anggaran berbasis kinerja maka setiap pengeluaran belanja daerah harus memiliki kejelasan hasil dengan ditetapkannya target-

target capaian pada setiap program dan kegiatan dari urusan pemerintah. Secara ringkas target pencapaian kinerja tahun anggaran 2023 pada setiap urusan pemerintahan.

2.3.1. URUSAN WAJIB

Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 23 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Selain itu terbagi juga menjadi dua urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib tidak pelayanan dasar.

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, antara lain:

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, antara lain:

1. Urusan Tenaga Kerja
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pangan
4. Urusan Pertanahan
5. Urusan Lingkungan Hidup
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Urusan Perhubungan
9. Urusan Komunikasi dan Informatika
10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11. Urusan Penanaman Modal
12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
13. Urusan Statistik
14. Urusan Persandian
15. Urusan Kebudayaan
16. Urusan Perpustakaan

17. Urusan Kearsipan

2.3.2. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 6 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. Urusan Kelautan dan Perikanan
- b. Urusan Pariwisata
- c. Urusan Pertanian
- d. Urusan Perdagangan
- e. Urusan Perindustrian
- f. Urusan Transmigrasi

2.3.3 URUSAN PENUNJANG

Urusan penunjang di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 8 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. Unsur Staf (Sekretariat Daerah)
- b. Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- d. Perencanaan
- e. Keuangan
- f. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
- g. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- h. Kecamatan

2.3.4. TARGET KINERJA KEUANGAN OPD

Target kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing OPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

Pengungkapan Perubahan Anggaran:

Selama Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Madiun telah melakukan sekali perubahan penjabaran APBD terkait mandatory spending yang harus dianggarkan. Perubahan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.4.1
Tabel Perubahan Anggaran

Struktur APBD	APBD Murni (Rp)	Perkada No. 16 Tahun 2023 Tanggal 17 April 2023 (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
Pendapatan:	1.071.012.267.175	1.092.446.885.377	1.088.817.109.508
PAD	255.138.115.765	265.644.885.765	261.815.342.908
Dana Transfer	815.874.151.410	826.801.999.612	827.001.766.600
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0	0	0
Belanja	1.263.012.267.175	1.283.690.557.824	1.280.060.781.955
Belanja Pegawai	490.371.338.423	490.393.338.423	468.936.215.253
Belanja Barang dan Jasa	463.979.666.642	488.606.957.526	513.171.846.360
Belanja Modal	244.661.755.441	247.744.683.137	222.872.275.205
Belanja Hibah	15.725.267.295	26.325.267.295	38.190.636.759
Belanja Bansos	26.482.927.100	26.482.927.100	32.772.802.700
Belanja Subsidi	99.146.000	99.146.000	99.146.000
Belanja Tak Terduga	21.692.166.273	4.038.238.343	4.017.860.642
Pembiayaan Neto	192.000.000.000	191.243.672.447	191.243.672.447
SiLPA	0,00	0,00	0,00

Sebelum Penetapan APBD-Perubahan Tahun 2023, Pemerintah Kota Madiun telah melakukan Perubahan Penjabaran APBD sebanyak satu kali, yaitu:

Perkada Nomor 16 Tahun 2023, Tanggal 17 April 2023

Alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah bahwa dengan terbitnya:

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2023,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023

- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/Sj tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2023.

Sehingga harus melakukan perubahan Penjabaran APBD, karena harus melakukan penyesuaian pada pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- a. Kenaikan Target Pendapatan

Berkaitan dengan target pendapatan pada perubahan APBD terjadi kenaikan walaupun relatif kecil, merupakan suatu upaya yang sangat luar biasa. Dimana kenaikan pendapatan secara total adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak, karena di sisi yang lain pendapatan transfer juga mengalami kenaikan.

- b. Kenaikan Anggaran Belanja

Pada sisi anggaran belanja terjadi kenaikan juga selain disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan juga disebabkan adanya optimalisasi belanja yang lebih optimal.

- c. Penurunan Anggaran pembiayaan

Pada pembiayaan daerah terjadi pengurangan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA, karena pada saat penyusunan APBD Tahun 2023 SiLPA yang dipergunakan sebagai acuan adalah SiLPA sebelum audited, setelah di audited maka dilakukan penyesuaian.

BAB III KHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua Hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Pencapaian kinerja keuangan tahun anggaran 2023 dapat tercermin melalui pelaksanaan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

3.1. URUSAN WAJIB

Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 23 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Urusan Pendidikan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pendidikan dari anggaran sebesar Rp305.108.012.078,00 dan terealisasi sebesar Rp283.017.127.138,51. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pendidikan ini sebesar 92.76 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Urusan Wajib Bidang Pendidikan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	184.684.189.527,00	172.195.902.384,81
program pengelolaan pendidikan	114.007.283.435,00	104.946.970.140,50
program pengembangan kurikulum	4.807.339.116,00	4.282.839.413,20
program pendidik dan tenaga kependidikan	1.609.200.000,00	1.591.415.200,00
Total	305.108.012.078,00	283.017.127.138,51

2. Urusan Kesehatan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kesehatan dari anggaran sebesar Rp262.237.846.290,00 dan terealisasi sebesar Rp252.898.531.901,24 Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang Kesehatan ini sebesar 96.44 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Urusan Wajib Bidang Kesehatan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	157.099.246.924,00	152.239.755.421,00
program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100.956.564.930,00	96.697.529.640,24
program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	893.645.000,00	749.215.874,0
program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	91.395.000,00	86.676.500,00
program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	3.196.994.436,00	3.125.354.466,00
Total	262.237.846.290,00	252.898.531.901,24

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari anggaran sebesar Rp132.150.748.174,00 dan terealisasi sebesar Rp127.717.127.540,67 Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini sebesar 96.65 % dari total pagu belanja pada APBD.

Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12.182.802.674,00	11.037.463.120,00
program pengelolaan sumber daya air (sda)	7.157.271.500,00	7.010.488.116,00
program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	16.872.319.750,00	16.367.960.473,67
program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	21.269.000,00	20.095.000,00

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penataan bangunan gedung	46.838.268.400,00	45.720.190.655,00
program penataan bangunan dan lingkungannya	12.877.487.200,00	12.318.273.218,00
program penyelenggaraan jalan	34.139.050.650,00	33.622.922.546,00
program pengembangan jasa konstruksi	986.419.000,00	699.751.992,00
program penyelenggaraan penataan ruang	1.075.860.000,00	919.981.420,00
Total	132.150.748.174,00	127.717.127.540,67

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari anggaran sebesar Rp42.207.303.705,00 dan terealisasi sebesar Rp40.611.823.081,33. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini sebesar 96,22 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.4
Urusan Wajib Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10.285.243.705,00	9.364.651.236,00
program pengembangan perumahan	2.477.810.500,00	2.384.725.563,00
program kawasan permukiman	6.051.801.600,00	5.955.079.435,00
program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	23.392.447.900,00	22.907.366.847,33
Total	42.207.303.705,00	40.611.823.081,33

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dari anggaran sebesar Rp29.271.228.805,00 dan terealisasi sebesar Rp25.256.353.227,57. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang ketentraman dan ketertiban umum ini sebesar 86,28 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.5
Urusan Wajib Bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	17.115.062.494,00	15.091.170.869,57
program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	11.032.938.311,00	9.089.711.388,00
program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.123.228.000,00	1.075.470.970,00
Total	29.271.228.805,00	25.256.353.227,57

6. Urusan Sosial

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Sosial dari anggaran sebesar Rp28.563.359.197,00 dan terealisasi sebesar Rp26.683.738.259,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang sosial ini sebesar 93.42 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.6
Urusan Wajib Bidang Sosial

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8.748.477.718,00	7.978.441.042,00
program pemberdayaan sosial	3.826.778.450,00	3.621.916.059,00
program rehabilitasi sosial	2.981.665.743,00	2.759.004.510,00
program perlindungan dan jaminan sosial	12.167.195.900,00	11.598.123.900,00
program penanganan bencana	656.991.300,00	557.893.500,00
program pengelolaan taman makam pahlawan	182.250.086,00	168.359.248,00
Total	28.563.359.197,00	26.683.738.259,00

7. Urusan Tenaga Kerja

Belanja Urusan Wajib untuk bidang Tenaga Kerja dari anggaran sebesar Rp11.278.758.543,00 dan terealisasi sebesar Rp10.052.122.765,69. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang tenaga kerja ini sebesar 89.12 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.7
Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.836.774.846,00	6.400.101.827,00
program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	2.093.811.800,00	1.845.107.133,00
program penempatan tenaga kerja	170.900.000,00	167.363.350,00
Total	11.278.758.543,00	10.052.122.765,69

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari anggaran sebesar Rp2.057.950.700,00 dan terealisasi sebesar Rp1.984.916.528,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang tenaga kerja ini sebesar 96.45 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.8
Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1.090.047.400,00	1.052.738.714,00
Program perlindungan perempuan	240.370.350,00	238.647.650,00
Program peningkatan kualitas keluarga	271.270.300,00	253.631.300,00
Program pengelolaan system data gender dan anak	108.891.900,00	102.384.500,00
Program pemenuhan hak anak	264.553.110,00	259.447.124,00
Program perlindungan khusus anak	82.817.640,00	78.067.240,00
Total	2.057.950.700,00	1.984.916.528,00

9. Urusan Pangan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pangan dari anggaran sebesar Rp7.451.412.500,00 dan terealisasi sebesar Rp6.471.641.616,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pangan ini sebesar 86.85 % dari total pagu

belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.9
Urusan Wajib Bidang Pangan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.837.267.500,00	5.864.616.791,00
program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	503.271.500,00	499.880.150,00
program penanganan kerawanan pangan	32.480.000,00	32.473.700,00
Total	7.451.412.500,00	6.471.641.616,00

10. Urusan Pertanahan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pangan dari anggaran sebesar Rp314.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp260.951.885,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 82.95 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.10
Urusan Wajib Bidang Pertanahan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program pengelolaan izin lokasi	15.000.000,00	10.347.750,00
program penyelesaian sengketa tanah garapan	36.200.000,00	32.249.185,00
program penatagunaan tanah	263.400.000,00	218.354.950,00
Total	314.600.000,00	260.951.885,00

11. Urusan Lingkungan Hidup

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp26.805.066.066,00 dan terealisasi sebesar Rp25.378.637.614,30. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 94.68 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.11
Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	17.941.018.760,00	17.230.152.988,45

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program perencanaan lingkungan hidup	299.284.000,00	283.494.300,00
program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.110.568.770,00	1.106.894.600,00
program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	76.700.000,00	76.530.000,00
program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	51.985.000,00	45.855.000,00
program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	323.629.200,00	319.872.000,00
program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	672.265.000,00	618.230.100,00
program penanganan pengaduan lingkungan hidup	145.000.000,00	143.579.000,00
program pengelolaan persampahan	6.184.615.336,00	5.554.028.825,85
Total	26.805.066.066,00	25.378.637.614,30

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari anggaran sebesar Rp6.884.144.194,00 dan terealisasi sebesar Rp6.756.225.074,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 98.14 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.12
Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.309.474.457,00	6.186.308.279,00
program pendaftaran penduduk	187.143.864,00	187.002.585,00
program pencatatan sipil	172.282.982,00	169.333.600,00
program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	215.242.891,00	213.580.610,00
Total	6.884.144.194,00	6.756.225.074,00

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari anggaran sebesar Rp5.167.292.100,00 dan terealisasi sebesar Rp4.337.343.723,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 83.94 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.13
Urusan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program pengendalian penduduk	704.621.300,00	701.551.430,00
program pembinaan keluarga berencana (kb)	2.674.264.000,00	2.226.608.033,00
program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	1.788.406.800,00	1.409.184.260,00
Total	5.167.292.100,00	4.337.343.723,00

14. Urusan Perhubungan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perhubungan dari anggaran sebesar Rp18.304.063.966,00 dan terealisasi sebesar Rp17.926.570.593,21. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 97.94 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.14
Urusan Wajib Bidang Perhubungan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10.564.529.014,00	10.337.697.857,21
program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaaj)	7.739.534.952,00	7.588.872.736,00
Total	18.304.063.966,00	17.926.570.593,21

15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Komunikasi dan Informatika dari anggaran sebesar Rp31.043.126.258,00 dan terealisasi sebesar Rp30.485.190.632,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 98.20 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.15
Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.371.300.337,00	6.888.069.588,00
program informasi dan komunikasi publik	4.005.319.361,00	3.976.856.378,00
program pengelolaan aplikasi informatika	19.666.506.560,00	19.620.264.366,00
Total	31.043.126.258,00	30.485.190.632,00

16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari anggaran sebesar Rp843.889.506,00 dan terealisasi sebesar Rp809.654.225,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 95,94 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.16
Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	460.790.000,00	456.964.000,00
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	180.804.100,00	151.363.900,00
Program pengembangan UMKM	202.295.406,00	201.326.325,00
Total	843.889.506,00	809.654.225,00

17. Urusan Penanaman Modal

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Penanaman Modal dari anggaran sebesar Rp7.303.552.247,00 dan terealisasi sebesar Rp6.981.191.473,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 95,59 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.17
Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.500.905.047,00	5.252.974.369,00

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program pengembangan iklim penanaman modal	34.700.000,00	30.371.000,00
program promosi penanaman modal	308.848.200,00	294.344.205,00
program pelayanan penanaman modal	798.175.500,00	780.764.791,00
program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	462.675.000,00	434.873.708,00
program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	198.248.500,00	187.863.400,00
Total	7.303.552.247,00	6.981.191.473,00

18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kepemudaan dan Olah Raga dari anggaran sebesar Rp7.968.389.861,00 dan terealisasi sebesar Rp7.867.451.678,90. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanian ini sebesar 98.73 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.18
Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	475.000.000,00	469.713.928,00
program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	7.493.389.861,00	7.397.737.750,90
Total	7.968.389.861,00	7.867.451.678,90

19. Urusan Statistik

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Statistik dari anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp123.426.700,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanian ini sebesar 98.74 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.19
Urusan Wajib Bidang Statistik

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penyelenggaraan statistik sektoral	125.000.000,00	123.426.700,00
Total	125.000.000,00	123.426.700,00

20. Urusan Persandian

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Persandian dari anggaran sebesar Rp292.872.000,00 dan terealisasi sebesar Rp284.892.875,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 97.28 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.20
Urusan Wajib Bidang Persandian

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	292.872.000,00	284.892.875,00
Total	292.872.000,00	284.892.875,00

21. Urusan Kebudayaan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kebudayaan dari anggaran sebesar Rp8.900.774.689,00 dan terealisasi sebesar Rp8.703.816.884,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 97.78 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.21
Urusan Wajib Bidang Kebudayaan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.908.074.689,00	6.718.551.234,00
program pengembangan kebudayaan	1.892.700.000,00	1.885.539.500,00
program pengembangan kesenian tradisional	50.000.000,00	49.883.250,00
program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	50.000.000,00	49.842.900,00
Total	8.900.774.689,00	8.703.816.884,00

22. Urusan Perpustakaan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perpustakaan dari anggaran sebesar Rp6.241.451.423,00 dan terealisasi sebesar Rp5.778.506.417,40. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 92.58 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.22
Urusan Wajib Bidang Perpustakaan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.097.514.767,00	4.686.876.773,00

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program pembinaan perpustakaan	1.015.899.000,00	988.000.144,40
program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	128.037.656,00	103.629.500,00
Total	6.241.451.423,00	5.778.506.417,40

23. Urusan Kearsipan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kearsipan dari anggaran sebesar Rp868.470.773,00 dan terealisasi sebesar Rp846.863.907,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 97.51 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.1.23
Urusan Wajib Bidang Kearsipan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program pengelolaan arsip	705.708.673,00	688.097.607,00
program perlindungan dan penyelamatan arsip	162.762.100,00	158.766.300,00
Total	868.470.773,00	846.863.907,00

3.2. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 6 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Kelautan dan Perikanan dari anggaran sebesar Rp404.505.000,00 dan terealisasi sebesar Rp401.398.026,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 99.23 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program pengelolaan perikanan budidaya	186.241.000,00	184.615.317,00
program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	34.510.000,00	34.353.600,00
program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	183.754.000,00	182.429.109,00
Total	404.505.000,00	401.398.026,00

2. Urusan Pariwisata

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pariwisata dari anggaran sebesar Rp1.856.446.866,00 dan terealisasi sebesar Rp1.852.993.139,00. Nilai Realisasi

Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 99.81 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	437.660.866,00	436.897.915,00
program pemasaran pariwisata	1.140.786.000,00	1.138.444.624,00
program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	278.000.000,00	277.650.600,00
Total	1.856.446.866,00	1.852.993.139,00

3. Urusan Pertanian

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Pertanian dari anggaran sebesar Rp5.334.742.300,00 dan terealisasi sebesar Rp4.913.122.573,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 92.10 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.2.3
Urusan Pilihan Bidang Pertanian

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.269.957.000,00	2.151.431.701,00
program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	439.684.000,00	419.957.100,00
program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	337.591.000,00	310.429.397,00
program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	167.855.000,00	155.018.250,00
program perizinan usaha pertanian	33.600.000,00	25.025.150,00
program penyuluhan pertanian	2.086.055.300,00	1.851.260.975,00
Total	5.334.742.300,00	4.913.122.573,00

4. Urusan Perdagangan

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perdagangan dari anggaran sebesar Rp16.352.788.030,00 dan terealisasi sebesar Rp15.151.606.033,00 . Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanahan ini sebesar 92.65 % dari total pagu

belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.2.4
Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	10.916.553.086,00	9.832.574.993,00
program perizinan dan pendaftaran perusahaan	267.374.400,00	267.325.700,00
program peningkatan sarana distribusi perdagangan	4.373.887.270,00	4.266.057.440,00
program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	250.257.000,00	249.511.500,00
program standardisasi dan perlindungan konsumen	235.684.724,00	230.943.400,00
program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	309.031.550,00	305.193.000,00
Total	16.352.788.030,00	15.151.606.033,00

5. Urusan Perindustrian

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Perindustrian dari anggaran sebesar Rp2.465.313.388,00 dan terealisasi sebesar Rp658.398.930,00. Nilai Realisasi Anggaran untuk bidang pertanian ini sebesar 49.49 % dari total pagu belanja pada APBD. Belanja tersebut difokuskan pada program – program sebagai berikut:

Tabel 3.2.5
Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program perencanaan dan pengembangan industri	2.090.592.950,00	283.918.745,00
Program pengelolaan system informasi industry nasional	374.720.438,00	374.480.185,00
Total	2.465.313.388,00	658.398.930,00

6. Urusan Transmigrasi

Belajar Urusan Wajib untuk bidang Transmigrasi dari anggaran sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00.

3.3. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

Pencapaian kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing OPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

- (01) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggung jawaban keuangan daerah.
- (02) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (03) Entitas pelaporan keuangan adalah Pemerintah Kota Madiun, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yaitu, Sekretariat Daerah terdiri dari 6 Bagian, Sekretariat DPRD, 6 Badan, 15 Dinas, 3 kecamatan dan Inspektorat.

4.2 BASIS AKUNTANSI

- (01) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual.
- (02) Basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas pada saat uang diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- (03) Basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, dan belanja, pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas. Pengakuan atas pendapatan dan belanja yang didanai dari Dana Badan Layanan Umum Daerah dan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
- (04) Basis akrual yaitu pengakuan transaksi dan kejadian keuangan dalam periode berjalan pada saat hak dan kewajiban timbul meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
- (05) Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.3 BASIS PENGUKURAN

- (01) Kas dan setara kas diukur berdasarkan nilai nominalnya.
- (02) Investasi jangka pendek diukur berdasarkan nilai perolehannya.
- (03) Piutang diukur berdasarkan nilai nominalnya.

- (04) Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tertagih Tak
1	0 - 1 tahun	Lancar	1%
2	1 - 2 tahun	Kurang Lancar	10%
3	Di atas 2 tahun	Macet	100%

- (05) Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehannya apabila diperoleh dengan pembelian, nilai wajar apabila diperoleh dari donasi.
- (06) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenisnya.
- (07) Biaya perolehan persediaan sebesar harga pembelian. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- (08) Investasi jangka panjang diukur berdasarkan nilai perolehannya.
- (09) Penggunaan penilaian investasi jangka panjang didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan;
 - Penilaian investasi Pemerintah Daerah menggunakan metode biaya tidak mempertimbangkan jumlah prosentase kepemilikan sebagaimana dijelaskan pada point a sampai dengan d di atas.
- (10) Aktiva tetap diukur berdasarkan nilai perolehannya, apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (11) Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pengeluaran harus dikapitalisir sebagai aset tetap apabila pengeluaran tersebut

dialokasikan dalam anggaran belanja modal dan nilai minimum sebesar Rp500.000.

- (12) Apabila pengeluaran atas perolehan aset tetap yang dialokasikan dalam anggaran belanja modal dan nilainya dibawah Rp500.000 tidak perlu dicatat dalam neraca tetapi tetap cukup dicatat dalam buku ekstra kompabel.
- (13) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- (14) Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method).
- (15) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- (16) Perkiraan masa manfaat aset tetap dan nilai sisa masing-masing kelompok aset mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tida Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (17) Penambahan masa manfaat akan diterapkan jika OPD terkait mengajukan permohonan untuk diterapkan, jika belum atau tidak baik overhaul atau renovasi hanya akan menambah nilai aset definitif dan tidak menambah masa manfaatnya.
- (18) Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

4.4 PENETAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- (01) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun meliputi:
 - (02) Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan
 - (03) Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
 - (04) Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - (05) Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Neraca
 - (06) Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Laporan Operasional

- (07) Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Laporan Arus Kas
- (08) Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Laporan Perubahan Ekuitas
- (09) Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Catatan atas Laporan Keuangan
- (10) Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Pendapatan
- (11) Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Belanja dan Beban
- (12) Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Aset
- (13) Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Kewajiban
- (14) Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- (15) Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Laporan Keuangan Konsolidasi.

4.5 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

- (01) Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
- (02) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan termasuk yang melaksanakan tata kelola keuangan BLUD sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yaitu Pemerintah Kota Madiun.
- (03) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebanyak 28 perangkat daerah dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. Sekretariat Daerah terdiri dari 6 bagian sebagai entitas pelaporan yaitu : Bagian Umum, Bagian Pemerintahan, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan
 - 2. Sekretariat DPRD;
 - 3. Inspektorat;
 - 4. Dinas Pendidikan;
 - 5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Dinas Perdagangan;
 11. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 15. Dinas Perhubungan;
 16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 17. Dinas Lingkungan Hidup;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 21. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 22. Badan Pendapatan Daerah;
 23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 26. Kecamatan Kartoharjo;
 27. Kecamatan Manguharjo;
 28. Kecamatan Taman.
- (04) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) badan yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Perangkat Daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah UPT pada Dinas Kesehatan dan KB yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Manguharjo, Puskesmas Oro-Oro Ombo, Puskesmas Patihan, Puskesmas Demangan, Puskesmas Banjarejo dan Puskesmas Tawangrejo.
- (05) Laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Kota Madiun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (06) Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

BAB V PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN

5.1. PENDAPATAN

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
PAD	261.815.342.908,00	255.554.493.407,62	97,61	264.212.229.517,55

Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp255.554.493.407,62 atau mencapai 97,61% yang berarti Rp6.260.849.500,38 atau 2,39% lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp261.815.342.908,00. Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp255.554.493.407,62 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp264.212.229.517,55 terjadi penurunan sebesar Rp8.657.736.109,93 atau 3,28%.

Perincian anggaran dan realisasi PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.
Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	104.240.450.000,00	113.514.116.369,67	108,90	106.165.312.122,76
Retribusi Daerah	18.446.515.665,00	22.551.072.553,00	122,25	21.385.348.837,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.160.694.027,00	14.983.008.032,73	92,71	15.595.752.355,97
Lain-lain PAD yang sah	122.967.683.216,00	104.506.296.452,22	84,99	121.065.816.201,82
Total	261.815.342.908,00	255.554.493.407,62	97,61	264.212.229.517,55

5.1.1.1. Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	104.240.450.000,00	113.514.116.369,67	108,90	106.165.312.122,76

Realisasi seluruh pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp 113.514.116.369,67 atau mencapai 108,90% yang berarti sebesar Rp9.273.666.369,67 atau 8,90% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp104.240.450.000,00. Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp113.514.116.369,67 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp106.165.312.122,76 terjadi peningkatan sebesar Rp7.348.804.246,91 atau lebih tinggi 6,92%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.1.
Pajak Daerah

Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.01.06. Pajak Hotel	6.950.000.000,00	8.130.855.159,00	116,99	7.026.280.556,00
4.1.01.07. Pajak Restoran	20.230.000.000,00	23.343.654.772,00	115,39	19.278.495.104,00
4.1.01.08. Pajak Hiburan	1.612.500.000,00	1.845.737.251,00	114,46	1.638.210.592,00
4.1.01.09. Pajak Reklame	2.000.000.000,00	2.304.955.619,00	115,25	2.114.017.568,00
4.1.01.10. Pajak Penerangan Jalan	21.528.250.000,00	23.482.333.529,83	109,08	22.103.164.301,44
4.1.01.11. Pajak Parkir	1.530.000.000,00	1.683.862.056,00	110,06	1.434.441.434,55
4.1.01.12. Pajak Air Tanah	270.000.000,00	318.395.998,84	117,92	292.100.851,30
4.1.01.15. PBB P2	23.944.700.000,00	23.884.649.634,00	99,75	24.574.559.488,00
4.1.01.16. BPHTB	26.175.000.000,00	28.519.672.350,00	108,96	27.704.042.227,47
Jumlah	104.240.450.000,00	113.514.116.369,67	108,90	106.165.312.122,76

Realisasi pajak hotel sebesar Rp8.130.855.159,00 atau mencapai 116,99% yang berarti Rp1.180.855.159,00 atau 16,99% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.950.000.000,00. Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2023 sebesar Rp8.130.855.159,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2022 sebesar Rp7.026.280.556,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp1.104.574.603,00 atau lebih tinggi 15,72%.

Realisasi pajak restoran sebesar Rp23.343.654.772,00 atau mencapai 115,39% yang berarti Rp3.113.654.772,00 atau 15,39% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp20.230.000.000,00. Realisasi pajak restoran tahun anggaran 2023 sebesar Rp23.343.654.772,00 dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2022 sebesar Rp19.278.495.104,00 terjadi peningkatan sebesar Rp4.065.159.668,00 atau lebih 21,09%. Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak restoran dalam melakukan pembayaran pajak restoran dan peningkatan kinerja petugas pungut pajak yang semakin berkualitas, dan telah dilaksanakan penggunaan aplikasi SIMPADAMA sehingga memudahkan Wajib Pajak restoran dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak restoran secara online.

Realisasi pajak hiburan sebesar Rp1.845.737.251,00 atau mencapai 114,46% yang berarti Rp233.237.251,00 atau 14,46% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.612.500.000,00. Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.845.737.251,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hiburan tahun 2022 sebesar Rp1.638.210.592,00 terjadi peningkatan sebesar Rp207.526.659,00 atau lebih tinggi 12,67%. Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi telah dihapuskannya kebijakan PPKM secara menyeluruh sehingga menyebabkan banyaknya kegiatan hiburan

Realisasi pajak reklame sebesar Rp2.304.955.619,00 atau mencapai 115,25% yang berarti sebesar Rp304.955.619,00 atau 15,25% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00. Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.304.955.619,00 dibandingkan dengan realisasi pajak reklame tahun 2022 sebesar Rp2.114.017.568,00 terjadi peningkatan sebesar Rp 190.938.051,00 atau lebih tinggi 9,03%. Pencapaian pajak reklame dipengaruhi oleh penambahan dan keterisian papan reklame dan penyelenggaraan acara di Kota Madiun

Realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp23.482.333.529,83 atau mencapai 109,08% yang berarti Rp1.954.083.529,83 atau 9,08% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp21.528.250.000,00. Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2023 sebesar Rp23.482.333.529,83 dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan tahun 2022 sebesar Rp22.103.164.301,44 terjadi peningkatan sebesar Rp1.379.169.228,39 atau lebih tinggi 6,24%. Pencapaian pajak penerangan jalan sesuai dengan potensi riil.

Realisasi pajak parkir sebesar Rp1.683.862.056,00 atau mencapai 110,06% yang berarti sebesar Rp153.862.056,00 atau 10,06% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.530.000.000,00. Pencapaian pajak Parkir sesuai dengan potensi riil. Realisasi Pajak Parkir tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.683.862.056,00 dibandingkan dengan realisasi pajak parkir tahun 2022 sebesar Rp1.434.441.434,55 terjadi peningkatan sebesar Rp249.420.621,45 atau lebih tinggi 17,39%. Pencapaian pajak Parkir sesuai dengan potensi riil. Realisasi pajak air tanah sebesar Rp318.395.998,84 atau mencapai 117,92% yang berarti sebesar Rp48.395.998,84 atau 17,92% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp270.000.000,00. Realisasi pajak air tanah tahun anggaran 2023 sebesar Rp318.395.998,84 dibandingkan dengan realisasi pajak air tanah tahun 2022 sebesar Rp292.100.851,30 terjadi peningkatan sebesar Rp26.295.147,54 atau lebih tinggi 9,00%. Pencapaian target kinerja pajak air tanah sesuai dengan potensi riil.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 sebesar Rp23.884.649.634,00 atau mencapai 99,75% yang berarti sebesar Rp60.050.366,00 atau 0,25% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp23.944.700.000,00. Realisasi pajak PBB tahun anggaran 2023 sebesar Rp23.884.649.634,00 dibandingkan dengan realisasi pajak PBB tahun 2022 sebesar Rp24.574.559.488,00 terjadi penurunan sebesar Rp689.909.854,00 atau lebih rendah 2,81%. Pencapaian target kinerja PBB P2 dipengaruhi adanya rangsangan berupa reward untuk wajib pajak, dan petugas pungut dan petugas penagih piutang PBB P2 sampai dengan tahun 2023.

Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan sebesar Rp28.519.672.350,00 atau mencapai 108,96% yang berarti sebesar Rp2.344.672.350,00 atau 8,96% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp26.175.000.000,00. Realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2023 sebesar Rp28.519.672.350,00 dibandingkan dengan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp27.704.042.227,47 terjadi peningkatan sebesar Rp815.630.122,53 atau lebih tinggi 2,94%. Pencapaian target kinerja bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipengaruhi adanya kenaikan permohonan pengalihan hak atas tanah dan bangunan baik melalui proses waris, pembagian hak bersama, hibah dan transaksi jual beli. Namun demikian potensi ini sangat tergantung jumlah transaksi jual beli tanah dan atau bangunan yang terjadi di masyarakat. Semakin banyak transaksi yang terjadi semakin besar potensi pendapatan yang diperoleh dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

5.1.1.2. Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Retribusi Daerah	18.446.515.665,00	22.551.072.553,00	122,25	21.385.348.837,00

Realisasi retribusi daerah adalah sebesar Rp22.551.072.553,00 atau mencapai 122,25% yang berarti sebesar Rp4.104.556.888,00 atau 22,25% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD 2023 sebesar Rp 18.446.515.665,00. Realisasi retribusi daerah anggaran 2023 sebesar Rp22.551.072.553,00 dibandingkan realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp21.385.348.837,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.165.723.716,00 atau lebih tinggi 5,45%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 obyek pendapatan retribusi tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.2.
Retribusi Daerah

Retribusi Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.01. Jasa Umum	3.684.675.940,00	3.797.537.578,00	103,06	4.255.304.240,00
4.1.02.02. Jasa Usaha	14.010.759.725,00	17.563.133.621,00	125,35	16.102.531.597,00
4.1.02.03. Perizinan tertentu	751.080.000,00	1.190.401.354,00	158,49	1.027.513.000,00
Jumlah	18.446.515.665,00	22.551.072.553,00	122,25	21.385.348.837,00

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji dibawah ini.

Tabel 5.1.1.2.a.
Retribusi Jasa Umum

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5

4.1.02.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)	155.000.000,00	171.940.000,00	110,93	167.605.500,00
4.1.02.01.04. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dinas Perhubungan)	2.898.595.940,00	2.986.960.408,00	103,05	3.234.432.000,00
4.1.02.01.05. Retribusi Pelayanan Pasar/Kios (Dinas Perhubungan)	0,00	0,00	0,00	148.337.000,00
4.1.02.01.06. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	410.020.000,00	364.421.204,00	88,88	427.874.709,00
4.1.02.01.11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Dinas Perdagangan)	61.060.000,00	71.884.000,00	117,73	64.240.500,00
4.1.02.01.13. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Komunikasi dan Informatika)	160.000.000,00	202.331.966,00	126,46	212.814.531,00
Jumlah	3.684.675.940,00	3.797.537.578,00	103,06	4.255.304.240,00

1. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp171.940.000,00 atau mencapai 110,93% yang berarti sebesar Rp16.940.000,00 atau 10,93% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp155.000.000,00. Realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun anggaran 2023 sebesar Rp171.940.000,00 dibandingkan dengan realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2022 sebesar Rp167.605.500,00 terjadi peningkatan sebesar Rp4.334.500,00 atau lebih tinggi 2,59%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai dengan potensi riil.
2. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp2.986.960.408,00 atau mencapai 103,05% yang berarti Rp88.364.468,00 atau 3,05% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar

Rp2.898.595.940,00. Pencapaian target kinerja retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.986.960.408,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2022 sebesar Rp3.234.432.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp247.471.592,00 atau lebih rendah 7,65%. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipengaruhi kenaikan jumlah kunjungan ke pusat perdagangan dan wisata di kota Madiun karena terbangunnya cluster ikonik di beberapa wilayah Kota Madiun seperti Malioboro Jalan Pahlawan dan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat sehingga menyebabkan kenaikan di segala bidang aktivitas utamanya perdagangan dan wisata di Kota Madiun.

3. Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp364.421.204,00 atau mencapai 88,88% yang berarti Rp45.598.796,00 atau 11,12% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp410.020.000,00. Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun anggaran 2023 sebesar Rp364.421.204,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2022 sebesar Rp427.874.709,00 terjadi penurunan sebesar Rp63.453.505,00 atau lebih rendah 14,83%. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah kendaraan bermotor yang harus di uji.
4. Realisasi retribusi ulang tera dikelola Dinas Perdagangan sebesar Rp71.884.000,00 atau mencapai 117,73% yang berarti sebesar Rp10.824.000,00 atau 17,73% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp61.060.000,00. Realisasi retribusi ulang tera 2023 sebesar Rp71.884.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp64.240.500,00 terjadi peningkatan sebesar Rp7.643.500,00 atau lebih tinggi 11,90%. Hal ini sesuai dengan potensi riil.
5. Realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp202.331.966,00 atau mencapai 126,46% yang berarti sebesar Rp42.331.966,00 atau 26,46% lebih tinggi dibandingkan dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp160.000.000,00. Realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi anggaran 2023 sebesar Rp202.331.966,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2022 sebesar Rp212.814.531,00 terjadi penurunan sebesar Rp10.482.565,00 atau lebih rendah 4,93%. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah inspeksi ke manara telekomunikasi di Kota Madiun.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji dibawah ini:

Tabel 5.1.1.2.b.
Retribusi Jasa Usaha

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.420.305.425,00	8.564.678.574,00	115,42	9.075.075.225,00
4.1.02.02.02. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	4.970.924.300,00	7.456.013.647,00	149,99	5.100.253.966,00
4.1.02.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir	627.120.000,00	781.654.000,00	124,64	1.012.902.200,00
4.1.02.02.07. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	32.410.000,00	23.079.000,00	71,21	26.414.000,00
4.1.02.02.09. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	960.000.000,00	737.708.400,00	76,84	887.886.206,00
Jumlah	14.010.759.725,00	17.563.133.621,00	125,35	16.102.531.597,00

6. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh beberapa OPD tersaji pada tabel berikut dari :

Tabel 5.1.1.2.b1.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

4.1.02.02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.02.01. Dinas PU	5.000.000,00	5.025.000,00	100,50	10.035.000,00
4.1.02.02.01. Dinas Budparpora	250.000.000,00	368.756.000,00	147,50	250.345.000,00
4.1.02.02.01. BKPSDM	100.000.000,00	136.775.000,00	136,78	174.630.000,00
4.1.02.02.01. BKAD	3.728.033.425,00	3.602.802.949,00	96,64	5.649.840.610,00
4.1.02.02.01. Kec,Kartoharjo	1.070.205.000,00	1.337.932.175,00	125,02	1.242.923.340,00

4.1.02.02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.02.01. Kec,Manguharjo	1.015.000.000,00	1.443.472.670,00	142,21	670.502.965,00
4.1.02.02.01. Kec,Taman	1.121.000.000,00	1.478.462.780,00	131,89	932.114.310,00
4.1.02.02.01. Dinas Pertanian	29.067.000,00	29.067.000,00	100,00	20.279.000,00
4.1.02.02.01. Dinas Perkim	102.000.000,00	162.385.000,00	159,20	124.405.000,00
Jumlah	7.420.305.425,00	8.564.678.574,00	115,42	9.075.075.225,00

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp5.025.000,00 atau mencapai 100,50% yang berarti sebesar Rp25.000.,00 atau 0,50% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.025.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp10.035.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.010.000,00 atau 49,93%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

b. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kebudayaan dan Olah Raga (Budparpora)

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp368.756.000,00 atau mencapai 147,50% yang berarti sebesar Rp118.756.000,00 atau 47,50% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp250.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp368.756.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp250.345.000,00 peningkatan sebesar Rp118.411.000,00 atau 47,30%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp136.775.000,00 atau mencapai 136,78% yang berarti sebesar Rp36.775.000,00 atau 36,78% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp136.775.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp174.630.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp37.855.000,00 atau lebih rendah 21,68%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

d. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp3.602.802.949,00 atau mencapai 96.64% yang berarti sebesar Rp125.230.476,00 atau 3.36% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.728.033.425,00. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.302.802.949,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp5.649.840.610,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.047.037.661,00 atau lebih rendah 36,23%. Hal ini dipengaruhi kerjasama pemanfaatan sewa dengan PT SRITANAYA berupa KSP Pengelolaan Plaza Lawu pembayaran kontribusi tetap dari tahun 2023-2024 senilai Rp1.312.500.000 akan dibayarkan secara mengangsur sesuai dengan Surat permohonan Audensi kepada Wali Kota Madiun tanggal 20 Desember 2023 nomor 006/ADM-LEAS/HO/STM-PL/XII/2023 .

e. Kecamatan Kartoharjo

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Kartoharjo sebesar Rp1.337.932.175,00 atau mencapai 125,02% yang berarti sebesar Rp267.727.175,00 atau lebih tinggi 25,02% dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.070.205.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dikelola oleh Kecamatan Kartoharjo terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp40.600.000,00 berupa sewa gedung kecamatan dan realisasi sebesar Rp1.297.322.175,00 berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.337.932.175,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp1.242.923.340,00 terjadi peningkatan sebesar Rp95.008.835,00 atau lebih tinggi 7.64%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

f. Kecamatan Manguharjo

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Manguharjo sebesar Rp1.443.472.670,00 atau mencapai 142.21% yang berarti sebesar Rp428.472.670,00 atau 42.21% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.015.000.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dikelola oleh Kecamatan Manguharjo terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp21.000.000,00 adalah berupa sewa gedung kecamatan dan Realisasi sebesar Rp1.422.472.670,00 adalah berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.443.472.670,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp670.502.965,00 terjadi peningkatan sebesar Rp772.969.705,00 atau lebih tinggi 115.28%. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

g. Kecamatan Taman

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Taman sebesar Rp1.478.462.780,00 atau mencapai 131.89% yang berarti sebesar Rp357.462.780,00 atau 31,89% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.121.000.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dikelola oleh Kecamatan Taman terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp56.400.000,00 adalah berupa sewa gedung kecamatan dan realisasi sebesar Rp1.422.062.780,00 berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.478.462.780,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp932.114.310,00 terjadi peningkatan sebesar Rp546.348.470,00 atau lebih tinggi 58.61 %. Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

h. Dinas Pertanian

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Pertanian sebesar Rp29.067.000,00 atau mencapai 100.% yang berarti sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.067.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.067.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp20.279.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp8.788.000,00 atau lebih tinggi 43.34 % Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

i. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Perkim sebesar Rp162.385.000,00 atau mencapai 159.20% yang berarti sebesar Rp60.385.000,00 atau 59.20% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp102.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp162.385.000,00 Dinas Perkim ini merupakan sewa rusunawa dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp124.405.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp37.980.000,00 atau lebih tinggi 30.53 % Pencapaian target kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan potensi riil.

7. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir meliputi lahan parkir Sumber Umis atas, parkir jalan jawa , parkir terminal dan parkir eks Terminal Barang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp781.654.000,00 atau mencapai 124.64% yang berarti sebesar Rp54.534.000,00 atau 24.64 % lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp627.120.000,00. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun anggaran 2023 sebesar Rp781.654.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2022 sebesar Rp1.012.902.200,00 terjadi penurunan sebesar Rp231.248.200,00 atau lebih rendah 22.83%. Pencapaian target kinerja Retribusi Tempat Khusus Parkir sesuai dengan potensi riil.
8. Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/pertokoan dikelola Dinas Perdagangan sebesar Rp7.456.013.647,00 atau mencapai 149.99% yang berarti sebesar Rp2.485.089.347,00 atau 49.99% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.970.924.300,00. Realisasi retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan dinas perdagangan tahun 2023 sebesar Rp7.456.013.647,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan dinas perdagangan tahun 2022 sebesar Rp5.100.253.966,00 terjadi peningkatan sebesar Rp2.355.759.681,00 atau lebih tinggi 46.19% Pencapaian target kinerja Retribusi Pasar Grosir dan/pertokoan sesuai dengan potensi riil.

9. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp23.079.000,00 atau mencapai 71.21% yang berarti Rp9.331.000,00 atau 28.79% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp32.410.000,00. Realisasi retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2023 sebesar Rp23.079.000,00 dibandingkan dengan Realisasi retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2022 sebesar Rp26.414.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp3.335.000,00 atau 12.63%. Pencapaian target kinerja Retribusi Rumah Potong Hewan sesuai dengan potensi riil.
10. Perincian anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dikelola oleh beberapa OPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji dibawah ini:

Tabel 5.1.1.2.b2.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.02.09. Dinas Perkim	10.000.000,00	12.500.000,00	125,00	34.000.000,00
4.1.02.02.09. Dinas Budparpora	950.000.000,00	725.208.400,00	76,34	853.886.206,00
Jumlah	960.000.000,00	737.708.400,00	76,84	887.886.206,00

1. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp 12.500.000,00 atau mencapai 125.00% yang berarti sebesar Rp2.500.000,00 atau 25.00% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000,00. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2023 sebesar Rp12.500.000,00 yang merupakan sewa alon alon dibandingkan dengan retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2022 sebesar Rp34.000.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp21.500.000,00 atau lebih rendah 63.24%.

2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kebudayaan dan Olah Raga (Budparpora).

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp725.208.400,00 atau mencapai 76.34% yang berarti sebesar Rp224.791.600,00 atau 23.66% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp950.000.000,00. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2023 sebesar Rp725.208.400,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 sebesar Rp853.886.206,00 terjadi penurunan sebesar Rp128.677.806,00 atau lebih rendah 15.07%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji dibawah ini.

Tabel 5.1.1.2.c
Retribusi Perizinan Tertentu

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	750.000.000,00	1.189.201.354,00	158,56	1.026.433.000,00
4.1.02.03.03. Retribusi Izin Trayek (Dinas Perhubungan)	1.080.000,00	1.200.000,00	111,11	1.080.000,00
Jumlah	751.080.000,00	1.190.401.354,00	158,49	1.027.513.000,00

1. Realisasi Retribusi IMB dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.189.201.354,00 atau mencapai 158.56% yang berarti sebesar Rp439.201.354,00 atau 58,56% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi retribusi IMB tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.189.201.354,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi IMB tahun 2022 sebesar Rp1.026.433.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp162.768.354,00 atau lebih tinggi 15.86%. Pencapaian target kinerja Retribusi IMB sesuai dengan potensi riil.
2. Realisasi izin trayek dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp1.200.000,00 atau mencapai 111.11% yang berarti sebesar Rp120.000,00 atau 11,11% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.080.000,00. Realisasi izin trayek tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.200.000,00 dibandingkan dengan realisasi izin trayek tahun 2022 sebesar Rp1.080.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp120.000,00 atau lebih tinggi 11.11%. Pencapaian target kinerja izin trayek sesuai dengan potensi riil.

5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.160.694.027,00	14.983.008.032,73	92,71	15.595.752.355,97

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp14.983.008.032,73 atau 92,71% yang berarti sebesar Rp1.177.685.994,27 atau 7,29% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp16.160.694.027,00. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp14.983.008.032,73 apabila dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp15.595.752.355,97 terjadi penurunan sebesar Rp612.744.323,24 atau lebih rendah 3,93%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.3.01.01 Perumda Air Minum	7.285.623.200,00	7.285.623.205,30	100,00	6.878.627.376,00
4.1.3.01.02 Perumda BPR Bank Daerah	579.904.398,00	579.904.398,00	100,00	930.412.525,00
4.1.3.01.03 Perumda Aneka Usaha	1.177.685.900,00	0,00	100,00	800.615.164,00
4.1.3.02.01 Bank Jatim	7.117.480.529,00	7.117.480.429,43	100,00	6.986.097.290,97
Total	16.160.694.027,00	14.983.008.032,73	92,71	15.595.752.355,97

1. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum sebesar Rp7.285.623.205,30 atau mencapai 100% yang berarti sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.285.623.200,00.

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2023 dari Perumda Air Minum dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Audited Laporan Keuangan Perumda Air Minum Per 31 Desember 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum anggaran 2023 sebesar Rp7.285.623.205,30 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Air Minum tahun 2022 sebesar Rp6.878.627.376,00 terjadi peningkatan sebesar Rp406.995.829,30 atau lebih tinggi 5,92%.

2. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah sebesar Rp579.904.398,00 atau mencapai 100% yang berarti sama dengan dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp579.904.398,00. Penetapan target anggaran tahun anggaran 2023 dari Perumda BPR Bank Daerah dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Bank Pasar per 31 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 579.904.398,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah tahun 2022 sebesar Rp930.412.525,00 terjadi penurunan sebesar Rp350.508.127,00 atau lebih rendah 37,67 %.
3. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha sebesar Rp 0,00 meskipun telah dianggarkan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.177.685.900,00. berdasarkan Surat Nomor 900/4594/401.202/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang setoran laba Perumda Aneka Usaha Tahun 2022, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perumda Aneka Usaha Kota Madiun Pasal 122 yang berbunyi *“Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”*

Berdasarkan pasal ini, Perumda Aneka Usaha untuk Surat Penetapan target anggaran Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Aneka Usaha per 31 Desember 2023 tidak perlu menyetorkan ke kas daerah sampai seluruh kerugian tertutup. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp800.615.164,00 terjadi penurunan sebesar Rp800.615.164,00 atau sama 0,00%.

4. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.117.480.429,43 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.117.480.529,00. Realisasi ini berdasarkan Surat dari Direksi Bank Jatim Pusat Surabaya No.2 Tahun Buku 2022 yang memuat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2022 tanggal 12 april 2023 oleh Notaris. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.117.480.429,43 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun 2022 sebesar Rp6.986.097.290,97 terjadi peningkatan sebesar Rp131.383.138,46 atau lebih tinggi 1,88 %.

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Lain-lain PAD yang sah	122.967.683.216,00	104.506.296.452,22	84,99	121.065.816.201,82

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp104.506.296.452,22 atau 84,99% yang berarti sebesar Rp18.461.386.763,78 atau 15,01% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp122.967.683.216,00. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp104.506.296.452,22 dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp121.065.816.201,82 terjadi penurunan sebesar Rp16.559.519.749,60 atau lebih rendah 13,68%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per obyek pendapatan tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.1.4.
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
a. 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	449.118.662,00	0,00	481.163.642,00
b. 4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainya	32.000.000,00	32.773.000,00	102,42	31.555.000,00
c. 4.1.04.05 Jasa giro	1.800.000.000,00	599.729.647,13	33,32	89.080.155,53
d 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.316,00	75.333.024,01	59,65	98.561.827,86
e. 4.1.04.07 Pendapatan Bunga Deposito	7.600.000.000,00	2.880.498.521,96	37,90	6.961.975.880,18
f. 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	172.086.543,39	0,00	56.062.722,01
g. 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	629.196.758,00	0,00	624.387.027,00
h. 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	28.122.900,00	121.838.700,00	433,24	0,00
i. 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.187.998.977,67	0,00	2.715.956.140,09
j. 4.1.04.16 Pendapatan BLUD	113.379.270.000,00	98.357.722.618,06	86,75	110.007.073.807,15
k. 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Lengkap Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Jumlah	122.967.683.216,00	104.506.296.452,22	84,99	121.065.816.201,82

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.4.a
Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah	113.379.270.000,00	98.357.722.618,06	86,75	110.007.073.807,15
a. 4.1.04.16 Pendapatan BLUD	113.379.270.000,00	98.357.722.618,06	86,75	110.007.073.807,15
2. BAPENDA	0,00	629.196.758,00	0,00	624.387.027,00
a. 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	629.196.758,00	0,00	624.387.027,00
3. BKAD	9.528.290.316,00	5.364.765.376,16	56,30	10.402.800.292,67
a. 4.1.04.01 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	449.118.662,00	0,00	481.163.642,00
b. 4.1.04.05 Jasa giro	1.800.000.000,00	599.729.647,13	33,32	89.080.155,53
c. 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	128.290.316,00	75.333.024,01	58,72	98.561.827,86
d. 4.1.04.07 Pendapatan Bunga Deposito	7.600.000.000,00	2.880.498.521,96	37,90	6.961.975.880,18
e. 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterb Pelak Pekerjaan	0,00	172.086.543,39	0,00	56.062.722,01
f. 4.1.04.16 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.187.998.977,67	0,00	2.715.956.140,09
g. 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Lengkap Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
4. Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian	32.000.000,00	32.773.000,00	102,42	31.555.000,00
a. 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	32.000.000,00	32.773.000,00	102,42	31.555.000,00
5. Dinas Perhubungan	28.122.900,00	121.462.500,00	431,90	0,00
4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	28.122.900,00	121.462.500,00	342,41	0,00
5. Dinas Perkim	0,00	376.200,00	0,00	0,00
4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	376.200,00	0,00	0,00
Jumlah	122.967.683.216,00	104.506.296.452,22	84,99	121.065.816.201,82

1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

a. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD.

Realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp98.357.722.618,06 atau mencapai 86,75% yang berarti Rp15.021.547.381,94 atau 13,25% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp113.379.270.000,00. Realisasi pendapatan BLUD tahun anggaran 2023 sebesar Rp98.357.722.618,06 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD tahun anggaran 2022 sebesar Rp110.007.073.807,15 terdapat penurunan sebesar Rp11.649.351.189,09 atau lebih rendah sebesar 10,59%. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per Puskesmas tersaji dibawah ini:

Tabel 5.1.1.4.a1
Pendapatan lain-lain PAD yang sah BLUD

4.1.04 Lain-Lain PAD yang	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Manguharjo	2.081.950.000,00	2.193.860.448,96	105,38	1.828.303.600,68

4.1.04 Lain-Lain PAD yang	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngegong	1.269.900.000,00	1.506.072.254,61	118,60	1.186.923.268,72
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Demangan	1.825.000.000,00	2.039.884.785,95	111,77	1.639.047.938,73
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Banjarejo	2.035.000.000,00	2.133.823.584,81	104,86	1.869.611.800,87
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Sukosari	1.554.000.000,00	1.694.651.514,35	109,05	1.525.339.767,08
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Tawangrejo	1.613.420.000,00	1.784.716.368,93	110,62	1.412.594.925,57
4.1.04.16 Pendapatan BLUD RSUD	103.000.000.000,00	87.004.713.660,45	84,47	100.545.252.505,50
Jumlah	113.379.270.000,00	98.357.722.618,06	86,75	110.007.073.807,15

- 1) Realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Manguharjo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.193.860.448,96 atau mencapai 105.38% yang berarti sebesar Rp111.910.448,96 atau 5.38% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.081.950.000,00. Realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Manguharjo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.193.860.448,96 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Manguharjo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.828.303.600,68 terdapat peningkatan sebesar Rp365.556.848,28 atau lebih tinggi 19.99%.
- 2) Realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Ngegong Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.506.072.254,61 atau mencapai 118.60% yang berarti sebesar Rp236.172.254,61 atau 18.60% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.269.900.000,00. Realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Ngegong Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.506.072.254,61 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Ngegong Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.186.923.268,72 terdapat peningkatan sebesar Rp319.148.985,89 atau lebih rendah 26.89%.

- 3) Realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Demangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.039.884.785,95 atau mencapai 111.77% yang berarti sebesar Rp214.884.785,95 atau 11.77% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.825.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Demangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.039.884.785,95 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Demangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.639.047.938,73 terdapat peningkatan sebesar Rp400.836.847,22 atau lebih tinggi 24.46%.
- 4) Realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Banjarejo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.133.823.584,81 atau mencapai 104.86% yang berarti Rp98.823.584,81 atau 4.86% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.035.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Banjarejo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.133.823.584,81 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Banjarejo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.869.611.800,87 terdapat peningkatan sebesar Rp264.211.783,94 atau lebih tinggi 14.13%.
- 5) Realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Sukosari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.694.651.514,35 atau mencapai 109.05% yang berarti sebesar Rp140.651.514,35 atau 9.05% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.554.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Sukosari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.694.651.514,35 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Sukosari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.525.339.767,08 terdapat peningkatan sebesar Rp169.311.747,27 atau lebih tinggi 11.10%.
- 6) Realisasi pendapatan BLUD Puskemas Tawangrejo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.784.716.368,93 atau mencapai 110.62% yang berarti sebesar Rp171.296.368,93 atau 10.62% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.613.420.000,00. Realisasi pendapatan BLUD Puskemas Tawangrejo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.784.716.368,93 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD Puskesmas Tawangrejo Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.412.594.925,57 terdapat peningkatan sebesar Rp372.121.443,36 atau lebih tinggi 26.34%.

7) Realisasi pendapatan BLUD RSUD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp87.004.713.660,45 atau mencapai 84,47% yang berarti sebesar Rp15.995.286.339,55 atau 15.53% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp103.000.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD RSUD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 87.004.713.660,45 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD RSUD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.545.252.505,50 terdapat penurunan sebesar Rp13.540.538.845,05 atau lebih rendah 13.47%.

2. Badan Pendapatan Daerah.

a. Pendapatan Denda Pajak Daerah.

Realisasi pendapatan denda pajak daerah berupa denda Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan BPHTB sebesar Rp629.196.758,00. Pendapatan denda pajak daerah tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 karena realisasi denda pajak daerah berupa denda Pajak Resto, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan BPHTB tidak dapat diprediksi perolehannya.

3. BKAD.

a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

Realisasi Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp449.118.662,00 ini meliputi realisasi atas penjualan alat angkutan sebesar Rp448.409.662,00 dan realisasi atas penjualan alat kantor sebesar Rp709.000,00. Realisasi penjualan peralatan dan Mesin tahun anggaran 2023 sebesar Rp449.118.662,00 tidak ditargetkan dalam APBD dibandingkan dengan realisasi pendapatan penjualan peralatan dan Mesin tahun anggaran 2022 sebesar Rp481.163.642,00 terdapat penurunan sebesar Rp39.044.980,00 atau lebih rendah 6.66%. karena realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin tidak dapat diprediksi perolehannya.

b. Pendapatan Jasa Giro.

Realisasi pendapatan jasa giro sebesar Rp599.729.647,13 atau mencapai 33,32% yang berarti sebesar Rp1.200.270.352,87 atau 66.68% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.800.000.000,00. Realisasi pendapatan jasa giro anggaran 2023 sebesar Rp599.729.647,13 dibandingkan dengan realisasi pendapatan jasa giro tahun anggaran 2022 sebesar Rp89.080.155,53 terdapat penurunan sebesar Rp 510.649.491,60 atau lebih tinggi 573,25%.

- c. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan dari LKK. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK sebesar Rp75.333.024,01 atau mencapai 58,72% yang berarti sebesar Rp52.957.291,99 atau 41,28% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp128.290.316,00. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2023 sebesar Rp75.333.024,01 dibandingkan dengan realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2022 sebesar Rp98.561.827,86 terdapat penurunan sebesar Rp23.228.803,85 atau lebih rendah 23,57%.
- d. Pendapatan Bunga Deposito. Realisasi pendapatan bunga deposito sebesar Rp2.880.498.521,96 atau 37,90% yang berarti sebesar Rp4.719.501.478,04 atau 62,10% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.600.000.000,00. Realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.880.498.521,96 dibandingkan dengan realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.961.975.880,18 terdapat penurunan sebesar Rp4.081.477.358,22 atau lebih rendah 58,63%. Turunnya pendapatan bunga deposito karena berkurangnya dana yang di depositokan.
- e. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan. Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp172.086.543,39. Pendapatan ini tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2023.
- f. Pendapatan dari Pengembalian Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.187.998.977,67 pendapatan ini tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2023. Pendapatan dari pengembalian antara lain pengembalian belanja tahun lalu baik hasil temuan BPK maupun Inspektorat.

Realisasi pendapatan dari pengembalian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.187.998.977,67, Pendapatan ini tidak di anggarakan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2023.

4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Pendapatan hasil penjualan Aset Tetap Lainnya berupa penjualan Biota Perairan.

Realisasi pendapatan penjualan Aset Tetap Lainnya berupa penjualan Biota Perairan sebesar Rp32.773.000,00 atau mencapai 102.42% yang berarti sebesar Rp773.000,00 atau 2.42% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp32.000.000,00. Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2023 sebesar Rp32.773.000,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2022 sebesar Rp31.555.000,00 terdapat peningkatan sebesar Rp1.218.000,00 atau lebih tinggi 3.86%.

5. Dinas Perhubungan

a. Pendapatan Denda Retribusi

Realisasi pendapatan denda Retribusi daerah berupa denda Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp121.462.500,00. Pendapatan denda Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pendapatan dari perpanjangan sewa parkir dan sewa kios Pemakaian Kekayaan daerah tidak dapat diprediksi perolehannya.

6. Dinas Perumahan dan Pemukiman

a. Pendapatan Denda Retribusi

Realisasi pendapatan denda Retribusi daerah berupa denda Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp376.200,00 Pendapatan denda Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pendapatan denda dari sewa rusunawa. Pemakaian Kekayaan daerah tidak dapat diprediksi perolehannya.

5.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

5.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	667.418.485.000,00	666.070.630.012,80	99,80	668.609.902.487,00

Penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp666.070.630.012,80 mencapai 99.80% yang berarti sebesar Rp1.347.854.987,20 atau 0.20% lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp667.418.485.000,00. Realisasi transfer pemerintah pusat dana perimbangan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 666.070.630.012,80 dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah pusat dana perimbangan tahun anggaran 2022 sebesar Rp668.609.902.487,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.539.272.474,20 atau lebih rendah 0.38%. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum yang di salurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dana pembangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagi Hasil Pajak	24.092.136.000,00	24.092.136.000,00	100	29.804.646.600,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	32.071.352.000,00	36.475.210.342,00	113,73	82.308.678.000,00
Dana Alokasi Umum	487.288.274.000,00	487.141.770.396,00	99,97	463.486.748.121,00
Dana Alokasi Khusus	94.358.814.000,00	82.402.483.839,80	87,33	71.207.048.405,00
Dana Bagi Hasil Cukai	29.607.909.000,00	35.959.029.435,00	121,45	21.802.781.361,00
Jumlah	667.418.485.000,00	666.070.630.012,80	99,80	668.609.902.487,00

5.1.2.1.1. Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	3
4.2.01.01.01 Dana Bagi Hasil	24.092.136.000,00	24.092.136.000,00	100	29.804.646.600,00

Realisasi bagi hasil pajak sebesar Rp24.092.136.000,00 atau mencapai 100% yang berarti sebesar sama dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp24.092.136.000,00. Realisasi bagi hasil pajak tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp24.092.136.000,00 dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 29.804.646.600,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.712.510.600,00 atau lebih rendah 19.17%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi DBH Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum yang di salurkan secara non tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.2.1.1.
Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0001 Bagi Hasil PBB	2.725.606.000,00	2.725.606.000,00	100	5.510.384.675,00
4.2.01.01.01.0003 Bagi hasil PPh Pasal 25 dan 29	21.366.530.000,00	21.366.530.000,00	100	24.294.261.925,00
Total	24.092.136.000,00	24.092.136.000,00	100	29.804.646.600,00

1. Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp2.725.606.000,00 atau yang berarti sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.725.606.000,00. Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.725.606.000,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.510.384.675,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.784.778.675,00 atau lebih rendah 50.54%.
2. Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 sebesar Rp21.366.530.000,00 atau yang berarti sama dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp21.366.530.000,00. Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 tahun anggaran 2023 sebesar Rp21.366.530.000,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 tahun anggaran 2022 sebesar Rp24.294.261.925,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.927.731.925,00 atau lebih rendah 12.05%.

5.1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	3
4.2.01.01.01 Bagi Hasil Bukan Pajak	32.071.352.000,00	36.475.210.342,00	113,73	82.308.678.000,00

Realisasi bagi hasil bukan pajak sebesar Rp36.475.210.342,00 atau mencapai 113.73% yang berarti sebesar Rp4.403.858.342,00 atau 13.73% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 32.071.352.000,00. Realisasi bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp36.475.210.342,00 dibandingkan dengan realisasi bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp82.308.678.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp45.833.467.658,00 atau lebih rendah 55.68%. Pendapatan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi DBH Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum yang di salurkan secara non tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.2.
Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0005				
Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi	29.896.423.000,00	33.797.056.552,00	113.05	76.819.003.249,00
4.2.01.01.01.0007				
Bagi Hasil Bukan Pajak Panas Bumi	9.728.000,00	12.969.320,00	113.32	46.240.672,00
4.2.01.01.01.0009				
Bagi Hasil Bukan Pajak Mineral dan Batubara	687.558.000,00	938.550.591,00	136.50	3.049.142.985,00
4.2.01.01.01.0010				
Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan	244.509.000,00	281.746.668,00	115.23	435.980.094,00
4.2.01.01.01.0013				
Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan	1.233.134.000,00	1.444.887.211,00	117.17	1.958.311.000,00
Total	32.071.352.000,00	36.475.210.342,00	113,73	82.308.678.000,00

1. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi sebesar Rp33.797.056.552,00 atau 113.05% yang berarti sebesar Rp6.351.120.435,00 atau 13.05% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.896.423.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi Tahun Anggaran 2023 sebesar R 33.797.056.552,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp76.819.003.249,00 terjadi penurunan sebesar Rp43.021.946.697,00 atau lebih rendah 56.00%. Penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Minyak Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

2. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Panas Bumi sebesar Rp12.969.320,00 atau 133.32% yang berarti sebesar Rp3.241.320,00 atau 33.32% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.728.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Panas Bumi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.969.320,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Panas Bumi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp46.240.672,00 terjadi penurunan sebesar Rp33.271.352,00 atau lebih rendah 71,95%. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyebab terjadinya Kenaikan atau penurunan Pendapatan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Panas Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
3. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Mineral dan Batu Bara sebesar Rp938.550.591,00 atau 136.50% yang berarti sebesar Rp250.992.591,00 atau 36.50% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp687.558.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp938.550.591,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.049.142.985,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.110.592.394,00 atau lebih rendah 69.22%. Penyebab terjadinya Kenaikan atau penurunan disebabkan mengingat Pendapatan Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan Batu Bara merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
4. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan sebesar Rp281.746.668,00 atau 115.23% yang berarti sebesar Rp37.237.668,00 atau 15.23% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp244.509.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp281.746.668,00 apabila dibandingkan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp435.980.094,00 terjadi penurunan sebesar Rp154.233.426,00 atau lebih rendah 35,38%. Penyebab terjadinya Kenaikan atau penurunan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Kehutanan dari iuran Provinsi Sumber Daya Hutan merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
5. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan sebesar Rp1.444.887.211,00 atau 117.17% yang berarti sebesar Rp211.753.211,00 atau 17.17% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran 2023 sebesar Rp1.233.134.000,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.444.887.211,00 apabila dibandingkan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.958.311.000,00 penurunan sebesar Rp513.423.789,00 atau lebih rendah 26.22%. Penyebab terjadinya Kenaikan atau penurunan pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak Perikanan merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

5.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.02 DAU	487.288.274.000,00	487.141.770.396,00	99,97	463.486.748.121,00

Realisasi dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp487.141.770.396,00 atau 99.97% yang berarti sebesar Rp146.503.604,00 atau 0.03% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp487.288.274.000,00. Realisasi dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp487.141.770.396,00 apabila dibandingkan dengan realisasi DAU Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp463.486.748.121,00 terjadi peningkatan sebesar Rp23.655.022.275,00 atau 5.10%. Penyebab terjadinya Kenaikan atau penurunan pendapatan dana alokasi umum merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi umum merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya menyajikan data-data berkaitan dengan penghitungan dana alokasi umum namun tidak berhak menentukan seberapa besar dana yang akan diterima. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi Umum (DAU) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.2.1.4
Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.02.0001 DAU DAK Fisik	459.655.490.000,00	459.508.986.396,00	99,97	463.486.748.121,00
4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Penggajian P3K	22.232.784.000,00	22.232.784.000,00	100,00	0,00
Jumlah	487.288.274.000,00	487.141.770.396,00	99,97	463.486.748.121,00

5.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.03 DAK	94.358.814.000,00	82.402.483.839,80	87,33%	71.207.048.405,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus adalah sebesar Rp82.402.483.839,80 atau 87.33% yang berarti sebesar Rp 11.956.330.160,20 atau 12.67% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp94.358.814.000,00. Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2023 sebesar Rp82.402.483.839,80 apabila dibandingkan dengan Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp71.207.048.405,00 terjadi peningkatan sebesar Rp11.195.435.434,80 atau lebih tinggi 15,72%. Pendapatan yang berasal dari dana alokasi khusus merupakan pendapatan yang uncontrolable karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi khusus merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus

Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.03 DAK Fisik	6.400.881.000,00	5.699.869.054,00	89,05	2.921.025.894,00
4.2.01.01.04 DAK Non Fisik	87.957.933.000,00	76.702.614.785,80	87,20	68.286.022.511,00
Jumlah	94.358.814.000,00	82.402.483.839,80	87,33	71.207.048.405,00

Sedangkan perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022.

Tabel 5.1.2.1.5.
Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 =(3/2)	5
4.2.01.01.03.				
Dana Alokasi Khusus Fisik	6.400.881.000,00	5.699.869.054,00	89,05	2.921.025.894,00
4.2.01.01.03.0003 Pendidikan Reguler SMP	3.437.834.000,00	2.876.952.272,00	83,69	864.908.794,00
4.2.01.01.03.0017 Kesehatan& KB Penguatan Stunting	1.723.545.000,00	1.706.171.149,00	98,99	-
4.2.01.01.03.0025 Kesehatan& KB Reguler KB	1.158.982.000,00	1.042.518.233,00	89,95	1.068.470.000,00
4.2.01.01.03.0060 Kesehatan& KB Reguler KB Penguatan sistem kesehatan	80.520.000,00	74.227.400,00	92,19	-
4.2.01.01.03.0011 perpustakaan daerah	-	-		279.410.600,00
4.2.01.01.03.0018DAK Fisik Bid.Kes dan KB-penug. peningk. pence. pegen. peny. dan sanitasi total berbasis masy.	-	-		586.140.600,00
4.2.01.01.03.0030 Industri Kecil dan menengah penugasan Pembangunan	-	-		122.095.900,00
4.2.01.01.04 Dana Alokasi Khusus Non Fisik:	87.957.933.000,00	76.702.614.785,80	87,20	68.286.022.511,00
4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik BOS Reguler	24.405.700.000,00	19.860.631.414,80	81,38	-
4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik BOS Kinerja	1.327.500.000,00	717.500.000,00	54,05	19.884.278.226,00
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik TPG PNSD	45.266.705.000,00	45.266.704.000,00	100,00	42.516.989.020,00
4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik -Tamsil Guru PNSD	949.500.000,00	605.685.285,00	55,00	654.000.000,00
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik BOP PAUD	4.422.900.000,00	99.000.000,00	2,24	-
4.2.01.01.04.0008 BOP Pendidikan kesetaraan	728.430.000,00	-	-	-
4.2.01.01.04.0011 BOK KB-BOK	2.301.503.000,00	2.301.503.000,00	100,00	2.816.134.090,00

4.2.01.01.04.0013 BOK KB-Akreditasi puskesmas	4.958.759.000,00	4.958.759.000,00	100,00	-
4.2.01.01.04.0015				
BOKKB-BOKB	2.842.666.000,00	2.195.894.686,00	77,25	946.394.000,00
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal	333.900.000,00	315.318.450,00	94,43	182.478.000,00
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik- PK2UKM	420.370.000,00	381.618.950,00	0,91	360.496.800,00
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik- Pelayan Perlindungan perempuan dan anak	-	-		451.800.000,00
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-		473.452.375,00
Jumlah	94,358,814,000.00	82.402.483.839,80	87.33%	71.207.048.405,00

5.1.2.1.5. Dana Bagi Hasil Cukai

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01 Dana Bagi Hasil Cukai	29.607.909.000,00	35.959.029.435,00	121,45	21.802.781.361,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai adalah sebesar Rp35.959.029.435,00 atau 121,45% yang berarti sebesar Rp6.351.120.435,00 atau 21.45% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp29.607.909.000,00. Realisasi dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2023 sebesar Rp35.959.029.435,00 apabila dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp21.802.781.361,00 terjadi peningkatan sebesar Rp14.156.248.074,00 atau lebih tinggi 64.93%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil cukai merupakan pendapatan yang *uncontrolable*. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil cukai merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	63.300.891.000,00	74.714.922.000,00	118.03%	28.870.790.000,00

Realisasi transfer pemerintah pusat – lainnya yang berupa Dana Penyesuaian yang terdiri dari Dana Insentif Daerah adalah sebesar Rp74.714.922.000,00 atau 118.03% yang berarti sebesar Rp11.414.031.000,00 atau 18.03% yang berarti lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 63.300.891.000,00 Pendapatan yang berasal dari Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Realisasi transfer pemerintah pusat – lainnya yang berupa Dana Insentif Daerah /DID Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.714.922.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah pusat – lainnya yang berupa Dana Insentif Daerah /DID Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp28.870.790.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp45.844.132.000,00 atau lebih tinggi 158.79%.

Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

5.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.4.01 Dana Insentif Daerah	63.300.891.000,00	74.714.922.000,00	118,03%	28.870.790.000,00

Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp74.714.922.000,00 atau 118.03% yang berarti lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp63.300.891.000,00. Realisasi Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.714.922.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp28.870.790.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp45.844.132.000,00 atau lebih tinggi 158,79%.

5.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Provinsi	96.282.390.600,00	121.272.084.812,00	125,95%	99.023.389.080,00

Penerimaan dari transfer pemerintah provinsi sebesar Rp121.272.084.812,00 atau 125.95% yang berarti sebesar Rp24.989.694.200,00 atau 25.95% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp96.282.390.600,00. Realisasi transfer pemerintah provinsi – dana perimbangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp121.272.084.812,00 dibandingkan dengan realisasi transfer pemerintah provinsi dana perimbangan tahun anggaran 2022 sebesar Rp99.023.389.080,00 terjadi peningkatan sebesar Rp22.248.695.732,00 atau lebih tinggi 22.47%. Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah provinsi dana perimbangan sesuai dengan Keputusan gubernur Jawa Timur Nomor 188/180/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Realisasi Pajak daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2023.

5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.663.488.000,00	120.565.582.200,00	126,03	98.284.006.080,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari propinsi adalah sebesar Rp120.565.582.200,00 mencapai 126.03% yang berarti sebesar Rp24.902.094.200,00 atau 26.03% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp95.663.488.000,00. Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari propinsi merupakan kewenangan penuh dari pemerintah provinsi. Realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi tahun anggaran 2023 sebesar Rp120.565.582.200,00 dibandingkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp98.284.006.080,00. atau terjadi peningkatan sebesar Rp22.281.576.120,00 atau lebih tinggi 22.67%.

Perincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.3.1

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak PKB	28.601.641.000,00	34.918.489.800,00	122.09	30.500.722.060,00
4.2.02.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Pajak BBNKB	12.062.084.000,00	15.339.681.100,00	127.17	13.983.937.380,00
4.2.02.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak PBBKB	17.363.013.000,00	29.292.250.400,00	168.70	18.943.492.380,00
4.2.02.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	231.250.000,00	371.681.600,00	160.73	270.478.040,00
4.2.02.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	37.405.500.000,00	40.643.479.300,00	108.66	34.585.376.220,00
Total	95.663.488.000,00	120.565.582.200,00	126.03	98.284.006.080,00

1. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp34.918.489.800,00 atau mencapai 122.09% yang berarti sebesar Rp6.316.848.800,00 atau 22.09% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.601.641.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.918.489.800,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2022 sebesar Rp30.500.722.060,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp4.417.767.740,00 atau lebih tinggi 14.48%.
2. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp15.339.681.100,00 atau mencapai 127.17% yang berarti sebesar Rp3.277.597.100,00 atau 27,17% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.062.084.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.339.681.100,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2022 sebesar Rp13.983.937.380,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp1.355.743.720,00 atau lebih tinggi 9,70%.
3. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp29.292.250.400,00 atau mencapai 168.70% yang berarti sebesar Rp11.929.237.400,00 atau 68.70% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.363.013.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.292.250.400,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2022 sebesar Rp18.943.492.380,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp10.348.758.020,00 atau lebih tinggi 54.63%.
4. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp371.681.600,00 atau mencapai 160.73% yang berarti sebesar Rp140.431.600,00 atau 60.73% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp231.250.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp371.681.600,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2022 sebesar Rp270.478.040,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp101.203.560,00 atau lebih tinggi 37.4282%.

5. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp40.643.479.300,00 atau mencapai 108.66% yang berarti sebesar Rp3.237.979.300,00 atau 8.66% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp37.405.500.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp40.643.479.300,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2022 sebesar Rp34.585.376.220,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp6.058.103.080,00 atau lebih tinggi 17,52%.

5.1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Lainnya

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemda Lainnya	618.902.600,00	706.502.612,00	114,15%	739.383.000,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi sebesar Rp 706.502.612,00 atau mencapai 114.15% yang berarti sebesar Rp87.600.000,00 atau 14.15% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 618.902.600,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi tahun anggaran 2023 sebesar Rp 706.502.612,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp739.383.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp32.880.388,00 atau lebih rendah 4,45%. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi berdasarkan ketetapan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Perincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan dari Propinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Bantuan Keuangan dari Propinsi /Pemerintah Lainnya

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) selama 6 bulan Ta.2023	476.850.000,00	476.850.000,00	100,00%	476.850.000,00
Honorarium Kinerja Guru Non PNS Sejenjang TK/SD/SMP selama 10 Bulan Ta.2023	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	0,000
Honorarium Kinerja Kepala /GuruTK/Paud Non PNS selama 6 bulan Ta.2023	81.600.000,00	163.200.000,00	100,00%	0,000
Bantuan Keuangan khusus Bidang Kesehatan Ta.2023	30.452.612,00	30.452.612,00	100,00%	0,000
Honorarium Kinerja Guru Non PNS jenjang /TK/SD/SMP selama 2 bulan ta 2023	0,00	6.000.000,00	0%	0,000
Pemenuhan honor kinerja kepala guru/Tk/Paud Non PNS	0,00	0,00	0%	108.800.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS (TK)	0,00	0,00	0%	12.000.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS SD	0,00	0,00	0%	12.000.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS SMP	0,00	0,00	0%	12.000.000,00
Bantuan Propinsi Pendampingan Poskestren	0,00	0,00	0%	117.733.000,00
Total	618.902.612,00	706.502.612,00	114.15%	739.383.000,00

5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.3. Lain-lain pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00%	0,00

Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah Tahun Anggaran 2023 tidak ada realisasi. Penerimaan dari pendapatan dana hibah terdiri dari Pendapatan dana BOS Tahun Anggaran 2023 pindah ke realisasi dana alokasi khusus non fisik. Realisasi lain-lain pendapatan yang ini merupakan merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

Perincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.3.
Lain Lain Pendapatan Yang Sah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.03.01.01.0001 Pendapatan hibah Dana BOS	0,00	0,00		0,00
4.3.03.01.02.0005 Pendapatan atas pengembalian hibah	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	0,00		0,00

5.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.03.01.01. Pendapatan Dana Hibah	0,00	0,00		0,00

Penerimaan dari pendapatan dana hibah terdiri dari Pendapatan dana BOS tahun anggaran 2023 pindah ke realisasi dana alokasi khusus non fisik. Pada tahun 2023 tidak terdapat penerimaan dari pendapatan dana hibah Bos, karena di reklas menjadi pendapatan DAK Non Fisik.

5.2. BELANJA

5.2.1. BELANJA OPERASI

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Operasi	1.053.170.646.108,00	975.874.375.042,70	92,66	930.473.573.791,29

Realisasi belanja Operasi sebesar Rp975.874.375.042,70 atau mencapai 92,66% yang berarti sebesar Rp45.039.062.408,61 atau 7,34% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.053.170.646.108,00.

Perincian anggaran dan realisasi belanja operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1
Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.1.1 Belanja Pegawai	468.936.215.253,00	423.896.152.844,39	90,40	404.406.660.608,25
5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	513.171.846.360,00	487.718.322.693,31	95,04	474.775.658.285,04
5.2.1.3 Belanja Subsidi	99.146.000,00	99.146.000,00	100,00	6.480.445.500,00
5.2.1.4 Belanja Hibah	38.190.636.795,00	32.355.896.005,00	84,71	11.562.623.718,00
5.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	32.772.801.700,00	31.804.857.500,00	97,05	33.248.185.680,00
Jumlah Belanja Operasi	1.053.170.646.108,00	975.874.375.042,70	92,66	930.473.573.791,29

5.2.1.1. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai	468.936.215.253,00	423.896.152.844,39	90,40	404.406.660.608,25

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp423.896.152.844,39 atau mencapai 90,40% yang berarti sebesar Rp45.040.062.408,61 atau 9,60% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp468.936.215.253,00. Hal ini dikarenakan banyak pegawai yang sudah pensiun.

Realisasi belanja pegawai dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp404.406.660.608,25 terjadi kenaikan sebesar Rp113.259.269.986,75 atau lebih tinggi 28,01%.

Perincian obyek belanja anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2.1.1
Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan	235.945.666.095,00	210.825.345.289,00	89,35	205.776.281.913,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan ASN	147.060.181.873,00	132.981.043.160,00	90,43	128.194.668.409,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasar Pertimbangan Obyektif Lainnya	66.868.963.435,00	64.056.690.831,33	95,79	51.522.008.317,25
5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	14.980.503.217,00	14.287.484.704,00	95,37	15.392.700.656,00
5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.859.590.633,00	912.138.860,06	49,05	934.173.813,00
5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, KDH/WKDH	741.600.000,00	731.340.000,00	98,62	731.340.000,00
5.1.1.88 Belanja Pegawai BOS	1.364.400.000,00	0,00	0,00	1.501.667.500,00
5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD	115.310.000,00	102.110.000,00	88,55	353.820.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	468.936.215.253,00	423.896.152.844,39	90,40	404.406.660.608,25

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.1.1
Belanja Pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Pegawai OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 =(3/2)	5
Dinas Pendidikan	172.659.737.000,00	159.677.191.999,00	92,48	148.247.482.206,00
Dinas Kesehatan PP & KB	76.408.122.561,00	71.923.686.377,00	94,13	58.746.782.273,00
Dinas PU TR	7.713.444.030,00	6.741.362.679,00	87,40	7.294.620.499,00

Belanja Pegawai OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.610.968.670,00	4.787.941.364,00	85,33	4.928.758.233,00
Satpol PP & Damkar	7.862.298.000,00	6.239.014.742,00	79,35	6.921.448.013,00
BPBD	1.756.695.000,00	1.701.613.226,00	96,86	1.529.845.511,00
Dinas Sosial	5.943.774.352,00	5.424.675.511,00	91,27	5.240.733.141,00
Dinas Tenaga Kerja	5.479.630.413,00	5.067.862.752,00	92,49	4.725.786.477,00
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	5.158.957.000,00	4.204.677.559,00	81,50	4.184.281.170,00
Dinas LH	9.775.953.388,00	9.297.966.573,00	95,11	10.126.696.205,00
Dispendukcapil	4.405.303.400,00	4.317.572.955,00	98,01	3.763.290.319,00
Dinas Perhubungan	6.413.732.086,00	6.228.595.727,00	97,11	6.340.822.791,00
Dinas Kominfo	5.390.459.137,00	4.931.346.454,00	91,48	5.148.484.206,00
Dinas PM & PTSP	4.016.473.000,00	3.818.343.136,00	95,07	3.784.736.829,00
Dinas Budparpora	4.436.532.397,00	4.265.260.370,00	96,14	4.147.363.429,00
Dinas Perpustakaan	4.040.291.218,00	3.723.966.456,00	92,17	3.340.386.062,00
Dinas Perdagangan	9.362.352.622,00	8.343.248.151,00	89,11	8.330.818.574,00
Bagian Pemerintahan	899.410.000,00	816.749.507,00	90,81	783.029.832,00
Bagian Organisasi	815.884.310,00	790.595.690,00	96,90	752.659.122,00
Bagian Hukum	864.232.000,00	829.661.789,00	96,00	1.167.982.365,00
Bagian PBJ & Adbang	1.667.521.476,00	1.652.305.058,00	99,09	1.531.030.620,00
Bagian Perekkesra	1.007.694.810,00	906.628.617,00	89,97	979.512.379,00
Bagian Umum	13.725.803.781,00	11.090.677.770,00	80,80	10.527.377.772,00
Sekretariat DPRD	18.225.445.841,00	17.377.019.689,00	95,34	18.575.840.357,00
BAPELITBANGDA	5.429.057.476,00	4.693.769.022,00	86,46	4.706.023.722,00
BKAD	29.584.637.209,00	18.764.087.938,00	63,43	20.477.087.237,00
Bependa	8.095.808.900,00	7.725.180.552,39	95,42	8.693.387.116,25
BKPSDM	5.903.398.559,00	5.690.093.810,00	96,39	5.494.527.396,00
Inspektorat	7.376.098.986,00	7.166.570.507,00	97,16	7.297.810.514,00
Kec Manguharjo	11.873.549.082,00	11.070.556.260,00	93,24	10.998.897.097,00
Kec Kartoharjo	11.469.217.545,00	10.742.772.955,00	93,67	10.978.147.747,00
Kec Taman	11.508.809.855,00	10.266.975.319,00	89,21	11.216.851.061,00
Bakesbangpol	4.054.921.149,00	3.618.182.330,00	89,23	3.424.160.333,00
Total	468.936.215.253,00	423.896.152.844,39	90,40	404.406.660.608,25

5.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Barang dan Jasa	513.171.846.360,00	487.718.322.693,31	95,04	474.775.658.285,04

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp487.718.322.693,31 atau mencapai 95,04% yang berarti sebesar Rp25.453.523.666,69 atau 4,96% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp513.171.846.360,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja barang dan jasa karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu.

Perincian anggaran dan realisasi obyek belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebelum dilakukan reklas tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2
Belanja Barang dan Jasa
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	513.171.846.360,00	487.718.322.693,31	95,04	474.775.658.285,04
5.1.02.01 Belanja Barang	130.795.592.613,00	122.590.404.708,50	93,73	115.594.663.182,78
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis	129.792.145.529,00	121.594.690.615,50	93,68	114.728.050.077,78
5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.003.447.084,00	995.714.093,00	99,23	866.613.105,00
5.1.02.02 Belanja Jasa	204.871.335.191,00	191.169.925.758,63	93,31	183.234.906.322,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor	148.855.012.110,00	138.950.330.745,70	93,35	129.182.236.001,00
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan Asuransi	34.848.509.300,00	33.350.830.308,00	95,70	33.730.869.200,00
5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah	98.100.000,00	98.058.450,00	99,96	0,00
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.906.865.962,00	5.050.319.519,00	85,50	3.126.510.544,00
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.142.102.053,00	808.833.130,00	70,82	1.582.317.684,00

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	145.607.679,00	131.839.800,00	90,54	343.792.090,00
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.539.339.100,00	1.109.490.690,00	72,08	3.287.222.994,00
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.126.428.437,00	6.807.330.669,00	95,52	6.812.408.837,00
5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	530.000.000,00	530.000.000,00	100,00	336.000.000,00
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek & Diklat	4.470.889.650,00	4.205.608.886,00	94,07	4.767.548.595,00
5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah	208.480.900,00	127.283.560,93	61,05	66.000.377,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	26.250.933.904,00	25.428.091.070,18	96,87	25.800.670.244,28
5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah	1.157.980.412,00	1.131.743.591,90	97,73	49.625.000,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan	6.073.443.038,00	5.747.336.369,00	94,63	8.961.018.445,00
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung &	8.987.758.154,00	8.841.745.814,28	98,38	9.574.633.319,28
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan & Irigasi	9.386.190.000,00	9.079.879.600,00	96,74	7.059.352.655,00
5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	645.562.300,00	627.385.695,00	97,18	156.040.825,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	44.184.775.959,00	41.205.029.504,00	93,26	37.852.741.707,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.784.541.709,00	39.262.456.274,00	93,97	37.504.458.331,00
5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.400.234.250,00	1.942.573.230,00	80,93	348.283.376,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	4.730.804.000,00	4.183.782.600,00	88,44	4.496.435.749,00
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.464.604.000,00	3.926.482.600,00	87,95	2.653.357.899,00

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	266.200.000,00	257.300.000,00	96,66	1.843.077.850,00
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS	16.493.491.830,00	17.756.446.336,00	107,66	15.861.064.197,98
5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS	16.493.491.830,00	17.756.446.336,00	107,66	15.861.064.197,98
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.844.912.863,00	85.384.642.716,00	99,46	91.935.176.882,00
5.1.02.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.844.912.863,00	85.384.642.716,00	99,46	91.935.176.882,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2.1
Belanja Barang dan Jasa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Belanja Barang dan Jasa OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 =(3/2)	5
Dinas Pendidikan	55.607.019.271,00	53.079.016.505,01	95,45	47.949.446.184,98
Dinas Kesehatan PP & KB	154.977.198.817,00	150.714.595.708,50	97,25	167.437.182.354,00
Dinas PU TR	22.608.591.154,00	21.271.408.630,67	94,09	19.128.788.261,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.083.470.802,00	20.384.711.510,00	96,69	18.583.243.327,00
Satpol PP & Damkar	16.828.809.305,00	14.570.976.270,00	86,58	9.963.403.806,00
BPBD	1.925.294.000,00	1.906.036.750,00	99,00	2.200.383.870,00
Dinas Sosial	11.404.112.687,00	10.375.921.776,00	90,98	10.787.919.018,00
Dinas Tenaga Kerja	8.787.282.996,00	6.167.232.530,69	70,18	7.056.338.199,00
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	7.440.134.057,00	6.997.365.725,00	94,05	5.372.428.956,00
Dinas LH	13.777.060.928,00	13.111.415.204,26	95,17	13.566.223.428,00
Dispendukcapil	2.187.884.413,00	2.151.651.519,00	98,34	3.177.500.773,00
Dinas Perhubungan	10.479.618.202,00	10.305.567.592,21	98,34	10.279.376.199,00
Dinas Kominfo	25.889.039.121,00	25.784.803.453,00	99,60	20.283.478.049,00
Dinas PM & PTSP	3.228.379.247,00	3.104.851.437,00	96,17	2.473.397.565,00
Dinas Budparpora	12.067.435.519,00	11.997.219.231,90	99,42	13.110.882.006,00
Dinas Perpustakaan	2.991.832.538,00	2.824.534.718,40	94,41	2.633.971.756,00

Belanja Barang dan Jasa OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Dinas Perdagangan	6.748.121.408,00	6.571.766.182,00	97,39	7.454.561.859,00
Bagian Pemerintahan	2.585.927.600,00	2.516.839.475,00	97,33	2.629.698.953,78
Bagian Organisasi	1.767.415.270,00	1.743.535.582,00	98,65	2.023.558.069,00
Bagian Hukum	1.502.806.358,00	1.447.167.083,00	96,30	1.423.924.604,00
Bagian PBJ & Adbang	1.534.866.261,00	1.525.127.316,00	99,37	1.609.600.453,28
Bagian Perekkesra	3.411.520.984,00	2.831.143.183,00	82,99	2.864.869.175,00
Bagian Umum	23.008.763.652,00	21.682.748.142,10	94,24	18.121.275.348,00
Sekretariat DPRD	28.274.585.713,00	25.300.933.755,00	89,48	22.850.435.952,00
BAPELITBANGDA	6.381.816.829,00	5.948.828.901,00	93,22	5.500.064.961,00
BKAD	25.160.823.179,00	23.056.547.075,00	91,64	17.679.599.807,00
Bependa	2.325.399.054,00	2.126.399.791,93	91,44	1.647.658.588,00
BKPSDM	5.667.400.905,00	5.342.016.703,00	94,26	6.099.082.501,00
Inspektorat	2.221.645.630,00	2.206.273.886,00	99,31	2.435.248.711,00
Kec Manguharjo	9.494.095.030,00	9.336.694.143,64	98,34	9.145.564.007,00
Kec Kartoharjo	8.814.481.218,00	8.613.550.630,00	97,72	8.410.792.712,00
Kec Taman	10.001.741.133,00	9.836.692.809,00	98,35	8.649.037.990,00
Bakesbangpol	2.987.273.079,00	2.884.749.474,00	96,57	2.226.720.842,00
Total	513.171.846.360,00	487.718.322.693,31	95,04	474.775.658.285,04

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa yang berasal dari belanja BOS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 Sekolah SDN dan SMPN di lingkungan Dinas Pendidikan tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2.2
Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Belanja Barang dan Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN 01 Kartoharjo	236.873.359,00	239.930.825,00	101,29	221.671.785,00
SDN 02 Kartoharjo	44.550.000,00	56.861.454,00	127,64	40.841.500,00
SDN 03 Kartoharjo				55.029.888,00

Belanja Barang dan Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN 01 Klegen	241.323.300,00	263.821.160,00	109,32	254.981.483,00
SDN 02 Klegen	94.025.000,00	93.551.745,00	99,50	60.008.843,00
SDN 03 Klegen	263.909.100,00	263.909.058,00	100,00	223.955.353,00
SDN 04 Klegen	65.778.000,00	80.778.000,00	122,80	70.955.813,00
SDN Oro Oro Ombo	190.823.200,00	187.653.293,00	98,34	157.941.849,00
SDN 01 Rejomulyo	84.154.000,00	84.102.646,00	99,94	63.739.562,00
SDN 02 Rejomulyo				39.453.039,00
SDN 01 Kanigoro	64.300.000,00	64.543.864,00	100,38	38.835.144,00
SDN 02 Kanigoro	123.008.700,00	132.006.212,00	107,31	110.227.915,98
SDN 03 Kanigoro	110.680.000,00	110.077.417,00	99,46	120.507.902,00
SDN Sukosari	21.958.600,00	21.958.502,00	100,00	24.205.015,00
SDN Pilangbango	178.290.000,00	187.182.896,00	104,99	129.751.981,00
SDN 01 Tawangrejo	121.427.595,00	121.034.194,00	99,68	98.972.445,00
SDN 02 Tawangrejo	70.480.900,00	83.980.728,00	119,15	41.169.500,00
SDN Kelun	123.321.097,00	123.251.500,00	99,94	137.503.352,00
SDN 01 Manguharjo	180.654.200,00	185.773.127,00	102,83	183.233.853,00
SDN 01 Nambangan Lor	236.097.482,00	205.005.227,00	86,83	213.971.164,00
SDN 02 Nambangan Lor	120.680.000,00	120.677.090,00	100,00	113.591.872,00
SDN 01 Madiun Lor	88.380.000,00	88.397.666,00	100,02	93.945.392,00
SDN 02 Madiun Lor	87.262.500,00	87.307.553,00	100,05	66.809.371,00
SDN 03 Madiun Lor	456.159.200,00	438.484.270,00	96,13	329.131.318,00
SDN 04 Madiun Lor	281.440.000,00	279.399.458,00	99,27	225.542.477,00
SDN 05 Madiun Lor	317.640.722,00	369.603.950,00	1,16	385.550.620,00
SDN 01 Nambangan Kidul	94.680.000,00	94.883.828,00	100,22	95.922.150,00
SDN 02 Nambangan Kidul	97.141.450,00	95.887.500,00	98,71	66.289.695,00
SDN 03 Nambangan Kidul	235.813.000,00	238.552.000,00	101,16	192.308.540,00
SDN 04 Nambangan Kidul				92.814.277,00
SDN 01 Winongo	222.150.000,00	222.149.935,00	100,00	199.583.583,00
SDN 02 Winongo	55.440.000,00	55.439.872,00	100,00	48.226.200,00
SDN Ngegong	139.623.000,00	139.622.849,00	100,00	128.344.485,00
SDN Patihan	192.976.000,00	192.976.000,00	100,00	212.600.820,00
SDN 01 Pangongangan		243.360.630,00	0,00	47.556.650,00
SDN 02 Pangongangan				185.841.940,00

Belanja Barang dan Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN Sogaten	153.418.000,00	153.417.242,00	100,00	101.821.421,00
SDN 01 Taman	361.104.100,00	371.939.712,00	103,00	404.856.809,00
SDN 02 Taman	57.492.000,00	57.491.364,00	100,00	60.339.206,00
SDN 03 Taman	61.934.900,00	59.665.855,00	96,34	75.351.010,00
SDN 01 Pandean	278.580.000,00	287.557.590,00	103,22	226.274.353,00
SDN 02 Pandean	241.062.690,00	241.061.493,00	100,00	215.071.448,00
SDN Banjarejo	330.316.730,00	303.201.647,00	91,79	204.283.783,00
SDN 01 Mojorejo	81.183.000,00	81.182.897,00	100,00	87.226.174,00
SDN 02 Mojorejo	401.494.150,00	401.403.085,00	99,98	333.681.968,00
SDN 01 Manisrejo	260.673.000,00	260.653.076,00	99,99	237.696.358,00
SDN 02 Manisrejo	243.365.000,00	228.393.100,00	93,85	146.065.875,00
SDN 03 Manisrejo	142.630.400,00	142.630.304,00	100,00	130.694.698,00
SDN 04 Manisrejo	157.160.000,00	157.303.044,00	100,09	161.899.402,00
SDN 01 Demangan	105.634.000,00	111.670.175,00	105,71	100.981.723,00
SDN 02 Demangan	124.030.000,00	124.030.500,00	100,00	108.401.550,00
SDN 01 Josenan	144.796.274,00	143.770.773,00	99,29	124.395.225,00
SDN 02 Josenan	147.577.450,00	147.570.724,00	100,00	98.127.515,00
SDN 03 Josenan	60.835.200,00	60.986.500,00	100,25	35.529.547,00
SDN Kejuron	35.640.000,00	35.974.749,00	100,94	13.930.350,00
SDN Kuncen	64.735.450,00	73.323.390,00	113,27	48.203.615,00
SMP NEGERI 1	822.564.450,00	859.041.086,00	104,43	763.895.742,00
SMP NEGERI 2	902.660.000,00	851.291.301,00	94,31	797.584.841,00
SMP NEGERI 3	582.170.000,00	581.187.404,00	99,83	534.415.978,00
SMP NEGERI 4	941.304.900,00	998.195.541,00	106,04	879.707.562,00
SMP NEGERI 5	466.176.100,00	465.985.111,00	99,96	412.969.564,00
SMP NEGERI 6	668.020.000,00	666.671.908,00	99,80	638.660.059,00
SMP NEGERI 7	773.370.350,00	773.364.483,00	100,00	757.333.242,00
SMP NEGERI 8	538.985.000,00	473.446.485,00	87,84	391.839.451,00
SMP NEGERI 9	408.663.600,00	476.609.054,00	116,63	303.435.384,00
SMP NEGERI 10	510.898.700,00	580.587.818,00	113,64	394.497.575,00
SMP NEGERI 11	758.296.000,00	758.295.900,00	100,00	692.941.767,00
SMP NEGERI 12	589.195.050,00	589.189.281,00	100,00	627.220.706,00

Belanja Barang dan Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
SMP NEGERI 13	769.189.501,00	778.788.426,00	101,25	671.614.718,00
SMP NEGERI 14	288.400.000,00	288.400.869,00	100,00	309.098.802,00
Total	17.314.596.400,00	17.756.446.336,00	102,55	15.861.064.197,98

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa yang berasal dari belanja BLUD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan periode 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2.3

Belanja Barang dan Jasa BLUD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BLUD				
Belanja Barang	34.593.269.355,00	31.180.220.179,00	90,13	36.635.434.357,00
Belanja Jasa	44.923.007.748,00	48.646.782.419,00	108,29	48.869.595.226,00
Belanja Pemeliharaan	4.563.029.460,00	3.987.889.031,00	87,40	4.984.044.095,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.765.606.300,00	1.569.751.087,00	88,91	1.446.103.204,00
Total Belanja Barang dan Jasa	85.844.912.863,00	85.384.642.716,00	99,46	91.935.176.882,00

5.2.1.3 BELANJA SUBSIDI

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hibah	99.146.000,00	99.146.000,00	100	6.480.445.500,00

Realisasi belanja subsidi tahun anggaran 2023 sebesar Rp99.146.000,00 atau 100,00% yang berarti Rp0,00 atau 0,00% sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp99.146.000,00. Belanja subsidi ini dalam rangka untuk penekanan inflasi melalui program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota pada sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota.

Perincian anggaran dan realisasi belanja Subsidi yang berasal dari beberapa OPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.3
Belanja Subsidi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.04.01. Belanja Subsidi kepada BUMN	99.146.000,00	99.146.000,00	100,00	6.480.445.500,00
Jumlah Belanja Hibah	99.146.000,00	99.146.000,00	100,00	6.480.445.500,00

5.2.1.4. Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hibah	38.190.636.795,00	32.355.896.005,00	84,72	11.562.623.718,00

Realisasi belanja hibah sebesar Rp32.355.896.005,00 atau mencapai 84,72% yang berarti sebesar Rp5.834.740.790,00 atau 15,28% lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp38.190.636.795,00 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 400-401.202/182/2023 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 400-401.202/16/2023 tentang Pejabat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Realisasi belanja hibah Tahun 2023 termasuk belanja hibah berupa bantuan kepada parpol pada tahun 2023 sebesar Rp950.563.500,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja hibah yang berasal dari beberapa OPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.4
Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.05.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.487.861.000,00	6.383.188.600,00	98,39	0,00
5.1.05.05. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, yang berbadan Hukum	30.752.212.295,00	25.022.143.905,00	81,37	10.612.060.218,00
5.1.05.07. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	950.563.500,00	950.563.500,00	100,00	950.563.500,00
Jumlah Belanja Hibah	38.190.636.795,00	32.355.896.005,00	84,72	11.562.623.718,00

5.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bantuan Sosial	32.772.801.700,00	31.804.857.500,00	97,05	33.248.185.680,00

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp31.804.857.500,00 atau mencapai 97,05% yang berarti sebesar Rp967.994.200,00 atau 2,95% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp32.772.801.700,00. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/182/2023 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Perincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	28.044.911.700,00	27.376.940.000,00	97,62	28.528.115.680,00
5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	00,00	113.400.000,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial Kepada lembaga non pemerintahan	4.727.890.000,00	4.427.917.500,00	93,66	4.606.670.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	32.772.801.700,00	31.804.857.500,00	97,05	33.248.185.680,00

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Non Pemerintah terdiri bantuan sosial kepada pengelola tempat ibadah, kelompok guru dan pegawai sekolah swasta, panti asuhan, beasiswa mahasiswa dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Belanja Sosial kepada Individu terdiri bantuan sosial kepada perintis kemerdekaan, pengabdian Tokoh Masyarakat, jambanisasi, bantuan sosial akibat bencana, bantuan pangan non tunai (BPNT), kinerja guru TK/PAUD Non PNS (BK Prop), Bantuan Sosial Insentif guru dan tenaga kependidikan swasta di lembaga PAUD, SD dan SMP.

5.2.2. BELANJA MODAL

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal	222.872.275.205,00	217.790.302.662,69	97,72	232.434.449.701,97

Realisasi jenis belanja modal sebesar Rp217.790.302.662,69 atau mencapai 97,72% yang berarti sebesar Rp5.081.972.542,31 atau 2,28% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp222.872.275.205,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp217.790.302.662,69 dibandingkan dengan realisasi belanja Modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp232.434.449.701,97 terjadi penurunan sebesar Rp14.644.147.039,28 atau lebih rendah 6,72%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2
Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.2.1 Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2 Peralatan & mesin	73.145.003.249,00	71.585.868.051,04	97,87	53.011.211.346,00
5.2.2.3 Gedung & bangunan	83.254.511.750,00	80.940.539.683,65	97,22	72.843.838.757,97
5.2.2.4 Jalan, irigasi, jaringan	64.036.113.165,00	62.832.477.443,00	98,12	103.137.296.907,00
5.2.2.5 Aset tetap lainnya	2.436.647.041,00	2.431.417.485,00	99,79	3.442.102.691,00
Jumlah Total	222.872.275.205,00	217.790.302.662,69	97,72	232.434.449.701,97

5.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Tanah	0,00	0,00	00,00	0,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2023 tidak ada alokasi anggaran belanja modal tanah

5.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Peralatan dan Mesin	73.145.003.249,00	71.585.868.051,04	97,87	53.011.211.346,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp71.585.868.051,04 atau mencapai 97,87% yang berarti sebesar Rp1.559.135.197,96 atau 2,13% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp73.145.003.249,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2023 sebesar Rp71.585.868.051,04 dibandingkan dengan belanja modal peralatan dan mesin tahun tahun anggaran 2022 sebesar Rp53.011.211.346,00 terjadi kenaikan sebesar Rp18.574.656.705,04 atau lebih tinggi 25,95%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.02. Belanja modal Peralatan dan Mesin	73.145.003.249,00	71.585.868.051,04	97,87	53.011.211.346,00
5.2.02.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar/ Berat	2.660.786.600,00	2.654.100.000,00	99,75	3.436.776.000,00
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan	3.377.556.750,00	3.243.522.130,00	96,03	26.814.906.500,00
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel/ Alat Ukur	81.655.000,00	81.120.000,00	99,34	327.688.765,00
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian	129.870.000,00	128.500.000,00	98,95	16.650.000,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat kantor/ Rumah Tangga	5.137.916.366,00	4.624.879.550,00	90,01	9.475.981.185,00
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	923.791.522,00	872.617.018,00	94,46	910.538.025,00
5.2.02.07 Belanja Modal Peralatan Kedokteran	5.571.940.953,00	4.804.418.371,00	86,23	1.957.878.063,00
5.2.3.02.10 Belanja Modal Komputer	50.195.953.480,00	50.089.399.142,00	99,79	2.628.164.333,00
5.2.3.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi	25.530.000,00	25.308.000,00	99,13	195.950.000,00
5.2.3.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permurnian	0,00	0,00	0,00	1.490.625,00
5.2.3.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	9.999.563,00
5.2.3.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	36.080.000,00	35.030.000,00	97,09	147.073.890,00
5.2.3.02.18 Belanja Modal Rambu - Rambu	3.076.259.437,00	3.058.049.636,04	99,41	4.549.069.492,00
5.2.3.02.19 Belanja Modal Peralatan Olah Raga	127.800.000,00	126.928.500,00	99,32	200.220.000,00
5.2.3.02.88 Belanja Modal Peralatan Mesin BOS	999.056.841,00	1.048.869.678,00	104,99	1.852.590.889,00
5.2.3.02.99 Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD	800.806.300,00	793.126.026,00	99,04	486.234.016,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.2.1
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Modal Peralatan dan Mesin OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	51.579.315.135,00	51.496.407.814,00	99,84	2.239.884.949,00
Dinas Kesehatan KB	9.309.472.987,00	8.085.234.765,00	86,85	3.970.394.299,00
Dinas PU TR	2.113.875.000,00	2.109.075.000,00	99,77	1.336.670.000,00
Dinas Perumahan	2.268.892.444,00	2.261.467.636,04	99,67	7.607.045.467,00
Dinas Satpol PP & Damkar	316.991.500,00	307.330.000,00	96,95	663.264.799,00
BPBD	29.011.000,00	29.010.182,00	100,00	44.639.900,00
Dinas Sosial	281.021.158,00	263.900.000,00	93,91	873.645.000,00
Dinas Tenaga Kerja	200.238.928,00	193.032.738,00	96,40	652.499.856,00
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	348.907.743,00	343.989.456,00	98,59	370.322.905,00
Dinas LH	794.551.750,00	759.652.700,00	95,61	3.704.180.600,00
Dispendukcapil	74.506.381,00	74.480.000,00	99,96	836.277.650,00
Dinas Perhubungan	1.410.713.678,00	1.392.407.274,00	98,70	2.531.153.000,00
Dinas Infokom	156.500.000,00	153.440.000,00	98,04	759.037.500,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	58.700.000,00	57.996.900,00	98,80	530.202.700,00
Dinas Budparpora	17.800.000,00	17.300.000,00	97,19	157.497.980,00
Dinas Perpustakaan	12.210.000,00	11.400.000,00	93,37	1.049.639.070,00
Dinas Perdagangan	143.168.000,00	137.445.700,00	96,00	273.681.600,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	975.000,00
Bagian Organisasi	26.267.344,00	26.267.344,00	100,00	0,00
Bagian Umum	1.504.255.320,00	1.474.385.000,00	98,01	20.057.377.490,00
Bagian Hukum	247.881.926,00	245.459.830,00	99,02	6.451.875,00
Bagian Perekkesra	3.265.065,00	2.865.000,00	87,75	56.295.000,00
Bagian Adbang	48.277.600,00	48.257.600,00	99,96	119.646.600,00
Sekretariat DPRD	185.433.000,00	150.927.000,00	81,39	291.763.037,00
BPK SDM	242.218.145,00	201.890.000,00	83,35	0,00
BKAD	855.100.000,00	842.070.000,00	98,48	178.000.000,00

Modal Peralatan dan Mesin OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bependa	254.870.280,00	244.700.000,00	96,01	177.300.000,00
BAPELITBANGDA	45.077.300,00	43.925.000,00	97,44	598.494.900,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	1.356.918.000,00
Kec Kartoharjo	173.508.960,00	171.316.142,00	98,74	980.790.734,00
Kec Manguharjo	147.685.500,00	146.125.720,00	98,94	784.393.845,00
Kec Taman	226.714.402,00	226.237.950,00	99,79	802.767.590,00
Bakesbangpol	68.572.703,00	67.871.300,00	98,98	0,00
Total	73.145.003.249,00	71.585.868.051,04	97,87	53.011.211.346,00

5.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Gedung dan Bangunan	83.254.511.750,00	80.940.539.683,65	97,22	72.843.838.757,97

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp80.940.539.683,65 atau 97,22% yang berarti Rp2.313.972.066,35 atau mencapai 2,78% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp83.254.511.750,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.03 Belanja modal Gedung dan Bangunan	83.254.511.750,00	80.940.539.683,65	97,22	72.843.838.757,97
5.2.3.03.01 Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	82.001.521.750,00	79.753.930.683,65	97,26	71.911.964.241,57

5.2.3.03.02 Belanja Modal Monumen	687.590.000,00	681.564.000,00	99,12	265.076.000,00
5.2.3.03.01 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	115.738.000,00
5.2.3.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	565.400.000,00	505.045.000,00	89,33	551.060.516,40

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.3.3.1

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Modal Gedung dan Bangunan OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	5.403.652.071,00	4.344.326.045,50	80,40	10.981.678.341,04
Dinas Kesehatan KB	24.630.114.480,00	24.557.084.208,74	99,70	5.075.788.557,71
Dinas PU TR	35.595.735.500,00	34.910.704.931,00	98,08	25.259.479.700,00
Dinas Perkim	10.763.571.789,00	10.648.663456,29	98,93	14.068.662.615,45
Dinas Satpol PP	300.000.000,00	250.860.057,57	83,62	0,00
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	36.630.000,00	36.000.000,00	98,28	146.345.691,00
Dinas LH	2.457.500.000,00	2.209.603.137,04	89,91	759.483.637,69
Dispendukcapil	216.450.000,00	212.520.600,00	98,18	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi	0,00	0,00	0,00	394.801.000,00
Perpustakaan & Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	957.523.441,96
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	214.666.000,00
Bapenda	19.286.250,00	19.086.250,00	98,96	149.774.400,00
BK & PSDM	0,00	0,00	0,00	190.763.000,00
Inspektorat	497.750.000,00	461.606.622,51	92,74	196.549.600,00

Modal Gedung dan Bangunan OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	3.902.496.585,12
Kec Manguharjo	3.275.821.660,00	3.232.120.375,00	98,67	5.904.131.076,00
Kec Taman	58.000.000,00	57.964.000,00	99,94	4.641.695.112,00
BAPELITBANGDA	0,00	0,00	0,00	0.00
Total	83.254.511.750,00	80.940.539.683,65	97,22	72.843.838.757,97

5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.036.113.165,00	62.832.477.443,00	98,12	103.137.296.907,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp62.832.477.443,00 atau mencapai 98,12% yang berarti Rp1.203.635.722,00 atau 1,88% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp64.036.113.165,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2.2.4
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.04.01 Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.036.113.165,00	62.832.477.443,00	98,12	103.137.296.907,00
5.2.04.01 Belanja modal Jalan dan jembatan	35.368.976.275,00	34.989.390.906,00	98,93	59.563.387.262,00
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air	24.934.457.040,00	24.239.146.850,00	97,21	43.115.947.645,00

Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi	3.157.850.000,00	3.125.017.187,00	98,96	457.962.000,00
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan	574.829.850,00	478.922.500,00	83,32	0,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.4.1
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan OPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	0,00	0,00	00,00	0,00
Dinas Kesehatan	574.829.850,00	478.922.500,00	83,32	425.106.000,00
Dinas PU TR	53.337.576.490,00	52.306.847.300,00	98,07	95.003.626.595,00
Dinas Perkim	695.000.000,00	689.991.000,00	99,28	1.072.533.772,00
Dinas Satpol PP	202.130.000,00	201.512.000,00	99,69	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	00,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	206.031.000,00	204.129.475,00	99,08	525.135.000,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	32.856.000,00
Bapenda	22.200.000,00	20.000.000,00	90,09	0,00
Kecamatan Manguharjo	0,00	0,00	00,00	0,00
Kecamatan Kartoharjo	4.430.391.947,00	4.385.444.607,00	98,99	2.584.059.786,00
Kecamatan Taman	4.567.953.878,00	4.545.630.561,00	99,51	3.493.979.754,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	00,00	0,00
Total	64.036.113.165,00	62.832.477.443,00	98,12	103.137.296.907,00

5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Aset Tetap Lainnya	2.436.647.041,00	2.431.417.485,00	99,79	3.442.102.691,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.431.417.485,00 atau mencapai 99,79% yang berarti Rp5.229.556,00 atau 0,21% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.436.647.041,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Belanja Modal Aset tetap lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.05 Belanja modal Aset Tetap lainnya	2.436.647.041,00	2.431.417.485,00	99,79	3.442.102.691,00
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan	135.737.440,00	73.487.150,00	54,14	145.110.700,00
5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga	298.400.000,00	263.074.464,00	88,16	244.755.000,00
5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	00,00	29.342.850,00
5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	145.000.000,00	43.465.000,00	29,98	1.129.431.000,00
5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.857.509.601,00	2.051.390.871,00	110,44	1.451.797.553,00
5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	00,00	441.665.588,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2.2.5.1
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Modal Aset Lainnya SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	2.051.058.601,00	2.181.483.335,00	106,36	1.456.597.553,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	00,00	441.665.588,00
Dinas PU TR	120.000.000,00	19.545.000,00	16,29	100.000.000,00
Dinas Perkim	0,00	0,00	00,00	748.883.000,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	43.847.000,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan & Olah Raga	0,00	0,00	0,00	244.755.000,00
Bagian Pereksos	175.000.000,00	141.000.000,00	80,57	0,00
Dinas Komunikasi	25.000.000,00	23.920.000,00	95,68	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	98.901.000,00
Kecamatan Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	29.342.850,00
Dinas Perpustakaan	65.588.440,00	65.469.150,00	99,82	278.110.700,00
Total	2.436.647.041,00	2.431.417.485,00	99,79	3.442.102.691,00

5.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

5.2.3.1. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Tidak Terduga	4.017.860.642,00	1.238.717.822,00	30,83	2.502.082.962,00

Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp1.238.717.822,00 atau mencapai 30,83% yang berarti Rp2.779.142.820,00 atau 69,17% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.017.860.642,00.

Perincian realisasi belanja tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2.3.1
Belanja Tidak Terduga

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3
Belanja Barang	551.363.000,00	262.205.712,00
Belanja Jasa	0,00	1.708.752.850,00
Belanja Perjalanan	0,00	321.160.000,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Pengembalian	641.753.696,00	209.964.400,00
Pengembalian Pajak	26.011.126,00	0,00
Pengembalian Retribusi	17.576.000,00	0,00
Pengembalian ganti rugi sewa tanah	2.014.000,00	0,00
Total	1.238.717.822,00	2.502.082.962,00

Perincian Dinas yang menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga tersaji pada table dibawah ini:

Tabel 5.2.3.2
OPD yang menggunakan Beban Tidak Terduga

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
1	2
Dinas Pendidikan	640.715.446,00
Dinas Pekerjaan Umum	5.176.000,00
Dinas Perhubungan	13.159.750,00
Dinas Kebudayaan	12.400.000,00
Dinas Perdagangan	551.363.000,00
BKAD	1.038.250,00
Kelurahan Klegen	2.014.000,00
Badan Pendapatan Daerah	12.851.376,00
Total	1.238.717.822,00

5.3. PEMBIAYAAN

5.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

5.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
SiLPA	191.243.672.447,00	191.243.672.447,43	100,00	295.936.667.818,14

Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 sebesar Rp191.243.672.447,43. dibandingkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2022 sebesar Rp295.936.667.818,14 terjadi penurunan sebesar Rp104.692.995.370,71 atau lebih rendah 42,26%.

5.3.1.2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	1.198.000,00	100,00	800.000,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2023 terdapat realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp1.198.000,00

5 . 4 . SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	3	5
SiLPA	113.953.605.152,46	191.243.672.447,43

Jumlah tersebut merupakan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Perincian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3
Surplus (Defisit)	(77.291.265.294,97)	(104.693.795.370,71)
Pembiayaan Neto	191.244.870.447,43	295.937.467.818,14
Total	113.953.605.152,46	191.243.672.447,43

BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

6.1. SAL Awal

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	191.243.672.447,43	295.936.667.818,14

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa anggaran lebih (SAL) milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 1 Januari tahun 2023 dan pada tanggal 1 Januari 2022.

6.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	191.243.672.447,43	295.936.667.818,14

Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

6.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Sisa lebih /kurang pembiayaan tahun berjalan	113.953.605.152,46	191.243.672.447,43

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan yang berasal dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan netto tahun berjalan.

6.4. SAL Akhir

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
SAL Akhir	113.953.605.152,46	191.243.672.447,43

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. SAL akhir diperoleh dari SAL awal, penggunaan SAL, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya, dan lain-lain.

BAB VII PENJELASAN POS-POS NERACA

7.1. ASET

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset	2.829.387.208.598,82	2.813.637.454.500,29

Jumlah aset merupakan jumlah saldo aset milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.829.387.208.598,82 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.813.637.454.500,29. Apabila dibandingkan antara jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.829.387.208.598,82 dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.813.637.454.500,29. terjadi penurunan sebesar Rp15.749.754.098,53.

Perincian aset milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1
Aset Pemerintah

Aset	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset lancar	146.619.826.286,07	220.864.402.624,77
Investasi	155.818.150.212,56	155.830.753.717,25
Aset Tetap	2.381.738.610.915,86	2.304.956.764.976,94
Aset Lainnya	145.210.621.184,33	131.985.533.181,33
Total	2.829.387.208.598,82	2.813.637.454.500,29

7.1.1. ASET LANCAR

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Lancar	146.619.826.286,07	220.864.402.624,77

Jumlah aset lancar merupakan jumlah saldo aset lancar milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp146.619.826.286,07 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp220.864.402.624,77. Apabila dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp146.619.826.286,07 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp220.864.402.624,77 terjadi penurunan sebesar Rp74.244.576.338,70.

Perincian aset lancar milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1
Aset Lancar

Aset Lancar	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Kas di kas daerah	67.071.188.644,14	119.817.397.122,23
2. Deposito Berjangka 1 Bulan	0,00	0,00
3. Kas di bendahara pengeluaran	601.132.820,00	0,00
4. Kas di bendahara penerimaan	10.230.722,00	10.236.077,00
5. Kas di BLUD RSUD	38.758.539.712,32	64.695.549.324,61
6. Kas di BLUD Puskesmas	7.503.164.480,85	6.254.896.034,24
7. Kas Lainnya BOS	187.018.419,15	474.385.599,35
8. Kas Lainnya BOP	0,00	0,00
9. Kas Lainnya BOK	423.463.174,00	0,00
9. Piutang Pajak Daerah	11.995.973.053,35	11.226.316.634,00
10. Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.296.540.965,20)	(5.208.614.573,93)
11. Piutang Retribusi Daerah	4.625.019.057,00	7.217.998.007,00
12. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(2.068.159.551,60)	(2.959.719.866,00)
13. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	110.358.980,00	121.517.355,00
14. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(110.358.980,00)	(121.517.355,00)
15. Piutang Lain-lain	8.072.837.702,85	6.558.726.241,18
16. Penyisihan Piutang Lain-Lain	(165.826.573,75)	(151.600.739,41)
17. Persediaan	13.537.733.840,96	12.928.832.764,50
18. Belanja dibayar dimuka	364.051.750,00	0,00
Total	146.619.826.286,07	220.864.402.624,77

7.1.1.1. Kas dan Bank

7.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	67.071.188.644,14	119.817.397.122,23

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bank Rekening Kas Umum (RKUD) Daerah Kota Madiun pada Bank Jatim Cabang Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp67.071.188.644,14 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp119.817.397.122,23. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp67.071.188.644,14 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp119.817.397.122,23 terjadi penurunan sebesar Rp52.746.208.478,07.

Kas di kas daerah merupakan saldo rekening Bank Jatim 0051021333 RKUD Kota Madiun. Perincian kas di kas daerah milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp67.071.188.644,14 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp119.817.397.122,23 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.1
Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
1. Bank Jatim 0051021333	67.071.188.644,14	119.817.397.122,23
Total	67.071.188.644,14	119.817.397.122,23

Kas di Kas Daerah terdiri dari kas yang tidak ditentukan penggunaannya dan kas yang telah ditentukan penggunaannya (*mandatory*). Perincian kas di kas daerah sesuai peruntukannya tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.1
Rincian Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Kas yang tidak di tentukan penggunaannya	61.881.641.683,14	106.742.828.817,23
2. Kas yang ditentukan penggunaannya (mandatory)	5.189.546.961,00	13.074.568.305,00
- DBH CHT	4.569.517.376,00	4.639.365.839,00
- DAK Non Fisik Total	620.029.585,00	8.435.202.466,00
a. Tunjangan Profesi Guru (TPG)	595.344.300,00	7.690.611.100,00
b. Tunjangan Non Profesi Guru (TPG)	24.685.285,00	73.000.000,00
c. DAK Non Fisik	0,00	671.591.366,00
Total	67.071.188.644,14	119.817.397.122,23

7.1.1.1.2. Deposito

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Deposito	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah deposito berjangka 1 bulan Pemerintah Kota Madiun pada Bank Jatim Cabang Madiun pada tanggal 31 Desember 2023.

7.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	601.132.820,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas di bendahara pengeluaran BKAD yang berasal dari penerbitan SP2D tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor SP2D 1697/LS/2023, SP2D 1698/LS/2023, SP2D 1709/LS/2023 dan SP2D Nomor 1710/LS/2023 untuk pembayaran BPJS Bulan Juli sd Bulan Desember 2023 yang telah terkirim ke Bank Jatim dan baru ditransfer ke rekening BPJS di tanggal 2 Januari 2024. Saldo Kas Bendahara Pengeluaran. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp601.132.820,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp601.132.820,00. Seluruh OPD telah melaksanakan cash opname pada tanggal 31 Desember 2023 untuk mengetahui posisi kas dibendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2023. Kas dibendahara pengeluaran terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran OPD, Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu SMPN, SDN, Puskesmas, Kelurahan, Kas di Bendahara BTT dan Rekening Penampungan Bantuan Langsung Tunai Daerah Pemerintah Kota Madiun. Rekening bendahara pengeluaran telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 900-401.202/306/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 900-401.202/263/2022 tentang Penunjukan Bendahara Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 dan dan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 400-401.202/313/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Bantuan Langsung Tunai Daerah Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023.

7.1.1.1.4. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	10.230.722,00	10.236.077,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas di bendahara penerimaan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun atas pendapatan yang telah diterima dan belum disetor ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.230.722,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.236.077,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di Bendahara Penerimaan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.230.722,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.236.077,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.355. Seluruh OPD telah melaksanakan *cash opname* pada tanggal 31 Desember 2023 untuk mengetahui posisi kas dibendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2023. Kas dibendahara penerimaan terdiri dari saldo kas tunai kas di bendahara penerimaan OPD dan saldo kas di rekening penampungan penerimaan. Rekening penampungan penerimaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 400-401.203/224/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Pajak Daerah sebagai Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun dan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 900-401.202/363/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Retribusi Parkir, Pengujian Kendaraan Bermotor dan E-tilang pada Dinas Perhubungan, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 400-401.203/224/2021 tentang Penunjukan Bank sebagai Penempatan Rekening Penampungan Pajak Daerah sebagai Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Madiun pada Badan Pendapatan Daerah, dan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 400-401.202/312/2021 tentang Penunjukan Bank Rekening Penampungan Retribusi Pelayanan Pasar Secara Elektronik (E-Retribusi) Pemerintah Kota Madiun pada Dinas Perdagangan. Rincian kas di bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.230.722,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.236.077,00 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.4
Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Bendahara Penerimaan RSUD	4.975.722,00	2.574.077,00
2. Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	5.255.000,00	7.662.000,00
Total	10.230.722,00	10.236.077,00

7.1.1.1.5. Kas di BLUD RSUD

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di BLUD RSUD	38.758.539.712,32	64.695.549.324,61

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD milik Pemerintah Kota Madiun yang merupakan saldo Kas di Bank pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp38.758.539.712,32 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp64.695.549.324,61 Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di BLUD RSUD pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp38.758.539.712,32 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp64.695.549.324,61 terjadi penurunan sebesar Rp25.936.009.612,29.

Perincian kas di BLUD RSUD Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp38.758.539.712,32 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp64.695.549.324,61 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.5
Kas BLUD RSUD

Kas di BLUD RSUD	Nomer Rekening	Tahun 2023	Tahun 2022
1. Giro Bank Jatim	0051035160	38.500.313.570,14	54.461.230.475,85
2. Tabungan Bank Mandiri	171-00-1250000-8	103.148.530,38	80.171.524,96
3. Tabungan BRI	0045-01-001272-56-9	102.945.401,80	102.259.257,80
4. Tabungan BNI	8125909889	52.132.210,00	51.888.066,00
5. Tabungan Muamalat	7450015607	0,00	0,00
6. Deposito Bank Mandiri	AF354424	0,00	2.000.000.000,00
7. Deposito BNI	PAB1847464	0,00	2.000.000.000,00
8. Deposito Bank BTN	A2111867	0,00	4.000.000.000,00
9. Deposito Bank BSI	1088930	0,00	2.000.000.000,00
Total		38.758.539.712,32	64.695.549.324,61

7.1.1.1.6. Kas di BLUD Puskesmas/JKN

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di BLUD	7.503.164.480,85	6.254.896.034,24

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas BLUD Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang terdiri dari saldo Kas di Bank pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7.503.164.480,85 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.254.896.034,24.

Apabila dibandingkan antara jumlah Kas di BLUD Puskesmas/JKN pada tanggal 31 Desember 2023 Rp7.503.164.480,85 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.254.896.034,24 terjadi kenaikan sebesar Rp1.248.268.446,61.

Perincian kas di kas BLUD Puskesmas milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7.503.164.480,85 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.254.896.034,24 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.6
Kas BLUD Puskesmas

Kas di BLUD Puskesmas	Nomer Rekening	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. BLUD Puskesmas Ngegong	0051036131	764.180.165,12	708.009.270,51
2. BLUD Puskesmas Manguharjo	0051036123	1.692.218.890,43	1.251.913.547,47
3. BLUD Puskesmas Banjarejo	0051036158	2.057.882.759,58	1.968.876.512,77
4. BLUD Puskesmas Demangan	0051036140	720.386.632,28	466.279.812,33
5. BLUD Puskesmas Sukosari	0051036166	1.082.810.835,20	968.258.539,85
6. BLUD Puskesmas Tawangrejo	0051036174	1.185.685.198,24	891.558.351,31
Total		7.503.164.480,85	6.254.896.034,24

7.1.1.1.7. Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas Lainnya	610.481.593,15	474.385.599,35

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas lainnya yang berasal dari sisa kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN, SMPN, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp610.481.593,15 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 474.385.599,35. Apabila dibandingkan antara jumlah Kas Lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp610.481.593,15 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp474.385.599,35. terjadi kenaikan sebesar Rp136.095.993,80.

Di tahun 2023 ada beberapa sekolah dasar yang *diregrouping* dan berkewajiban mengembalikan Dana BOS berdasarkan:

1. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-19/PK/PK.3/2023 Tanggal 7 Juni 2023 Tentang Pemantauan Pengembalian Dana BOSP TA 2020-2022;

2. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 420-401.101/282/2022 Tentang Perubahan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri di Kota Madiun serta Surat Dinas Pendidikan Nomor: 420/3740/401.101/2023 perihal Permohonan Verifikasi dan Validasi Pengembalian Dana BOSP.

Hal tersebut telah ditindaklanjuti berupa pengembalian dana BOS sebesar Rp1.588.088,06 ke Kasda, yaitu terdiri atas pengembalian dari SDN 03 Kartoharjo sebesar Rp750.811,14; SDN 02 Rejomulyo sebesar Rp196.561,40; SDN 02 Nambangan Kidul sebesar Rp390.304,97; dan SDN 01 Pangongangan sebesar Rp250.410,55.

Pengembalian dana BOS Tahap I sebesar Rp101.019.166,00, yaitu pengembalian dari SDN 03 Kartoharjo sebesar Rp23.999.298,00; SDN 02 Rejomulyo sebesar Rp20.275.173,00; SDN 02 Nambangan Kidul sebesar Rp31.499.695,00; dan SDN 01 Pangongangan sebesar Rp25.245.000,00.

1. Pengembalian BOS Kinerja pada SDN 02 Klegen sebesar Rp80.000.000,00 karena pergantian Satuan Pendidik PSP Angkatan III berdasarkan:
 - a) Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 3574/CI/DM.00.02/2023 perihal Pergantian Satuan Pendidikan PSP Angkatan III;
 - b) Surat Dinas Pendidikan Nomor: 420/4190/401.101/2023 perihal Permohonan Verifikasi dan Validasi Pengembalian Dana BOSP Reguler Tahap I dan BOSP Kinerja 2023.
2. Pengembalian BOS Kinerja karena telah dilaksanakan *regrouping* pada SDN 03 Kartoharjo sebesar Rp22.500.000 berdasarkan:
 - a) Keputusan Walikota Madiun Nomor: 420-401.101/282/2022 Tentang Perubahan Dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri di Kota Madiun
 - b) Surat Dinas Pendidikan Nomor: 420/4967/401.101/2023 perihal Permohonan Verifikasi dan Validasi Pengembalian Dana BOSP Reguler Tahap II 2023 dan BOSP Kinerja 2023.

Seluruh sekolah negeri telah melaksanakan *cash opname* pada tanggal 31 Desember 2023 untuk mengetahui posisi kas di bendahara pengeluaran BOS dan BOP PAUD pada tanggal 31 Desember 2023. Rekening Bendahara Pengeluaran BOS sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 420-401.101/296/2022 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

Perincian kas di kas lainnya milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar sebesar Rp610.481.593,15 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp474.385.599,35 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.1.7

Kas Lainnya

Kas Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Dana BOS SDN	40.111.846,78	105.196.147,98
2. Dana BOS SMPN	146.906.572,37	360.397.741,37,00
3. Kas Lainnya BOP PAUD	0,00	0,00
4. Kas Lainnya BOK	423.463.174,00	0,00
5. Utang PFK		8.791.710,00
Total	610.481.593,15	474.385.599,35

7.1.1.2. Piutang Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	11.995.973.053,35	11.226.316.634,00

Jumlah saldo piutang pajak daerah tersebut merupakan jumlah tagihan pajak daerah yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp11.995.973.053,35 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.226.316.634,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang Pajak Daerah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp11.995.973.053,35 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.226.316.634,00 terjadi kenaikan sebesar Rp769.654.419,35 atau sebesar 6,85%.

Perincian perubahan piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.995.973.053,35 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.226.316.634,00 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.2.a
Piutang Pajak Daerah

Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023
Piutang Pajak Daerah	1	2	3	4 = (1 + 2 - 3)
Pajak hotel	96.796.634,00	8.034.758.525,00	8.130.855.159,00	700.000,00

Pajak restoran	500.544.088,00	22.941.828.006,00	23.343.654.772,00	98.717.322,00
Pajak hiburan	17.708.500,00	1.828.328.751 00	1.845.737.251,00	300.000,00
Pajak reklame	122.235.590,00	2.377.338.769,00	2.304.955.619,00	194.618.740,00
Pajak penerangan jalan	9.192.539,00	25.674.378.651,18	23.482.333.529,83	2.201.237.660,35
Pajak parkir	1.072.000,00	1.700.245.616,00	1.683.862.056,00	17.455.560,00
Pajak air tanah	1.483.530,00	321.693.220,84	318.395.998,84	4.780.752,00
PBB	10.423.184.353,00	22.885.528.900,00	23.884.649.634,00	9.424.063.619,00
BPHTB	54.099.400,00	28.519.672.350,00	28.519.672.350,00	54.099.400,00
Total	11.226.316.634,00	114.283.772.789,02	113.514.116.369,67	11.995.973.053,35
Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023				4.296.540.965,20
Piutang Pajak Daerah Neto Per 31 Desember 2023				7.699.432.088,15

1. Pajak Hotel

Pajak hotel terdiri dari hotel, rumah penginapan dan rumah kos. Piutang pajak hotel sampai dengan 31 Desember 2023 memiliki piutang sebesar Rp700.000,00. Piutang tersebut merupakan piutang pajak rumah kos dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang tahun 2020 sebesar Rp160.000,00
- Piutang tahun 2021 sebesar Rp360.000,00
- Piutang tahun 2022 sebesar Rp180.000,00

Pada tanggal 11 September 2023 terdapat uji coba pembayaran memakai Qris pada pajak hotel sebesar Rp1.000,00. Uji coba ini menambah realisasi pajak hotel akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak hotel.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran terdiri dari restoran dan catering. Piutang pajak restoran per 31 Desember 2023 sebesar Rp98.717.322,00. Dari total piutang tersebut terdiri dari piutang pajak restoran sebesar Rp53.028.335,00 dan piutang jasa boga/catering sebesar Rp45.688.987,00.

- Tanggal 16 Juni 2023 terbit Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 973-401.203/104/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dimana salah satunya terdapat penghapusan piutang pajak restoran sebesar Rp70.540.500,00 yang terdiri dari piutang pajak restoran:
 - a. Tahun 2010 sebesar Rp4.706.000,00;

- b. Tahun 2011 sebesar Rp1.334.500,00;
 - c. Tahun 2012 sebesar Rp64.200.000,00;
 - d. Tahun 2016 sebesar Rp150.000,00;
 - e. Tahun 2017 sebesar Rp150.000,00.
- Pada tanggal 11 September 2023 terdapat uji coba pembayaran memakai *Qris* pada pajak jasa boga/catering sebesar Rp1.000,00. Uji coba ini menambah realisasi pajak restoran akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak restoran.

3. Pajak Hiburan

Saldo piutang pajak hiburan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp300.000,00. Piutang pajak tersebut merupakan piutang pajak tahun 2022 pada wajib pajak Cave Diva, Jl. Mancung Sari.

- Tanggal 16 Juni 2023 terbit Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 973-401.203/104/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dimana salah satunya terdapat penghapusan piutang pajak hiburan sebesar Rp14.565.000,00 yang terdiri dari piutang pajak hiburan:
- a. Tahun 2010 sebesar Rp12.225.000,00
 - b. Tahun 2011 sebesar Rp1.665.000,00
 - c. Tahun 2012 sebesar Rp675.000,00
- Pada tanggal 11 September 2023 terdapat uji coba pembayaran memakai *Qris* pada pajak hiburan tontonan film sebesar Rp1.000,00. Uji coba ini menambah realisasi pajak hiburan akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak hiburan.

3. Pajak Reklame

Piutang pajak reklame sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp194.618.740,00.

- Tanggal 16 Juni 2023 terbit Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 973-401.203/104/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dimana salah satunya terdapat penghapusan piutang pajak reklame sebesar Rp18.262.380,00 yang terdiri dari piutang pajak reklame:
- a. Tahun 2010 sebesar Rp3.337.900,00;
 - b. Tahun 2011 sebesar Rp355.000,00;
 - c. Tahun 2012 sebesar Rp856.500,00;
 - d. Tahun 2015 sebesar Rp1.611.500,00;
 - e. Tahun 2016 sebesar Rp5.698.200,00;
 - f. Tahun 2017 sebesar Rp6.403.280,00.

- Pada tanggal 11 September 2023 terdapat uji coba pembayaran memakai *Qris* pada pajak hiburan tontonan film sebesar Rp1.075,00. Uji coba ini menambah realisasi pajak reklame akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak reklame.
4. Pajak Penerangan Jalan
- Piutang pajak penerangan jalan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.201.237.660,35 Piutang ini adalah piutang tahun 2022 sebesar Rp3.007.275,00 dan piutang tahun 2023 sebesar Rp2.198.230.385,35.
- Pada tanggal 11 September 2023 terdapat uji coba pembayaran memakai *Qris* pada pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp10.547,00. Uji coba ini menambah realisasi pajak penerangan jalan akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak penerangan jalan.
5. Pajak Parkir
- Piutang pajak parkir per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.455.560,00 yang merupakan piutang pajak dari hasil SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar) yang diterbitkan tahun 2023 pada wajib pajak Jatim Parking Center Jl. Dr. Soetomo No. 53 Kota Madiun untuk masa pajak April 2022 s/d Desember 2022.
- Pada tanggal 11 September 2023 terdapat uji coba pembayaran memakai *Qris* pada pajak parkir sebesar Rp1.010,00. Uji coba ini menambah realisasi pajak parkir akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak parkir.
6. Pajak Air Tanah
- Piutang pajak Air tanah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.780.752,00.
- Pada tanggal 11 September 2023 terdapat uji coba pembayaran memakai *Qris* pada pajak air tanah sebesar Rp1.050,00. Uji coba ini menambah realisasi pajak air tanah akan tetapi tidak berpengaruh pada pengurangan piutang pajak air tanah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
- PBB mempunyai piutang sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.424.063.619,00.
- SPPT PBB yang terbit di tahun 2023 sebesar Rp24.541.199.969,00
 - Terdapat mutasi pelayanan yang menambah jumlah SPPT PBB awal tahun yang telah diterbitkan sebesar Rp457.835.855,00 dan terdapat mutasi pelayanan yang mengurangi jumlah SPPT PBB awal tahun 2023 sebesar Rp215.664.109,00

- Terdapat pelunasan menggunakan STTS PBB yang mengurangi jumlah saldo awal sebesar Rp570.366,00
- Tanggal 16 Juni 2023 terbit Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 973-401.203/104/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dimana salah satunya terdapat penghapusan piutang PBB tahun 2002 s/d 2017 sebesar Rp1.997.624.611,00
- Terdapat realisasi piutang tahun 2002 s/d 2017 yang telah dilakukan penghapusan yang dapat mengurangi nominal penghapusan piutang pajak daerah yaitu sebesar Rp100.352.162,00.

8. Pajak BPHTB

Pajak BPHTB mempunyai piutang sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp54.099.400,00 yang terdiri dari piutang dari hasil terbitnya SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar) untuk tahun:

- ✓ 2021 sebesar Rp51.299.400,00 dan,
- ✓ 2022 sebesar Rp2.800.000,00

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang Lancar	10%
3	Diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.1.2.b
Umur Piutang Pajak Daerah

Klasifikasi Umur Piutang	< 1 tahun	> 1 th< 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Pajak hotel	0,00	180.000,00	520.000,00	700.000,00
Pajak restoran	0,00	87.524.057,00	11.193.265,00	98.717.322,00
Pajak hiburan	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Pajak reklame	125.425.230,00	11.268.150,00	57.925.360,00	194.618.740,00
Pajak penerangan jalan	2.198.230.385,35	3.007.275,00	0,00	2.201.237.660,35
Pajak parkir	17.455.560,00	0,00	0,00	17.455.560,00
Pajak air tanah	3.297.222,00	1.304.814,00	178.716,00	4.780.752,00
PBB	3.460.446.913,00	2.063.199.405,00	3.900.417.301,00	9.424.063.619,00
BPHTB	0,00	2.800.000,00	51.299.400,00	54.099.400,00
	5.804.855.310,35	2.169.583.701,00	4.021.534.042,00	11.995.973.053,35
Penyisihan Piutang	1%	10%	100%	
Penyisihan pajak	58.048.553,10	216.958.370,10	4.021.534.042,00	4.296.540.965,20
	5.746.806.757,25	1.952.625.330,90	0,00	7.699.432.088,15

7.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Retribusi Daerah	4.625.019.057,00	7.217.998.007,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang belum tertagih dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.625.019.057,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp7.217.998.0007,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang Retribusi Daerah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.625.019.057,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp7.217.998.0007,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.592.978.950,00.

Perincian perubahan piutang retribusi daerah per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.3
Piutang Retribusi Daerah

Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
Piutang Retribusi Daerah	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3

a. Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	7.217.998.007,00	11.295.836.565,00	13.888.815.515,00	4.625.019.057,00
c. Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Piutang Retribusi Daerah 2023	7.217.998.007,00	11.295.836.565,00	13.888.815.515,00	4.625.019.057,00
			Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 2023	(2.068.159.551,60)
			Piutang Retribusi Daerah Netto 2023	2.556.859.505,40

Tabel 7.1.1.3.a
Piutang Retribusi OPD
Per 31 Desember 2023

Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Piutang Retribusi Daerah				
1. Dinas Perumahan dan Pemukiman	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
a. Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
c. Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dinas Komunikasi dan Informasi	3.598.000,00	0,00	3.598.000,00	0,00
a. Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	3.598.000,00	0,00	3.598.000,00	,00
c. Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dinas Budparpora	184.591.936,00	0,00	0,00	184.591.936,00
a. Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	184.591.936,00	0,00	0,00	184.591.936,00
c. Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. BKPSDM	0,00	216.125.000,00	176.450.000,00	39.675.000,00
a. Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	0,00	216.125.000,00	176.450.000,00	39.675.000,00
c. Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
4. BPKAD	1.924.099.651,00	3.481.290.039,00	3.681.041.699,00	1.724.347.991,00
a. Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	1.924.099.651,00	3.481.290.039,00	3.681.041.699,00	1.724.347.991,00
c. Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dinas Perdagangan	5.105.708.420,00	7.581.421.526,00	10.027.725.816,00	2.659.404.130,00
a. Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	5.105.708.420,00	7.581.421.526,00	10.027.725.816,00	2.659.404.130,00

c. Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah 2023	7.217.998.007,00	11.295.836.565,0	13.888.815.515,00	4.625.019.057,00
			Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 2023	(2.068.159.551,60)
			Piutang Retribusi Daerah Netto 2023	2.556.859.505,40

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang retribusi daerah per OPD per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.3.b
Umur Piutang Retribusi Daerah

Klasifikasi Umur Piutang	< 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Piutang Retribusi Daerah				
1. Dinas Perumahan, Pemukiman	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
2. Dinas Budparpora	0,00	0,00	184.591.936,00	184.591.936,00
3. BKPSDM	39.675.000,00	0,00	0,00	39.675.000,00
4. BKAD	1.366.126.840,00	10.821.600,00	347.399.551,00	1.724.347.991,00
5. Dinas Perdagangan	540.135.220,00	670.902.640,00	1.448.366.270,00	2.659.404.130,00
Total Piutang Retribusi 2023	1.962.937.060,00	681.724.240,00	1.980.357.757,00	4.625.019.057,00
Penyisihan Piutang Retribusi 2023	1%	10%	100%	
Penyisihan Piutang Retribusi 2023	(19.629.370,60)	(68.172.424,00)	(1.980.357.757,00)	(2.068.159.551,60)
Piutang Retribusi Netto 2023	1.943.307.689,40	613.551.816,00	0,00	2.556.859.505,40

7.1.1.4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	110.358.980,00	121.517.355,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp110.358.980,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp121.517.355,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp110.358.980,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp121.517.355,00 mengalami penurunan karena adanya realisasi piutang sebesar Rp11.158.375,00.

Tagihan penjualan angsuran tersebut merupakan tagihan atas penjualan bedak pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan yang telah jatuh tempo pada 31 Desember 2023.

Perincian perubahan bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2023 sebesar Rp110.358.980,00 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.4.a
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2023	121.517.355,00	0,00	11.158.375,00	110.358.980,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2023	0,00	0,00	0,00	(110.358.980,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto 2023				0,00

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.4.b
Umur Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2023

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	< 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Pasar Logam	0,00	0,00	36.816.850,00	36.816.850,00
Pasar Srijaya I	0,00	0,00	1.067.130,00	1.067.130,00
Pasar Srijaya II	0,00	0,00	46.603.000,00	46.603.000,00
Pasar Sleko	0,00	0,00	25.872.000,00	25.872.000,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2023	0,00	0,00	110.358.980,00	110.358.980,00
Penyisihan 2023	1%	10%	100%	
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2023	0,00	0,00	(110.358.980,00)	(110.358.980,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto 2023	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1.1.5. Piutang Lain-lain

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Lain-lain	8.072.837.702,85	6.558.726.241,18

Jumlah tersebut merupakan jumlah piutang lain-lain yang seharusnya diterima Pemerintah Kota Madiun tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.072.837.702,85 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.558.726.241,18. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang Lain – Lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.072.837.702,85 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.558.726.241,18 terjadi kenaikan sebesar Rp1.514.111.461,67.

Piutang lain-lain terdiri dari piutang bagian lancar investasi dana bergulir dan piutang atas klaim BLUD RSUD. Perincian perubahan piutang lain-lain per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.5.a
Piutang Lain Lain

Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
Piutang Lain-Lain	1	2	3	4 = (1 + 2 -3)
Bagian lancar investasi dana bergulir	86.882.300,00	0,00	1.198.000,00	85.684.300,00
Piutang BLUD	6.471.843.941,18	7.984.145.183,67	6.468.835.722,00	7.987.153.402,85
Piutang Lain-Lain 2023	6.558.726.241,18	7.984.145.183,67	6.470.033.722,00	8.072.837.702,85
			Penyisihan Piutang lain lain 2023	(165.826.573,75)
			Piutang Lain-Lain Netto 2023	7.907.011.129,10

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang lain-lain berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2023 tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.1.5.b
Umur Piutang Lain Lain

Klasifikasi Umur Piutang	< 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Piutang lain-lain				
Bagian lancar investasi dana bergulir	0,00	0,00	85.684.300,00	85.684.300,00
Piutang BLUD	7.984.145.183,67	3.008.219,18	0,00	7.987.153.402,85
Jumlah Piutang Lain-lain 2023	7.984.145.183,67	3.008.219,18	85.684.300,00	8.072.837.702,85

Penyisihan 2023	1%	10%	100%	
Penyisihan Piutang Lain-lain 2023	79.841.451,84	300.821,92	85.684.300,00	(165.826.573,75)
Piutang Lain-Lain Netto 2023	7.904.303.731,83	2.707.397,26	0,00	7.907.011.129,10

7.1.1.5.1. Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir	85.684.300,00	86.882.300,00

Jumlah tersebut merupakan saldo jumlah bagian lancar investasi dana bergulir yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi dari investasi dana bergulir tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp85.684.300,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp86.882.300,00. Apabila dibandingkan antara jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 Rp85.684.300,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp86.882.300,00 terjadi penurunan sebesar Rp1.198.000,00.

Perincian perubahan investasi dana bergulir per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.5.1.a
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir

Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir				
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2002	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2004	51.320.100,00	0,00	0,00	51.320.100,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2005	14.440.000,00	0,00	0,00	14.440.000,00
Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
Koperasi dan UKM Dana Bergulir 2006	17.362.200,00	0,00	1.198.000,00	16.164.200,00
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir 2023	86.882.300,00	0,00	1.198.000,00	85.684.300,00
	Penyisihan Bagian Lancar Invstasi Dana Bergulir 2023			(85.684.300,00)
	Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Netto 2023			0,00

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang lain-lain berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.5.1.b
Piutang Investasi Dana Bergulir

Klasifikasi Umur Piutang	< 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir				
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2002	0,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2004	0,00	0,00	51.320.100,00	51.320.100,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2005	0,00	0,00	14.440.000,00	14.440.000,00
Koperasi dan UKM Dana Bergulir 2006	0,00	0,00	16.164.200,00	16.164.200,00
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir 2023	0,00	0,00	85.684.300,00	85.684.300,00
Penyisihan 2023	1%	10%	100%	
Penyisihan bagian lancar investasi dana bergulir 2023	0,00	0,00	(85.684.300,00)	(85.684.300,00)
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Netto 2023	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1.1.5.2. Piutang BLUD

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang BLUD	7.987.153.402,85	6.471.843.941,18

Jumlah saldo piutang BLUD tersebut merupakan jumlah tagihan piutang BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.987.153.402,85 dan 31

Desember 2022 sebesar Rp6.471.843.941,18. Apabila dibandingkan antara jumlah Piutang BLUD pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7.987.153.402,85 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.471.843.941,18 terjadi kenaikan sebesar Rp1.515.309.461,67. Piutang BLUD terdiri dari Piutang BLUD pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

Perincian perubahan Piutang BLUD per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.5.2.a
Piutang BLUD

Perubahan Piutang BLUD	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
Puskesmas	10.507.100,00	17.182.100,00	10.507.100,00	17.182.100,00
RSUD	6.461.336.841,18	7.966.963.083,67	6.458.328.622,00	7.969.971.302,85
Piutang BLUD 2023	6.471.843.941,18	7.984.145.183,67	6.468.835.722,00	7.987.153.402,85
		Penyisihan Piutang BLUD 2023		(80.142.273,75)
		Piutang BLUD Netto 2023		7.907.011.129,10

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur Piutang BLUD per 31 Desember 2023 tersaji dibawah ini:

Tabel 7.1.1.5.2.b
Umur Piutang BLUD

Klasifikasi Umur Piutang BLUD	< 1 tahun	> 1 th< 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Puskesmas	17.182.100,00	0,00	0,00	0,00

RSUD	7.966.963.083,67	3.008.219,18	0,00	7.987.153.402,85
	7.984.145.183,67	3.008.219,18	0,00	7.987.153.402,85
Penyisihan 2023	1%	10%	100%	
Penyisihan piutang lain-lain	(79.841.451,84)	(300.821,92)	0,00	(80.142.273,75)
	7.904.303.731,83	2.707.397,26	0,00	7.907.011.129,10

7.1.1.6. Persediaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Persediaan	13.537.733.840,96	12.928.832.764,50

Jumlah tersebut merupakan jumlah persediaan yang masih tersisa berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) yang terdiri dari persediaan tak habis pakai, persediaan pakai habis dan persediaan bekas pakai pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp13.537.733.840,96 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.928.832.764,50. Apabila dibandingkan antara jumlah Persediaan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp13.537.733.840,96 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.928.832.764,50 terjadi kenaikan sebesar Rp608.901.076,46.

Setelah memperhitungkan persediaan kedaluwarsa yang belum dilakukan penghapusan pada tahun 2023. Persediaan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 terbagi menjadi persediaan tak habis pakai dan persediaan pakai habis.

Perincian saldo persediaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.537.733.840,96 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 12.928.832.764,50 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1.6.a
Persediaan

No	Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Persediaan Tak Habis Pakai	858.025.724,00	915.118.932,00
2	Persediaan Pakai Habis	12.679.708.116,96	12.013.713.832,50
3	Persediaan Bekas Pakai	0.00	0.00
	Jumlah	13.537.733.840,96	12.928.832.764,50

Perincian saldo persediaan tak habis pakai Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.1.6.b
Persediaan Tak Habis Pakai

Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Persediaan Tak Habis Pakai	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Permukiman	858.025.724,00	915.118.932,00
	Jumlah	858.025.724,00	915.118.932,00

Persediaan bahan pakai habis meliputi alat tulis kantor, barang cetakan, karcis, pakaian dinas, alat-alat kontrasepsi dan obat-obatan. Perincian persediaan bahan pakai habis per 31 Desember 2023 berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) sebagaimana tersaji dibawah ini.

Tabel 7.1.1.6.c
Persediaan Pakai Habis
Per 31 Desember 2023

Persediaan Bahan Pakai Habis	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
1 Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Dinas Kesehatan dan KB	10.058.137.583,00	10.932.672.447,96	10.058.137.583,00	10.932.672.447,96
3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.228.818.474,00	50.678.000,00	372.630.812,00	906.865.662,00
4 Dinas Perhubungan	175.225.000,00	0,00	54.700.000,00	120.525.000,00
5 Dinas Sosial	6.450.000,00	0,00	2.415.000,00	4.035.000,00
6 Bagian Umum	215.096.869,00	79.922.000,00	34.098.147,00	260.920.722,00
7 Bagian Hukum	12.590.500,00	0,00	7.822.500,00	4.768.000,00
8 Badan Pendapatan Daerah	17.511.650,00	0,00	12.953.600,00	4.558.050,00
9 Dinas Pertanian	276.625.563,50	201.167.151,50	56.155.677,00	421.637.038,00
10 Dinas Perdagangan	15.138.000,00	20.227.400,00	13.308.000,00	22.057.400,00
11 Sekretariat DPRD	8.120.193,00	1.668.797,00	8.120.193,00	1.668.797,00
Jumlah	12.013.713.832,50	11.286.335.796,46	10.620.341.512,00	12.679.708.116,96

7.1.1.7. Belanja Dibayar Dimuka

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Dibayar Dimuka	364.051.750,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Jumlah tersebut merupakan belanja asuransi yang telah dibayar tersebut memiliki masa manfaat 1 tahun terhitung sejak tanggal 16 Maret 2023 s.d 15 Maret 2024 sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kota

Madiun dengan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1976 Nomor: 027/PPK/059/401.202/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang meliputi polis asuransi kebakaran (*property all risk*), polis asuransi gempa bumi, dan polis asuransi kendaraan bermotor.

7.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Investasi Jangka Panjang	155.818.150.212,56	155.830.753.717,25

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi jangka panjang milik Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp155.818.150.212,56 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp155.830.753.717,25. Apabila dibandingkan antara jumlah Investasi Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp155.818.150.212,56 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp155.830.753.717,25 terjadi penurunan sebesar Rp12.603.504,69.

Perincian investasi jangka panjang Per 31 Desember 2023 sebesar Rp155.818.150.212,56 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp155.830.753.717,25 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.2
Investasi Jangka Panjang

No	Investasi Jangka Panjang	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Investasi Non Permanen	15.283.625.503,56	15.307.987.050,25
2	Investasi Permanen	140.534.524.709,00	140.522.766.667,00
	Jumlah	155.818.150.212,56	155.830.753.717,25

7.1.2.1. Investasi Non Permanen

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Investasi Non Permanen	15.283.625.503,56	15.307.987.050,25

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi *non permanen netto* setelah memperhitungkan cadangan penyisihan milik Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.050,25 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.307.987.050,25. Apabila dibandingkan antara

jumlah Investasi Non Permanen pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.050,25 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.307.987.050,25 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp24.361.546,69.

7.1.2.1.1. Investasi Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Investasi Dana Bergulir	15.283.625.503,56	15.307.987.050,25

Jumlah tersebut merupakan jumlah investasi non permanen kepada Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.503,56 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.307.987.050,25 yang terdiri dari modal yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemupukan modal setelah memperhitungkan penyisihan piutang LKK. Apabila dibandingkan antara jumlah Investasi Dana Bergulir pada tanggal 31 Desember 2023 Rp15.283.625.503,56 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.307.987.050,25 terjadi penurunan sebesar Rp24.361.546,69.

Perincian investasi dana bergulir LKK Per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.503,56 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.307.987.050,25 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.2.1.1.a
Investasi Dana Bergulir LKK

No	Investasi Dana Bergulir LKK	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Modal Pemerintah Kota Madiun	11.761.997.436,00	11.761.997.436,00
2	Modal Pemerintah Pusat dan Provinsi	1.161.342.067,00	1.161.342.067,00
3	Pemupukan Modal dari Laba Usaha	11.732.983.845,41	11.327.869.353,97
4	Koreksi selisih lebih/kurang	0,00	0,00
5	Laba / Rugi LKK Kota Madiun	762.194.165,48	748.401.433,61
6	Jumlah Investasi Dana Bergulir LKK	25.418.517.513,89	24.999.610.290,58
7	Cadangan Penyisihan Piutang LKK	(10.134.892.010,33)	(9.691.623.240,33)
8	Investasi Dana Bergulir LKK Netto	15.283.625.503,56	15.307.987.050,25

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perguliran nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang disajikan oleh Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.503,56. Nilai tersebut termasuk

modal yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, nilai pemupukan modal beserta Laba yang diperoleh LKK. Rincian laba berasal dari total LKK yang mendapatkan laba sebesar Rp781.305.467,48 dikurangi dengan LKK yang rugi sebesar Rp19.111.302,00 maka diperoleh laba keseluruhan sebesar Rp762.194.165,48 Selain itu, nilai penyisihan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.134.892.010,33. Perincian investasi non permanen-dana bergulir Per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.283.625.503,56 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.2.1.1.b
Investasi Non Permanen Dana Bergulir

	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
Dana Bergulir LKK				
Modal	12.923.339.503,00	0,00	0,00	12,923,339,503,00
Pemupukan Modal	11.327.869.353,97	510.139.386,84	(105.024.895,40)	11.732.983.845,41
Koreksi selisih lebih/kurang	0,00	0,00	0,00	0,00
Laba atau Rugi LKK	0,00	781.305.467,48	(19.111.302,00)	762.194.165,48
Dana Bergulir Tahun 2023	24.251.208.856,97	1.291.444.854,52	(124.136.197,40)	25.418.517.513,89
			Penyisihan Dana Bergulir LKK 2023	(10.134.892.010,3)
			Dana Bergulir LKK Neto 2023	15.283.625.503,56

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, investasi non permanen tahun 2020 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value (NRV)). LKK mengklasifikasikan pinjaman dana yang digulirkan kepada masyarakat sesuai kategori yaitu lancar, kurang lancar dan macet. Perincian investasi non permanen berupa investasi dana bergulir Per 31 Desember 2023 Rp15.283.625.503,56 tersaji di bawah ini.

Tabel 7.1.2.1.1.c
Investasi Non Permanen Dana Bergulir OPD
Per 31 Desember 2023

Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
Investasi Dana Bergulir LKK				
Modal	12.923.339.503,00			12.923.339.503,00
Kec Kartoharjo				

1. Kanigoro	2.097.256.015,45	139.060.755,33	-	2.236.316.770,78
2. Tawangrejo	48.772.345,00	980.111,00	-	49.752.456,00
3. Rejomulyo	54.012.122,00		(5.293.313,00)	48.718.809,00
4. Pilangbango	592.074.184,00	43.816.777,50	-	635.890.961,50
5. Oro-Oro Ombo	221.877.518,40	6.375.099,00	-	228.252.617,40
6. Sukosari	331.908.441,00	13.881.214,00	-	345.789.655,00
7. Kelun	672.207.545,33	19.307.707,61	-	691.515.252,94
8. Kartoharjo	399.504.523,80		(1.480.367,40)	398.024.156,40
9. Klegen	56.114.246,48	1.270.796,70	-	57.385.043,18
Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
Kec Manguharjo				
1. Ngegong	802.993.678,00	57.587.703,03	-	860.581.381,03
2. Sogaten	282.505.273,90	9.067.688,80	-	291.572.962,70
3. Madiun Lor	231.037.591,00		(17.923.507,00)	213.114.084,00
4. Patihan	179.094.061,00	6.529.472,00	-	185.623.533,00
5. Nambangan Kidul	682.321.795,90	21.275.244,00	-	703.597.039,90
6. Manguharjo	289.549.410,00	968.248,20	-	290.517.658,20
7. Pangongangan	229.568.660,00	4.829.176,80	-	234.397.836,80
8. Nambangan Lor	134.383.080,00	15.829.514,40	-	150.212.594,40
9. Winongo	118.059.682,00	4.524.240,00	-	122.583.922,00
Kec Taman				
1. Demangan	(10.538.599,00)		(3.197.216,00)	(13.735.815,00)
2. Taman	116.302.129,00	4.273.801,20	-	120.575.930,20
3. Kuncen	349.208.274,00	23.239.202,20	-	372.447.476,20
4. Banjarejo	601.200.979,50	16.149.384,60	-	617.350.364,10
5. Josenan	626.321.997,00	60.273.267,00	-	686.595.264,00
6. Kejuron	420.496.200,40	1.568.163,00	-	422.064.363,40
7. Mojorejo	1.239.853.960,22	39.651.266,87	-	1.279.505.227,09
8. Pandean	463.845.230,40	19.680.553,80	-	483.525.784,20
9. Manisrejo	97.939.009,00		(77.130.492,00)	20.808.517,00
Laba atau Rugi LKK Th. 2023		781.305.467,48	(19.111.302,00)	762.194.165,48
Investasi Dana Bergulir LKK 2023	24.251.208.856,97	1.291.444.854,52	(124.136.197,40)	25.418.517.513,89
			Penyisihan Investasi Dana Bergulir LKK 2023	(10.134.892.010,33)
			Investasi Dana Bergulir LKK Neto 2023	15.283.625.503,56

Penambahan dari pendistribusian Laba LKK tahun 2022 untuk Pemupukan Modal sebesar 60% yaitu Rp405.114.491,64. Sedangkan untuk 40% dari Laba LKK 2022 telah didistribusikan untuk insentif pengurus sebesar 12%, insentif pengawas sebesar 8%, insentif karyawan sebesar 10%, serta PAD sebesar 10%. Penambahan yang lainnya merupakan penambahan atas Laba LKK tahun 2023 sebesar Rp781.305.467,48 yang belum didistribusikan untuk pemupukan modal sebesar 60%, insentif pengurus sebesar 12%, insentif pengawas sebesar 8%, insentif karyawan sebesar 10%, serta PAD sebesar 10%. Pengurangan atas pendistribusian rugi LKK tahun

2022 sebesar Rp105.024.895,40,00 dan rugi LKK tahun 2023 sebesar Rp19.111.302,00. Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	100%

Khusus klarifikasi umur piutang investasi non permanen dana bergulir LKK penyisihan dilakukan berdasarkan jumlah piutang yang beredar pada LKK bukan berdasarkan jumlah nilai investasi non permanen LKK.

Tabel 7.1.2.1.1.d
Umur Piutang Investasi Non Permanen Dana Bergulir
Per 31 Desember 2023

Klasifikasi Umur Piutang	< 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Investasi Non Permanen Dana Bergulir LKK				
Kec Kartoharjo				
1. Kanigoro	1.091.852.000,00	170.362.000,00	495.641.000,00	1.757.855.000,00
2. Tawangrejo	3.900.000,00	-	531.075.870,00	534.975.870,00
3. Rejomulyo	15.698.000,00	17.854.000,00	271.320.700,00	304.872.700,00
4. Pilangbango	558.294.500,00	57.385.000,00	280.298.700,00	895.978.200,00
5. Oro-Oro Ombo	225.880.000,00	21.600.000,00	365.884.900,00	613.364.900,00
6. Sukosari	414.105.000,00	79.150.000,00	290.781.500,00	784.036.500,00
7. Kelun	302.818.500,00	122.440.000,00	628.976.400,00	1.054.234.900,00
8. Kartoharjo	74.700.000,00	10.700.000,00	189.481.300,00	274.881.300,00
9. Klegen	16.300.000,00	2.000.000,00	463.858.000,00	482.158.000,00
Kec Manguharjo				
1. Ngegong	560.076.666,67	174.201.666,67	343.801.775,00	1.078.080.108,33
2. Sogaten	297.886.000,00	103.346.000,00	215.025.445,00	616.257.445,00
3. Madiun Lor	211.534.500,00	160.018.500,00	327.972.150,00	699.525.150,00
4. Patihan	254.205.000,00	2.570.000,00	362.769.670,00	619.544.670,00
5. Nambangan Kidul	140.588.000,00	97.450.000,00	433.209.250,00	671.247.250,00
6. Manguharjo	206.450.000,00	20.700.000,00	540.495.000,00	767.645.000,00

7. Pangongangan	294.575.000,00	90.320.000,00	336.652.500,00	721.547.500,00
8. Nambangan Lor	274.750.000,00	17.300.000,00	404.952.802,00	697.002.802,00
9. Winongo	82.737.500,00	5.530.000,00	439.530.250,00	527.797.750,00
Kec Taman				
1. Demangan	-	-	113.598.500,00	113.598.500,00
2. Taman	137.208.000,00	64.469.500,00	313.359.500,00	515.037.000,00
3. Kuncen	286.070.000,00	59.270.000,00	163.369.300,00	508.709.300,00
4. Banjarejo	760.542.500,00	156.700.000,00	281.373.500,00	1.198.616.000,00
5. Josenan	915.340.000,00	27.650.000,00	82.715.000,00	1.025.705.000,00
Klasifikasi Umur Piutang	< 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
6. Kejuron	33.603.000,00	66.767.500,00	446.788.800,00	547.159.300,00
7. Mojorejo	840.140.000,00	262.090.000,00	413.993.500,00	1.516.223.500,00
8. Pandean	206.860.000,00	112.137.000,00	630.472.500,00	949.469.500,00
9. Manisrejo	41.194.000,00	54.150.000,00	489.405.000,00	584.749.000,00
Piutang Dana Bergulir LKK 2023	8.247.308.166,67	1.956.161.166,67	9.856.802.812,00	20.060.272.145,33
Penyisihan piutang LKK	1%	10%	100%	
Penyisihan piutang Dana Bergulir LKK 2023	82.473.081,67	195.616.116,67	9.856.802.812,00	10.134.892.010,33
Investasi Non Permanen Dana Bergulir LKK Neto 2023	8.164.835.085,00	1.760.545.050,00	0,00	9.925.380.135,00

7.1.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penyisihan Kerugian Dana Bergulir	10.134.892.010,33	9.691.623.240,33

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyisihan piutang dana bergulir investasi non permanen pada LKK di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada akhir tanggal 31 Desember 2023 Rp10.134.892.010,33 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.691.623.240,33 sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, menyatakan bahwa penyajian atas investasi non permanen berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value (NRV)). Berdasarkan perhitungan penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.134.892.010,33 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.691.623.240,33 sebagaimana tersebut di atas. Pemerintah Kota Madiun menyajikan nilai penyisihan tidak berdasarkan nilai investasi non permanen – investasi dana bergulir yang sesungguhnya yaitu dana yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dari perolehan modal pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Penyisihan tersebut dihitung

berdasarkan nilai piutang yang beredar pada seluruh LKK, bukan dihitung berdasarkan jumlah nilai investasi non permanen LKK. Apabila dibandingkan antara jumlah Penyisihan Dana Bergulir pada tanggal 31 Desember 2023 Rp10.134.892.010,33 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.691.623.240,33 terjadi kenaikan sebesar Rp443.268.770,00. Perincian penyisihan investasi non permanen berupa investasi dana bergulir Per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.134.892.010,33 dan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.691.623.240,33 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.2.1.2
Penyisihan Piutang Dana Bergulir

No	Penyisihan Piutang	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Lancar	82.473.081,67	87.511.983,33
2	Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	195.616.116,67	145.851.836,67
3	Penyisihan Piutang Macet	9.856.802.812,00	9.458.259.420,33
		10.134.892.010,33	9.691.623.240,33

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK No.1/LHP/XVIII.SBY/02/2022 dengan judul temuan Pengelolaan Investasi Non Permanen oleh Lembaga Keuangan Kelurahan Belum Memadai, BPK merekomendasikan untuk melakukan verifikasi dan validasi atas perjanjian pinjaman yang menjadi dasar pencatatan piutang LKK, maka dalam laporan ini kami sampaikan

Progress rencana aksi yang telah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan saat ini yaitu sudah memasuki tahapan konfrontir terhadap pinjaman yang tidak mengakui pinjamannya melalui lembar konfirmasi positif yang sudah diedarkan sebelumnya. Hingga saat ini sudah melaksanakan tahapan konfrontir di 8 (delapan) LKK dari 27 (dua puluh tujuh) LKK yaitu di LKK Kelurahan Patihan, LKK Kelurahan Kelun, LKK Kelurahan Pilangbango, LKK Kelurahan Josenan, LKK Kelurahan Kanigoro, LKK Kelurahan Banjarejo, LKK Kelurahan Mojorejo dan LKK Kelurahan Manguharjo.

7.1.2.2. Investasi Permanen

7.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemda

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
--------	--------------------	--------------------

Penyertaan Modal Pemda	140.534.524.709,00	140.522.766.667,00
------------------------	--------------------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Madiun yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp140.534.524.709,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp140.522.766.667,00. Apabila dibandingkan antara jumlah Penyertaan Modal Pemda pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp140.534.524.709,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp140.522.766.667,00 terjadi kenaikan sebesar Rp11.758.042,00.

Sedangkan investasi permanen pada Bank Jatim menggunakan *cost method* sehingga investasi dicatat sebesar modal yang ditempatkan pada Bank Jatim.

Perincian investasi permanen Per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.2.2.1.a
Investasi Permanen

Perubahan 2023	Saldo 1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2023
Penyertaan Modal Pemda				
PDAM	61.486.970.783,00	13.993.862.557,00	6.665.668.490,00	68.815.164.850,00
PD BPR Bank Daerah	38.830.077.525,00	0,00	8.563.089.401,00	30.266.988.124,00
PD Aneka Usaha	6.689.611.609,00	1.246.653.376,00	0,00	7.936.264.985,00
Bank Jatim	33.516.106.750,00	0,00	0,00	33.516.106.750,00
Jumlah	140.522.766.667,00	15.240.515.933,00	15.228.757.891,00	140.534.524.709,00

1. Perumda Air Minum (PDAM)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perumda PDAM ditetapkan modal disetor sebesar Rp50.000.000.000,00 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, dan pelayanan umum. Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2019 tentang PDAM, Pasal 70 ayat (2) laba bersih Perumda PDAM setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD sebesar 55%. Nilai penyertaan modal Perumda PDAM sebesar Rp68.815.164.848,00. Modal awal Perumda PDAM terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar

Rp200.099.148,50 ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan/ atau sumber-sumber lain yang sah.

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Perumda PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2020. Pencatatan investasi permanen pada Perumda PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun menggunakan *equity method* sehingga setiap tahun investasi permanen akan bertambah sebesar laba perusahaan dan akan berkurang sebesar laba yang telah didistribusikan sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 terdapat kelebihan pembayaran atas pembagian Tantiem dan Jasa Produksi atas laba tahun buku 2021 yang dibagikan tahun 2022 pada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari sebesar Rp1.125.593.570,61 dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 103 ayat (1) yang menyatakan bahwa Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun telah menindaklanjuti dan mengembalikan kelebihan sebesar Rp1.009.628.400,00.

Dan terdapat saldo piutang merupakan saldo audited sebelum terbit keputusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Saldo Tahun 2023 merupakan saldo yang sesuai Petikan putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/PN Sby Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan perkara pada terdakwa Pegawai Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

Tabel 7.1.2.2.1.b
Investasi Permanen PDAM
Per 31 Desember 2023

Uraian	Besaran Investasi (Rp)
Setoran modal dasar Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Daerah Kodya Dati II Madiun Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun, dan terakhir diubah dengan Perda No. 17 Tahun 2001	200,099,148.50
Anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 1993/1994 pasal No. 2P.0.172.01-002 disetor tanggal 04 Maret 1994	4.000.000,00

Anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 1994/1995 pasal No. 2P.5.202-002 disetor tanggal 20 Maret 1995	2.000.000,00
Pelunasan hutang RPD No. RDA-210/DP3/1994 dan Loan IBRD No. 4017-IND, PPP No. SLA-114/DP3/1999 oleh Pemerintah Kota Madiun dengan Surat Keputusan Walikota Madiun No. 4 tahun 2002	5.969.273.000,00
Bantuan Modal sesuai SK Walikota No. 18 Tahun 2002	2.000.000.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun sesuai BAC Nomor 650/73/413.401/2003 (antara Walikota dan Direktur PDAM)	486.610.000,00
Penyerahan Pengelolaan dan Pemanfaatan atas Hasil Pembangunan Sektor Air Bersih Kota Madiun (Berita Acara Pemerihintah Kota Madiun Nomor: 650/202/413.109/2000 tanggal 2 Januari 2001) terdiri dari : a. Pipa Distribusi PK 50 Ø sepanjang 2.757 m sebesar Rp49.148.000 b. Instalasi Gas Chlor 1 unit, pompa panel kapasitas 40 l/dt H=30 m lengkap dengan panel dan pompa 1 unit sebesar Rp99.990.000,00 c. Pompa submersible kapasitas 40l/dt H= 40 m, 2 unit dan motor protektor 2 unt sebesar Rp118.734.000,00	267.872.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun sesuai BAC 650/825/413.401/2003 (antara Walikota dan Direktur PDAM)	281.500.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun atas pengelolaan dan pemanfaatan atas hasil PDP SB-AB sesuai BA No. 650/001A/413.401/2005 (antara Walikota dan Direktur PDAM)	173,500,000.00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun yang dananya dari ABT Pasca Bencana Sektor Sumber Daya Air tahun anggaran 2004 Kota madiun Sesuai Berita Acara No. 050/1800a/401.109/2005 (antara Walikota dan Direktur PDAM) dengan perincian: a. Sumur Dalam Rp312.513.000,00 b. Pompa Submerble Rp 247.041.000,00 c. Jaringan Perpipaian Rp 1.087.614.000,00 d. Pemb R. Jaga Operator/Panel Pompa Rp 135.383.000,00 e. Instalasi Gas Chlor Rp 82.642.000,00 f. Pagar keliling Instalasi Sumur Rp 128.5356.000,00	1.993.728.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun berupa barang Sesuai Berita Acara No. 030/3180/401.024/2007 berupa: a. Alat-alat Pengolahan Air Rp 69.300.000,00 b. Jaringan Pipa Distribusi Rp 463.850.000,00 c. Sumur-sumur Rp 352.137.000,00	885.287.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun berupa hasil kegiatan pembangunan saluran pemukiman dan jaringan air bersih kota Madiun sesuai Berita Acara Nomor: 050/880/401.109/2008 denga rincian: a. Sumur-sumur Rp 515.999.000,00 b. Peralatan Pompa Rp 67.331.000,00 c. Alat-alat Pengolahan Air Rp 158.774.000,00 d. Jaringan pipa distribusi Rp 826.925.000,00	1.569.029.000,00
Berita Acara Serah Terima Konstruksi Jaringan Air Milik Pemerintah Kota Madiun No. 028/802/401.012/2009 tertanggal 2 September 2009 berupa: a. Pengadan dan Pemasangan jaringan pipa distribusi serta pembuatan MCK 7 (tujuh) Rp 434.220.000,00	1.692.665.000,00

b. Pengadaan generator set 150 kva	Rp 399.645.000,00	
c. Pembuatan sumur dalam lengkap dengan pompa q=30 liter per detik	Rp 287.900.000,00	
d. Sambungan rumah murah	Rp 570.900.000,00	
Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Milik Pemerintah Kota Madiun No. 030/1333/401.012/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 dengan rincian sebagai berikut:		2.158.667.500,00
a. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa Transmisi	Rp 632.478.000,00	
b. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Rp 830.742.000,00	
c. Pemasangan sambungan rumah	Rp 695.447.500,00	
Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/2246/401.109/2011 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK)		543.431.000,00
Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/785/401.109/2011 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK)		775.782.000,00
Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/211/401.101/2013 tentang Berita Acara Serah Terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK), Jaringan pipa Distribusi, Meter Air Induk dan Sambungan Rumah		1.089.956.000,00
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT: Koreksi penenyertaan modal pemerintah pusat per 31 desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:		8.094.640.563,00
a. Bantuan meter air dari Direktorat Teknik penyehatan departemen penyehatan umum sebesar	Rp30.970.000,00	
b Sarana dan prasarana air bersih dari PPSAB JATIM tahun 1972 sd 1979 sebesar	Rp127.445.650,00	
c. Sarana dan prasarana air bersih dari PPSAB JATIM tahun 1983 sd 1991 sebesar	Rp3.243.396.718,00	
d. Bantuan tangki air dari PPSB Jatim sebesar	Rp39.985.000,00	
e. Bantuan dari PPSPB tahun 1994 sebesar	Rp374.220,00	
f. Bantuan Pipa dari PPSAB 1997 tanggal 10 Agustus 1997 No.PDB-Jatim/30/97 sebesar	Rp26.164.575,00	
g. Bantuan Pipa GMS, SOCK GI dari PPSAB tanggal 29 Maret 1999 sebesar	Rp2.544.000,00	
h. Surat Perintah Mengeluarkan Barang dari kantor proyek peningkatan prasarana pemukiman Jawa Timur tertanggal 18 Oktober 1999 No.PL.03.01.03.Ca.13.01/X/99-006 berupa Pipa ACP 250 diameter 240 sebesar	Rp11.419.200,00	
i. Berita Acara tanggal 9 Nopember 1999 No.01/BA/P4/1999 Antara pemimpin proyek peningkatan prasarana pemukiman Jawa Timur dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun berupa sebuah sumur dalam sebesar	Rp180.744.300,00	
j. Berita Acara tanggal 31 Maret 2000 No.SPL.050/2238/413.109/2000 antara pemimpin proyek program penyediaan dan pengelolaan air bersih SPL OECF INP 23 LG tahun anggaran 1999/2000 dengan Walikota Madiun		

berupa :	
- Sebuah sumur dalam	Rp223.419.000
- Pipa distribusi ukuran 2Q dan 4Q	Rp329.373.000
- Pipa distribusi ukuran 4Q dan 6Q	Rp224.268.000
k. Kendaraan dinas truk tangki air minum bantuan Pemerintah Pusat Departemen Pekerjaan umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satker PKP air minum Jatim. Berita Acara Serah Terima Sementara No.02/BAST_PBS/PKP-AM/XII/2007 sebesar	Rp187.220.000
l. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Nomor,75/bast/pk-pam.jt/2009 tanggal 15 Desember 2009 antara kepala satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaan air minum Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pekerjaan perpipaan senilai	Rp1.819.915.900
m. Bukti pengeluaran barang No.157/mdn/pkp/-am/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 dari kantor Cipta Karya Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum Jawa Timur berupa perpipaan senilai	Rp14.238.700
n. Berita Acara Serah Terima Nomor.10/BAST/PK-PAM.JT/2013 tanggal 30 Desember 2013 antara kepala Satuan Kerja pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pengelolaan air minum senilai	Rp1.633.162.300
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH JAWA TIMUR :	
Penyertaan Propinsi Jawa Timur yang belum ditentukan statusnya per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut:	168.346.000,00
a. Berita Acara Serah Terima Nomor: 602.1/638.3/121/PP/2005 tanggal 12 Desember 2005 antara Kepala Sub Dinas Pengembangan Perkotaan Dinas Pemukiman Propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pengadaan dan pemasangan pipa PVC S12,5 50Q+Accesoris=2.511 M dan Pipa GI 50Q+Accesoris=-30m senilai	Rp100.000.000
b. Berita Acara Serah Terima Nomor: 602.1/PK121/2007 tanggal 12 Juli 2007 antara kepala sub dinas pengembangan perkotaan dinas pemukiman propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pemasangan sambungan rumah sebanyak 180 sambungan per sambungan Rp379.700 sehingga totalnya	Rp68.346.000
Penambahan Nilai Investasi Permanen Sebelum tahun 2012	28.356.386.211,50
Penambahan Nilai Investasi Permanen Sebelum tahun 2012	1.919.306.250,50
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2012	30.275.692.462,00
Penam nilai invest permanent selama th 2012 dan 2013	850.389.361,20
a. Laba Tahun 2011	Rp4.251.946.806,00
b. Deviden dari laba tahun 2011 (PAD)	(Rp2.338.570.743,30)
c. Dana Sosial & Pendidikan	(Rp212.597.340,30)
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(Rp425.194.680,60)
e. Jasa Produksi	(Rp425.194.680,60)

Penambahan Modal Pemerintah Kota Madiun sesuai Berita Acara No. 050/211/401.101/2013		1.089.956.000,00
Koreksi Cadangan Penambahan nilai investasi permanen th 2012		(173.890.609,00)
		295.902.693,75
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2012		32.338.050.507,95
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2012 dan 2013		909.569.900,34
a. Laba Tahun 2012	Rp4.547.849.501,75	
b. Deviden dari laba tahun 2012 (PAD)	(Rp2.501.317.225,96)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(Rp227.392.475,09)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(Rp454.784.950,18)	
e. Jasa Produksi	(Rp454.784.950,18)	
Penambahan Modal Pemerintah Kota Madiun sesuai Berita Acara No. 050/1642/401.501/2013		53.855.000,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2013		117.827.232,25
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2013		33.419.302.040,54
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2013 dan 2014		933.135.346,80
a. Laba Tahun 2013	Rp4.665.676.734,00	
b. Deviden dari laba tahun 2013 (PAD)	(Rp2.566.122.203,70)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(Rp233.283.836,70)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(Rp466.567.673,40)	
e. Jasa Produksi	(Rp466.567.673,40)	
f. Koreksi Cadangan		-168.299.732,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2014		1.804.284.739,00
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2014		35.988.422.394,34
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2014 dan 2015		1.293.992.294,60
a. Laba Tahun 2014	Rp6.469.961.473,00	
b. Deviden dari laba tahun 2014 (PAD)	(Rp3.558.478.810,15)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(Rp323.498.073,65)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(Rp646.996.147,30)	
e. Jasa Produksi	(Rp646.996.147,30)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum Penyertaan dari Pemda sesuai Berita Acara No. :		(-823.200.000,00)
No. 050/088/401.501/2015		1.457.833.000,00
No. 050/359/401.501/2014		1.129.206.000,00
No. 050/361/401.501/2014		15.000.000,00
Penyertaan Dari Pemerinth Jatim sesuai Berita Acara: Nomor: 10/BAST/PK-PAM.JT/2013		1.633.162.300,00
Penambahan nilai investasi permanen th		151.789.812,00

2015	
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015	40.846.206.400,94
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2015 dan 2016	1.324.350.257,00
a. Laba Tahun 2013	Rp6.621.751.285,00
b. Deviden dari laba tahun 2013 (PAD)	(Rp3.641.963.206,75)
c. Dana Sosial & Pendidikan	(Rp331.087.564,25)
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(Rp662.175.128,50)
e. Jasa Produksi	(Rp662.175.128,50)
Penambahan nilai investasi permanen th 2016	3.260.477.959,00
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2016	45.431.034.016,94
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2016 dan 2017	1.976.445.848,80
a. Laba Tahun 2016	Rp9.882.229.244,00
b. Deviden dari laba tahun 2016 (PAD)	(Rp5.435.226.084,20)
c. Dana Sosial & Pendidikan	(Rp494.111.462,20)
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(Rp988.222.924,40)
e. Jasa Produksi	(Rp988.222.924,40)
f. Sumbungan Gratis dari dangan umum	(386.399.991,00)
g. Koreksi Penyertaan Modal Pusat	1.633.162.300,00
h. Koreksi pengurangan modal pemth Jatim	(1.633.162.300,00)
Penambahan nilai investasi permanen th 2017	427.964.813,17
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2017	47.449.045.287,91
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2016 dan 2017	2.062.038.811,43
a. Laba Tahun 2017	Rp10.310.194.057,17
b. Deviden dari laba tahun 2017 (PAD)	(Rp5.670.606.731,44)
c. Dana Sosial & Pendidikan	(Rp515.509.702,86)
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(Rp1.031.019.405,72)
e. Jasa Produksi	(Rp1.031.019.405,72)
f. Sumbungan Gratis dari dangan umum	-564.910.128,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2018	74.437.015,11
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018	49.020.610.386,45
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2018 dan 2019	2.076.926.214,32
a. Laba Tahun 2018	Rp10.384.631.072,14
b. Deviden dari laba tahun 2018 (PAD)	(Rp5.711.547.089,75)
c. Dana Sosial & Pendidikan	(Rp519.231.553,61)
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(Rp1.038.463.107,23)
e. Jasa Produksi	(Rp 1.038.463.107,23)
f. Sumbungan Gratis dari dangan umum	(215.398.331,00)
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2019	1.525.987.809,72
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019	52.408.126.679,49

Penambahan nilai investasi permanen selama th 2019 dan 2020		(9.528.495.105,98)
a. Laba Tahun 2019	Rp12,336,731,592.00	
b. Deviden dari laba tahun 2019 (PAD)	(Rp6.550.840.385,10)	
c. CSR	(Rp238.212.377,65)	
d. Tantiem Dewas dan Direksi	(Rp357.318.566,47)	
e. Dana Kesejahteraan	(Rp1.191.061.888,25)	
f. Jasa Produksi	(Rp1.191.061.888,25)	
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020		55.216.363.165,77
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2020 dan 2021		2,637,209,955.00
a. Laba Tahun 2020	Rp12,506,595,229.00	
b. Deviden dari laba tahun 2020 55%	(Rp6.785.202.376,15)	
c. CSR 2%	(Rp246,734,632.00)	
d. Tantiem Dewas dan Direksi 3%	(Rp370,101,948.00)	
e. Dana Kesejahteraan 10%	(Rp1.233.673.159,30)	
f. Jasa Produksi 10%	(Rp1.233.673.159,30)	
g. Sambungan Gratis cadangan umum		479.520.000,00
Penambahan nilai investasi permanen tahun 2021 berupa tanah berdasarkan Perda No. 9 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Kota Madiun Koreksi Investasi permanen PDAM karena desimal		1.918.126.800,00 (599,77)
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021		59.292.179.321,00
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2021 dan 2022		3,241,311,462.00
a. Laba Tahun 2021	Rp13.246.587.646,00	
b. Deviden dari laba tahun 2021	(Rp6.878.627.376,00)	
c. CSR	(Rp250.131.905,00)	
d. Tantiem Dewas dan Direksi	(Rp375.197.857,00)	
e. Dana Kesejahteraan	(Rp1.250.659.523,00)	
f. Jasa Produksi %	(Rp1.250.659.523,00)	
g. Sambungan Gratis cadangan umum		1.046.520.000,00
Koreksi Investasi permanen PDAM karena desimal		
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022		61.486.970.783,00
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2021 dan 2022		7.328.194.065,32

a. Laba Tahun 2023	Rp12.984.234.155,35	
b. Dividen dari laba tahun 2022	(Rp6.665.668.490,03)	
c. Pengembalian Tantiem & Jaspro tahun buku 2021 Yang dibagikan Tahun 2022	Rp1.009.628.400,00	
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023		68.815.164.850,00

2. Perumda Bank Daerah Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun, Pasal 6 ditetapkan modal dasar sebesar Rp25.000.000.000,00. Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp8.000.032.295,00. Pada tahun 2009 penyertaan modal kepada Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun bertambah sebesar Rp1.200.000.000,00 yang dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kredit lunak kepada usaha kecil dan menengah serta petani binaan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka membantu permodalan dengan memberikan suku bunga rendah sebagai pengganti dana perguliran yang selama ini dikucurkan melalui OPD yang membidangi koperasi, UMKM, pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun, Pasal 95 ayat (2) laba bersih Perumda BPR Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/dividen untuk daerah sebesar 50%.

Pada Tahun 2023 terdapat permasalahan di Bank Daerah dan telah dilaksanakan bentuk tindak lanjut penyelesaian penyalahgunaan kredit dan deposito yang dilakukan pegawai Bank Pada tahun 2023 Bank menemukan adanya penyalahgunaan kredit dan deposito yang dilakukan oleh pegawai dengan potensi kerugian sebesar Rp5.654.843.400 dan Rp40.000.000. Tindak lanjut penyelesaian penyalahgunaan kredit yang telah dilakukan oleh Bank Daerah. Saat ini masih dalam proses penyidikan untuk melengkapi barang bukti dan pemanggilan saksi. Sampai dengan posisi pemeriksaan nominal kerugian tersebut belum dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan Bank posisi 31 Desember 2023. Bank akan melakukan koreksi pada Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2024 dengan melakukan reklasifikasi kerugian tersebut sesuai POJK tentang KAP PPAP atas aset non produktif tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dan BPR akan membentuk cadangan sebesar 100% (seratus persen) atas akun tagihan BPR tersebut.

Tabel 7.1.2.2.1.c
Investasi Permanen PD. BPR Bank Daerah
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Besaran Investasi (Rp)
1	Setoran modal dasar Pemerintah Kota Madiun	8.000.032.295,00
2	Setoran penyertaan modal fasilitas kredit lunak	1.200.000.000,00
3	Saldo Cadangan Umum, Cadangan tujuan dan Laba ditahan	2.261.467.409,00
4	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2009 dan tahun 2010	683.347.316,00
	a. Laba Tahun 2009 Rp1.893.174.388,00	
	b. Deviden Tahun 2009 (Rp946.587.194,00)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi -Rp378.634.878,00	
	d. Penambahan Cadangan tujuan	115.395.000,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	12.144.847.020,00
5	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2010 dan tahun 2011	615.882.958,00
	a. Laba Tahun 2010 Rp2.052.943.192,00	
	b. Deviden Tahun 2011 (Rp1.026.471.596,00)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi (Rp410.588.638,00)	
	d. Penambahan Cadangan tujuan	128.549.500,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	12.889.279.478,00
6	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2011 dan tahun 2012	730.580.401,00
	a. Laba Tahun 2011 Rp2.435.268.003,00	
	b. Deviden Tahun 2012 (Rp1.217.634.004,00)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi (Rp487.053.600,00)	
	d. Penambahan Cadangan tujuan	30.805.500,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	13.650.665.379,00
7	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2012 dan tahun 2013	847.803.031,00
	a. Laba Tahun 2012 Rp2.826.010.104,00	
	b. Deviden Tahun 2013 (Rp1.413.005.052,00)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi (Rp565.202.021,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas	14.498.468.410,00
8	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2013 dan tahun 2014	847.334.873,00
	a. Laba Tahun 2013 Rp2.824.449.575,00	
	b. Deviden Tahun 2014 (Rp1.412.224.788,00)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi (Rp564.889.915,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas	15.345.803.283,00
9	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2014 dan tahun 2015	978.878.099,00
	a. Laba Tahun 2014 Rp3.262.926.995,00	
	b. Deviden Tahun 2014 (Rp1.631.463.498,00)	
	c. Dana Kesra dan Jasa Produksi (Rp652.585.399,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas	16.324.681.381,00
10	Tambahan Penyertaan Modal secara tunai berdasarkan SP2D Nomor :900/SPP-LS/052/401.207/2015 tanggal 24 Nopember 2015	12.106.967.705,00

11	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2015 dan tahun 2016 a. Laba Tahun 2015 Rp3.191.871.055,00 b. Deviden Tahun 2015 (Rp1.595.935.528,00) c. Dana Kesra dan Jasa Produksi (Rp638.374.211,00)	957.561.317,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	29.389.210.403,00
12	Tambahan Penyertaan Modal berupa Hibah Tanah dengan nilai buku 492.400.000,00 berdasarkan BA Nomor : 028/1938/401.207/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 dengan nilai appraisal Rp3.693.000.000,00	3.693.000.000,00
13	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2016 dan tahun 2017 a. Laba Tahun 2016 Rp4.068.903.474,00 b. Deviden Tahun 2016 (Rp2.034.451.735) c. Dana Kesra dan Jasa Produksi (Rp813.780.695,00)	1.220.671.042,00
14	Pengurangan cadangan tujuan untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) sesuai surat No.580/82/401.502/2017 tanggal 28 Pebruari 2017	-181.650.001,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	34.121.231.444,00
15	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2017 dan tahun 2018 a. Laba Tahun 2017 Rp2.749.499.888,00 b. Deviden Tahun 2017 (Rp1.374.749.944,00) c. Dana Kesra dan Jasa Produksi (Rp549.899.978,00)	824.849.966,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	34.946.081.410,00
16	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2018 dan tahun 2019 a. Laba Tahun 2018 Rp4.243.472.734,00 b. Deviden Tahun 2018 (Rp2.121.736.367,05) c. Dana Kesra dan Jasa Produksi (Rp848.694.547,00)	1.273.041.820,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	36.219.123.230,00
17	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2019 dan tahun 2020 a. Laba Tahun 2019 Rp2.476.262.706,00 b. Deviden Tahun 2019 (Rp1.361.944.488,00) c. Dana Kesejahteraan (Rp247.626.271,00) e. Dana Tantiem (Rp99.050.508,00) f. Jasa Produksi (Rp198.101.016,00) g. CSR (Rp74.287.881,00)	495.252.541,00
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2020	36.714.375.772,00
18	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen	722.998.293,00

	selama tahun 2020 dan tahun 2021	
	a. Laba Tahun 2021	Rp3.614.991.463,00
	b. Deviden Tahun 2020 55%	(Rp1.988.245.305,00)
	c. Dana Kesejahteraan 10%	(Rp361.499.146,00)
	e. Tantiem untuk Dewas dan Direksi 4%	(Rp144.599.659,00)
	f. Jasa Produksi 8%	(Rp289.199.317,00)
	g. CSR 3%	(Rp108.449.744,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2021	37.437.374.065,00
19	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2021 dan tahun 2022	338.331.828,00
	a. Laba Tahun 2021 dan 2022	Rp1.691.659.137,00
	b. Deviden dari Laba Tahun 2021 55%	(Rp930.412.525,00)
	c. Dana Kesejahteraan 10%	(Rp169.165.914,00)
	e. Tantiem untuk Dewas dan Direksi 4%	(Rp67.666.365,00)
	f. Jasa Produksi 8%	(Rp135.332.731,00)
	g. CSR 3%	(Rp50.749.774,00)
20	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2022	37.775.705.893,00
	Penambahan nilai investasi selama tahun 2022 audited	1.054.371.632,00
	Saldo Perubahan Ekuitas 2022	38.830.077.525,00
	Pengurangan penyertaan modal ke PD Bank Daerah karena mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan audited Per 31 Desember 2023	(7.719.592.095,00)
	a. Penyesuaian berkurangnya investasi permanen pada BUMD pd bank daerah karena pembagian deviden sebesar Rp579.904.398,00;	(843.497.306,00)
	b. dana kesejahteraan pegawai sebesar Rp105.437.163,00;	
	c. jasa produksi sebesar Rp84.349731,00;	
	d. CSR sebesar Rp31.631.149,00; dan	
	e. tantiem sebesar Rp42.174.865,00.	
21	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2023	30.266.988.124,00

3. Perumda Aneka Usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perumda Aneka Usaha Pasal 5, modal awal perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan berupa tanah dan bangunan, peralatan

mesin cetak, fasilitas alat perbengkelan dan fasilitas pelayanan SPBU dan dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan daerah dan atau sumber-sumber lain yang sah. Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perumda Aneka Usaha, Pasal 45 ayat (1) laba bersih Perumda Aneka Usaha setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD sebesar 55%.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perumda Aneka Usaha Kota Madiun Pasal 116 dan Pasal 117 berkaitan dengan Pelaporan Dewan Pengawas dan Pelaporan Direksi, BAB X, Pasal 119 ayat (1) tentang Penggunaan Laba Perumda Aneka Usaha. Serta memperhatikan Hasil Audit atas Laporan Keuangan Perumda Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2022 tertanggal 07 Februari 2023 oleh Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan Nomor LAI: 60001/3.0437/AU.2/05/1237-2/1/II/2023. Dinyatakan bahwa Laba Perumda Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2022 sebesar Rp2.141.247.247,00 (dua miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Pasal 122 menyatakan bahwa: *“Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Penggunaan Laba Perumda Aneka Usaha Tahun Buku 2022 sebesar Rp2.141.247.247,00 (dua miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh dua ratus empat puluh tujuh rupiah) seluruhnya digunakan untuk menutup kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 7.1.2.2.1.d
Investasi Permanen PD. Aneka Usaha
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran modal awal Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha.	4.085.502.000,00

2	Penyertaan modal pembangunan SPBU pada tahun 2007 tertuang dalam Berita Acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan peningkatan sarana praarna aparatur sub kegiatan perencanaan pengawasan teknik serta lanjutan pembangunan SPBU tahun anggaran 2005 – tahun anggaran 2007 Nomor: 050/5689/401.015/2007 Tanggal 19 Desember 2007	4.489.766.850,00
3	Rugi Tahun – tahun sebelumnya	(2.307.352.895,00)
4	Saldo Awal Tahun 2008	6.267.915.955,00
5	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2008 dan tahun 2009 a. Laba Tahun 2008 Rp423.402.038,00 b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi (Rp176.266.244,00) c. Kenaikan cadangan Rp35.748.250,00 d. Pengurangan laba ditahan (474.431.588,00)	282.884.044,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	6.076.368.411,00
6	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2009 dan tahun 2010 a. Laba Tahun 2009 Rp550.651.565,00 b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi (Rp423.402.038,00) c. Kenaikan cadangan Rp101.027.936,00 d. Pengurangan laba ditahan (838.470.116,00)	228.277.463,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	5.466.175.758,00
7	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2010 dan tahun 2011 a. Laba Tahun 2010 Rp531.074.191,00 b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi (Rp550.651.565,00) c. Kenaikan cadangan Rp110.130.313,00 d. Pengurangan laba ditahan (1.059.866.296,00)	90.552.939,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	4.496.862.401,00
8	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2011 dan tahun 2012 a. Laba Tahun 2011 Rp389.896.947,00 b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi (Rp531.074.191,00) c. Kenaikan cadangan (Rp100.356.275,00)	(241.533.519,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	4.255.328.882,00
9	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2012 dan tahun 2013 a. Laba Tahun 2012 Rp361.281.487,00 b. Deviden (Rp214.443.320,85) c. Sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi (Rp175.453.626,15) d. Kenaikan cadangan Rp134.172.325,00	105.556.865,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	4.360.885.747,00
10	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2013 dan tahun 2014 a. Laba Tahun 2013 Rp310.405.987,00 b. Deviden (Rp198.704.817,85) c. Sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi (Rp162.576.669,15) d. Kenaikan cadangan Rp72.256.297,00 e. Koreksi saldo laba (188.648.413,00)	21.380.797,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	4.193.618.131,00

11	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2014 dan tahun 2015	(109.968.733,00)
	a. Laba Tahun 2014 b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi c. Koreksi saldo laba	Rp138.356.057,00 (Rp248.324.790,00) (1.956.299.461,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	2.127.349.937,00
12	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2015 dan tahun 2016	24.628.851,00
	a. Laba Tahun 2015 b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	Rp307.932.523,00 (Rp283.303.672,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	2.151.978.788,00
13	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2016 dan tahun 2017	(418.308.949,00)
	a. Laba Tahun 2016 b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi c. Koreksi saldo laba	(Rp171.962.931,00) (Rp246.346.018,00) (2.079.500,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	1.731.590.339,00
14	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2017 dan tahun 2019	741.463.024,00
	Laba Tahun 2017 Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	Rp741.463.024,00
	Saldo Perubahan Ekuitas	2.473.053.363,00
15	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2017 dan tahun 2018	668.179.700,00
	a. Laba Tahun 2018 b. Deviden c. Sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	Rp1.261.350.119,00 (Rp407.804.663,00) (Rp185.365.756,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas	3.141.233.063,00
16	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2018 dan tahun 2019	521.062.283,00
	a. Laba Tahun 2017 b. Deviden c. Sosial Pendidikan, Sokongan, jasa Produksi Penyertaan Modal Pemda Tahun 2019	Rp1.530.142.378,00 (Rp693.742.600,00) (Rp315.337.495,00) 1.500.000.000,00
	Saldo Perubahan Ekuitas tahun 2019	5.162.295.346,00
17	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2019 dan tahun 2020	371.136.750,00
	a. Laba Tahun 2019 b. Deviden c. Dana Sosial dan Pendidikan e. Dana Pensiun dan Sokongan f. Jasa Produksi	Rp1.595.250.651,00 (Rp841.578.307,90) (Rp76.507.118,00) (Rp153.014.238,00) (Rp153.014.238,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2020	5.533.432.096,00
18	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2020 dan tahun 2021	179.463.413,20
	a. Laba Tahun 2021 b. Deviden tahun 2020 55% c. Dana Sosial dan Pendidikan 5% d. Dana Pensiun dan Sokongan 10% e. Tantiem Direksi dan Dewan	Rp1.455.663.934,00 (Rp877.387.858,05) Rp159.525.065,10 (Rp159.525.065,10) (Rp15.952.506,51)

	Pengawas f. Bonus Karyawan (Rp63.810.026,04)	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2021	5.712.895.509,20
19	Penambahan nilai investasi permanent selama tahun 2021 dan tahun 2022	976.716.099,80
	a. Laba Tahun 2022 Rp2.141.247.247,00	
	b. Deviden tahun 2020 55% (Rp800.615.163,70)	
	c. Dana Sosial dan Pendidikan 5% (Rp145.566.393,40)	
	d. Dana Pensiun dan Sokongan 10% (Rp145.566.393,40)	
	e. Tantiem Direksi dan Dewan (Rp14.556.639,34)	
	Pengawas	
	f. Bonus Karyawan (Rp58.226.557,36)	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2022	6.689.611.609,00
	Penambahan nilai investasi permanen selama th 2022 dan 2023	1.246.653.376 ,00
	a. Laba Tahun 2023 Rp1.246.653.376,00	
	b. Deviden dari laba tahun 2022	
	c. Dana Sosial & Pendidikan	
	d. Dana Pensiun dan Sokongan	
	e. Tantiem Direksi dan Dewan	
	Pengawas	
	f. Bonus Karyawan	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2023	7.936.264.985,00

4. PT. Bank Jatim

Berdasarkan Surat Penyampaian Lembar Saham dari PT. Bank Jatim bahwa bukti kepemilikan saham Pemerintah Kota Madiun pada PT. Bank Jatim adalah Rp33.516.106.750,00 termasuk sebesar Rp3.125.106.750,00 merupakan cadangan yang dikonversi menjadi Saham sesuai Surat dari PT. Bank Jatim: 050/019/Dir/Djl-Dn Tanggal 25 Juli 2014.

Perincian penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.516.106.750,00 tersaji dalam dibawah ini.

Tabel 7.1.2.2.1.e
Investasi Permanen PT. Bank Jatim

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran sampai dengan tanggal 1 September 2008	890.000.000,00
2	Setoran tanggal 20 April 2009	1.000.000.000,00
3	Setoran tanggal 22 Pebruari 2010	1.000.000,00
4	Setoran tanggal 21 Pebruari 2012	1.000.000.000,00
5	Setoran tanggal 27 Oktober 2012	7.500.000.000,00
6	Setoran tanggal 17 Pebruari 2014	20.000.000.000,00
7	Cadangan yang dikonversi saham	3.125.106.750,00
	Total Penyertaan Modal PT Bank Jatim 2023	33.516.106.750,00

7.1.3. ASET TETAP

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Tetap	2.381.738.610.915,86	2.304.956.764.976,94

Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.381.738.610.915,86 dan Rp2.304.956.764.976,94. Nilai netto Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.381.738.610.915,86 berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.016.394.631.107,62 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.634.656.020.191,76.

Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Perincian aset tetap milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3
Perincian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Tanah	710.169.521.272,27	710.406.120.272,27
2. Peralatan dan mesin	776.839.667.064,50	704.569.408.867,71
3. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	(638.444.793.528,54)	(574.146.833.518,54)
4. Peralatan dan mesin Netto	138.394.873.535,96	130.422.575.349,17
5. Gedung dan bangunan	1.051.357.839.620,13	943.400.178.827,51
6. Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan	(214.838.706.903,30)	(191.683.302.682,30)
7. Gedung dan bangunan Netto	836.519.132.716,83	751.716.876.145,21
8. Jalan, irigasi dan jaringan	1.464.805.790.487,14	1.417.896.999.992,67
9. Akumulasi Penyusutan Jalan, irigasi dan jaringan	(780.193.133.666,00)	(720.579.673.319,00)
10. Jalan, irigasi dan jaringan Netto	684.612.656.821,14	697.317.326.673,67
11. Aset tetap lainnya	6.698.636.203,19	6.625.595.703,19
12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.179.386.093,92)	(1.071.131.843,92)
13. Aset tetap lainnya Netto	5.519.250.109,27	5.554.463.859,27
14. Konstruksi dalam pengerjaan	6.523.176.460,39	9.539.402.677,35
Jumlah bruto (1+2+4+6+8+9)	4.016.394.631.107,62	3.792.437.706.340,70
Akumulasi penyusutan aset tetap (3+5+7)	(1.634.656.020.191,76)	(1.487.480.941.363,76)
Jumlah Netto	2.381.738.610.915,86	2.304.956.764.976,94

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp76.781.845.938,92 atau 3,33 %. Kenaikan aset tetap berasal dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp72.270.258.196,79 atau 10,26 %, aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp107.957.660.792,62 atau 11,44 %, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp46.908.790.494,47 atau 3,31 %. Aset tetap tanah mengalami penurunan sebesar Rp236.599.000,00 atau 0,03%, Aset tetap lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp73.040.500,00 atau 1,10 % sedangkan Konstruksi dalam pengerjaan juga mengalami penurunan sebesar Rp3.016.226.216,96 atau 31,62 %.

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun menerapkan penyusutan atas aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan umur ekonomis masing-masing aset tetap. Sedangkan aset tetap lainnya berupa alat musik yang disusutkan sedangkan lainnya seperti hewan, tanaman, taman dan buku perpustakaan tidak disusutkan.

Mutasi penambahan aset tetap tahun 2023 berasal dari beberapa hal yaitu:

- Realisasi belanja modal yang diperoleh dari APBD tahun anggaran 2023.
- Koreksi aset tetap karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.
- Perolehan non APBD seperti perolehan aset tetap karena hibah/sumbangan, mutasi antar OPD, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Mutasi pengurangan aset tetap selama tahun 2023 berasal dari beberapa hal yaitu:

- reklas realisasi belanja modal yang diperoleh dari APBD tahun anggaran 2023 ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap yaitu nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00.

- reklas aset tetap rusak berat atas peralatan dan mesin ke aset lain-lain karena sudah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- Koreksi aset tetap karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

Mutasi penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin selama tahun 2023 berasal dari beberapa hal yaitu:

- Beban tahun berjalan atas aset tetap.
- Koreksi perubahan akumulasi penyusutan aset tetap atas kejadian tahun sebelumnya karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

Mutasi pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap selama tahun 2023 berasal dari beberapa hal:

- Beban tahun berjalan atas aset tetap.
- Koreksi perubahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas kejadian tahun sebelumnya karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, kesalahan posting, penghapusan dan antar OPD.

7.1.3.1. Tanah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tanah	710.169.521.272,27	710.406.120.272,27

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset tetap tanah per 31 Desember 2023 dibandingkan aset tetap tanah per 31 Desember 2022 terdapat selisih kurang sebesar Rp236.599.000,00 karena adanya penambahan dan pengurangan aset tetap tanah.

Aset tetap tanah bertambah sebesar Rp1.522.737.000,00 berupa penambahan aset tetap tanah yang berasal dari perolehan hibah sebesar Rp583.581.000,00 dan antar OPD sebesar Rp939.156.000,00. Hibah tanah berupa tanah jalan dan tanah RTH/RTH yang merupakan fasum fasos perumahan *Taman Puspa Regency* yang diserahkan ke Pemerintah Kota Madiun.

Aset tetap tanah berkurang sebesar Rp1.759.336.000,00 dengan pengurangan aset tetap tanah berupa hapus aset tanah jalan karena double catat pada Dinas PUPR sebanyak 19 ruas jalan seluas 9.975 m² sebesar Rp820.180.000,00 berdasarkan hasil inventarisasi dan dituangkan dalam

Berita Acara Nomor: 620/2807/401.110/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Penyajian Data Kondisi Ruas Jalan di Kota Madiun dan mutasi antar OPD sebesar Rp939.156.000,00. Mutasi antar OPD dari BKAD ke inspektorat sebesar Rp362.556.000,00, ke Kecamatan Taman sebesar Rp563.600.000,00 dan dari Dinas Pendidikan ke BKAD sebesar Rp13.000.000,00.

Masih terdapat tanah dibawah saluran yang sedang dalam proses identifikasi karena dimungkinkan keberadaannya diatas tanah milik pihak lain.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap tanah dapat di lihat di Lampiran 7.1.3.1.1.1.

Aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Madiun sebanyak 2.430 bidang, terdiri atas tanah sawah/bangunan/usaha sebanyak 916 bidang, tanah dibawah jalan sebanyak 1.473 bidang dan tanah irigasi sebanyak 41 bidang. Atas tanah milik Pemerintah Kota Madiun sebanyak 2.430 bidang yang sudah bersertifikat sebanyak 2.327 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 103 bidang, dengan perincian berupa tanah sawah/bangunan/usaha yang sudah bersertifikat sebanyak 893 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 23 Bidang, tanah dibawah jalan yang telah bersertifikat sebanyak 1.410 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 63 bidang, sedangkan berupa tanah irigasi yang sudah bersertifikat sebanyak 24 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 17 bidang. Tidak terdapat aset tetap tanah yang dalam sengketa hukum. Terdapat aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Madiun yang saat ini dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.1

Pemanfaatan Aset Tetap Tanah oleh Pihak Lain dalam bentuk Pinjam Pakai

Perubahan di tahun 2023	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	1	2	3	4
PMI Cabang Madiun	155.200.000,00	0,00	0,00	155.200.000,00
KUA Manguharjo	29.835.000,00	0,00	0,00	29.835.000,00
Polsekta Kartoharjo	2.812.000.000,00	0,00	0,00	2.812.000.000,00
Perubahan di tahun 2023	Saldo 31 Desember 2022	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023
Tanah	1	2	3	4
Primkop Kartika Merak Jaya	57.040.000,00	0.00	0.00	57.040.000,00
Koramil Manguharjo	13.600.000,00	0.00	0.00	13.600.000,00

Kwarcab Kota Madiun	540.000.000,00	0,00	0,00	540.000.000,00
Baznas Kota Madiun	494.775.000,00	0,00	0,00	494.775.000,00
	4.102.450.000,00	0,00	0,00	4.102.450.000,00

Perincian pemanfaatan aset tetap tanah oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai sebagaimana Lampiran 7.1.3.1.2.

7.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Peralatan dan Mesin	776.839.667.064,50	704.569.408.867,71

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset tetap peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp82.101.203.618,47 berupa penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari perolehan realisasi belanja modal APBD sebesar Rp71.585.868.051,04 dan yang berasal dari perolehan non APBD berupa hibah sebesar Rp2.126.749.315,00 dan tambah mutasi antar OPD sebesar Rp5.480.074.816,73. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin berupa reklas antar aset tetap sebesar Rp2.718.884.935,70 dan koreksi karena penambahan dari realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp189.626.500,00.

Aset tetap peralatan dan mesin berkurang sebesar Rp9.830.945.421,68 dengan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin berupa reklas belanja modal APBD ke beban lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap sebesar Rp155.846.735,00, hibah keluar sebesar Rp1.314.674.613,91, mutasi antar OPD sebesar Rp5.480.074.816,73 dan reklas antar aset tetap sebesar Rp1.966.955.136,04. Terdapat pengurangan karena koreksi sebesar Rp30.470.000,00 karena tidak memenuhi kriteria aset tetap. Selain itu ada pengurangan aset tetap berupa penghapusan sebesar Rp882.924.120,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap peralatan dan mesin dapat di lihat di Lampiran 7.1.3.2.1.1.

Akumulasi penyusutan aset tetap peralatan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp638.444.793.528,54 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp574.146.833.518,54. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin dapat di lihat di Lampiran 7.1.3.2.2.

Terdapat aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Lingkungan Hidup yang telah dihibahkan ke pihak lain, seperti sampah pemilah, gerobak sampah, tempat sampah pemilah, tong sampah, dan komposter aerob namun masih tercatat di aset tetap Dinas Lingkungan Hidup. Atas aset tetap peralatan dan mesin tersebut masih dalam proses penghapusan.

Terdapat aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan berupa *Laptop* dan *Chromebook* dalam kondisi rusak berat dan akan dilakukan proses penghapusan.

Terdapat aset tetap peralatan dan mesin yang saat ini dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.3.2
Pemanfaatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin oleh Pihak Lain dalam bentuk Pinjam Pakai

Perubahan di tahun 2023	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
Kendaraan Roda 4	1	2	3	4
Denpom V/1	232.725.000,00	0,00	0,00	232.725.000,00
Kodim 0803/ Madiun	232.725.000,00	0,00	0,00	232.725.000,00
Polres Madiun Kota	208.850.000,00	0,00	0,00	208.850.000,00
PD. Aneka Usaha	208.850.000,00	0,00	0,00	208.850.000,00
Yonif Para Raider Bajra Yudha	162.840.000,00	0,00	0,00	162.840.000,00
Dewan Masjid Indonesia	232.725.000,00	0,00	0,00	232.725.000,00
Baznas Kota Madiun	265.000.000,00	0,00	0,00	265.000.000,00
Kwarcab Kota Madiun	208.490.000,00	0,00	0,00	208.490.000,00
PGRI Kota Madiun	162.840.000,00	0,00	0,00	162.840.000,00
PMI Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
MUI Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
IPHI Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
NU Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
Muhammadiyah Kota Madiun	175.490.000,00	0,00	0,00	175.490.000,00
Kendaraan Roda 2				
Kwarcab Kota Madiun	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00
	2.833.995.000,00	0,00	0,00	2.833.995.000,00

Perincian pemanfaatan aset tetap peralatan dan mesin oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai sebagaimana Lampiran 7.1.3.2.3.

7.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Gedung dan Bangunan	1.051.357.839.620,13	943.400.178.827,51

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset tetap gedung dan bangunan bertambah sebesar Rp1.051.357.839.620,13 berupa penambahan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari perolehan realisasi belanja modal APBD sebesar Rp80.940.539.683,65, berasal dari perolehan non APBD berupa hibah sebesar Rp20.085.592.777,67 dan tambah mutasi antar OPD sebesar Rp14.378.864.333,33. Selain itu juga terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin berupa reklas antar aset tetap sebesar Rp11.447.840.961,00 dan koreksi sebesar Rp818.382.659,00 dengan perincian koreksi berupa realisasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp318.382.659,00 dan kurang catat aset sebesar Rp500.000.000,00.

Aset tetap gedung dan bangunan berkurang sebesar Rp19.713.559.622,03 dengan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan berupa mutasi antar OPD sebesar Rp14.378.864.333,33, reklas antar aset tetap sebesar Rp4.621.032.498,70 dan koreksi sebesar Rp713.662.790,00 berupa salah posting karena tidak memenuhi kriteria aset tetap atau berupa kegiatan pemeliharaan sebesar Rp402.413.790,00 dan bayar hutang belanja Rp311.249.000,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap gedung dan bangunan dapat di lihat di Lampiran 7.1.3.3.1.1.

Akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp214.838.706.903,30 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp191.683.302.682,30. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan dapat di lihat di Lampiran 7.1.3.3.2.

7.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.464.805.790.487,14	1.417.896.999.992,67

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan

Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset tetap jalan, irigasi dan bangunan bertambah sebesar Rp67.011.923.038,00 berupa penambahan aset tetap jalan, irigasi dan bangunan yang berasal dari perolehan realisasi belanja modal APBD sebesar Rp62.832.477.443,00, berasal dari perolehan non APBD berupa hibah sebesar Rp93.869.680,00 dan berupa reklas antar aset tetap sebesar Rp4.085.575.915,00.

Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi berkurang sebesar Rp20.103.132.543,53 berupa reklas antar aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp9.295.325.646,00 dan koreksi salah posting karena tidak memenuhi kriteria aset tetap atau berupa barang persediaan atau berupa kegiatan pemeliharaan sebesar Rp10.044.759.147,53 dan koreksi bayar hutang belanja sebesar Rp763.047.750,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dapat di lihat di Lampiran 7.1.3.4.1.1.

Akumulasi penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp780.193.133.666,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp720.579.673.319,00. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi dapat di lihat di Lampiran 7.1.3.4.2.

Pemerintah Kota Madiun akan melakukan inventarisasi atas tanah dibawah jalan lingkungan paving untuk menyajikan pencatatan aset tanah dibawah konstruksi jalan lingkungan paving.

7.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	6.698.636.203,19	6.625.595.703,19

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset tetap lainnya bertambah sebesar Rp2.436.417.485,00 berupa penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari perolehan realisasi belanja modal APBD sebesar Rp2.431.417.485,00 dan reklas antar aset tetap sebesar Rp5.000.000,00.

Aset tetap lainnya berkurang sebesar Rp2.363.376.985,00 dengan pengurangan aset tetap lainnya berupa reklas belanja modal APBD ke beban

lain-lain karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap sebesar Rp2.059.871.521,00, reklas antar aset tetap sebesar Rp259.762.964,00 dan koreksi berupa koreksi aset tetap menjadi ke aset lainnya berupa aset tidak berwujud sebesar Rp43.742.500,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tetap lainnya dapat di lihat di Lampiran 7.1.3.5.1.1.

Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.179.386.093,92 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.071.131.843,92. Perincian akumulasi penyusutan aset tetap lainnya dapat di lihat di Lampiran 7.1.3.5.2.

7.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.523.176.460,39	9.539.402.677,35

Jumlah tersebut merupakan jumlah konstruksi dalam pengerjaan bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Konstruksi dalam pengerjaan bertambah sebesar Rp1.326.396.137,00 berupa perencanaan yang fisik bangunannya akan dibangun tahun berikutnya dan berkurang sebesar Rp4.342.622.353,96 berupa konstruksi dalam pengerjaan karena reklas dari aset tetap dan ke aset tetap untuk dikapitalisasi ke aset tetap induknya sebesar Rp3.440.621.703,96 dan penghapusan sebesar Rp902.000.650,00.

Perincian mutasi tambah dan kurang konstruksi dalam pengerjaan dapat di lihat di Lampiran 7.1.3.6.1.1.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 (PSAP 17) Properti Investasi, Pemerintah Daerah harus menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Daerah. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Madiun belum menyajikan potensi properti investasi berupa tanah dan/atau tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan menghasilkan pendapatan atas sewa karena belum diatur dalam kebijakan akuntansi. Adapun potensi properti investasi Pemerintah Kota Madiun atas aset tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp141.184.264.669,27 dan aset gedung dan bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp118.781.460.895,10. Perincian potensi properti investasi dapat di lihat di Lampiran 7.1.3.

7.1.4. ASET LAINNYA

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Lainnya	145.210.621.184,33	131.985.533.181,33

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo aset lainnya milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian aset lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel 7.1.4
Perincian Aset Lainnya

Aset Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
2. Kemitraan dengan pihak ketiga	119.532.900.004,00	119.532.900.004,00
3. Aset tidak berwujud	23.172.037.247,00	23.128.572.247,00
4. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(22.699.916.915,00)	(21.701.067.582,00)
5. Aset tidak berwujud Netto	472.120.332,00	1.427.504.665,00
6. Aset lain-lain	58.843.255.389,37	40.520.839.389,37
7. Akumulasi penyusutan aset lain-lain	(33.637.654.541,04)	(29.495.710.877,04)
8. Aset lain-lain Netto	25.205.600.848,33	11.025.128.512,33
Jumlah bruto (1+2+3+6)	201.548.192.640,37	183.182.311.640,37
Akumulasi amortisasi + penyusutan (4+7)	(56.337.571.456,04)	(51.196.778.459,04)
Jumlah neto	145.210.621.184,33	131.985.533.181,33

7.1.4.1. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo tuntutan ganti rugi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 kerugian daerah yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Kesanggupan Membayar dari Pihak Ketiga di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Tabel 7.1.4.1
Perincian Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Perubahan di tahun 2020 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	1	2	3	4
Pihak ke III	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	119.532.900.004,00	119.532.900.004,00

Jumlah kemitraan dengan pihak ketiga milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang terdiri dari Bangun Guna Serah (BOT) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Perincian mutasi kemitraan dengan pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2023 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.4.2
Perincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1	2	3	4
Bangun Guna Serah (BOT)	31.979.755.000,00	0,00	0,00	31.979.755.000,00
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)	87.553.145.004,00	0,00	0,00	87.553.145.004,00
	119.532.900.004,00	0,00	0,00	119.532.900.004,00

7.1.4.2.1. Bangun Guna Serah (BOT)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Bangun Guna Serah (BOT)	31.979.755.000,00	31.979.755.000,00

Jumlah bangun guna serah merupakan jumlah aset yang tidak termasuk aset lancar, investasi dan aset tetap Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang dibangun melalui kemitraan dengan pihak ketiga.

Tabel 7.1.4.2.1

Perincian Mutasi Bangun Guna Serah (BOT)

Perubahan di tahun 2023	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
Bangun Guna Serah (BOT)	1	2	3	4
Carrefour	8.500.000.000,00	0,00	0,00	8.500.000.000,00
Taman Hiburan Rakyat /THR	10.406.250.000,00	0,00	0,00	10.406.250.000,00
Kawasan Suncity	13.073.505.000,00	0,00	0,00	13.073.505.000,00
	31.979.755.000,00	0,00	0,00	31.979.755.000,00

Perincian penggunaan bangun guna serah (BOT) sebagai berikut :

No.	Uraian	Jangka Waktu
1.	PT. KELOLA TAMA PROPERTI (Carrefour)	15 tahun 10 bulan atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. S.Parman (eks terminal) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT KELOLA TAMA PROPERTI Nomor : 644.1/03/401.013/2008 Nomor : 001/III/KTP/2008 Saat ini dalam proses penilaian atas nilai wajar atas tanah dan bangunan setelah perjanjian berakhir.
2.	PT. KELOLA TAMA PROPERTI (THR)	15 tahun atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. Slamet Riyadi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT KELOLA TAMA PROPERTI Nomor : 556/08/401.013/2008 Nomor : 001/XII/KTP/2008

		Saat ini dalam proses penilaian atas nilai wajar atas tanah dan bangunan setelah perjanjian berakhir.
3.	PT. INDRACO (Kawasan Hiburan/Wisata. Perdagangan dan Hotel)	30 tahun atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. Pelita Tama sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT INDRACO Nomor : 415.4/14/401.011/2010 Nomor : 02/SPK-IND/X/2010

7.1.4.2.2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)	87.553.145.004,00	87.553.145.004,00

Jumlah kerja sama pemanfaatan merupakan jumlah aset yang tidak termasuk aset lancar, investasi dan aset tetap Pemerintah Kota Madiun atas tanah dan bangunan Plaza Lawu Madiun yang terletak di Jalan Pahlawan Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang dibangun melalui kemitraan dengan pihak ketiga.

Perincian mutasi Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) pada tanggal 31 Desember 2023 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.1.4.2.2
Perincian Mutasi Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Perubahan di tahun 2020	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
Kerjasama Pemanfaatan(KSP)	1	2	3	4
Plaza Lawu Madiun	87.553.145.004,00	0,00	0,00	87.553.145.004,00
	87.553.145.004,00	0,00	0,00	87.553.145.004,00

Perincian Kerja Sama Pemanfaatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jangka Waktu
1.	PT. SRI TANAYA MEGATAMA (Kerjasama Pemanfaatan Plaza Lawu Madiun)	Jangka waktu 30 tahun atas penyerahan tanah dan bangunan beserta utilitas penunjang gedung Plaza Lawu Madiun milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. Pahlawan No.47 Madiun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara

		Pemerintah Kota Madiun dengan PT. SRI TANAYA MEGATAMA Nomor : 030/4/401.202/2017 Nomor : 003/STM-LP/HO/XII/2017 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut, Pemerintah Kota Madiun setiap tahun mendapatkan kontribusi tetap sebesar Rp1.250.000.000,00 terhitung mulai tahun 2019 dan setiap 5 tahun sekali mengalami kenaikan sebesar 5% dari nilai kontribusi tetap, dan kontribusi profit sharing sebesar 7,5%. Selain itu, PT. SRI TANAYA MEGATAMA menginvestasikan dananya sebesar Rp31.121.145.004,00 untuk melakukan renovasi Plaza Lawu Madiun.
--	--	--

7.1.4.3. Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	23.172.037.247,00	23.128.572.247,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tidak berwujud berupa pengadaan software yang dipergunakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Aset tidak berwujud bertambah sebesar Rp43.465.000,00 berupa penambahan aset tidak berwujud yang berasal dari reklas aset tetap.

Perincian mutasi tambah dan kurang aset tidak berwujud dapat di lihat di Lampiran 7.1.4.3.1.1.

Amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp 22.699.916.915,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.701.067.582,00. Perincian amortisasi aset tidak berwujud dapat di lihat di Lampiran 7.1.4.3.2.1.

7.1.4.4. Aset Lain-Lain

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Lain-Lain	58.843.225.389,37	40.520.839.389,37

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset lain-lain berupa reklasifikasi dari piutang lain-lain, aset rusak berat belum dihapuskan milik OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain Per 31 Desember 2023.

Mutasi penambahan aset lain-lain selama tahun 2023 berasal dari beberapa hal yaitu:

- ✓ Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya yang rusak berat sehingga tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan aset tetap karena akan diserahkan ke pihak lain.
- ✓ Koreksi aset tetap rusak berat seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.
- ✓ Perolehan non APBD seperti perolehan yang berasal dari mutasi antar OPD, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi tetapi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan karena rusak berat/tidak dimanfaatkan atau berlebih.

Mutasi pengurangan aset lain-lain selama tahun 2023 berasal dari beberapa hal yaitu:

- ✓ Penghapusan aset rusak berat dan aset yang telah diserahkan ke pihak ketiga.
- ✓ Koreksi aset tetap rusak berat ke aset tetap karena masih dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- ✓ Koreksi aset tetap rusak berat seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.

Aset lain-lain berkurang sebesar Rp146.000.000,00 berupa penghapusan.

Aset lain-lain senilai Rp58.843.255.389,37 yang tersaji merupakan aset tetap rusak berat dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain. Penyajian atas aset lain-lain antara aset tetap rusak berat dan aset yang akan diserahkan ke pihak lain tercatat dalam satu akun karena aplikasi SIMDA BMD belum bisa mengakomodir dan memisahkan kedua aset tersebut. Adapun perincian sebagaimana berikut:

- ✓ Aset tetap rusak berat senilai Rp2.894.292.011,04 berada di OPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- ✓ Aset yang akan diserahkan ke pihak lain senilai Rp31.526.447.447,33 berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Ruang;

- ✓ Aset berupa bangunan gedung yang direncanakan untuk dihapuskan karena dilakukan rehab total senilai Rp6.100.099.931,00, berada di Dinas Pendidikan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- ✓ Berdasarkan koreksi BPK terdapat penyesuaian atas pengakuan Aset lain-lain yang berasal dari Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak - LO berdasarkan Surat Edaran Nomor : S-574/wpb.16/2024 tentang penyampaian data saldo rekening *treasury deposit facility transfer* ke daerah (TDF - TKD) periode 1 Desember 2023 - 12 Januari 2024 sebesar Rp18.468.416.000,00.

Tabel 7.1.4.4

Perincian Aset Lain-Lain pada Dinas Pekerjaan Umum yang Akan Diserahkan

Nama Barang	Konstruksi	Letak / Lokasi Alamat	Tahun Perolehan	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Instansi Penerima
1	2	3	4	5	6	7
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Urip Sumoharjo	2014	27.200	775.305.395,00	Kementerian PUPR
1	2	3	4	5	6	7
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Ahmad Yani	2014	12.800	584.120.074,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Yos Sudarso	2014	37.440	1.222.407.801,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Basuki Rachmad	2014	17.700	620.375.256,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. S. Parman	2014	6.400	513.308.579,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Thamrin	2014	9.600	548.152.730,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Letjend. Haryono	2014	12.400	763.325.250,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Letjend. Panjaitan	2014	17.300	1.607.513.490,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Trunojoyo	2014	15.360	1.496.230.227,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Sukarno Hatta	2014	22.400	1.941.751.956,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Mayjend. Sungkono	2014	16.100	958.716.483,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Lokal	Hotmix	-	2014	3.744	59.904.000,00	Kementerian PUPR

Jalan Khusus Lain-lain	-	Pembangunan dan Penataan Arena Road Race Bantaran Kali Mdn	2016	-	8.056.148.500,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo
Jalan Khusus Lain-lain	-	pengaspalan halaman polresta madiun	2016	-	202.691.596,00	Polres Madiun Kota
Jalan Khusus Lain-lain	-	Pengaspalan halaman kantor dan rumah dinas korem	2016	-	407.951.377,00	Kodim
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Urip Sumoharjo	2020	-	205.316.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Yos Sudarso	2020	-	207.024.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	Hotmix	Jl. Trunojoyo	2020	-	207.300.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Khusus Lain-lain	-	Pembangunan dan Penataan Arena Road Race Bantaran Kali Mdn	2020	-	882.298.600,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo
1	2	3	4	5	6	7
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Penataan Trotoar Pintu Masuk Kota Madiun-Jiwan	2020	-	209.539.000,00	-
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan A.Yani	2020	-	202.654.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Depan INKA	2020	-	206.280.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Pembangunan Bangunan Pelengkap Jl. Yos Sudarso	2020	-	204.879.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I - Jalan Basuki Rahmad (KARGO)	2020	-	1.258.101.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan S.Parman	2020	-	213.318.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Kelas III	-	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jl. DI Panjaitan	2020	-	208.716.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Khusus Lain-lain	-	Penataan Kawasan Road Race Bantaran Kali Madiun	2020	-	195.655.000,00	Balai Wilayah Sungai V Bengawan Solo

Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Kodim 0803	2022	-	459.966.333,33	Kodim
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2022	-	235.992.000,00	Kejaksaan Negeri
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Kejaksaan Negeri	2022	-	925.069.400,00	Kejaksaan Negeri
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Gedung Ruang SKPT Polres Madiun Kota	2022	-	224.335.000,00	Polres Madiun Kota
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Pos Polisi Manguharjo	2022	-	227.158.900,00	Polres Madiun Kota
Jalan Kabupaten Arteri	-	Jl. Yos Sudarso	2022	-	39.600.000,00	Kementerian PUPR
Jalan Kabupaten Arteri	-	Jl. Basuki Rahmat	2022	-	49.550.000,00	Kementerian PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2023	58.58	79.200.000,00	Dinas PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2023	58.58	1.231.122.100,00	Dinas PUPR
1	2	3	4	5	6	7
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kantor Kejaksaan Negeri	2023	58.58	3.777.379.400,00	Dinas PUPR
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Beton	Gedung Kodim 0803	2023	-	318.091.000,00	Dinas PUPR
					31.526.447.447,33	

Terhadap aset yang akan diserahkan ke Kementerian PUPR telah dilakukan koordinasi oleh DPU&TR Pemerintah Kota Madiun. Tahapan sebelum pelaksanaan fisik mulai dari ijin dan asistensi perencanaan telah dilakukan dengan Balai Besar Jalan Nasional Wilayah V dan telah mendapatkan persetujuan. Setelah fisik konstruksi selesai dikerjakan dan akan diserahkan, Pihak Kementerian PUPR direncanakan akan meninjau lapangan dan sampai saat ini proses tersebut belum dilaksanakan sehingga sampai saat ini aset tersebut masih tersaji menjadi aset lain-lain.

Tabel 7.1.4.5

Perincian Aset Lain-Lain pada yang akan dihapuskan

Nama Barang	Konstruksi	Letak / Lokasi Alamat	Tahun Perolehan	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Instansi Penerima
1	2	3	4	5	6	7

Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1993	126	1.061.880.063,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1996	94	305.336.000,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl. Abdul Rahman Saleh No. 3 Kota Madiun	2002	544	1.983.886.110,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1996	243	331.000.000,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl .PG Kanigoro No.11, Madiun	1993	144	365.400.000,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl. Mliwis No. 26	2004	143	238.273.500,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Beton	Jl. Arwana No. 24, Madiun	1975	189	548.066.400,00	Dinas Pendidikan
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	1980	72	15.120.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	144	149.760.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
1	2	3	4	5	6	7
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	199	602.466.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	110	450.000.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	5	3.900.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Klinik/Puskesmas	Beton	JL. Diponegoro, No.22	2000	3	1.950.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Beton	TPS. JL. BASUKI RAKHMAD SUKOSARI	2016	58.58	43.061.858,00	Dinas Lingkungan Hidup
					6.100.099.931,00	

Perincian mutasi tambah dan kurang aset lain-lain dapat di lihat di Lampiran 7.1.4.4.1.1. Akumulasi penyusutan lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.637.654.541,04 dan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp29.495.710.877,04. Perincian akumulasi penyusutan aset lain-lain dapat di lihat di Lampiran 7.1.4.4.2.

7.2. UTANG

7.2.1. UTANG JANGKA PENDEK

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
--------	--------------------	--------------------

Utang Jangka Pendek	22.524.854.759,67	14.704.441.851,67
---------------------	-------------------	-------------------

Utang jangka pendek Pemerintah Kota Madiun adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Kota Madiun dalam jangka waktu 12 bulan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.524.854.759,67 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp14.704.441.851,67.

Perincian utang jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.2.1
Perincian Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	601.132.820,00	8.791.710,00
2. Pendapatan diterima dimuka	5.051.616.973,67	4.898.956.358,67
3. Utang belanja	16.872.104.966,00	9.796.693.783,00
Total	22.524.854.759,67	14.704.441.851,67

7.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	601.132.820,00	8.791.710,00

PFK Per 31 Desember 2023 sebesar Rp601.132.820,00 disebabkan SP2D tanggal 29 Desember 2023 atas nama Bendahara Pengeluaran BKAD sampai dengan Per 31 Desember 2023 Bank Jatim belum melakukan pemindahbukuan ke Rekening penerima. Daftar SP2D tersebut terdiri dari :

1. SP2D Nomor 1697/LS/2023 sebesar Rp29.062.820,00 Pembayaran Iuran JKN TPG PPPK Bulan Juli s/d Desember 2023, JKN TPG PPPK Bulan Juli s/d Desember 2023 Tahap 2, JKN Tambahan Penghasilan PPPK Bulan Juli s/d November 2023 ;
2. SP2D Nomor 1698/LS/2023 sebesar Rp436.719.700,00 Pembayaran iuran JKN TPG PNS Bulan Juli s/d Desember 2023, JKN TPG PNS Bulan Juli sd Desember 2023 Tahap 2 dan JKN Tambahan Penghasilan Guru PNS Bulan Juli sd Desember 2023 ;
3. SP2D Nomor 1709/LS/2023 sebesar Rp131.024.168,00 Pembayaran Iuran JKN TPP Beban Kerja PNS Pemkot Kota Madiun Bulan November dibayar Desember 2023 ;

4. SP2D Nomor 1710/LS/2023 sebesar Rp4.326.132,00 Pembayaran Iuran JKN TPP Beban Kerja PNS Pemkot Kota Madiun Bulan November dibayar Desember 2023 ;

7.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	5.051.616.973,67	4.898.956.358,67

Pendapatan di terima di muka berasal dari pembayaran atas pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.051.616.973,67 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.898.956.358,67.

Perincian mutasi pendapatan diterima dimuka pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.051.616.973,67 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7.2.1.2
Perincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

Perubahan di tahun 2023	Saldo 1 Januari 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan diterima dimuka				
Dinas Kesehatan dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
BKAD	1.995.720.122,00	849.722.874,00	1.995.720.122,00	849.722.874,00
Badan Pendapatan Daerah	574.274.371,25	811.369.759,17	574.274.371,25	811.369.759,17
Kecamatan Kartoharjo	1.013.248.616,67	1.081.110.146,00	1.013.248.616,67	1.081.110.146,00
Kecamatan Manguharjo	490.052.223,75	1.093.257.877,50	490.052.223,75	1.093.257.877,50
Kecamatan Taman	748.449.425,00	1.185.052.317,00	748.449.425,00	1.185.052.317,00
Dinas Pertanian dan KP	14.247.000,00	0,00	14.247.000,00	0,00
Dinas Perdagangan	62.964.600,00	31.104.000,00	62.964.600,00	31.104.000,00
	4.898.956.358,67	5.051.616.973,67	4.898.956.358,67	5.051.616.973,67

7.2.1.3. Utang Belanja

Utang belanja terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja jasa dan utang belanja modal tahun anggaran 2023 tetapi belum dibayarkan 31

Desember 2023 sebesar Rp16.872.104.966,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp9.796.693.783,00. Perincian utang belanja tersaji di tabel di bawah ini :

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Belanja	16.872.104.966,00	9.796.693.783,00

Tabel 7.2.1.3
Perincian Utang Belanja

Utang Jangka Pendek	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Utang Belanja Pegawai	4.261.848.017,50	5.276.851.627,00
2. Utang Belanja Jasa	3.415.274.648,00	2.951.883.802,00
3. Utang Belanja Modal	351.047.830,00	1.567.958.354,00
4. Utang Persediaan (Obat)	8.843.934.470,50	0,00
Total	16.872.104.966,00	9.796.693.783,00

Utang belanja pegawai sebesar Rp4.261.848.017,50 terdiri dari utang belanja TPP beban kerja ASN per 31 Desember 2023 yang belum dibayarkan pada tahun anggaran tahun 2023.

Utang belanja jasa sebesar Rp3.415.274.648,00 yang terdiri dari belanja honorarium daerah sebesar Rp562.700.000,00 dan utang belanja listrik, belanja air, dan belanja telepon/internet yang ada di beberapa OPD untuk tagihan bulan Desember 2023 sebesar Rp562.700.000,00 dan Jasa Medis dari RSUD sebesar Rp2.712.570.735,00 bulan Desember 2023 yang dibayar di bulan januari 2024.

Utang belanja atas obat sebesar Rp8.843.934.470,50 di RSUD tahun 2023 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023.

7.3 EKUITAS

7.3.1. Ekuitas

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Ekuitas	2.806.862.353.839,15	2.798.933.012.648,62

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo ekuitas akhir yang berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.806.862.353.839,15 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.798.933.012.648,62.

BAB VIII LAPORAN OPERASIONAL (LO)

8.1. PENDAPATAN LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Pendapatan LO	1.167.775.852.624,59	1.057.305.452.700,09	10,45%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan LO terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer LO dan lain-lain pendapatan yang sah LO. Pendapatan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.167.775.852.624,59 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.057.305.452.700,09 terjadi kenaikan sebesar 10,45%. Perincian pendapatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1
Pendapatan LO

Pendapatan LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Pendapatan Asli Daerah LO	264.360.007.027,12	259.472.840.887,09	1,88%
Pendapatan Transfer LO	880.526.052.824,80	796.504.081.567,00	10,55%
Lain-lain Pendapatan yang	22.889.792.772,67	1.328.530.246,00	1.622,94%
Jumlah	1.167.775.852.624,59	1.057.305.452.700,09	10,45%

8.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Pendapatan Asli Daerah LO	264.360.007.027,12	259.472.840.887,09	1,88%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan asli daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan asli daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan asli daerah LO terdiri dari pajak daerah LO, retribusi daerah LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO dan lain-lain PAD yang sah LO. Pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp264.360.007.027,12 dibandingkan pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 259.472.840.887,09 terjadi kenaikan sebesar 1,88%.

Perincian pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.1
Pendapatan Asli Daerah LO

Pendapatan Asli Daerah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Pajak Daerah LO	114.046.677.401,10	106.736.313.999,26	6,85%
2. Retribusi Daerah LO	21.264.290.040,92	21.696.850.879,58	(1,99%)
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO	22.714.358.167,73	18.468.304.240,97	22,99%
4. Lain-lain PAD yang sah LO	106.334.681.417,37	112.571.371.767,28	(5,54%)
Jumlah	264.360.007.027,12	259.472.840.887,09	1,88%

8.1.1.1. Pajak Daerah LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pajak Daerah LO	114.046.677.401,10	106.736.313.999,26	6,85%

Jumlah pendapatan pajak daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan pajak daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan pajak daerah LO terdiri dari pajak hotel LO, pajak restoran LO, pajak hiburan LO, pajak reklame LO, pajak penerangan jalan LO, pajak parkir LO, pajak air tanah LO, BPHTB LO dan PBB LO. Pendapatan pajak daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp114.046.677.401,10 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp106.736.313.999,26 terjadi kenaikan sebesar 6,85%.

Perincian pendapatan pajak daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah LO

Pendapatan Pajak Daerah LO	Ket	31 Desember 2023 (Rp)
1. Pendapatan Pajak LRA	+	113.514.116.369,67
2. Piutang Pajak Daerah 2023	+	11.995.973.053,35
3. Piutang Pajak Daerah 2022	(-)	(11.226.316.634,00)
4. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka 2023	(-)	(811.369.759,17)
5. Pendapatan Pajak Diterima Dimuka 2022	+	574.274.371,25
Jumlah Pajak Daerah LO (1+2-3-4+5)		114.046.677.401,10

Perincian pajak daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.1.2
Pendapatan Pajak Daerah LO

Pendapatan Pajak Daerah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase % 4=(2/3x100%)-
1	2	3	
1. Pajak hotel	8.034.758.525,00	7.119.223.190,00	12,86%
2. Pajak restoran	22.941.828.006,00	19.620.767.915,00	16,93%
3. Pajak hiburan	1.828.328.751,00	1.641.354.092,00	11,39%
4. Pajak reklame	2.140.243.381,08	2.056.916.210,50	4,05%

5. Pajak penerangan jalan	25.674.378.651,18	22.112.356.840,44	16,11%
6. Pajak parkir	1.700.245.616,00	1.435.513.434,55	18,44%
7. Pajak air tanah	321.693.220,84	292.564.417,30	9,96%
8. PBBP2	22.885.528.900,00	24.823.053.835,00	(7,81%)
9. BPHTB	28.519.672.350,00	27.634.564.064,47	3,20%
Total	114.046.677.401,10	106.736.313.999,26	6,85%

1. Pendapatan pajak hotel LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp8.034.758.525,00. Pendapatan pajak Hotel LO tahun 2023 tersebut telah disetor ke kas daerah sebesar Rp8.130.855.159,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp96.796.634,00 dan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp 700.000,00. Pendapatan pajak hotel LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar 8.034.758.525,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak hotel LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar 7.119.223.190,00 terjadi kenaikan sebesar 12,86%.
2. Pendapatan pajak restoran LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan karcis pajak restoran yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp22.941.828.006,00. Pendapatan Pajak restoran yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp23.343.654.772,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp500.544.088,00 dan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp98.717.322,00. Pendapatan pajak restoran LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp22.941.828.006,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak restoran LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp19.620.767.915,00 terjadi kenaikan sebesar 16,93%.
3. Pendapatan pajak hiburan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp1.828.328.751,00. Pendapatan pajak hiburan LO tahun 2023 telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.845.737.251,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp17.708.500,00 dan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp300.000,00. Pendapatan pajak hiburan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.828.328.751,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak

- hiburan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.641.354.092,00 terjadi kenaikan sebesar 11,39%.
4. Pendapatan pajak reklame LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp2.140.243.381,08. Pendapatan pajak reklame LO yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp2.304.955.619,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp122.235.590,00 dan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp194.618.740,00. Terdapat pendapatan diterima dimuka yang sudah dibayarkan di Tahun sebelumnya sebesar Rp574.274.371,25 dan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan sebesar Rp811.369.759,17. Pajak reklame LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.140.243.381,08 dibandingkan dengan pendapatan pajak reklame LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp2.056.916.210,50 terjadi kenaikan sebesar 4,05%.
 5. Pendapatan pajak penerangan jalan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Potongan Pajak Penerangan Jalan dari PLN dan non PLN yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp25.674.378.651,18. Pendapatan pajak penerangan jalan LO yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp23.482.333.529,83 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp9.192.539,00 dan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp2.201.237.660,35. Pendapatan pajak penerangan jalan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp25.674.378.651,18 dibandingkan dengan pendapatan pajak penerangan jalan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp22.112.356.840,44 terjadi kenaikan sebesar 16,11%.
 6. Pendapatan pajak parkir LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp1.700.245.616. Pendapatan pajak parkir LO tahun 2023 yang telah disetor ke kasda sebesar Rp1.683.862.056,00 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp1.072.000,00 dan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp17.455.560,00. Pendapatan pajak parkir LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.700.245.616,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak parkir

- LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.435.513.434,55 terjadi kenaikan sebesar 18,44%.
7. Pendapatan pajak air tanah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp321.693.220,84. Pendapatan pajak air tanah LO tahun 2023 yang telah disetor ke kasda sebesar Rp318.395.998,84 yang menjadi piutang pajak tahun lalu sebesar Rp1.483.530,00 dan piutang pajak tahun 2023 sebesar Rp4.780.752,00. Pendapatan pajak air tanah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp321.693.220,84 dibandingkan dengan pendapatan pajak air tanah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp292.564.417,30 terjadi kenaikan sebesar 9,96%.
 8. Pendapatan PBB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp22.885.528.900,00. Pendapatan PBB LO Tahun 2023 yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp23.884.649.634,00 yang menjadi piutang tahun lalu sebesar Rp10.423.184.353,00 dan piutang tahun 2023 sebesar Rp9.424.063.619,00. Pendapatan PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp22.885.528.900,00 dibandingkan dengan pendapatan PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp24.823.053.835,00 terjadi penurunan sebesar 7,81%.
 9. Pendapatan BPHTB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp28.519.672.350,00. Pendapatan BPHTB LO yang telah disetor ke kasda sebesar Rp28.519.672.350,00 yang menjadi piutang tahun lalu adalah sebesar Rp54.099.400,00 dan piutang pajak tahun 2022 sebesar Rp54.099.400,00. Pendapatan BPHTB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp28.519.672.350,00 dibandingkan dengan pendapatan BPHTB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp27.634.564.064,47 terjadi kenaikan sebesar 3,20%.

8.1.1.2. Retribusi Daerah LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Retribusi Daerah LO	21.264.290.040,92	21.696.850.879,58	(1,99%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan retribusi daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan retribusi daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan retribusi daerah LO terdiri dari retribusi jasa umum LO, retribusi usaha LO, retribusi perizinan tertentu LO. Pendapatan retribusi daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp21.264.290.040,92 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp21.696.850.879,58 terjadi penurunan sebesar 1,99%.

Perincian pendapatan retribusi daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel 8.1.1.2
Retribusi Daerah LO

Retribusi Daerah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
1. 9.1.02.01 Retribusi Jasa Umum	3.791.532.578,00	4.239.820.540,00	(10,57%)
a. 9.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	171.940.000,00	167.605.500,00	2,59%
Dinas Lingkungan Hidup	171.940.000,00	167.605.500,00	2,59%
b. 9.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	2.984.553.408,00	3.234.432.000,00	(7,73%)
Dinas Perhubungan	2.984.553.408,00	3.234.432.000,00	(7,73%)
c. 9.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	148.337.000,00	(100%)
Dinas Perhubungan	0,00	148.337.000,00	(100%)
d. 9.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	364.421.204,00	427.874.709,00	(14,83%)
Dinas Perhubungan	364.421.204,00	427.874.709,00	(14,83%)
e. 9.1.02.01.11 Retribusi Ulang Tera	71.884.000,00	64.240.500,00	11,90%
Dinas Perdagangan	71.884.000,00	64.240.500,00	11,90%

Retribusi Daerah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4 = \frac{2}{3} \times 100\% - 100\%$
f. 9.1.02.01.13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	198.733.966,00	197.330.831,00	0,71%
Dinas Kominfo	198.733.966,00	197.330.831,00	0,71%
2. 9.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha	16.282.356.108,92	16.429.517.339,58	(0,90%)
a. 9.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.474.176.086,92	9.007.624.967,58	(5,92%)
1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.025.000,00	1.569.000,00	220,27%
2) Dinas Perumahan dan Permukiman	179.385.000,00	124.405.000,00	44,19%
3) Disbudparpora	368.756.000,00	250.345.000,00	47,30%
4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM)	176.450.000,00	174.630.000,00	1,04%
5) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	4.549.048.537,00	5.457.360.217,00	(16,64%)
6) Kecamatan Kartoharjo	1.270.070.645,67	1.318.886.834,33	(3,70%)
7) Kecamatan Taman	1.041.859.888,00	806.562.535,00	29,17%
8) Kecamatan Manguharjo	840.267.016,25	848.390.856,25	(0,96%)
9) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	43.314.000,00	25.475.525,00	70,02%
b. 9.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6.263.331.622,00	5.501.134.466,00	13,86%
Dinas Perdagangan	6.263.331.622,00	5.501.134.466,00	13,86%
c. 9.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir	784.061.000,00	1.006.457.700,00	(22,10%)
Dinas Perhubungan	784.061.000,00	1.006.457.700,00	(22,10%)
d. 9.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan	23.079.000,00	26.414.000,00	(12,63%)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.079.000,00	26.414.000,00	(12,63%)
e. 9.1.02.02.09 Tempat Rekreasi dan Olah Raga	737.708.400,00	887.886.206,00	(16,91%)
1) Dinas Perumahan dan Pemukiman	12.500.000,00	853.886.206,00	(98,54%)
2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	725.208.400,00	34.000.000,00	2.032,97%
3. 9.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu	1.190.401.354,00	1.027.513.000,00	(15,85%)
a. 9.1.02.03.01 Retribusi Mendirikan Bangunan	1.189.201.354,00	1.026.433.000,00	(15,86%)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.189.201.354,00	1.026.433.000,00	(15,86%)
b. 9.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek	1.200.000,00	1.080.000,00	11,11%

Retribusi Daerah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4 = \frac{2}{3} \times 100\% - 100\%$
Dinas Perhubungan	1.200.000,00	1.080.000,00	11,11%
	21.264.290.040,92	21.696.850.879,58	(1,99%)

1. Retribusi Jasa Umum

A. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Retribusi jasa umum LO terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO.

- ✓ Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan karcis retribusi parkir/setoran untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp171.940.000,00. Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO periode 31 Desember 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp171.940.000,00. Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp171.940.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp167.605.500,00 terjadi kenaikan sebesar 2,59%.

B. Dinas Perhubungan

Retribusi jasa umum LO terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO, Retribusi pelayanan pasar LO dan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO.

- ✓ Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan karcis retribusi parkir/setoran dari juru parkir untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp2.984.553.408,00. Pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp2.984.553.408,00 yang menjadi piutang retribusi

2023 sebesar Rp0,00 dan piutang tahun lalu sebesar Rp0,00. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.984.553.408,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp3.234.432.000,00 terjadi penurunan sebesar 7,73%.

- ✓ Retribusi pelayanan pasar LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan hasil pelayanan pasar LO untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pelayanan pasar LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp0,00. Retribusi pelayanan pasar LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pelayanan pasar LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp148.337.000,00 terjadi penurunan sebesar 100%.
- ✓ Retribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan hasil pengujian kendaraan bermotor yang telah dilakukan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp364.421.204,00. Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp364.421.204,00. Retribusi pengujian kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp364.421.204,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp427.874.709,00 terjadi penurunan sebesar 14,83%.

C. Dinas Perdagangan

Retribusi jasa umum LO berupa retribusi tera ulang LO

- ✓ Retribusi tera ulang LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp 71.884.000,00. Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah

disetor ke kas daerah sebesar Rp 71.884.000,00 Pendapatan retribusi tera ulang LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp71.884.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tera ulang LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp64.240.500,00 terjadi kenaikan sebesar 11,90%.

D. Dinas Kominfo

Retribusi jasa umum LO berupa retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO.

- ✓ Retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp198.733.966,00. Pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp202.331.966,00 dan yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 adalah sebesar Rp3.598.000,00. Pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp198.733.966,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp197.330.831,00 terjadi kenaikan sebesar 0,71%.

2. Retribusi Jasa Usaha

A. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PU dan TR)

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO

- ✓ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp5.025.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp5.025.000,00. Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah 2023 sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp5.025.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.569.000,00 terjadi kenaikan sebesar 220,27%.

B. Dinas Perumahan dan Pemukiman

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO.

- ✓ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp179.385.000,00. Pendapatan pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp 162.385.000,00 yang menjadi piutang tahun 2023 sebesar Rp17.000.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp179.385.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp124.405.000,00 terjadi kenaikan sebesar 44,19%.
- ✓ Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp12.500.000,00. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp12.500.000,00. Pendapatn retribusi tempat rekreasi dan olahraga LO untuk periode 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga LO periode 31 Desember 2022 sebesar Rp853.886.206,00 terjadi penurunan sebesar 98,54%.

C. Dinas Perhubungan

Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi tempat khusus parkir LO.

- ✓ Retribusi tempat khusus parkir LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau

dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp784.061.000,00. Pendapatan retribusi tempat parkir khusus LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp784.061.000,00 dan sisanya menjadi piutang 2022 sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi tempat parkir khusus LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp784.061.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tempat parkir khusus LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.006.457.700,00 terjadi penurunan sebesar 22,10%.

D. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO.

- ✓ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp368.756.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp368.756.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp368.756.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp250.345.000,00 terjadi kenaikan sebesar 47,30%.
- ✓ Retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp725.208.400,00. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp725.208.400,00 yang menjadi piutang tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp725.208.400,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp34.000.000,00 terjadi kenaikan sebesar 2.032,97%.

E. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKPSDM)

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

- ✓ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas

Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp176.450.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp136.775.000,00 dan yang menjadi piutang tahun berjalan sebesar Rp39.675.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp176.450.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp174.630.000,00 terjadi kenaikan sebesar 1,04%.

F. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

- ✓ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp4.549.048.537,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp3.602.802.949,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp849.722.874,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp1.995.720.122,00 dan sisanya menjadi piutang tahun berjalan sebesar Rp1.724.347.991,00 dan piutang tahun 2022 sebesar Rp1.924.099.651,00. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp4.549.048.537,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp5.457.360.217,00 terjadi penurunan sebesar 16,64%

G. Kecamatan Kartoharjo

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

- ✓ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp1.270.070.645,67. Pendapatan

retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.337.932.175,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp1.081.110.146,00 dan pendapatan diterima dimuka 2022 sebesar Rp1.013.248.616,67. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.270.070.645,67 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.318.886.834,33 terjadi penurunan sebesar 3,70%.

H. Kecamatan Taman

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

- ✓ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp1.041.859.888,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.478.462.780,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp1.185.052.317,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp748.449.425,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.041.859.888,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 806.562.535,00 terjadi kenaikan sebesar 29,17%.

I. Kecamatan Manguharjo

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

- ✓ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp840.267.016,25. Pendapatan

retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.443.472.670. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar Rp1.093.257.877,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp490.052.223,75. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp840.267.016,25 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp848.390.856,25 terjadi penurunan sebesar 0,96%.

J. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi rumah potong hewan LO.

- ✓ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp43.314.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp29.067.000,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2022 adalah sebesar Rp14.247.000,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp43.314.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp25.475.525,00 terjadi kenaikan sebesar 70,02%.
- ✓ Retribusi rumah potong hewan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa

tahun 2023 adalah sebesar Rp23.079.000,00. Pendapatan retribusi rumah potong hewan LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp23.079.000,00. Pendapatan retribusi rumah potong hewan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp23.079.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi rumah potong hewan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp26.414.000,00 terjadi penurunan sebesar 12,63%.

K. Dinas Perdagangan

Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan LO

- ✓ Retribusi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan surat ketetapan/perijinan/yang dipersamakan/karcis retribusi pelayanan pasar untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp 6.263.331.622,00. Pendapatan retribusi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp7.456.013.647,00. Yang menjadi pendapatan diterima dimuka tahun 2022 adalah sebesar Rp62.964.600,00 dan pendapatan diterima dimuka tahun berjalan adalah sebesar Rp31.104.000,00. Yang menjadi piutang tahun 2023 sebesar Rp5.105.708.420,00 dan piutang tahun lalu sebesar Rp31.104.000,00. Pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp6.263.331.622,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp5.501.134.466,00 terjadi kenaikan sebesar 13,86%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)

Retribusi perizinan tertentu LO berupa retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) LO.

- ✓ Retribusi IMB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan IMB yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp1.189.201.354,00. Pendapatan retribusi IMB LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.189.201.354,00 dan yang menjadi piutang tahun lalu adalah sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi IMB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.189.201.354,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi IMB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.026.433.000,00 terjadi kenaikan sebesar 15,86%.

B. Dinas Perhubungan

Retribusi perizian tertentu LO berupa retribusi izin trayek LO.

- ✓ Retribusi izin trayek LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan izin trayek yang diterbitkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp1.200.000,00. Pendapatan retribusi izin trayek LO tahun 2023 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.200.000,00. Pendapatan retribusi izin trayek LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.200.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi izin trayek LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.080.000,00 terjadi kenaikan sebesar 11,11%.

8.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4 = \frac{2}{3} \times 100\% - 100\%$
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO	22.714.358.167,73	18.468.304.240,97	22,99%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa

mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha LO dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.714.358.167,73 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp18.468.304.240,97 terjadi kenaikan sebesar 22,99%.

Perincian pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini. Data tersaji pada lampiran 8.1.1.3.

Tabel 8.1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase % 4=(2/3x100%)-
1	2	3	
1. PDAM	14.613.817.270,30	9.073.418.838,00	61,06%
2. BPR Bank Daerah	(263.592.908,00)	631.456.848,00	(141,74%)
3. Aneka Usaha	1.246.653.376,00	1.777.331.264,00	(29,86%)
4. Bank Jatim	7.117.480.429,43	6.986.097.290,97	1,88%
Total	22.714.358.167,73	18.468.304.240,97	22,99%

1. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan PDAM Tahun 2023 adalah sebesar Rp14.613.817.270,30. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp 14.613.817.270,30 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp9.073.418.838,00 terjadi kenaikan sebesar 61,06%.
2. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak

Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah sesuai laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan BPR Bank Daerah Tahun 2023 adalah sebesar (Rp263.592.908,00). Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar (Rp263.592.908,00) dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda BPR Bank Daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp631.456.848,00 terjadi penurunan sebesar 141,74%.

3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan PD Aneka Usaha LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.246.653.376,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.246.653.376,00 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perumda Aneka Usaha LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.777.331.264,00 terjadi penurunan sebesar 29,86%.
4. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan Bank Jatim LO Tahun 2023 telah tersaji Rp7.117.480.429,43. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp7.117.480.429,43 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp6.986.097.290,97 terjadi kenaikan sebesar 1,88%.

8.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)- 100%
Lain-lain PAD Yang Sah LO	106.334.681.417,37	112.571.371.767,28	(5,54%)

Jumlah pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp106.334.681.417,37 merupakan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipisahkan yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2023. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun pada tahun 2023 tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah.

Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan LO, jasa giro LO, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan LO, hasil pengelolaan dana bergulir LO, pendapatan lain-lain LO, dan pendapatan BLUD LO. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp106.334.681.417,37 dibandingkan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp112.571.371.767,28 terjadi penurunan sebesar 5,54%.

Perincian obyek pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.1.4.1
Lain-Lain PAD yang Sah LO

4.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
	1	2	3	4 = (3/2)
4.1.4.02	Jasa giro	599.729.647,13	89.080.155,53	573,25%
4.1.4.07	Pendapatan Bunga deposito	2.880.498.521,96	6.961.975.880,18	(58,63%)
4.1.4.06	Denda keterlambatan pelaksanaan keg	172.086.543,39	56.062.722,01	206,95%
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	1.187.998.977,67	2.601.511.678,09	(54,33%)
4.1.4.13	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (LKK)	837.527.189,49	846.963.261,47	(1,11%)
4.1.4.15	Pendapatan BLUD	99.873.032.079,73	101.359.836.043,00	(1,47%)
4.1.4.14	Denda Pajak	629.196.758,00	624.387.027,00	0,77%

4.1.4.21 Denda atas pelanggaran lengkap peraturan daerah	121.838.700,00	0,00	100%
4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	32.773.000,00	31.555.000,00	3,86%
Jumlah	106.334.681.417,37	112.571.371.767,28	(5,54%)

Perincian pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 8.1.1.4.2
Lain-Lain PAD yang Sah LO - OPD

Lain-lain PAD Yang Sah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Dinas Naker	762.194.165,48	748.401.433,61	1,84%
a. LKK	762.194.165,48	748.401.433,61	1,84%
2. Dinas Kesehatan dan RSUD	99.873.032.079,73	101.359.836.043,00	(1,47%)
a. Pendapatan BLUD	99.873.032.079,73	101.359.836.043,00	(1,47%)
3. BAPENDA	629.196.758,00	624.387.027,00	0,77%
a. Pendapatan Denda Pajak	629.196.758,00	624.387.027,00	0,77%
4. BKAD	4.915.646.714,16	9.807.192.263,67	(49,88%)
a. Jasa giro	599.729.647,13	89.080.155,53	573,25%
b. Pendapatan bunga deposito	2.880.498.521,96	6.961.975.880,18	(58,63%)
c. Hasil pengelolaan dana bergulir	75.333.024,01	98.561.827,86	(23,57%)
d. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	172.086.543,39	56.062.722,01	206,95%
e. Pendapatan pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan	1.187.998.977,67	2.601.511.678,09	(54,33%)
5. Dinas Perhubungan	121.462.500,00	0,00	100%
a. Pendapatan denda atas pelanggaran	121.462.500,00	0,00	100%
6. Dinas Pertanian	32.773.000,00	31.555.000,00	3,86%
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	32.773.000,00	31.555.000,00	3,86%
7. Dinas Perkim	376.200,00	0,00	100%
a. Pendapatan denda atas pelanggaran	376.200,00	0,00	100%
TOTAL	106.334.681.417,37	112.571.371.767,28	(5,54%)

1. Dinas Naker

- ✓ Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) LO. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan persentasi bagian hasil atas laba LKK menurut Laporan Keuangan LKK di seluruh kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp762.194.165,48. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp762.194.165,48 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp748.401.433,61 terjadi penurunan sebesar 1,84%.
2. Dinas Kesehatan dan RSUD
- ✓ Pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan jasa pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp99.873.032.079,73. Terdapat pembayaran piutang tahun berjalan sebesar Rp 7.984.145.183,67 dan piutang tahun 2022 sebesar Rp6.468.835.722,00. Pendapatan RSUD LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp99.873.032.079,73 dibandingkan dengan pendapatan BLUD Puskesmas LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp101.359.836.043,00 terjadi penurunan sebesar 1,47%.
3. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
- ✓ Pendapatan Badan Pendapatan Daerah LO berupa Pendapatan lain-lain LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp629.196.758,00. Pendapatan lain-lain LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp629.196.758,00 dibandingkan dengan pendapatan lain-lain LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp624.387.027,00 terjadi kenaikan sebesar 0,77%.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

- ✓ Pendapatan jasa giro LO berupa pendapatan jasa giro RKUD dan jasa giro pemegang kas LO. Pendapatan jasa giro LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan jasa giro RKUD dan seluruh bendahara pengeluaran non BLUD untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp599.729.647,13. Pendapatan jasa giro LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp599.729.647,13 dibandingkan dengan pendapatan jasa giro LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp89.080.155,53 terjadi kenaikan sebesar 573,25%.
- ✓ Pendapatan bunga deposito LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan bunga deposito RKUD dan seluruh bendahara pengeluaran non BLUD untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp2.880.498.521,96. Pendapatan bunga deposito LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.880.498.521,96 dibandingkan dengan pendapatan bunga deposito LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp6.961.975.880,18 terjadi penurunan sebesar 79,88%.
- ✓ Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) LO. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan persentasi bagian hasil atas laba LKK menurut Laporan Keuangan LKK di seluruh kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp75.333.024,01. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp75.333.024,01. Dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK Lo untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp98.561.827,86 terjadi penurunan sebesar 23,57%.

- ✓ Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2023 sebesar Rp172.086.543,39. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp172.086.543,39 dibandingkan dengan pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp56.062.722,01 terjadi kenaikan sebesar 206,95%.
 - ✓ Pendapatan dari pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp1.187.998.977,67. Pendapatan dari pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.187.998.977,67 dibandingkan dengan pendapatan pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp2.601.511.678,09 terjadi penurunan sebesar 54,33%.
5. Dinas Perhubungan
- ✓ Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2023 sebesar Rp121.462.500,00. Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp121.462.500,00 dibandingkan dengan pendapatan atas denda atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100%.
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- ✓ Pendapatan penjualan hasil perikanan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan hasil kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk masa tahun 2023 adalah sebesar Rp32.773.000,00. Pendapatan penjualan hasil perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp32.773.000,00 dibandingkan dengan pendapatan penjualan hasil perikanan LO untuk periode yang berakhir

31 Desember 2022 sebesar Rp31.555.000,00 terjadi kenaikan sebesar 3,86%.

7. Dinas Perumahan dan Permukiman

- ✓ Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2023 sebesar Rp376.200,00. Pendapatan atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp376.200,00 dibandingkan dengan pendapatan atas denda atas pelanggaran (lengkap peraturan) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100%.

8.1.2. PENDAPATAN TRANSFER LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Pendapatan Transfer LO	880.526.052.824,80	796.504.081.567,00	8,23%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 . Pendapatan transfer LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah untuk tahun berjalan. Pendapatan transfer LO terdiri transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO, transfer pemerintah pusat – lainnya LO, dan transfer pemerintah provinsi LO. Pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp880.526.052.824,80 dibandingkan pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp796.504.081.567,00 terjadi kenaikan sebesar 10,55%.

Perincian pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2
Pendapatan Transfer LO

Pendapatan Transfer LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
1. Transfer Pemerinta Pusat – Dana Perimbangan LO	684.539.046.012,80	668.609.902.487,00	(0,38%)

2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	74.714.922.000,00	28.870.790.000,00	158,79%
3. Transfer Pemerintah Provinsi LO	121.272.084.812,00	99.023.389.080,00	(22,47%)
Total	880.526.052.824,80	796.504.081.567,00	8,23%

8.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO	684.539.046.012,80	668.609.902.487,00	(2,38%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO terdiri bagi hasil pajak LO, bagi hasil bukan pajak/SDA LO, DAU LO, DAK LO dan bagi hasil cukai LO. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil atau Dana Alokasi Umum yang di salurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp684.539.046.012,80 dibandingkan 31 Desember 2022 Rp668.609.902.487,00 terjadi penurunan sebesar 0,38%.

Perincian pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.1
Tranfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
---	--------------------------	--------------------------	--------------

1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Bagi hasil pajak LO	42.560.552.000,00	29.804.646.600,00	42,80%
2. Bagi hasil SDA LO	36.475.210.342,00	82.308.678.000,00	(55,68%)
3. DAU LO	487.141.770.396,00	463.486.748.121,00	5,10%
4. DAK LO	82.402.483.839,80	71.207.048.405,00	15,72%
5. Bagi hasil cukai LO	35.959.029.435,00	21.802.781.361,00	64,93%
Total	684.539.046.012,80	668.609.902.487,00	(0,38%)

8.1.2.1.1. Bagi Hasil Pajak LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Bagi Hasil Pajak LO	42.560.552.000,00	29.804.646.600,00	(42,80%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan bagi hasil pajak LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan bagi hasil pajak LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang telah diterima oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan bagi hasil pajak LO terdiri bagi hasil PBB LO, bagi hasil PPh Pasal 21, 25 dan 29 LO. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp42.560.552.000,00 dibandingkan pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp29.804.646.600,00 terjadi penurunan sebesar 42,80%.

Berdasarkan koreksi BPK terdapat penyesuaian atas pengakuan Aset Lainnya yang berasal dari Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak - LO berdasarkan Surat Edaran Nomor : S-574/wpb.16/2024 tentang penyampaian data saldo rekening *treasury deposit facility* transfer ke daerah (TDF - TKD) periode 1 Desember 2023 - 12 Januari 2024 sebesar Rp18.468.416.000,00.

Perincian pendapatan bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel 8.1.2.1.1
Bagi Hasil Pajak LO

Bagi Hasil Pajak LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
			100%

1. PBB LO	2.725.606.000,00	5.510.384.675,00	(50,54%)
2. PPh Pasal 21,25,29 LO	39.834.946.000,00	24.294.261.925,00	(63,97%)
Total	42.560.552.000,00	29.804.646.600,00	(42,80%)

1. Pendapatan bagi hasil pajak-PBB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil pajak-PBB LO dari pemerintah pusat sebesar Rp2.725.606.000,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan bagi hasil pajak-PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.725.606.000,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak-PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp5.510.384.675,00 terjadi penurunan sebesar 50,54%.
2. Pendapatan bagi hasil pajak – PPh Pasal 21, 25, 29 LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil pajak – PPh Pasal 21, 25, 29 LO dari pemerintah pusat sebesar Rp39.834.946.000,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan bagi hasil pajak PPh Pasal 21, 25, 29 LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp21.366.530.000,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil pajak – PPh Pasal 21, 25, 29 LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp24.294.261.925,00 terjadi penurunan sebesar 42,80%.

8.1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4 = \frac{2}{3} \times 100\% - 100\%$
Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA LO	36.475.210.342,00	82.308.678.000,00	(55,68%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan bagi

hasil bukan pajak/SDA LO terdiri bagi hasil sumber daya kehutanan LO, bagi hasil pungutan hasil perikanan LO, dan bagi hasil pertambangan umum migas LO. Pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp36.475.210.342,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp82.308.678.000,00 terjadi penurunan sebesar 55,68%.

Perincian pendapatan bagi hasil bukan pajak/SDA LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.1.2
Bagi Hasil Bukan Pajak LO

Bagi Hasil Bukan Pajak LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-
1. DBH SDA Minyak Bumi	33.797.056.552,00	76.819.003.249,00	(56,00%)
2. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	12.969.320,00	46.240.672,00	(71,95%)
3. DBH SDA Mineral dan Batu Bara	938.550.591,00	3.049.142.985,00	(69,22%)
4. DBH SDA Kehutanan	281.746.668,00	435.980.094,00	(35,38%)
5. DBH SDA Perikanan	1.444.887.211,00	1.958.311.000,00	(26,22%)
Total	36.475.210.342,00	82.308.678.000,00	(55,68%)

1. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA minyak bumi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil bukan pajak- SDA minyak bumi LO dari pemerintah pusat sebesar Rp33.797.056.552,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA minyak bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp33.797.056.552,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA minyak bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp76.819.003.249,00 terjadi penurunan sebesar 56,00%.
2. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA panas bumi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas

Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak-panas bumi LO dari pemerintah pusat sebesar Rp 12.969.320,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA panas bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp12.969.320,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA panas bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp46.240.672,00 terjadi penurunan sebesar 71,95%.

3. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara LO dari pemerintah pusat sebesar Rp938.550.591,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp938.550.591,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA mineral dan batu bara LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp3.049.142.985,00 terjadi penurunan sebesar 69,22%.
4. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA kehutanan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak- SDA kehutanan LO dari pemerintah pusat sebesar Rp281.746.668,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA kehutanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp281.746.668,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA kehutanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp435.980.094,00 terjadi penurunan sebesar 35,38%.
5. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA perikanan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran bagi hasil bukan pajak- SDA perikanan LO dari pemerintah pusat sebesar Rp1.444.887.211,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.444.887.211,00 dibandingkan dengan pendapatan bagi hasil bukan pajak- SDA perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.958.311.000,00 terjadi penurunan sebesar 26,22%.

8.1.2.1.3.Dana Alokasi Umum (DAU) LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Dana Alokasi Umum LO	487.141.770.396,00	463.486.748.121,00	5,10%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan DAU LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan DAU LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan DAU LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp487.141.770.396,00 apabila dibandingkan pendapatan DAU LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp463.486.748.121,00 terjadi kenaikan sebesar 5,10%.

8.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Dana Alokasi Khusus/DAK LO	82.402.483.839,80	71.207.048.405,00	15,72%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan DAK LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan DAK LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 bahwa untuk Dana Alokasi Khusus Pemerintah Madiun mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus dengan realisasi sampai dengan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp82.402.483.839,80. Pendapatan DAK LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp82.402.483.839,80 dibandingkan DAK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp71.207.048.405,00 terjadi kenaikan sebesar 15,72%.

Perincian pendapatan DAK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus LO

Penerimaan Dana Alokasi Khusus	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase
1	2	3	4
4.2.01.01.03 DAK Fisik	5.699.869.054,00	2.921.025.894,00	95,13%
4.2.01.01.04 DAK Non Fisik	76.702.614.785,80	68.286.022.511,00	12,33%
Jumlah	82.402.483.839,80	71.207.048.405,00	15,72%

8.1.2.1.5. Bagi Hasil Cukai LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Bagi Hasil Cukai LO	35.959.029.435,00	21.802.781.361,00	64,93%

Jumlah pendapatan bagi hasil cukai LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan bagi hasil cukai LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan bagi hasil cukai LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp35.959.029.435,00 dibandingkan bagi hasil cukai LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp21.802.781.361,00 terjadi kenaikan sebesar 64,93%.

8.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	74.714.922.000,00	28.870.790.000,00	158,79%

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan transfer pemerintah

pusat-lainnya LO terdiri dana otonomi khusus LO dan dana penyesuaian LO. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp74.714.922.000,00 dibandingkan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp28.870.790.000,00 terjadi kenaikan sebesar 158,79%

Perincian pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.2
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. DAK otonomi khusus LO	0,00	0,00	0,00
2. Dana penyesuaian LO	74.714.922.000,00	28.870.790.000,00	158,79%
Total	74.714.922.000,00	28.870.790.000,00	158,79%

8.1.2.2.1.Dana Penyesuaian LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dana Penyesuaian LO	74.714.922.000,00	28.870.790.000,00	158,79%

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat-dana penyesuaian LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan dana penyesuaian LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan dana penyesuaian LO terdiri dana insentif daerah (DID) LO dan dana insentif daerah tambahan LO.

Perincian pendapatan dana penyesuaian LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.2.1
Dana Penyesuaian LO

Dana Penyesuaian LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%

1. Dana insentif daerah (DID) LO	74.714.922.000,00	28.870.790.000,00	158,79%
Total	74.714.922.000,00	28.870.790.000,00	158,79%

Pendapatan dana insentif daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana insentif daerah LO, untuk tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota Madiun mendapatkan alokasi pendapatan dana insentif daerah LO sebesar Rp74.714.922.000,00. Pendapatan Dana Insentif Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp74.714.922.000,0 dibandingkan pendapatan Dana Insentif Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp28.870.790.000,00 mengalami kenaikan sebesar 158,79%.

8.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-
Transfer Pemerintah Provinsi LO	121.272.084.812,00	99.023.389.080,00	22,47%

Jumlah pendapatan transfer pemerintah provinsi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO terdiri dana bagi hasil pajak LO dan dana bagi hasil lainnya LO. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp121.272.084.812,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp99.023.389.080,00 terjadi kenaikan sebesar 22,47%.

Perincian pendapatan transfer pemerintah provinsi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.3
Transfer Pemerintah Provinsi LO

Transfer Pemerintah Provinsi LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%)-100\%$
1. Dana bagi hasil pajak LO	120.565.582.200,00	98.284.006.080,00	22,67%
2. Dana bagi hasil lainnya LO	0,00	0,00	0,00
3. Bantuan Keuangan LO	706.502.612,00	739.383.000,00	(4,45%)
Total	121.272.084.812,00	99.023.389.080,00	22,47%

8.1.2.3.1. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%)-100\%$
Pendapatan Dana Bagi Pajak LO	120.565.582.200,00	98.284.006.080,00	22,67%

Jumlah pendapatan dana bagi hasil pajak LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah.

Pendapatan dana bagi hasil pajak LO terdiri pajak kendaraan bermotor (PKB) LO, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) LO, pajak pemanfaatan air permukaan LO, dan pajak rokok LO. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp120.565.582.200,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp98.284.006.080,00 terjadi penurunan sebesar 22,67%.

Perincian pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.3.1
Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak LO

Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%)-100\%$
4.2.02.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak PKB Lo	34.918.489.800,00	30.500.722.060,00	14,48%
4.2.02.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Pajak BBNKB Lo	15.339.681.100,00	13.983.937.380,00	9,70%

4.2.02.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak PBBKB Lo	29.292.250.400,00	18.943.492.380,00	54,63%
4.2.02.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Lo	371.681.600,00	270.478.040,00	37,42%
4.2.02.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Lo	40.643.479.300,00	34.585.376.220,00	17,52%
Total		120.565.582.200,00	98.284.006.080,00	22,67%

1. Pendapatan dana bagi hasil PKB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil PKB LO sebesar Rp34.918.489.800,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan dana bagi hasil PKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp34.918.489.800,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil PKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp30.500.722.060,00 terjadi kenaikan sebesar 14,48%.
2. Pendapatan dana bagi hasil BBNKB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil BBNKB LO sebesar Rp15.339.681.100,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan dana bagi hasil BBNKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp15.339.681.100,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil BBNKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp13.983.937.380,00 terjadi kenaikan sebesar 9,70%.
3. Pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO sebesar Rp29.292.250.400,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp29.292.250.400,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp18.943.492.380,00 terjadi kenaikan sebesar 54,63%.

4. Pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan
5. setoran dana bagi hasil pajak air permukaan LO sebesar Rp371.681.600,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp371.681.600,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp270.478.040,00 terjadi kenaikan sebesar 37,42%.
6. Pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil pajak rokok LO sebesar Rp40.643.479.300,00 untuk masa tahun 2023. Pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp 40.643.479.300,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp34.585.376.220,00 terjadi kenaikan sebesar 17,52%.

8.1.2.3.2. Bantuan Keuangan LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4 = \frac{2}{3} \times 100\% - 100\%$
Bantuan Keuangan dari Provinsi LO	706.502.612,00	739.383.000,00	(4,45%)

Jumlah pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO berupa bantuan keuangan penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah dan guru swasto LO, bantuan keuangan pelaksanaan hari aksara LO, bantuan keuangan community college LO, bantuan keuangan BOP Madiun LO, bantuan keuangan peningkatan hari jadi provinsi LO, bantuan keuangan pengembangan taman posyandu LO, Kegiatan Seleksi dan Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Diknas Berprestasi LO, Setoran Bantuan

Provinsi Honor 1 Dokter Puskesmas rawat Inap dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp706.502.612,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp739.383.000,00 terjadi penurunan sebesar 4,45 %.

Perincian pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.2.3.2
Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Lainnya LO

Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Lainnya LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Bantuan keuangan dari provinsi LO	706.502.612,00	739.383.000,00	(4,45%)
Total	706.502.612,00	739.383.000,00	(4,45%)

8.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO	22.889.792.772,67	1.328.530.246,00	1.622,94%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun pada tahun 2023 tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO terdiri pendapatan hibah LO, pendapatan darurat LO, pendapatan lainnya LO. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.889.792.772,67 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.328.530.246,00 terjadi kenaikan sebesar 1.622,94%.

Perincian pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.3
Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
1. Pendapatan hibah LO	22.889.792.772,67	1.328.530.246,00	1.622,94%
2. Pendapatan lainnya LO	0,00	0,00	0,00
Total	22.889.792.772,67	1.328.530.246,00	1.622,94%

8.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Pendapatan Dana Hibah LO	22.889.792.772,67	1.328.530.246,00	1.622,94%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan dana hibah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Pendapatan dana hibah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan dana hibah terdiri pendapatan hibah tugas pembantuan dari pemerintah pusat LO, pendapatan hibah dekonsentrasi dari provinsi, pendapatan hibah dari bantuan operasional sekolah, pendapatan hibah bantuan operasional sekolah (BOS) SMPN LO, pendapatan hibah bantuan operasional sekolah (BOS) SDN LO yang dianggarkan di BPKAD selaku SKPKD, pendapatan hibah blockgrant LO, pendapatan hibah barang dari pemerintah pusat LO, pendapatan hibah barang dari pemerintah provinsi LO, pendapatan hibah barang dari komite LO, pendapatan hibah lainnya LO. Pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.889.792.772,67 dibandingkan pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.328.530.246,00 terjadi kenaikan sebesar 1.622,94%.

Perincian pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.1.3.1
Pendapatan Hibah LO

Pendapatan Dana Hibah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)- 100%
1. Pendapatan Hibah LO Dinkes	265.329.805,00	138.095.610,00	92,13%
2. Pendapatan Hibah LO DPU	1.164.905.527,67	0,00	100%
3. Pendapatan Hibah LO Dinas Perkim	20.604.672.812,00	0,00	100%
4. Pendapatan Hibah LO Satpol PP	42.327.500,00	0,00	100%
5. Pendapatan Hibah LO Dinsos	50.400.000,00	0,00	100%
6. Pendapatan Hibah LO Dishub	2.438.739,00	0,00	100%
7. Pendapatan Hibah LO Diskominfo	2.020.270,00	278.000.000,00	(99,27%)
8. Pendapatan Hibah LO Dispora	55.114.200,00	0,00	100%
9. Pendapatan Hibah LO Dinas Perpus	10.149.000,00	85.986.500,00	(88,20%)
10. Pendapatan Hibah LO Pereksos	533.000.000,00	194.100.000,00	174,60%
11. Pendapatan Hibah LO Sekwan	4.499.000,00	0,00	100%
12. Pendapatan Hibah LO Manguharjo	4.550.000,00	0,00	100%
Pendapatan Dana Hibah LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)- 100%
13. Pendapatan Hibah LO Kec. Taman	80.385.919,00	0,00	100%
14. Pendapatan Hibah LO Bag. Umum	0,00	398.986.500,00	(100%)
15. Pendapatan Hibah LO Disnaker	0,00	26.061.636,00	(100%)
16. Pendapatan Hibah LO Dukcapil	0,00	203.700.000,00	(100%)
17. Pendapatan Hibah LO Kec.Kartoharjo	0,00	3.600.000,00	(100%)
18. Pendapatan Hibah Dinas Perdagangan	70.000.000,00	0,00	100%
Total	22.889.792.772,67	1.328.530.246,00	1.622,94%

8.2. BEBAN OPERASI

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100 %)-100%
Beban Operasi	1.137.849.555.033,26	1.084.574.793.500,74	4,91%

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban operasi merupakan beban yang menjadi kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum, pemakaian/konsumsi aset, penurunan nilai aset sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyisihan kerugian investasi non permanen, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tidak berwujud dan beban lain lain. Beban lain-lain terdiri dari belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi (asset extracom). Beban operasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.137.849.555.033,26 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.084.574.793.500,74 terjadi kenaikan 4,91%

Perincian beban operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2
Beban Operasi

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100 0%)-100%
1. Beban pegawai	422.881.149.234,89	402.259.612.087,25	5,13%
2. Beban persediaan	162.232.535.065,04	161.980.339.760,76	0,16%
3. Beban jasa	247.925.077.120,63	243.168.503.606,19	1,96%
4. Beban pemeliharaan	31.556.734.043,18	33.681.434.482,28	(6,31%)
5. Beban perjalanan dinas	42.894.685.591,00	39.903.387.457,00	7,50%
6. Beban Subsidi	99.146.000,00	6.480.445.500,00	(98,47%)
7. Beban hibah	44.134.020.599,50	11.682.323.718,00	277,78%
8. Beban bantuan sosial	31.804.857.500,00	33.248.185.680,00	(4,34%)
9. Beban Penyisihan Piutang	578.175.207,58	1.450.381.015,56	(60,14%)

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
10. Beban Penyusutan	150.036.103.064,44	146.351.482.025,70	2,52%
11. Beban Amortisasi	998.849.333,00	1.985.993.167,00	(49,71%)
12. Beban Penyusutan Aset Lain-lain	492.226.518,00	441.991.276,00	11,37%
13. Beban Lain-lain	2.215.995.756,00	1.940.713.725,00	14,18%
Jumlah	1.137.849.555.033,26	1.084.574.793.500,74	4,91%

8.2.1. Beban Pegawai

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase % (Rp)
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Beban Pegawai	422.881.149.234,89	402.259.612.087,25	5,13%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban pegawai mengakui beban yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai terdiri dari beban pegawai yang didanai dari APBD tahun anggaran 2023, beban pegawai yang didanai BLUD, beban pegawai yang didanai dari BOS. Beban pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp422.881.149.234,89 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp402.259.612.087,25 terjadi kenaikan sebesar 5,13%.

Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.1
Beban Pegawai
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Beban Pegawai	Ket	31 Desember 2023 (Rp)
1. Belanja Pegawai APBD	+	415.044.760.473,39
2. Belanja Pegawai BOS	+	0,00
3. Belanja Pegawai BLUD	+	8.851.392.371,00
4. Utang Belanja Pegawai 2023	+	4.261.848.017,50
5. Utang Belanja Pegawai 2022	(-)	(5.276.851.627,00)
Jumlah Beban Pegawai (1+2+3+4-5)		422.881.149.234,89

8.2.1.1. Beban Pegawai APBD

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Beban Pegawai (APBD)	415.044.760.473,39	394.493.672.383,25	5,21%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pegawai yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2023 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban pegawai mengakui beban yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai terdiri dari beban gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah, beban honorarium PNS, beban honorarium non PNS, beban uang lembur. Beban pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp415.044.760.473,39 dibandingkan beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp394.493.672.383,25 terjadi kenaikan sebesar 5,21%.

Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.1.1
Beban Pegawai APBD

Beban Pegawai Per OPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Dinas Pendidikan	159.677.191.999,00	146.745.814.706,00	8,81%
Dinas Kesehatan KB	63.072.294.006,00	50.335.461.548,00	25,30%
Dinas PU TR	6.741.362.679,00	7.294.620.499,00	(7,58%)
Dinas Perkim	4.787.941.364,00	4.928.758.233,00	(2,86%)
Kantor Satpol PP	6.239.014.742,00	6.921.448.013,00	(9,86%)
BPBD	1.701.613.226,00	1.529.845.511,00	11,23%
Dinas Sosial	5.424.675.511,00	5.240.733.141,00	3,51%
Dinas Tenaga Kerja	5.067.862.752,00	4.725.786.477,00	7,24%

Beban Pegawai Per OPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Dinas LH	9.297.966.573,00	10.126.696.205,00	(8,18%)
Dispendukcapil	4.317.572.955,00	3.763.290.319,00	14,73%
Dinas Perhubungan	6.228.595.727,00	6.340.822.791,00	(1,77%)
Dinas Infokom	4.931.346.454,00	5.148.484.206,00	(4,22%)
Dinas PM, PTSP/KPPT	3.818.343.136,00	3.784.736.829,00	0,89%
Dinas Budparpora	4.265.260.370,00	4.147.363.429,00	2,84%
Dinas Perpustakaan	3.723.966.456,00	3.340.386.062,00	11,48%
Bagian Pemerintahan	816.749.507,00	783.029.832,00	4,31%
Bagian Organisasi	790.595.690,00	752.659.122,00	5,04%
Bagian Umum	11.090.677.770,00	10.527.377.772,00	5,35%
Bagian Hukum	829.661.789,00	1.167.982.365,00	(28,97%)
Bagian Perekkesra	906.628.617,00	979.512.379,00	(7,44%)
Bagian Adbang	1.652.305.058,00	1.531.030.620,00	7,92%
Sekretariat DPRD	17.377.019.689,00	18.575.840.357,00	(6,45%)
BKD	5.690.093.810,00	5.494.527.396,00	3,56%
BPKAD	18.764.087.938,00	20.477.087.237,00	(8,37%)
Bapenda	7.725.180.552,39	8.693.387.116,25	(11,14%)
Inspektorat	7.166.570.507,00	7.297.810.514,00	(1,80%)
BAPPEDA	4.693.769.022,00	4.706.023.722,00	(0,26%)
Kec Kartoharjo	10.742.772.955,00	10.978.147.747,00	(2,14%)
Kec Manguharjo	11.070.556.260,00	10.998.897.097,00	0,65%
Kec Taman	10.266.975.319,00	11.216.851.061,00	(8,47%)
Bakesbangpol	3.618.182.330,00	3.424.160.333,00	5,67%
Dinas Pertanian KP	4.204.677.559,00	4.184.281.170,00	0,49%
Dinas Perdagangan	8.343.248.151,00	8.330.818.574,00	0,15%
Total	415.044.760.473,39	394.493.672.383,25	5,21%

8.2.1.2. Beban Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Beban Pegawai BLUD	8.851.392.371,00	8.411.320.725,00	5,23%

Jumlah beban pegawai BLUD yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban pegawai BLUD mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BLUD terdiri dari beban pegawai BLUD Puskesmas dan beban pegawai blud RSUD. Beban pegawai BLUD untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.851.392.371,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.411.320.725,00 terjadi kenaikan sebesar 5,23%.

Perincian beban pegawai BLUD yang berakhir periode 31 Desember 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.1.2
Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) -$
1. RSUD	8.851.392.371,00	8.142.010.725,00	5,23%
2. Puskesmas Ngegong	0,00	57.980.000,00	(100%)
3. Puskesmas Manguharjo	0,00	42.296.000,00	(100%)
4. Puskesmas Banjarejo	0,00	42.296.000,00	(100%)
5. Puskesmas Demangan	0,00	43.096.000,00	(100%)
6. Puskesmas Sukosari	0,00	42.296.000,00	(100%)
7. Puskesmas Tawangrejo	0,00	41.346.000,00	(100%)
Total	8.851.392.371,00	8.411.320.725,00	5,23%

8.2.1.3. Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) -$
Beban Pegawai BOS	0,00	1.501.667.000,00	(100%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai BOS yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban pegawai BOS mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BOS pendidikan dasar dan menengah negeri yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BOS mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BOS pendidikan dasar dan menengah negeri yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BOS meliputi beban pegawai BOS SDN, beban pegawai BOS SMPN. Beban pegawai BOS untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.501.667.000,00 terjadi penurunan sebesar 100%.

Beban Pegawai BOS sebesar Rp0,00 merupakan beban pegawai yang tidak dikeluarkan melalui rekening kas daerah tetapi dilaksanakan di masing masing rekening BOS sekolah negeri. Perincian beban pegawai BOS yang berakhir untuk periode 31 Desember 2023 tersaji pada table dibawah ini.

Tabel 8.2.1.3

Beban Pegawai BOS

Beban Pegawai BOS	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-
1. Pegawai BOS SDN	0,00	694.447.500,00	(100%)
2. Pegawai BOSSMPN	0,00	807.220.000,00	(100%)
Total	0,00	1.501.667.500,00	(100%)

8.2.2. Beban Persediaan

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-
Beban Persediaan	162.232.535.065,04	161.980.339.760,76	0,16%

Jumlah beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 merupakan konsumsi/pemakaian persediaan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun. Beban persediaan mengakui konsumsi/pemakaian persediaan tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban persediaan mengakui konsumsi/pemakaian persediaan yang berasal dari sisa persediaan tahun lalu, hasil pengadaan dana APBD tahun anggaran 2023 hasil pengadaan dana BOS, hasil pengadaan dana BLUD, hasil pengadaan blockgrant, hasil pengadaan komite sekolah, hasil pengadaan tugas pembantuan, hasil pengadaan dekonsentrasi, hibah barang persediaan lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2023. Pencatatan persediaan menggunakan pendekatan beban, sehingga setiap belanja barang jasa berupa belanja persediaan di catat sebagai beban persediaan dan pada akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk mengetahui persediaan akhir. Beban persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp162.232.535.065,04 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp161.980.339.760,76 terjadi kenaikan sebesar 0,16%.

Perincian beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.2
Beban Persediaan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Ket	31 Desember 2023 (Rp)
1. Pemakaian Persediaan Tahun Lalu	+	11.423.499.720,00
2. Belanja Persediaan APBD	+	119.688.351.728,50
3. Belanja Persediaan BLUD	+	31.180.220.179,00
4. Belanja Persediaan BOS	+	8.048.488.778,00
5. BOK	+	2.902.052.980,00
6. Reklas Barang Jasa	-	(7.851.641.994,50)
7. Utang Belanja	+	9.211.207.065,30
8. Koreksi Utang	-	(367.272.594,80)
9. Koreksi Aset	+	30.030.000,00
10. Sisa Persediaan Tahun 2023	-	(12.032.400.796,46)
Jumlah Beban Persediaan (1+2+3+4+5-6+7-8+9-10)		162.232.535.065,04

8.2.3. Beban Jasa

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase % 4=(2/3x100%)
1	2	3	
Beban Jasa	247.925.077.120,63	243.168.503.606,19	1,96%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban jasa atas penggunaan jasa oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban jasa mengakui penggunaan jasa yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban jasa mengakui penggunaan jasa yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2023, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah jasa lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama berjalan. Beban jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp247.925.077.120,63 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp243.168.503.606,19 terjadi kenaikan sebesar 1,96%.

Perincian beban jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.3
Beban Jasa
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Beban Jasa	Ket	31 Desember 2023 (Rp)
1. Belanja jasa APBD	+	194.536.222.012,63
2. Belanja jasa BLUD	+	7.849.373.216,00
3. Belanja jasa BOS	+	48.646.782.419,00
4. BOK	+	817.486.346,00
5. Utang Jasa 20NN	+	3.419.081.173,00
6. Utang Jasa 20NN-1	-	(2.949.683.802,00)
7. Koreksi Beban Jasa	+	440.000,00
8. Koreksi Beban Jasa	-	(474.063.684,00)
9. Penyesuaian Aset	-	(32.440.000,00)
10. Reklas Aset	+	402.413.790,00
11. Hibah	-	(3.926.482.600,00)
12. Koreksi Belanja Non Tunai	-	(364.051.750,00)
Jumlah Beban Persediaan (1+2+3+4+5-6+7-8-9+10-11-12)		247.925.077.120,63

8.2.4. Beban Pemeliharaan

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase % $4=(2/3 \times 100\%)$
1	2	3	
Beban Pemeliharaan	31.556.734.043,18	33.681.434.482,28	(6,31%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban pemeliharaan mengakui beban yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan aset yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pemeliharaan mengakui pengeluaran biaya pemeliharaan yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2023, dana BOS, hasil dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah jasa lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp31.556.734.043,18 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp33.681.434.482,28 penurunan sebesar 6,31%.

Perincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.4
Beban Pemeliharaan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Beban Pemeliharaan	Ket	31 Desember 2023 (Rp)
1. Belanja pemeliharaan APBD	+	25.428.091.070,18
2. Belanja pemeliharaan BLUD	+	3.986.889.031,00
3. Belanja pemeliharaan BOS	+	1.738.679.342,00
4. BOK	+	1.000.000,00
5. Utang 20NN	+	0,00
6. Utang 20NN-1	-	(0,00)
7. Koreksi Aset	+	402.074.600,00
Jumlah Beban Persediaan (1+2+3+4-5+6)		31.556.734.043,18

8.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase % 4=(2/3x100%)-
1	2	3	
Beban Perjalanan Dinas	42.894.685.591,00	39.903.387.457,00	7,50%

Jumlah tersebut merupakan saldo beban perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban perjalanan dinas mengakui beban perjalanan dinas yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban perjalanan dinas mengakui pengeluaran biaya perjalanan dinas yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2023 dana BLUD, dana BOS, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2022. Beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp42.894.685.591,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp39.903.387.457,00 terjadi kenaikan sebesar 7,50%

Perincian beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.5
Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Beban Pemeliharaan	Ket	31 Desember 2023 (Rp)
1. Belanja Perjalanan Dinas APBD	+	40.389.273.004,00
2. Belanja Perjalanan Dinas BLUD	+	1.569.751.087,00
3. Belanja Perjalanan Dinas BOS	+	119.905.000,00
4. Utang 20NN	+	0,00
5. Utang 20NN-1	(-)	(0,00)
6. BOK	+	815.756.500,00
Jumlah Beban Persediaan (1+2+3+4-5+6)		42.894.685.591,00

8.2.6. Beban Subsidi

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Beban Subsidi	99.146.000,00	6.480.445.500,00	(98,47%)

Jumlah tersebut merupakan beban Subsidi yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun untuk mengurangi dampak inflasi pada masyarakat. Belanja subsidi ini dalam rangka untuk penekanan inflasi dalam program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota pada sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota.

8.2.7. Beban Hibah

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Beban Hibah	44.134.020.599,50	11.682.323.718,00	277,78%

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban hibah yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban hibah mengakui beban hibah yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban hibah mengakui hibah berasal dari belanja OPD tahun anggaran 2023 dan reklas dari belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2023, dana BOS, dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana bantuan keuangan parpol, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban hibah untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp44.134.020.599,50 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.682.323.718,00 terjadi kenaikan sebesar 277,78%.

Perincian beban hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.7
Beban Hibah

Beban Hibah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%)(100\%)$
Beban Hibah Dinas Pendidikan	5.704.289.840,00	1.803.165.500,00	216,35%
Beban Hibah Dinas Kesehatan	3.918.238.964,50	1.954.821.762,00	100,44%
Beban Hibah DPU	10.358.184.000,00	0,00	100%
Beban Hibah Dinas Perkim	94.200.000,00	0,00	100%
Beban Hibah Dinas Sosial	644.600.000,00	0,00	100%
Beban Hibah Disnaker	102.797.900,00	0,00	100%
Beban Hibah DLH	469.950.000,00	0,00	100%
Beban Hibah Dishub	14.320.000,00	0,00	100%
Beban Hibah Diskominfo	12.000.000,00	0,00	100%
Beban Hibah PTSP	23.500.000,00	0,00	100%
Beban Hibah Dinas Kebudayaan	3.569.082.100,00	2.616.657.956,00	36,40%
Beban Hibah Dinas Perpustakaan	32.865.000,00	0,00	100%
Beban Hibah Bag. Pemerintahan	67.000.000,00	0,00	100%
Beban Hibah Bag. Organisasi	90.000.000,00	0,00	100%
Beban Hibah Bag. Pereksos	3.526.465.000,00	2.722.665.000,00	29,52%
Beban Hibah Bapelitbangda	44.265.000,00	0,00	100%
Beban Hibah Kec. Mangu	546.075.557,00	0,00	100%
Beban Hibah Kec. Taman	331.598.700,00	119.700.000,00	177,02%
Beban Hibah Kesbangpol	13.000.563.500,00	2.465.313.500,00	427,34%
Beban Hibah Disperta	1.584.025.038,00	0,00	100%
Total Beban Hibah	44.134.020.599,50	11.682.323.718,00	277,78%

8.2.8 Beban Bantuan Sosial

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%)-100\%$
Beban Bantuan Sosial	31.804.857.500,00	33.248.185.680,00	(4,34%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban bantuan sosial yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban bantuan sosial mengakui beban bantuan keuangan yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban bantuan Sosial untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp31.804.857.500,00 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp33.248.185.680,00 terjadi penurunan sebesar 4,34%.

Perincian beban bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel 8.2.8
Beban Bansos

Beban Bansos	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%)(100\%)$
1. Beban Bansos Dinas Pendidikan	10.481.900.000,00	10.028.550.000,00	4,52%
2. Beban Bansos Perkim	2.100.000.000,00	1.260.000.000,00	66,67%
3. Beban Bansos Dishub	0,00	109.074.180,00	(100%)
4. Beban Bansos BPBD	50.000.000,00	60.000.000,00	(16,67%)
5. Beban Bansos Dinsos	12.604.157.500,00	16.893.861.500,00	(25,39%)
6. Beban Bansos Bag.Pereksos	6.568.800.000,00	4.896.700.000,00	34,15%
Jumlah	31.804.857.500,00	33.248.185.680,00	(4,34%)

8.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%)-100\%$
Beban Penyisihan Piutang	578.175.207,58	1.450.381.015,56	(60,14%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyisihan piutang yang diestimasikan berdasarkan umur piutang oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Beban penyisihan piutang mengakui penyisihan piutang berasal dari penyisihan piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah dan penyisihan piutang lain-lain. Beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp578.175.207,58 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.450.381.015,56 terjadi kenaikan sebesar 60,14%.

Perincian beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.9
Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan piutang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
1. Pajak Daerah	21.951.902,84	1.019.206.309,96	(97,85%)
2. Retribusi Daerah	97.530.700,40	431.174.705,60	(77,38%)
3. Piutang lain-lain	15.423.834,34	0,00	100%
4. Investasi Dana Bergulir	443.268.770,00	0,00	100%
Jumlah	578.175.207,58	1.450.381.015,56	(60,14%)

8.2.10. Beban Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Beban Penyusutan Aset Tetap	150.036.103.064,44	146.351.482.025,70	2,52%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyusutan aset tetap akibat penurunan nilai aset tetap yang diestimasikan berdasarkan umur ekonomis aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 Aset tetap lainnya tidak disusutkan. Beban penyusutan aset tetap terdiri dari penyisihan aset tetap peralatan dan mesin, penyusutan gedung dan bangunan, penyusutan jalan, irigasi dan jaringan yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp150.036.103.064,44 dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp146.351.482.025,70 terjadi kenaikan sebesar 2,52%.

Perincian beban penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.10
Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
1. Peralatan dan Mesin	67.378.238.257,44	61.292.556.933,78	9,93%
2. Gedung dan Bangunan	21.228.960.991,00	19.047.868.279,00	11,45%
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.320.649.566,00	65.911.397.564,00	(6,97%)
4. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	108.254.250,00	99.659.248,92	8,62%
Jumlah	150.036.103.064,44	146.351.482.025,70	2,52%

8.2.11. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	998.849.333,00	1.985.993.167,00	(49,71%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban amortisasi aset tidak berwujud akibat penurunan nilai aset tidak berwujud yang diestimasi berdasarkan umur ekonomis aset tidak berwujud oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp998.849.333,00. Beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp998.849.333,00 dibandingkan beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.985.993.167,00 terjadi penurunan sebesar 49,71%.

8.2.12. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	492.226.518,00	441.991.276,00	11,37%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyusutan aset lain-lain akibat dilakukan koreksi atas penyusutan aset lain-lain yang tahun 2023 tidak dilakukan penyusutan. Belum dilakukan penyusutan atas aset lain-lain untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023. Beban penyusutan aset lain-lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 Rp492.226.518,00 dibandingkan beban penyusutan lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp441.991.276,00 terjadi kenaikan sebesar 11,37%.

8.2.13. Beban Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Beban Lain-lain	2.215.995.756,00	1.940.713.725,00	14,18%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban lain-lain beban atas reklas pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.215.995.756,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.940.713.725,00 terjadi kenaikan sebesar 14,18%

Rincian beban lain-lain yang berasal dari realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset tetap Per OPD pada tanggal 31 Desember 2023 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.13.1
Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase % $4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
1	2	3	
Reklas BM tidak memenuhi kapitalisasi AT			
1. Tanah	0,00	0,00	0,00
2. Peralatan dan Mesin	156.124.235,00	287.658.011,00	(45,73%)
3. Gedung dan Bangunan	0,00	17.582.660,00	(100%)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5. Aset Tetap Lainnya	2.059.871.521,00	1.635.473.054,00	25,95%
Jumlah	2.215.995.756,00	1.940.713.725,00	14,18%

Rincian beban lain-lain yang berasal dari realisasi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset tetap Per OPD pada tanggal 31 Desember 2023 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 8.2.13.2
Beban Lain-lain OPD

Penambahan selama 2023	KIB A (Rp)	KIB B (Rp)	KIB C (Rp)	KIB D (Rp)	KIB E (Rp)
Beban Lain-lain	1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan	0,00	80.956.084,00	0,00	0,00	1.994.402.371,00
Dinas Kesehatan KB	0,00	60.315.817,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	4.892.404,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU TR	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	2.105.180,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas LH	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	6.410.250	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP&UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Budparpora	0,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00

Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	65.469.150,00
Walikota/Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pereksos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan selama 2023	KIB A (Rp)	KIB B (Rp)	KIB C (Rp)	KIB D (Rp)	KIB E (Rp)
Beban Lain-lain	1	2	3	4	5
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bapenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec. Taman	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	156.124.235,00	0,00	0,00	2.059.871.521,00

Beban lain-lain atas reklas pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.215.995.756,00.

8.3. Kegiatan Non Operasional

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Kegiatan Non Operasional	(452.881.988,00)	(1.799.730.285,00)	(74,84%)

Jumlah tersebut adalah jumlah surplus (defisit) kegiatan non operasional Kota Madiun yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Kegiatan Non Operasional terdiri dari surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian jangka panjang, defisit penjualan aset non lancar, defisit penjualan aset non lancar dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp452.881.988,00 dibandingkan dengan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional yang berakhir pada periode 31 Desember 2022 Rp.1.799.730.285,00 terjadi penurunan 74,84%.

8.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%)-100\%$
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	449.118.662,00	481.163.643,00	(6,66%)

Jumlah tersebut adalah jumlah surplus penjualan aset non lancar yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp449.118.662,00.

8.3.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%)-100\%$
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	902.000.650,00	2.280.893.928,00	(60,45%)

Jumlah tersebut adalah defisit penjualan aset non lancar dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp902.000.650,00 dibandingkan dengan defisit dari kegiatan non operasional lainnya periode 31 Desember 2022 Rp2.280.893.928,00 terjadi penurunan 60,45%.

8.4. Pos Luar Biasa

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%)-100\%$
Pos Luar Biasa	1.238.717.822,00	2.502.082.962,00	(50,49%)

Jumlah tersebut adalah adalah beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2023. Beban pos luar biasa terdiri dari pendapatan luar biasa, beban luar biasa, dan beban tidak terduga. Beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp1.238.717.822

dibandingkan dengan beban pos luar biasa yang berakhir pada periode 31 Desember 2022 Rp2.502.082.962,00 terjadi penurunan 50,49%.

8.4.1. Beban Tidak Terduga

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Prosentase %
1	2	3	$4=(2/3 \times 100\%) - 100\%$
Beban Tidak Terduga	1.238.717.822,00	2.502.082.962,00	(50,49%)

Jumlah tersebut adalah terdiri dari beban tidak terduga per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.238.717.822 terdiri dari pembayaran sisa dana bantuan keuangan khusus dari Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.038.250,00, pembayaran ganti rugi sewa tanah aset milik Pemerintah Kota Madiun tahun 2021-2022 kelurahan Klegen kecamatan Kartoharjo sebesar Rp2.014.000,00, pengembalian dana retribusi sewa GOR pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 sebesar Rp12.400.000,00, pengembalian dana BOSP tahun 2020 sampai dengan 2023 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp640.715.446,00, pengembalian kelebihan pembayaran PBB a.n PT Hasta Mulya Putra pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar Rp12.851.376,00, belanja kegiatan program tekan inflasi pada Dinas Perdagangan Kota Madiun tahun 2023 sebesar Rp551.363.000,00, pengembalian kelebihan bayar retribusi PBG a.n Duhri Permata pada Dinas PU sebesar Rp5.176.000,00, pengembalian dana pajak reklame Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp13.159.750,00.

Tabel 8.4.1

Perincian OPD yang menggunakan Beban Tidak Terduga untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023

Nama OPD	Realisasi 2023 (Rp)
1	2
1. BKAD	1.038.250,00
2. Kec Kartoharjo	2.014.000,00
3. Disbudparpora	12.400.000,00
4. Dinas Pendidikan	640.715.446,00
5. Bapenda	12.851.376,00
6. Dinas Perdagangan	551.363.000,00
7. DPU	5.176.000,00
8. DISHUB	13.159.750,00
Total	1.238.717.822,00

BAB IX PENJELASAN POS - POS LAPORAN ARUS KAS

9.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilaksanakan sehingga memperoleh penerimaan pendapatan yang berarti menambah kas dan atau mengeluarkan belanja yang berarti mengurangi kas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.

9.1.1. ARUS KAS MASUK

9.1.1.1. Penerimaan Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	113.514.116.369,67	106.165.312.122,76

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.1.1
Penerimaan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.01.06. Pajak Hotel	6.950.000.000,00	8.130.855.159,00	116,99	7.026.280.556,00
4.1.01.07. Pajak Restoran	20.230.000.000,00	23.343.654.772,00	115,39	19.278.495.104,00
4.1.01.08. Pajak Hiburan	1.612.500.000,00	1.845.737.251,00	114,46	1.638.210.592,00
4.1.01.09. Pajak Reklame	2.000.000.000,00	2.304.955.619,00	115,25	2.114.017.568,00
4.1.01.10. Pajak Penerangan Jalan	21.528.250.000,00	23.482.333.529,83	109,08	22.103.164.301,44
4.1.01.11. Pajak Parkir	1.530.000.000,00	1.683.862.056,00	110,06	1.434.441.434,55
4.1.01.12. Pajak Air Tanah	270.000.000,00	318.395.998,84	117,92	292.100.851,30
4.1.01.15. PBB P2	23.944.700.000,00	23.884.649.634,00	99,75	24.574.559.488,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.01.16. BPHTB	26.175.000.000,00	28.519.672.350,00	108,96	27.704.042.227,47
Jumlah	104.240.450.000,00	113.514.116.369,67	108,90	106.165.312.122,76

9.1.1.2. Penerimaan Retribusi Daerah

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan Retribusi Daerah	22.551.072.553,00	21.385.348.837,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan retribusi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian anggaran dan penerimaan pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.1.2
Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.2.01. Jasa Umum	3.684.675.940,00	3.797.537.578,00	103,06	4.255.304.240,00
4.1.2.02. Jasa Usaha	14.010.759.725,00	17.563.133.621,00	125,35	16.102.531.597,00
4.1.2.03. Perizinan tertentu	751.080.000,00	1.190.401.354,00	158,49	1.027.513.000,00
Jumlah	18.446.515.665,00	22.551.072.553,00	122,25	21.385.348.837,00

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tersaji dibawah ini:

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. 4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum	3.684.675.940,00	3.797.537.578,00	103,06	4.255.304.240,00
a. 4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	155.000.000,00	171.940.000,00	110,93	167.605.500,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
b. 4.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.898.595.940,00	2.986.960.408,00	103,05	3.234.432.000,00
c. 4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar.	0,00	0,00	0,00	148.337.000,00
d. 4.1.2.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	410.020.000,00	364.421.204,00	88,88	427.874.709,00
e. 4.1.2.01.11 Retribusi Ulang Tera	61.060.000,00	71.884.000,00	117,73	64.240.500,00
f. 4.1.2.01.13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	160.000.000,00	202.331.966,00	126,46	212.814.531,00
2. 4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha	14.010.759.725,00	17.563.133.621,00	125,35	16.102.531.597,00
a. 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.420.305.425,00	8.564.678.574,00	39,29	9.075.075.225,00
b. 4.1.2.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	4.970.924.300,00	7.456.013.647,00	88,78	5.100.253.966,00
c. 4.1.2.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir	627.120.000,00	781.654.000,00	124,64	1.012.902.200,00
d. 4.1.2.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan	32.410.000,00	23.079.000,00	71,21	26.414.000,00
e. 4.1.2.02.09 Tempat Rekreasi dan Olah Raga	960.000.000,00	737.708.400,00	76,84	887.886.206,00
3. 4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu	751.080.000,00	1.190.401.354,00	158,49	1.027.513.000,00
a. 4.1.2.03.01 Retribusi Mendirikan Bangunan	750.000.000,00	1.189.201.354,00	158,56	1.026.433.000,00
b. 4.1.2.03.03 Retribusi Izin Trayek	1.080.000,00	1.200.000,00	111,11	1.080.000,00
Jumlah	18.446.515.665,00	22.551.072.553,00	122,25	21.385.348.837,00

9.1.1.3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.983.008.032,73	15.595.752.355,97

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.1.3
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.03.02.01 Bank Jatim	7.117.480.529,00	7.117.480.429,43	100,00	6.986.097.290,97
4.1.03.02.01 BPR Bank Daerah	579.904.398,00	579.904.398,00	100,00	930.412.525,00
4.1.03.02.02 PD Aneka Usaha	1.177.685.900,00	0,00	0,00	800.615.164,00
4.1.03.02.03 PDAM	7.285.623.200,00	7.285.623.205,30	100,00	6.878.627.376,00
Jumlah	16.160.694.027,00	14.983.008.032,73	92,71	15.595.752.355,97

9.1.1.4. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan lain-lain PAD yang sah	104.057.177.790,22	120.584.652.558,82

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah dan kas blud yang berasal dari penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 setelah dikurangi reklas ke Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.

Perincian penerimaan pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.1.4
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.04.01 Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	32.000.000,00	32.773.000,00	102,42	31.554.999,00
4.1.04.05 Jasa Giro	1.800.000.000,00	599.729.647,13	33,32	89.080.155,53
4.1.04.06 Hasil pengelolaan dana bergulir	128.290.316,00	75.333.024,01	58,72	98.561.827,86

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.04.07 Pendapatan bunga	7.600.000.000,00	2.880.498.521,96	37,90	6.961.975.880,18
4.1.04.11 Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	172.086.543,39	0,00	56.062.722,01
4.1.04.12 Pendapatan denda pajak daerah	0,00	629.196.758,00	0,00	624.387.027,00
4.1.04.13 Pendapatan denda retribusi daerah	28.122.900,00	121.838.700,00	433,24	0
4.1.04.16 Pendapatan BLUD	113.379.270.000,00	98.357.722.618,06	86,75	1.110.007.073.807,15
4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.187.998.977,67	0,00	2.715.956.140,09
Jumlah	122.967.683.216,00	104.057.177.790,22	84,62	1.120.584.652.558,82

9.1.1.5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	24.092.136.000,00	29.804.646.600,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.1.5
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.001 DBH PBB	2.725.606.000,00	2.725.606.000,00	100	5.510.384.675,00
4.2.01.01.01.003 DBH PPh Pasal 25 dan 29	21.366.530.000,00	21.366.530.000,00	100	24.294.261.925,00
Jumlah	24.092.136.000,00	24.092.136.000,00	100	29.804.646.600,00

9.1.1.6. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	36.475.210.342,00	82.308.678.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil bukan pajak dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.1.6
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0005 DBH SDA Minyak Bumi	29.896.423.000,00	33.797.056.552,00	113,05	76.819.003.249,00
4.2.01.01.01.0007 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	9.728.000,00	12.969.320,00	133,32	46.240.672,00
4.2.01.01.01.0009 DBH SDA Mineral dan Batubara Royalti	687.558.000,00	938.550.591,00	136,50	3.049.142.985,00
4.2.01.01.01.0010 DBH SDA Kehutanan- PSDH	244.509.000,00	281.746.668,00	115,23	435.980.094,00
4.2.01.01.01.0013 DBH Perikanan	1.233.134.000,00	1.444.887.211,00	117,17	1.958.311.000,00
Jumlah	32.071.352.000,00	36.475.210.342,00	113,73	82.308.678.000,00

9.1.1.7. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	487.141.770.396,00	463.486.748.121,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel 9.1.1.7
Penerimaan Dana Alokasi Umum

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.02.0001 DAU Murni Formula	459.655.490.000,00	459.508.986.396,00	99,97	463.486.748.121,00
4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	100	0,00
4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	22.232.784.000,00	22.232.784.000,00	100	0,00
Jumlah	487.288.274.000,00	487.141.770.396,00	99,97	463.486.748.121,00

9.1.1.8. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	82.402.483.839,80	71.207.048.405,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.1.8
Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.03 DAK Fisik	6.400.881.000,00	5.699.869.054,00	89,05	2.921.025.894,00
4.2.01.01.03 DAK Non Fisik	87.957.933.000,00	76.702.614.785,80	87,20	68.286.022.511,00
Jumlah	94.358.814.000,00	82.402.483.839,80	87,20	71.207.048.405,00

9.1.1.9. Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai	35.959.029.435,00	21.802.781.361,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil cukai dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel 9.1.1.9
Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.04 DBH Cukai	29.607.909.000,00	35.959.029.435,00	121,45	21.802.781.361,00
Jumlah	29.607.909.000,00	35.959.029.435,00	121,45	21.802.781.361,00

9.1.1.10. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	120.565.582.200,00	98.284.006.080,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.1.10
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. 4.2.02.01.01.0001 DBH PKB	28.601.641.000,00	34.918.489.800,00	122.09	30.500.722.060,00
2. 4.2.02.01.01.0002 DBH BBNKB	12.062.084.000,00	15.339.681.100,00	127.17	13.983.937.380,00
3. 4.2.02.01.01.0003 DBH PBBKB	17.363.013.000,00	29.292.250.400,00	168.70	18.943.492.380,00

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4. 4.2.02.01.01.0004 DBH Air Permukaan	231.250.000,00	371.681.600,00	160.73	270.478.040,00
5. 4.2.02.01.01.0005 Pajak Rokok	37.405.500.000,00	40.643.479.300,00	108.66	34.585.376.220,00
Total	95.663.488.000,00	120.565.582.200,00	126.03	98.284.006.080,00

9.1.1.11. Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	706.502.612,00	739.383.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan bantuan keuangan provinsi dari Pemerintah Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan bantuan keuangan dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.1.11
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan dari Pemprov	618.902.600,00	706.502.612,00	114,15%	739.383.000,00
Jumlah	618.902.600,00	706.502.612,00	114,15%	739.383.000,00

9.1.1.12. Penerimaan Dana Penyesuaian

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan Dana Penyesuaian	74.714.922.000,00	28.870.790.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.1.12
Penerimaan Dana Penyesuaian

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.02.01 Dana Insentif Daerah (DID)	63.300.891.000,00	74.714.922.000,00	118.03%	28.870.790.000,00
Jumlah	63.300.891.000,00	74.714.922.000,00	118.03%	28.870.790.000,00

9.1.1.13. Penerimaan Hibah

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan Hibah	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Tidak terdapat realisasi penerimaan hibah disebabkan karena pendapatan hibah dana BOS pada tahun anggaran 2023 reklas menjadi penerimaan DAK Non Fisik.

Perincian penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.1.13
Penerimaan Hibah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.2. ARUS KAS KELUAR

9.1.2.1. Pembayaran Pegawai

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Pembayaran pegawai	423.896.152.844,39	404.406.660.608,25

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari pengeluaran belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.2.1
Pembayaran Pegawai

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan	235.945.666.095,00	210.825.345.289,00	89,35	205.776.281.913,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan ASN	147.060.181.873,00	132.981.043.160,00	90,43	120.137.167.684,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasar Pertimbangan Obyektif Lainnya	66.868.963.435,00	64.056.690.831,33	95,79	51.522.008.317,25
5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	14.980.503.217,00	14.287.484.704,00	95,37	15.392.700.656,00
5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.859.590.633,00	912.138.860,06	49,05	934.173.813,00
5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, KDH/WKDH	741.600.000,00	731.340.000,00	98,62	731.340.000,00
5.1.1.88 Belanja Pegawai BOS	1.364.400.000,00	0,00	0,00	1.501.667.500,00
5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD	115.310.000,00	102.110.000,00	88,55	8.411.320.725,00
Jumlah Belanja Pegawai	468.936.215.253,00	423.896.152.844,39	90,40	404.406.660.608,25

9.1.2.2. Pembayaran Barang dan Jasa

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Pembayaran barang dan Jasa	487.718.322.693,31	474.775.658.285,04

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas BLUD dan kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian pengeluaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.2.2
Pembayaran Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.02.01 Belanja Barang	130.795.592.613,00	122.590.404.708,50	93,73	115.594.663.182,78
5.1.02.02 Belanja Jasa	204.871.335.191,00	191.169.925.758,63	93,31	183.234.906.322,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	26.250.933.904,00	25.428.091.070,18	96,87	25.800.670.244,28
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	44.184.775.959,00	41.205.029.504,00	93,26	37.852.741.707,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.730.804.000,00	4.183.782.600,00	88,44	4.496.435.749,00
5.1.02.88 Belanja Barang Jasa BOS	16.493.491.830,00	17.756.446.336,00	107,66	15.861.064.197,98
5.1.02.99 Belanja Barang Jasa BLUD	85.844.912.863,00	85.384.642.716,00	99,46	91.935.176.882,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	513.171.846.360,00	487.718.322.693,31	95,04	474.775.658.285,04

9.1.2.3. Pembayaran Subsidi

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Pembayaran Subsidi	99.146.000,00	6.480.445.500,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Belanja subsidi ini dalam rangka untuk penekanan inflasi melalui program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota pada sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/ kota pada Dinas Perdagangan.

9.1.2.4. Pembayaran Hibah

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Pembayaran hibah	32.355.896.005,00	11.562.623.718,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 400-401.202/182/2023 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 400-401.202/16/2023 tentang Pejabat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Perincian pengeluaran hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.2.4
Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.05.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.487.861.000,00	6.383.188.600,00	98,39	0,00
5.1.05.05. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, yang berbadan Hukum Indonesia	30.752.212.295,00	25.022.143.905,00	81,37	10.612.060.218,00
5.1.05.07. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	950.563.500,00	950.563.500,00	100,00	950.563.500,00
Jumlah Belanja Hibah	38.190.636.795,00	32.355.896.005,00	84,72	11.562.623.718,00

9.1.2.5. Pembayaran Bantuan Sosial

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Pembayaran Bantuan Sosial	31.804.857.500,00	33.248.185.680,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor: 400-401.202/182/2023 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Perincian pengeluaran bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.2.5
Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	28.044.911.700,00	27.376.940.000,00	97,62	28.528.115.680,00
5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	00,00	113.400.000,00
5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial Kepada lembaga non pemerintahan	4.727.890.000,00	4.427.917.500,00	93,66	4.606.670.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	32.772.801.700,00	31.804.857.500,00	97,05	33.248.185.680,00

9.1.2.6. Pembayaran Tidak terduga

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Pembayaran Tidak Terduga	1.238.717.822,00	2.502.082.962,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Perincian pembayaran tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1.2.6
Pembayaran Tidak Terduga

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3
Belanja Barang	551.363.000,00	262.205.712,00
Belanja Jasa	0,00	1.708.752.850,00
Belanja Perjalanan	0,00	321.160.000,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Pengembalian	641.753.696,00	209.964.400,00
Pengembalian Pajak	26.011.126,00	0,00
Pengembalian Retribusi	17.576.000,00	0,00
Pengembalian ganti rugi sewa tanah	2.014.000,00	0,00
Total	1.238.717.822,00	2.502.082.962,00

9.1.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	140.049.918.705,72	127.259.490.688,26

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel 9.1.3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas masuk	1.117.163.011.570,42	1.060.235.147.441,55
Arus kas keluar	(977.113.092.864,70)	(932.975.656.753,29)
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas operasi	140.049.918.705,72	127.259.490.688,26

9.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas netto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

9.2.1. ARUS KAS MASUK

9.2.1.1 Penjualan Aktiva Tetap

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Penjualan Aktiva Tetap	449.118.662,00	481.163.643,00

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi antara lain berasal dari penjualan alat angkut dan penjualan alat kantor dan rumah tangga pada OPD Dinas Pendidikan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Hukum, Bakesbangpol, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, Badan Kepegawaian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Inspektorat untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

Perincian penjualan aktiva tetap untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.2.1.1
Penjualan Aktiva Tetap

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Penjualan Alat Angkut		
1. Bagian Umum	150.620.000,00	78.910.453,00
2. Badan Pendapatan Daerah	32.726.541,00	16.389.994,00
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		19.580.995,00
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah		19.796.866,00
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.919.096,00	0,00
6. Dinas Pekerjaan Umum	19.962.499,00	0,00
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.478.999,00
8. Dinas Perdagangan		81.769.999,00
9. Dinas Sosial		32.924.994,00

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
10. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	20.820.449,00
11. Dinas Kesehatan dan KB	129.351.976,00	19.520.098,00
12. Puskesmas Banjarejo	15.455.677,00	0,00
13. Puskesmas Ngegong	6.744.999,00	0,00
14. Dinas Lingkungan Hidup	10.300.000,00	24.425.799,00
15. Dinas Perumahan dan Permukiman	3.700.000,00	0,00
11. Dinas Penanaman Modal	0,00	2.769.999,00
12. Kelurahan Patihan	3.349.999,00	0,00
13. Kecamatan Manguharjo	0,00	5.439.998,00
14. Dinas Pendidikan	0,00	2.769.999,00
15. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	44.278.875,00	0,00
15. Satuan Pamong Praja	0,00	15.770.000,00
Jumlah Penjualan Alat Angkut	448.409.662,00	344.368.642,00
Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	709.000,00	136.795.000,00
Jumlah total Aktiva Tetap	449.118.662,00	481.163.643,00

9.2.2. ARUS KAS KELUAR

9.2.2.1. Perolehan Modal Tanah

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Perolehan Modal Tanah	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, yang berasal dari perolehan modal Tanah untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

9.2.2.2. Perolehan Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	71.585.868.051,04	53.011.211.346,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal peralatan dan mesin untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian perolehan modal peralatan dan mesin untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.2.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.02. Belanja modal Peralatan dan Mesin	73.145.003.249,00	71.585.868.051,04	97,87	53.011.211.346,00
5.2.02.01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar/ Berat	2.660.786.600,00	2.654.100.000,00	99,87	3.436.776.000,00
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan	3.377.556.750,00	3.243.522.130,00	96,03	26.814.906.500,00
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel/ Alat Ukur	81.655.000,00	81.120.000,00	99,34	327.688.765,00
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian	129.870.000,00	128.500.000,00	98,95	16.650.000,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat kantor/ Rumah Tangga	5.137.916.366,00	4.624.879.550,00	90,01	9.475.981.185,00
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	923.791.522,00	872.617.018,00	94,46	910.538.025,00
5.2.02.07 Belanja Modal Peralatan Kedokteran	5.571.940.953,00	4.804.418.371,00	86,23	1.957.878.063,00
5.2.3.02.10 Belanja Modal Komputer	50.195.953.480,00	50.089.399.142,00	99,79	2.628.164.333,00
5.2.3.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi	25.530.000,00	25.308.000,00	99,13	195.950.000,00
5.2.3.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Permurnian	0,00	0,00	0,00	1.490.625,00
5.2.3.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	9.999.563,00
5.2.3.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	36.080.000,00	35.030.000,00	97,09	147.073.890,00
5.2.3.02.18 Belanja Modal Rambu - Rambu	3.076.259.437,00	3.058.049.636,04	99,41	4.549.069.492,00
5.2.3.02.19 Belanja Modal Peralatan Olah Raga	127.800.000,00	126.928.500,00	99,32	200.220.000,00
5.2.3.02.88 Belanja Modal Peralatan Mesin BOS	999.056.841,00	1.048.869.678,00	104,99	1.852.590.889,00
5.2.3.02.99 Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD	800.806.300,00	793.126.026,00	99,04	486.234.016,00

9.2.2.3. Perolehan Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Perolehan modal gedung dan bangunan	80.940.539.683,65	72.843.838.757,97

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal gedung dan bangunan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian perolehan modal gedung dan bangunan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.2.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.03 Belanja modal Gedung dan Bangunan	83.254.511.750,00	80.940.539.683,65	97,22	72.843.838.757,97
5.2.3.03.01 Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	82.001.521.750,00	79.753.930.683,65	97,26	71.911.964.241,57
5.2.3.03.02 Belanja Modal Monumen	687.590.000,00	681.564.000,00	99,12	265.076.000,00
5.2.3.03.01 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	115.738.000,00
5.2.3.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	565.400.000,00	505.045.000,00	89,33	551.060.516,40

9.2.2.4. Perolehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Perolehan modal jalan, irigasi dan jaringan	62.832.477.443,00	103.137.296.907,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian perolehan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.2.2.4
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.04.01 Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.036.113.165,00	62.832.477.443,00	98,12	103.137.296.907,00
5.2.04.01 Belanja modal Jalan dan jembatan	35.368.976.275,00	34.989.390.906,00	98,93	59.563.387.262,00
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air	24.934.457.040,00	24.239.146.850,00	97,76	43.115.947.645,00
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi	3.157.850.000,00	3.125.017.187,00	98,96	457.962.000,00
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan	574.829.850,00	478.922.500,00	83,32	0,00

9.2.2.5. Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Perolehan modal aset tetap lainnya	2.431.417.485,00	3.442.102.691,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah, kas blud dan kas BOS yang berasal dari perolehan modal aset tetap lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian perolehan modal aset tetap lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.2.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Belanja Modal Aset tetap lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.05 Belanja modal Aset Tetap lainnya	2.436.647.041,00	2.431.417.485,00	99,79	3.442.102.691,00
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan	135.737.440,00	73.487.150,00	54,14	145.110.700,00
5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga	298.400.000,00	263.074.464,00	88,16	244.755.000,00
5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	00,00	29.342.850,00
5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	145.000.000,00	43.465.000,00	29,98	1.129.431.000,00
5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.857.509.601,00	2.051.390.871,00	110,44	1.451.797.553,00
5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	00,00	441.665.588,00

9.2.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(217.341.184.000,69)	(231.953.286.058,97)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.2.3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas masuk	449.118.662,00	481.163.643,00
Arus kas keluar	(217.790.302.662,69)	(232.434.449.701,97)
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas investasi	(217.341.184.000,69)	(231.953.286.058,97)

9.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan Surplus (Defisit) anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak yang terkait terhadap arus kas di masa yang akan datang.

9.3.1. ARUS KAS MASUK

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas pendanaan antara lain berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang bukan merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan melainkan sebagai saldo awal kas tahun 2023 dan tahun 2022, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

9.3.1.1. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1.198.000,00	800.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

9.3.2. ARUS KAS KELUAR

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan antara lain untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang pinjaman dan obligasi, dan pemberian pinjaman.

9.3.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	1.198.000,00	800.000,00

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.3.3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas masuk	1.198.000,00	800.000,00
Arus kas keluar	0,00	0,00
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas pendanaan	1.198.000,00	800.000,00

9.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang diperoleh dan digunakan oleh pihak ketiga dan tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

9.4.1. ARUS KAS MASUK

9.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Penerimaan 2023 (Rp)	Penerimaan 2022 (Rp)
Penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK)	61.215.397.853,00	59.270.137.579,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk dari aktivitas transitoris yang berasal dari penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) yang dipotong melalui SP2D LS oleh BUD terdapat utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan sisa uang persediaan yang baru disetor pada tahun berikutnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perincian penerimaan PFK dan sisa uang persediaan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.4.1.1
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK)	61.215.397.853,00	59.270.137.579,00

Total	61.215.397.853,00	59.270.137.579,00
-------	-------------------	-------------------

9.4.2. ARUS KAS KELUAR

9.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK)	60.623.056.743,00	59.278.397.517,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari aktivitas transitoris yang berasal dari pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) yang dipotong melalui SP2D LS oleh BUD dan sisa uang persediaan yang baru disetor pada tahun berikutnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dan Pengeluaran pihak ketiga (PFK) merupakan honorarium panitia pelaksana kegiatan dan upahan di OPD yang baru ditransfer ke rekening masing masing penerima honorarium tersebut di awal bulan Januari 2023.

Perincian pengeluaran PFK dan sisa uang persediaan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.4.2.1

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Pengeluaran 2023 (Rp)	Pengeluaran 2022 (Rp)
Pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK)	0,00	59.278.397.517,00
Sisa Uang Persediaan	60.623.057.743,00	0,00
Total	60.623.056.743,00	59.278.397.517,00

9.4.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	592.341.110,00	(8.259.938,00)

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.4.3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas masuk	61.215.397.853,00	59.270.137.579,00
Arus kas keluar	(60.623.056.743,00)	(59.278.397.517,00)
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas transitoris	592.341.110,00	(8.259.938,00)

9.5. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan (penurunan) kas bersih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 merupakan penjumlahan yang terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

Perincian kenaikan (penurunan) kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.5
Kenaikan (Penurunan) Kas

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	140.049.918.705,72	127.259.490.688,26
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(217.341.184.000,69)	(231.953.286.058,97)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	1.198.000,00	800.000,00
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	592.341.110,00	(8.259.938,00)
Jumlah kenaikan (penurunan) kas	(76.697.726.184,97)	(104.701.255.308,71)

9.6. SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 merupakan saldo awal kas Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas ditambah Saldo Kas Daerah dan saldo

awal kas. Jumlah Saldo Akhir Kas tersebut juga menunjukkan jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SiLPA) tahun berjalan.

Perincian saldo akhir kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 9.6
Saldo Akhir Kas

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kenaikan (penurunan) bersih kas	(76.697.726.184,97)	(104.701.255.308,71)
Saldo awal kas daerah dan Saldo awal kas di bendahara pengeluaran	119.817.397.122,23	225.992.425.922,40
Saldo awal kas di BLUD Dinas Kesehatan	6.254.896.034,24	7.457.912.123,59
Saldo awal kas di BLUD RSUD	64.695.549.324,61	61.231.491.260,82
Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan	10.236.077,000	6.402.708,00
Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	0,00	0,00
Saldo awal Kas Lainnya BOS	465.593.889,35	1.265.487.451,33
Saldo Akhir Kas Lainnya PFK	8.791.710,00	0,00
Jumlah saldo akhir kas	114.554.737.972,46	191.252.464.157,43
Saldo Akhir Kas	67.071.188.644,14	119.817.397.122,23
Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran	601.132.820,00	0,00
Saldo akhir kas di BLUD Dinas Kesehatan	7.503.164.480,85	6.254.896.034,24
Saldo akhir kas di BLUD RSUD	38.758.539.712,32	64.695.549.324,61
Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	10.230.722,00	7.662.000,00
Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	0,00	2.574.077,00
Saldo akhir Kas Lainnya BOS	610.481.593,15	465.593.889,35
Saldo akhir Kas Lainnya PFK	0,00	8.791.710,00
Jumlah saldo akhir kas	114.554.737.972,46	191.252.464.157,43

BAB X PENJELASAN POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

10.1. Ekuitas Awal

Uraian	1 Januari 2023 (Rp)	1 Januari 2022 (Rp)
Ekuitas awal	2.798.933.012.648,62	2.810.414.582.202,98

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022.

10.2. Surplus (Defisit) LO

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Surplus (Defisit) LO	28.234.697.781,33	(31.571.154.047,65)

Jumlah tersebut merupakan jumlah surplus (defisit) yang berasal dari Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

10.3. Lain-lain

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Lain-lain	(20.305.356.590,80)	20.089.584.493,29

Jumlah tersebut merupakan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas yang berasal dari lain-lain yang mempengaruhi perubahan ekuitas secara langsung periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Perincian ekuitas lain-lain Per OPD dan rincian ekuitas lain lain Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersebut dibawah ini. Rincian ekuitas lain-lain Per OPD pada tanggal 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 10.3
Rincian Ekuitas Lain - Lain per OPD

Perubahan	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
Ekuitas Lain - Lain	1	2
1. Dinas Pendidikan	(2.511.605.365,00)	63.844.445,00
2. Dinas Kesehatan & KB	(173.648.485,69)	83.797.469,35
3. Dinas PU & TR	(16.138.805.447,77)	(906.472.666,00)
4. Dinas Perkim	(7.261.835.290,53)	20.542.154.970,00
5. Satpol PP	1.299.868,00	-1,00

Perubahan	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2022 (Rp)
Ekuitas Lain - Lain	1	2
6. BPBD	809.984,00	-13,00
7. Dinas Sosial	1.445.917.953,00	2,00
8. Dinas Tenaga Kerja	(347.088.607,17)	(671.294.545,45)
9. Dinas Lingkungan Hidup	219.087.041,00	-65,00
10. Dispendukcapil	2.276.959,00	(2.602.752,00)
11. Dinas Perhubungan	788.712.915,00	49.617.759,00
12. Dinas Infokom	325.350.172,00	190.645,00
13. Dinas PM PTSP	869.335,00	(19,00)
14. Dinas Budparpora	2.069.550.575,00	38.719.991,00
15. Dinas Perpustakaan	(5,00)	(191.833.256,00)
16. Bagian Pemerintahan	(582.083,00)	0,00
17. Bagian Organisasi	0,00	0,00
18. Bagian Umum	2.050.739.830,71	361.406.822,00
19. Bagian Hukum	0,00	-5,00
20. Bagian Perekokesra	990.003,00	0,00
21. Bagian Adbang	(1.418.542,00)	0,00
22. Sekretariat DPRD	2.147.792,00	44,00
23. BKD	1.249.699,00	4,00
24. BKAD	(8.158.080.355,05)	6.066.415,00
25. BAPENDA	1.335.254.292,57	261.422.966,39
26. Inspektorat	614.832.697,00	0,00
27. Bapelitbangda	392.447.509,00	0,00
28. Kec. Kartoharjo	1.548.190.339,33	(812.243,00)
29. Kec. Manguharjo	1.089.444.116,00	(1.923.768,00)
30. Kec. Taman	2.818.684.250,00	1.255.859,00
31. Bakesbangpol	9.969.600,00	0,00
32. Dinas Pertanian & KP	(1.759.991,00)	(11,00)
33. Dinas Perdagangan	15.990.618,80	456.046.446,00
Total	(20.305.356.590,80)	20.089.584.493,29

LAMPIRAN 10.3B
LAIN – LAIN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
DAN 31 DESEMBER 2022

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
				31-Dec-23
1	2	3	4	5 = 3 - 4
DINAS PENDIDIKAN	MENCATAT PENYESUIAN MUTASI MASUK ASET TETAP PERALATAN MESIN DARI DLH TAHUN 2023	62.160.000,00	-	62.160.000,00
	MENCATAT PENYESUIAN MUTASI KELUAR ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN UPTD KEC TAMAN KE BKAD TAHUN 2023	-	445.985.480,00	- 445.985.480,00
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	1.832.317.917,00	- 1.832.317.917,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	31.781.183,00	-	31.781.183,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA KOREKSI PEMBULATAN DI TAHUN 2023	44,00	-	44,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA KOREKSI PEMBULATAN DI TAHUN 2023	96,00	-	96,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KARENA KOREKSI PEMBULATAN DI TAHUN 2023	499,00	-	499,00
	KOREKSI BPK MENCATAT ASET LAIN-LAIN PADA DINAS PENDIDIKAN KURANG SAJI ATAS BEBAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN DI TAHUN 2023		314.243.790,00	- 314.243.790,00
	MENCATAT MUTASI ASET TETAP TANAH KE BKAD		13.000.000,00	- 13.000.000,00
				-
		93.941.822,00	2.605.547.187,00	
			- 2.511.605.365,00	

OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
DINAS KESEHATAN & KB	MENCATAT HIBAH ASET TETAP PERALATAN MESIN DARI RUMAH SAKIT SOGATEN BERUPA KENDARAAN RODA 4 KEPADA NURUL HAYAT TAHUN 2023	-	43.850.000,00	- 43.850.000,00
	MENCATAT PENGAKUAN HIBAH ASET TETAP PERALATAN MESIN DARI DINKES BERUPA 3 MOBIL AMBULANS DARI APBD KE BAZNAS SENILAI Rp145.000.000,00; RPM SENILAI RP150.000.000,00 KE PMI SENILAI RP74.000.000,00 TAHUN 2023	-	-	-
	MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN DARI DINKES KE DINAS SOSIAL BERUPA 3 TEMPAT TIDUR DI TAHUN 2023	-	73.110.000,00	- 73.110.000,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	11.886.966,00	- 11.886.966,00
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DINAS KESEHTAN DI TAHUN 2023	-	2,00	- 2,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT RSUD DI TAHUN 2023	-	44.801.567,42	- 44.801.567,42
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN RSUD DI TAHUN 2023	-	2,00	- 2,00
	MENCATAT KOREKSI MENGURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN RSUD DI TAHUN 2023	25,00	-	25,00
	MENCATAT KOREKSI MENGURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN RSUD DI TAHUN 2023	3,00	-	3,00
	MENCATAT KOREKSI MENGURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN DINKES DI TAHUN 2023	23,73	-	23,73
		51,73	173.648.537,42	
			- 173.648.485,69	
DINAS PUPR	PENGAKUAN REALISASI PEMBAYARAN ATAS UTANG BELANJA MODAL - PERENCANAAN GEDUNG BANGUNAN	368.613.200,00	-	368.613.200,00

	PENGAKUAN UTANG BELANJA ATAS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN ATAS ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	1.056.731.380,00	-	1.056.731.380,00
OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
	MENCATAT KOREKSI PENGURANGAN KARENA DOUBLE CATAT ASET TETAP TANAH JALAN DI TAHUN 2023	-	820.180.000,00	- 820.180.000,00
	MENCATAT PENGAKUAN MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN KE BUDPARPORA BERUPA INVENTARIS STADION WILIS TAHUN 2023	-	52.646.081,00	- 52.646.081,00
	MENCATAT PENGAKUAN MUTASI ASET TETAP BERUPA INVENTARIS STADIUN WILIS KE BUDPARPORA TAHUN 2023	-	11.715.024.863,33	- 11.715.024.863,33
	MENCATAT PENYESUAIAN BERKURANGNYA ASET LAIN-LAIN YANG DISERAHKAN KE BUDPARPORA BERUPA BARANG INVENTARIS DI TAHUN 2023	-	-	-
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN TAHUN 2023	-	10,00	- 10,00
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG BANGUNAN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	165.979.813,00	- 165.979.813,00
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTANGEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN TAHUN 2023	-	3,00	- 3,00
	MENCATAT KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	18.593.405,56	-	18.593.405,56
	MENCATAT KOREKSI KURANG AKUMULASI JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	41,00	-	41,00
	ASET LAIN-LAIN PADA DPU PR KURANG SAJI BEBAN DAN AKUMULASI KARENA KOREKSI HITUNG APLIKASI		3.403.568.124,00	- 3.403.568.124,00
	PENGAKUAN REALISASI PEMBAYARAN ATAS UTANG BELANJA MODAL - PERENCANAAN GEDUNG BANGUNAN		368.613.200,00	- 368.613.200,00
	PENGAKUAN UTANG BELANJA ATAS PERENCANAAN DAN PENGAWASAN ATAS ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN		1.056.731.380,00	- 1.056.731.380,00

		1.443.938.026,56	17.582.743.474,33	
			-16.138.805.447,77	
OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
DINAS PERKIM	PENGAKUAN REALISASI UTANG BELANJA MODAL ATAS PERENCANAAN KEGIATAN FISIK TAHUN 2022 YANG DIBAYARKAN DI TAHUN 2023	142.613.774,00	-	142.613.774,00
	PENGHAPUSAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KENDARAAN RODA 3 /KOREKSI ATAS SALAH JURNAL PER 30 SEPTEMBER 2023 YANG SEHARUSNYA TANPA RK PPKD PERALATAN MESIN KARENA BUKAN MUTASI ASET ANTAR OPD TETAPI PENGHAPUSAN DI TAHUN 2023	-	-	-
	MENCATAT KOREKSI BERKURANG ATAS ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KARENA MEMENUHI KRITERIA BARANG PERSEDIAAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7.870.115.664,53	- 7.870.115.664,53
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN TAHUN SEBELUMNYA DI TAHUN 2023	-	11.649,00	- 11.649,00
	MENCATAT KOREKSI BERKURANG ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN TAHUN SEBELUMNYA KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	533.384.628,00	-	533.384.628,00
	MENCATAT KOREKSI BERKURANG ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN TAHUN SEBELUMNYA DI TAHUN 2023	665,00	-	665,00
	MENCATAT KOREKSI BERKURANG ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA DI TAHUN 2023	100,00	-	100,00
	KOREKSI BPK ATAS BEBNAN PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN DI TAHUN 2023		2.338.000,00	- 2.338.000,00
	KOREKSI BPK ATAS BEBAN PENYUSUTAN DAN AKUMUALSI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN		65.369.144,00	- 65.369.144,00
				-
		675.999.167,00	7.937.834.457,53	
			- 7.261.835.290,53	

SATPOL PP	KOREKSI BPK ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	1.299.870,00	-	1.299.870,00
OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
	KOREKSI BPK ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	2,00	- 2,00
		1.299.870,00	2,00	
			1.299.868,00	
BPBD	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	810.000,00	- 810.000,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	8,00	-	8,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	8,00	-	8,00
		16,00	810.000,00	
			- 809.984,00	
DINSOS	MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN DARI DINAS KESEHATAN BERUPA 3 TEMPAT TIDUR DI TAHUN 2023	73.110.000,00	-	73.110.000,00
	MENCATAT MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN BERUPA BANGUNAN SRINDIT DARI DPU & TR DI TAHUN 2023	1.371.007.954,00	-	1.371.007.954,00
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN DI TAHUN 2023	-	4,00	- 4,00
	MENCATAT KOREKSI KURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN DI TAHUN 2023	3,00	-	3,00
	MENCATAT KOREKSI KURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	1.800.000,00	-	1.800.000,00
		1.445.917.957,00	4,00	

				1.445.917.953,00
			1.445.917.953,00	
OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
DISNAKER	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	4.999.666,00	- 4.999.666,00
	KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	4,00	-	4,00
	KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	3,00	- 3,00
	KOREKSI LABA YANG DIBAGIKAN 40%	-	343.286.942,17	- 343.286.942,17
	MENCATAT KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN INVESTASI DANA BERGULIR KARENA TELAH DIBAYAR	1.198.000,00	-	1.198.000,00
				-
		1.198.004,00	348.286.611,17	
			- 347.088.607,17	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	MENCATAT MUTASI ASET TETAP YANG DIHIBAHKAN BERUPA GEROBAK SAMPAH KE KORAMIL KOTA TAHUN 2023	-	4.440.000,00	- 4.440.000,00
	MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA GEROBAK SAMPAH DINAS PENDIDIKAN SENILAI Rp77.700.000,00; KEL. KARTOHARJO SENILAI Rp83.250.000,00; KEL. MANGUHARJO SENILAI Rp38.850.000,00; KEL. TAMAN SENILAI Rp66.600.000,00 DI TAHUN 2023.	-	213.120.000,00	- 213.120.000,00
	MENCATAT PENGHAPUSAN ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA KENDARAAN RODA DUA	-	-	-
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	1.527.166,00	- 1.527.166,00

	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN TAHUN LALU KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	10,00	-	10,00
OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		Saldo (Rp)
1	2	3	4		5 = 3 - 4
	MENCATAT KOREKSI KURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN TAHUN LALU KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	101,00	-		101,00
	MENCATAT KOREKSI KURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN LALU KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	32,00	-		32,00
	KOREKSI BPK ATAS ASET LAI-LAIN PADA DLH LEBIH SAJI BEBAN DAN AKUM,ULASI PENYUSUTAN KAREA HITUNG APLIKASI	2,00			2,00
		135,00	219.087.176,00		
			- 219.087.041,00		
DUKCAPIL	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	2.276.960,00	-	2.276.960,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	1,00		- 1,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	2,00	-		2,00
					-
		2,00	2.276.961,00		
			- 2.276.959,00		
					-
DINHUB	MENCATAT MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DARI DINAS PEKERJAAN UMUM BERUPA PARKIR JALAN JAWA TAHUN 2023	494.560.920,00	-		494.560.920,00
	KOREKSI MENGURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	294.151.666,00	-		294.151.666,00

	KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN OPERALATAMNMESIN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	173,00	-	173,00
OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		Saldo (Rp)
1	2	3	4		5 = 3 - 4
	KOREKSI KURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	58,00	-		58,00
	KOREKSI KURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	444,00	-		444,00
					-
		788.713.088,00	173,00		
			788.712.915,00		
					-
DISKOMINFO	KOREKSI KURANG CATAT TAHUN SEBELUMNYA ATAS ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA MENARA TOWER	262.500.000,00	-		262.500.000,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	62.850.000,00	-		62.850.000,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	2,00	-	2,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	2,00	-		2,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA KURANG CATAT DI TAHUN 2023	-	-		-
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	172,00	-		172,00
		325.350.174,00	2,00		
			325.350.172,00		

DINAS PTSP	MENCATAT PENYESUAIAN ATAS KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	869.312,00	-	869.312,00
	KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMUBLATAN DI TAHUN 2023	7,00	-	7,00
OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
	KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMUBLATAN DI TAHUN 2023	16,00	-	16,00
		869.335,00	-	
			869.335,00	
				-
DINAS BUDPORA	MUTASI MASUK ASET TETAP PERALATAN MESIN DARI DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2023	52.646.081,00	-	52.646.081,00
	MENCATAT BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG BANGUNAN 2023	2.016.904.484,00	-	2.016.904.484,00
	MENCATAT PENYESUAIAN KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN DI TAHUN 2023	10,00	-	10,00
		2.069.550.575,00	-	
			2.069.550.575,00	
				-
DINAS PERPUSTAKAAN	KOREKSI PEMBULATAN ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT	-	5,00	- 5,00
		-	5,00	
			- 5,00	
				-
BAGIAN PEMERINTAHAN	MENCATAT KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET PERALATAN MESIN YANG DISEBABKAN UBAH MASA MANFAAT KARENA KOREKSI PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	582.083,00	- 582.083,00
		-	582.083,00	- 582.083,00
			- 582.083,00	
				-
BAGIAN UMUM	MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA KENDARAAN RODA 4 KE BAPENDA	-	398.037.500,00	- 398.037.500,00

	MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA KENDARAAN RODA 4 KE BAPPEDA	-	398.037.500,00	-	398.037.500,00
	MENCATAT PENYESUIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	11.662.573,00	-	-	11.662.573,00
OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		Saldo (Rp)
1	2	3	4		5 = 3 - 4
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG BANGUNAN DI TAHUN 2023	-	2,00	-	2,00
	MENCATAT KOREKSI BERKURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN DI TAHUN 2023	25,71	-	-	25,71
	MENCATAT MUTASI TAMBAH ASET GEDUNG DAN BANGUNAN DARI DPU TR DI TAHUN 2023	2.835.152.234,00	-	-	2.835.152.234,00
		2.846.814.832,71	796.075.002,00		
			2.050.739.830,71		
BAGIAN PEREKOKESRA	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	990.000,00	-	-	990.000,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	3,00	-	-	3,00
		990.003,00	-	-	
			990.003,00		
BAGIAN ADBANG	MENCATAT KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET PERALATAN MESIN YANG DISEBABKAN UBAH MASA MANFAAT KARENA KOREKSI PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	1.418.541,00	-	1.418.541,00
	MENCATAT KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET PERALATAN MESIN YANG DISEBABKAN UBAH MASA MANFAAT KARENA KOREKSI PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	1,00	-	1,00
		-	1.418.542,00		
			-	1.418.542,00	

SEKRET. DPRD	MENCATAT PENYESUIAN UBAH MASA MANFAAT ASET TETAP PERALATAN MESIN TAHUN 2023	2.147.933,00	-	2.147.933,00
	MENCATAT KOREKSI PENYESUIAN KARENA PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN TAHUN 2023	-	142,00	- 142,00
OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
	MENCATAT KOREKSI PENYESUIAN KARENA PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN 2023	1,00	-	1,00
		2.147.934,00	142,00	
			2.147.792,00	
BKD	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	1.249.710,00	-	1.249.710,00
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	6,00	- 6,00
	KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	5,00	- 5,00
		1.249.710,00	11,00	
			1.249.699,00	
BKAD	MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN DARI BKAD KE INSPEKTORAT ATAS RUMAH DINAS EKS KETUA DPRD DI TAHUN 2023	-	17.920.760,00	- 17.920.760,00
	MUTASI TAMBAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DARI PENDIDIKAN CABANG DINAS KECAMATAN TAMAN DI TAHUN 2023	445.985.480,00	-	445.985.480,00
	MUTASI KURANG ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KE INSPEKTORAT DI TAHUN 2023	-	18.648.833,00	- 18.648.833,00
	MENCATAT KOREKSI KURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA DOBLE CATAT AKUMULASI DI TAHUN SEBELUMNYA	95.985.000,00	-	95.985.000,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA UBAH MASA MANFAAT TAHUN 2023	-	1,00	- 1,00

	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN TAHUN 2023	-	1,00	- 1,00
	MMENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT TAHUN 2023	852.456,95	-	852.456,95
	KOREKSI TAMBAH PEMBULATANAN NILAI PENYERTAAN MODAL KE PDAM SEBESAR RP2,00 DI TAHUN 2023	2,00	-	2,00
	MENCATAT PENYESUIAN KERUGIAN BANK DAERAH ATAS LAPOREAN KEUANGAN AUDITED ATAS PEROLEHAN LABA PD BANK DAERAH BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2023	-	7.719.592.095,00	- 7.719.592.095,00
	KOREKSI BPK ATAS MUTASI ASET TETAP TANAH DARI CABANG DINAS KECAMATAN TAMAN DINAS PENDIDIKAN KE BKAD DI TAHUN 2023	13.000.000,00	-	13.000.000,00
	KOREKSI BPK MUTASI ASET TETAP TANAH EKS RUMAH DINAS KETUA DPRD DARI BKAD KE INSPEKTORAT DI TAHUN 2023	-	362.556.000,00	- 362.556.000,00
	KOREKSI BPK MENCATAT PENYESUAIAN MUTASI ASET TETAP TANAH KANTOR KE KELURAHAN KEJURON KE BKAD DI TAHUN 2023	-	560.100.000,00	- 560.100.000,00
	KOREKSI BPK MENCATAT PENYESUAIAN MUTASI ASET TETAP TANAH SUMUR BOR JALAN MANGGA KE KELURAHAN KEJURON DI TAHUN 2023	-	3.500.000,00	- 3.500.000,00
	KOREKSI BPK ATAS ASET LAIN-LAIN PADA BKAD KURANG SAJI BEBAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN KARENA KOREKSI HITUNG APLIKASI DI TAHUN 2023	-	31.585.604,00	- 31.585.604,00
		555.822.938,95	8.713.903.294,00	
			- 8.158.080.355,05	
BAPENDA	MENCATAT BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2023 (KHUSUS SKPD PENGHASIL)	934.025.511,57	-	934.025.511,57
	MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA MOBIL DARI BAGIAN UMUM	398.037.500,00	-	398.037.500,00
	KOREKSI KARENA UBAH MASA MANFAAT AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN TH 2022	42.871.250,00	-	42.871.250,00
	KOREKSI BPK ATAS ASET LAIN-LAIN PADA BAPENDA KURANG SAJI AKUMULASI		39.679.969,00	- 39.679.969,00

	KARENA KOREKSI HITUNG APLIKASI DI TAHUN 2023			
		1.374.934.261,57	39.679.969,00	
			1.335.254.292,57	
OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
INSPEKTORAT	MENCATAT PENYESUAIAN ATAS MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN KANTOR INSPEKTORAT JALAN DR SOETOMO (EKS RUMAH DINAS KETUA DPRD) DARI BKAD KE INPEKTORAT	17.920.760,00		17.920.760,00
	MENCATAT PENYESUAIAN ATAS MUTASI ASET TETAP GEDUNG KANTOR INSPEKTORAT JALAN DR SOETOMO (EKS RUMAH DINAS KETUA DPRD) DARI BKAD KE INPEKTORAT	18.648.833,00		18.648.833,00
	MENCATAT PENYESUIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA UBAH MASA MANFAAT ASET TETAP DI TAHUN 2023	215.707.100,00		215.707.100,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	4,00		4,00
	MENCATAT PENYESUAIAN ATAS MUTASI ASET TETAP TANAH ATAS GEDUNG KANTOR INSPEKTORAT JALAN DR SOETOMO (EKS RUMAH DINAS KETUA DPRD) DARI BKAD KE INPEKTORAT	362.556.000,00		362.556.000,00
		614.832.697,00	-	
			614.832.697,00	
BAPPEDA	MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA MOBIL INNOVA DARI BAGIAN UMUM	398.037.500,00		398.037.500,00
	MENCATAT KOREKSI PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN TH 2023	9,00		9,00
	KOREKSI BPK ATAS ASET LAIN-LAIN KARENA KURANGSAJI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN KARENA KOREKSI HITUNG APLIKASI		5.590.000,00	- 5.590.000,00
				-

		398.037.509,00	5.590.000,00	
			392.447.509,00	
OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
KARTOHARJO	MENCATAT PENGAKUAN MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA GEROBAK SAMPAH DARI DLH KE BEBERAPA KELURAHAN DI KECAMATAN KARTOHARJO ANTARA LAIN KEL. ORO-ORO OMBO SEBESAR RP5.550.000,00 ; KEL. SUKOSARI SEBESAR RP11.100.000,00 ; KEL. KLEGEN SEBESAR RP11.100.000,00 ; KEL. REJOMULYO SEBESAR RP16.650.000,00 ; KEL. KANIGORO SEBESAR RP27.750.000,00 DAN KEL. SEBESAR RP11.100.000,00.	66.600.000,00	-	66.600.000,00
	MUTASI ANTAR OPD ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DARI DPU TR BERUPA BALAI RT DAN RW KE 4 KELURAHAN TAHUN 2023	1.481.590.267,33	-	1.481.590.267,33
	MENCATAT PENYESUIAN KOREKSI TAMBAH PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN DI TAHUN 2023	-	13,00	- 13,00
	MENCATAT PENYESUIAN KOREKSI MENGURANGI PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN DI TAHUN 2023	78,00	-	78,00
	MENCATAT PENYESUIAN KOREKSI MENGURANGI PEMBULATAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DI TAHUN 2023	7,00	-	7,00
				-
		1.548.190.352,33	13,00	
			1.548.190.339,33	
MANGUHARJO	MENCATAT PENYESUIAN MUTASI MASUK ASET TETAP PERALATAN DARI DLH SEBESAR RP38.850.000,00 DAN BAGIAN UMUM SEBESAR RP750.000,00 TAHUN 2023	31.080.000,00	-	31.080.000,00
	MENCATAT PENYESUIAN PENGHAPUSAN ASET TETAP PERALATAN MESIN	-	-	-

	BERUPA KENDARAAN RODA 2			
	MENCATAT MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DARI DPU TR PADA TAHUN 2023	1.058.364.140,00	-	1.058.364.140,00
	MENCATAT KOREKSI TAMBAH AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	37,00	- 37,00
OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
	MENCATAT KOREKSI KURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	25,00	-	25,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	12,00	- 12,00
		1.089.444.165,00	49,00	
			1.089.444.116,00	
TAMAN	MENCATAT PENYESUAIAN MUTASI ASET TETAP PERALATAN MESIN BERUPA GEROBAK SAMPAH DARI DLH KE KEL. TAMAN SEBESAR Rp11.100.000,00; KEL. PANDEAN SEBESAR Rp11.100.000,00; KEL. BANJAREJO SEBESAR Rp11.100.000,00; KEL. MANISREJO SEBESAR Rp11.100.000,00; KEL. KEJURON SEBESAR Rp5.550.000,00 DAN KEL. JOSENAN SEBESAR Rp10.650.000,00 KECAMATAN TAMAN TAHUN 2023	53.280.000,00	-	53.280.000,00
	MENCATAT MUTASI TAMBAHAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN DARI DPU TR DI TAHUN 2023	2.209.414.704,00	-	2.209.414.704,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	7.610.454,00	- 7.610.454,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	3,00	- 3,00
	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	4,00	- 4,00

	MENCATAT KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	7,00	-	7,00
	MENCATAT PENYESUAIAN MUTASI ASET TETAP TANAH KANTOR DARI BKAD KE KELURAHAN KEJURON KECATAMAN TAMAN DI TAHUN 2023	563.600.000,00		563.600.000,00
		2.826.294.711,00	7.610.461,00	
			2.818.684.250,00	
OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
BAKESBANGPOL	KOREKSI PENAMBAHAN ASET DARI BELANJA BARANG DAN JASA KARENA TEMUAN INSPEKTORAT TAHUN 2022	6.009.600,00	-	
	MENCATAT PENGAKUAN KOREKSI KURANG AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT TAHUN 2023	3.960.000,00	-	
		9.969.600,00	-	
			9.969.600,00	
DINAS PERTANIAN & KP	MENCATAT KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PERUBAHAN MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	1.760.000,00	
	MENCATAT KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	-	4,00	
	MENCATAT KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG BANGUNAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	6,00	-	
	MENCATAT KOREKSI ATAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI JARINGAN KARENA PEMBULATAN DI TAHUN 2023	7,00	-	
		13,00	1.760.004,00	
			- 1.759.991,00	
DINAS PERDAGANGAN	MENCATAT MUTASI TAMBAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN KIOS KULINER BOGOWONTO SEBESAR	248.030.160,00	-	248.030.160,00

	RP253,092,000,00 DARI DPU TR DI TAHUN 2023			
	KOREKSI AKUMULASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN 2023	50,00	-	50,00
	MENCATAT KOREKSI PENYESUAIAN AKUMULASI ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	1.680.720,00	-	1.680.720,00
	MENCATAT KOREKSI PENYESUAIAN AKUMULASI ASET TETAP PERALATAN MESIN KARENA UBAH MASA MANFAAT DI TAHUN 2023	-	-	-
OPD	Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
	KERINGANAN PIUTANG RETRIBUSI SEBESAR 60% DARI PIUTANG TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 DI TAHUN 2023	-	1.232.920.040,00	- 1.232.920.040,00
	PENYISIHAN PIUTANG BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN	11.158.375,00	-	11.158.375,00
	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI TAHUN 2023	989.091.014,80	-	989.091.014,80
	KOREKSI BPK ATAS PENYESUIAN PENCATATAN ASET LAIN-LAIN PADA DINAS PERDAGANGAN KURANG SAJI AKUMULASI KARENA KOREKSI HITUNG APLIKASI		1.049.661,00	
		1.249.960.319,80	1.233.969.701,00	
			15.990.618,80	
		19.365.467.270,65	39.670.823.861,45	- 18.867.180.668,80
TOTAL			-20.305.356.590,80	

10.4. Ekuitas Akhir

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ekuitas akhir	2.806.862.353.839,15	2.798.933.012.648,62

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir milik Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Ekuitas akhir diperoleh dari hasil penjumlahan saldo awal ditambah surplus (defisit) LO, dan memperhitungkan dampak kumulatif sebagai akibat dari perubahan kebijakan akuntansi.

BAB XI INFORMASI NON KEUANGAN

11.1 GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA MADIUN

11.1.1 Keadaan Geografis

Kota Madiun secara geografis memiliki luas wilayah 33,23*km² dan terletak pada koordinat 1110 sampai 1120 Bujur Timur dan 70 sampai 80 Lintang Selatan, yang secara administrative terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Sedangkan secara administratif, Kota Madiun dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun ;
- b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ;
- c. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Kota Madiun merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 63 M di atas permukaan air laut. Daerah kota dilintasi Kali Madiun yang mengalir ke arah utara dan bertemu dengan Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Ngawi dan selanjutnya bermuara ke Laut Jawa. Kali Madiun membelah Kota Madiun menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kota Bagian Timur 82% dan Kota Bagian Barat 18%.

11.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Madiun dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun tingkat laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan tetapi tetap menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun tahun 2022 mencapai 199.192 jiwa terdiri atas 97.370 penduduk laki-laki dan 101.822 penduduk perempuan. Sedangkan, rata-rata kepadatan penduduk/Km² di Kota Madiun sebesar 5.994,34 jiwa/km².

Kecamatan Taman adalah kecamatan paling padat. Sebanyak 41.753 penduduk mendiami wilayah Kecamatan Taman yang seluas 12,46 km², sehingga kepadatannya 6.866,93 penduduk/km².

Jumlah penduduk yang tinggal di dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 59.243 jiwa dan 54.387 jiwa. Dengan luas wilayah masing-masing 10,04 km² dan 10,73 km², maka kepadatan penduduk kedua kecamatan tersebut adalah 5.900,70 dan 5.068,69 penduduk/ km².

11.2 ORGANISASI

Pemerintah Kota Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2019–2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.35-8262 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-8263 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur, yang telah dilantik pada tanggal 29 April 2019.

Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2019 - 2024 terdiri dari:

a. Pimpinan Eksekutif

1. Wali Kota Madiun : Drs. H. Maldi, S.H., M.M., M.Pd.
2. Wakil Wali Kota Madiun : Inda Raya Ayu Miko Saputri, S.E., M.I.B.

b. Pimpinan Legislatif

1. Ketua DPRD : Andi Raya Bagus Miko Saputro, S.H.
2. Wakil Ketua DPRD : Drs. Istono, M.Pd.
3. Wakil Ketua DPRD : Drs. H. Armaya

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;

6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Dinas Perdagangan;
11. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
17. Dinas Lingkungan Hidup;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
22. Badan Pendapatan Daerah;
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Kecamatan Kartoharjo;
27. Kecamatan Manguharjo;
28. Kecamatan Taman;

Pada tanggal 4 Januari 2021, Pemerintah Kota Madiun telah melantik seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk mengisi jabatan-jabatan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

11.3 VISI MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun telah memuat visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun terpilih untuk periode 2019-2024.

11.3.1 Visi

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Madiun, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2019–2024 adalah:

“Terwujudnya Pemerintahan Bersih
Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

Makna substantif dari visi di atas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi sebagai berikut:

1. *Bersih* mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. *Berwibawa* mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.
3. *Sejahtera* mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

11.3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Madiun 2019-2024,

maka Misi pembangunan daerah Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam PANCA KARYA yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu: PENDEKAR. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi: PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI dan TERBUKA yang KHARISMATIK.

Tabel 11.1
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Visi Kota Madiun 2019-2024 Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	
Pokok - Pokok Visi	Misi
Bersih Berwibawa	Misi ke- 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
	Misi ke- 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
Sejahtera	Misi ke- 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
	Misi ke- 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Misi yang telah ditetapkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih merupakan jawaban dari isu strategis Kota Madiun dalam periode 2019 - 2024. Misi daerah menjawab kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang di masa mendatang. Selain daripada itu, hal tersebut juga menjawab potensi daerah yang belum terkelola dan dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Keterkaitan antara misi daerah dan isu strategis daerah selanjutnya akan menjadi rujukan dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator masing-masing tujuan dan sasaran tersebut. Keterkaitan antara misi dan isu strategis daerah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 11.2
Keterkaitan Misi Daerah dan Isu Strategis Daerah
Kota Madiun Tahun 2019-2024

No	Misi	Isu Strategis
1.	Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan publik berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.
		Peningkatan keamanan dan ketentraman kehidupan Masyarakat.
2.	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu.
3.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun	Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun	Percepatan pemulihan ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi.

11.3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Madiun Tahun 2019-2024 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Madiun untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

11.3.3.1 Tujuan dan Sasaran dari Misi Pertama

Misi pertama untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah *Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)*. Dalam pencapaian misi pertama, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada Pelayanan Publik berbasis <i>smart cities</i>
Sasaran 1.1	: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sasaran 1.2	: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

11.3.3.2 Tujuan dan Sasaran dari Misi Kedua

Misi kedua untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah *Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan*. Dalam pencapaian misi kedua, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kota yang Maju, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
Sasaran 1.1	: Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur
Sasaran 1.2	: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

11.3.3.3 Tujuan dan Sasaran dari Misi Ketiga

Misi ketiga untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah *Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun*. Dalam pencapaian misi ketiga, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Sasaran 1.1	: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
Sasaran 1.2	: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Sasaran 1.3	: Meningkatnya Pemberdayaan Gender

5.3.4 Tujuan dan Sasaran dari Misi Keempat

Misi keempat untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah *Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun*. Dalam pencapaian misi keempat, ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1	: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif
Sasaran 1.1	: Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
Sasaran 1.2	: Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi
Tujuan 2	: Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat
Sasaran 2.1	: Pengurangan Kemiskinan
Sasaran 2.2	: Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat

BAB XII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggungjawab. Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan, Pemerintah Kota Madiun telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai pentahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang - undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumber daya yang dimiliki.

Sesuai regulasi yang mendasarinya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 telah disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Madiun dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal-hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan yang periode berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan Tahun 2023 telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan, serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan keuangan guna pengambilan keputusan.

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun pengakuan piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1.	Piutang Pajak	2023	11.226.316.634,00	114.283.772.789,02	113.514.116.369,67	11.995.973.053,35
2.	Piutang Retribusi	2023	7.217.998.007,00	11.295.836.565,00	13.888.815.515,00	4.625.019.057,00
3.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2023	121.517.355,00		11.158.375,00	110.358.980,00
4.	Piutang Lain - Lain	2023	6.558.726.241,18	7.984.145.183,67	6.470.033.722,00	8.072.837.702,85
Jumlah			25.124.558.237,18	133.563.754.537,69	133.884.123.981,67	24.804.188.793,20

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Tahun pengakuan piutang	Penyisihan Piutang
1	2	3	4
1.	Piutang Pajak	2023	(4.296.540.965,20)
2.	Piutang Retribusi	2023	(2.068.159.551,60)
3.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2023	(110.358.980.000,00)
4.	Piutang Lain - Lain	2023	(165.826.573,75)
	Jumlah		(116.889.507.090,55)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Klasifikasi Umur Piutang	Tahun pengakuan piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo per 31 desember 2023	Penyisihan	Nilai bersih piutang dana bergulir
1	2	3						4
1.	Investasi dana Bergulir	2023	24.251.208.856,97	1.291.444.854,52	(124.136.197,40)	25.418.517.514,09	(10.134.892.010,33)	15.283.625.503,76
Jumlah			24.251.208.856,97	1.291.444.854,52	(124.136.197,40)	25.418.517.514,09	(10.134.892.010,33)	15.283.625.503,76

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENYERTAAN MODAL
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1		PDAM	PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL	Penyertaan Modal	68.815.164.850,00	68.815.164.850,00	-	68.815.164.850,00	-			68.815.164.850,00
2		PD Bank Pasar		Penyertaan Modal	30.266.988.124,00	30.266.988.124,00		30.266.988.124,00	-			30.266.988.124,00
3		PD Aneka Usaha		Penyertaan Modal	7.936.264.985,00	7.936.264.985,00		7.936.264.985,00	-			7.936.264.985,00
4		Bank Jatim		Saham	33.516.106.750,00	33.516.106.750,00		33.516.106.750,00	-			33.516.106.750,00
JUMLAH					140.534.524.709,00	140.534.524.709,00	-	140.534.524.709,00	-	-	-	140.534.524.709,00

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	U r a i a n	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tanah	710.406.120.272,27	1.522.737.000,00	1.759.336.000,00	710.169.521.272,27
2	Peralatan dan Mesin	704.569.408.867,71	82.101.203.618,47	9.830.945.421,68	776.839.667.064,50
3	Gedung dan Bangunan	943.400.178.827,51	127.671.220.414,65	19.713.559.622,03	1.051.357.839.620,13
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.417.896.999.992,67	67.011.923.038,00	20.103.132.543,53	1.464.805.790.487,14
5	Aset Tetap Lainnya	6.625.595.703,19	2.436.417.485,00	2.363.376.985,00	6.698.636.203,19
		3.782.898.303.663,35	280.743.501.556,12	53.770.350.572,24	4.009.871.454.647,23

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL ASET TETAP
1	2	3	4	5	6	5	6 = 3 + 4 - 5
1	ASET TETAP	710.169.521.272,27	776.839.667.064,50	1.051.357.839.620,13	1.464.805.790.487,14	6.698.636.203,19	4.009.871.454.647,23
		710.169.521.272,27	776.839.667.064,50	1.051.357.839.620,13	1.464.805.790.487,14	6.698.636.203,19	4.009.871.454.647,23

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
 TAHUN ANGGARAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	U r a i a n	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.539.402.677,35	1.326.396.137,00	4.342.622.353,96	6.523.176.460,39
		9.539.402.677,35	1.326.396.137,00	4.342.622.353,96	6.523.176.460,39

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian Aset Lainnya	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Aset Lainnya	23.128.572.247,00	43.465.000,00	-	23.172.037.247,00
Jumlah		23.128.572.247,00	43.465.000,00	-	23.172.037.247,00

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N i h i l								
Jumlah								

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2		3	4	5
1	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.704.441.851,67	7.820.412.908,00	-	22.524.854.759,67
	JUMLAH	14.704.441.851,67	7.820.412.908,00	-	22.524.854.759,67

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2		3	4	5
N i h i l					
	JUMLAH				

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

No.	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Realisasi Tahun n-2, Tahun n-1, Tahun n			Jumlah Akumulasi Realisasi sampai dengan akhir Tahun n	Jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun berikutnya
			Realisasi Tahun n-2	Realisasi Tahun n-1	Realisasi Tahun n		
1	2	3	4	5	6	7	8
N i h i l							
JUMLAH			-	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah,
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198212132006042009

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

XX. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

XX.I. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK
DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

XX.2. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA
MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM
TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00001/2.1353/AU.2/10/1439.1/1/I/2024

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM
TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Nomor : 00001/2.1353/AU.2/10/1439.1/1/1/2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN MANAJEMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	ii
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN :	
1. Neraca tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.....	1
2. Laporan Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.....	2
3. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.....	3
4. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.....	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN

Jl Sulawesi no 18 telp (0351) 464205, 458923, 456442, Fax 454958 Madiun
e-mail: pdam_kota_madiun@yahoo.co.id, website : www.pdamkotamadiun.com



SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suyoto, S.IP
Alamat : Jl. Sulawesi No.18 Madiun
Alamat Rumah : Jl. Mangku prajan I No.16
Jabatan : Direktur Utama

Untuk dan atas nama PERUMDA Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Laporan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun tanggal 31 Desember 2023 telah disusun dan disajikan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang berlaku di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta dalam rangka memenuhi prinsip tata kelola PERUMDA Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang baik.



Madiun, 08 Januari 2024

Suyoto
Suyoto, S.IP
Direktur Utama



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00001/2.1353/AU.2/10/1439.1/1/1/2024

Kepada :

Kuasa Pemilik Modal, Badan Pengawas dan Direksi
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, yang terdiri dari neraca keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami.

Kami Independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Kantor (Office) :

Gedung Graha Artawa, Jalan Waru No. 20 AC Rawamangun, Jakarta Timur 13220

Telp. 021-47862273

Email : admin@kap-rpr.com

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor (Office) :

Gedung Graha Artawa, Jalan Waru No. 20 AC Rawamangun, Jakarta Timur 13220

Telp. 021-47862273

Email : admin@kap-rp.com



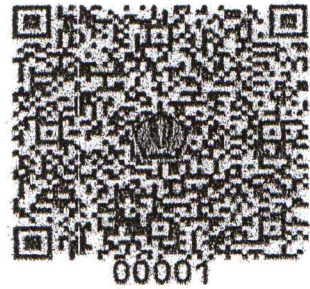
Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang dijadikan angka koresponding atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit dan diterbitkan oleh auditor independen lain tertanggal 8 Februari 2023 yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian

**Kantor Akuntan Publik
Roni Pupung**

Pupung Heru, CPA.
NRAP AP.1439

Jakarta, 8 Januari 2024



Kantor (Office) :

Gedung Graha Artawa, Jalan Waru No. 20 AC Rawamangun, Jakarta Timur 13220

Telp. 021-47862273

Email : admin@kap-rpr.com

PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

A S E T	Catatan	2023 Rp	2022 Rp
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2b, 3	10,551,284,222	6,264,486,148
Investasi Jangka Pendek	2b, 4	21,000,000,000	22,000,000,000
Piutang Usaha Neto	2d, 5, 6	5,059,781,491	4,982,701,091
Piutang Non Usaha	7	729,878,430	729,835,930
Persediaan	2g, 8	1,103,492,167	1,315,202,765
Uang Muka	9	22,094,594	-
Jumlah Aset Lancar		38,466,530,904	35,292,225,934
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.60.247.293.610 Pada tahun 2023 dan Rp.52.280.590.258 pada tahun 2022	2i, 2j, 10	43,178,722,736	39,704,211,437
Aset Dalam Penyelesaian	11	18,038,805	92,254,545
Aset Tidak Berfungsi	11	22,444,800	10,056,600
Aset Lain - Lain	12	1,939,163,444	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		45,158,369,785	39,806,522,582
JUMLAH ASET		83,624,900,688	75,098,748,516
KEWAJIBAN & EKUITAS			
	Catatan	2023 Rp	2022 Rp
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang pajak	13, 30	863,172,098	1,432,771,413
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	14	603,384,837	110,757,145
Pendapatan Diterima Dimuka		-	45,000,000
Kewajiban Jangka Pendek lainnya	15	54,274,350	53,553,350
Jumlah Kewajiban Lancar		1,520,831,286	1,642,081,908
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Kewajiban Imbal Pasca Kerja	2n, 16	1,939,163,444	-
Dana Cadangan	2p, 17	11,349,741,109	11,969,695,824
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		13,288,904,553	11,969,695,824
JUMLAH KEWAJIBAN		14,809,735,839	13,611,777,732
EKUITAS			
Modal Dasar	2p, 18	200,099,149	200,099,149
Penyertaan Pemerintah Kota Madiun	19	24,467,321,300	24,467,321,300
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	20	8,094,640,663	8,094,640,663
Penyertaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yg belum ditentukan statusnya	21	168,346,000	168,346,000
Saldo Cadangan Dana Umum	22	15,947,839,040	15,309,976,027
Laba Ditahan	23	6,952,684,543	-
Saldo Laba	24	12,984,234,155	13,246,587,646
Jumlah Ekuitas		68,815,164,850	61,486,970,783
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		83,624,900,688	75,098,748,515

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

KETERANGAN	Catatan	2023 Rp	2022 Rp
Pendapatan Usaha	2i, 25	43,461,788,153	42,220,377,460
Beban Langsung Usaha	2i, 26	12,392,108,067	11,372,571,233
Laba Kotor Usaha		31,069,680,086	30,847,806,227
Biaya Administrasi dan Umum	2i, 27	16,500,945,706	15,872,659,038
Laba Operasional		14,568,734,380	14,975,147,187
Pendapatan (Biaya) Lain - lain			
Pendapatan Lain - lain	2i, 28	1,950,477,926	1,835,411,419
Biaya Lain - lain	2i, 29	40,051,271	47,424,787
Jumlah Pendapatan (Biaya) Lain-lain Neto		1,910,426,655	1,787,986,632
Laba Bersih Sebelum Pajak		16,479,161,035	16,763,133,820
Taksiran Pajak Penghasilan			
Pajak Penghasilan	2m, 30	3,494,926,880	3,516,546,174
Laba Bersih Setelah Pajak		12,984,234,155	13,246,587,646

262.353.491

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Modal Dasar	Penyertaan Pemerintah Kota Madiun	Penyertaan Pemerintah Pusat	Penyertaan Pemerintah Propinsi Jatim	Cadangan Dana Umum	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Laba 2021	19	200,099,149	24,467,321,300	8,094,640,663	168,346,000	13,855,176,980	12,506,595,229	59,292,179,321
Laba setelah pajak penghasilan yang dibagikan tahun 2022 untuk :								
- PAD	55%	-	-	-	-	-	(6,878,627,376)	(6,878,627,376)
- Cadangan Dana Umum	20%	-	-	-	-	2,501,319,046	(2,501,319,046)	-
- Tanggung Jawab Sosial (CSR)	2%	-	-	-	-	-	(250,131,905)	(250,131,905)
- Tantiem Direksi & Dewan Pengawas	3%	-	-	-	-	-	(375,197,857)	(375,197,857)
- Jasa Produksi untuk pegawai	10%	-	-	-	-	-	(1,250,659,523)	(1,250,659,523)
- Dana Kesejahteraan	10%	-	-	-	-	-	(1,250,659,523)	(1,250,659,523)
- Cad umum yg di kompen ke samb gratis		-	-	-	-	(1,046,520,000)	-	(1,046,520,000)
Laba Tahun 2022		-	-	-	-	-	13,246,587,646	13,246,587,646
SALDO 31 DESEMBER 2022		200,099,149	24,467,321,300	8,094,640,663	168,346,000	15,309,976,026	13,246,587,646	61,486,970,784
Laba yang dibagikan tahun 2023 atas laba tahun 2022	19							
- PAD	55%	-	-	-	-	-	(6,665,668,490)	(6,665,668,490)
- Cadangan Dana Umum	20%	-	-	-	-	637,863,013	(637,863,013)	-
- Pengembalian Jaspro Tahun Buku 2021 yang dibagikan		-	-	-	-	-	1,009,628,400	1,009,628,400
Laba Ditahan		-	-	-	-	-	-	-
Laba Tahun 2023		-	-	-	-	-	12,984,234,155	12,984,234,155
SALDO 31 DESEMBER 2023		200,099,149	24,467,321,300	8,094,640,663	168,346,000	15,947,839,040	19,936,918,698	68,815,164,850

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

KETERANGAN	2023 Rp	2022 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Bersih Setelah Pajak	12,984,234,155	13,246,587,646
Penyesuaian :		
Penyisihan Piutang Usaha	94,299,852	(28,993,712)
Beban Penghapusan Piutang Usaha	246,712,345	-
Penyusutan Aset Tetap	3,966,703,352	3,620,280,557
Laba (Rugi) Sebelum Perubahan Modal Kerja	<u>17,291,949,704</u>	<u>16,837,874,491</u>
Perubahan Modal Kerja :		
(Kenaikan) / Penurunan Investasi Jangka Pendek	1,000,000,000	(1,000,000,000)
(Kenaikan) / Penurunan Piutang Usaha	(418,044,639)	(228,243,618)
(Kenaikan) / Penurunan Uang Muka Pajak	(22,094,594)	-
(Kenaikan) / Penurunan Piutang Non Usaha	-	(729,835,930)
(Kenaikan) / Penurunan Persediaan	211,710,598	(171,105,332)
(Kenaikan) / Penurunan Hutang Non Usaha	-	(598,860)
(Kenaikan) / Penurunan Biaya Yang Masih Harus Dibayar	492,627,692	50,736,620
(Kenaikan) / Penurunan Hutang Pajak	(518,191,084)	946,602,837
Kenaikan / (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	-	(50,666,400)
Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek lainnya	44,279,000	16,184,500
Kas dihasilkan Dari Operasi	<u>790,286,973</u>	<u>(1,166,926,183)</u>
Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Jumlah I)	<u>18,082,236,678</u>	<u>15,670,948,308</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
(Kenaikan) / Penurunan Aset Tetap	(7,441,214,650)	(5,559,369,155)
(Kenaikan) / Penurunan Aset Dalam Penyelesaian	74,215,740	(53,703,770)
(Kenaikan) / Penurunan Aset Tidak berfungsi	(12,388,200)	(2,115,800)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Jumlah II)	<u>(7,379,387,110)</u>	<u>(5,615,188,725)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan / (Penurunan) Dana Cadangan	(619,954,715)	1,114,000,982
Kenaikan / (Penurunan) Penyertaan Pemerintah Kota Madiun	-	-
Pembagian Laba Tahun Sebelumnya	(5,656,040,090)	(10,005,276,183)
Kenaikan / (Penurunan) Dana Cadangan	-	(1,046,520,000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Jumlah III)	<u>(6,275,994,805)</u>	<u>(9,937,795,201)</u>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (Jumlah I+II+III)	4,286,798,074	117,964,382
Kas dan Setara Kas Awal Periode	6,264,486,148	6,146,521,766
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	<u>10,551,284,222</u>	<u>6,264,486,148</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1. INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 8 Tahun 1977, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun No.13 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Kota Madiun No.17 Tahun 2001 tanggal 15 September 2001 dan Peraturan Daerah No.10 tahun 2011. Terakhir Berubah Peraturan Daerah Kota Madiun No.8 Tahun 2019 Tanggal 1 Agustus 2019 tentang perubahan nama dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari Kota Madiun menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, PERUMDA Air Minum TIRTA TAMAN SARI Kota Madiun memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan kemandirian umum berupa jasa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, PERUMDA Air Minum TIRTA TAMAN SARI Kota Madiun menjalankan fungsi - fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah
2. Memperoleh laba
3. Jasa penyediaan air minum
4. Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan/ atau Air Minum Isi Ulang
5. Pendayagunaan lahan

c. Susunan Badan Pengawas dan Direksi

Struktur organisasi PERUMDA Air Minum TIRTA TAMAN SARI Kota Madiun dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor 08 tahun 2015 tanggal 02 Oktober 2015 dan peraturan Direksi terbaru No.12 Tahun 2022 tanggal 17 Nopember 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun terdiri dari Direksi, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan Badan Pengawas dan Dewan Direksi sebagai berikut :

Badan Pengawas :

Ketua : Ir. Soeko Dwi Handiarto, MT
Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas sesuai Surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.012/33/2022 tertanggal 15 Februari 2022. Masa Bakti empat tahun mulai tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 15 Februari 2026.

Sekretaris : Budi Wibowo, SH
Pengangkatan Anggota dan sekretaris Badan Pengawas sesuai Surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.012/35/2022 tertanggal 15 Februari 2022, masa Bakti empat tahun mulai 15 Februari 2022 sampai dengan 15 Februari 2026.

Anggota : Widodo Ponco Putro, S.Sos, M.Si
Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sesuai Surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.023/8/2020 tertanggal 31 Januari 2020, selama empat tahun terhitung mulai tanggal 31 Januari 2020 s/d 30 Januari 2024.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1. INFORMASI UMUM PERUSAHAAN - (Lanjutan)

c. Susunan Badan Pengawas dan Direksi - (Lanjutan)

Dalam menjalankan tugas, Badan Pengawas dibantu Sekretaris yang ditetapkan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun : Sulistanti Purwaningtyastuti, S.Pd., M.Si
Pengangkatan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun, sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas Madiun No.3/DP/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022. Masa Bakti empat tahun mulai 28 Maret 2022

Kepala Penelitian dan Pengembangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari : Naryadi, S.Kom
Pengangkatan Kepala Penelitian dan Pengembangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari, sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas Madiun No.3/DP/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022. Masa Bakti empat tahun mulai 28 Maret 2022 sampai dengan 27 Maret 2026.

Dewan Direksi :

Direktur Utama : Suyoto, S.IP
Pengangkatan Direktur Utama sesuai Surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.012/17/K/2021 tertanggal 14 Juli 2021. Masa Bakti 5 tahun mulai 14 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2026.

Direktur Administrasi dan Keuangan : Hery Sulistiyono, ST
Pengangkatan Direktur Administrasi dan Keuangan sesuai Surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.012/18/K/2021 tertanggal 14 Juli 2021. Masa Bakti 5 tahun mulai 14 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2026.

Direktur Teknik : Tarmiyono, ST, SH
Pengangkatan Direktur Teknik sesuai Surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.012/19/K/2023. Tertanggal 11 Juli 2023. Dengan masa bakti mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan 15 Juli 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan mempunyai jumlah karyawan masing-masing sebanyak 108 orang dan 115 orang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum TIRTA TAMAN SARI Kota Madiun Tahun buku 2023 disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan angka komparatif tahun 2022 dan telah memenuhi semua persyaratannya.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - (Lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan - (Lanjutan)

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode tidak langsung. Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas dan investasi jangka pendek sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu - waktu bisa di cairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang. Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya".

c. Transaksi - transaksi dengan pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak - pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur SAK ETAP Bab 28, "Pengungkapan pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa". Semua transaksi - transaksi signifikan dengan pihak - pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa dengan persyaratan dan kondisi yang sama atau berbeda apabila dilakukan dengan pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

d. Piutang Usaha

Piutang Disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Berdasarkan pengalaman dan data historis selama tiga tahun terakhir, perusahaan menetapkan estimasi kerugian piutang tak tertagih sebagai berikut kecuali untuk pelanggan HANKAM dan PEMDA :

Umur Piutang 1 - 3 bulan	:	0 %
Umur Piutang 4 - 6 bulan	:	30 %
Umur Piutang 7 - 12 bulan	:	50 %
Umur Piutang 13 - 24 bulan	:	75 %
Umur Piutang diatas 24 bulan	:	100 %

e. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Perusahaan kepada pemberi kerja yang akan dilunasi oleh pemberi kerja setelah pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat penerimaan atas tagihan termin yang ditahan oleh pemberi kerja sejumlah persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak sampai dengan masa pemeliharaan.

f. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin. Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang telah disahkan oleh pemberi kerja atau yang mewakilinya yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara progress fisik dengan pengajuan pengalihan pada tanggal neraca.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - (Lanjutan)

g. Persediaan

Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO). Pencatatan persediaan dilakukan dengan Physical inventory method.

h. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus.

i. Properti Investasi

Properti Investasi merupakan tanah atau bangunan yang dimiliki untuk sewa operasi atau kenaikan nilai dan tidak digunakan atau dijual dalam kegiatan operasi perusahaan.

Pada saat pengakuan awal, properti investasi diukur sebesar biaya perolehannya. Setelah perolehan awal properti investasi diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan properti investasi meliputi harga pembelian dan pengeluaran yang dapat diatribusikan secara

j. Aset Tetap dan Penyusutan

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, yaitu harga beli termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aktiva tetap tersebut siap digunakan. Penyusutan aktiva tetap kelompok bangunan disusutkan berdasarkan persentase tetap dari nilai perolehan, sedangkan aktiva tetap lainnya disusutkan dengan persentase tetap dari nilai buku sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Besarnya penyusutan aktiva tetap berdasarkan atas jenisnya adalah sebagai berikut :

	Tarif
Instalasi Sumber Air	5 % / tahun
Instalasi Perpompaaan :	
Bangunan Instalasi Pompa	5 % / tahun
Instalasi Pompa Lainnya	10 % / tahun
Instalasi Pengolahan :	
Bangunan Instalasi Pengolahan	5 % / tahun
Reservoair dan Tangki	5 % / tahun
Alat Pengolahan Air	10 % / tahun
Instalasi Transmisi dan Distribusi :	
Bangunan Reservoair dan Saluran Transmisi & Distribusi	5 % / tahun
Pipa Dinas, Kran Umum, Saluran Air Pemadam Kebakaran dan saluran Transmisi dan Distribusi lainnya.	10 % / tahun
Meter Air dan Instalasi Meter	10 % / tahun
Instalasi Tertier & Accessories	25 % / tahun
Instalasi Tertier Ex Pelanggan	25 % / tahun
Instalasi Umum :	
Bangunan	5 % / tahun
Kendaraan Bermotor	50 % / tahun
Inventaris Kantor Golongan I	50 % / tahun
Inventaris Kantor Golongan II	25 % / tahun

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - (Lanjutan)

k. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume. Beban diakui pada saat terjadinya.

m. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terhutang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

n. Kewajiban Imbalan Kerja

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun dalam memberikan imbalan pasca kerja kepada karyawan selain memberikan imbalan yang bersifat rutin berupa gaji dan jaminan kesejahteraan lain, juga ikut program baik yang diwajibkan perundang - undangan juga ikut program lainnya dengan pihak ketiga. Imbalan Kerja yang diberikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun kepada karyawan terdiri dari :

Pada saat masih bekerja, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun selain memberikan gaji dan kesejahteraan juga mengikutkan program Jaminan Sosial dan program Jaminan Kesehatan yang bersifat wajib diantaranya :

- PT. JAMSOSTEK program yang diikuti program jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Hari Tua (JHT), sedangkan premi bulannya ditanggung Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun 4,89% sedangkan ditanggung karyawan 2%.
- BPJS KESEHATAN program yang diikuti yaitu program jaminan kesehatan, premi per bulan sebesar 4,5% dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap per orang per bulan, ditanggung perusahaan sebesar 4% sedangkan karyawan 0,5%, yang mendapatkan jaminan kesehatan adalah yang bersangkutan, suami atau istri dan anak maksimum 3 (tiga) anak.

Imbalan Pasca Kerja, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sesuai dengan kemampuan keuangan dalam rangka penyelesaian imbalan pasca kerja pada saat karyawan pensiun, menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dengan PT. Asuransi Jiwasraya sesuai perjanjian kerjasama Nomor : 842.1/401.401/100/2005 tanggal 22 Desember 2005 dan mulai bulan Juni 2014 diikutkan ke DAPENMA PAMSI untuk program tambahan berupa :

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - (Lanjutan)

n. Kewajiban Imbalan Kerja - (Lanjutan)

- Program luran Pasti, dengan premi 15% dari Phdp ditanggung Perusahaan dan 5% dari Phdp ditanggung karyawan.
- Program Asuransi Tabungan Hari Tua Kumpulan, yang preminya per triwulan sebesar Rp. 53.267.237 ditanggung perusahaan semua.
- Program luran Pasti, dengan premi 12,10% dari Phdp ditanggung Perusahaan dan 5% dari Phdp ditanggung karyawan. (DAPENMA PAMSI)

o. Pengeluaran Barang Modal dan Biaya

Batasan pengeluaran biaya yang diklasifikasikan atau diperlukan sebagai pengeluaran barang modal adalah sebagai berikut :

- Barang modal yang diperlukan untuk digunakan dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan.
- Mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan batasan jumlah diatas Rp.200.000, sedangkan pengeluaran untuk penggantian komponen mesin / instalasi yang bersifat pemeliharaan rutin dan tidak menambah umur ekonomis diperlakukan sebagai biaya.

p. Pembagian Laba

Berdasarkan Perda Kodya Dati II Madiun No.13 Tahun 1997 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun, kemudian diubah dengan Perda Nomor 17 Tahun 2001 dan Perda No.10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab XIV pasal 70 pembagian laba setelah diaudit dan dikurangi pajak dihitung sebagai berikut :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	55%
- Cadangan Umum	20%
- Dana Sosial dan Pendidikan	5%
- Dana Pensiun dan Sokongan	10%
- Jasa Produksi	10%

Berdasarkan Perda Kodya Dati II Madiun tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, kemudian diubah dengan Perda Nomor 17 Tahun 2001 dan Perda No.10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab XIV pasal 70, mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 8 Tahun 2019 pasal 123 ayat 2 pembagian laba setelah diaudit dan di kurangi pajak

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	55%
- Cadangan Umum	20%
- Tanggung Jawab Sosial (CSR)	2%
- Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas	3%
- Jasa Produksi /insentif pekerjaan utk pegawai	10%
- Dana Kesejahteraan	10%

PERSAHAAN AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS - POS LAPORAN KEUANGAN

	2023	2022
3. Kas dan Bank	10,551,284,222	6,264,486,148
Jumlah ini merupakan saldo Kas/Setara Kas dan Bank Perusahaan Per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing terdiri dari :		
	2023	2022
Kas	311,583,115	78,395,667
Kas Kecil	5,000,000	5,000,000
Bank Jatim Cabang Madiun No.Rek 0051002022	2,179,628,920	1,749,033,478
Bank Jatim Simpeda No Rek 0052279300	308,113,178	305,754,484
Bank BTN (Giro) No Rek 0002901300003382	7,072,203,564	3,802,637,976
Bank Bukopin No.Rek 51001200133	-	100,962,982
Tabungan Bank Pasar No.Rek 10110002111	674,755,444	89,653,566
Bank BTN No.Rek 0002901500208318	-	97,777,580
Bank BRI No Rek 004501002415568	-	35,270,416
Jumlah	10,551,284,222	6,264,486,148

Saldo Kas/Kas Kecil telah sesuai dengan hasil pemeriksaan kas sedangkan saldo Bank telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan rekening masing-masing Bank yang dilakukan perusahaan Per 31 Desember 2023.

	2023	2022
4. Investasi Jangka Pendek	21,000,000,000	22,000,000,000

Jumlah tersebut merupakan Simpanan Deposito di Bank per Per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Bank BTN	9,000,000,000	8,000,000,000
Deposito Bank Pasar Kota Madiun	12,000,000,000	12,000,000,000
Deposito Bank Bukopin	-	2,000,000,000
Jumlah	21,000,000,000	22,000,000,000

4. Investasi Jangka Pendek

Deposito Bank Pasar Kota Madiun sebesar Rp 12.000.000.000,00 terdiri dari :

NO.	No.Deposito	Tanggal	Jangka Waktu	Nominal
1	000137	15 Maret 2023	12 bulan	1,000,000,000
2	000138	15 Maret 2023	12 bulan	800,000,000
3	000139	15 Maret 2023	12 bulan	1,000,000,000
4	000143	29 Maret 2023	12 bulan	600,000,000
5	000144	31 Maret 2023	12 bulan	1,000,000,000
6	000152	18 April 2023	12 bulan	600,000,000
7	000160	17 Mei 2023	12 bulan	600,000,000
8	000175	10 Juni 2023	12 bulan	600,000,000
9	000197	29 Juli 2023	12 bulan	1,000,000,000
10	000200	8 Agustus 2023	12 bulan	800,000,000
11	000218	06 September 2023	12 bulan	1,000,000,000
12	000219	06 September 2023	12 bulan	1,000,000,000
13	000220	06 September 2023	12 bulan	1,000,000,000
14	000223	13 September 2023	12 bulan	1,000,000,000
	Jumlah			12,000,000,000

Deposito Bank BTN sebesar Rp 9.000.000.000,00 terdiri dari :

NO.	No.Deposito	Tanggal	Jangka Waktu	Nominal
1	2214011	29 December 2023	3 bulan	3,000,000,000
2	2214012	29 December 2023	3 bulan	3,000,000,000
3	2214016	05 Desember 2023	3 bulan	3,000,000,000
	Jumlah			9,000,000,000

PERSAHAAN AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS - POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

5. Piutang Usaha	2023	2022
	5,059,781,491	4,982,701,091

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Usaha Per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing terinci sebagai berikut :

	2023	2022
Piutang Rekening Air	4,559,370,700	5,002,317,255
Piutang Rekening Non Air	60,016,725	16,405,031
Piutang Rekening Ragu-ragu	673,148,783	102,433,940
Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang Usaha	(232,754,717)	(138,455,135)
Jumlah Piutang Usaha Neto	5,059,781,491	4,982,701,091

Rincian Piutang Air sebagai berikut :

	2023	2022
Piutang Air Sosial Umum	6,784,320	8,877,640
Piutang Air Sosial Khusus	63,482,710	59,568,240
Piutang Air Rumah Tangga A	3,800,267,200	4,042,708,315
Piutang Air Rumah Tangga B	294,115,000	447,626,850
Piutang Air Pemerintah A	166,228,920	190,079,950
Piutang Air Niaga Kecil	217,872,120	230,527,960
Piutang Air Industri Kecil	752,800	695,200
Piutang Air Niaga Besar	8,507,660	21,207,560
Piutang Air Industri Besar	1,359,970	1,025,540
Jumlah	4,559,370,700	5,002,317,255

Rincian Piutang Non Air sebagai berikut :

	2023	2022
Piutang Non Air Umum	60,016,725	16,405,031
Jumlah	60,016,725	16,405,031

Rincian Piutang Rekening Ragu - Ragu sebagai berikut :

	2023	2022
Piutang Ragu-Ragu Air	634,698,821	101,833,940
Piutang Ragu-Ragu Non Air	38,449,962	600,000
Jumlah	673,148,783	102,433,940

Rincian Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang Usaha Tahun 2023 :

piutang air :			
Umur Piutang	% Penyisihan	Piutang Usaha	Penyisihan Piutang
1 - 3 Bulan	0%	3,787,669,690	-
4 - 6 Bulan	30%	93,826,410	28,147,923
7 - 12 Bulan	50%	93,405,270	46,702,635
Piutang Air Hankam	0%	555,283,580	-
Piutang Air Pemda	0%	29,185,750	-
Jumlah		4,559,370,700	74,850,558

Piutang Non air :			
Umur Piutang	% Penyisihan	Piutang Usaha	Penyisihan Piutang
1 - 3 Bulan	0%	15,641,105	-
4 - 6 Bulan	30%	27,069,845	8,120,955
7 - 12 Bulan	50%	17,305,775	8,652,888
Piutang Air Hankam	0%	-	-
Piutang Air Pemda	0%	-	-
Jumlah		60,016,725	16,773,842

Rincian Piutang Ragu - Ragu Air :			
Umur Piutang	% Penyisihan	Piutang Usaha	Penyisihan Piutang
13 - 24 Bulan	75%	159,308,030	119,481,023
Akumulasi Piutang karena perubahan sistem		475,390,791	-
Jumlah		634,698,821	119,481,023

PERSAHAAN AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS - POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

5. Piutang Usaha - (Lanjutan)

Rincian Piutang Ragu - Ragu Non Air :			
Umur Piutang	% Penyisihan	Piutang Usaha	Penyisihan Piutang
13 - 24 Bulan	75%	28,865,725	21,649,294
Akumulasi Piutang karena perubahan sistem		9,584,237	
Jumlah		38,449,962	21,649,294
Total Penyisihan Piutang Ragu - Ragu		673,148,783	

Rincian Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang Usaha Tahun 2022 :

Umur Piutang	% Penyisihan	Piutang Usaha	Penyisihan Piutang
1 - 3 Bulan	0%	4,866,968,226	-
4 - 6 Bulan	30%	71,236,750	21,371,025
7 - 12 Bulan	50%	80,517,310	40,258,655
13 - 24 Bulan	75%	102,433,940	76,825,455
Diatas 24 Bulan	100%	-	-
Jumlah		5,121,156,226	138,455,135

Piutang Ragu-Ragu 2023 dan 2022 masing-masing terdiri atas :

	2023	2022
Piutang Ragu-ragu Air	634,698,821	101,833,940
Piutang Ragu-ragu Non Air	38,449,962	600,000
Jumlah	673,148,783	102,433,940

Piutang ragu -ragu merupakan klasifikasi untuk akun piutang usaha yang umur piutangnya sudah di atas 2 tahun, dan diperkirakan tidak dapat tertagih. Tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Pasal 112.

6. Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang Usaha

	2023	2022
	232,754,717	138,455,135

Jumlah tersebut merupakan saldo Cadangan Kerugian Piutang Usaha masing-masing sebesar terdiri dari :

	2023	2022
Penyisihan Piutang Air	74,850,558	61,629,680
Penyisihan Piutang Non Air	16,773,842	-
Penyisihan Piutang Ragu-Ragu Air	119,481,023	76,375,455
Penyisihan Piutang Ragu-Ragu Non Air	21,649,294	450,000
Jumlah	232,754,716	138,455,135

7. Piutang Non Usaha

	2023	2022
	729,878,430	729,835,930

Jumlah tersebut merupakan saldo Tahun 2023 dan 2022. Saldo Tahun 2022 merupakan saldo audited sebelum terbit keputusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Saldo Tahun 2023 merupakan saldo yang sesuai Petikan putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/PN Sby Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan perkara pada terdakwa Rahajeng Elok Kartika Putri. Untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut dalam satu bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak bisa mengembalikan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, maka dari itu piutang tersebut belum bisa di hapuskan.

8. Persediaan

	2023	2022
	1,103,492,167	1,315,202,765

Jumlah tersebut merupakan Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Alat Tulis & Barang Cetak	63,515,286	53,841,627
Lain-Lain	429,425,014	685,870,434
Pipa dan Assesories	351,022,718	369,495,319
Water Meter	136,777,850	76,844,950
Suku Cadang AETA	122,751,300	129,150,435
Jumlah	1,103,492,167	1,315,202,765

PERSAHAAN AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS - POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

9. Uang Muka	2023	2022
	22,094,594	-

Jumlah tersebut merupakan Uang Muka Per 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung sebagai berikut :

	2023	2022
Uang Muka Operasional	22,094,594	-
Jumlah	22,094,594	-

10. Aset Tetap	2023	2022
	43,178,722,735	39,704,211,437

Jumlah tersebut merupakan Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung sebagai berikut :

	2023	2022
Harga Perolehan	103,426,016,345	95,984,801,695
Akumulasi Penyusutan	(60,247,293,610)	(56,280,590,258)
Jumlah	43,178,722,735	39,704,211,437

Aset Tetap 2023				
Harga Perolehan	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Tanah & Hak atas tanah	3,655,622,847	-	-	3,655,622,847
Instalasi Sumber Air	15,028,722,625	1,946,450,232	-	16,975,172,857
Instalasi Perpompaan	12,403,704,208	955,929,664	-	13,359,633,872
Instalasi Pengolahan Air	2,685,260,398	208,739,500	-	2,893,999,898
Instalasi Transmisi & Distribusi	50,419,091,938	1,758,919,580	-	52,178,011,518
Bangunan / Gedung	3,302,142,895	94,379,500	-	3,396,522,395
Peralatan & Perlengkapan	274,478,330	-	-	274,478,330
Kendaraan Alat Pengangkutan	2,698,557,500	290,550,000	-	2,989,107,500
Inventaris Kantor	5,517,220,954	2,186,246,174	-	7,703,467,128
Jumlah	95,984,801,695	7,441,214,650	-	103,426,016,345

Akumulasi Penyusutan	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Instalasi Sumber Air	6,529,576,241	677,032,439	-	7,206,608,680
Instalasi Perpompaan	7,623,731,738	569,873,058	-	8,193,604,796
Instalasi Pengolahan Air	1,553,541,489	111,325,350	-	1,664,866,839
Instalasi Transmisi & Distribusi	30,877,470,903	1,920,924,981	-	32,798,395,884
Bangunan / Gedung	2,769,157,410	45,638,583	-	2,814,795,993
Peralatan & Perlengkapan	274,478,330	-	-	274,478,330
Kendaraan Alat Pengangkutan	2,499,871,562	142,542,187	-	2,642,413,749
Inventaris Kantor	4,152,762,585	499,366,753	-	4,652,129,338
Jumlah	56,280,590,258	3,966,703,352	-	60,247,293,610
Nilai Buku	39,704,211,437			43,178,722,735

Aset Tetap 2022				
Harga Perolehan	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2022
Tanah & Hak atas tanah	3,655,622,847	-	-	3,655,622,847
Instalasi Sumber Air	13,671,283,230	1,731,789,395	374,350,000	15,028,722,625
Instalasi Perpompaan	12,169,196,528	234,507,680	-	12,403,704,208
Instalasi Pengolahan Air	2,629,926,898	55,333,500	-	2,685,260,398
Instalasi Transmisi & Distribusi	47,575,318,255	2,843,773,683	-	50,419,091,938
Bangunan / Gedung	3,147,802,056	154,540,839	-	3,302,142,895
Peralatan & Perlengkapan	274,478,330	-	-	274,478,330
Kendaraan Alat Pengangkutan	2,549,557,500	149,000,000	-	2,698,557,500
Inventaris Kantor	4,752,446,894	984,147,060	219,373,000	5,517,220,954
Jumlah	90,425,432,538	6,153,092,157	593,723,000	95,984,801,695

PERSAHAAN AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG Mendukung POS - POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

10. Aset Tetap - (Lanjutan)

Aset Tetap 2022	Saldo 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2022
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi Sumber Air	5,921,350,363	608,225,878	-	6,529,576,241
Instalasi Perpompaan	7,134,163,424	489,568,314	-	7,623,731,738
Instalasi Pengolahan Air	1,444,499,251	109,042,238	-	1,553,541,489
Instalasi Transmisi & Distribusi	29,021,823,781	1,855,647,122	-	30,877,470,903
Bangunan / Gedung	2,715,161,181	53,996,229	-	2,769,157,410
Peralatan & Perlengkapan	274,478,330	-	-	274,478,330
Kendaraan Alat Pengangkutan	2,383,301,687	116,569,875	-	2,499,871,562
Inventaris Kantor	3,765,531,684	387,230,901	-	4,152,762,585
Jumlah	52,660,309,701	3,620,280,557	-	56,280,590,258
Nilai Buku	37,765,122,837			39,704,211,437

Semua aset tetap perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun tidak diasuransikan dari segala resiko kerugian sehingga tidak ada jaminan ganti rugi jika terjadi musibah kebakaran atau gempa bumi.

11. Aset Tetap Dalam Penyelesaian

2023	2022
40,483,605	102,311,145

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pekerjaan Dalam Penyelesaian Per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Instalasi Sumber	18,038,805	91,927,095
Instalasi Transmisi & Distribusi	-	327,450
Aset Tidak Berfungsi	22,444,800	10,056,600
Jumlah	40,483,605	102,311,145

12. Aset Lain-Lain

2023	2022
1,939,163,444	-

Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian:

	2023	2022
Iuran Pensiun/DAPENMA	1,373,656,445	-
Asuransi Hari Tua DPLK(BNI46)	247,748,872	-
Asuransi Tenaga Kerja	317,758,127	-
Jumlah	1,939,163,444	-

Iuran DAPENMA merupakan iuran Dana Pensiun Bersama Perumda Air Minum Seluruh Indonesia.

13. Hutang Pajak

2023	2022
863,172,098	1,432,771,413

Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Pajak Per 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri atas :

	2023	2022
PPh Pasal 21	-	111,164,654
PPN Dan PPh Lainnya	-	14,633,374
PPh Badan Pasal 25	-	573,048,526
PPh 29	863,172,098	733,924,859
Jumlah	863,172,098	1,432,771,413

Hutang pajak Tahun 2023 merupakan taksiran hutang Pajak Badan Tahun 2023

14. Beban Yang Masih Harus Dibayar

2023	2022
603,384,837	110,757,145

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Yang Masih Harus Dibayar Per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut

PERSAHAAN AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS - POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

14. Beban Yang Masih Harus Dibayar - (Lanjutan)

	2023	2022
Beban Retribusi Air	19,401,350	18,830,050
Beban Air Kantor	-	-
Beban Lainnya	583,983,487	91,927,095
Jumlah	<u>603,384,837</u>	<u>110,757,145</u>

15. Kewajiban Jangka Pendek lainnya

	2023	2022
	<u>54,274,350</u>	<u>98,553,350</u>

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Pendapatan Diterima Dimuka	54,274,350	98,553,350
Jumlah	<u>54,274,350</u>	<u>98,553,350</u>

Jumlah tersebut merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa Tower di Instalasi Produksi Ngrowo dan Bantuan Sosial Air bersih sesuai Keputusan Walikota Nomor 460-401.104/34/2023 per Per 31 Desember 2023 dan 2022

16. Kewajiban Jangka Panjang

	2023	2022
Kewajiban Imbal Pasca Kerja	1,939,163,444	-
Jumlah	<u>1,939,163,444</u>	<u>-</u>

17. Kewajiban Lain

	2023	2022
	<u>11,349,741,109</u>	<u>11,969,695,824</u>

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Lain-Lain Per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	2023	2022
Pendapatan Asli Daerah /PAD	(619,954,715)	-
Tanggung Jawab Sosial / CSR	776,673,747	776,673,747
Dana Kesejahteraan	11,193,022,077	11,193,022,077
Jumlah	<u>11,349,741,109</u>	<u>11,969,695,824</u>

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Cadangan Tahun 2023 dan 2022 yang dibentuk dari pembagian laba berdasarkan Perda No. 13 Tahun 1997 diubah dengan Perda No. 17 Tahun 2001 yang dirubah lagi dengan Perda No. 10 Tahun 2011 dan terakhir dirubah dengan Perda No. 08 Tahun 2019

18. Modal Dasar

	2023	2022
	200,099,149	200,099,149
	<u>200,099,149</u>	<u>200,099,149</u>

Jumlah Modal Dasar Perusahaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kodya Dati II Madiun Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun.

19. Penyertaan Pemda Kota Madiun

	2023	2022
	24,467,321,300	24,467,321,300
	<u>24,467,321,300</u>	<u>24,467,321,300</u>

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Pemda Kota Madiun Per 31 Desember 2023 dan 2022 terinci sebagai berikut :

- Anggaran Pemda Tahun 1993/1994 pasal No. 2P.0.172.01-002 disetor tanggal 05 Maret 1994	4,000,000	✓
- Anggaran Pemda Tahun 1994/1995 pasal No. 2P.5.202-002 disetor tanggal 20 Maret 1995	2,000,000	✓
- Pelunasan hutang RPD No. RDA-210/DP3/1994 dan Loan IBRD No. 4017-IND, PPP No. SLA-114/DP3/1999 oleh Pemerintah Kota Madiun dengan Surat Keputusan Walikota Madiun No. 4 Tahun 2002	5,969,273,001	✓
- Bantuan Modal SK Walikota No. 18 Tahun 2002	2,000,000,000	✓
- Bantuan dari Pemda Kota Madiun sesuai BAC Nomor 650/73/413.401/2003 (antara Walikota dengan Direktur PDAM)	486,610,000	✓

PERSAHAAN AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG Mendukung POS - POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

19. Penyertaan Pemda Kota Madiun - (lanjutan)

-	Penyerahan Pengeluaran dan Pemanfaatan atas Hasil Pembangunan sektor air bersih Kota Madiun (Berita Acara antara Pemerintah Kota Madiun dengan PDAM Kota Madiun No. 650/202/413.109/2001 tanggal 2 Januari 2001) terdiri dari :		
	- Pipa Distribusi PK 50 Ø sepanjang 2.757 M	49,148,000	-
	- Instalasi Gas Chlor 1 unit, pompa panel kapasitas 40 l/dt H=30 M lengkap dengan panel dan kabel 1 unit	99,990,000	-
	- Pompa Submersible kapasitas 40 l/dt H= 40 M 2 unit dan motor protektor 2 unit	118,734,000	-
-	Bantuan dari Pemda Kota Madiun sesuai BAC Nomor 650/825/413.401/2003 (antara Walikota dengan Direktur PDAM)	281,500,000	-
-	Bantuan dari Pemda Kota Madiun atas pengelolaan dan pemanfaatan atas hasil PDP SB-SB sesuai BA No 650/001a/413.401/2005 (antara Walikota dengan Direktur	173,500,000	-
-	Berita Acara Serah terima yang dananya dari ABT Pasca Bencana Sektor Sumber Daya Air tahun anggaran 2004 Kota madiun Sesuai Berita Acara No. 050/1800a/401.109/2005 (antara Walikota Madiun denga Direktur PDAM) dengan perincian sebagai berikut:	1,993,728,000	-
	- Sumur Dalam	312,513,000	
	- Pompa Submerble	247,041,000	
	- Jaringan Perpipaan	1,087,614,000	
	- Pemb R.Jaga Operator/Panel Pompa	135,383,000	
	- Instalasi Gas Chlor	82,642,000	
	- Padagr keliling Instalasi Sumur	128,535,000	
		1,993,728,000	
-	Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelola Hasil Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Saluran Pemukiman dan Jaringan Air Bersih Kota Madiun No. 050/880/401.109/2008	1,569,029,000	-
	- Sumur-sumur	515,999,000	
	- Peralatan Pompa	67,331,000	
	- Alat-2 Pengolahan Air	158,774,000	
	- Jaringan Pipa Distribusi	826,925,000	
		1,569,029,000	
-	Berita Acara Serah Terima anantara Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM No. 030/3180/401.024/2007	885,287,000	-
	- Alat-2 Pengolahan Air	69,300,000	
	- Jaringan Pipa Distribusi	463,850,000	
	- Sumur-sumur	352,137,000	
		885,287,000	
-	Berita Acara Serah Terima anantara Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM No. 028/802/401.012/2009	1,692,665,000	-
2010	- Generator 150 kva	399,645,000	
	- Jaringan Pipa Distribusi	434,220,000	
	- Sambungan Rumah Murah	570,900,000	
	- Sumur-sumur	287,900,000	
		1,692,665,000	
-	Berita Acara Serah Terima anantara Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM No. 030/1333/401.012/2010	2,158,667,500	-
2010	- Jaringan Pipa Distribusi	1,463,220,000	
	- Sambungan Rumah Murah	695,447,500	
		2,158,667,500	
-	Berita Acara Serah Terima anantara Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM No. 050/2246/401.109/2011	543,431,000	-
2010	- Jaringan Pipa Distribusi	543,431,000	

**PERSAHAAN AIR-MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS - POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

19. Penyertaan Pemda Kota Madiun - (lanjutan)

2011	Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/785/401.109/2011 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK) dengan rincian sebagai berikut :	775,782,000
2012	Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No.050/211/401.101/2013 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK) dengan rincian sebagai berikut : - Jaringan Pipa Distribusi 262,692,000 - Pemasangan Water Meter Induk 93,994,000 - Pemasangan Sambungan Rumah 733,270,000 <u>1,089,956,000</u>	1,089,956,000
2013	Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/1642/401.501/2013. tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK) dengan rincian sebagai berikut : (Nota dinas Distribusi)	53,855,000
2015	Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/361/401.501/2014. tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK) dengan rincian sebagai berikut : (Beban Peren. & Pengaw)	15,000,000
2015	Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/359/401.501/2014. tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK) dengan rincian sebagai berikut : - Pembuatan Sumur Dalam 306,000,000 - Pengembangan Jaringan 823,206,000 <u>1,129,206,000</u>	1,129,206,000
2015	Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/088/401.501/2015. Tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK) dengan rincian sebagai berikut : - Pembuatan dua unit Sumur Dalam 1,021,961,000 - Pengembangan Jaringan 435,872,000 <u>1,457,833,000</u>	1,457,833,000
2021	Perda No.9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun tanggal 10 November 2020 - Tanah dan Hak atas tanah 1,918,126,800	1,918,126,800
	Jumlah	24,467,321,301

20. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2023 dengan perincian sebagai berikut :

-	Bantuan Meter Air dari Direktorat Teknik Penyehatan Departemen Pekerjaan Umum	30,970,000
-	Sarana dan Prasarana Air Bersih dari PPSAB Jatim Tahun 1972 s/d 1979	127,445,650
-	Sarana dan Prasarana Air Bersih dari PPSAB Jatim Tahun 1983 s/d 1991	3,243,396,718
-	Bantuan Mobil Tangki Air dari PPSAB Jatim	39,985,000
-	Bantuan dari PPSAB Jatim Tahun 1994	374,220
-	Bantuan Pipa dari PSSAB tahun 1997 tanggal 10 Agustus 1997 No. PDB-JATIM/30/97 sebesar	26,164,675
-	Bantuan Pipa GMS, SOCK GI dari PSSAB tanggal 29 Maret 1999 sebesar	2,544,000
-	Surat Perintah Mengeluarkan Barang Dari Kantor Proyek Peningkatan Prasarana Pemukiman Jawa Timur tertanggal 18 Oktober 1999 No. PL.03.01.03.Ca.13.01/X/99-006 Berupa Pipa ACP 250" diameter 240 sebesar	11,419,200

PERSAHAAN AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS - POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

19. Penyertaan Pemda Kota Madiun - (lanjutan)

-	Berita Acara Tanggal 9 Nopember 1999 No. 01/BA/P4/1999 Antara Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemukiman Jawa Timur dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun berupa sebuah Sumur Dalam sebesar	180,744,300
-	Berita Acara Tanggal 31 Maret 2000 No. SPL.050/2238/413.109/2000 antara Pemimpin Proyek Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih SPL OECF INP 23 LG Tahun Anggaran 1999/2000 dengan Walikota Madiun berupa :	
	- Sebuah Sumur Dalam	223,419,000
	- Pipa Distribusi ukuran 2" dan 4" sebesar	329,373,000
	- Pipa Distribusi ukuran 4" dan 6" sebesar	224,268,000

20. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat - (Lanjutan)

-	Kendaraan Dinas Truk Tangki Air Minum bantuan Pemerintah Pusat Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satker PKP Air Minum Jatim, Berita Acara Serah Terima Sementara No. 02/BAST PBS/PKP-AM/XII/2007	187,220,000
-	Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Nomor: 75/bast/pk-pam.jt/2009 Tanggal 15-12-2009 antara Kepala satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaan air minumi Jawa Tmur dengan Direktur PDAM Kota madiun berupa pekerjaan	1,819,915,900
2010	Bukti Pengeluaran barang No. 157/mdn/pkp-am/III/2010, tertanggal 3 Maret 2010 dari kantor Cipta Karya Pengembangan Kinerja pengelolaan Air Minum Jawa Timur, berupa perpipaan	14,238,700
2010	Berita Acara Serah Terima Nomor: 10/BAST/PK-PAM.JT/2013 antara Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Proipinsi Jawa Tmur dengan Direktur PDAM Kota madiun berupa Pengelolaan Air Minum	1,633,162,300
	Jumlah	8,094,640,663

21. Pernyataan Propinsi Jawa Timur Yang Belum Ditentukan Statusnya

	2023	2022
	168,346,000	168,346,000
	168,346,000	168,346,000

Penyertaan Propinsi Jawa Timur yang belum ditentukan statusnya Per 31 Desember 2023 dengan perincian sebagai berikut :

-	Berita Acara Serah Terima Nomor: 602.1/638.3/121/PP/2005 Tanggal 12 Desember 2005 antara Kepala Sub Dinas Pengembangan Perkotaan Dinas Pemukiman Proipinsi Jawa Tmur dengan Direktur PDAM Kota madiun berupa pengadaan & Pemasangan Pipa PVC S12.5 dia.50 + Accesorie = 2.511 M dan Pipa GI dia.50+	100,000,000
-	Berita Acara Serah Terima Nomor: 602.1/PK/121/2007 Tanggal 12 Juli 2007 antara Kepala Sub Dinas Pengembangan Perkotaan Dinas Pemukiman Proipinsi Jawa Tmur dengan Direktur PDAM Kota madiun berupa pemasangan sambungan rumah sebanyak 180 sambungan dengan asumsi per sambungan Rp 379.700.00	68,346,000
	Jumlah	168,346,000

22. Cadangan Dana Umum

	2023	2022
	15,947,839,040	15,309,976,026
	15,947,839,040	15,309,976,026

Saldo tersebut merupakan saldo Per 31 Desember 2023 dan 2022 hasil dari reklasifikasi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP) yang dimulai pada tahun buku 2011.

PERSAHAAN AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
GATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS - POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

	2023	2022
23. Laba Ditahan	<u>6,952,684,543</u>	<u>-</u>
	<u>6,952,684,543</u>	<u>-</u>
Jumlah tersebut merupakan Laba Rugi Per 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri atas :		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Laba Tahun Lalu	13,246,587,646	12,506,595,229
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(6,665,668,490)	(6,878,627,376)
Dana Cadangan	(637,863,013)	(2,501,319,046)
Tanggung Jawab Sosial (CSR)	-	(250,131,905)
Tantiem Direksi & Dewan Pengawas	-	(375,197,857)
Jasa Produksi untuk pegawai	-	(1,250,659,523)
Dana Kesejahteraan	-	(1,250,659,523)
Pengembalian Jaspro	1,009,628,400	-
Jumlah	<u>6,952,684,543</u>	<u>-</u>
24. Laba Tahun Berjalan	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<u>12,984,234,155</u>	<u>13,246,587,646</u>
	<u>12,984,234,155</u>	<u>13,246,587,646</u>
Pembagian Laba Sebagai Berikut :		
Dana Cadangan	5% (649,211,708)	(637,863,013)
	12,335,022,448	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	55% (6,784,262,346)	(6,665,668,490)
Tanggung Jawab Sosial (CSR)	2% (246,700,449)	-
Tantiem Direksi & Dewan Pengawas	1% (123,350,224)	-
Jasa Produksi untuk pegawai	4% (493,400,898)	-
Laba Ditahan/Pensiun	38% (4,687,308,530)	-
Pengembalian Jaspro Tahun Buku 2021 yang dibagikan tahun 2022 karena temuan BPK	-	1,009,628,400
Laba ditahan	<u>-</u>	<u>6,952,684,543</u>
25. Pendapatan	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<u>43,461,740,465</u>	<u>42,220,377,460</u>
	<u>43,461,740,465</u>	<u>42,220,377,460</u>
Jumlah tersebut merupakan pendapatan usaha tahun berjalan terdiri atas :		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan Air	40,617,935,796	39,468,081,649
Pendapatan Non Air	2,843,852,357	2,752,295,811
Jumlah	<u>43,461,788,153</u>	<u>42,220,377,460</u>
Berdasarkan jenis pelanggan pend. air tersebut diatas dapat dikelompokkan sebagai berikut :		
Sosial	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Non Niaga	780,702,122	735,676,429
Pemerintah	35,980,741,538	35,258,588,840
Niaga	1,571,407,240	1,500,539,090
Industri	2,248,141,258	1,947,634,330
Jumlah	31,545,950	25,652,960
	<u>40,612,538,108</u>	<u>39,468,091,649</u>
Pendapatan Non Air Tahun masing-masing terdiri atas :		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan Sambungan Baru	627,387,357	1,260,727,386
Pendapatan Sambungan Kembali	997,077,700	735,836,175
Pendapatan Denda	1,206,437,300	755,732,250
Pendapatan Sweeping	12,950,000	-
Jumlah	<u>2,843,852,357</u>	<u>2,752,295,811</u>

PERSAHAAN AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG Mendukung POS - POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

	2023	2022
26. Beban Langsung Usaha	12,392,108,067	11,372,571,233
Jumlah tersebut merupakan Beban Langsung Usaha masing - masing terdiri atas :		
	2023	2022
Beban Sumber/Perpompaan	7,371,639,755	6,788,349,620
Beban Pengolahan Air	455,801,237	439,270,328
Beban Transmisi & Distribusi	4,564,667,075	4,144,951,285
Jumlah	12,392,108,067	11,372,571,233
a. Beban Sumber/Perpompaan masing-masing terdiri atas :		
	2023	2022
Beban Operasional	5,461,907,473	5,070,527,082
Beban Pemeliharaan	412,427,235	363,669,447
Beban Penyusutan	1,246,905,498	1,097,794,191
Beban Air Baku	250,399,550	256,358,000
Jumlah	7,371,639,755	6,788,348,720
Beban Operasional terdiri atas :		
	2023	2022
Beban Pegawai	1,096,221,383	1,018,599,695
Beban Bahan Bakar	53,081,400	20,298,000
Beban Listrik	4,312,604,690	4,031,629,387
Jumlah	5,461,907,473	5,070,527,082
Beban Pemeliharaan terdiri atas :		
	2023	2022
Beban Pemeliharaan Bangunan	6,160,000	14,600,000
Beban Pemeliharaan Sumur	6,376,569	9,120,137
Beban Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik	38,701,035	44,045,650
Beban Pemeliharaan Alat	29,741,115	28,480,000
Beban Pemeliharaan Lingkungan Sumber	331,448,516	267,423,680
Jumlah	412,427,235	363,669,447
Beban Penyusutan Sumber dan Pompaan masing-masing terdiri atas :		
b. Beban Pengolahan Air terdiri atas :		
	2023	2022
Beban Operasional	339,690,843	324,274,690
Beban Pemeliharaan	4,785,044	5,953,400
Beban Penyusutan	111,325,350	109,042,238
Jumlah	455,801,237	439,270,328
Beban Operasional Tahun terdiri atas :		
	2023	2022
Beban Pegawai	174,501,840	172,922,570
Beban Bahan Kimia	30,104,493	32,847,120
Beban Bahan Pembantu	10,244,510	-
Beban Pemeriksaan Air	124,840,000	118,505,000
Jumlah	339,690,843	324,274,690
Beban Pemeliharaan Pengolahan Air Tahun terdiri atas :		
	2023	2022
Beban Pemeliharaan Alat Pengolahan Air	4,785,044	5,953,400
Jumlah	4,785,044	5,953,400
Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Air terdiri atas :		
c. Beban Transmisi dan Distribusi terdiri atas :		
	2023	2022
Beban Operasional	1,489,372,502	1,466,939,889
Beban Pemeliharaan	1,154,369,593	822,364,274
Beban Penyusutan	1,920,924,981	1,855,647,123
Jumlah	4,564,667,075	4,144,951,285

PERSAHAAN AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS - POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

26. Beban Langsung Usaha - (Lanjutan)

Beban Operasional terdiri atas :	2023	2022
Beban Pegawai	1,355,755,472	1,307,878,300
Beban Bahan Perlengkapan+ Bahan Baku	20,469,360	3,232,800
Beban Pipa Persil	68,243,170	154,806,539
Beban Aspal dan Rabat	44,904,500	1,022,250
Jumlah	1,489,372,502	1,466,939,889

Beban Pemeliharaan terdiri atas :	2023	2022
Beban Pemeliharaan Reservoir	1,210,000	1,050,000
Beban Pemeliharaan Pipa Transmisi & Distribusi	490,407,372	170,764,121
Beban Pemeliharaan Pipa Dinas	484,177,170	398,690,614
Beban Pemeliharaan Inst. Pompa & Ins.Meter	178,025,051	251,859,539
Beban Pemeliharaan Jembatan Pipa	550,000	-
Jumlah	1,154,369,593	822,364,274

Beban Penyusutan Transmisi dan Distribusi terdiri atas :	2023	2022
Beban Penyusutan Transmisi dan Distribusi	1,920,924,981	-
Jumlah	1,920,924,981	-

27. Beban Umum dan Administrasi

2023	2022
16,500,945,706	15,872,659,038

Jumlah tersebut merupakan Beban Umum dan Administrasi Per 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri atas :

Jumlah tersebut merupakan Beban Umum dan Administrasi Per 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri atas :	2023	2022
Beban Operasional Umum	9,011,202,477	9,062,628,780
Beban Kantor	595,836,701	612,832,069
Beban Langganan	346,043,791	317,681,202
Beban Penelitian dan Pengembangan	626,139,099	1,220,081,789
Beban Pemeliharaan	525,096,714	423,597,420
Beban Penyisihan Piutang	255,272,112	-
Rupa-Rupa Beban Umum	4,453,807,290	3,678,040,774
Beban Penyusutan	687,547,523	557,797,005
Jumlah	16,500,945,706	15,872,659,038

Beban Operasional Umum terdiri atas :	2023	2022
Beban Pegawai	5,081,475,030	4,903,959,262
Beban Juran Pensiun	1,373,656,445	1,520,923,135
Beban Pembinaan Karyawan	339,647,385	355,661,290
Beban Bantuan dan Sumbangan	256,374,000	58,337,100
Beban Pendidikan dan Latihan	610,329,164	831,950,924
Rupa-Rupa Beban Pegawai	1,349,720,453	1,391,797,069
Jumlah	9,011,202,477	9,062,628,780

Beban Kantor masing-masing terdiri atas :	2023	2022
Beban Alat Kantor dan Foto Copy	154,831,358	131,118,446
Beban Barang Cetak	7,610,000	17,568,901
Beban Perlengkapan Komputer	43,418,908	49,757,364
Beban Telepon dan Air	41,935,201	32,539,799
Beban Tamu dan Rapat	187,993,032	180,946,490
Beban Benda Pos	4,341,448	4,022,170
Beban Listrik Kantor	105,853,831	115,387,300
Beban Cleaning Service	49,852,924	81,491,599
Jumlah	595,836,701	612,832,069

PERSAHAAN AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS - POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

27. Beban Umum dan Administrasi - (Lanjutan)

Beban Langganan Tahun terdiri atas :

	2023	2022
Beban Pengawasan Meter	14,815,000	19,432,500
Beban Pembacaan Meter	101,040,807	3,330,000
Beban Premi Tagihan	79,603,704	193,850,482
Beban Pencetakan Rekening	2,250,000	10,000,000
Beban Promosi dan Humas	148,334,280	91,068,220
Jumlah	346,043,791	317,681,202

Beban Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

	2023	2022
Beban Survey dan Penelitian	4,369,750	22,550,000
Beban Perencanaan Teknik	220,620,000	741,563,819
Beban Perencanaan Keuangan	109,970,000	177,050,000
Beban Perencanaan Komputer	8,753,750	11,157,985
Beban Humas	-	200,000
Beban Organisasi	165,829,478	53,710,500
Rupa-Rupa Beban Litbang	116,596,121	213,849,485
Jumlah	626,139,099	1,220,081,789

Beban Pemeliharaan masing-masing sebesar terdiri atas :

	2023	2022
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	1,818,700	2,870,230
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	447,258,920	367,594,400
Beban Pemeliharaan Bangunan	2,550,000	827,500
Beban Pemeliharaan Instalasi	11,550,470	2,890,305
Beban Pemeliharaan Taman & Lapangan	680,000	5,572,000
Beban Pemeliharaan Lingkungan Kantor	61,238,624	46,733,290
Jumlah	525,096,714	426,287,725

Rupa-rupa Beban Umum dan Administrasi masing-masing sebesar terdiri atas :

	2023	2022
Beban Iuran	100,195,922	131,600,392
Beban Badan Pengawas dan Direksi	473,163,960	450,160,845
Beban Perjalanan Dinas	312,680,394	188,891,056
Beban Jasa Profesional	416,059,316	248,132,505
Beban Asuransi dan Keamanan	1,607,385,343	2,343,057,371
Beban Pajak, PBB dan Perijinan	364,407,805	309,198,605
Beban Pengawas SPI	8,000,000	7,000,000
Jumlah	3,281,892,740	3,678,040,774

Beban Penyusutan masing-masing terdiri atas :

	2023	2022
Beban Penyusutan Bangunan	45,638,583	53,996,229
Beban Penyusutan Kendaraan	142,542,187	116,569,875
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	499,366,753	387,230,901
Jumlah	687,547,523	557,797,005

28. Pendapatan Lain-Lain

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Lain-Lain Tahun terdiri atas :

	2023	2022
Bunga Deposito	990,246,125	615,753,174
Jasa Giro	210,813,194	274,583,937
Rupa-Rupa Pendapatan Lainnya	541,314,106	673,276,798
AMDK	208,104,500	271,797,500
Jumlah	1,950,477,926	1,835,411,409

PERSAHAAN AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS - POS LAPORAN KEUANGAN - (Lanjutan)

	2023	2022
29. Beban Lain-Lain		
Beban Administrasi Bank	40,051,271	47,424,777
Jumlah	<u>40,051,271</u>	<u>47,424,777</u>
30. Taksiran Pajak		
Perhitungan taksiran pajak untuk Tahun 2023 :		
Laba Sebelum Pajak	<u>16,479,161,035</u>	<u>16,763,133,820</u>
Koreksi Fiskal :		
Koreksi Fiskal Positif :		
- Beban Makan & Minum Rapat	187,993,032	180,946,490
- Beban Pakai-an Dinas	-	149,138,125
- Beban Pakai-an	67,371,813	-
- Beban Representatif	388,244,250	307,480,000
- Beban Olahraga	18,242,500	59,712,500
- Beban Hari - Hari Besar	249,438,685	233,128,100
- Beban Penyisihan Piutang	232,754,717	138,455,135
- Beban Rekreasi	610,329,164	-
- Beban Kesehatan	306,028,736	349,080,951
- Beban Pajak	-	223,377,097
- Bantuan dan Sumbangan	258,374,000	58,337,100
Jumlah	<u>2,316,776,897</u>	<u>1,699,655,498</u>
Koreksi Fiskal Negatif :		
- Beban Penyusutan	533,639,166	667,215,256
- Pendapatan Jasa Giro/Bunga Deposito	1,201,040,335	890,337,121
- Beban Penghapusan Piutang	246,712,345	-
Jumlah	<u>1,981,391,846</u>	<u>1,557,552,377</u>
Laba Setelah Koreksi Fiskal	<u>16,814,546,087</u>	<u>16,905,236,941</u>
Laba Fiskal Dibulatkan	<u>16,814,546,000</u>	<u>16,905,236,941</u>
PPh fasilitas:		
= (Rp. 4.800.000.000,-/Rp. 43.461.788.153,-) x Rp. 16.814.546.000,-		
= (Rp. 1.857.029.456,-) x 11%	204,273,240	202,605,953
= Rp. 204.273.240,-		
PPh non fasilitas:		
= (Rp. 16.814.546.000,-) - (Rp. 1.857.029.456,-)		
= (Rp. 14.957.516.544,-) x 22%	3,290,653,640	3,313,940,220
= Rp. 3.290.653.640,-		
Jumlah Pajak Penghasilan	<u>3,494,926,880</u>	<u>3,516,546,174</u>
Dikurangi Pajak Penghasilan dibayar di muka :		
PPh Pasal 25	2,631,754,781	2,782,621,315
Estimasi Kurang (Lebih) Bayar Pajak Penghasilan	<u>863,172,099</u>	<u>733,924,859</u>

31. Tanggung Jawab Atas Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari, dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman ini telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2024.

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

XX. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

XX.I. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK
DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

XX.2. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA
MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH KOTA MADIUN
LAPORAN KEUANGAN
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00002/3.0347/AU.2/07/1069-1/1/I/2024

**PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH KOTA MADIUN**

**LAPORAN KEUANGAN DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
31 Desember 2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Neraca	1 - 2
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5 - 6
Catatan Atas Laporan Keuangan	7 - 37



PEMERINTAH KOTA MADIUN
PERUMDA BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN

Jln. Imam Bonjol No. 70 Telepon (0351) 452589 Fax. (0351) 453296
e-mail. bpr_kota_madiun@yahoo.com, web. www.bprkotamadiun.com



PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
**PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH KOTA MADIUN**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Forest Khrisna Tri Wasisto Ady, SH |
| Alamat kantor | : | Jl. Imam Bonjol No. 70, Kota Madiun |
| Alamat rumah sesuai KTP | : | Jl. Bukit Cemara Sari IV Blok C1 No. 31, Kelurahan
Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | Sugeng Mukti Wibowo, ST |
| Alamat kantor | : | Jl. Imam Bonjol No. 70, Kota Madiun |
| Alamat rumah sesuai KTP | : | Desa Bogem RT.01 RW.01, Kecamatan Kawedanan,
Kabupaten Magetan |
| Jabatan | : | Direktur |

Menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN** ("Bank").
- Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR).
- a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Madiun, 26 Januari 2024

Sugeng Mukti Wibowo, ST
Direktur



Forest Khrisna Tri Wasisto Ady, SH
Direktur Utama

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00002/3.0347/AU.2/07/1069-1/1/1/2024

**Kepada Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi
PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN ("Bank") terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi yang material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen Dan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan SAK ETAP di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Halaman 2

Tanggung Jawab Manajemen Dan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit Atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Halaman 3

Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit Atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

Ir. Lilik Hartatik, CPA, CA, BKP.
No. Ijin AP. 1069



Surabaya, 26 Januari 2024

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
NERACA

Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
ASET			
Kas	3	419.418.400	420.695.000
Pendapatan bunga yang akan diterima	4	713.491.561	760.031.847
Penempatan pada bank lain	5	39.619.842.219	45.114.673.614
Penyisihan kerugian		(52.700.533)	(87.144.995)
		<u>39.567.141.686</u>	<u>45.027.528.619</u>
Kredit yang diberikan	6		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		74.840.550	228.413.670
Pihak ketiga		65.399.546.219	60.778.155.228
Penyisihan kerugian		(11.856.494.619)	(3.994.680.553)
		<u>53.617.892.150</u>	<u>57.011.888.345</u>
Aset tetap - bersih	7	4.487.859.266	4.593.532.593
Aset tidak berwujud - bersih	8	7.432.321	15.838.567
Aset lain-lain	9	370.758.469	333.784.676
JUMLAH ASET		<u><u>99.183.993.853</u></u>	<u><u>108.163.299.647</u></u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
NERACA (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	10	1.074.330.508	959.306.588
Utang bunga	11	114.770.808	156.499.194
Utang pajak	12a	69.133.480	13.720.830
Simpanan nasabah	13		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		30.197.077	502.764.276
Pihak ketiga		67.492.826.538	67.678.276.135
		<u>67.523.023.615</u>	<u>68.181.040.411</u>
Kewajiban imbalan kerja	14	116.107.070	-
Kewajiban lain-lain	15	19.640.248	22.655.099
		<u>68.917.005.729</u>	<u>69.333.222.122</u>
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor	16	25.000.000.000	25.000.000.000
Saldo laba	17		
Cadangan umum		6.500.551.115	6.395.113.952
Cadangan tujuan		6.486.029.104	6.380.591.941
Belum ditentukan tujuannya		(7.719.592.095)	1.054.371.632
		<u>5.266.988.124</u>	<u>13.830.077.525</u>
		<u>30.266.988.124</u>	<u>38.830.077.525</u>
JUMLAH EKUITAS		<u>99.183.993.853</u>	<u>108.163.299.647</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>99.183.993.853</u>	<u>108.163.299.647</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga	18		
Kontraktual		7.513.006.571	9.133.013.143
Amortisasi provisi dan administrasi		529.765.518	620.333.064
		<u>8.042.772.089</u>	<u>9.753.346.207</u>
Beban bunga	19		
Kontraktual		3.012.947.405	3.163.445.912
Premi penjaminan simpanan		132.734.102	133.203.849
		<u>3.145.681.507</u>	<u>3.296.649.761</u>
Pendapatan bunga - bersih		4.897.090.582	6.456.696.446
Pendapatan operasional lainnya	20	114.900.298	242.470.693
Jumlah pendapatan operasional		<u>5.011.990.880</u>	<u>6.699.167.139</u>
Beban penyisihan kerugian/penyusutan	21	8.089.892.527	563.359.406
Beban pemasaran	22	60.536.500	100.112.600
Beban umum dan administrasi	23	4.203.255.296	4.095.525.873
Beban operasional lainnya	24	275.291.718	644.137.845
		<u>12.628.976.041</u>	<u>5.403.135.724</u>
		<u>(7.616.985.161)</u>	<u>1.296.031.415</u>
LABA (RUGI) OPERASIONAL			
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan non operasional		34.831.016	132.238.173
Beban non operasional	25	(68.304.470)	(31.172.450)
		<u>(33.473.454)</u>	<u>101.065.723</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(7.650.458.615)	1.397.097.138
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	13b		
Pajak kini		69.133.480	342.725.506
LABA (RUGI) BERSIH		<u>(7.719.592.095)</u>	<u>1.054.371.632</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal disetor	Saldo laba		Belum ditentukan tujuannya	Jumlah
			Cadangan umum	Cadangan tujuan		
Saldo 31 Desember 2021	1, 16	25.000.000.000	6.225.948.038	6.211.426.027	1.691.659.137	39.129.033.202
Pembagian dividen	17	-	-	-	(930.412.525)	(930.412.525)
Cadangan	17	-	169.165.914	169.165.914	(338.331.828)	-
Dana kesejahteraan pegawai	17	-	-	-	(169.165.914)	(169.165.914)
Jasa produksi	17	-	-	-	(135.332.731)	(135.332.731)
CSR	17	-	-	-	(50.749.774)	(50.749.774)
Tantiem	17	-	-	-	(67.666.365)	(67.666.365)
Laba tahun berjalan		-	-	-	1.054.371.632	1.054.371.632
Saldo 31 Desember 2022	1, 16	25.000.000.000	6.395.113.952	6.380.591.941	1.054.371.632	38.830.077.525
Pembagian dividen	17	-	-	-	(579.904.398)	(579.904.398)
Cadangan	17	-	105.437.163	105.437.163	(210.874.326)	-
Dana kesejahteraan pegawai	17	-	-	-	(105.437.163)	(105.437.163)
Jasa produksi	17	-	-	-	(84.349.731)	(84.349.731)
CSR	17	-	-	-	(31.631.149)	(31.631.149)
Tantiem	17	-	-	-	(42.174.865)	(42.174.865)
Rugi tahun berjalan		-	-	-	(7.719.592.095)	(7.719.592.095)
Saldo 31 Desember 2023	1, 16	25.000.000.000	6.500.551.115	6.486.029.104	(7.719.592.095)	30.266.988.124

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS			
OPERASI			
Laba (rugi) bersih		(7.719.592.095)	1.054.371.632
Penyesuaian:			
Penyisihan kerugian kredit	6, 21	7.863.107.155	152.850.191
Penyisihan kerugian penempatan pada bank lain		-	32.826.779
Penyusutan aset tetap	7, 21	218.379.126	156.583.054
Imbalan pasca kerja	14, 23	116.107.070	-
Amortisasi:			
Amortisasi sewa	23	131.825.100	84.107.542
Amortisasi aset tidak berwujud	8, 21	8.406.246	15.114.376
Provisi dan administrasi kredit yang diberikan	18	(529.765.518)	(620.333.064)
Pemulihan PPAP	5, 20	(35.737.551)	-
Arus kas sebelum perubahan aset dan kewajiban operasi		52.729.533	875.520.510
Perubahan aset dan kewajiban operasi:			
Pendapatan bunga yang akan diterima		46.540.286	(139.859.691)
Kredit yang diberikan		(3.938.052.353)	8.728.846.793
Aset lain-lain		(168.798.893)	(105.929.311)
Kewajiban segera		115.023.920	455.884.931
Utang bunga		(41.728.386)	12.904.757
Utang pajak		55.412.650	(59.727.324)
Simpanan nasabah		(658.016.796)	4.426.689.473
Kewajiban lain-lain		(3.014.851)	(345.873.391)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(4.539.904.890)	13.848.456.747

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian aset tetap	7	(112.705.799)	(201.169.600)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(112.705.799)	(201.169.600)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran dividen	17	(1.054.371.632)	(1.691.659.137)
Cadangan umum		105.437.163	169.165.914
Cadangan tujuan		105.437.163	169.165.914
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		(843.497.306)	(1.353.327.309)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(5.496.107.995)	12.293.959.838
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		45.535.368.614	33.241.408.776
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		40.039.260.619	45.535.368.614
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN			
Kas dan setara kas terdiri dari:			
Kas	3	419.418.400	420.695.000
Giro	5	9.792.017.938	7.617.380.625
Tabungan	5	14.547.824.281	24.717.292.989
Deposito berjangka dengan jangka waktu paling lama 3 bulan	5	15.280.000.000	12.780.000.000
Jumlah kas dan setara kas		40.039.260.619	45.535.368.614

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

1.1. Pendirian Bank

Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun ('Bank'), didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotapraja Tingkat II Madiun No. 15L/38 tanggal 15 Desember 1938. Peraturan tersebut diubah dengan peraturan Bank Pasar Kotapraja Madiun No. 105/DPRD/1960 tanggal 5 November 1960 dan Peraturan Daerah No. 6 tahun 1973 yang merupakan unit usaha Perusahaan Daerah Pemerintah Kota Madiun. Selanjutnya, Bank diubah menjadi Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Madiun No. 16 tahun 1981 tanggal 6 Oktober 1981 yang telah disahkan melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Februari 1983 No. 40/P/tahun 1983, diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun tahun 1983 seri C tanggal 18 April 1983 No. 2/C.

Bank telah mengalami beberapa perubahan nama. Perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun oleh Walikota Madiun. Bank mengalami perubahan nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. SR-61/KO.0402/2021 tanggal 31 Mei 2021.

Sesuai dengan pasal 5, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 tahun 2009, maksud dan tujuan pendirian Bank adalah membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Bank dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- 2) Memberikan kredit sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha kecil dan mikro;
- 3) Melakukan kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Lembaga Keuangan / Lembaga lainnya;
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;
- 5) Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 70 Madiun. Pada tanggal 31 Desember 2023 Bank memiliki 5 (lima) Kantor Kas, yaitu:

- 1) Kantor Kas Pasar Sleko, beralamat di Jl. Musi No. 1 Madiun.
- 2) Kantor Kas Pasar Besar, beralamat di Jl. Panglima Sudirman Madiun

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

1.1. Pendirian Bank (lanjutan)

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 70 Madiun. Pada tanggal 31 Desember 2023 Bank memiliki 5 (lima) Kantor Kas, yaitu: (lanjutan)

- 3) Kantor Kas Sogaten, beralamat di Jl.Puspowarno No.12 Sogaten Madiun
- 4) Kantor Kas Manisrejo, beralamat di Jl. Dungus Manis No. 7, Manisrejo, Taman Kota, Madiun
- 5) Kantor Kas Bok Malang, beralamat di Jl. Pilang Dwija Pasar Bok Malang Kota Madiun

1.2. Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 susunan Dewan Pengawas dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Dewan Pengawas</u>		
Ketua	: Sudandi, S.Sos	Sudandi, S.Sos
<u>Direksi</u>		
Direktur Utama	: Forest Khrisna Tri Wasisto Ady, SH	-
Direktur	: Sugeng Mukti Wibowo, ST	Sugeng Mukti Wibowo, ST

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun No 539-401.012/214/2022 tanggal 21 Oktober 2022, No 539-401.023/8/K/2020 tanggal 5 Maret 2020 dan No. No 539-401.012/25/2023 tanggal 18 Agustus 2023, susunan pengurus tahun 2023 dan 2022 telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) program Apolo.

Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas, Direktur dan Direktur Utama sesuai dengan Surat OJK No. KEP-93/KO.0402/2022 tanggal 4 Oktober 2022, No.KEP-15/KO.0402/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan KEP-43/KO.0402/2023 tanggal 5 Juli 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 jumlah karyawan tetap Bank adalah 42 orang (tidak diaudit).

1.3. Tanggal Penyelesaian Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang diselesaikan pada tanggal 26 Januari 2024.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang material, dimana Bank berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR), dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimana diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2.1 Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain seperti yang dijelaskan pada kebijakan akuntansi untuk masing-masing akun tersebut.

Manajemen Bank berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2023 dan 2022 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan PABPR dan telah memenuhi persyaratannya.

Manajemen Bank berpedoman pula pada pemenuhan kewajiban sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR yang telah diubah dengan SEOJK No. 16/SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

2.2. Transaksi hubungan istimewa

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP Bab 28 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.3. Pendapatan bunga yang akan diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari aset produktif dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya.

2.4. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada Bank lain terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan setelah dikurangi penyisihan kerugian kecuali giro yang disajikan sebesar saldo giro.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2.5. Kredit yang diberikan

Saldo kredit yang diberikan disajikan di neraca sebesar pokok kredit dikurangi dengan provisi serta ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit dikurangi dengan penyisihan kerugian kredit. Penyisihan tersebut merupakan cadangan yang dibentuk sebesar persentase yang ditetapkan dari saldo kredit yang diberikan pada tanggal neraca berdasarkan penggolongan kualitas kredit yang diberikan. Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan.

Pendapatan provisi dan komisi serta biaya transaksi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan/atau yang mempunyai jangka waktu tertentu, ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya.

Saldo pendapatan provisi dan komisi yang belum diamortisasi untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, diakui sebagai pendapatan pada saat pelunasan.

Kredit diklasifikasikan "*non-performing*" pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut diragukan. Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai "*non-performing*" tidak diperhitungkan dan akan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Kredit dihapuskan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut sudah tidak akan tertagih lagi. Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbuku diakui sebagai pendapatan operasional lainnya.

2.6. Penyisihan kerugian aset produktif

Aset produktif Bank terdiri dari penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan.

Bank membentuk penyisihan penghapusan aset produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset produktif, komitmen dan kontinjensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pembentukan penyisihan kerugian aset produktif pada tahun 2023 dan 2022 ditentukan berdasarkan kriteria Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018.

<u>Klasifikasi</u>	<u>Kredit yang diberikan</u>	<u>Penempatan pada bank lain</u>
Lancar *)	0,5%	0,5%
Dalam perhatian khusus	3%	0%
Kurang lancar	10%	10%
Diragukan	50%	0%
Macet	100%	100%

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

- *) Kualitas lancar pada tahun 2022 berdasarkan POJK No. 34/POJK.03/2020 tanggal 2 Juni 2020 dan telah dirubah sesuai POJK No. 18/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 mengatur bahwa, Bank dapat:
- a) membentuk penyisihan penghapusan aset produktif umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar; atau
 - b) tidak membentuk penyisihan penghapusan aset produktif umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar

Persentase penyisihan kerugian aset produktif dalam bentuk kredit yang diberikan di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar, yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

Bagian Penempatan pada Bank Lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan penyisihan kerugian aset produktif atas penempatan pada bank lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2.7. Agunan yang diambil alih (AYDA)

Agunan yang diambil alih merupakan aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Agunan yang diambil alih dicatat sebesar nilai wajar setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual, maksimal sebesar kewajiban debitur.

Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengambilalihan agunan dan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Laba atau rugi akibat realisasi penjualan agunan yang diambil alih dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

2.8. Aset tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK ETAP.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2.8. Aset tetap (lanjutan)

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana harusnya, hanya apabila kemungkinan besar Bank akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur secara handal.

Aset tetap kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

Masa Manfaat

Gedung	20 tahun
Kendaraan bermotor	4 dan 8 tahun
Inventaris kantor	4 dan 8 tahun

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

2.9. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

Lisensi peranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat peranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaat (4 tahun).

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program peranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi peranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Bank dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tidak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, program SLIK dan maintenance serta aplikasi perbankan sehubungan dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan aplikasi laporan bulanan Otoritas Jasa Keuangan.

Penurunan nilai aset tidak berwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya.

2.10. Aset lain-lain

Aset lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Aset lain-lain terdiri dari beban dibayar dimuka, beban ditanggungkan, uang muka biaya dan lainnya, dimana diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2.10. Aset lain-lain (lanjutan)

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

2.11. Kewajiban segera

Kewajiban segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang telah jatuh tempo atau menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah pemberi amanat maupun tidak. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan oleh Bank.

2.12. Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain

Simpanan merupakan kewajiban kepada nasabah dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.

Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Deposito merupakan simpanan pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan.

Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain diakui sebesar kewajiban kepada nasabah dan bank lain dikurangi dengan saldo biaya transaksi yang dapat diatribusikan yang belum diamortisasi. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu simpanan atau estimasi masa manfaat yang ditetapkan oleh Bank dan diakui sebagai beban bunga simpanan.

Beban bunga simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada simpanan tersebut.

2.13. Kewajiban imbalan kerja

Bank mengakui kewajiban imbalan kerja karyawan yang didanai sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (diubah Perpu No. 2 Tahun 2022).

Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan perusahaan untuk membayar imbalan kerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, bilamana ketentuan dalam Undang-Undang terpenuhi.

Dalam ketentuan tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU Cipta Kerja adalah program imbalan pasti.

Berkaitan dengan penerapan SAK ETAP Bab 23 tentang Imbalan Kerja yang diterapkan oleh Bank, dimana beban imbalan kerja yang harus disediakan hendaknya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dihitung oleh Bank dengan memakai asumsi masa kerja, sisa masa kerja, pertumbuhan gaji dan tingkat suku bunga. Kewajiban imbalan pasti diukur pada nilai terdiskonto.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2.13. Kewajiban imbalan kerja (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah mengakui dan mencatat besaran nilai beban serta kewajiban imbalan kerja sesuai perhitungan Bank.

2.14. Penggunaan Laba Bersih

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 7 Tahun 2019 Bab IX Pasal 114 ayat (3) oleh Pemerintah Kota Madiun, Pasal 95 tentang "Perencanaan dan Laporan" diatur penggunaan laba sebagai berikut:

a) Bagian laba untuk Daerah	55%
b) Cadangan	20%
c) Tanggung jawab sosial dan lingkungan/ <i>corporate social responsibility</i>	3%
d) <i>Tantiem</i>	4%
e) Jasa produksi	8%
f) Dana kesejahteraan	10%

2.15. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana Bank pada aset produktif. Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual, amortisasi provisi dan pendapatan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, diskonto, dikurangi amortisasi biaya-biaya yang terkait langsung dengan penanaman dana Bank pada aset produktif yang ditanggung oleh Bank (biaya transaksi).

Amortisasi provisi dan pendapatan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu serta amortisasi biaya-biaya transaksi dilakukan dengan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu penanaman dana Bank dalam aset produktif.

Amortisasi provisi dan pendapatan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu serta amortisasi biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan kualitas penanaman dana, apakah termasuk kategori *performing* atau *non performing*.

Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman. Beban bunga meliputi beban bunga kontraktual dan amortisasi biaya transaksi yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana. Amortisasi biaya transaksi dilakukan dengan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu penghimpunan dana.

Pendapatan dan beban bunga kontraktual diakui berdasarkan metode akrual. Pendapatan bunga kontraktual atas aset produktif dihentikan pada saat aset produktif tersebut diklasifikasikan sebagai *non performing* (kurang lancar, diragukan dan macet). Pendapatan bunga kontraktual dari aset produktif yang diklasifikasikan sebagai *non performing* dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat pendapatan tersebut diterima (*cash basis*).

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

2.15. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Seluruh penerimaan kas yang berhubungan dengan kredit *non-performing* (kurang lancar, diragukan dan macet) digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan pokok dan jika masih terdapat kelebihan setoran yang diterima diakui sebagai pelunasan tunggakan bunga sebagai pendapatan bunga kontraktual dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Pendapatan bunga kontraktual dari kredit kategori *performing* yang telah diakui Bank sebagai pendapatan namun belum diterima secara kas dibukukan pada akun pendapatan bunga yang akan diterima.

Beban bunga kontraktual dari penghimpunan dana Bank yang telah diakui sebagai beban namun belum dibayarkan kepada nasabah maupun kreditur dibukukan pada akun utang bunga.

Pendapatan dan biaya lainnya dicatat secara akrual yaitu saat timbulnya pendapatan dan beban yang bersangkutan.

2.16. Pajak penghasilan badan

Bank mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Bank harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Bank tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

2.17. Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, Bank tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

3. KAS

Akun ini merupakan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp419.418.400 dan Rp420.695.000.

4. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kredit yang diberikan	665.225.573	725.255.269
Penempatan pada bank lain	48.265.988	34.776.578
Jumlah	<u><u>713.491.561</u></u>	<u><u>760.031.847</u></u>

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Giro		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	3.369.868.906	1.057.938.066
PT Bank Permata Tbk	2.501.535.600	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.401.954.281	2.378.482.089
PT Bank CIMB Niaga Tbk	637.311.737	636.103.612
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	471.452.823	471.405.681
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	271.909.968	894.863.781
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	137.984.623	101.564.459
PT Bank KB Bukopin Tbk	-	2.077.022.937
Sub jumlah	<u>9.792.017.938</u>	<u>7.617.380.625</u>
Tabungan		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	3.782.130.786	3.869.519.262
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.336.843.274	3.385.615.291
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.779.511.116	6.565.200.326
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.462.704.925	5.485.857.424
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.226.071.934	3.582.935.379
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.067.335.527	1.052.324.758
Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun	728.517.753	655.340.248
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Karya Mugi Sentosa	96.927.778	53.057.103
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	67.781.188	67.443.198
Sub jumlah	<u>14.547.824.281</u>	<u>24.717.292.989</u>
Deposito berjangka		
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Bank Perkreditan Rakyat Polatama Kusuma	2.000.000.000	2.000.000.000
Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Arta Kencana	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ngawi	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000
Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun	2.000.000.000	1.000.000.000
Sub jumlah pihak ketiga (dipindahkan)	<u>12.000.000.000</u>	<u>11.000.000.000</u>

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (Lanjutan)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Deposito berjangka (lanjutan)		
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>		
Sub jumlah deposito berjangka (pindahan)	12.000.000.000	11.000.000.000
PT Bank Perkreditan Rakyat Ekadharmas		
Bhina Raharja	1.500.000.000	-
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan	1.000.000.000	1.000.000.000
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Karya		
Mugi Sentosa	750.000.000	500.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	30.000.000	30.000.000
PT Bank Perkreditan Rakyat Arthaya		
Indotama Pusaka	-	250.000.000
Sub jumlah	<u>15.280.000.000</u>	<u>12.780.000.000</u>
Jumlah	39.619.842.219	45.114.673.614
Penyisihan kerugian	<u>(52.700.533)</u>	<u>(87.144.995)</u>
Jumlah - bersih	<u>39.567.141.686</u>	<u>45.027.528.619</u>
Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Giro	1,59%	1,64%
Tabungan	1,58%	1,85%
Deposito berjangka	6,09%	6,00%

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 penempatan pada bank lain dalam bentuk deposito berjangka pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar Rp 30.000.000 merupakan *sinking fund* atas keanggotaan APEX.

Perubahan penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal tahun	87.144.995	54.318.216
Pembentukan (pemulihan) selama tahun berjalan		
(Catatan 20 dan 21)	(35.737.551)	32.826.779
Reklasifikasi PPAP (Catatan 6)	1.293.089	-
Saldo akhir tahun	<u>52.700.533</u>	<u>87.144.995</u>

Kolektibilitas penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tergolong lancar.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada bank lain serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Kredit yang diberikan menurut jenis penggunaan:

	2023					Jumlah
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
<u>Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:</u>						
Kontraktual						
Modal kerja	75.832.194	-	-	-	-	75.832.194
Provisi yang belum diamortisasi	(495.822)	-	-	-	-	(495.822)
Biaya Administrasi yang belum diamortisasi	(495.822)	-	-	-	-	(495.822)
Sub jumlah	74.840.550	-	-	-	-	74.840.550
<u>Pihak ketiga:</u>						
Kontraktual						
Modal kerja	11.795.942.763	1.246.538.970	90.701.500	457.209.400	5.911.660.250	19.502.052.883
Investasi	2.522.313.500	240.328.000	38.074.400	4.582.600	426.627.900	3.231.926.400
KPR dengan hak tanggungan	637.432.700	331.460.790	-	-	-	968.893.490
KPR kepemilikan kendaraan bermotor	-	-	-	-	28.364.000	28.364.000
Konsumsi	31.401.314.082	2.026.073.200	288.669.400	1.501.311.100	7.464.757.250	42.682.125.032
	46.357.003.045	3.844.400.960	417.445.300	1.963.103.100	13.831.409.400	66.413.361.805
Provisi yang belum diamortisasi	(395.456.340)	(32.066.464)	(3.185.790)	(16.904.419)	(59.294.780)	(506.907.793)
Biaya Administrasi yang belum diamortisasi	(395.456.340)	(32.066.464)	(3.185.790)	(16.904.419)	(59.294.780)	(506.907.793)
Sub jumlah	45.566.090.365	3.780.268.032	411.073.720	1.929.294.262	13.712.819.840	65.399.546.219
Jumlah	45.640.930.915	3.780.268.032	411.073.720	1.929.294.262	13.712.819.840	65.474.386.769
Penyisihan kerugian	(231.459.424)	(70.308.282)	(34.094.578)	(911.855.468)	(10.608.776.867)	(11.856.494.619)
Jumlah - bersih	45.409.471.491	3.709.959.750	376.979.142	1.017.438.794	3.104.042.973	53.617.892.150

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

a. Kredit yang diberikan menurut jenis penggunaan: (lanjutan)

	2022					Jumlah
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
<u>Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:</u>						
Kontraktual						
Modal kerja	93.199.200	-	-	-	-	93.199.200
Lainnya	139.200.400	-	-	-	-	139.200.400
	232.399.600	-	-	-	-	232.399.600
Provisi yang belum diamortisasi	(1.992.965)	-	-	-	-	(1.992.965)
Administrasi yang belum diamortisasi	(1.992.965)	-	-	-	-	(1.992.965)
Sub jumlah	228.413.670	-	-	-	-	228.413.670
<u>Pihak ketiga:</u>						
Kontraktual						
Modal kerja	12.943.194.600	2.604.497.600	137.942.200	381.705.700	3.128.745.350	19.196.085.450
Investasi	905.695.600	543.042.100	-	-	401.185.900	1.849.923.600
Kredit Kepemilikan Rumah	1.126.230.500	206.657.100	-	-	-	1.332.887.600
Kredit Kepemilikan Kendaraan bermotor	8.622.300	46.629.000	-	-	-	55.251.300
Konsumsi	30.112.649.248	6.845.350.200	440.469.300	44.746.000	1.878.149.750	39.321.364.498
	45.096.392.248	10.246.176.000	578.411.500	426.451.700	5.408.081.000	61.755.512.448
Provisi yang belum diamortisasi	(391.648.658)	(86.212.541)	(5.390.018)	(273.817)	(5.153.576)	(488.678.610)
Administrasi yang belum diamortisasi	(391.648.658)	(86.212.541)	(5.390.018)	(273.817)	(5.153.576)	(488.678.610)
Sub jumlah	44.313.094.932	10.073.750.918	567.631.464	425.904.066	5.397.773.848	60.778.155.228
Jumlah	44.541.508.602	10.073.750.918	567.631.464	425.904.066	5.397.773.848	61.006.568.898
Penyisihan kerugian	(9.522.102)	(239.062.221)	(27.885.080)	(31.352.850)	(3.686.858.300)	(3.994.680.553)
Jumlah - bersih	44.531.986.500	9.834.688.697	539.746.384	394.551.216	1.710.915.548	57.011.888.345

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. **KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**

b. Kredit yang diberikan menurut sektor ekonomi:

	2023					Jumlah
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
<u>Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:</u>						
Kontraktual						26.874.694
Jasa	26.874.694	-	-	-	-	26.874.694
Lainnya	48.957.500	-	-	-	-	48.957.500
	75.832.194	-	-	-	-	75.832.194
Provisi yang belum diamortisasi	(495.822)	-	-	-	-	(495.822)
Biaya Administrasi yang belum diamortisasi	(495.822)	-	-	-	-	(495.822)
Sub jumlah	74.840.550	-	-	-	-	74.840.550
<u>Pihak ketiga:</u>						
Kontraktual						23.332.896
Pertanian	23.332.896	-	-	-	-	23.332.896
Industri	112.500.000	-	-	-	-	112.500.000
Jasa	1.387.927.892	315.499.770	-	336.596.200	4.629.108.500	6.669.132.362
Perdagangan	34.193.500	-	-	-	-	34.193.500
Konstruksi	-	300.000.000	-	-	-	300.000.000
Lainnya	44.799.048.757	3.228.901.190	417.445.300	1.626.506.900	9.202.300.900	59.274.203.047
	46.357.003.045	3.844.400.960	417.445.300	1.963.103.100	13.831.409.400	66.413.361.805
Provisi yang belum diamortisasi	(395.456.340)	(32.066.464)	(3.185.790)	(16.904.419)	(59.294.780)	(506.907.793)
Biaya Administrasi yang belum diamortisasi	(395.456.340)	(32.066.464)	(3.185.790)	(16.904.419)	(59.294.780)	(506.907.793)
Sub jumlah	45.566.090.365	3.780.268.032	411.073.720	1.929.294.262	13.712.819.840	65.399.546.219
Jumlah	45.640.930.915	3.780.268.032	411.073.720	1.929.294.262	13.712.819.840	65.474.386.769
Penyisihan kerugian	(231.459.424)	(70.308.282)	(34.094.578)	(911.855.468)	(10.608.776.867)	(11.856.494.619)
Jumlah - bersih	45.409.471.491	3.709.959.750	376.979.142	1.017.438.794	3.104.042.973	53.617.892.150

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. **KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**

b. Kredit yang diberikan menurut sektor ekonomi: (lanjutan)

	2022					Jumlah
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
<u>Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:</u>						
Kontraktual						
Jasa	31.741.300	-	-	-	-	31.741.300
Lainnya	200.658.300	-	-	-	-	200.658.300
	232.399.600	-	-	-	-	232.399.600
Provisi yang belum diamortisasi	(1.992.965)	-	-	-	-	(1.992.965)
Administrasi yang belum diamortisasi	(1.992.965)	-	-	-	-	(1.992.965)
Sub jumlah	228.413.670	-	-	-	-	228.413.670
<u>Pihak ketiga:</u>						
Kontraktual						
Pertanian	38.330.000	-	-	-	-	38.330.000
Industri	142.500.000	-	-	-	-	142.500.000
Jasa	4.802.274.700	1.459.776.300	13.685.000	374.500.000	2.138.143.700	8.788.379.700
Kontruksi	599.000.000	599.000.000	-	-	-	1.198.000.000
Lainnya	39.514.287.548	8.187.399.700	564.726.500	51.951.700	3.269.937.300	51.588.302.748
	45.096.392.248	10.246.176.000	578.411.500	426.451.700	5.408.081.000	61.755.512.448
Provisi yang belum diamortisasi	(391.648.658)	(86.212.541)	(5.390.018)	(273.817)	(5.153.576)	(488.678.610)
Administrasi yang belum diamortisasi	(391.648.658)	(86.212.541)	(5.390.018)	(273.817)	(5.153.576)	(488.678.610)
Sub jumlah	44.313.094.932	10.073.750.918	567.631.464	425.904.066	5.397.773.848	60.778.155.228
Jumlah	44.541.508.602	10.073.750.918	567.631.464	425.904.066	5.397.773.848	61.006.568.898
Penyisihan kerugian	(9.522.102)	(239.062.221)	(27.885.080)	(31.352.850)	(3.686.858.300)	(3.994.680.553)
Jumlah - bersih	44.531.986.500	9.834.688.697	539.746.384	394.551.216	1.710.915.548	57.011.888.345

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2023
 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

c. Kredit yang diberikan menurut jangka waktu:

Jangka waktu kredit diklasifikasikan berdasarkan periode kredit sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kurang dari atau sama dengan 6 bulan	351.616.000	1.365.547.000
Lebih dari 6 sampai 12 bulan	2.637.562.698	810.224.500
Lebih dari 12 sampai 24 bulan	2.679.619.443	2.492.454.150
Lebih dari 24 bulan	60.820.395.858	57.319.686.398
Sub jumlah	66.489.193.999	61.987.912.048
Provisi yang belum diamortisasi	(507.403.615)	(490.671.575)
Biaya administrasi yang belum diamortisasi	(507.403.615)	(490.671.575)
Jumlah	65.474.386.769	61.006.568.898
Penyisihan kerugian	(11.856.494.619)	(3.994.680.553)
Jumlah - bersih	<u>53.617.892.150</u>	<u>57.011.888.345</u>

d. Kredit yang diberikan menurut sisa umur jatuh tempo:

Sisa umur jatuh tempo kredit diklasifikasikan berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh tempo kredit.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kurang dari atau sama dengan 6 bulan	5.412.944.796	5.525.824.500
Lebih dari 6 sampai 12 bulan	3.923.649.695	1.779.716.600
Lebih dari 12 sampai 24 bulan	4.506.420.184	6.569.607.200
Lebih dari 24 bulan	52.646.179.324	48.112.763.748
Sub jumlah	66.489.193.999	61.987.912.048
Provisi yang belum diamortisasi	(507.403.615)	(490.671.575)
Biaya administrasi yang belum diamortisasi	(507.403.615)	(490.671.575)
Jumlah	65.474.386.769	61.006.568.898
Penyisihan kerugian	(11.856.494.619)	(3.994.680.553)
Jumlah - bersih	<u>53.617.892.150</u>	<u>57.011.888.345</u>

e. Tingkat suku bunga kredit yang diberikan rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kredit yang diberikan	13,14%	13,58%

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

- f. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tanggal 31 Desember 2023 untuk pihak ketiga sebesar Rp6.110.229.616 dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp3.055.114.808 sedangkan BMPK pada tanggal 31 Desember 2022 untuk pihak ketiga sebesar Rp7.679.911.761 dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp3.839.955.881.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- g. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah kredit *non performing* adalah sebesar Rp16.211.957.800 dan Rp6.412.944.200 atau sebesar 24,38% dan 10,35% dari kredit yang diberikan.

- h. Perubahan penyisihan kerugian kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo awal tahun	3.994.680.553	3.841.830.362
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 21)	7.863.107.155	358.835.197
Reklasifikasi PPAP (Catatan 5)	(1.293.089)	-
Kelebihan pembentukan PPAP (Catatan 20)	-	(205.985.006)
Saldo akhir tahun	11.856.494.619	3.994.680.553

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk pada tahun 2023 dan 2022 adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang diberikan serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

- i. Ikhtisar kredit yang dihapusbukukan:

	2023	2022
Saldo awal tahun	511.081.545	511.081.545
Hapus buku tahu berjalan	-	-
Saldo akhir tahun	511.081.545	511.081.545

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2023
 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

j. Tindak lanjut penyelesaian penyalahgunaan kredit dan deposito yang dilakukan pegawai Bank

Pada tahun 2023 Bank menemukan adanya penyalahgunaan kredit dan deposito yang dilakukan oleh pegawai dengan potensi kerugian sebesar Rp5.654.843.400 dan Rp40.000.000. Tindak lanjut penyelesaian penyalahgunaan kredit yang telah dilakukan oleh Bank terinci sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan dan pemeriksaan pada portofolio kredit yang sebelumnya dikelola oleh yang bersangkutan
- b. Melaporkan kasus tersebut kepada Walikota Madiun dengan Surat No. 580/35/301.502/2023 tanggal 17 Januari 2023 dan meminta bantuan inspektorat untuk melakukan audit investigatif. Laporan inspektorat telah di terima dengan surat No. 700/570/401.050/2023 tanggal 31 Maret 2023.
- c. Memutasi yang bersangkutan sehingga tidak lagi berhubungan dengan nasabah
- d. Melakukan pengkiniaan kewenangan akses Core Banking Sistem sesuai dengan job description dan kewenangan pegawai.
- e. Melakukan penyesuaian data rekening kredit yang sebelumnya telah diubah sesuai dengan dokumen debitur dan perjanjian kredit
- f. Pemulihan kerugian 53 nasabah dengan nominal sebesar Rp102.051.800
- g. Melakukan pendekatan ke keluarga yang bersangkutan untuk penyelesaian tersebut.
- h. Inspektorat berkoordinasi dengan Pemkot Madiun telah menyampaikan laporan ke kepolisian. Saat ini masih dalam proses penyidikan untuk melengkapi barang bukti dan pemanggilan saksi.

Sampai dengan posisi pemeriksaan nominal kerugian tersebut belum dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan Bank posisi 31 Desember 2023.

Bank akan melakukan koreksi pada Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2024 dengan melakukan reklasifikasi kerugian tersebut sesuai POJK tentang KAP PPAP atas aset non produktif tagihan BPR yang timbul akibat pihak lawan tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dan BPR akan membentuk cadangan sebesar 100% (seratus persen) atas akun tagihan BPR tersebut.

7. ASET TETAP

HARGA PEROLEHAN	SALDO 31-Des-2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Des-2023
Tanah	3.693.000.000	-	-	3.693.000.000
Bangunan	1.093.799.110	-	-	1.093.799.110
Kendaraan	1.120.474.000	-	-	1.120.474.000
Inventaris kantor	1.474.177.172	112.705.799	309.686.600	1.277.196.371
Jumlah	7.381.450.282	112.705.799	309.686.600	7.184.469.481

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2023
 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. ASET TETAP (Lanjutan)

AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO 31-Des-2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Des-2023
Bangunan	519.050.087	51.506.088	-	570.556.175
Kendaraan	875.907.297	105.118.745	-	981.026.042
Inventaris kantor	1.392.960.305	61.754.293	309.686.600	1.145.027.998
Jumlah	2.787.917.689	218.379.126	309.686.600	2.696.610.215
Nilai Buku	4.593.532.593			4.487.859.266

HARGA PEROLEHAN	SALDO 31-Des-2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Des-2022
Tanah	3.693.000.000	-	-	3.693.000.000
Bangunan	1.058.199.110	35.600.000	-	1.093.799.110
Kendaraan	994.974.000	125.500.000	-	1.120.474.000
Inventaris kantor	1.434.107.572	40.069.600	-	1.474.177.172
Jumlah	7.180.280.682	201.169.600	-	7.381.450.282

AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO 31-Des-2021	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Des-2022
Bangunan	469.027.329	50.022.758	-	519.050.087
Kendaraan	816.882.298	59.024.999	-	875.907.297
Inventaris kantor	1.345.425.008	47.535.297	-	1.392.960.305
Jumlah	2.631.334.635	156.583.054	-	2.787.917.689
Nilai Buku	4.548.946.047			4.593.532.593

Jumlah beban penyusutan aset tetap adalah sebesar Rp218.379.126 dan Rp156.583.054 masing-masing untuk tahun 2023 dan 2022 (Catatan 21).

Pada tahun 2023 terdapat penghapusan aset inventaris dengan nilai perolehan dan nilai buku masing-masing sebesar Rp309.686.600 dan RpNihil.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau kejadian yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

8. ASET TIDAK BERWUJUD

Rincian aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Harga perolehan	177.590.000	177.590.000
Akumulasi amortisasi	(170.157.679)	(161.751.433)
Nilai buku bersih	<u>7.432.321</u>	<u>15.838.567</u>

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. ASET TIDAK BERWUJUD (Lanjutan)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal	15.838.567	30.952.943
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 21)	(8.406.246)	(15.114.376)
Saldo akhir	<u>7.432.321</u>	<u>15.838.567</u>

9. ASET LAIN - LAIN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Sewa kantor	227.413.800	287.990.900
Dana talangan	75.604.565	-
Lainnya	67.740.104	45.793.776
Jumlah	<u>370.758.469</u>	<u>333.784.676</u>

1/ Berdasarkan Perjanjian Sewa No.1 tanggal 2 Mei 2014, Bank menyewa bangunan yang terletak di Jalan Ciliwung No. 85, Kecamatan Taman, Madiun yang digunakan sebagai Kantor Kas Taman dengan nominal sebesar Rp80.000.000 selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 7 September 2015 sampai dengan 7 September 2025.

2/ Berdasarkan Perjanjian Sewa No. 84 tanggal 23 April 2019, Bank menyewa bangunan yang terletak di Jalan Ponorogo No. 33, Kecamatan Taman, Madiun yang digunakan sebagai Kantor Kas Soekarno Hatta dengan nominal sebesar Rp25.000.000 selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 23 April 2019 sampai dengan 23 April 2024.

3/ Berdasarkan Perjanjian Sewa tanggal 26 Mei 2019, Bank menyewa bangunan yang terletak di Jalan Pilang Dija, Pilang Bango, Kartoharjo, Madiun yang digunakan sebagai Kantor Kas Bok Malang dengan nominal sebesar Rp25.400.000 selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan 26 Mei 2024.

4/ Berdasarkan Perjanjian Sewa No. 72 tanggal 23 Agustus 2019, Bank menyewa bangunan yang terletak di Jalan Puspowarno, Kecamatan Manguharjo, Madiun yang digunakan sebagai Kantor Kas Manguharjo dengan nominal sebesar Rp32.500.000 selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan 23 Agustus 2024.

Akun dana talangan tahun 2023 sebesar Rp75.604.565 merupakan dana talangan atas penyalahgunaan yang dilakukan mantan pegawai Bank atas nama Sulastri Arum.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2023
 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. KEWAJIBAN SEGERA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pajak penghasilan :		
Pasal 4 ayat 2	49.722.325	52.052.821
Pasal 21	-	2.916.212
	<u>49.722.325</u>	<u>54.969.033</u>
Titipan nasabah	597.417.721	694.140.742
Titipan asuransi	310.079.482	146.915.813
Cadangan jasa profesional	27.250.000	29.585.000
Lainnya	89.860.980	33.696.000
Jumlah	<u>1.074.330.508</u>	<u>959.306.588</u>

Akun kewajiban segera lainnya pada tahun 2023 dan 2022 merupakan saldo cadangan biaya telepon, air, listrik, perbarindo, audit dan OJK.

11. UTANG BUNGA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Utang bunga deposito yang belum jatuh tempo	114.770.808	119.621.547
Utang bunga deposito yang sudah jatuh tempo	-	36.877.647
Jumlah	<u>114.770.808</u>	<u>156.499.194</u>

12. PERPAJAKAN

a. Akun ini merupakan utang pajak penghasilan badan pasal 29 dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 69.133.480 dan Rp13.720.830.

b. Beban pajak

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pajak kini	69.133.480	342.725.506

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2023
 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Beban pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Laba (rugi) sebelum taksiran pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi	(7.650.458.615)	1.397.097.138
<u>Koreksi fiskal</u>		
Penyisihan kerugian aset produktif (Catatan 20 dan 21)	7.827.369.604	185.676.970
Imbalan pasca kerja (Catatan 14)	116.107.070	-
Seragam	88.154.000	133.196.990
Biaya promosi	60.536.500	74.662.600
Sanksi	5.299.770	-
Kegiatan keagamaan	3.550.000	3.800.000
Pemeliharaan dan BBM	-	221.675.998
Penyusutan	-	29.512.500
Konsumsi	-	29.362.000
Kenaikan kredit yang diberikan	-	3.659.179
Penginapan	-	520.000
Pulsa	-	5.100.000
Pendapatan bunga penempatan pada bank lain	(84.917.235)	(53.493.439)
Lainnya	78.801.950	10.872.450
Penghasilan kena pajak	<u>444.443.044</u>	<u>2.041.642.386</u>
Dibulatkan	<u>444.443.000</u>	<u>2.041.642.000</u>
Taksiran pajak penghasilan:		
11% x Rp260.399.819	28.643.980	-
22% x Rp184.043.181	40.489.500	-
11% x Rp967.597.582	-	106.435.734
22% x Rp1.074.044.418	-	236.289.772
Jumlah pajak kini	<u>69.133.480</u>	<u>342.725.506</u>
<u>Kredit pajak</u>		
Pajak penghasilan pasal 25	-	329.004.676
Pajak penghasilan pasal 29	<u>69.133.480</u>	<u>13.720.830</u>

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. SIMPANAN NASABAH

a. Berdasarkan jenis simpanan nasabah terdiri dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Tabungan</u>		
Kontraktual		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	20.197.077	202.764.276
Pihak ketiga	17.929.426.538	16.063.276.135
Jumlah tabungan	<u>17.949.623.615</u>	<u>16.266.040.411</u>
<u>Deposito berjangka</u>		
Kontraktual		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	10.000.000	300.000.000
Pihak ketiga	49.563.400.000	51.615.000.000
Jumlah deposito berjangka	<u>49.573.400.000</u>	<u>51.915.000.000</u>
Jumlah simpanan	<u>67.523.023.615</u>	<u>68.181.040.411</u>

b. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat simpanan yang diblokir atau dijadikan jaminan kredit yang diberikan.

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Tabungan	2,19%	1,42%
Deposito berjangka	5,32%	3,56%

d. Klasifikasi deposito berdasarkan jangka waktu:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1 bulan	536.400.000	1.106.000.000
3 bulan	1.573.000.000	1.671.500.000
6 bulan	5.873.500.000	6.786.500.000
12 bulan	41.590.500.000	42.351.000.000
Jumlah	<u>49.573.400.000</u>	<u>51.915.000.000</u>

e. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat simpanan yang memperoleh suku bunga melebihi suku bunga yang ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Imbalan pasca kerja

Bank memberikan program pesangon bagi Direksi dan karyawan yang jumlahnya didasarkan pada perhitungan Bank. Pesangon tersebut dicadangkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi dan karyawan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Bank.

Perubahan kewajiban imbalan pasca kerja yang diakui dineraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo awal tahun	-	-
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 23)	135.967.070	-
Pembayaran selama tahun berjalan	(19.860.000)	-
Kewajiban yang diakui dineraca	116.107.070	-

Untuk mengetahui kewajiban diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 yang seharusnya dicadangkan Bank, telah dilakukan perhitungan mandiri oleh pihak manajemen Bank secara periodik dengan menerapkan asumsi masa kerja, sisa masa kerja, pertumbuhan gaji dan tingkat suku bunga diskonto.

Perubahan kewajiban diestimasi atas imbalan kerja yang seharusnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	2023
Saldo awal tahun	-
Penambahan yang seharusnya dicadangkan	1.709.620.792
Imbalan yang dibayarkan	(19.860.000)
Kewajiban yang seharusnya diakui di neraca	1.689.760.792

Disamping Bank membentuk imbalan pasca kerja imbalan pasti, Bank ikut serta dalam :

- program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh PT BNI Life Insurance untuk karyawan tetapnya pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 37 orang dan 36 orang yang ditanggung oleh Bank. Jumlah iuran dibebankan pada laba rugi periode berjalan, sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo nilai tunai yang tercatat masing-masing sebesar Rp837.262.754 dan Rp704.231.075.
- program Dana Kelolaan IFG Pendanaan Hari Tua pada PT Asuransi Jiwa IFG sesuai No Polis PK/PHT-0000035358/NA untuk karyawan tetapnya pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 26 dan 28 orang yang ditanggung oleh Bank. Jumlah iuran dibebankan pada laba rugi periode berjalan, sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo nilai tunai yang tercatat masing-masing sebesar Rp1.047.547.755 dan Rp1.402.221.603.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

	2023	2022
<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	19.640.248	20.993.099
Titipan pendidikan	-	1.662.000
	19.640.248	22.655.099

16. MODAL SAHAM

Modal saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Modal dasar	25.000.000.000	25.000.000.000
Modal belum ditempatkan	-	-
Modal ditempatkan dan disetor	25.000.000.000	25.000.000.000

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009, Pemerintah Kota Madiun menetapkan modal dasar sebesar Rp25.000.000.000 yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp21.307.000.000 dan penyertaan modal berupa aktiva tetap sebesar Rp3.693.000.000. Setoran modal tersebut telah dicatat dalam administrasi pengawasan kantor Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No.S-55/KO.362/2016 dan No.S-356/KO.042/2017 tanggal 14 Juli 2017.

17. PENGGUNAAN SALDO LABA

Berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Laba tanggal 21 Juni 2023 dan tanggal 4 April 2022, disetujui penggunaan laba tahun buku 2022 dan 2021 setelah pajak masing-masing sebesar Rp1.054.371.632 dan Rp1.691.659.137.

Alokasi penggunaan saldo laba tahun buku 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Pemerintah Daerah Kota Madiun	579.904.398	930.412.525
Cadangan umum	105.437.163	169.165.914
Cadangan tujuan	105.437.163	169.165.914
Dana kesejahteraan pegawai	105.437.163	169.165.914
Jasa produksi	84.349.731	135.332.731
<i>Tantiem</i>	42.174.865	67.666.365
CSR	31.631.149	50.749.774
Jumlah	1.054.371.632	1.691.659.137

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdapat pembagian jasa produksi dan tantiem yang didebet dari saldo laba, yang menurut SAK ETAP Bab 19 mengenai "Ekuitas" seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2023
 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PENDAPATAN BUNGA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kontraktual		
Kredit yang diberikan	6.461.781.516	8.303.261.886
Deposito	674.529.378	477.119.330
Tabungan	312.535.105	287.135.210
Giro	64.160.572	65.496.717
	<u>7.513.006.571</u>	<u>9.133.013.143</u>
Amortisasi provisi dan administrasi Kredit yang diberikan	529.765.518	620.333.064
Jumlah	<u>8.042.772.089</u>	<u>9.753.346.207</u>

19. BEBAN BUNGA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kontraktual		
Deposito berjangka	2.660.378.321	2.805.676.974
Tabungan	352.569.084	357.768.938
Premi penjaminan simpanan	132.734.102	133.203.849
	<u>3.145.681.507</u>	<u>3.296.649.761</u>
Jumlah	<u>3.145.681.507</u>	<u>3.296.649.761</u>

20. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Denda kredit yang diberikan	63.198.283	21.735.375
Pemulihan PPAP penempatan pada bank lain	35.737.551	-
Administrasi tabungan	15.964.464	14.750.312
Pemulihan PPAP kredit yang diberikan	-	205.985.006
Jumlah	<u>114.900.298</u>	<u>242.470.693</u>

21. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN/PENYUSUTAN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Penyisihan kredit yang diberikan (Catatan 6h)	7.863.107.155	358.835.197
Penyusutan aset tetap (Catatan 7)	218.379.126	156.583.054
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 8)	8.406.246	15.114.376
Penyisihan penempatan pada bank lain (Catatan 5)	-	32.826.779
Jumlah	<u>8.089.892.527</u>	<u>563.359.406</u>

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. BEBAN PEMASARAN

Akun ini merupakan biaya promosi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp60.536.500 dan Rp100.112.600.

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Biaya tenaga kerja *)	2.964.612.789	2.800.406.567
Barang dan jasa **)	787.216.703	779.311.323
Sewa	131.825.100	84.107.542
Pendidikan	168.367.777	281.759.509
Pemeliharaan dan perbaikan	133.055.157	132.416.662
Pajak-pajak	18.177.770	17.524.270
Jumlah	<u>4.203.255.296</u>	<u>4.095.525.873</u>

*) Beban tenaga kerja

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gaji pokok	2.367.291.069	2.498.396.451
Tunjangan Hari Raya (THR)	235.553.663	248.549.280
Imbalan kerja (Catatan 14)	135.967.070	-
Iuran DPLK dan BPJS	134.480.482	38.206.586
Honorarium	72.880.000	10.450.000
Kompensasi cuti tahunan	11.500.005	-
Lembur	6.940.500	4.804.250
Jumlah	<u>2.964.612.789</u>	<u>2.800.406.567</u>

***) Barang dan jasa

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Telepon, listrik dan air	127.645.464	129.614.628
Beban konsultan	92.613.810	-
Beban pakaian dinas	88.154.000	136.868.293
Beban operasional kendaraan	79.209.520	97.142.655
Alat Tulis Kantor	70.686.884	67.914.125
Biaya kantor	64.926.123	98.151.265
Biaya penagihan	62.384.158	90.151.300
Beban konsumsi	59.162.300	29.362.000
Beban jasa profesional	54.500.000	53.835.000
Jumlah (dipindahkan)	<u>699.282.259</u>	<u>703.039.266</u>

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

***) Barang dan jasa (lanjutan)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jumlah (pindahan)	699.282.259	703.039.266
Biaya panitia seleksi	52.667.250	62.397.500
Biaya perjalanan dinas	11.781.000	6.708.200
Biaya penginapan	11.166.909	520.000
Lain -lain	12.319.285	6.646.357
	<u>787.216.703</u>	<u>779.311.323</u>

24. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Penanganan kredit bermasalah	188.121.337	597.467.819
Iuran OJK	87.170.381	46.670.026
Jumlah	<u>275.291.718</u>	<u>644.137.845</u>

25. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan non operasional		
Lainnya	34.831.016	132.238.173
Sub jumlah	<u>34.831.016</u>	<u>132.238.173</u>
Beban non operasional		
Iuran Perhimpunan	31.200.000	16.200.000
Denda / sanksi	26.134.700	10.872.450
Kegiatan keagamaan	7.419.770	300.000
Lainnya	3.550.000	3.800.000
Sub jumlah	<u>68.304.470</u>	<u>31.172.450</u>
Jumlah pendapatan (beban) non operasional	<u>(33.473.454)</u>	<u>101.065.723</u>

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat hubungan istimewa

- Pengurus Bank (Catatan 1)
- Perorangan yang merupakan anggota keluarga dekat dari pengurus Bank
- Pemegang saham Bank

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (Lanjutan)

Transaksi hubungan istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut manajemen, transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga, kecuali pinjaman yang diberikan kepada karyawan dan Pengurus Bank.

Transaksi dan saldo dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta persentase terhadap masing-masing total transaksi dan saldo akun-akun yang terkait, terinci sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aset		
Kredit yang diberikan	74.840.550	228.413.670
Kewajiban		
Simpanan nasabah	30.197.077	502.764.276
Persentase terhadap jumlah aset		
Kredit yang diberikan	0,08%	0,21%
Persentase terhadap jumlah kewajiban		
Simpanan nasabah	0,04%	0,73%

27. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Kontinjensi

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Tagihan kontinjensi		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	4.063.624.221	2.800.181.238
Aktiva produktif yang dihapus buku	511.081.545	511.081.545

28. RASIO PERMODALAN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Modal Inti	30.266.988.124	38.302.891.709
Modal Pelengkap	284.159.957	96.667.097
Jumlah Modal Bank	30.551.148.081	38.399.558.806
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	57.601.147.327	64.439.288.651
Modal Minimum 12% X ATMR	6.912.137.679	7.732.714.638
Rasio KPM (CAR)	53,04%	59,59%

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023
 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. RASIO PERMODALAN (Lanjutan)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Modal Inti	30.266.988.124	38.302.891.709
Jumlah Aset Produktif bermasalah neto	4.657.230.887	2.666.847.970
Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto (MIAPB)	649,89%	1436,26%

29. RASIO RENTABILITAS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
I. Total laba (rugi) 12 bulan terakhir	(7.650.458.615)	1.397.097.138
II. Rata-rata Volume Usaha	102.149.567.350	107.123.800.182
Return on Asset (ROA)	-7,49%	1,30%
I. Pendapatan Operasional	8.157.672.387	9.995.816.900
II. Beban Operasional	15.774.657.548	8.699.785.485
BOPO	193,37%	87,03%
I. Total pendapatan bunga bersih 12 bulan terakhir	6.456.696.446	6.456.696.446
II. Rata-rata Aset Produktif	104.558.732.741	105.726.817.876
Net Interest Margin (NIM)	6,18%	6,11%

30. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-undang tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp100.000.000 diubah menjadi maksimum Rp2.000.000.000.

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Pada tanggal 30 Juni 2021, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang merupakan adopsi dari IFRS for SMEs dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. SAK EP akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan. SAK EP akan menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK-ETAP).

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul pada penerapan standar baru dan revisi tersebut, serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

XX. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

XX.I. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK
DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

XX.2. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA
MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)

ANEKA USAHA KOTA MADIUN

LAPORAN KEUANGAN

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00001/3.0437/AU.2/05/1237.3/1/I/2024

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
KOTA MADIUN**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
KOTA MADIUN**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



SURAT PERNYATAAN DIREKSI



SURAT PERNYATAAN DIREKSI

TENTANG

TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ir. SUTRISNO
Alamat : Jl. Jend Ahmad Yani No 11 Madiun
No telepon : 0821 3218 4590
Jabatan : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Aneka Usaha Kota Madiun
2. Laporan keuangan Perumda Aneka Usaha Kota Madiun telah disusun dan disajikan sesuai Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)
3. a. Semua Informasi dalam Laporan keuangan Perumda Aneka Usaha Kota Madiun telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Perumda Aneka Usaha Kota Madiun tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perumda Aneka Usaha Kota Madiun

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



**HADORI SUGIARTO
ADI & REKAN**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor LAI : 00001/3.0437/AU.2/05/1237-3/1/2024

**Kepada Yth
Kuasa Pemilik Modal, Badan Pengawas dan Direksi
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

www.hlbindonesia.id

Certified Public Accountants, License Number. 118/KM1/2021
Jl. Ngebong No. 1 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur
Telp. : 0351-4773336 E-mail : kaphadorimdn@gmail.com



Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



**HADORI SUGIARTO
ADI & REKAN**

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP HADORI SUGIARTO ADI & REKAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sugiharto', written over a faint circular stamp.

Sugiharto, SE., MSA., Ak., CA., CPA
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP 1237



22 Januari 2024

LAPORAN KEUANGAN

1. PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

A S E T	Catatan	2 0 2 3	2 0 2 2
		Rp	Rp
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2b,3	5.673.372.859	3.773.259.423
Piutang Usaha-Bersih	2c, 4	344.258.169	334.781.803
Persediaan Barang	2d,5	1.108.421.179	1.921.376.787
Uang Muka Pembelian	6	443.200.000	439.440.000
Pajak Dibayar Dimuka	7	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	8	12.045.000	18.375.833
Pendapatan Diterima Dimuka	9	-	4.545.000
Jumlah Aset Lancar		7.581.297.207	6.491.778.846
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap			
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp			
8.793.995.424 tahun 2023 dan Rp 8.433.369.753.			
tahun 2022			
	2e, 10	2.423.374.031	2.488.713.014
Jumlah Aset Tidak Lancar		2.423.374.031	2.488.713.014
		10.004.671.237	8.980.491.859
TOTAL ASET			
LIABILITAS DAN EKUITAS			
	Catatan	2 0 2 3	2 0 2 2
		Rp	Rp
Liabilitas Lancar			
Hutang Usaha	2f,11	228.794.070	312.861.264
Hutang Pajak	2i,12	277.985.170	486.015.505
Pendapatan Diterima Dimuka	13	69.886.450	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2f,14	48.559.427	41.597.957
Jumlah Liabilitas Lancar		625.225.117	840.474.726
Liabilitas Tidak Lancar			
Hutang Lain lain	2f,15	1.443.181.136	1.450.405.525
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		1.443.181.136	1.450.405.525
Ekuitas			
Modal Dasar	16	10.075.268.850	10.075.268.850
Rugi tahun-tahun sebelumnya		(3.385.657.241)	(5.526.904.489)
Laba tahun berjalan		1.246.653.376	2.141.247.247
Jumlah Ekuitas		7.936.264.984	6.689.611.609
		10.004.671.237	8.980.491.859
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS			

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

2. PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	Catatan	2023	2022
		Rp	Rp
Pendapatan Usaha	2g, 17		
CETAK		1.759.273.498	1.717.562.242
SPBU I		56.942.763.920	44.858.220.379
SPBU II		113.595.815.289	98.080.926.565
Bengkel		477.020.300	360.498.860
Cucian Kendaraan		638.947.500	410.188.410
Alfamart		5.626.180.027	5.214.416.348
Jumlah Pendapatan		179.040.000.534	150.641.812.804
Beban Pokok Usaha	2h, 18		
CETAK		4.212.500	69.523.500
SPBU I		55.255.319.224	43.099.887.338
SPBU II		110.089.084.866	94.206.627.968
Bengkel		161.853.300	111.376.322
Cucian Kendaraan		189.318.712	0
Alfamart		4.633.242.503	4.262.760.917
Jumlah Beban Pokok Usaha		170.333.031.105	141.750.176.046
Laba Kotor		8.706.969.429	8.891.636.758
Beban Usaha	2h, 19		
CETAK		1.612.063.294	1.510.481.406
SPBU I		1.030.703.153	788.109.134
SPBU II		1.841.805.223	1.623.858.668
Bengkel		193.664.475	152.552.906
Cucian Kendaraan		286.374.550	276.529.220
Alfamart		661.148.591	657.716.283
Umum dan Administrasi		1.799.661.213	1.537.519.531
Jumlah beban usaha		7.425.420.499	6.546.767.147
Laba Usaha		1.281.548.930	2.344.869.611
Pendapatan dan Beban Diluar Usaha	2h, 20		
Pendapatan Lain-lain		246.410.953	294.043.151
Beban Lain-lain		12.835.991	17.200.244
Jumlah Pendapatan dan Beban Diluar Usaha		233.574.962	276.842.907
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		1.515.123.892	2.621.712.518
Pajak Penghasilan	2i,21	268.470.516	480.465.271
Laba Bersih Setelah Pajak		1.246.653.376	2.141.247.247

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

3. PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Keterangan	Catatan	Modal Dasar	Saldo Laba			Jumlah
			Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Dicadangkan		
				Saldo Rugi Tahun Lalu	Saldo Laba Tahun Berjalan	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo akhir tahun 2021	16	10.075.268.850	-	(5.818.037.275)	1.455.663.934	5.712.895.509
Laba yang dibagikan tahun 2022 atas laba tahun 2021						
APBD	55%	0	0	0	(800.615.164)	(800.615.164)
Cadangan Umum	20%	0	0	0	(291.132.787)	(291.132.787)
Sosial dan Pendidikan	10%	0	0	0	(145.566.393)	(145.566.393)
Sumbangan dana pensiun dan sokongan	10%	0	0	0	(145.566.393)	(145.566.393)
Tantem untuk Direksi dan Dewan Pengawas	1%	0	0	0	(14.556.639)	(14.556.639)
Bonus Karyawan	4%	0	0	0	(58.226.557)	(58.226.557)
Cadangan Umum		0	0	291.132.787	0	291.132.787
Laba Rugi tahun 2022		0	0	0	2.141.247.247	2.141.247.247
Saldo akhir tahun 2022		10.075.268.850	-	(5.526.904.488)	2.141.247.247	6.689.611.609
Laba yang dibagikan tahun 2023 atas laba tahun 2022 (Tetapi tidak dibagikan)						
APBD	55%	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	20%	-	-	-	-	-
Sosial dan Pendidikan	10%	-	-	-	-	-
Sumbangan dana pensiun dan sokongan	10%	-	-	-	-	-
Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas	1%	-	-	-	-	-
Bonus Karyawan	4%	-	-	-	-	-
Laba yang dibagikan						
Cadangan Umum					1.246.653.376	1.246.653.376
Laba Rugi tahun 2023						
Saldo akhir tahun 2023		10.075.268.850	-	(5.526.904.488)	3.387.900.623	7.936.264.984

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merufakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

4. PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	2023	2022
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
Laba Setelah Pajak	1.246.653.376	2.141.247.247
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas :		
Beban Penyusutan Aset Tetap Operasional	360.625.671	384.552.309
Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	1.607.279.046	2.525.799.557
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	(9.476.366)	(211.534.595)
Penurunan (Kenaikan) Persediaan	812.955.608	(832.815.654)
Penurunan (Kenaikan) Uang Muka Pembelian	(3.760.000)	25.080.000
Penurunan (Kenaikan) Pajak Dibayar Dimuka	-	-
Penurunan (Kenaikan) Biaya Dibayar Dimuka	6.330.833	7.731.358
Penurunan (Kenaikan) Pendapatan Diterima dimuka	4.545.000	(4.545.000)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Usaha	(84.067.194)	84.569.280
Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak	(208.030.335)	456.776.313
Kenaikan (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	69.886.450	-
Kenaikan (Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	6.961.470	11.194.031
Kenaikan (Penurunan) Hutang lain lain	(7.224.389)	221.442.787
Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	2.195.400.124	2.283.698.077
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :		
Penurunan (Kenaikan) Nilai Perolehan Aset Tetap	(295.286.688)	(254.859.482)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(295.286.688)	(254.859.482)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :		
Kenaikan (Penurunan) Pembagian laba	-	(1.164.531.147)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	(1.164.531.147)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	1.900.113.436	864.307.448
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	3.773.259.423	2.908.951.976
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	5.673.372.858	3.773.259.423

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

1. UMUM

1.1. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun (yang selanjutnya disebut perusahaan) berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 11 Kota Madiun merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Madiun yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun No. 3 Tahun 2003 tanggal 28 Maret 2003 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun No.5 Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Peraturan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 10 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun. Pendirian Perumda Aneka Usaha dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemandirian umum berupa penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.

Surat surat perijinan yang telah diperoleh Perumda Aneka Usaha adalah sebagai berikut :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah, No.9120301910846 dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 5 September 2019.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS No. 9120301910846 tanggal 4 September 2019
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor :02.301.631.4-621.000 dari Kantor Pelayanan Pajak Madiun tanggal 19 Juni 2003.
4. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.PEM-208/WPJ.11/KP.1203/2003 dan Kantor Pelayanan Pajak Madiun tanggal 7 Agustus 2003. dan ada perubahan Pengukuhan Pengusaha kena Pajak No.S-988PKP/WPJ.24/KP.0603/2019 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun tanggal 10 Oktober 2019.
5. Izin Gangguan (HO) tempat usaha no 503/048/401.303/2013 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 31 Januari 2013.
6. Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dengan nomor 0900000011255, 0900000011387, dan 0900000011311
7. Surat Izin usaha industri dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS No. 9120301910846 tanggal 5 September 2019

1.2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 Perusahaan mempunyai kegiatan usaha dalam bidang :

- a. Percetakan
- b. Perbengkelan
- c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yaitu SPBU 1 di Jalan Basuki Ranmat Madiun SPBU 2 di Jalan Mayjend Sungkono Madiun.
 Dalam pendirian kedua unit SPBU tersebut, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun menggunakan nama KPRI Karya Madya Kencana Kota Madiun. Hal ini berdasarkan akta perjanjian pinjam nama nomor 01 oleh Notaris Muhammad Ali Fauzi, S.H pada tanggal 14 November 2005.
- d. Usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Modal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun disebutkan bahwa modal dasar Perumda Aneka Usaha seluruhnya ditetapkan sebesar Rp.20.000.000.000. (dua puluh milyar rupiah).

Modal yang disetor sebesar Rp.10.075.268.850 (sepuluh milyar tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2004 sebesar Rp.4.085.502.000 (empat milyar delapan puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah)
- b. Tahun 2007 sebesar Rp.4.489.766.850 (empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- c. Tahun 2019 sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Nilai modal Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ekuivalen dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan berupa tanah dan bangunan, peralatan mesin cetak, fasilitas alat perbengkelan dan fasilitas pelayanan SPBU.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

1.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.012/12/K/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan masa jabatan 5 tahun mulai 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2026 dan Surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.012/299/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Masa Jabatan empat tahun mulai 10 Desember 2021 sampai dengan 10 Desember 2025 sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas
Ketua : Drs. Gaguk Hariyono
- b. Direksi
Direktur Utama : Ir. Sutrisno

Pada akhir tahun 2023 dan 2022 Perumda Aneka Usaha kota Madiun Memiliki karyawan masing masing sebanyak 42 Orang dan 42 orang.

Jumlah karyawan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebanyak 42 orang dan 42 orang yang dikelompokkan menurut jabatannya adalah sebagai berikut :

	2023		2022	
- Direksi	1	orang	1	orang
- Kepala Bagian	3	orang	3	orang
- Staf Sekretariat	5	orang	3	orang
- Staf SPBU Basuki Rahmat	13	orang	12	orang
- Staf SPBU Mayjend Sungkono	23	orang	22	orang
- Staf Bengkel	1	orang	1	orang
Jumlah	46	orang	42	orang

1.5. Kebijakan Usaha

Kebijakan usaha tahun 2023 direncanakan dan dilaksanakan secara optimal dan strategis untuk mempercepat profesionalitas usaha diantaranya :

1. Menghidupkan kembali unit usaha cetak
2. Menambah jenis produk BBM yaitu pertamax turbo di SPBU Mayjend Sungkono
3. Mengoptimalkan unit usaha perbengkelan

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan telah menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 01 Januari 2011. Oleh karena itu laporan keuangan sejak tahun 2011 disajikan berdasarkan SAK ETAP.

Dasar Akuntansi yang digunakan dalam perhitungan hasil usaha dan penentuan posisi keuangan dilakukan dengan metode akrual. Dengan metode akrual diartikan bahwa pembukuan tidak hanya sekedar mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang, akan tetapi pencatatan terhadap setiap perubahan aset dan kewajiban, demikian pula pendapatan dan biaya, pada saat terjadinya atau diakuinya perubahan dimaksud.

Laporan Arus Kas disajikan dengan metode tidak langsung, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas mencakup Kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

c. Piutang Usaha

Piutang usaha dicatat berdasarkan nilai brotonya dan dapat ditagih seluruhnya sehingga perusahaan tidak melakukan penyisihan penurunan nilai piutang usaha atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha.

d. Pencatatan dan Penilaian Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan, sedangkan metode pencatatan pemakaian persediaan menggunakan metode *first in first out* (FIFO). Persediaan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu, persediaan SPBU dan persediaan bengkel dan alfamart.

Persediaan bahan SPBU berupa Solar, Pertamina, Peralite, Dexlite. Persediaan bengkel dan alfamart berupa Oli dan Persediaan toko

e. Aset Tetap Dan Penyusutan

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah tidak disusutkan) dan rugi penurunan nilai.

Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan yang jumlahnya relatif kecil dibebankan pada laba rugi tahun berjalan, sedangkan pengeluaran yang jumlahnya material dan menambah umur aset tetap dibukukan sebagai penambah nilai aset tetap yang bersangkutan (dikapitalisir). Aset tetap Perusahaan Umum Aneka Usaha disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut sebagai berikut :

Bangunan	20 tahun
Mesin dan peralatan	10 tahun
Peralatan Kantor	10 tahun

f. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai jatuh temponya. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang berdasarkan tenggang waktu penyelesaiannya.

g. Pendapatan

Pengakuan terhadap pendapatan menganut sistem Accrual Basis yaitu dicatat pada saat terjadinya transaksi (realisasinya) yaitu pada saat penyerahan produk kepada pembeli.

h. Beban-beban (Biaya)

Pengakuan biaya perusahaan pada dasarnya menganut sistem Accrual Basis. Biaya diakui sebagai beban biaya pada saat terjadinya transaksi walaupun belum dilaksanakan pembayarannya atau telah dibayar dimuka.

Untuk keperluan pisah batas periode akuntansi biaya-biaya yang telah terjadi sampai dengan tanggal neraca walaupun jumlahnya belum diketahui secara pasti dicatat dan dilaporkan dengan cara estimasi wajar.

i. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh Pajak Penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan sebagaimana di atur dalam SAK ETAP bab 24 tentang pajak penghasilan.

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha termasuk dalam kriteria wajib pajak dengan peredaran tertentu (Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 dan diperbaharui Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018) sehingga atas pendapatan dari unit percetakan bengkel, cuci mobil dan alfamart merupakan obyek pajak final. Tapi mulai tahun 2022 penghitungan pajak atas penghasilan bengkel, cetak, cucian, alfamart menggunakan perhitungan sesuai PP No. 7 tahun 2021. Sedangkan penjualan unit SPBU juga termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

j. Kebijakan Pembagian Laba

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 10 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Menetapkan Penggunaan laba serta pemberian jasa produksi dengan rincian sebagai berikut :

- Bagian laba untuk pemerintah daerah kota Madiun	55 %
- Cadangan Umum	20 %
- Sosial dan Pendidikan	10 %
- Sumbangan dana pensiun dan sokongan	10 %
- Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas	1 %
- Bonus Karyawan	4 %

k. Pensiun dan imbalan pasca kerja.

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP bab 23 "Imbalan Kerja". Perusahaan juga mengikuti program iuran pasti dengan mengikutsertakan karyawannya dalam program JHT/THT yang diselenggarakan oleh BPJS, dimana premi setiap bulannya sebesar 3,7 % dibayar oleh pemberi kerja dan 2 % dibayar oleh karyawan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13/2003 perusahaan wajib membayar imbalan berdasarkan pasca kerja pada saat karyawan berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia, dan cacat tetap. Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan karyawan dalam program pensiun JHT/THT yang preminya dibayar oleh pengusaha dan karyawan maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun JHT/THT yang dibayar oleh pengusaha (UU No.13/2003 pasal 167)

l. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar akuntansi di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang akan dilaporkan dimasa mendatang dapat berbeda dari estimasi tersebut.

3. KAS DAN SETARA KAS

Saldo kas dan setara kas terdiri dari :

	2023	2022
	Rp	Rp
Kas	622.281	1.799.748
- Percetakan	521.514.239	352.270.806
- SPBU I	927.804.085	335.021.477
- SPBU II	31.180.175	10.666.337
- Bengkel	22.223.169	4.281.619
- Cucian	44.570.636	54.047.872
- Alfamart	<u>1.547.914.585</u>	<u>758.087.859</u>
Jumlah Kas		
Bank	3.444.255.172	2.822.367.324
- Bank Jatim No Rek 0051024052	446.002.467	3.786.967
- Bank Mandiri II No Rek 1440004669096	41.636.089	-
- Bank BTN Rek 00029-01-30-000364-1	193.564.546	189.017.273
- Bank Pasar/BPR Bank Daerah No Rek 01410173701	<u>4.125.458.274</u>	<u>3.015.171.564</u>
Jumlah Bank		
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u><u>5.673.372.859</u></u>	<u><u>3.773.259.423</u></u>

4. PIUTANG USAHA

Saldo piutang usaha terdiri dari :

	2023	2022
	Rp	Rp
SPBU I	7.100.000	3.800.000
- Honda Bintang	3.246.268	13.362.284
- Dinas Perdagangan		

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

- Refindo	5.635.436	12.970.604
- My Pertamina Link Aja	3.696.070	-
- Satpol PP	31.285.510	20.371.100
- DLH Kota	-	30.000
- Centratama	-	3.474.700
- Disnaker KUKM	448.500	5.798.000
- Kec. Manguharjo	6.111.500	2.759.000
- Unipma	4.539.000	7.506.000
- Dinas Pendidikan	576.350	7.848.000
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.057.860	-
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	1.742.000	-
- KPKNL	4.106.500	-
- KPU	133.500	-
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.235.750	-
Jumlah Piutang SPBU I	108.914.244	77.919.688
SPBU II		
- CV Mitra Usaha Sukses Sejahtera	822.800	1.976.800
- PT. Bina San Prima	13.324.563	30.346.990
- PT. Armada Finance	703.730	578.250
- Dinas Perhubungan	36.194.150	2.756.730
- Kantor Kementerian Agama Kota Madiun	1.786.500	217.000
- Dinas Perpustakaan	4.730.000	4.420.000
- Dinas Kesehatan Kota Madiun	-	-
- PT. Singular Point Asia (AICE)	23.409.701	16.712.201
- PMI Kota Madiun	-	-
- UTD PMI Kota Madiun	5.164.000	2.630.000
- Komisi Penanggulangan Aids Daerah Kabupaten Madiun	4.000.000	5.000.000
- PT. Astra Internasional Tbk (Auto 2000)	19.289.750	13.949.250
- Bagian Umum Kota Madiun	3.808.100	10.341.740
- Infokom	-	2.689.700
- BPBD	1.042.280	629.700
- Bappelitbangda	-	1.668.000
- Damri	17.760.911	5.068.890
- Sekretariat DPRD	2.586.210	-
- PT. So Good Food	434.984	-
Jumlah Piutang SPBU II	135.057.679	98.985.251
Percetakan		
- Piutang Usaha	10.560.121	60.452.088
Bengkel		
- Piutang Usaha	3.175.500	1.965.853
Alfamart		
- Piutang Usaha	86.550.625	47.421.173
Piutang Lain-lain		
	-	48.037.750
Jumlah Piutang Usaha	344.258.169	334.781.803

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

5. PERSEDIAAN BARANG

Saldo Persediaan barang terdiri dari :	2023	2022
	Rp	Rp
PERCETAKAN	19.058.500	23.271.000
SPBU I		
- Solar	49.682.010	88.316.760
- Pertamina	81.482.170	178.411.250
- Peralite	79.250.160	50.999.580
- Dexlite	69.193.545	300.828.680
SPBU II		
- Solar	66.651.260	171.869.600
- Pertamina	52.058.770	292.311.685
- Peralite	312.373.600	156.286.540
- Dexlite	77.554.620	264.783.700
- Pertamina Turbo	20.051.525	57.599.375
Bengkel		
- Oli	15.900.813	17.373.366
Cucian	9.570.531	23.357.843
Alfamart		
- Persediaan Toko	255.593.675	295.967.408
Jumlah Persediaan Barang	<u>1.108.421.179</u>	<u>1.921.376.787</u>

Persediaan barang selama kami melakukan pemeriksaan dalam keadaan baik dan tidak ada persediaan yang rusak atau mengalami penurunan nilai.

6. UANG MUKA PEMBELIAN

Saldo uang muka pembelian terdiri dari :	2023	2022
	Rp	Rp
DO belum terkirim SPBU I		
- Solar	52.720.000	52.640.000
- Pertamina	-	-
- Peralite	77.440.000	154.720.000
- Dexlite	-	-
DO belum terkirim SPBU II		
- Solar	158.160.000	-
- Pertamina	-	-
- Peralite	154.880.000	232.080.000
Jumlah Uang Muka Pembelian	<u>443.200.000</u>	<u>439.440.000</u>

7. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

Saldo pajak dibayar dimuka terdiri dari :	2023	2022
	Rp	Rp
- Pajak Dibayar Dimuka PPh 21	-	-
- Pajak Dibayar Dimuka PPh 22	-	-
- Pajak Dibayar Dimuka PPh 23	-	-
- Pajak Dibayar Dimuka PPh 25	-	-
- Pajak Dibayar Dimuka PPN	-	-
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	<u>-</u>	<u>-</u>

Perhitungan Pajak Badan tahun buku 2021 memakai PP No.23 Tahun 2018 yang telah habis masanya ditahun buku 2021 yang dilaporkan ditahun 2022 (Yang bersifat Final dg tarif 0,5%), sedangkan perhitungan pajak badan untuk

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

tahun buku 2023 menggunakan PP. No.7 Tahun 2021. dengan perhitungan sebagai berikut :

	2023	2022
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.515.123.892	2.621.712.518
Koreksi Fiskal I *		
Beban Pakaian Dinas	56.231.000	48.233.750
Beban Representatif	86.301.235	98.030.000
Biaya Penyisihan piutang	-	-
Beban Olah Raga	47.583.396	39.196.104
Beban Kesehatan	-	-
Sumbangan	-	-
Beban Rekreasi	-	-
Beban Pembinaan Karyawan Lainnya	187.305.694	126.382.080
Beban Tamu/Rapat	57.147.500	50.217.100
Beban Hari-hari besar	-	-
Biaya Pajak	434.568.826	362.059.034
Jumlah Koreksi Fiskal Positif	1.949.692.717	2.983.771.552
Laba Setelah Koreksi Fiskal Positif		
Koreksi Fiskal Negatif :		
Beban Penyusutan	38.261.321	27.411.953
Pendapatan Jasa Giro & Bunga Deposito	38.261.321	27.411.953
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif	-	-
Laba Kena Pajak	1.911.431.396	2.956.359.599
Perhitungan PPh Badan Tahun 2022 sebagai berikut :		
- Pendapatan Kotor	3.759.205.263	9.185.679.909
- Laba Kena Pajak	1.911.431.396	2.956.359.599
- Penghasilan Kena Pajak Fasilitas (4,8 M : Pendapatan Kotor) x Laba Kena Pajak	2.440.641.056	1.544.853.099
- Penghasilan Kena Pajak Non Fasilitas (laba Kena Pajak- Penghasilan Kena Pajak Fasilitas)	268.470.516	169.933.841
- Pajak Terutang Fasilitas (50 % x 22 % x PKP Fasilitas)	-	310.531.430
- Pajak Terutang Non Fasilitas (22 % x PKP Non Fasilitas)	268.470.516	480.465.271
Jumlah Pajak Penghasilan Badan		
Kredit Pajak PPh psl 25	416.004	4.343.091
Kredit Pajak 23 ,22	268.054.512	476.122.180
PPh badan Kurang (Lebih) Bayar	-	-
8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA	2023	2022
Saldo biaya dibayar dimuka terdiri dari :	Rp	Rp
- Biaya Dibayar Dimuka	12.045.000	18.375.833
Jumlah Dibayar Dimuka	12.045.000	18.375.833

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

9. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka terdiri dari :

	2023	2022
	Rp	Rp
- Pendapatan diterima dimuka	-	4.545.000
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	-	4.545.000

10. ASET TETAP

Saldo aset tetap terdiri dari :

	2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan / reklasifikasi	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Nilai Perolehan :				
Tanah	194.930.000	-	-	194.930.000
Gedung	5.001.482.377	207.700.000	-	5.209.182.377
Mesin SPBU Basuki Rahmad	1.466.207.052	-	-	1.466.207.052
Mesin SPBU Mayjend Sungkon	2.101.216.751	4.568.000	-	2.105.784.751
Kendaraan	277.259.000	-	-	277.259.000
Mesin Cetak	1.086.196.500	5.300.000	-	1.091.496.500
Peralatan Kantor Cetak	186.289.150	70.088.000	-	256.377.150
Peralatan Kantor SPBU Basuki	122.887.350	2.299.000	-	125.186.350
Peralatan Kantor SPBU Mayjen	100.108.200	4.308.000	-	104.416.200
Peralatan Perbengkelan	180.508.600	-	-	180.508.600
Peralatan Alfamart	204.997.787	1.023.688	-	206.021.475
Jumlah	10.922.082.767	295.286.688	-	11.217.369.455
Akumulasi Penyusutan :				
Gedung	3.704.130.201	129.752.532	-	3.833.882.733
Mesin SPBU Basuki Rahmad	1.231.503.719	38.060.000	-	1.269.563.719
Mesin SPBU Mayjend Sungkon	1.840.972.577	51.702.093	-	1.892.674.670
Kendaraan	122.292.650	42.307.400	-	164.600.050
Mesin Cetak	1.086.196.500	44.167	-	1.086.240.667
Peralatan Kantor Cetak	132.657.243	6.193.900	-	138.851.143
Peralatan Kantor SPBU Basuki	73.402.317	6.837.250	-	80.239.567
Peralatan Kantor SPBU Mayjen	31.241.825	8.524.683	-	39.766.508
Peralatan Perbengkelan	91.344.666	36.101.720	-	127.446.386
Peralatan Alfamart	119.628.055	41.101.926	-	160.729.981
Jumlah	8.433.369.753	360.625.671	-	8.793.995.424
Nilai buku	2.488.713.014			2.423.374.031

2022

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan / reklasifikasi	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
	Nilai Perolehan :			
Tanah	194.930.000	-	-	194.930.000
Gedung	4.829.631.377	257.951.000	86.100.000	5.001.482.377
Mesin SPBU Basuki Rahmad	1.466.207.052	-	-	1.466.207.052
Mesin SPBU Mayjend Sungkon	2.101.216.751	-	-	2.101.216.751
Kendaraan	277.259.000	-	-	277.259.000
Mesin Cetak	1.086.196.500	-	-	1.086.196.500
Peralatan Kantor Cetak	166.554.150	19.735.000	-	186.289.150

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Peralatan Kantor SPBU Basuki	107.137.350	15.750.000	-	122.887.350
Peralatan Kantor SPBU Mayjen	54.380.200	45.728.000	-	100.108.200
Peralatan Perbengkelan	179.332.000	1.176.600	-	180.508.600
Peralatan Alfamart	204.378.905	618.882	-	204.997.787
Jumlah	10.667.223.285	340.959.482	86.100.000	10.922.082.767
Akumulasi Penyusutan :				
Gedung	3.584.402.311	119.727.890	-	3.704.130.201
Mesin SPBU Basuki Rahmad	1.193.443.719	38.060.000	-	1.231.503.719
Mesin SPBU Mayjend Sungkono	1.789.460.817	51.511.760	-	1.840.972.577
Kendaraan	79.985.250	42.307.400	-	122.292.650
Mesin Cetak	1.086.196.500	-	-	1.086.196.500
Peralatan Kantor Cetak	128.607.808	4.049.435	-	132.657.243
Peralatan Kantor SPBU Basuki	67.136.317	6.266.000	-	73.402.317
Peralatan Kantor SPBU Mayjen	25.843.842	5.397.983	-	31.241.825
Peralatan Perbengkelan	55.282.166	36.062.500	-	91.344.666
Peralatan Alfamart	38.458.714	81.169.341	-	119.628.055
Jumlah	8.048.817.444	384.552.309	-	8.433.369.753
Nilai buku	2.618.405.841			2.488.713.014

Seluruh Aset Tetap dan Persediaan barang pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha tidak diansuransikan dari segala risiko kebakaran dan gempa bumi, sehingga tidak ada jaminan ganti rugi bila terjadi musibah.

11. HUTANG USAHA

Saldo hutang usaha terdiri dari :	2023	2022
	Rp	Rp
Pihak Ketiga	228.794.070	312.861.264
Pihak Hubungan Istimewa	-	-
Jumlah	228.794.070	312.861.264
Pihak Ketiga		
PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk	228.794.070	249.506.557
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	60.187.007
Administrasi Pemerintah	-	3.167.700
Jumlah Hutang Usaha	228.794.070	312.861.264

12. HUTANG PAJAK

Saldo hutang pajak terdiri dari :	2023	2022
	Rp	Rp
Hutang PPh Final	-	-
Hutang PPh pasal 29	268.054.512	476.122.180
Hutang PPh pasal 23	9.930.658	9.893.325
Jumlah Hutang Pajak	277.985.170	486.015.505

Perhitungan pajak badan untuk tahun buku 2021 masih memakai PP no 23 Tahun 2018 yang telah habis penggunaannya dan taripnya 0,5%, sedangkan untuk tahun buku 2023 pajak badan memakai UU No 7 Tahun 2021 dengan tarip (50% x 22%).

13. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Saldo pendapatan diterima dimuka terdiri dari :	2023	2022
	Rp	Rp
Bappelitbangda	452.750	-
Dinas Kesehatan Kota Madiun	11.065.700	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.812.184	-

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

PLN	19.282.995	-
Bagian Organisasi	1.710.000	-
Dinas Sosial	450.010	-
Administrasi Pemerintah	2.887.700	-
Pendapatan diterima di muka lainnya	10.225.111	-
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	69.886.450	-

14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Saldo biaya yang masih harus dibayar terdiri dari :

	2023	2022
	Rp	Rp
Biaya Yang Masih Harus Dibayar Alfamart	48.559.427	41.597.957
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	48.559.427	41.597.957

15. HUTANG LAIN LAIN

Saldo hutang lain lain terdiri dari :

	2023	2022
	Rp	Rp
Sosial dan pendidikan	616.107.168	621.107.168
Jasa Produksi	-	2.224.389
Dana Pensiun & Sokongan	827.073.967	827.073.967
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	-	0
Jumlah Hutang lain lain	1.443.181.136	1.450.405.525

Perusahaan telah membentuk cadangan dana pensiun untuk membayar penghargaan berupa pesangon pada saat pensiun. Besarnya jumlah pesangon dihitung berdasarkan Keputusan Direksi. Cadangan tersebut dibentuk dari pembagian laba tahun berjalan sesuai dengan PERDA nomor 10 tahun 2019. Perhitungan penghargaan paska kerja dan kecukupan dana cadangan yang merujuk pada Undang Undang nomor 13 tahun 2003.

Karyawan tetap Perusahaan telah diikutsertakan pada program iuran pasti dengan mengikutsertakan karyawannya dalam program JHT/THT yang diselenggarakan oleh BPJS.

16. EKUITAS

Saldo Ekuitas terdiri dari :

	2023	2022
	Rp	Rp
Modal awal		
Tahap I	100.000.000	100.000.000
Tahap II	571.872.000	571.872.000
Tahap III	1.000.000.000	1.000.000.000
Tahap IV	2.000.000.000	2.000.000.000
Tahap V	413.630.000	413.630.000
Tahap VI	5.989.766.850	5.989.766.850
Rugi Tahun-tahun sebelumnya	(3.385.657.241)	(5.526.904.489)
Laba Rugi Tahun Berjalan	1.246.653.376	2.141.247.247
Jumlah Ekuitas	7.936.264.984	6.689.611.609

17. PENDAPATAN USAHA

Saldo Pendapatan usaha terdiri dari :

	2023	2022
	Rp	Rp
CETAK		
SPBU I	1.759.273.498	1.717.562.242
- Solar	17.860.160.092	12.669.958.945
- Pertamina	5.004.099.132	6.122.593.061

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

- Peralite	30.727.476.882	23.062.699.398
- Dexlite	3.351.027.813	3.002.968.976
Jumlah SPBU I	<u>56.942.763.920</u>	<u>44.858.220.379</u>
SPBU II		
- Solar	26.190.677.637	19.714.873.716
- Pertamina	13.954.822.740	18.457.250.395
- Peralite	68.537.042.640	55.584.443.889
- Dexlite	3.335.274.096	2.882.355.071
- Pertamina Turbo	1.577.998.176	1.442.003.494
Jumlah SPBU II	<u>113.595.815.289</u>	<u>98.080.926.565</u>
BENGGEL & CUCIAN		
- Jasa Service	477.020.300	360.498.860
- Jasa Cucian	638.947.500	410.188.410
Jumlah Bengkel	<u>1.115.967.800</u>	<u>770.687.270</u>
ALFAMART		
- Penjualan bahan dan barang	5.626.180.027	5.214.416.348
Jumlah Alfamart	<u>5.626.180.027</u>	<u>5.214.416.348</u>
Jumlah Pendapatan Usaha	<u><u>179.040.000.534</u></u>	<u><u>150.641.812.804</u></u>

18. BEBAN POKOK USAHA

Saldo beban usaha terdiri dari :

	2023	2022
	Rp	Rp
PERCETAKAN		
- Persediaan awal	23.271.000	69.523.500
- Pembelian		
- BBM Tersedia	23.271.000	69.523.500
- Persediaan akhir	19.058.500	
- Beban Pokok Usaha	<u>4.212.500</u>	<u>69.523.500</u>
SPBU I		
- Persediaan awal BBM	618.556.270	301.436.715
- Pembelian BBM	54.916.370.839	43.417.006.893
- BBM Tersedia	55.534.927.109	43.718.443.608
- Persediaan akhir BBM	279.607.885	618.556.270
- Beban Pokok Usaha SPBU I	<u>55.255.319.224</u>	<u>43.099.887.338</u>
SPBU II		
- Persediaan awal BBM	942.850.900	538.353.635
- Pembelian BBM	109.674.923.741	94.611.125.233
- BBM Tersedia	110.617.774.641	95.149.478.868
- Persediaan akhir BBM	528.689.775	942.850.900
- Beban Pokok Usaha SPBU II	<u>110.089.084.866</u>	<u>94.206.627.968</u>
ALFAMART		
- Persediaan awal Bahan dan Barang	295.967.408	233.311.126
- Pembelian Bahan dan Barang	4.592.868.770	4.325.417.199
- Persediaan barang tersedia	4.888.836.178	4.558.728.325
- Persediaan Akhir	255.593.675	295.967.408
- Beban Pokok Usaha Alfamart	<u>4.633.242.503</u>	<u>4.262.760.917</u>
BENGGEL		
- Persediaan awal Bahan dan Barang	17.373.366	10.730.284
- Pembelian Bahan dan Barang	160.380.747	118.019.404
- Persediaan barang tersedia	177.754.113	128.749.688
- Persediaan Akhir	15.900.813	17.373.366
- Beban Pokok Usaha Bengkel	<u>161.853.300</u>	<u>111.376.322</u>

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

CUCIAN KENDARAAN

	23.357.843	-
- Persediaan awal Bahan dan Barang	175.531.400	-
- Pembelian Bahan dan Barang	198.889.243	-
- Persediaan barang tersedia	9.570.531	-
- Persediaan Akhir	189.318.712	-
Beban Pokok Usaha Bengkel	170.333.031.105	141.750.176.046
Jumlah BeBan Pokok Usaha	170.333.031.105	141.750.176.046

Saldo beban usaha terdiri dari :

	2023	2022
	Rp	Rp
CETAK	1.612.063.294	1.510.481.406
SPBU I		
- Beban Produksi	127.096.670	102.559.873
- Beban Pegawai	386.719.269	301.913.913
- Beban Kantor	45.957.926	43.336.177
- Beban Pemeliharaan	94.086.933	89.271.950
- Beban Pajak	9.964.390	9.949.810
- Beban Penyusutan aset tetap	84.192.557	84.192.557
- Beban penyusutan bahan bakar	282.685.409	156.884.853
Jumlah Beban Operasional SPBU I	1.030.703.153	788.109.134
SPBU II		
- Beban Produksi	252.871.251	220.213.433
- Beban Pegawai	695.898.430	641.044.522
- Beban Kantor	104.874.562	96.111.878
- Beban Pemeliharaan	148.289.088	121.724.250
- Beban Pajak	21.482.815	21.024.875
- Beban Penyusutan aset tetap	135.322.068	125.107.093
- Beban penyusutan bahan bakar	483.067.009	398.632.617
Jumlah Beban Operasional SPBU II	1.841.805.223	1.623.858.668
BENGKEL		
- Alat alat bengkel	87.000	980.000
- Honor Pegawai	149.716.545	112.225.961
- Penyusutan Aset Tetap	36.101.720	36.062.500
- Alat Tulis Kantor & Pemel.	7.165.200	2.047.300
- Lain Lain	594.010	1.237.145
Jumlah Beban Bengkel	193.664.475	152.552.906
CUCIAN		
- Alat Alat Cucian & Atk	53.533.150	49.259.470
- Biaya Pegawai	-	1.990.000
- Honor Pegawai	218.261.000	195.213.000
- Pemeliharaan	7.627.000	22.020.750
- Lain Lain	6.953.400	8.046.000
Jumlah Beban Cucian	286.374.550	276.529.220
ALFAMART		
- Beban pegawai	133.633.519	132.759.203
- Beban Fee	335.469.445	327.509.232
- Beban perjalan dinas	205.000	225.500
- Beban komunikasi	15.054.607	12.204.270
- Beban pertangkapan	39.057.140	31.355.978

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

- Beban asuransi	1.843.921	1.897.087
- Beban perbaikan & pemeliharaan	4.968.655	5.287.938
- Beban Pajak 7 Perijinan	4.739.668	3.492.499
- Beban Renovasi	-	-
- Beban Listrik dan air	84.771.410	81.198.921
- Beban Logistik	303.300	326.400
- Beban Administrasi bank	-	-
- Beban Penyusutan	-	-
- Beban lain lain	41.101.926	61.459.255
Jumlah Beban Alfamart	661.148.591	657.716.283
ADMINISTRASI DAN UMUM		
- Beban Gaji Direktur	123.018.540	111.745.140
- Tunjangan Direktur	23.664.258	22.349.028
- Honor Badan pengawas	49.207.416	44.698.056
- Honor staff sekretariat badan pengawas	250.098.538	212.127.378
- Tunjangan Hari Raya	127.078.312	107.727.998
- Seragam	56.231.000	48.233.750
- Hari hari Besar	57.147.500	50.217.100
- Representatif	86.301.235	98.030.000
- Jasa Audit	38.850.000	37.000.000
- Pendidikan dan pelatihan	112.892.170	97.312.500
- Retribusi	384.000	540.000
- Promosi	29.140.250	18.601.000
- Honor Kegiatan	33.300.000	33.565.800
- Biaya Konsultan	8.800.000	-
- Pesangon Karyawan	96.441.734	43.398.177
- Gaji 13 Karyawan	125.062.080	110.175.976
- Beban Operasional Dirut	13.200.000	13.200.000
- Beban operasional BBM	23.760.000	23.100.000
- Materai	2.200.000	2.200.000
- Beban Rumah Tangga	187.305.694	126.382.080
- Perjalanan Dinas	84.495.940	63.630.037
- Asuransi tenaga kerja	93.772.187	84.680.406
- Asuransi kesehatan	47.583.396	39.196.104
- Kontribusi KPRI	50.494.329	26.625.826
- Penghapusan piutang	-	47.704.891
- Beban Umum Lainnya	57.669.333	53.971.383
- Beban Penyusutan Aset	21.563.300	21.106.900
- Alat Tulis Kantor	-	-
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	1.799.661.213	1.537.519.531
Jumlah Beban Operasional	7.425.420.499	6.546.767.147

19. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

Saldo pendapatan dan beban lain lain terdiri dari :

	2023	2022
	Rp	Rp
Pendapatan Lain-lain :		
- Bunga/Jasa Giro	38.261.321	27.411.953
- Pendapatan sewa	-	-
- Pendapatan lain lain	208.149.632	266.631.198
Jumlah	246.410.953	294.043.151

PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

	2023	2022
	Rp	Rp
Beban Lain-lain :		
- Administrasi bank	2.876.761	2.777.431
- Beban lain lain	9.959.230	14.422.813
Jumlah	12.835.991	17.200.244
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	233.574.962	276.842.907

20. PAJAK PENGHASILAN BADAN

Saldo pajak penghasilan badan dengan perhitungan sebagai berikut :

	2023	2022
	Rp	Rp
Pajak Penghasilan	268.470.516	480.465.271

Perhitungan pajak badan untuk tahun buku 2021 masih memakai PP no 23 Tahun 2018 yang telah habis penggunaannya dan taripnya 0,5%, sedangkan untuk tahun buku 2023 pajak badan memakai UU No 7 Tahun 2021 dengan tarip (50% x 22%).

21. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman ini telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009